

Laporan Tahunan Perusahaan Umum DAMRI

Memacu Kinerja, Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan

*Energize Performance,
Advance Sustainable Growth*



Laporan Tahunan Perum DAMRI 2021

*2021 Annual Report
Perum DAMRI*

SELAMAT DATANG pada *Laporan Tahunan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 2021*. Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Perum DAMRI untuk menyajikan data dan informasi material mengenai kinerja dan tata kelola perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Tema **“Memacu Kinerja, Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan (Energize Performance, Advance Sustainable Growth)”** dipilih berdasarkan analisis dan kajian berdasarkan realitas, fakta, dan perkembangan bisnis Perum DAMRI di sepanjang 2021 serta prospek keberlanjutan bisnisnya.

Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, Laporan Tahunan Perum DAMRI 2021 ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN serta Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik juga menjadi referensi tambahan untuk menjadikan Laporan Tahunan

Welcome to the Annual Report of Public Company (Perum) DAMRI 2021. This report is a form of transparency and accountability of Perum DAMRI to present material data and information regarding performance and corporate governance for stakeholders. The theme *“Energize Performance, Advance Sustainable Growth”* was chosen based on analysis and studies based on the realities, facts, and business developments of Perum DAMRI throughout 2021 as well as prospects for business sustainability.

In order to implement best practices for the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), this 2021 Annual Report of Perum DAMRI is published in accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation GCG Practices in BUMN and Decree of the Secretary of the Minister of BUMN Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN. Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies is also an additional reference to make this Annual Re-

ini memenuhi harapan peningkatan keterbukaan informasi seiring dengan pemenuhan aspek substansi dan komposisi pelaporan.

Laporan Tahunan Perum DAMRI 2021 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia, tempat di mana Perusahaan. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks. Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam kriteria *Annual Report Award (ARA)*.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perum DAMRI, yaitu www.damri.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perum DAMRI, yang digolongkan sebagai pernyataan dalam pelaksanaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang, terkait lingkungan bisnis Perusahaan. Perum DAMRI tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil sesuai harapan. Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan” atau “DAMRI” yang mengacu pada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

port meet the expectations of increasing information disclosure in line with the fulfillment of the substance and composition aspects of reporting.

The Perum DAMRI 2021 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English by using font types and sizes that are easy to read and printed with good quality. The mention of the currency unit “Rupiah” or “Rp” refers to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The tables and graphs in this Annual Report present numerical data with writing standards following Indonesian language rules. Numerical presentation in the text uses standard Indonesian and English language rules according to context.

This Annual Report can be viewed and downloaded on the official website of Perum DAMRI, namely www.damri.co.id.

Disclaimer and Limitation of Liability

This Annual Report contains various statements related to the financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives of Perum DAMRI, which are classified as statements in implementation based on the applicable laws and regulations. These statements have the prospect of risk, as well as uncertainty, to the possibility of discrepancy with actual developments. The various prospective statements in this Annual Report are prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections on future situations, related to the Company’s business environment. Perum DAMRI does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring results as expected. This Annual Report contains the words “Company” or “DAMRI” which refers to the Public Company (Perum) DAMRI.



Daftar Isi

Table of Contents

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM DAMRI 2021 <i>2021 Perum DAMRI Annual Report</i>	ii	LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI REPORT FROM THE BOARD OF SUPERVI- SORY AND THE BOARD OF DIRECTORS	
TEMA LAPORAN TAHUNAN 2021 <i>2021 Annual Report Theme</i>	1		
KESINAMBUNGAN TEMA <i>Continuity of Themes</i>	2	LAPORAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI <i>Report of the Supervisory Board of Public Company (Perum) DAMRI</i>	31
		LAPORAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI <i>Report of the Board of Directors of Public Company (Perum) DAMRI</i>	37
IKHTISAR PENTING IMPORTANT OVERVIEW			
IKHTISAR KEUANGAN <i>Financial Overview</i>	7		
PENINGKATAN JUMLAH PENUMPANG <i>The Increase in numbers of passenger</i>	8		
STATISTICAL FINANSIAL <i>Financial Highlights</i>	10	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	
STATISTIK OPERASIONAL <i>Operational Statistics</i>	14	IDENTITAS PERUSAHAAN <i>Company Identity</i>	47
IKHTISAR SAHAM DAN OBLIGASI <i>Share and Bond Overview</i>	16	INFORMASI UMUM <i>General Information</i>	48
PERISTIWA PENTING 2021 <i>Important Phenomenon 2021</i>	17	LOGO PERUSAHAAN <i>Company Logo</i>	49
KONTRIBUSI TERBAIK KAMI <i>Our Best Contribution</i>	26	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN <i>Brief History Of The Company</i>	50

JEJAK LANGKAH <i>Milestones</i>	52
VISI, MISI, DAN NILAI (BUDAYA) PERUSAHAAN <i>Vision, Mission, and Value (Culture) of The Company</i>	54
KEGIATAN DAN BIDANG USAHA <i>Activities and Fields of Business</i>	56
WILAYAH OPERASI <i>Operating Area</i>	60
STRUKTUR ORGANISASI <i>Organizational Structure</i>	64
INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI <i>Main Shareholders and Control Information</i>	66
PROFIL DEWAN PENGAWAS <i>Supervisory Board Profile</i>	67
PROFIL DIREKSI <i>Board of Directors Profile</i>	73
PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA <i>Human Resources Management</i>	80
PEMEGANG SAHAM UTAMA, ENTITAS ANAK, DAN ENTITAS ASOSIASI <i>Main Shareholders, Subsidiaries, and Associated Entities</i>	86
PRODUK DAN JANGKAUAN PASAR <i>Product and Market Reach</i>	88
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG <i>Institutions and Supporting Professional</i>	89
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI <i>Award and Certification</i>	90
INFORMASI SITUS PERUSAHAAN <i>Company Site Information</i>	92
TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN <i>Transparency of Reports</i>	95

ANALISIS DAN DISKUSI MANAJEMEN ANALYSIS AND MANAGEMENT DISCUSSION

TINJAUAN PEREKONOMIAN <i>Economic Review</i>	99
ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI TRANSPORTASI <i>Analysis on the Economy and Transportation Industry</i>	100
TINJAUAN OPERASIONAL <i>Operational Review</i>	102
STRATEGI PERUSAHAAN <i>Corporate Strategy</i>	103
ASPEK PEMASARAN <i>Marketing Aspect</i>	106
KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA <i>Operation Performance for Each Business Segment</i>	113
PROSPEK USAHA <i>Business Prospect</i>	116
STRATEGI KE DEPAN <i>Strategy for the Future</i>	118
URAIAN ATAS KINERJA PERUSAHAAN <i>Description on Company's Financial Performance</i>	121
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF <i>Comprehensive Profit and Loss Statement</i>	122
LAPORAN POSISI KEUANGAN <i>Statement of Financial Position</i>	123
LAPORAN ARUS KAS <i>Cashflow Statement</i>	131
KEMAMPUAN MEMBAYAR PINJAMAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG <i>The Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility</i>	132

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL <i>Capital Structure and Capital Structure Policy</i>	133	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPEN- TINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI <i>Information on Material Transaction Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties</i>	152
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL <i>Material Bond on Capital Goods Investment</i>	135	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN <i>Changes to the Regulation Impact to the Company</i>	156
TARGET TAHUN 2022 <i>Target for 2022</i>	139	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN <i>Changes to the Regulation Impact to the Company</i>	157
URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERUSAHAAN <i>Description on Company Business Prospect</i>	143	TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN <i>Company's Health Level</i>	160
URAIAN TENTANG ASPEK PEMASARAN <i>Description of Marketing Aspects</i>	149	KELANGSUNGAN USAHA <i>Business Sustainability</i>	161
KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN <i>Policy on Dividend Payment</i>	150	SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN DIREKSI OLEH OTORITAS <i>Administrative Sanction Imposed By Authority to Company, Member of Supervisory Board, and Member of Board of Directors</i>	163
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP) <i>Share Ownership Program By Employees and/or Management Implemented By the Company (ESOP/MSOP)</i>	151		
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM <i>Realization of the Use of Proceeds from Public Offering</i>	151		
DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURASI UTANG/MODAL <i>Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring</i>	151		
INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RE- STRUKTURISASI UTANG/MODAL <i>Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring</i>	152		
		PENGEMBANGAN PERUSAHAAN COMPANY DEVELOPMENT	
		INVESTASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KE DEPAN <i>Investment to Overcome Future Challenges</i>	165
		PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN PERUSAHAAN <i>Company Development Projects</i>	166
		INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN <i>Information Technology Innovation on Services Development</i>	176

BELANJA MODAL <i>Capital Expenditure</i>	178	DIREKSI <i>Board of Directors</i>	207
TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE		RAPAT DEWAN PENGAWAS, RAPAT DIREKSI, DAN RAPAT BERSAMA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI <i>Meetings of Supervisory Board, Meetings of the Board of Directors, and the Joint Meetings of Supervisory Board and Board of Directors</i>	225
PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Achievements In Implementation of Corporate Governance</i>	181	HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI <i>Affiliation Between Member of Supervisory Board, Board of Directors, and Main/Controlling Shareholder</i>	230
SOROTAN AKTIVITAS TATA KELOLA TAHUN 2021 <i>2021 Highlights of Governance Activities</i>	182	REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI <i>Remuneration for Supervisory Board and Board of Directors</i>	232
JEJAK LANGKAH IMPLEMENTASI GCG PERUSAHAAN <i>Steps of Company GCG Implementation</i>	183	ORGAN PENUNJANG DEWAN PENGAWAS <i>Supporting Board of Supporting Organs</i>	234
DASAR PENERAPAN GCG <i>Basic Application of GCG</i>	185	KOMITE AUDIT <i>Audit Committee</i>	237
TUJUAN PENERAPAN GCG <i>Objective of GCG Application</i>	187	KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management Monitoring Committee</i>	242
TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG <i>GCG Implementation Stage</i>	188	KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	247
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Corporate Governance Structure</i>	190	SEKRETARIS PERUSAHAAN <i>Corporate Secretary</i>	251
KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Corporate Governance Policy</i>	192	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>Internal Monitoring System</i>	256
PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERDASARKAN OBJECTIVE RISK AND CON- TROL SERTA PRINSIP-PRINSIP GCG <i>Policy Development Approach Based on Objective Risk and Control and GCG Principles</i>	193	MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management</i>	275
INTERNALISASI GCG <i>GCG Internalization</i>	194	TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI <i>Information And Communication Technology Governance</i>	286
RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA <i>Joint Discussion Meeting</i>	195	PENGADAAN BARANG DAN JASA <i>Procurement Of Goods and Services</i>	295
DEWAN PENGAWAS <i>Supervisory Board</i>	196		

AKUNTAN PUBLIK <i>Public Accountant</i>	302	KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN <i>Commitment To Social Responsibility</i>	326
KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR <i>Policy Concerning Meeting Creditor Rights</i>	303	INFORMASI MENGENAI METODE DAN LINGKUP UJI TUNTAS TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN <i>Information On The Method and Scope Due Diligence On The Impact Of Social, Economic, and Environ- mental Activities of The Company</i>	328
STANDAR ETIKA PERUSAHAAN <i>Business Ethic Standard</i>	305	INFORMASI MENGENAI STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU TERPEN- GARUH OLEH AKTIVITAS PERUSAHAAN <i>Information About Important Stakeholders That Impact or Impact On The Impact of The Company's Activities</i>	329
PENGLOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI <i>Conflict Of Interest Management and Relationship with Related Parties</i>	308	INFORMASI TENTANG ISU-ISU PENTING SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN <i>Information On Important Socio Economic and Environmental Issues Related To The Impact of Company Activities</i>	330
PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM <i>Prevention Of Inside Transactions</i>	309	INFORMASI MENGENAI LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUP PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELE- BIHI KEWAJIBAN <i>Information About The Scope of Corporate Social Responsibility That Is An Obligation or Exceeds An Obligation</i>	331
PENGENDALIAN GRATIFIKASI <i>Gratification Policy</i>	310	INFORMASI MENGENAI STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA STAKEHOLDER ENGAGEMENT DAN MENINGKATKAN VALUE UNTUK STAKEHOLDER DAN SHAREHOLDER <i>Information About The Company's Strategy and Work Program In Handling Social, Economic, and Environmental Issues In Stakeholders Engage- ment and Increasing Value For Stakeholders and Shareholders</i>	333
PENGLOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA <i>Management Of State Administrator's Wealth Report (LHKPN)</i>	314		
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	315		
PERMASALAHAN HUKUM PERUSAHAAN <i>Company Legal Issues</i>	319		
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN <i>Access To Company Information and Data</i>	321		
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Assessment Of Corporate Governance Implementation</i>	322		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY			
TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN <i>Social Responsibility Governance</i>	325		

INFORMASI TENTANG BERBAGAI PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINI- MAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN	334	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	347
<i>Information About Various Programs That Exceed The Minimum Liability of The Company Relevant To The Business You Are Doing</i>		<i>Corporate Social Responsibility on Environment</i>	
INFORMASI TENTANG PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	335	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN K3	348
<i>Information About Financing and Social Responsi- bility Budget</i>		<i>Corporate Social Responsibility on Employment and HSE</i>	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA (HAM)	336	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN	350
<i>Corporate Social Responsibility on Human Rights</i>		<i>Corporate Social Responsibility on Consument</i>	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PRAKTIK OPERASI YANG ADIL	342	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KE- MASYARAKATAN	362
<i>Corporate Social Responsibility on Fair Operations</i>		<i>Corporate Social Responsibility on Community Development</i>	

Tema Laporan Tahunan Perum DAMRI 2021

*2021 Annual Report
Theme*

MEMACU KINERJA, MENJAGA PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

ENERGIZE PERFORMANCE, ADVANCE SUSTAINABLE GROWTH

Dampak wabah virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi global masih terus dirasakan sepanjang tahun 2021, menimbulkan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi perekonomian. Imbasnya terasa signifikan pada berbagai bidang usaha Perusahaan Umum (Perum) DAMRI yang menjalankan usaha transportasi darat. Tantangan berupa pembatasan mobilitas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dengan menggunakan moda transportasi umum telah berimbas pada penurunan jumlah pelanggan yang tentunya berdampak pada penurunan pendapatan dan potensi keuntungan. Tantangan tersebut memacu Perusahaan untuk melakukan berbagai upaya agar bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya, termasuk dalam kerangka turut berperan membangun konektivitas nasional, perekonomian dan sosial masyarakat, serta program pemerataan ekonomi nasional.

Tema Laporan Tahunan 2021, yakni “Memacu Kinerja, Menjaga Pertumbuhan Berkelanjutan” (*Energize Performance, Advance Sustainable Growth*), menjadi cerminan dari upaya Perusahaan dengan dukungan segenap elemennya untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan terus tumbuh memenuhi visinya menjadi perusahaan transportasi darat berkelas dunia. Pilihan tema tersebut juga menggambarkan kesediaan seluruh Insan DAMRI agar Perusahaan tetap bertahan dalam berbagai keadaan, sanggup menghadapi tantangan yang terus-menerus hadir, dan pada akhirnya terus tumbuh secara berkelanjutan memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

The impact of the Corona virus outbreak or Covid-19 as a global pandemic continues to be felt throughout 2021, causing uncertainties in the economic situation. The impact is significantly observed in various business fields, including the Public Company (Perum) DAMRI which operates a land-based transportation business. Challenges in the form of restrictions on mobility as well as a reduced level of travel using public transportation modes have decreased the number of customers, which in turn decrease revenue and potential profit. These challenges stimulate the Company to implement various efforts in order to protect the sustainability of its business, including within the framework of contributing to the development of national connectivity, economy, social community, as well as national economic equity program.

The theme of the 2021 Annual Report, namely “Energize Performance, Advance Sustainable Growth” is a reflection of the Company's efforts with the support of all of its elements to continuously make improvements as well as to carry on growing to fulfill its vision of becoming a world-class land transportation company. The choice of theme also illustrates the eagerness of all DAMRI personnel for the Company to survive in various circumstances, being able to face challenges that are constantly present, and ultimately continuing to grow in a sustainable manner providing the best benefits for all stakeholders.

Kesinambungan Tema

Continuity of Themes



2020

BERTAHAN MENGHADAPI TANTANGAN, BERSIAP UNTUK KEBANGKITAN

DAMRI menghadapi tantangan besar dari pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia sejak awal tahun 2020 yang memengaruhi kehidupan global, menyebabkan perlambatan di berbagai sektor usaha, termasuk industri transportasi darat yang dijalankan oleh Perusahaan. Di tengah hantaman pandemi, Perusahaan masih bisa terus menjalankan aktivitas operasional, termasuk memenuhi tugas untuk turut berperan dalam membangun konektivitas nasional, perekonomian dan sosial masyarakat, serta program pemerataan ekonomi nasional. Lebih dari sekadar bertahan, ujian tersebut disikapi oleh Perusahaan sebagai kawah penyiapan diri untuk berubah; terus tumbuh dan berkembang lebih baik di masa depan.

2020

RESILIENT AGAINST CHALLENGES, STRIVING TOWARDS RECOVERY

DAMRI faced huge challenges from the impact of the Covid-19 pandemic that has spread to all corners of the world since the beginning of 2020 has affected global life, causing a slowdown in various business sectors, including the transportation industry where the Company operates in. Inevitably, the pandemic, which cannot be predicted when it will end, has presented challenges and has become a test of resilience for all elements within the Company.



2019

PENINGKATAN STRATEGI UNTUK MEMPERKUAT KEHADIRAN KAMI DI SELURUH NUSANTARA

DAMRI berkomitmen untuk terus mewujudkan layanan prima bagi pelanggan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan strategi Perusahaan dan transformasi bisnis di tahun 2019 merupakan wujud keseriusan DAMRI agar setiap kantor cabang dapat memberikan layanan prima bagi pelanggan sehingga semakin memperkuat keberadaan DAMRI di pelosok Nusantara. Penguatan strategi Perusahaan dan rencana kerja yang dipersiapkan, diarahkan untuk memaksimalkan potensi organisasi dan kekuatan lokal di masing-masing daerah yang menyentuh semua aspek layanan, mulai dari kesiapan operasional, ketersediaan armada yang andal dan nyaman, sampai dengan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan DAMRI, yang didukung TI untuk kemudahan pengendalian dan untuk mengakomodasi kemajuan masyarakat dalam memanfaatkan TI.

2019

IMPROVED STRATEGY TO REINFORCE OUR PRESENCE ACROSS ARCHIPELAGO

DAMRI is committed to continuing to provide excellent service for customers spread across all provinces in Indonesia. The improvement of the Company's strategy and business transformation in 2019 is a manifestation of DAMRI's seriousness so that every branch of office can provide excellent service to customers, thereby further strengthening DAMRI's presence in remote areas of the archipelago. Strengthening the Company's strategy and work plans that are prepared, directed at maximizing the potential of the organization and local strengths in each region that touch all aspects of service, ranging from operational readiness, availability of a reliable and comfortable fleet, to easy access to DAMRI information and services, supported by IT for ease of control and to accommodate the progress of society in utilizing IT.



2018 MENUJU ERA BARU

Dengan lebih dari 55 tahun pengalaman dalam sektor transportasi nasional, DAMRI melakukan berbagai inovasi seiring dengan momentum transformasi menuju era yang serba cepat. Transformasi yang dilaksanakan selama tahun 2018 merupakan langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan modernisasi dan digitalisasi di seluruh lini usaha dan operasional DAMRI. Dengan identitas perusahaan dan pengembangan unit usaha, DAMRI siap mengoptimalkan setiap peluang menuju pertumbuhan yang lebih tinggi di masa depan.

2018 MOVING FORWARD THE NEW ERA

With more than 55 years of experience in the national transportation sector, DAMRI has made various innovations along with the momentum of transformation into a fast-paced era. The transformation carried out during 2018 was a step to adapt to the development of modernization and digitalization in all business lines and operations of DAMRI. With a corporate identity and business unit development, DAMRI is ready to optimize every opportunity for higher growth in the future.

2017 KEBERLANJUTAN TRANSPORTASI UNTUK INDONESIA

Komitmen Perusahaan untuk menyediakan jasa layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, serta efisiensi dalam menjangkaunya yang ramah terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Seiring dalam perkembangan dan perbaikan infrastruktur di Indonesia Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis dengan mengedepankan aspek-aspek tata kelola yang baik, tentu juga keamanan dalam transportasi. DAMRI juga selalu membangun konsistensi dalam hal kualitas,

2017 TRANSPORTATION SUSTAINABILITY FOR INDONESIA

The Company's commitment to provide good transportation services for the community, as well as efficiency in reaching them that is friendly to the environment and the safety of the Indonesian people. Along with the development and improvement of infrastructure in Indonesia, the Company continues to run its business by prioritizing aspects of good governance, of course also security in transportation. DAMRI also always builds consistency in terms of quality, good resources,



sumber daya yang baik, tentu yang dapat bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, dan menjadi harapan masyarakat Indonesia menjadi satu transportasi untuk semua pihak.

of course those who can be responsible for serving the community, and become the hope of the Indonesian people to become one



2016 BERUBAH DENGAN KUALITAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan sebagai wujud terima kasih Perusahaan kepada pelanggan, Perum DAMRI melakukan perombakan pelayanan dan kualitas bus agar pelanggan semakin nyaman. Dengan perubahan ini diharapkan nantinya DAMRI tidak akan kehilangan pelanggan dan akhirnya mati, baik oleh pesaing yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Oleh karenanya, seluruh Insan DAMRI diharapkan membuat perubahan, utamanya dalam menyediakan armada, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan pelayanan kepada pelanggan.

2016 CHANGE WITH QUALITY

In order to improve the quality of service and as a form of the Company's gratitude to customers, Perum DAMRI has remodeled the service and quality of buses so that customers are more comfortable. With this change, it is hoped that later DAMRI will not lose customers and eventually die, both by visible and invisible competitors. Therefore, all DAMRI personnel are expected to make changes, especially in providing fleets, human resource competencies (HR), and services to customers.

Ikhtisar Penting

Overview Highlight



IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

TOTAL ASET TOTAL ASSET

11,28%

Total Aset Perusahaan mengalami penurunan 11,28% (Rp 956.998.436.628).

The Company's Total Assets decreased by 11.28% (Rp 956,998,436,628).

TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY

28,32%

Total Ekuitas Perusahaan mengalami penurunan 28,32% (Rp 354.400.871.253).

The Company's Total Equity decreased by 28.32% (Rp 354,400,871,253).

RUGI TAHUN BERJALAN CURRENT LOSS

30,52%

Total Rugi Tahun Berjalan Perusahaan mengalami penurunan 30,52% (Rp 152.902.380.435).

The Company's Total Loss for the Year decreased by 30.52% (Rp 220,077,411,000).

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN

CUSTOMER SATISFACTION

92%

Tingkat kepuasan pelanggan seluruh segmen mengalami peningkatan 92% (7,11).

Customer satisfaction for all segments increased by 92% (&.11).





PENINGKATAN JUMLAH PENUMPANG

THE INCREASE IN NUMBERS OF PASSENGER

ANGKUTAN PEMADU MODA *INTEGRATED MODE OF TRANSPORTATION*

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:



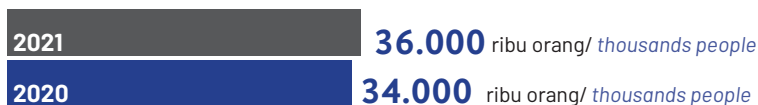
TRANSPORTASI URBAN *URBAN TRANSPORTATION*

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:



ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA *CROSS-BORDER TRANSPORTATION*

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:



ANGKUTAN TRAVEL/PARIWISATA *TRAVEL/TOURISM TRANSPORTATION*

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:





ANGKUTAN ANTAR-KOTA
INTER-CITY TRANSPORTATION

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:



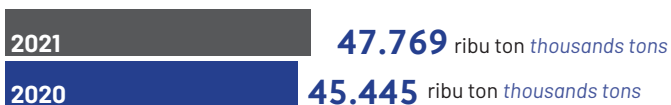
ANGKUTAN PERINTIS
PIONEER TRANSPORTATION

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:



ANGKUTAN BARANG
CARGO TRANSPORTATION

Besaran deviasi untuk penyerapan total anggaran:
The deviation for the total absorption of customers:





STATISTIK FINANSIAL

FINANCIAL STATISTICS

TABEL IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO
KEUANGAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF FINANCIAL SUMMARY AND FINAN-
CIAL RATIOS (IN MILLIONS OF IDR)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	Description
Laporan Posisi Keuangan ///// Statement of Financial Position						
ASET LANCAR						
CURRENT ASSETS						
Kas dan Setara Kas.	53.642	73.868	146.092	146.071	97.404	Cash and cash equivalents.
Putang Usaha - Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.219.983.571 pada 2021 dan Rp 2.631.601.049 pada 2020	16.727	24.301	35.108	14.783	23.400	Accounts Receivable After deducting allowance for impairment losses of IDR3.219.983.571,404 in 2021 and IDR2.631.601.049 in 2020.
Persediaan.	4.780	8.750	13.120	13.436	15.252	Supply.
Biaya Dibayar diMuka.	642	801	3.590	4.242	4.692	Prepaid Expenses.
Uang Muka Pembelian.	3.228	12.095	9.339	1.251	556	Down Payment.
Uang Muka Pajak.	-	-	-	-	524	Tax Advance.
Jumlah Aset Lancar.	85.771	125.248	217.020	187.492	145.763	Total Current Assets.
ASET TIDAK LANCAR						
NON-CURRENT ASSETS						
Aset Program.	1.475	1.007	1.974	2.657	-	Program Assets.
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penurunan sebesar Rp 1.528.994.929.620 pada 2021 dan Rp 1.433.773.276.359 pada 2020	864.453	945.986	1.048.408	966.541	1.061.650	Fixed Assets - After deducting accumulated decreases of IDR1.528.994.929.620 in 2021 and IDR1.433.773.276.359 in 2020.
Investasi Pada Entitas Asosiasi.	319	319	319	319	319	Investment in Associates
Aset dalam Proses	525	4.171	6.739	5.373	2.900	Assets In Process
Aset Lain-lain	4.457	1.918	2.440	2.062	2.758	Miscellaneous Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar.	871.228	953.401	1.059.880	976.953	1.067.628	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET.	956.998	1.078.650	1.276.900	1.164.445	1.213.391	TOTAL ASSETS

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	Description
LIABILITAS JANGKA PENDEK						SHORT-TERM LIABILITIES
Utang Usaha	35.612	41.479	22.176	26.953	16.111	Accounts Payable
Pendapatan Diterima di Muka	4.864	3.377	4.592	3.358	531	Prepaid Income
Beban Akrua	724	1.253	1.383	2.901	6.866	Accrued Expense
Utang Pajak	935	1.806	13.609	24.828	3.571	Tax Debt
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	17.542	23.738	56.049	59.657	106.156	Long-term Bank Loans Maturity in a Year
Liabilitas Surat Berharga Jangka Menengah yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu 1 Tahun	-	-	-	-	-	Medium-term Securities Liabilities that Will Maturity Within a Year
Utang Lain-Lain	83.355	51.349	10.689	6.058	4.952	Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	143.134	123.002	108.397	6.058	4.592	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						CURRENT ASSETS
Liabilitas Sewa Pembiayaan	-	102	102	102	102	Lease Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	38.805	55.247	63.380	72.639	66.401	Deferred Tax Liabilities
Utang Bank Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam 1 Tahun	161.812	167.104	113.617	25.161	82.054	Non Current Maturities of Long Term Bank Loans
Utang Investasi	33.876	2.014	12.012	-	-	Investment Loans
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	223.780	236.857	186.483	201.739	185.148	Post Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	459.463	461.222	375.594	299.641	333.705	Total Non-Current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	602.598	584.224	483.992	423.396	471.533	TOTAL LIABILITY
EKUITAS						CURRENT ASSETS
Modal Disetor	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	Paid up Capital
Penyertaan Modal Negara (PMN)	627.721	627.721	627.721	627.721	316.926	State Equity Participation
Bantuan Pemerintah Lainnya yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS)	-	-	-	-	310.795	Undefined Status Government Assistance
Modal Sumbangan	15.207	4.266	4.266	4.266	639	Donated Capital
Cadangan Modal	(51.965)	194.252	150.990	129.427	122.756	Capital Reserves
Penghasilan Komprehensif Lain	(103.359)	(131.437)	(53.031)	(61.627)	(36.101)	Other Comprehensive Income
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(152.902)	(220.077)	43.262	21.562	7.144	Profit (Loss) for the Year
TOTAL LIABILITAS	354.401	494.425	792.908	741.050	741.859	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	956.998	1.078.649	1.276.900	1.164.445	1.213.391	TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	Description
Laporan Laba Rugi Komprehensif ///// Comprehensive Income Statement						
PENDAPATAN USAHA						
Pendapatan Angkutan	610.940	725.340	1.229.479	1.237.678	1.155.152	Transportation Revenue
Pendapatan Bukan Angkutan	25.566	10.740	7.300	10.963	9.278	Non-Transportation Revenue
Lainnya	2.076	2.256	5.172	2.850	3.421	Others
Jumlah Pendapatan Usaha	638.583	738.336	1.241.951	1.251.491	1.167.852	Total Net Sales
BEBAN USAHA						
Operasional	521.751	643.460	876.675	846.288	834.844	Operational
Pemasaran	18.854	27.188	57.580	62.044	57.624	Marketing
Administrasi dan Umum	242.883	279.599	277.263	269.831	228.816	Administration and General
Jumlah Beban Usaha	783.488	950.247	1.211.518	1.178.163	1.121.284	Total Operating Expenses
LABA RUGI USAHA	(144.905)	(211.911)	30.433	73.328	27.570	PROFIT AND LOSS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Pendapatan Lain-Lain	2.446	658	43.385	4.035	4.045	Other Income
Beban Lain-Lain	(12.348)	(15.205)	(11.105)	(6.705)	(5.115)	Other Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(9.902)	(14.547)	32.280	(2.670)	(1.070)	Total Other Income (Expenses)
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN						
Pendapatan Keuangan	446	2.974	4.708	1.586	1.347	Financial Income
Beban Keuangan	(14.349)	(18.736)	(19.495)	(21.450)	(30.919)	Financial Expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan	(13.903)	(15.762)	32.280	(2.670)	(1.070)	Total Financial Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK	(168.710)	(242.220)	47.927	50.794	15.927	PROFIT BEFORE TAX
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK						
Pajak Kini	-	-	(13.923)	(22.994)	(7.299)	Current Tax
Pajak Tangguhan	15.808	22.143	9.259	(6.237)	(1.484)	Deferred Tax
Jumlah Pendapatan (Beban) Pajak	15.808	22.143	(4.664)	(29.231)	(8.783)	Total Tax Income (Expenses)
LABA TAHUN BERJALAN	(152.902)	(220.077)	43.262	21.562	7.143	CURRENT YEAR PROFIT
PENGHASILAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN						
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	1.706	(77.687)	8.596	(25.527)	(28.684)	Actuarial Gain (Loss)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(151.196)	(304.416)	51.859	(3.964)	(21.540)	Total Other Comprehensive Income (Loss)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	Description
LAPORAN ARUS KAS						CASH FLOW STATEMENT
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	11.737	(61.603)	87.670	99.624	191.710	Cash Flow Obtained from (Used for) Operating Activities
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(30.598)	(34.808)	(172.608)	(18.621)	(79.883)	Cash Flow Obtained from (Used for) Investment Activities
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.370)	-	84.959	(32.337)	(104.781)	Cash Flow Obtained from (Used for) Funding Activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(20.232)	(72.224)	21	48.667	7.047	Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	73.875	146.092	146.071	97.404	90.357	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year Balance
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53.643	73.868	146.092	146.071	97.404	CASH AND YEAR-END CASH EQUIVALENTS BALANCE
KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG						ABILITY TO PAY DEBTS AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY
Rasio Cepat (%)	58%	60%	45%	44%	31%	Quick Ratio (%)
Rasio Lancar (%)	60%	101%	200%	152%	106%	Current Ratio (%)
Rasio Utang Terhadap Modal (%)	70%	54%	38%	36%	38%	Debt to Capital Ratio (%)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	170%	118%	61%	57%	63%	Debt to Equity Ratio (%)
Perputaran Putang (Kali)	xx	20	38	35	49	Account Receivable Turn-over (Times)
Rata-rata Umur Piutang (Hari)	xx	15	13	4	7	Average Age of Receivables (Days)
Imbal Terhadap Aset	xx	-20,40%	3,39%	1,04%	1,26%	Return on Asset
Imbal Terhadap Ekuitas	xx	-44,51%	5,46%	1,69%	0,92%	Return on Equity



OPERATIONAL STATISTICS STATISTIK OPERASIONAL

TABEL IKHTISAR OPERASIONAL TABLE OF OPERATIONAL OVERVIEW

TINJAUAN PRODUKSI PER SEGMENT USAHA <i>Production Overview per Business Segment</i>			REALISASI <i>Realization</i>				
No.	Segmen <i>Segment</i>	Uraian <i>Description</i>	2021	2020	2019	2018	2017
1	Angkutan Bandara <i>Airports Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	69.772	78.044	162.156	157.525	147.644
		Trip <i>Trip</i>	276.424	388.919	954.926	959.882	794.678
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	21.205	23.768	53.391	52.482	47.286
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	2.087	3.216	9.451	11.529	11.881
2	Angkutan Antarkota <i>Intercity Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	66.539	47.118	124.034	116.497	123.178
		Trip <i>Trip</i>	98.687	106.571	165.199	170.082	176.127
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	25.076	16.225	40.184	37.563	39.796
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	1.833	1.408	3.455	3.359	3.494
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	496.087	258.269	875.087	786.162	817.955
3	Angkutan Perkotaan <i>Urban Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	59.532	72.047	143.282	155.833	49.011
		Trip <i>Trip</i>	401.822	529.675	953.086	1.065.443	412.139
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	11.391	13.085	28.512	30.695	15.390
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	5.694	6.233	30.129	18.409	78.198

No.	Segmen Segment	Uraian Description	2021	2020	2019	2018	2017
4	Angkutan Lintas-Batas Transboundary Transportation	Hari Jalan Road Days	1.751	1.787	3.668	2.409	2.747
		Trip Trip	1.646	1.568	3.648	2.263	2.402
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	784	788	1.886	1.512	1.672
		Total Pelanggan (ribu penumpang) Total customers (thousand pax)	37	34	73	35	40
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	17.271	16.165	37.636	23.453	26.387
5	Angkutan Perintis Pioneer Transportation	Hari Jalan Road Days	137.686	134.979	144.794	149.707	134.969
		Trip Trip	308.100	318.505	331.965	331.821	273.352
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	25.499	23.978	26.204	27.578	24.930
		Total Pelanggan (ribu penumpang) Total customers (thousand pax)	1.370	1.357	2.188	6.615	5.676
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	133.691	103.107	172.706	176.965	151.863
6	Angkutan Barang Cargo Transportation	Hari Jalan Road Days	13.709	18.350	17.126	20.705	18.548
		Trip Trip	10.867	13.205	12.877	11.589	11.111
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	4.584	4.524	4.622	5.157	4.312
		Total Tonase (ribu ton) Total tonnage (thousand ton)	47,6	45	172	273	122
		Total Tonase (ribu ton km) Total tonnage (thousand ton km)	38.517,9	15.478	33.250	52.732	23.521
7	Angkutan Travel/Pariwisata Travel/Tourism Transportation	Hari Jalan Road Days	22.055	18.350	17.126	20.705	18.548
		Trip Trip	62.255	13.205	12.877	11.589	11.111
		Total Perjalanan (ribu km) Total trip (thousand km)	4.622	4.524	4.622	5.157	4.312
		Total Tonase (ribu ton) Total tonnage (thousand ton)	185.2	45	172	273	122
		Total Tonase (ribu ton km) Total tonnage (thousand ton km)	24.673	15.478	33.250	52.732	23.521



IKHTISAR SAHAM DAN OBLIGASI

SHARE AND BOND OVERVIEW



INFORMASI SAHAM (EKUITAS)

STOCK INFORMATION (EQUITY)

Sampai dengan 31 Desember 2021 DAMRI bukan merupakan perusahaan publik dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa mana pun sehingga tidak terdapat informasi terkait harga tertinggi, terendah, harga penutupan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar.

As of 31 December 2021, DAMRI is not a public company and its shares are not traded on any exchange, hence there is no information regarding the highest price, lowest, closing price, trading volume, and market capitalization.

INFORMASI OBLIGASI DAN/ ATAU PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ON BONDS
AND/OR OTHER FUNDING

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 DAMRI belum menerbitkan obligasi dan/atau pendanaan lainnya, sehingga tidak memiliki informasi obligasi dan/atau pendanaan lainnya.

As of 31 December 2021, DAMRI has not issued bonds and/or other funding, so it does not have information on bonds and/or other funding.



PERISTIWA PENTING 2021

IMPORTANT EVENTS IN 2021

JANUARI
JANUARY

24

Peresmian Angkutan Perintis di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, melayani rute Masamba-Rongkong.

The inauguration of Pioneer Transportation in North Luwu Regency, South Sulawesi, serving the Masamba-Rongkong route.



FEBRUARI
FEBRUARY

1

Serah-terima 20 unit single bus DAMRI kepada PT Bianglala Metropolitan.

Handover of 20 single bus units by DAMRI to PT Bianglala Metropolitan.



MARET
MARCH

2

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia.

The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between DAMRI and the Deputy Attorney General for Civil and State Administrative Affairs (Jamdatun) of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.



10

Peluncuran trayek Jakarta-Malang, berlokasi di DAMRI Cabang Kemayoran, Jakarta.

The launch of the Jakarta-Malang route at DAMRI Kemayoran Branch, Jakarta.



APRIL
APRIL

20

DAMRI sediakan *shuttle bus* gratis selama pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Bersama BUMN di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.

DAMRI provided free shuttle bus during the SOE Joint Vaccination activity at the Gelora Bung Karno Stadium, Senayan.



22

DAMRI Cabang Mataram meresmikan peluncuran Bus Disabilitas di Sumbawa, NTB.

DAMRI Mataram Branch inaugurated the launch of the Disability Bus in Sumbawa, NTB.



MEI
MAY

24

Jajaran Manajemen DAMRI menandatangani Komitmen Terimplementasinya DAMRI Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Ketepatan, dan Kenyamanan (D5K).

DAMRI Management Board signed the DAMRI Implementation Commitment to Safety, Health, Security, Accuracy, and Comfort (D5K).



JULI
JULY

23

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and PT Food Station Tjipinang Jaya.



AGUSTUS
AUGUST

1

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan KAI Logistik (Kalog).

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and KAI Logistik (Kalog)



12

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan KAI Logistik (Kalog).

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and KAI Logistik (Kalog).



OKTOBER
OCTOBER

4

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI Cabang Batam dan Bank Mandiri Cabang Batam.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI Batam Branch and Mandiri Bank Batam Branch



7

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI Cabang Batam dan Bank BJB Cabang Batam.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI Batam Branch and BJB Bank Batam Branch.



8

Penyerahan Sertifikat Hibah Tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada DAMRI.

Handing over Land Grant Certificate Belonging to the Government of West Sulawesi Province to DAMRI.



NOVEMBER
NOVEMBER

5

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan Kimia Farma TD.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and Kimia Farma TD.



5

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan Jungle Land, Sentul, Kabupaten Bogor.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and Jungle Land, Sentul, Bogor Regency.



11

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Signing of a Memorandum of Agreement (MoU) between DAMRI and the Government of West Kalimantan Province.



11

Peluncuran Angkutan Pariwisata Lombok City Tour oleh DAMRI Cabang Mataram.

Launching of Lombok City Tour Tourism Transportation by DAMRI Mataram Branch.



25

Perayaan HUT ke-75 DAMRI, disemarakkan dengan peluncuran bus listrik di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, peluncuran DAMRI Clean Bus, dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DAMRI dan PT Jababeka.

DAMRI's 75th Anniversary celebration was enlivened by the launch of the electric bus at Terminal 5 Soekarno Hatta Airport, launch of DAMRI Clean Bus, and the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between DAMRI and PT Jababeka.





KONTRIBUSI TERBAIK

OUR BEST CONTRIBUTIONS

MENGHUBUNGKAN NEGERI

Menghubungkan Negeri adalah menjadikan angkutan perintis dan tol laut sebagai sarana pemersatu Nusantara sampai ke daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta perbatasan (3TP) dan transportasi hasil bumi dengan menggunakan layanan DAMRI. Melalui Angkutan Perintis, DAMRI terus berupaya meningkatkan konektivitas hingga ke daerah 3TP yang belum memiliki sarana angkutan memadai dengan tarif terjangkau. DAMRI turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui perusahaan jasa angkutan darat. Angkutan Keperintisan DAMRI merupakan salah satu dukungan nyata DAMRI dalam melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat di 47 kabupaten/kota terpencil di seluruh Indonesia.

BERPERAN DALAM LAYANAN TRANSPORTASI TERPADU DARI BANDARA, PELABUHAN, STASIUN SAMPAI KE TUJUAN

Pelayanan angkutan bandara meliputi jaringan pelayanan 26 bandara di 24 kota di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Cabang yang melayani angkutan bandara adalah Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta Soekarno-Hatta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, Mataram, Ende, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Gorontalo, Kendari, Ambon, dan Jayapura. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus memberikan pelayanan terbaiknya dengan tarif relatif murah, aman, dan nyaman. Okupansi dan peminat trayek yang tinggi dan menjadi sumber pendapatan potensial bagi Perusahaan.

CONNECT THE COUNTRY

Connect The Country is to make pioneer transportation and sea tolls as means for unifying the archipelago all the way to the frontier, outermost, underdeveloped, and border areas (3TP) as well as the transportation of agricultural products using DAMRI services. Through Pioneer Transportation, DAMRI continues to improve connectivity to 3TP areas that do not yet have adequate transportation facilities at affordable fares. DAMRI participates in implementing and supporting the policies and programs of the central and local governments in the field of economy and national development through the operation of land transportation services. DAMRI's Pioneer Transportation is one of DAMRI's concrete support towards improving community welfare in 47 remote regencies/cities throughout Indonesia.

CONTRIBUTES TO THE INTEGRATION OF TRANSPORTATION SERVICES FROM AIRPORTS, PORTS, STATIONS TO DESTINATIONS

Airport transportation services include a service network of 26 airports in 24 cities in Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan and Papua. Branches that serve airport transportation are Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta Soekarno-Hatta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, Mataram, Ende, Pontianak, Samarinda, Manado, Makassar, Gorontalo, Kendari, Ambon, and Jayapura. This customer satisfaction-oriented services will continue to provide the best services at relatively cheap fares, which are safe and comfortable. High occupancy and immense interest in the routes are potential sources of income for the Com-



DAMRI melakukan pengembangan strategi dalam mencapai target seperti bundling ticket dengan maskapai pesawat terbang, kapal laut, dan kereta api serta peningkatan kerjasama Public Service Obligation (PSO) dan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan BUMN (melalui kerjasama Angkutan BRT (Bus Rapid Transit), Angkutan Sekolah/Pelajar, Angkutan Disabilitas, Angkutan Karyawan, Angkutan Apron, dan Angkutan Shuttle).

BERPARTISIPASI AKTIF MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI ANGKUTAN YANG TERJANGKAU DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mendukung pengembangan sektor pariwisata potensial di Indonesia dengan penyediaan layanan transportasi darat. Pada tahun 2021 DAMRI melayani perjalanan wisata di 13 (tiga belas) jaringan trayek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan pelayanan ini, DAMRI dapat menunjang kebutuhan masyarakat untuk bermobilitas ke daerah wisata dengan aman dan nyaman dengan harga terjangkau.

DAMRI developed strategies to achieve targets by bundling ticket fares with airlines, ships, trains, as well as increasing Public Service Obligation (PSO) and Operational Cooperation (KSO) collaborations with the central government, regional governments, and state-owned companies (through Bus Rapid Transit Transportation Cooperation), School/Student Transportation, Disability Transportation, Employee Transportation, Apron Transportation, and Shuttle Transportation.

ACTIVELY PARTICIPATE IN DEVELOPING THE TOURISM SECTOR THROUGH AFFORDABLE TRANSPORTATION IN NATIONAL TOURISM STRATEGIC AREAS

The government through the Ministry of Transport supports the development of the potential tourism sectors in Indonesia by providing land transportation services. In 2021 DAMRI served tourism journeys in 13 (thirteen) National Tourism Strategic Areas (KSPN) route networks. With this service, DAMRI support the needs of the communities to travel safely and comfortably to tourist areas at affordable fares. DAMRI's concrete support towards improving community welfare in 47 remote regencies/cities throughout Indonesia.

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi

*The Reports of the Supervisory
Board and the Board of Directors*

LAPORAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAMRI

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD OF PUBLIC COMPANY DAMRI

Pemilik Modal, Direksi, dan para pemangku
kepentingan yang terhormat,

*Dear Shareholders, Members of the Board of Directors,
and stakeholders,*

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa dalam kondisi penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, Perum DAMRI bisa menjalankan kegiatan operasional Perusahaan sepanjang tahun. Bersama ini kami sampaikan Laporan Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi Perusahaan sepanjang tahun. Dewan Pengawas senantiasa mengedepankan integritas dan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Praise be to God Almighty that in these challenging times due to the Covid-19 pandemic, Perum DAMRI was able to carry out the Company's operational activities throughout 2021. We hereby submit the Report of the Supervisory Board in carrying out its supervisory function and providing advice to the Company's Board of Directors throughout 2021. The Supervisory Board always prioritizes integrity and independence in carrying out its duties and responsibilities, as mandated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.



Sam Budigusdian

Ketua Dewan Pengawas

*Chairman of
the Supervisory Board*

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Secara umum, strategi Perusahaan telah disusun dengan baik oleh Direksi, sekalipun kemudian pandemi Covid-19 yang masih berlanjut menjadikan pencapaian Perusahaan belum seperti yang diharapkan. Secara umum, kinerja Perusahaan sepanjang memang belum pulih dari dampak pandemi, tetapi sudah lebih baik ketimbang capaian tahun buku 2020. Merujuk pada Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2021; realisasi aset, kewajiban, dan ekuitas menjadi sebesar Rp 857 miliar atau menurun 21% dari realisasi periode tahun 2020 sebesar Rp 1,079 triliun. Meski demikian, perbaikan terjadi pada tingkat profitabilitas dengan realisasi hasil usaha (laba/rugi) Perusahaan, yaitu realisasi rugi bersih setelah pajak tahun 2021 sebesar rugi Rp 152,9 miliar, dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu rugi bersih sebesar Rp 220,1 miliar. Realisasi alat produksi, yakni siap guna (SG) pada tahun 2021 sebanyak 2.376 unit atau 99,96% dari anggaran sebanyak 2.726 unit. Sementara alat produksi siap guna operasi (SGO) pada tahun 2021 sebanyak 1.730 unit atau 108,13% dari anggaran sebanyak 1.600 unit. Sementara, unit kendaraan siap operasi (SO) tahun 2021 sebanyak 1.017 unit atau 94,52% dari anggaran sebanyak 1.076 unit.

Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2021 pada kategori “Sehat” dengan penggolongan “A” dengan skor sebesar 65,00. Tingkat Kesehatan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 66,5, atau kriteria “Sehat” dengan penggolongan “A”.

Realisasi target-target Key Performance Indicator (KPI) tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar 90,4%, dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 79,00.

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas telah memberikan saran/evaluasi

ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

In general, the Company's strategy has been well prepared by the Board of Directors, although the ongoing Covid-19 pandemic has made the Company's achievement falling short of expectation. Although the Company's performance has not recovered from the impact of the pandemic, it is nevertheless in a better position compared to the performance in the 2020 financial year. Referring to the Company Financial Statement per 31 December 2021; asset, liabilities, and equity realization is Rp 857 billion, or a decrease of 21% from the realization of the 2020 period which amounts to Rp 1,079 trillion. Nonetheless, improvement occurred at the level of profitability with the realization of the Company's operating results (profit/loss), namely the realization of net loss after tax in 2021 amounting to a loss of Rp. 152.9 billion, compared to the realization in 2020, which was a net loss of Rp. 220.1 billion. Realization of production equipment, namely ready-to-use (SG) in 2021 as many as 2,376 units or 99.96% of the budget of 2,726 units. Meanwhile, production equipment ready for operation (SGO) in 2021 is 1,730 units or 108.13% of the budget for 1,600 units. Meanwhile, vehicles ready for operation (SO) in 2021 are 1,017 units or 94.52% of the budget for 1,076 units.

The Company's Health Level in 2021 is in the “Healthy” category with a classification of “A” and scoring 65.00. This Health Level has decreased compared to 2020 of 66.5, or the “Healthy” criteria with a classification of “A”.

The realization of the Key Performance Indicator (KPI) targets in 2021 was realized to 90.4%, which is a increased compared to 2020 which amounts to 79.00.

One of the duties and responsibilities of the Supervisory Board is to supervise the implementation of the Company's strategy. Throughout 2021, the Supervisory Board has provided advice/evaluation on the effective-

atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi, memberikan saran/nasihat berdasarkan rekomendasi dan/atau hasil evaluasi Komite Dewan Pengawas, memberikan rekomendasi/persetujuan atas tindakan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, dan menyusun laporan (pendapat/saran) atas laporan manajemen.

Dalam memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Pengawas menggunakan media Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi, Rapat dengan unit terkait bersama komite penunjang, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi ke kantor cabang. Sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi untuk membahas laporan kinerja bulanan Perusahaan. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas secara *sampling* melakukan kunjungan ke lapangan guna memantau kinerja divisi regional dan kantor cabang.

Sesuai dengan batasan kewenangannya, Dewan Pengawas juga telah memberikan persetujuan/rekomendasi kepada Direksi atas hal-hal yang terkait dengan operasional Perusahaan. Dewan Pengawas akan terus mendorong peningkatan kinerja Perusahaan di tahun 2021 dan akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, khususnya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak terhadap kinerja Perusahaan.

Dengan memperhatikan perbaikan kinerja Perusahaan, berupa penurunan tingkat kerugian pada tahun 2021, Dewan Pengawas meminta Direksi untuk terus mengambil langkah-langkah strategis untuk terus mendorong pemulihan dan peningkatan kinerja Perusahaan. Direksi juga harus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan pemasaran, pelayanan, dan juga pengembangan usaha. Langkah sinergi dengan BUMN lain dan/atau lembaga pemerintah

ness of the implementation of risk management and the application of information technology, provided advice/advice based on the recommendations and/or evaluation results of the Supervisory Board Committee, provided recommendations/approvals for the actions of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, and prepared reports (opinions/suggestions) on management reports.

The Supervisory Board provided advice to the Board of Directors through the Joint Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors, the meetings with related units and supporting committees, as well as monitoring and evaluating activities of branch offices. Throughout 2021, the Supervisory Board has held 12 (twelve) Joint Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors to discuss the Company's monthly performance report. To find out the conditions in the field, the Supervisory Board and the Supervisory Board Committee made a random visit to the field to monitor the performance of regional divisions and branch offices.

The Supervisory Board has also given approval/recommendation, within limits of its authority, to the Board of Directors on matters related to the Company's operations. The Supervisory Board continue to encourage the improvement of the Company's performance in 2021 and will continue to strive to increase the effectiveness of supervision on the implementation of the company's strategy, particularly in anticipating changes in the business environment that would impact the performance of the Company.

In consideration towards improving Company performance by lowering the amount of losses in 2021, the Supervisory Board asked the Board of Directors to continue to take strategic steps to encourage the recovery and improvement of the Company's performance. The Board of Directors must also develop innovations in order to improve marketing, service, and business development. Synergies with other SOEs and/or government institutions are essential for business development and

perlu dilakukan untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan usaha. Direksi juga diminta untuk senantiasa menjaga kualitas alat-alat produksi Perusahaan serta menyiapkan langkah strategis optimal pemanfaatan aset tetap Perusahaan. Seluruh langkah itu menjadi bagian upaya yang komprehensif untuk memperbaiki kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan.

Upaya maksimal Pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, termasuk dengan vaksinasi massal, dan upaya pemulihan ekonomi nasional, menerbitkan harapan ekonomi Indonesia akan kembali mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2022. Kami berpandangan bahwa prospek usaha Perusahaan ke depan akan tetap baik. Dewan Pengawas optimistis bahwa melalui berbagai inovasi dan strategi Perusahaan yang dijalankan di bawah arahan Direksi dengan dukungan optimal dari seluruh Insan DAMRI di seluruh Indonesia, perusahaan dapat bangkit dan berkembang ke depannya.

PANDANGAN ATAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENERAPAN/ PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Dewan Pengawas menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik senantiasa diterapkan secara efektif di Perusahaan. Penerapan mekanisme tata kelola yang baik dalam pengelolaan Perusahaan akan mendorong terpenuhinya hak Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2021, skor *assessment* GCG. DAMRI adalah sebesar 85,68, atau terus meningkat dari skor *assessment* GCG tahun 2020 sebesar 82,40, dan sebesar 81,93 pada tahun buku 2019. Dewan Pengawas berharap peningkatan skor penerapan GCG tersebut terefleksikan secara konkret dalam praktik pengurusan Perusahaan sehari-hari.

increasing revenues. The Board of Directors is also asked to always maintain the quality of the Company's production equipment and to prepare optimal strategic steps for the utilization of the Company's fixed assets. All of these steps are part of a comprehensive effort to improve the Company's performance and financial condition.

The Government of Indonesia's prevention efforts to stop the spread of the Covid-19 virus, including by mass vaccination, as well as efforts to recover the national economy, raises the hope that the Indonesian economy will once again record positive growth in 2022. We are of the view that the Company's business prospects in the future will remain good. The Supervisory Board is optimistic that through the various innovations and strategies the Company carries out under the direction of the Board of Directors and with optimum support from all DAMRI personnel throughout Indonesia, the Company will bounce back and further develop in the future.

OPINION ON COMPANY MANAGEMENT AND THE IMPLEMENTATION/MANAGEMENT OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Supervisory Board emphasized that the principles of good governance should always be implemented effectively in the Company. Effective implementation of good governance mechanisms in the management of the Company will encourage the fulfillment of the rights of the Shareholder and other stakeholders. In 2021, the GCG assessment score for DAMRI is 85.64, representing continued increase from previous GCG assessment scores, namely the 2020 GCG assessment score of 82.40, and an assessment score of 81.93 for the 2019 financial year. The Supervisory Board hopes that the increase in the GCG implementation score is reflected concretely in the daily management practices of the Company.



Dewan Pengawas optimistis bahwa melalui berbagai inovasi dan strategi Perusahaan yang dijalankan di bawah arahan Direksi dengan dukungan optimal dari seluruh Insan DAMRI di seluruh Indonesia, perusahaan dapat bangkit dan berkembang ke depannya.

The Supervisory Board is optimistic that through the various innovations and strategies the Company carries out under the direction of the Board of Directors and with optimum support from all DAMRI personnel throughout Indonesia, the Company will bounce back and further develop in the future.

Dewan Pengawas juga berkomitmen mendorong Perusahaan membangun dan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sistem yang disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh siapa pun para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan, dialami, maupun rasa kepekaannya terhadap hal-hal yang terkait dengan indikasi pelanggaran, kecurangan, dan juga perilaku ataupun tindak korupsi dalam Perusahaan. Perusahaan tidak akan mentolerir kecurangan dan perilaku koruptif dalam seluruh aspek. Dewan Pengawas meyakini bahwa WBS akan efektif apabila ada peran aktif Insan DAMRI dan para pemangku kepentingan lainnya, yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan peran aktif Perusahaan/tim WBS untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan serangkaian tahapan mulai dari meneliti kebenaran laporan, menetapkan proses pemberian sanksi, perlindungan kerahasiaan bagi pelapor, dan juga kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan Perusahaan, terjadi serangkaian perubahan susunan Dewan Pengawas Perusahaan. Pada awal tahun 2021 terjadi pergantian posisi Ketua Dewan Pengawas Perusahaan dengan pemberhentian Bapak Muhammad Salim oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal dengan Surat Keputusan SK-29/MBU/01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum DAMRI. Sejak 28 Januari 2021, posisi Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Bapak Sam Budigusdian. Bapak Teguh Pristiwanto pada 11 November 2021 menyatakan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Pengawas seiring dengan penugasan beliau sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Pemberhentian Bapak Teguh Pristiwanto tersebut dinyatakan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara SK Nomor: S-254/DHK.MBU.A/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-415/

The Supervisory Board is also committed to encouraging the Company to develop and implement a Whistleblowing System (WBS) as a system that is provided to and can be utilized by any of the stakeholders (stakeholders) to convey what is known, felt, experienced, as well as their sensitivity to matters related to indications of violations, fraud, as well as behavior or acts of corruption within the Company. The Company will not tolerate fraud and corrupt behavior in all aspects. The Supervisory Board believes that WBS will be effective if there is an active role for DAMRI Personnel and other stakeholders, which is then also followed up with the active role of the Company/WBS team to follow up on each incoming report with a series of steps starting from examining the veracity of the report, determining the process of imposing sanctions, protection of confidentiality for the whistleblower, as well as the opportunity of defense for the reported party.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

In order to meet the growing needs of the Company, there have been a series of changes to the composition of the Company's Supervisory Board. In early 2021, there was a change in the position of the Chairman of the Company's Supervisory Board with the dismissal of Mr. Muhammad Salim by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the Shareholder with Decree SK-29/MBU/01/2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum DAMRI. Since 28 January 2021, the position of Chairman of the Supervisory Board has been held by Mr. Sam Budigusdian. Mr. Teguh Pristiwanto in 11 November 2021 announced his resignation as a member of the Supervisory Board in line with his assignment as the Head of the Southeast Sulawesi Regional Police. The dismissal of Mr. Teguh Pristiwanto was stated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises S-254/DHK.MBU.A/12/2021 dated 27 Desember 2021. In early 2022, the Minister of State-Owned Enterprises as the Representative of the Government as Owner of Company

MBU/12/2021 tertanggal 27 Desember 2021. Pada awal 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan melakukan penataan susunan keanggotaan Dewan Pengawas dan mengganti Bapak Yudi Yudhawan dengan Bapak Henda Tri Retnadi sebagaimana termuat dalam Keputusan Nomor SK-77/MBU/03/2022. Perusahaan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi tenaga dan pikiran serta pengabdian Bapak Muhammad Salim, Bapak Teguh Pristiwanto, dan juga Bapak Yudi Yudhawan selama menjalankan tugas sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan. Kami juga menyambut kehadiran Bapak Henda Tri Retnadi untuk bersama-sama menjalankan tugas Dewan Pengawas Perusahaan.

PENUTUP

Demikian Laporan kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan Pemilik Modal dan dukungan Direksi serta pemangku kepentingan lainnya sehingga Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat atas pengurusan Perusahaan. Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh Insan DAMRI yang terus mengupayakan perbaikan kinerja Perusahaan sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Semoga kinerja Perusahaan semakin membaik pada tahun dan waktu-waktu mendatang.

Jakarta, 30 Juni 2022

Atas nama Dewan Pengawas Perum DAMRI



Sam Budigusdian

Ketua Dewan Pengawas

Chairman of the Supervisory Board

Capital carried out a restructuring of the membership of the Supervisory Board and replaced Mr. Yudi Yudhawan with Mr. Henda Tri Retnadi as stated in Decree Number SK-77/MBU/03/2022. The Company expressed its gratitude and appreciation for the contribution of energy and thoughts as well as the dedication of Mr. Muhammad Salim, Mr. Teguh Pristiwanto, and also Mr. Yudi Yudhawan while carrying out their duties as Chairman and Members of the Company's Supervisory Board. We also welcome the presence of Mr. Henda Tri Retnadi to jointly carry out the duties of the Company's Supervisory Board.

CLOSING

Thus we convey our report. Thank you for the trust of the Shareholders and the support of the Board of Directors and other stakeholders that allows for the Supervisory Board to carry out its duties and responsibilities in terms of supervision and providing advice on the management of the Company. The Supervisory Board appreciates the Board of Directors and all DAMRI personnel who continue to strive to improve the Company's performance even in very difficult conditions. Hopefully the Company's performance will improve in the years and times to come.

Jakarta, 30 June 2022

On behalf of the Supervisory Board of Perum DAMRI



Tourista

DAMRI

KEMAYORAN 1

BIJ102

New
DAMRI

JAC
JABODETABEK AIRPORT

ANGKUTAN PERKOTAAN JABODETABEK

B 7275 JGD

LAPORAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAMRI

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DAMRI



Setia N. Milatia Moemin

Direktur Utama

President Director

Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan
yang kami hormati,

With respect to the Shareholders and stakeholders,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa menjalani tahun 2021 dengan sebaik-baiknya. Bersama ini kami laporkan hasil pelaksanaan tugas kepengurusan Perusahaan yang telah dilaksanakan oleh Direksi sepanjang tahun 2021.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Perekonomian global sepanjang tahun 2021 masih dihindangi ketidakpastian sebagai imbas pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia masih menerapkan berbagai pem-

Praise be to God Almighty for His mercy and grace so that we can all live as well as possible in 2021. We hereby report the results of the implementation of the Company's management duties that have been carried out by the Board of Directors throughout 2021.

ANALYSIS OF COMPANY PERFORMANCE

The global economy throughout 2021 is still plagued with uncertainty as a result of the Covid-19 pandemic. The Indonesian government is still implementing various restrictions on social

batasan aktivitas sosial dan bisnis untuk menekan penyebaran pandemi. Hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan khususnya kepada Perusahaan yang menjalankan bidang usaha utama jasa angkutan penumpang dan barang untuk umum.

Industri transportasi menjadi salah satu sektor usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Upaya Pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang antara lain dengan mengurangi mobilitas masyarakat, pada akhirnya berimbas pada perolehan pendapatan dan keuntungan yang diraih oleh Perusahaan.

Dalam kondisi yang sulit dan perekonomian yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19, Direksi mengapresiasi semua pihak, khususnya seluruh pegawai, atas kontribusi yang telah diberikan. Sejumlah capaian Perusahaan sepanjang tahun di antaranya terlihat dengan peningkatan pendapatan di layanan penumpang/perintis, penggunaan infrastruktur digital seperti e-ticketing dan sistem informasi manajemen administrasi untuk operasional dan teknik, serta penerapan sentralisasi pendapatan pada sejumlah cabang pelaksana layanan penumpang/perintis.

Masih berlangsungnya pandemi juga menjadikan Perusahaan belum bisa melakukan utilisasi unit kendaraan secara maksimal. Proporsi unit kendaraan Siap Operasi (SO) terhadap Siap Guna Operasi (SGO) masih belum pulih belum bisa terserap pasar. Sekalipun Perusahaan tetap bisa merealisasikan pendapatan sepanjang tahun lebih tinggi dibanding Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Pemilik Modal, akan tetapi penurunan pendapatan yang signifikan belum dapat diimbangi dengan penurunan beban secara proporsional, meskipun secara umum beban langsung berhasil diturunkan dibandingkan tahun 2020. Penurunan beban langsung membuat kerugian Perusahaan lebih kecil dibandingkan kerugian tahun 2020, meskipun masih lebih tinggi dibanding yang dianggarkan.

and business activities to suppress the spread of the pandemic. This has an impact on the Indonesian economy, in particular to companies whose main business line is passengers and cargo transportation services for the public.

The transportation industry is one of the most affected business sectors due to Covid-19 pandemic. The Government's efforts in handling and preventing the spread of the Covid virus include reducing community mobility, which ultimately have an impact on the revenue and profits achieved by the Company.

In difficult conditions and a challenging economy due to the Covid-19 pandemic, the Board of Directors appreciates all parties, especially all employees, for their contributions. The Company achieved several achievements throughout the year, as reflected in the increase of revenue in the assignment/pioneer services, the usage of digital infrastructure such as e-ticketing and administrative management information system for operational and technical, as well as the implementation of revenue centralization in a number of branches implementing assignment/pioneer services.

The ongoing pandemic has also made the Company unable to fully utilize vehicle units. The proportion of Ready-for-Operations (SO) units to Ready-to-Operate (SGO) units has not yet recovered and cannot be absorbed by the market. Even though the Company is still able to realize higher revenue throughout the year in comparison to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021 as approved by the Shareholders, the significant decrease in revenue has not been offset by a proportional reduction in expenses, although in general direct expenses have been reduced, when compared to 2020. The decrease in direct costs made the Company's losses smaller than the losses in 2020, although still higher than budgeted.

Pada tahun buku 2021, total pendapatan Perusahaan terealisasi sebesar Rp 610,941 miliar atau 108,72% dari RKAP sebesar Rp 561,923 miliar. Total biaya terealisasi sebesar Rp 783,398 miliar atau 104,81% dari anggaran pada tahun sebesar Rp 747,472 miliar. Laba (rugi) setelah pajak pada tahun 2021 sebesar minus Rp 152,902 miliar atau lebih baik ketimbang anggaran sebesar minus Rp 178,68 miliar. Total aset maupun liabilitas dan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 957 miliar atau lebih tinggi ketimbang anggaran sebesar Rp 953,39 miliar.

Mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, kinerja Perum DAMRI Tahun Buku berada pada kategori Sehat "A" dengan jumlah skor 65,00. Skor tersebut menurun dibandingkan pada Tahun Buku 2021 yang termasuk pada kategori Sehat "A" dengan jumlah skor 66,5.

Sekalipun target sebagaimana dinyatakan dalam RKAP belum sepenuhnya tercapai, namun manajemen dan seluruh Insan DAMRI berkomitmen untuk mengatasi setiap kendala dan mengupayakan pencapaian kinerja terbaik di masa mendatang.

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROSPEK USAHA

Seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia, Perusahaan menjalankan inisiatif strategis dalam komersial dan pengembangan usaha yang bertujuan untuk memulihkan kinerja Perusahaan. Strategi utama yang dipilih adalah pemulihan likuiditas, pembedahan proses bisnis dan meningkatkan inovasi pada seluruh lini bisnis perusahaan, pembenahan organisasi perusahaan, penyesuaian jumlah armada yang "demand responsive", penguatan proses digitalisasi di dalam seluruh proses bisnis, mendorong relaksasi regulasi sesuai dengan perbaikan proses bisnis, pengembangan dan penguatan unit internal menjadi SBU, dan sinergi/kolaborasi strategis.

Dalam pelaksanaan strategi pemulihan di atas, Perusahaan memaksimalkan proyek penugasan

In the 2021 financial year, the Company's total revenue was realized at Rp. 610.941 billion or 108.72% of the RKAP of Rp. 561.923 billion. The total realized cost was Rp. 783.398 billion or 104.81% of the budget for the year of Rp. 747.472 billion. Profit (loss) after tax in 2021 is minus Rp. 152,902 billion or better than the budget of minus Rp. 178.68 billion. Total assets as well as liabilities and equity as of 31 December 2021 were Rp. 957 billion or higher than the budget of IDR 953.39 billion.

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, the performance of Perum DAMRI for the Financial Year is in the Healthy category "A" with a total score of 65.00. This score reflects a decrease compared to the 2021 Fiscal Year which was in the "A" Healthy category with a total score of 66.5.

Even though the target as stated in the RKAP has not been fully achieved, the management and all DAMRI personnel are committed to overcoming every obstacle and striving to achieve the best performance in the future.

STRATEGIC POLICY AND BUSINESS PROSPECTS

As the Indonesian economy recovers, the Company carries out strategic commercial and business development initiatives aimed at restoring the Company's performance. The main chosen strategies are liquidity recovery, business process improvement and increasing innovation in all business lines, corporate organization reform, adjustment to the number of "demand responsive" fleets, strengthening digitalization processes in all business processes, encouraging relaxation of regulations in accordance with improvements in the business process, development and strengthening of internal units into SBUs, and strategic synergy/collaboration.

In implementing the above-mentioned recovery strategy, the Company maximizes project assign-

dari pemerintah terutama yaitu angkutan perintis dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), pembukaan layanan angkutan barang penyambung tol laut, penggunaan aplikasi digital untuk pembelian tiket dan pembayaran non-tunai, menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan e-commerce untuk meningkatkan jumlah pelanggan secara online, pengembangan trayek antar kota, kolaborasi untuk trayek Transjakarta, pemantauan lapangan, pengendalian pola market demand, dan kerja sama strategis dengan berbagai perusahaan untuk menyediakan angkutan penumpang maupun barang.

Secara umum, strategi pemulihan ini masih bertumpu pada optimalisasi bisnis dengan pendapatan yang lebih pasti, seperti pelaksanaan penugasan angkutan yang diberikan pemerintah (subsidi) dengan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dipergunakan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi Perusahaan. Layanan perintis masih merupakan salah satu segmen penting bagi DAMRI sebagai *agent of development*.

Perum DAMRI juga terus menangkap peluang di sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat menggerakkan pemulihan perekonomian nasional. Dengan kian longgarnya pembatasan perjalanan, jumlah kunjungan wisatawan sudah kembali meningkat pada 2021 dibandingkan 2020 di masa awal pandemi.

Menyambut penetapan destinasi wisata prioritas sebagaimana amanat Presiden dalam upaya mendorong pemerataan pariwisata Indonesia, DAMRI berperan serta dalam memberikan dukungan angkutan wisata. Ini merupakan salah satu segmen baru bagi Perusahaan, dimulai dengan dimenangkannya tender untuk angkutan yang melayani KSPN.

Perusahaan juga tidak pernah ragu mengambil peluang yang di era kenormalan baru (*new normal*), termasuk pola kehidupan baru masyarakat yang makin banyak melakukan belanja secara online sehingga terjadi peningkatan pergerakan barang secara signifikan. Karena itu, Perusahaan menghadirkan solusi logistik dengan mengembangkan DAMRI Integrated

Logistics System (DILS) which integrates goods transportation and freight services connecting sea tolls, using digital applications for ticket purchases and non-cash payments, establishing cooperation with various e-commerce companies to increase the number of online customers, development of inter-city routes, collaboration for Transjakarta routes, field monitoring, controlling market demand patterns, and strategic co-operation with various companies to provide passenger and freight transportation.

In general, this recovery strategy still relies on optimizing businesses with more definite income, such as implementing government-assigned transportation assignments (subsidies) by ensuring that existing resources can be used properly and bring benefits to the Company. Pioneering services are still an important segment for DAMRI as an agent of development.

Perum DAMRI also continues to seize opportunities in the tourism sector as one of the sectors that is expected to drive the recovery of the national economy. With the loosening of travel restrictions, the number of tourist visits has increased again in 2021 compared to the beginning period of the pandemic in 2020.

Welcoming the establishment of priority tourist destinations as mandated by the President in an effort to increase the distribution of tourism in Indonesia, DAMRI participates by providing tourism transportation support. This is a new segment for the Company, starting with winning the tender for transportation serving KSPN.

The company also never hesitates to take opportunities in the new normal era, including the new life patterns of people who are increasingly shopping online, resulting in a significant increase in the movement of goods. Therefore, the Company presents a logistics solution by developing the DAMRI Integrated Logistic System (DILS) which integrates goods transportation services

Logistic System (DILS) yang mengintegrasikan pelayanan angkutan barang dengan kekuatan jaringan yang dimiliki DAMRI di seluruh Indonesia.

Di lingkup internal, Perusahaan senantiasa mengupayakan efisiensi beban biaya serta melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Sumber daya dialihkan ke unit bisnis atau cabang yang masih produktif. Sumber daya yang sudah tidak optimal dikurangi, termasuk pengurangan armada bus yang sudah tua guna mengurangi beban perbaikan. Perusahaan senantiasa mempersiapkan sumber daya dan alat produksi sebagai antisipasi manakala pada saatnya *business turnaround*.

Kerugian yang masih signifikan sepanjang 2021 menghadirkan tantangan besar untuk menjaga arus kas dan pemenuhan pembiayaan investasi. Pada akhirnya, Manajemen Perusahaan berpandangan bahwa prospek usaha ke depan akan tetap baik, salah satunya dengan dukungan pengalaman panjang dan kelengkapan jaringan Perusahaan di seluruh Indonesia.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum DAMRI berkewajiban untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, Perum DAMRI memiliki kewajiban untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG yang dilakukan secara berkala.

Untuk tahun buku 2021, pelaksana penilaian adalah Pelaksana penilaian adalah PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group). Berdasarkan penilaian tim MUC yang merupakan penilai independen tersebut, total nilai penerapan GCG tahun 2021 yang diperoleh Perum DAMRI adalah sebesar 85,64 dari nilai

with the network strength of DAMRI throughout Indonesia.

Internally, the Company always strives for cost efficiency and optimizes available resources. Resources were transferred to business units or branches that were still productive. Resources that were no longer optimal were reduced, including the reduction of aging bus fleet to reduce the burden of repairs. The company always prepares production resources and equipment in anticipation of a business turnaround.

Significant losses throughout 2021 present major challenges to maintaining cash flow and fulfilling investment financing. In the end, the Company's Management believes that the future business prospects will remain good, supported by the long experience of the Company and its comprehensive network throughout Indonesia.

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As a State-Owned Enterprise (BUMN), Perum DAMRI is obligated to implement Good Corporate Governance (GCG) as mandated in the Minister of SOE Regulation Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 regarding the Implementation of GCG Practices in SOE. In accordance with the provisions of the regulation, Perum DAMRI has an obligation to measure and assess the implementation of GCG in an effort to improve and increase the quality of GCG implementation on a periodic basis.

For the 2021 financial year, the executor of the assessment is PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group). Based on the assessment of the MUC team which is an independent appraiser, the total value of GCG implementation in 2021 obtained by Perum DAMRI is 85.64 from the maximum weight value of 100% so

bobot maksimal 100% sehingga secara keseluruhan hasil *assessment* implementasi GCG Perum DAMRI tahun 2021 mendapatkan klasifikasi kualitas penerapan GCG kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut menunjukkan perkembangan yang baik, terus meningkat dari skor *assessment* GCG tahun 2020 sebesar 82,40 dan sebesar 81,93 pada tahun buku 2019.

Perusahaan berkomitmen untuk terus menerapkan GCG di seluruh lini, baik di Kantor Pusat, Divisi Regional, maupun Cabang. Bentuk komitmen tersebut tecermin dengan pemutakhiran dokumen kebijakan Perusahaan terkait GCG, melaksanakan proses bisnis sesuai dengan nilai-nilai GCG, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaannya secara berkala.

Dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, salah satu prestasi yang diraih Perusahaan adalah penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Cukup Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2021, perubahan susunan Direksi terjadi pada awal tahun di mana Direktur Keuangan Bapak Sri Purwanto yang habis masa jabatannya digantikan oleh Bapak Joni Prasetyanto sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Nomor: SK-5/MBU/01/2021 tertanggal 7 Januari 2021. Berikutnya pada tahun 2022, posisi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Bapak Sandry Pasambuna digantikan oleh Bapak Dadan Rudiansyah sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemilik Modal Nomor: SK-100/MBU/04/2022 tertanggal 18 April 2022. Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Sri Purwanto dan juga Bapak Sandry Pasambuna atas kontribusinya selama ini. Kami juga menyambut kehadiran Bapak Henda Tri Retnadi untuk bersama-sama menjalankan tugas kepengurusan Perusahaan.

that the overall GCG implementation assessment result of Perum DAMRI in 2021 gets a classification of “Very Well”. This achievement indicates good progress and continued increase from past GCG assessment score, namely 82.40 in 2020 and 81.93 in 2019 financial year.

The company is committed to continuously implement GCG in all lines, both at the Head Office, Regional Divisions, and Branches. This form of commitment is reflected in updating the Company’s policy documents related to GCG, implementing business processes in accordance with GCG values, as well as monitoring and evaluating its implementation on a regular basis.

In terms of compliance with regulations, one of the achievements achieved by the Company is the Central Information Commission of the Republic of Indonesia awarding the Company as a Fairly Informative Public Agency at the 2021 Public Information Openness Award.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2021 financial year, a change in the composition of the Board of Directors occurred at the beginning of the year in which the Director of Finance, Mr. Sri Purwanto, whose term of office had expired, was replaced by Mr. Joni Prasetyanto according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as Shareholder Number: SK-5/MBU/01/2021 dated 7 January 2021. Further in 2022, the position of Director of Commercial and Business Development Mr. Sandry Pasambuna was replaced by Mr. Dadan Rudiansyah according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as Shareholder Number: SK-100/MBU/04/2022 dated 18 April 2022. We express our appreciation and gratitude to Mr. Sri Purwanto and Mr. Sandry Pasambuna for their contributions. We also welcome the presence of Mr. Henda Tri Retnadi to jointly carry out the management duties of the Company.



Perusahaan juga tidak pernah ragu mengambil peluang yang di era kenormalan baru (*new normal*), termasuk pola kehidupan baru masyarakat yang makin banyak melakukan belanja secara *online*—

The company also never hesitates to take opportunities in the new normal era, including the new life patterns of people who are increasingly shopping online—

PENUTUP

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemilik Modal yang senantiasa memberikan dukungan terhadap setiap langkah Perusahaan dalam meraih kinerja optimal.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Dewan Pengawas atas seluruh arahan dan pengawasannya terhadap pengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Tidak lupa, penghargaan yang tinggi kepada seluruh Insan DAMRI atas kerja keras dan dedikasinya untuk bersama-sama memajukan Perusahaan yang kita cintai ini.

Direksi juga berterimakasih kepada para mitra kerja dan para pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama ini, dengan harapan semoga kerjasama yang baik terus dapat berlanjut untuk menjadikan Perum DAMRI perusahaan transportasi kelas dunia yang andal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati upaya yang kita jalankan untuk mencapai kinerja Perusahaan yang lebih baik pada tahun dan waktu-waktu mendatang.

Jakarta, 30 Juni 2022

Atas nama Direksi Perum DAMRI

CLOSING

Finally, we would like to express our gratitude and highest appreciation to the Shareholders who provide continuous support to every step of the Company's efforts to reach optimum performance.

We also express our gratitude and appreciation to the Supervisory Board for their direction and supervision towards the management of the Company which is carried out by the Board of Directors. Not to forget, tremendous appreciation to all DAMRI personnel for their hard work and dedication to advance together this beloved Company.

The Board of Directors would also like to thank our partners and other stakeholders for the cooperation and support provided so far, with the hope that the good cooperation will continue to make Perum DAMRI a reliable, excellent-performing, and sustainable world-class transportation company.

May Allah, the Almighty God continue to bless our efforts to achieve better Company performance in the years and years to come.

Jakarta, 30 June 2022

On behalf of the Board of Directors of Perum DAMRI



Setia N. Milatia Moemin
Direktur Utama
President Director



Profil Perusahaan

Company Profile



IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	Perusahaan Umum (Perum) DAMRI	DAMRI Public Company
Merek Dagang <i>Trademark</i>	DAMRI	
Jenis/Badan Hukum Perusahaan <i>Type/Legal Entity Status</i>	Perusahaan Umum (Perum)	Public Company
Bidang Usaha <i>Business Line</i>	Pengusahaan jasa angkutan jalan, baik penumpang dan barang untuk umum	<i>The business of road transportation services, both for general passengers and goods</i>
Produk/Jasa <i>Products/Services</i>	Angkutan Bandara Angkutan Antar Kota Angkutan Perkotaan Angkutan Lintas Batas Negara Angkutan Perintis Angkutan Paket/Barang Angkutan Travel/Pariwisata	Airport Transport Inter-City Transport Urban Transport Transboundary Transport Pioneer Transport Freight/Package Transport Travel/Tourism Transport
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	25 November 1946	25 November 1946
Tanggal Beroperasi <i>Date of Operation</i>	25 November 1946	25 November 1946
DASAR HUKUM PENDIRIAN <i>Legal Standing</i>	• Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/26 Tahun 1946 • Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961 • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018	• Decree of Minister of Transport of the Republic of Indonesia No.01/DAM/26 Year 1946 • Government Regulation Number 233 Year 1961 • Government Regulation Number 30 Year 1984 • Government Regulation Number 31 Year 2002 • Government Regulation Number 45 Year 2005 • Government Regulation Number 38 Year 2018
MODAL <i>Capital</i>	Rp 627.721.000.110 (merupakan seluruh nilai penyertaan modal negara dalam Perusahaan)	Rp 627.721.000.110 (reflecting total amount of state equity participation in the Company)
KEPEMILIKAN <i>Shareholder</i>	100% Pemerintah Indonesia	100% Government of Indonesia
ALAMAT KANTOR PUSAT <i>Head Office Address</i>	Jln. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 13140	
KONTAK <i>Contact</i>	Telepon: (021) 8583131, Hunting 1500825 Faksimili: - email: sesper@damri.co.id website: www.damri.co.id Facebook: DAMRI Instagram: @damriindonesia Twitter: @damriindonesia Youtube: DAMRI Indonesia	
WILAYAH KERJA <i>Working Area</i>	Seluruh Wilayah Indonesia 1 Kantor Pusat 4 Kantor Divisi Regional 57 Kantor Caban	Entire Region of Indonesia 1 Head Office 4 Regional Division Offices 57 Branch Offices
JUMLAH KARYAWAN <i>Number of Employees</i>	2019 = 5.364 Karyawan 2020 = 5.105 Karyawan 2021 = 4.349 Karyawan	



INFORMASI UMUM

GENERAL INFORMATION

DAMRI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum DAMRI. Sejak Indonesia merdeka, DAMRI telah berkontribusi dalam membangun konektivitas transportasi darat. DAMRI hadir di seluruh provinsi di Indonesia sehingga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga NKRI melalui konektivitas transportasi darat.

DAMRI melaksanakan usaha pokok jasa angkutan penumpang dan barang untuk umum. DAMRI juga menjalankan penugasan dari pemerintah berupa angkutan perintis, angkutan perkotaan, dan penugasan lainnya dalam bidang angkutan. Melalui layanan angkutan perintis, DAMRI hadir melayani masyarakat terutama di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Perusahaan juga berkontribusi dalam penugasan beberapa proyek strategis nasional, termasuk dalam mendukung ekosistem kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang sangat pesat berimbas pada peluang bagi penyedia layanan transportasi untuk dapat menjangkau seluruh infrastruktur yang telah terbangun. Kondisi tersebut membuka peluang peningkatan dan pengembangan layanan Perum DAMRI. Kondisi lingkungan bisnis yang berkembang sangat dinamis, kompetitif, dan kompleks yang diakibatkan berbagai faktor seperti globalisasi, deregulasi, liberalisasi, perkembangan teknologi, orientasi pasar, dan faktor-faktor lainnya, mendorong Perum DAMRI untuk senantiasa berubah dan beradaptasi dengan dinamika

DAMRI is regulated under Government Regulation Number 38 Year 2018 regarding Public Company DAMRI. Since Indonesia declared independence, DAMRI has contributed to the development of land transportation connectivity. DAMRI is present in all the provinces of Indonesia, thus playing a role in supporting economic growth and maintaining the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) through land transportation connectivity.

DAMRI carries out its main business line of passenger and goods transportation services for the public. DAMRI also carries out assignments from the government in the form of pioneer transportation, urban transportation, and other assignments in the transportation sector. Through its pioneering transportation services, DAMRI is present to serve the community, especially in disadvantaged, remote, outermost, and border areas (3TP). The Company also contributes to the assignment of several national strategic projects, including in supporting the national tourism strategic area ecosystem (KSPN), which supports economic development and basic services.

Rapid infrastructure developments such as toll roads, airports and ports served as opportunities for transportation service providers to be able to reach all the infrastructure that has been built. This condition opens up opportunities for improvement and development of Perum DAMRI services. The business environment is very dynamic, competitive, and complex due to various factors such as globalization, deregulation, liberalization, technological developments, market orientation, and other factors, thus encouraging Perum DAMRI to constantly transform and adapt to the dynamics of the business environment in the spirit of “business not as

lingkungan bisnis dalam semangat “business not as usual” dan “out of the box” yang didukung sumber daya manusia yang berkompeten dan beretos kerja tinggi.

Sesuai dengan visi dan misi, DAMRI secara berkesinambungan melakukan pemutakhiran proses bisnis di Kantor Pusat, Regional, dan Cabang agar DAMRI mampu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyediaan jasa berkualitas prima sehingga dapat mencapai perusahaan “top of mind” pada para pelanggan. DAMRI juga akan mengembangkan bisnis-bisnis pendukung di sektor transportasi darat dan penguatan menuju One Stop Business Transportation Services. Menyikapi kondisi pandemi Covid-19, DAMRI senantiasa memberlakukan standar protokol kesehatan secara ketat untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan 5K, yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan bagi pelanggan dan karyawan.

usual” and “out of the box,” and supported by competent human resources with high work ethics.

In accordance with its vision and mission, DAMRI continuously updates the business processes at its Head Office, Regional and Branch Offices, so that DAMRI is able to increase customer satisfaction by providing excellent quality services that would allow it to achieve a “top of mind” company for its customers. DAMRI will also develop and strengthen supporting businesses in the land transportation towards One Stop Business Transportation Services. In consideration to the Covid-19 pandemic, DAMRI always enforces strict health protocol standards to be able to provide the best service by prioritizing 5K, namely Accuracy, Safety, Security, Comfort, and Health for customers and employees.

Logo Perusahaan Corporate Logo

WARNA KUNING
melambangkan pengalaman dinamis yang memberikan kebahagiaan dan semangat baru bagi seluruh pengguna jasa.

YELLOW signifies dynamic experience that provides happiness and new enthusiasm to all of its service users.

WARNA BIRU
melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan loyalitas DAMRI yang selalu dapat diandalkan.

BLUE signifies DAMRI's knowledge, wisdom, and loyalty that can always be relied upon.



LOGOGRAM berbentuk dua tanda panah sebagai lambang sifat **progresif** DAMRI, **keandalan**, **kecepatan**, serta **keselamatan** dalam perjalanan yang mampu memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan.

THE LOGOGRAM in the form of two arrows signifies DAMRI's progressive nature, its reliability, speed, as well as travel safety that can enhance the experience of its customers.

WARNA ORANYE melengkapi logogram dengan sifat hangat dan kreatif.

ORANGE complement the logogram with its warm and creative nature.

Jenis huruf **SANS SERIF** menunjukkan sifat modern, ditulis dengan tebal menggunakan huruf kapital sebagai lambang kekokohan dan komitmen kuat DAMRI dalam melayani kebutuhan transportasi Indonesia.

The SANS SERIF typeface indicates a modern nature, written in bold using capital letters as a symbol of DAMRI's solidity and strong commitment in serving Indonesia's transportation needs.



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

CORPORATE BRIEF HISTORY

Embrio Perusahaan adalah dua perusahaan angkutan pada masa pendudukan Jepang, yaitu “Jawa Unyu Zigyosha” dan “Zidosha Sokyoku”. Pada 1945, kedua usaha angkutan berubah nama menjadi “Djawatan Pengangkutan” untuk angkutan barang dan “Djawatan Angkutan Darat” untuk pengangkutan penumpang di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 01/DAM/46, kedua badan usaha tersebut digabungkan menjadi “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, yang disingkat menjadi DAMRI. Tonggak penggabungan kedua jawatan tersebut pada 25 November 1946 diperingati sebagai hari ulang tahun Perusahaan.

Pada 1961 terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961, yang kemudian BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN) pada 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor “Damri” Menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984, status PN DAMRI beralih menjadi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Seiring dengan perkembangan sektor transportasi di Indonesia, DAMRI terus beradaptasi dan berinovasi, baik dalam aspek proses bisnis maupun layanan transportasi yang diberikan kepada seluruh pengguna jasa.

The embryo of the Company were two transportation companies during the Japanese occupation period, namely “Java Unyu Zigyosha” and “Zidosha Sokyoku”. In 1945, the two transportation businesses changed their names to “Djawatan Pengangkutan” for freight transportation and “Djawatan Angkutan Darat” for passenger transportation under the management of the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia. Based on the Decree of the Minister of Transport of the Republic of Indonesia No. 01/DAM/46, the two business entities were merged into “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia”, which was shortened to DAMRI. The milestone of merging the two entities on 25 November 1946 was commemorated as the anniversary of the Company.

In 1961, there was a change in the status of DAMRI to become a State Enterprise General Leading Body (BPUPN) based on Government Regulation No. 233 Year 1961, while later in 1965, the BPUPN status was removed and DAMRI was designated as a State Company (PN).

Government Regulation Number 30 Year 1982 regarding the Transfer of the State Motor Transport Company “Damri” to a Public Company (Perum), later updated by Government Regulation Number 31 Year 1984, the status of PN DAMRI was changed to Public Company (Perum) DAMRI.

In line with the growth of the transportation sector in Indonesia, DAMRI continues to adapt and innovate, both in terms of its business processes as well as its transportation services provided to all its service users.

Keterangan Perubahan Nama *Information on Name Change*

1945

Gabungan dari "Jawa Unyu Zigyosha" dan "Zidosha Sokyoku" menjadi "Djawatan Pengangkutan" dan "Djawatan Angkutan Darat".

A merge of "Jawa Unyu Zigyosha" and "Zidosha Sokyoku" becoming "Djawatan Pengangkutan" and "Djawatan Angkutan Darat"

**25
NOVEMBER
1946**

Djawatan Angkoetan Motor Repoebluk Indonesia" atau DAMRI.

"Djawatan Angkoetan Motor Repoebluk Indonesia" or DAMRI

1961

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) DAMRI.

State Enterprise General Leading Body (BPUPN) DAMRI

1965

Perusahaan Negara (PN) DAMRI

State Company (PN) DAMRI

1984

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Public Company (Perum) DAMRI





JEJAK LANGKAH MILESTONE

Pada masa pendudukan Jepang, didirikan dua usaha transportasi Jawa Unyu Zigyosha untuk melayani angkutan barang dan Zidosha Sokyoku untuk melayani angkutan penumpang.

During the Japanese occupation period, two transportation enterprises were established, namely Jawa Unyu Zigyosha that provided cargo transport services and Zidosha Sokyoku that provided passenger transport services.

1943

Setelah Indonesia merdeka, Jawa Unyu Zigyosha berubah nama menjadi "Djawatan Pengangkutan" untuk angkutan barang dan Zidosha Sokyoku menjadi "Djawatan Angkutan Darat" untuk angkutan penumpang

After Indonesia declared independence, Jawa Unyu Zigyosha was changed to "Djawatan Pengangkutan" that still provide cargo transport services and Zidosha Sokyoku became "Djawatan Angkutan Darat" for passenger carrier services.

1945

Kedua jawatan tersebut digabung menjadi "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia" disingkat DAMRI Makloemat Menteri Perhoeboengan RI No. 01/DAM/46 dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya. Sejak itu, DAMRI bertugas melayani masyarakat sambil turut ambil bagian dalam mempertahankan kedaulatan negara di era agresi Belanda pasca-kemerdekaan

The two Djawatan (companies) were merged into "Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia" or DAMRI based on the Minister of Transport of the Republic of Indonesia Decree No. 01/DAM/46. Its main duty is providing land-based transportation with buses, trucks, and other motor vehicles. Since then, DAMRI has been in charge of serving the communities while also taking part in defending the sovereignty of the country during the post-independence Dutch military aggression period.

1946

1961

DAMRI diubah statusnya menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 Tahun 1961 Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri.

DAMRI was transformed into the State Enterprise General Leading Body (BPUPN) according to Government Regulation No. 233 Year 1961.

1965

Status BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara.

BPUPN was abolished and DAMRI was declared as a State Company (PN).

1982-1984

DAMRI's status was changed to Public Company (Perum) based on Government Regulation No. 30 Year 1982, later revised with Government Regulation No. 31 Year 1984

2002

Status DAMRI sebagai Perum diperkuat dengan PP No. 31 Tahun 2002. Perum DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinggi. Hingga saat ini Perum DAMRI tetap hadir dan konsisten menjalankan amanat PP No. 31 Tahun 2002 tersebut.

The status of DAMRI as Perum was strengthened with Government Regulation No. 31 Year 2002. The Company was assigned a duty to provide road-based public transportation services for both passenger and goods with high-quality motor vehicles. Since then, Perum DAMRI maintains its presence and consistently carries out the mandate as stated in Government Regulation No. 31 Year 2002.

2018

DAMRI diperbaharui dengan PP No. 38 Tahun 2018. Selain itu, terdapat perubahan logo Perusahaan, visi, misi, dan nilai baru yang menggambarkan semangat transformasi Perusahaan.

DAMRI took another reform with Government Regulation No. 38 Year 2018. It was updated with the new Company logo, vision, mission, and value that represent the spirit of corporate transformation.



VISI, MISI DAN NILAI (BUDAYA) PERUSAHAAN

CORPORATE VISION, MISSION, AND VALUES

VISI	VISION
Menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang andal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan.	<i>Become a world-class transportation company that is reliable, superior, and sustainable.</i>
MISI	MISSION
- Menyediakan alat produksi yang andal, modern, dan berbasis teknologi mutakhir untuk mendukung konektivitas transportasi. - Memberikan pelayanan yang berkualitas prima, berkeselamatan, dan berorientasi kepada pelanggan. - Mengembangkan <i>human capital</i> yang profesional dan inovatif untuk mengoptimalkan profit guna meningkatkan nilai tambah kepada <i>stakeholder</i>. - Menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas usaha Perusahaan. - Mengembangkan diversifikasi usaha guna mendukung cara bisnis Perusahaan.	<i>Providing production equipment that is reliable, modern, and based on the latest technology to support transportation connectivity.</i> <i>Providing services that are of prime quality, safe, and customer oriented.</i> <i>Develop professional and innovative human capital to optimize profit to increase added value to stakeholders.</i> <i>Carry out the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Company's business activities.</i> <i>Develop business diversification to support the Company's core business.</i>
Visi dan Misi DAMRI telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan Surat Keputusan 0981/HK.003/DAMRI 2019 tentang Penetapan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tertanggal 25 Februari 2019.	
NILAI BUDAYA	VALUES (CULTURE)
Nilai-nilai utama Perusahaan mengikuti amanat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ketentuan tersebut termuat dalam Surat Edaran SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia BUMN tertanggal 1 Juli 2020 yang menjadi pedoman kerja seluruh BUMN di bawah Kementerian BUMN.	<i>The core values of the Company follow the mandate from the Ministry of State Owned Enterprises (BUMN), which is AKHLAK, an abbreviation for Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. These stipulation is contained within SE Decree 7/MBU/07/2020 concerning Core Values of SOE Human Resources dated 1 July 2020, which serve as the working guidance for all SOEs under the Ministry of State Owned Enterprises. .</i>
AKHLAK sejalan dan memperkuat nilai-nilai utama DAMRI yang dianut selama ini, yaitu SMILE yang merupakan dari akronim dari Smart, Motivation, Innovation, Learning, dan Ethics and Integrity. "Dengan SMILE, DAMRI jalankan AKHLAK" adalah kalimat afirmasi yang digunakan untuk internalisasi nilai-nilai utama Perusahaan tersebut kepada para pemangku kepentingan.	<i>AKHLAK is in line with and strengthen the core values that DAMRI has embraced, namely SMILE, which is an acronym for Smart, Motivation, Innovation, Learning, and Ethics and Integrity. "DAMRI goes AKHLAK with SMILE" is an affirmative sentence that is used to internalize the core values of the Company to stakeholders.</i>

"DENGAN SMILE, DAMRI JALANKAN AKHLAK"
DAMRI GOES AKHLAK WITH SMILE

SMILE SMILE	Cekatan, cerdas, tangguh, dan semangat mencapai kinerja <i>Nimble, smart, tough, and passionate about performance</i>
MOTIVATION MOTIVATION	Motivasi bekerja sama dan teamwork dalam kerja <i>Motivation for cooperation and teamwork at work</i>
INNOVATION INNOVATION	Inovasi dan perbaikan berkesinambungan <i>Continuous innovation and improvement</i>
ETHICS AND INTEGRITY ETHICS AND INTEGRITY	Profesional dan kinerja yang optimum <i>Professional and optimum performance</i>
AMANAH TRUSTWORTHY	Etika kerja dan tanggung jawab utuh dalam berkarya <i>Work ethics and full responsibility at work</i>
KOMPETEN COMPETENCE	Integritas, tulus, konsisten (<i>integrity, honest, and consistent</i>), dapat dipercaya <i>Integrity, sincere, consistent (integrity, honest, and consistent), trustworthy</i>
HARMONIS HARMONY	Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, <i>learning agility</i> , dan ahli di bidangnya <i>Best performance, success, deliver, learning agility, and experts in their fields</i>
LOYAL LOYAL	Peduli (<i>caring</i>), perbedaan (<i>diversity</i>)
ADAPTIF ADAPTIVE	Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif <i>Innovative, enthusiastic for change, proactive</i>
KOLABORASI COLLABORATION	Ketersediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik <i>Availability to work together, synergy for better results</i>



KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

BUSINESS FIELD AND ACTIVITIES

BIDANG USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI menyatakan bahwa maksud, tujuan, dan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pengusahaan jasa angkutan jalan dan jasa lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Jasa angkutan penumpang dan barang untuk umum.
2. Penugasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa angkutan perintis, angkutan perkotaan, dan penugasan lainnya dalam bidang angkutan.
3. Jasa penyewaan sarana angkutan.
4. Jasa titipan dan pengiriman barang/pos melalui angkutan jalan.
5. Jasa lainnya di bidang angkutan lain.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, sepanjang mendukung secara finansial

BUSINESS LINE ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND WHICH HAS BEEN IMPLEMENTED

Article 8 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2018 dated 6 August 2018 concerning Public Company (Perum) DAMRI states that the aims, objectives and business activities are as follows:

The Company has the aims and objectives to participate in implementing and supporting the policies and programs of the Central and Local Governments in the field of economy and national development in general, particularly in the field of road transportation services and other services as well as optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on the principles of managing a healthy Company.

In carrying out its aims and objectives, the Company carries out the following core business activities:

1. Passenger and goods transportation services for the public.
2. Assignments from the Central and Local Governments in the form of pioneer transportation, urban transportation, and other assignments in the transportation sector.
3. Rental services for transportation facilities.
4. Deposit services and delivery of goods/post via road transportation.
5. Other services in the field of other transportation.

In addition to the core business activities as referred to above, as long as financially supportive of the main

terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Seluruh kegiatan usaha yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Perusahaan.

PRODUK/JASA (KEGIATAN USAHA) JASA ANGKUTAN

Angkutan Bandara

Angkutan Bandara melayani perjalanan pelanggan dari dan menuju bandara. Angkutan Bandara dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya sehingga dapat menjangkau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan. Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus memberikan pelayanan terbaiknya dengan tarif relatif murah, aman, dan nyaman.

Bandara yang telah dilayani DAMRI antara lain:

1. Bandara Kualanamu, Medan
2. Bandara Silangit, Tapanuli Utara
3. Bandara Internasional Minangkabau, Padang
4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru
5. Bandara Hang Nadim, Batam
6. Bandara Depati Amir, Bangka Tengah
7. Bandara Fatmawati Soekarno-Putri, Bengkulu
8. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang
9. Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta
10. Bandara Internasional Kertajati, Majalengka
11. Bandara Ahmad Yani, Semarang
12. Bandara Adi Sumarmo, Boyolali
13. Bandara Adi Sutjipto, Sleman

business activity, the Company may carry out business activities in the context of optimizing the utilization of potential resources that are already owned and/or controlled by the Company as determined by the Minister.

All business activities listed in the Articles of Association have been carried out by the Company.

PRODUCT/SERVICES (BUSINESS ACTIVITIES) TRANSPORTATION SERVICES

Airport Transportation

Airport Transportation serves customers journeying to and from the airport. Airport transportation can be integrated with other transportation modes so that it can reach strategic areas or other areas that have the potential for trip generation and attraction. This customer satisfaction-oriented service will continue to provide the best services that are safe and comfortable, and with relatively cheap fares.

Airports that have been served by DAMRI :

1. Kualanamu Airport, Medan
2. Silangit Airport, North Tapanuli
3. Minangkabau International Airport, Padang
4. Sultan Syarif Kasim II Airport, Pekanbaru
5. Hang Nadim Airport, Batam
6. Depati Amir Airport, Bangka Tengah
7. Fatmawati Soekarno-Putri Airport, Bengkulu
8. Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang
9. Halim Perdanakusuma Airport, Jakarta
10. Kertajati International Airport, Jakarta
11. Ahmad Yani Airport, Semarang
12. Adi Sumarmo Airport, Boyolali
13. Adi Sutjipto Airport, Sleman

Angkutan Antar-Kota

Pelayanan Angkutan Antar-Kota meliputi jaringan pelayanan 33 kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Cabang yang melayani Angkutan Antar-Kota adalah Serang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandung, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Surakarta, Purwokerto, Cilacap, Purworejo, Pontianak, Kefamenanu, Kendari, Mamuju, Mataram, Palu, Makassar, Banyuwangi, Denpasar, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Manado, Gorontalo, Ambon, dan Jayapura.

Angkutan Antar-Kota menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek, terdiri atas Angkutan Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar-Kota Antar Provinsi (AKAP).

1. Angkutan Antar-Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
2. Angkutan Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi.

Angkutan Perkotaan

Angkutan Perkotaan melayani kebutuhan transportasi masyarakat dalam trayek perkotaan (dalam wilayah kota, ibukota provinsi, dan kabupaten), baik reguler maupun BRT (Bus Rapid Transit), dengan rute yang sudah ditentukan. Pelayanan mencakup 10 (sepuluh) kota besar di seluruh Indonesia, yakni Medan, Batam, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Makassar, dan Manado.

Angkutan Lintas Batas Negara

Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melintasi batas negara dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. DAMRI memelopori transportasi lintas-batas

Inter-City Transporation

Inter-City Transport Services include a service network of 33 major cities in Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan and Papua. Branches that serve inter-city transportation are Serang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandung, Bandar Lampung, Jakarta, Bogor, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Surakarta, Purwokerto, Cilacap, Purworejo, Pontianak, Kefamenanu, Kendari, Mamuju, Mataram, Palu, Makassar, Banyuwangi, Denpasar, Malang, Pamekasan, Ponorogo, Manado, Gorontalo, Ambon, and Jayapura.

Inter-City Transportation consists of public buses tied to routes, consisting of Inter-City Transport in the Province (AKDP) and Inter-City Transport Inter-Province (AKAP).

1. *Inter-City Transport in the Province (AKDP) is transport through from one city to another city through regencies/cities in one province.*
2. *Inter-City Transport Inter-Province (AKAP) is transport from one city to another city through regencies/cities in more than one province.*

Urban Transportation

Urban Transportation serves the transportation needs of the communities on urban routes (within the city, provincial capitals, and regencies), both regular and BRT (Bus Rapid Transit), with predetermined routes. Services cover 10 (ten) major cities throughout Indonesia, namely Medan, Batam, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Makassar, and Manado.

Cross-border Transportation

Cross-border transportation is transportation from one city to another that crosses national borders using public buses that are tied to the route. DAMRI pioneered cross-border transportation between Indonesia-Malay-

antarnegara Indonesia-Malaysia, dengan trayek Pontianak (Indonesia)-Kuching (Malaysia). Selain itu DAMRI juga melayani trayek Pontianak-Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam).

Angkutan Perintis

Angkutan Perintis melayani daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan lain. Angkutan Perintis merupakan tugas dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kantor Cabang DAMRI yang melayani Angkutan Perintis antara lain Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kaltara, Mataram, Kupang, Ende, Waingapu, Kefamenanu, Mamuju, Kendari, Palu, Jayapura, Sorong, Serui, Biak, Nabire, Mimika, Manokwari, Merauke, Ambon, Halmahera, Gorontalo, Manado, Batam, Bandung, Bogor, Pekanbaru, Palangkaraya, Cilacap, Makassar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Ponorogo, Namlea, Sarmi, dan Sorong Selatan.

Angkutan Paket/Barang

Angkutan Barang adalah untuk melayani pengiriman barang dengan menggunakan mobil barang (truck/box). Angkutan barang DAMRI tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain angkutan paket/barang Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, dan Makassar. DAMRI juga melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk tujuan Jambi, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, dan Mataram.

Angkutan Travel atau Pariwisata

Angkutan Travel merupakan salah satu unit kerja pada DAMRI yang khusus melayani angkutan travel atau pariwisata dengan menggunakan kendaraan microbus dan bus besar. Angkutan travel atau pariwisata selain ada di Jakarta, juga terdapat di Kantor Cabang DAMRI yang lainnya di wilayah Indonesia.

sia, with the Pontianak (Indonesia)-Kuching (Malaysia) route. In addition, DAMRI also serves the Pontianak-Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) route.

Pioneer Transportation

Pioneer Transportation serves remote and isolated areas that have not been served by other transportation companies. Pioneer Transportation is an assignment from the government to meet the public's need for transportation.

This activity is carried out in 47 regencies/cities throughout Indonesia. DAMRI Branch Offices providing Pioneer Transport include Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kaltara, Mataram, Kupang, Ende, Waingapu, Kefamenanu, Mamuju, Kendari, Palu, Jayapura, Sorong, Serui, Biak, Nabire, Mimika, Manokwari, Merauke, Ambon, Halmahera, Gorontalo, Manado, Batam, Bandung, Bogor, Pekanbaru, Palangkaraya, Cilacap, Makassar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Ponorogo, Namlea, Sarmi, and South Sorong.

Freight/Package Transportation

Freight Transport provides the delivery of goods by using a car (truck / box). DAMRI's goods transportation is spread across several regions in Indonesia, including transportation of packages/goods from Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, and Makassar. DAMRI also cooperates with PT Pos Indonesia (Persero) for destinations of Jambi, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, and Mataram.

Travel or Tourism Transportation

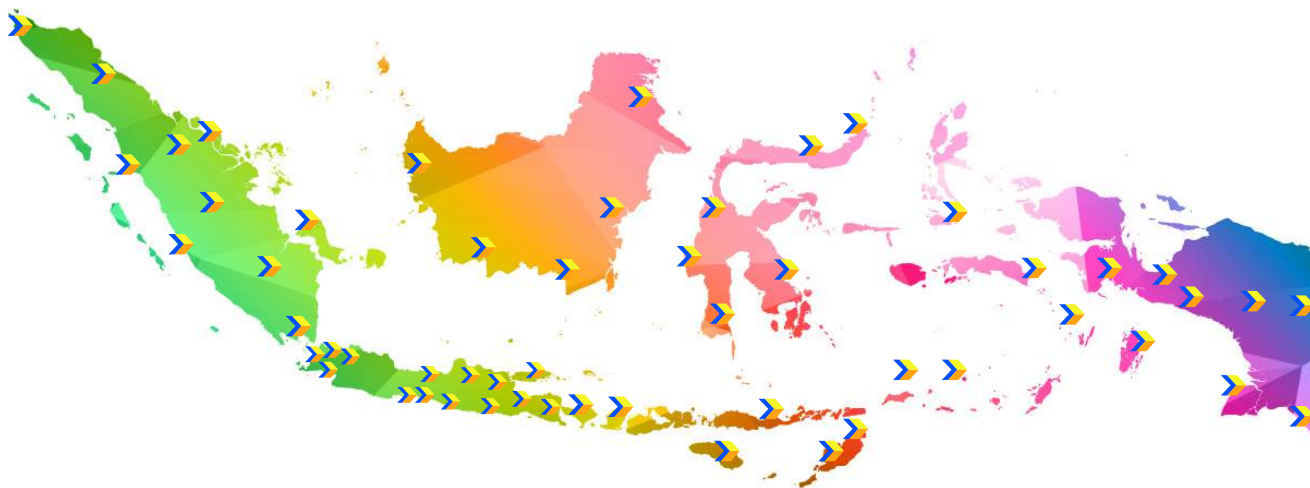
Travel Transportation is one of the work units at DAMRI that specifically serves travel or tourism transportation using microbus vehicles and large buses. Apart from being in Jakarta, travel or tourism transport is also available at other DAMRI Branch Offices in Indonesia.

WILAYAH OPERASI

Per 31 Desember 2021, DAMRI memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Divisi Regional, dan memiliki 57 (lima puluh delapan) Kantor Cabang.

OPERATING AREA

As of 31 December 2021, DAMRI has 1 (one) Head Office, 4 (four) Regional Division Offices, and 57 (fifty eight) Branch Offices.



WILAYAH USAHA, NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN Operating Areas, Name and Address of Branch or Representative Offices

Nama Kantor Offices	Alamat Address	Telp/Fax/Situs Web Phone/fax/website
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Jln. Matraman Raya No 25 - Jakarta	Telp: 021 8583131 Fax: - Email: pusat@damri.co.id
Kantor Divisi Regional (Divre) I <i>Regional I Division Office</i>	Jln. Angkasa No. 17 B Kemayoran - Jakarta	Telp: 021 4246802 Fax: - Email: divre.area1@damri.co.id
Bandara Soekarno-Hatta	Jln. Tipar No. 39 Cakung - Jakarta	Telp: 021 4603708 Fax: - Email: cabang.basoetta@damri.co.id
Strategic Business Unit Trans Jakarta Busway (SBU TJBW) Koridor 1 dan 8	Jln. KRT. Radjiman Widyodiningrat - Jakarta	Telp: 021 29832817 Fax: - Email: sbu.tjbw18@damri.co.id
Jakarta	Jln. Angkasa No. 17-B, Kemayoran - Jakarta	Telp: 021 4245783 Fax: - Email: cabang.jakarta@damri.co.id
Kantor Cabang Logistik	Jln. KRT. Radjiman Widyodiningrat - Jakarta	Telp: 021 4602373 Fax: - Email: admin.logistik@damri.co.id
Bogor	Jln. Raya Cipaku, Batutulis No. 17 - Bogor	Telp: 0251 8328921 Fax: - Email: cabang.bogor@damri.co.id

Nama Kantor Offices	Alamat Address	Telp/Fax/Situs Web Phone/fax/website
Bandung	Jln. Soekarno-Hatta No. 787 - Bandung	Telp: 022 7800506 Fax: - Email: cabang.bandung@damri.co.id
Serang	Jln. Mayor Syaefi No. 56 - Serang	Telp: 0254 221175 Fax: - Email: cabang.serang@damri.co.id
Bandar Lampung	Jln. Kapt. Abd. Haq No. 28 - Lampung	Telp: 0721 706532 Fax: - Email: cabang.lampung@damri.co.id
Palembang	Jln. Kolonel Burlan Km. 9 - Palembang	Telp: 0711 416526 Fax: - Email: cabang.palembang@damri.co.id
Jambi	Jln. Kapten Pattimura Km. 8 No. 1 - Jambi	Telp: 0741 3051485 Fax: - Email: cabang.jambi@damri.co.id
Medan	Jln. Raya Tg. Morawa Km. 10 - Medan	Telp: 061 7865466 Fax: - Email: cabang.medan@damri.co.id
Banda Aceh	Jln. Twk. Hasyim Bantamuda No.24 - Aceh	Telp: 0651 635586 Fax: - Email: cabang.aceh@damri.co.id
Bengkulu	Jln. Mayjen Sutoyo Km 6 - Bengkulu	Telp: 0736 20465 Fax: - Email: cabang.bengkulu@damri.co.id
Pangkal Pinang	Jln. Muntok No.24 - Pangkal Pinang	Telp: 0717 421631 Fax: - Email: cabang.pangkalpinang@damri.co.id
Padang	Jln. Parak Anau (Wisma Indah Parupuk) - Padang	Telp: 0751 7052137 Fax: - Email: cabang.padang@damri.co.id
Riau	Jln. Sultan Ismail Pel Siak Sri Indrapura - Pekanbaru Riau	Telp: 081284555599 Fax: - Email: cabang.pekanbaru@damri.co.id
Batam	Jln. Brigjen Katamso, Tg. Uncang - Batam	Telp: 085252252930, 088746454396 Fax: - Email: cabang.batam@damri.co.id
Kantor Divisi Regional (Divre) II <i>Regional II Division Office</i>	Jln. Mpu Tantular No. 8 - Semarang	Telp: 0243544712 Fax: - Email: divre.area2@damri.co.id
Purwokerto	Jln. Pasar No.23 - Purwokerto	Telp: 0281 636064 Fax: - Email: cabang.purwokerto@damri.co.id
Cilacap	Jln. Jend. A. Yani No.21 - Cilacap	Telp: 0282 534018 Fax: - Email: cabang.cilacap@damri.co.id
Purworejo	Jln. Gajah Mada Km. 7 - Purworejo	Telp: 0275 321387 Fax: - Email: cabang.purworejo@damri.co.id
Yogyakarta	Jln. Ring Road Timur, Banguntapan - Yogyakarta	Telp: 0274 371450, 375839 Fax: - Email: cabang.yogyakarta@damri.co.id

Nama Kantor Offices	Alamat Address	Telp/Fax/Situs Web Phone/fax/website
Surakarta	Jln. Raya Palur - Surakarta	Telp: 0271 825411 Fax: - Email: cabang.surakarta@damri.co.id
Pontianak	Jln. Sultan Hamid II - Pontianak	Telp: 0561 7076849 Fax: - Email: cabang.pontianak@damri.co.id
Banjarmasin	Jln. Trikora RT.027 - Banjarmasin	Telp: 0511 7946595 Fax: - Email: cabang.banjarmasin@damri.co.id
Samarinda	Jln. A. Wahab Syahrani No.67 - Samarinda	Telp: 0541 7776890 Fax: - Email: cabang.samarinda@damri.co.id
Tanjung Selor	Jln. Sengkawit Ruko Pasar Induk Gedung II No 8 - Tanjung Selor	Telp: 085346435559 Fax: - Email: cabang.tanjungselor@damri.co.id
Palangkaraya	Jln. Cilik Riwayat Km. 7 - Palangkaraya	Telp: 0536 3231228 Fax: - Email: cabang.palangkaraya@damri.co.id
Kantor Divisi Regional (Divre) III <i>Regional III Division Office</i>	Jln. Kali Rungkut No. 7A - Surabaya	Telp: 031 8490118 Fax: - Email: divre.area3@damri.co.id
Malang	Jln. Letjend. S. Parman No.11 - Malang	Telp: 0341 473586 Fax: - Email: cabang.malang@damri.co.id
Surabaya	Jln. Raya Kalirungkut No. 7A - Surabaya	Telp: 031-8482803 Fax: - Email: cabang.surabaya@damri.co.id
Ponorogo	Jln. Jend. Sudirman No. 8 - Ponorogo	Telp: 0352 481357 Fax: - Email: cabang.ponorogo@damri.co.id
Banyuwangi	Jln. Jend. A. Yani No. 49 - Banyuwangi	Telp: 0333 424313 Fax: - Email: cabang.banyuwangi@damri.co.id
Pamekasan	Jln. Stadion No. 111 - Pamekasan	Telp: 0324 321585 Fax: - Email: cabang.pamekasan@damri.co.id
Jember	Jln. MH. Thamrin No. 12 - Jember	Telp: 0331 336385 Fax: - Email: cabang.jember@damri.co.id
Denpasar	Jln. P. Diponegoro No. 149 - Denpasar	Telp: 0361 235923 Fax: - Email: cabang.denpasar@damri.co.id
Mataram	Jln. Tgh. Faisal No. 1 - Mataram	Telp: 0370 671240 Fax: - Email: cabang.mataram@damri.co.id
Kupang	Jln. Timor Raya Km. 11 Lasiana - Kupang	Telp: 0380 8551788 Fax: - Email: cabang.kupang@damri.co.id
Waingapu	Jln. Adam Malik Km. 8 - Waingapu	Telp: 081218318511, 085253511337 Fax: - Email: cabang.waingapu@damri.co.id

Nama Kantor Offices	Alamat Address	Telp/Fax/Situs Web Phone/fax/website
Ende	Jln. Mahoni, Kel. Kota Ratu - Ende	Telp: 0381 22467, Fax: - Email: cabang.ende@damri.co.id
Kefamenanu	Jln. Jurusan Kupang Km. 9, Kab. Ttu - Kefamenu	Telp: 0388 2433016, Fax: - Email: cabang.kefamenanu@damri.co.id
Makassar	Jln. P. Kemerdekaan Km. 14, Daya - Makassar	Telp: 0411 510 155, Fax: - Email: cabang.makassar@damri.co.id
Mamuju	Jln. Gatot Subroto No. 37 - Mamuju	Telp: 0426 2324864, Fax: - Email: cabang.mamuju@damri.co.id
Gorontalo	Gedung IT Terminal Tipe A Isimu Jln. Amala Mantu Desa Dutohe - Gorontalo	Telp: 0822 9196 0999, Fax: - Email: cabang.gorontalo@damri.co.id
Manado	Jln. Baru Tugu Adipura Km. 1 - Manado	Telp: 0431 818086, Fax: - Email: cabang.manado@damri.co.id
Palu	Jln. P. Diponegoro No.61 - Palu	Telp: 085397077715, Fax: - Email: cabang.palu@damri.co.id
Kendari	Jln. Brigjen. Katamso No.99 - Kendari	Telp: 0401 3195968, Fax: - Email: cabang.kendari@damri.co.id
Kantor Divisi Regional (Divre) IV <i>Regional IV Division Office</i>	Ex. Bengkel Induk PU Jln. Pasifik Indah, Pasir 2 - Jayapura	Telp: - Fax: - Email: divre.area4@damri.co.id
Jayapura	Ex. Bengkel Induk PU Jln. Pasifik Indah, Pasir 2 - Jayapura	Telp: 082238039933, Fax: - Email: cabang.jayapura@damri.co.id
Merauke	Jln. Kuprik No.102 - Merauke	Telp: 0971 3331499, Fax: - Email: cabang.merauke@damri.co.id
Sorong	Jln. Basuki Rahmat Km. 10 - Sorong	Telp: 0951 322385, Fax: - Email: cabang.sorong@damri.co.id
Manokwari	Jln. Percetakan Negara No. 276 - Manokwari	Telp: 081218884853, Fax: - Email: cabang.manokwari@damri.co.id
Biak	Jln. Sorido Raya - Biak	Telp: 081248940538, Fax: - Email: cabang.biak@damri.co.id
Nabire	Jln. Trikora Kota Lama (Samping GOR) - Nabire	Telp: -, Fax: - Email: cabang.nabire@damri.co.id
Serui	Jln. Sumatra - Serui	Telp: 082199442266, Fax: - Email: cabang.serui@damri.co.id
Mimika	Jln. C. Heatu Bun, Kab. Mimika - Mimika	Telp: 0901 3268232, Fax: - Email: cabang.mimika@damri.co.id
Ambon	Jln. Laksda Leo Wattimena, Bdesa Nania Kec. Baguala - Ambon	Telp: 0911 361369, Fax: - Email: cabang.ambon@damri.co.id
Sarmi	Jln. Syan Mor - Mararena - Sarmi	Telp: -, Fax: - Email: cabang.sarmi@damri.co.id
Namlea	Jln. Terminal Tatanggo - Namlea	Telp: -, Fax: - Email: cabang.namlea@damri.co.id
Halmahera	Jln. Komplek Pemerintahan Halut - Halmahera	Telp: 0924 2621499, Fax: - Email: cabang.halmahera@damri.co.id
Sorong Selatan	Jln. Terminal Boan - Ayamaru - Sorong Selatan	Telp: - Fax: - Email: cabang.sorongsal@damri.co.id

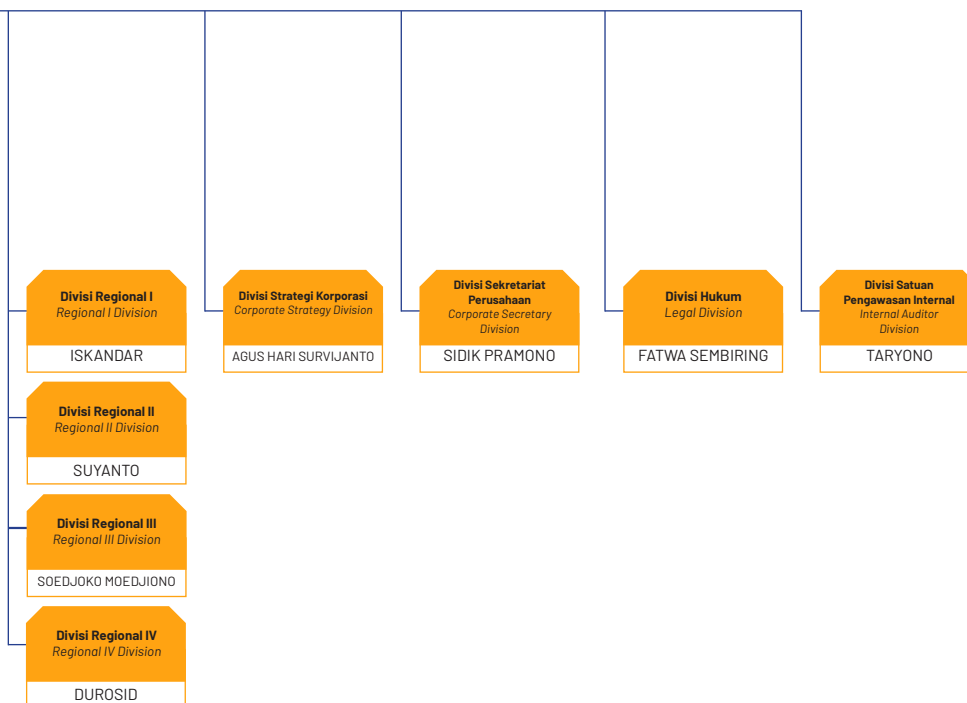




STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

Berdasarkan SK.4944.01/HK.101/SK/00/DU/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Kantor Pusat, kemudian diperbarui dengan SK.5225.00/HK.101/SK/00/DU/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.4944.01/HK.101/SK/00/DU/2021 tanggal 28 April tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Kantor Pusat.

Based on Decree 4944.01/HK.101/SK/00/DU/2021 dated 28 April 2021 regarding Changes in Organizational Structure and Work Procedures for Public Company (Perum) DAMRI Head Office, later updated with Decree 5225.00/HK.101/SK/00/DU/2021 dated 8 September 2021 regarding the First Amendment to the Decree of the Board of Directors of Perum DAMRI Number: Decree 4944.01/HK.101/SK/00/DU/2021 dated 28 April concerning Changes in the Organizational Structure and Work Procedure of Public Company (Perum) DAMRI Head Office.





INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI *INFORMATION ON THE MAIN AND CONTROLLING SHAREHOLDERS*

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perum DAMRI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali dari Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Until 31 December 2021, Perum DAMRI is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Accordingly, the Main and Controlling Shareholder of the Company is the Government of the Republic of Indonesia.





PROFIL DEWAN PENGAWAS

PROFILE OF THE SUPERVISORY BOARD

SAM BUDIGUSDIAN

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	58 tahun, per 31 Desember 2021 Cirebon, 13 Agustus 1963	58 years old, per 31 December 2021, Cirebon, 13 August 1963
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan berdasarkan SK-415/MBU/12/2021 tanggal 27 Desember 2021.	Appointed as Chairman of the Supervisory Board and concurrently a Member of the Company's Independent Supervisory Board based on Decree 415/MBU/12/2021 dated 27 December 2021.
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	AKABRI tahun 1986, PTIK tahun 1997, Sespim Pol tahun 2001, Sespati Polri tahun 2009, Lemhanas 48 pada tahun 2012.	AKABRI in 1986, PTIK in 1997, Sespim Pol in 2001, Sespati Polri in 2009, Lemhanas 48 in 2012.
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI). Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi dengan berbagai area penugasan di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk di antaranya sebagai Kepala Polda Kepulauan Riau (2015-2016), Wakil Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Wakakorlantas) Polri (2014-2015), serta Direktur Lalu Lintas pada Polda Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.	Served as an Expert Staff for Review of Law and Human Rights at the Indonesian National Defense Institute (Lemhanas RI). Member of the Indonesian National Police with the last rank of Police Inspector General (Irjen), with various assignments areas at home and abroad, including as Head of the Riau Islands Police Force (2015-2016), Deputy Head of the Traffic Police Corps (Wakakorlantas) Polri (2014-2015), as well as the Director of Traffic at the Regional Police of East Java, Central Java, East Kalimantan, and Central Kalimantan.
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholder
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms in the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	



YUDI YUDHAWAN *

Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board

* menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan sampai dengan 15 Maret 2022
*served as member of the Company Supervisory Board until 15 March 2022

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	50 tahun, per 31 Desember 2021, Lahat, 21 Januari 1971	50 years, per 31 December 2021, Lahat, 21 January 1971
Domisili <i>Domicile</i>	Kota Tangerang, Indonesia	Tangerang City, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan ber- dasarkan SK-201/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019	Appointed as member of the Company Supervisory Board based on Decree 201/MBU/09/2019 dated 13 September 2019
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung (1989-1995).	Bachelor (S1) Law from Padjajaran University Band- ung(1989-1995)
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif BUMN pada Keasdepan Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Hukum BUMN II pada Keasdepan Layanan Hukum BUMN, Kementerian BUMN (2015-2017), Kepala Bagian Pelayanan Hukum II pada Biro Hukum, Kement- erian BUMN (2014-2015), Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum IIb pada Biro Hukum, Kementerian BUMN (2010-2014), Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian BUMN (2006-2010), Kepala Sub Bagian Peraturan Perun- dang-undangan I pada Biro Hukum Kemnterian BUMN (2002-2006), Kepala Seksi Pendanaan dan Sumber Daya Jasa Pembiayaan pada Direktorat Persero Jasa Keuan- gan, Ditjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan (2001-2002).	He served as Head of the Human Resources SOE Executive Policy Division at the Assistant Deputy Human Resources Management of SOEs Ministry. Previously he served as Head of SOE II Legal Services in the Assistant Deputy for SOE Legal Services, SOEs Ministry (2015- 2017), Head Bureau of Legal Services II at the Legal Bu- reau, SOEs Ministry (2014-2015), Head of Sub-Section for Legal Services and Assistance IIb in Legal Bureau, SOEs Ministry (2010-2014), Head of Litigation Sub-Section at the Bureau of Law and Public Relations, SOEs Ministry (2006-2010), Head of Sub-Division of Legislation I at the Legal Bureau of SOEs Ministry (2002-2006), Head of Sec- tion for Funding and Resources for Financing Services at the Directorate of Persero Financial Services, Direc- torate General of State-Owned Enterprise Development, Finance Ministry (2001-2002).
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: Kepala Polda Sulawesi Tenggara, sebelumnya adalah Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi pada Deputi Intelijen Ekonomi, Kepala Pusat Pengelolaan Data Per- sonel Pusat Lahjiantapers Aparatur Pemerin- tah dan Non Pemerintah	Inside the Company: - Outside the Company: Head of Sulawesi Tenggara Polda, previously Directorate for Planning Control Activity and Operation at the Economic Intelligence Dep- uty, Head of Central Personnel Data Manage- ment Lahjiantapers Government Apparatus and Non Government
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota De- wan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms as member of the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	

HENDA TRI RETNADI *

Anggota Dewan Pengawas Member of the Supervisory Board



*menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan sejak 15 Maret 2022
*served as member of the Company Supervisory Board since 15 March 2022

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	51 tahun, per 31 Desember 2021, Cilacap, 11 Maret 1966	51 years old, per 31 December 2021, Cilacap, 11 March 1966
Domisili <i>Domicile</i>	Kota Jakarta Timur, Indonesia	East Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan ber- dasarkan SK-77/MBU/03/2022 tanggal 15 Maret 2022	Appointed as member of the Company Supervisory Board based on Decree 77/MBU/03/2022 dated 15 March 2022
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Jenderal Soedirman (1985-1990) dan Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Polri (2002-2004).	Bachelor of Economics (S1) from Jenderal Sudirman University (1985-1990) and Master of Management from Bhayangkara Police University (2002-2004).
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Menjabat sebagai Analis Manajemen Risiko pada Keasdepan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Se- belumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Umum PT Perikanan Nusantara (Persero) pada 2019-2021, Direktur Keuangan, SDM, dan Umum Perum Jasa Tirta I (2017-2019).	Served as a Risk Management Analyst at the Assis- tant Deputy Risk Management of the SOEs Ministry. Previously, he served as Director of Finance, HR, and General Affairs at PT Perikanan Nusantara (Persero) in 2019-2021, Director of Finance, HR, and General Affairs at Perum Jasa Tirta I (2017-2019).
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: • Analis Manajemen Risiko pada Keasdepan Mana- ajemen Risiko Kementerian BUMN	Inside the Company: - Outside the Company: • Risk Management Analyst at the Assistant Deputy for Risk Management, SOEs Ministry
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota De- wan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms as member of the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	



TEGUH PRISTIWANTO *

Anggota Dewan Pengawas

Member of the Supervisory Board

* menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan sampai dengan 11 November 2021

*Served as member of Company Supervisory Board until 11 November 2021

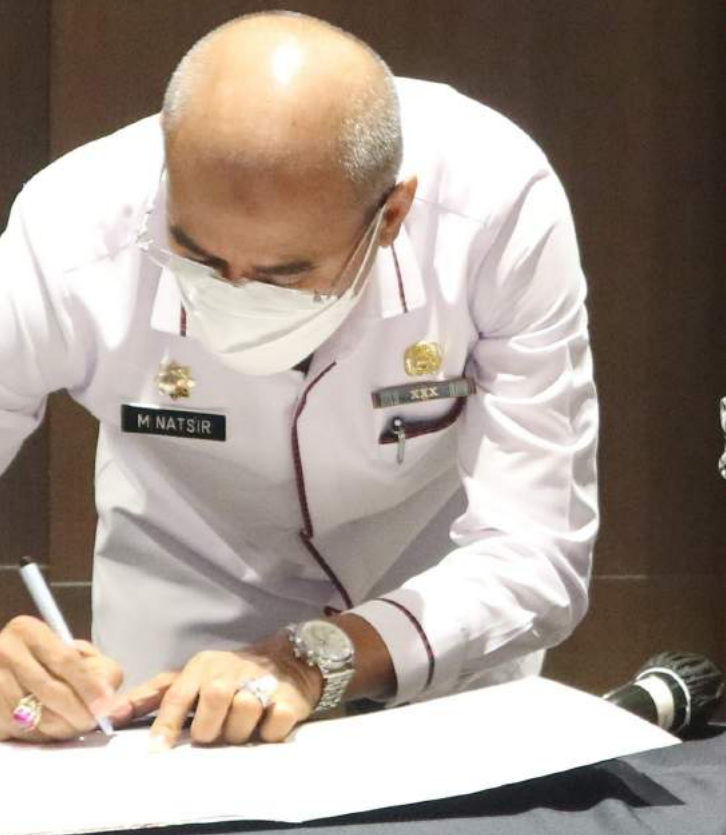
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	56 tahun, per 31 Desember 2021, Gembong, 7 April 1966	56 years old, per 31 December 2021, Gembong, 7 April 1966
Domisili <i>Domicile</i>	Kota Bandung	Bandung City
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan ber- dasarkan SK-92/MBU/05/2019 tanggal 08 Mei 2019	Appointed as member of the Company Supervisory Board based on Decree 92/MBU/05/2019 dated 08 May 2019
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)	Bachelor (S1) from Police Science College (PTIK)
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, pernah menjadi Pama pada Akpol, Danton I KI IV YON TK I KI IV Mentarsis Akpol, Kasubnit Patwal Satlantas Polwiltabes Surabaya, Wakasat Lantas Polres Probolinggo Polda Jatim, Kapuskodal Ops Polres Asahan Polda Sumut, Kasi Ops Satbrimob Sumut, Ps Danyon A Satbrimob Sumut 27-8-2001 Ps Danyon A Satbrimob Sumut, Ps Danyon A Men II Korbrimob Deops Polri, Ps Danyon C Men III Korprimob Deops Polri, Kasat Brimob Polda NTB, Pamen Polda Jateng, Kapolres Rembang Polwil, Pati Polda Jateng, Dir Samapta Polda Maluku Utara, Dir Sabhara Polda Maluku, Dir Sabhara Polda Bali, Kapusdikmin Lemdikpol, Kasat Brimob Polda Metro Jaya, Kabag Infotek Rojanganbang Lemdikpol, Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdikpol, dan Irbidjemenopsnal I Itwil V Itwasum Polri.	
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Sekretariat Kabinet RI	Inside the Company: - Outside the Company: Deputy for Human Development and Culture at Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota De- wan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms as mem- ber of the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	

YULI HARSONO

Anggota Dewan Pengawas
Member of the Supervisory Board



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	54 tahun, per 31 Desember 2021	54 years old, per 31 December 2021
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, 21 Juli 1967	Jakarta, 21 July 1967
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan berdasarkan SK-274/MBU/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020	Appointed as member of the Company Supervisory Board based on Decree 274/MBU/08/2020 dated 31 August 2020
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1992; Master of Law (S2) dari The University of Sheffield, Inggris pada tahun 1997; dan Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012	Bachelor (S1) from the Faculty of Law from the University of Indonesia in 1992; Master of Law (S2) from The University of Sheffield, UK in 1997; and Doctor of Law (S3) from Padjadjaran University in 2012
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Menjabat sebagai Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Sekretariat Kabinet RI. Sebelumnya dipercaya sebagai pejabat berbagai bidang di Sekretariat Kabinet RI, di antaranya Staf Biro Peraturan Perundang-undangan (PUU) (1995-1999), Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Biro PUU I (1999-2001), Kepala Sub Bagian Pajak dan PNBPN Biro PUU I (2001-2004), Kepala Bagian Moneter dan Jasa Keuangan Biro PUU Bidang Perekonomian dan Industri (2004-2006), Asisten Deputy Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat (2011-2014), Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan (2014-2015), Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Dukungan Kerja Kabinet (2015-2019), dan Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019-sekarang).	Served as Deputy for Human Development and Culture at the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. Previously trusted as officials in various fields at the Secretariat of the Cabinet of the Republic of Indonesia, including the Staff of the Legislation Bureau (PUU) (1995-1999), Sub-Section Head of Natural Resources PUU I Bureau (1999-2001), Head of the Sub-Division of Taxes and PNBPN Bureau PUU I (2001-2004), Head of the Monetary and Financial Services PUU Bureau of the Economy and Industry Field (2004-2006), Assistant Deputy for Legislation on People's Welfare (2011-2014), Expert Staff to the Cabinet Secretary for Spatial Planning and Border Areas (2014-2015), Deputy Cabinet Secretary for Cabinet Work Support (2015-2019), and Deputy Cabinet Secretary for Human Development and Culture (2019-present).
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: • Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Sekretariat Kabinet RI	Inside the Company: - Outside the Company: • Deputy for Human Development and Culture at Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms as member of the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	





PROFIL DIREKSI

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS

SETIA N. MILATIA MOEMIN

Direktur Utama
President Director



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	60 tahun, per 31 Desember 2021, Jakarta, 24 Maret 1961	60 years old, per 31 December 2021, Jakarta, 24 March 1961
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia	
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-278/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017	Appointed as Board of Directors based on Decree 278/MBU/12/2017 dated 11 December 2017
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) Insinyur Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Indonesia dengan Konsentrasi Studi Transportasi, Universitas Indonesia (UI) pada 1983; gelar MBA (S2) dari School of Business and Management, Azusa Pacific University, a Christian University, Azusa, California, USA pada tahun 1994; dan Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti dengan konsentrasi Service Management pada tahun 2021	Bachelor (S1) in Civil Engineering, Faculty of Engineering from the University of Indonesia with a Concentration in Transportation Studies, University of Indonesia (UI) in 1983; an MBA (S2) from the School of Business and Management, Azusa Pacific University, a Christian University, Azusa, California, USA in 1994; and Doctorate (S3) of Economics from the Faculty of Economics and Business, Trisakti University with a concentration in Service Management in 2021
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Country Director Institute Transportation Development and Policy (ITDP) (2007-2012), Direktur Keuangan PT Eka Sari Lorena (2005-2006) Anggota Komite Audit PT Kereta Api Indonesia (2001-2003), Tim Advisor Dirjen Perhubungan Darat, Policy Writer Kabinet Indonesia Hebat (Jokowi-JK), Staf Ahli Khusus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Direktur Utama PT Trias Cipta OSG-PMDN, Direktur Utama PT Saoda Trias Cipta	Country Director Institute Transportation Development and Policy (ITDP) (2007-2012), Finance Director of PT Eka Sari Lorena (2005-2006) Member of the Audit Committee of PT Kereta Api Indonesia (2001-2003), Advisory Team for the Director General of Land Transportation, Policy Writer at Indonesia Hebat Cabinet (Jokowi-JK), Special Expert Staff of the Jabodetabek Transportation Management Agency (BPTJ), President Director of PT Trias Cipta OSG-PMDN, President Director of PT Saoda Trias Cipta
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholder
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Dewan Pengawas	Has not served more than 2 (two) terms in the Supervisory Board
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	



SANDRY PASAMBUNA*

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Director of Commercial and Business Development

* menjabat sebagai Direktur Perusahaan sampai dengan 31 Maret 2022

*Served as Company director until 31 March 2022

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	54 tahun, per 31 Desember 2021 Kotamobagu, 8 Agustus 1967	54 years old, per 31 December 2021 Kotamobagu, 8 August 1967
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-168/MBU/05/2020 tanggal 29 Mei 2020	Appointed as Company Board of Directors Decree 168/MBU/05/2020 dated 29 May 2020
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Insinyur dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, Environmental Policy and Management The Van Hall Institute Belanda, Magister Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta	Engineer from the Faculty of Civil Engineering, Sam Ratulangi University, Manado, Environmental Policy and Management The Van Hall Institute Netherlands, Master in Petroleum Engineering UPN Veteran Yogyakarta
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Construction Supervisor, Production Supervisor di Cement Bag Making & Cement Dispatch Plant pada PT Semen Bosowa, Site Manager Seaweed Plant Project, PT Bantimurung Indah Bosowa, Sr. Construction Spt./CSR (Company Site Representative) Total E&P Indonesia, Sr. Construction Spt. di Mobil Cepu Limited (ExxonMobil Oil Indonesia), Project SPA (Single Point Accountability) Project Manager di KODECO Energy Co., Ltd. , Head of Project Delivery di PHE-WMO dan Commissioning & Quality Control Manager di PHE-ONWJ	Construction Supervisor, Production Supervisor at Cement Bag Making & Cement Dispatch Plant at PT Semen Bosowa, Site Manager Seaweed Plant Project, PT Bantimurung Indah Bosowa, Sr. Construction Spt./CSR (Company Site Representative) Total E&P Indonesia, Sr. Construction Spt. at Mobil Cepu Limited (ExxonMobil Oil Indonesia), Project SPA (Single Point Accountability) Project Manager at KODECO Energy Co., Ltd. Head of Project Delivery at PHE-WMO and Commissioning & Quality Control Manager at PHE-ONWJ
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direksi Perusahaan	Has not served more than 2 (two) periods as member of the Company Board of Directors
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	

JONI PRASETIYANTO

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	53 tahun, per 31 Desember 2021 Mojokerto, 10 November 1968	53 years old, per 31 December 2021 Mojokerto, 10 November 1968
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia	
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-05/MBU/01/2021 tanggal 7 Januari 2021	Appointed as member of Company Board of Directors based on Decree 05/MBU/01/2021 dated 7 January 2021
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana Hukum Perdata dari Universitas Brawijaya dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia	Bachelor of Civil Law from Brawijaya University and Master of Business Law from University of Indonesia
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Kelahiran 10 November 1968, di Mojokerto. Sebelum diangkat menjadi Direktur Keuangan Perum DAMRI, Joni menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Operasi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selama lebih dari 25 tahun, Joni berkarier di BTN dengan berbagai area penugasan. Sebelum berkarier di BUMN, Joni bekerja di PAN Indonesia Bank LTD bagian Seksi Teller dan Wesel, Centris INT. Bank Jakarta bagian kredit, dan menjadi Dosen Tidak Tetap di Universitas Nasional. Menyandang gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia, dan Sarjana Hukum Perdata dari Universitas Brawijaya.	
	Born November 10, 1968, in Mojokerto. Prior to being appointed as Finance Director of Perum DAMRI, Joni served as Head of Operational Credit Division at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. For more than 25 years, Joni has had a career at BTN with various assignment areas. Prior to his career in BUMN, Joni worked at PAN Indonesia Bank LTD in the Teller and Wesel Section, Centris INT. Bank Jakarta credit department, and became a Non-Permanent Lecturer at the National University. Holds a Master of Business Law degree from the University of Indonesia, and a Bachelor of Civil Law from Brawijaya University.	
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholder
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direksi Perusahaan	Has not served more than 2 (two) periods as member of the Company Board of Directors
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	



ARIFIN

Direktur Teknik dan Fasilitas
Director of Engineering and Facilities

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	50 tahun, per 31 Desember 2021 Jombang, 16 November 1971	50 years old, per 31 December 2021 Jombang, 16 November 1971
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia	
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-166/MBU/07/2019 tanggal 31 Juli 2019	Appointed as member of the Company Board of Directors based on Decree 166/MBU/07/2019 dated 31 July 2019
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) Fisika dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta pada tahun 1995, dan gelar (S2) Manajemen Transportasi dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta pada tahun 2011	Bachelor (S1) in Physics from the Jakarta Institute of Teacher Training and Education in 1995, and a degree (S2) in Transportation Management from the Jakarta National Development University in 2011
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Berkarier di Perusahaan sebagai Area Manager Divisi Regional III (2018-2019), Senior Manager Sekretariat Perusahaan (2015-2018), Area Manager Divisi Regional I (2014-2015), Senior Manager Sub Direktorat SDM (2012-2014), Kepala Sub Direktorat Personalia Kantor Pusat DAMRI (2011-2012), Ph Kepala Sub Direktorat Umum dan Rumah Tangga (2011), Kepala Seksi Diklat Sub Direktorat Personalia (2007-2011), Kepala Seksi Tata Usaha Personalia (2003-2007).	Career in the Company as Area Manager of Regional Division III (2018-2019), Senior Manager of Corporate Secretariat (2015-2018), Area Manager of Regional Division I (2014-2015), Senior Manager of HR Sub-Directorate (2012-2014), Head of Sub-Directorate DAMRI Head Office Personnel (2011-2012), Ph. Head of General and Household Sub-Directorate (2011), Head Section of Education and Training of Personnel Sub-Directorate (2007-2011), Head Section of Personnel Administration (2003-2007).
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direksi Perusahaan	Has not served more than 2 (two) periods as member of the Company Board of Directors
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	

SITI INDA SURI

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Director of Human Capital and General Affairs



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	61 tahun, per 31 Desember 2021 Jakarta, 8 Agustus 1960	61 years old, per 31 December 2021 Jakarta, 8 August 1960
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta	
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-166/MBU/07/2019 tanggal 31 Juli 2019	Appointed as member of the Company Board of Directors based on Decree 166/MBU/07/2019 dated 31 July 2019
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia pada tahun 1986	Bachelor (S1) in Social and Political Sciences from the University of Indonesia in 1986
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	HR Director PT Cowell Development Tbk (2014-2017), Head of HR Bentoel Group – a subsidiary of British American Tobacco in Indonesia (2006-2014), Vice President – Human Resources and General Affairs PT MetLife Sejahtera – Jakarta (2002-2005), HR Manager PT BAT (British American Tobacco) Indonesia Tbk. – Jakarta (1997-2002), Office Manager Westinghouse Electric S.A., Jakarta (1993-1997), dan Customer and Inbound Services Manager PT Crown Pacific Jaya, Jakarta (1990-1993)	HR Director PT Cowell Development Tbk (2014-2017), Head of HR Bentoel Group – a subsidiary of British American Tobacco in Indonesia (2006-2014), Vice President – Human Resources and General Affairs PT MetLife Sejahtera – Jakarta (2002-2005), HR Manager of PT BAT (British American Tobacco) Indonesia Tbk. – Jakarta (1997-2002), Office Manager Westinghouse Electric S.A., Jakarta (1993-1997), and Customer and Inbound Services Manager PT Crown Pacific Jaya, Jakarta (1990-1993)
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholder
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direksi Perusahaan	Has not served more than 2 (two) periods as member of the Company Board of Directors
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	



DADAN RUDIANSYAH*

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Director of Commercial and Business Development

* menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 18 April 2022

*Served as Company director since 18 April 2022

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia, tempat, tanggal lahir <i>Age, place and date of birth</i>	50 tahun, per 31 Desember 2021, Kota Tasikmalaya, 3 Desember 1972	50 years old, per 31 December 2021, Kota Tasikmalaya, 3 December 1972
Domisili <i>Domicile</i>	Kota Bandung, Indonesia	
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Direksi Perusahaan berdasarkan SK-100/MBU/04/2022 tanggal 18 April 2022	Appointed as member of the Company Board of Directors based on Decree 100/MBU/04/2022 dated 18 April 2022
Latar Belakang Pendidikan <i>Academic background</i>	Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (lulus '996)	Bachelor of Law from Bandung School of Law (graduated '996)
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Pernah menjabat sebagai Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada 2021 dan Komisaris PT Jaklingko 2020-2021. Memulai karier di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan berbagai jabatan seperti Executive Vice President Corporate Secretary (2020-2021), Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta (2017-2020), Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya (2017), dan Executive Vice President Legal (2013-2017).	Previously served as Commercial Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 2021 and Commissioner of PT Jaklingko 2020-2021. Started his career at PT Kereta Api Indonesia (Persero) with various positions such as Executive Vice President Corporate Secretary (2020-2021), Executive Vice President Operation Area 1 Jakarta (2017-2020), Executive Vice President Operation Area 8 Surabaya (2017), and Executive Vice President Legal (2013-2017).
Rangkap Jabatan <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: - Di luar Perusahaan: -	Inside the Company: - Outside the Company: -
Hubungan Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama	Is not affiliated with a member of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders
Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direksi Perusahaan	Has not served more than 2 (two) periods as member of the Company Board of Directors
Jumlah Kepemilikan Saham Perusahaan Secara Langsung <i>Direct Ownership of Company Shares</i>	-	





PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

PENATAAN DASAR-DASAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 2021

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama bagi Perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu misi Perusahaan untuk mengembangkan human capital yang profesional dan inovatif untuk mengoptimalkan profit guna meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder. DAMRI telah berkomitmen untuk menjadikan pengembangan dan peningkatan kapasitas karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pencapaian Perusahaan. Keberhasilan Perusahaan adalah juga keberhasilan karyawan dalam merealisasikan kinerja dan kontribusinya untuk berkarya dan mencapai keberhasilan.

Pelaksanaan pengembangan SDM ini sejalan dengan transformasi yang dilakukan Perusahaan untuk memastikan integritas karya dan kinerja serta budaya Perusahaan dapat berjalan berkesinambungan dalam menciptakan kesehatan usaha dan pencapaian jangka panjang Perusahaan.

Langkah baru dari Direktorat SDM dan Umum untuk memulai penataan dalam memastikan terlaksananya dasar-dasar pengelolaan sumber daya manusia secara benar (*get the basic right*) dimulai pada 2019 dengan melakukan:

1. Penataan sistem administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi atau yang dikenal dengan *Human Resources Management System*. Pemanfaatan sistem ini bertujuan untuk memastikan ketepatan data dan informasi kepegawaian yang akan dipergu-

SETTING THE BASICS FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 2021

Human resource development is one of the main focuses of the Company in an effort to achieve its goals, as stated in one of the Company's mission to develop professional and innovative human capital to optimize profits in order to increase added value to stakeholders. DAMRI is committed to ensuring employee capacity building and development as an integral part of the Company's goals for achievement. The success of the Company is also the success of employees in realizing their performance and contribution, and to achieve success.

The implementation of HR development is in line with the transformation carried out by the Company to ensure the integrity of the work and performance, as well as ensuring that the Company's culture continuously create healthy business and long term Company's achievement.

*New actions from the Directorate of Human Resources and General Affairs to start the arrangement that would ensure proper implementation of basic human resource management (*get the basic right*) started in 2019, by way of the following :*

1. Structuring the employee administration system by utilizing technology or what is known as the *Human Resources Management System*. Utilization of this system aims to ensure the accuracy of employee data and information that will be used in payroll management which will also be

nakan dalam pengelolaan penggajian yang juga akan dikembangkan pada pelaksanaan manajemen kinerja dan talenta.

2. Penataan sistem rekrutmen karyawan –yang tidak hanya memberikan kesempatan bagi penerimaan karyawan eksternal, akan tetapi juga memberikan kesempatan bagi karyawan internal yang berbakat untuk dapat mengembangkan diri pada posisi-posisi jabatan yang terbuka. Untuk keperluan ini, bekerjasama dengan Direktorat yang membawahkan Divisi Teknologi Informasi, sistem perekrutan diciptakan untuk dapat melakukan penyeleksian karyawan, khususnya bagi calon karyawan yang berada di luar wilayah Jakarta.
3. Guna memantapkan basis bagi pengembangan karyawan, Direktorat SDM dan Umum telah memantapkan penetapan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Insan DAMRI, yang meliputi kompetensi Kepemimpinan, Pencapaian Kinerja, Inovasi, Fokus pada Pelanggan, Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan, Kerjasama Tim, Pengembangan Diri dan Karyawan, Komunikasi dan Keterampilan Interpersonal, serta Etika dan Integritas.
4. Dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawannya dan berdasarkan analisis atas kebutuhan pelatihan yang diperlukan, Direktorat SDM dan Umum telah menyusun rangkaian pelatihan wajib yang akan diterapkan secara kontinyu yang meliputi pelatihan kepemimpinan bagi level manajerial dan pelatihan umum teknis operasional yang akan dikembangkan bagi seluruh karyawan.
5. Direktorat SDM dan Umum telah memulai langkah awal bagi pelaksanaan manajemen suksesi khususnya bagi talenta-talenta, khususnya bagi satu level di bawah Direksi (BOD-1) yang bertujuan untuk membentuk kekuatan talent pool bagi Perusahaan juga bertujuan untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan di organisasi.

developed in the implementation of performance and talent management.

2. Structuring the employee recruitment system – which not only provides opportunities for external employee recruitment, but also provides opportunities for talented internal employees to be able to develop themselves in open positions. For this purpose, in collaboration with the Directorate in charge of the Information Technology Division, a recruitment system was created to be able to conduct employee selection, especially for prospective employees who are outside the Jakarta area.
3. In order to strengthen the basis for employee development, the Directorate of Human Resources and General Affairs has determined the competencies that must be possessed by every DAMRI Personnel, which include Leadership competencies, Performance Achievement, Innovation, Customer Focus, Problem Solving and Decision Making, Teamwork, Self Development and Employees, Communication and Interpersonal Skills, and Ethics and Integrity.
4. In terms of training and development of its employees and based on an analysis of the required training needs, the Directorate of Human Resources and General Affairs has compiled a series of mandatory training that will be implemented continuously which includes leadership training for the managerial level and general technical operational training which will be developed for all employees.
5. The Directorate of Human Resources and General Affairs has started the initial steps for the implementation of succession management, especially for talents, one level below the Board of Directors (BOD-1) which aims to form a strong talent pool for the Company as well as to ensure continuity of leadership in the organization.

6. Terkait dengan pembentukan talent pool, Direktorat SDM dan Umum telah menetapkan rangkaian pengembangan Management Trainee bagi lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) serta perekrutan talenta bersama BUMN yang melibatkan talenta-talenta milenial untuk dapat berkembang bersama Perusahaan.

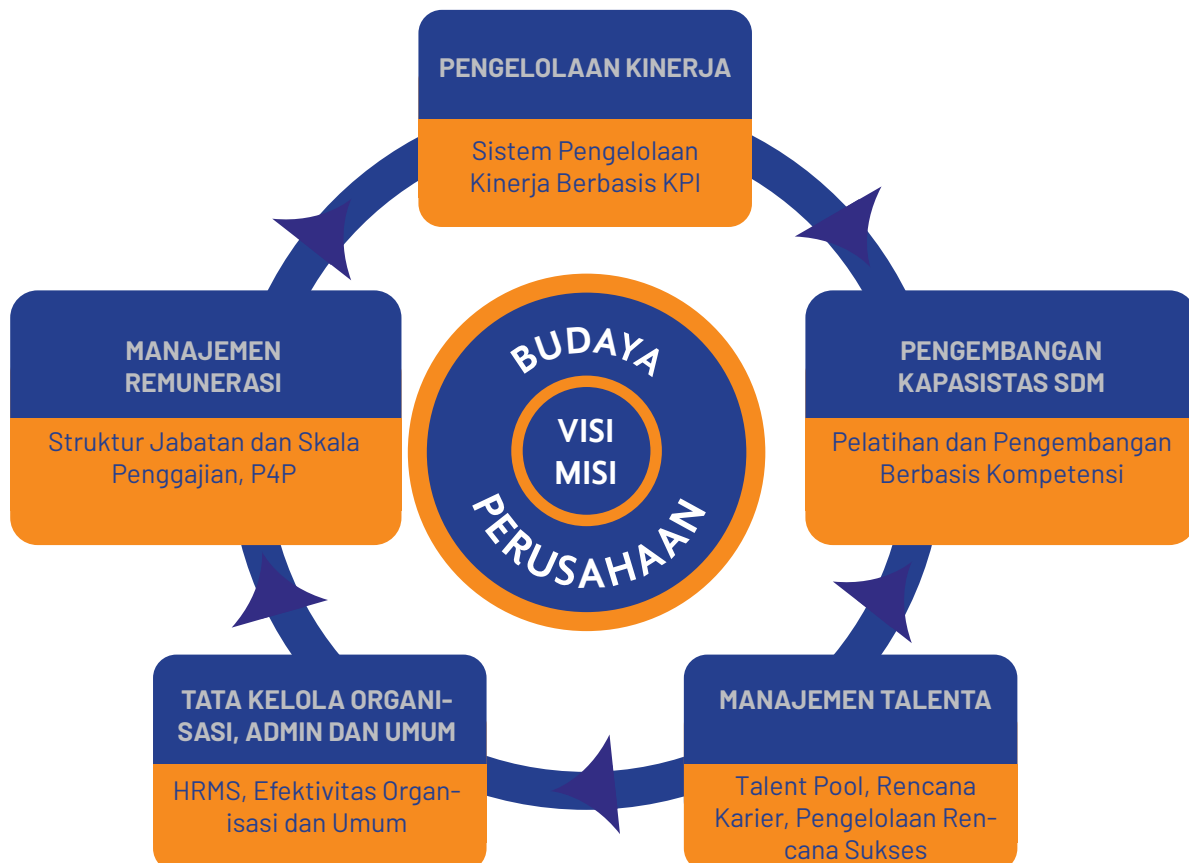
6. In relation to the formation of a talent pool, the Directorate of Human Resources and General Affairs has established a series of Management Trainee development for graduates of the College of Land Transportation (STTD) as well as talent recruitment with SOEs involving millennial talents to be able to develop with the Company.

STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai kelanjutan dari upaya peningkatan aktivitas pada Direktorat SDM dan Umum dan bagi kelanjutan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di DAMRI, Direktorat SDM dan Umum telah mencanangkan rancangan pengembangan berkesinambungan bagi karyawannya sebagaimana yang terangkum dalam diagram di bawah ini.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGY

As a continuation of efforts to increase activity at the Directorate of Human Resources and General Affairs and for the continuation of the implementation of human resource development at DAMRI, the Directorate of Human Resources and General Affairs has launched a sustainable development plan for its employees as summarized in the diagram below.



Direktorat SDM dan Umum juga berfokus pada efektivitas organisasi yang tidak hanya akan menata dan mengkaji struktur organisasi yang ada pada saat ini, namun juga menelaah efektivitas alur proses operasional dalam menata keseluruhan kantor cabang dan kebijakan-kebijakan organisasi yang tepat guna bagi berlangsungnya tatanan organisasi yang tepat ke depannya.

The HR and General Affairs Directorate also focuses on organizational effectiveness which will not only organize and review the current organizational structure, but also examine the effectiveness of the operational process flow in managing the entire branch office and appropriate organizational policies for the proper organizational structure going forward.

Komposisi SDM Tahun 2021

Komposisi SDM tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada bagian Profil Karyawan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan.

HR Composition Year 2021

The composition of HR in 2021 compared to 2020 and 2019 can be seen in the Employee Profile and Employee Competency Development section.

JUMLAH KARYAWAN UNTUK MASING-MASING LEVEL ORGANISASI NUMBER OF EMPLOYEES FOR EACH LEVEL OF ORGANIZATION

POSISI/POSITION	2021	2020	2019
Pengemudi/Driver	2.082	2.572	2.721
Kondektur/Conductor	175	258	223
PPA/Timer/PPA/Timer	499	535	604
Teknik/Technical	444	489	511
Administrasi/Admnistration	801	899	958
Pimpinan/Management	348	352	364
TOTAL	4.349	5.105	5.363

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EDUCATIONAL LEVEL

POSISI/POSITION	2021	2020	2019
<SMA/<Highschool	3654	4.341	4.582
Diploma/Diploma	143	152	187
Sarjana/Bachelor	507	565	541
Pascasarjana/Master	45	50	53
TOTAL	4.349	5.105	5.363

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GENDER NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON GENDER

JENIS KELAMIN/ <i>GENDER</i>	2021	2020	2019
Laki-laki/ <i>Male</i>	3.976	4.697	4.954
Perempuan/ <i>Female</i>	373	408	409
TOTAL	4.349	5.105	5.363

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

STATUS KEPEGAWAIAN/ <i>EMPLOYMENT STATUS</i>	2021	2020	2019
Tetap/ <i>Permanent</i>	3.647	3.766	3.766
Kontrak/ <i>Contract</i>	702	1.597	1.597
TOTAL	4.349	5.363	5.363

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA NUMBER OF EMPLOYEE BASED ON AGE

RENTANG USIA/ <i>AGE RANGE</i>	2021	2020	2019
< 25 tahun/ <i>years</i>	143	324	332
25-35 tahun/ <i>years</i>	878	1.132	1.259
36-45 tahun/ <i>years</i>	1.245	2.432	2.576
46-56 tahun/ <i>years</i>	2.083	1.217	1.196
TOTAL	4.349	5.105	5.363

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

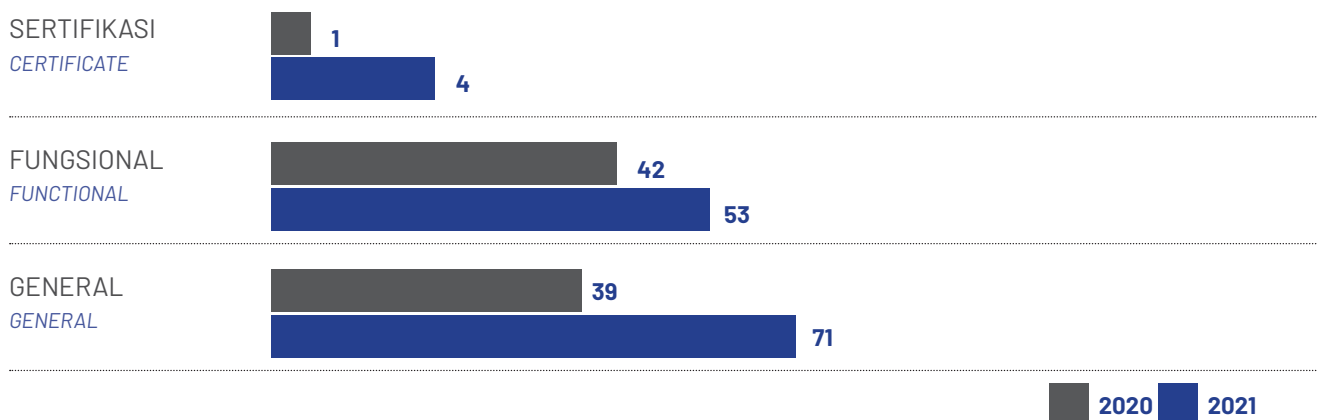
Dalam upaya pengembangan karyawannya, Perusahaan telah merencanakan pelatihan-pelatihan yang bersifat umum (*general training*), fungsional (*functional training*), ataupun sertifikasi.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

In an effort to develop its employees, the Company has planned general trainings, functional trainings, or certification.

TIPE PELATIHAN TYPE OF TRAINING	JUMLAH PELATIHAN/NUMBER OF TRAINING	
	2021	2020
General <i>General</i>	39	71
Fungsional <i>Functional</i>	42	53
Sertifikasi <i>Certificate</i>	1	4
TOTAL	82	128

Tabel Jumlah Jenis Pengembangan Karyawan
Chart of Types of Employee Development



Secara spesifik, di tahun 2021 Perusahaan telah melibatkan lebih banyak karyawan di seluruh lini organisasi atau sebanyak 156,1%, dengan total sebanyak lebih dari 20.878,5 jam kerja pelatihan.

Specifically in 2021, the Company has involved more employees across all lines of the organization or 156.1%, with a total of more than 20,878.5 hours of training.

TABEL JUMLAH PESERTA LATIHAN TAHUN 2021
CHART OF NUMBER OF TRAINING PARTICIPANTS IN 2021

TIPE PELATIHAN 2021/ TYPE OF TRAINING 2021	JUMLAH PELATIHAN/ NUMBER OF TRAINING	JUMLAH PESERTA/ NUMBER OF PARTICIPANTS
General/ <i>General</i>	71	2.402
Fungsional/ <i>Functional</i>	53	2.324
Sertifikasi/ <i>Certificate</i>	4	64
TOTAL	128	4.790

TABEL BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN (DALAM RUPIAH) **CHART OF THE COST OF EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT (IN RUPIAH)**

URAIAN/DESCRIPTION	2020	2021
Target/Target	2.313.000.000	2.184.906.000
TOTAL	232.231.000	183.556.500



PEMEGANG SAHAM UTAMA, ENTITAS ANAK, DAN ENTITAS ASOSIASI *MAIN SHAREHOLDER, SUBSIDIARIES, AND AFFILIATED ENTITIES*

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Per 31 Desember 2021, seluruh modal DAMRI dimiliki Pemerintah Republik Indonesia berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dengan demikian informasi kepemilikan saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar, nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, dan kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, serta kepemilikan saham Direktur dan Dewan Pengawas, baik langsung dan tidak langsung, tidak relevan bagi DAMRI.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Per 31 Desember 2021, DAMRI tidak memiliki anak perusahaan.

Per 31 Desember 2021, DAMRI tidak memiliki entitas

COMPOSITION OF MAIN SHAREHOLDER

As of 31 December 2021, all of DAMRI's capital is owned by the Government of the Republic of Indonesia in the form of state assets which are separated and not divided into shares.

Hence, share ownership information which includes the 20 largest shareholders, names of shareholders who own 5% or more, and groups of community shareholders with share ownership of less than 5% each, as well as share ownership of the Directors and Supervisory Board, both directly and indirectly, are not relevant for DAMRI.

LIST OF SUBSIDIARY AND/OR ASSOCIATION ENTITIES

Per 31 December 2021, DAMRI does not have subsidiaries.

Per 31 December 2021, DAMRI does not have a parent, subsidiary, and association entities, as well as joint

induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). Modal DAMRI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

venture and special purpose vehicle (SPV). DAMRI's capital is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia.

KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM

Kepemilikan Modal DAMRI 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologi penerbitan saham.

COMPOSITION OF MAIN SHAREHOLDER

DAMRI's Capital Ownership is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, hence there is no information regarding the chronology of the issuance of shares.





PRODUK DAN JANGKAUAN PASAR

PRODUCTS AND MARKET REACH

SEGMENT USAHA Business Segment	SEGMENTASI PASAR Market Segmentation
Angkutan Pemandu Moda/Angkutan Bandara <i>Integrated Mode Transport/Airport Transport</i>	- Aktivitas: karyawan yang kerap melakukan perjalanan dinas, karyawan area bandara, orang yang memiliki rumah dan kota tempat kerja terpisah - Tinggal atau berasal dari ibukota provinsi - Tinggal atau berasal daerah penyangga yang terjangkau trayek dari dan menuju bandara - Activities: employee frequently travel for work, airport employee, people who works in a different province to home - Living in or coming from provincial capital - Living in or coming from regional satellite with accessible route to and from the airport
Angkutan Dalam Kota <i>Urban Transportation</i>	- Aktivitas: berangkat ke sekolah, berangkat kuliah, bekerja, berdagang - Penduduk di area kota - Penduduk dari luar area kota yang bepergian ke kota dengan multimoda - Activities: departing to school, college, working, selling/trading - Residents from the city area - Residents from outside the city and travel to the city in multimodal transportation
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi <i>Inter-City Transport in a Province and Inter-City Transport Between Provinces</i>	- Aktivitas: kuliah, bekerja, berdagang, berkunjung ke sanak saudara, wisata - Penduduk dari luar area kota yang bepergian ke kota dengan multimoda - Activities : college, working, trading/selling, visiting relatives, tourism - Residents living outside the city area that travels to the city with intermodal transportation
Angkutan Lintas Batas Negara <i>Transboundary Transportation</i>	- Aktivitas: bekerja, berdagang, pulang kampung - Penduduk yang berasal dari luar kota - Penduduk Malaysia - Penduduk Brunei Darussalam - Activity: working, selling/trading, going back to the hometown - Residents coming from outside the city - Residents from Malaysia - Residents from Brunei Darussalam
Angkutan Perintis <i>Pioneer Transport</i>	- Aktivitas: sekolah, berdagang - Penduduk yang berasal dari daerah 3T dan sulit dijangkau - Activities: school, selling/trading - Residents from 3T regions and difficult to reach
Angkutan Pariwisata <i>Tourism Transportation</i>	- Aktivitas: berwisata, studi - Pelanggan yang berasal dari kota besar/ perkotaan - Pelanggan yang berasal dari luar provinsi - Penduduk lokal - Activities: tourism, study - Customers from big cities - Customers from outside the province - Local residents
Angkutan Logistik <i>Logistic Transportation</i>	- Aktivitas: melakukan pengiriman barang - Pelanggan yang berada di daerah operasional DAMRI - Activities: transporting goods - Customers in DAMRI operational area



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSION

NAMA DAN ALAMAT PROFESI PENUNJANG		Name and Address of Supporting Profession
Kantor Akuntan Publik		Public Accounting Firm
KAP	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	
Alamat Address	Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan	
Telepon/Fax/ Phone/Fax	+62 21 3144003 / +62 21 3144213	
Email	jkt.office@pkfhadiwinata.com	
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2021 2021 Financial Year	
Fee	Rp 396.000.000	
Lingkup Penugasan Scope of Assignment	- Melaksanakan prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI () untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. <i>Carry out the procedures for the Report on the Results of the Performance Evaluation and Achievement of KPIs (Key Performance Indicators) for the financial year ending on 31 December 2021.</i> - Melaksanakan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2021. <i>Carry out an audit of the Financial Statement for the 2021 financial year.</i> - Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2021. <i>Carry out compliance audits with laws and regulations and internal control for the 2021 financial year.</i> - Melaksanakan audit atas Pengendalian Internal tahun buku 2021. <i>Carry out an audit of Internal Control for the 2021 financial year.</i> - Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. <i>To audit the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program (PKBL)/Social and Environmental Responsibility (TJSL) for the financial year ending 31 December 2021.</i>	

NAMA DAN ALAMAT PROFESI PENUNJANG		Name and Address of Supporting Profession	
Notaris		Notary	
Notaris Publik		Cut Dara Puspita, S.H., MKn,	
Alamat <i>Address</i>		Jalan Bukit Cinere Raya No. 179, Cinere, Depok, Jawa Barat	
Telepon/Fax/ <i>Phone/Fax</i>		+62 21 3144003 / +62 21 3144213	
Email		jkt.office@pkfhadiwinata.com	
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>		Tahun Buku 2021 <i>2021 Financial Year</i>	
Fee		Rp. 4.000.000 untuk setiap pembuatan akta <i>Rp. 4.000.000 for each deed</i>	
Lingkup Penugasan <i>Scope of Assignment</i>		Menyatakan dalam salinan otentik Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal DAMRI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi DAMRI. <i>Stating in an authentic copy of the Decree of the Minister for State-Owned Enterprises as Representative of the Government as DAMRI's Capital Owner regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board and/or Members of the Board of Directors of DAMRI.</i>	



PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL

AWARD AND EXTERNAL RECOGNITION

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2021

21 Oktober 2021

DAMRI mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan atau organisasi yang senantiasa memiliki perhatian dan program-program akan perkembangan budaya keselamatan di dalam perusahaan, dalam Concerned Company Award oleh World Safety Organization (WSO) Indonesia.

26 Oktober 2021

DAMRI meraih penghargaan sebagai Badan Publik kategori Cukup Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2021 AWARDS AND CERTIFICATES

21 October 2021

DAMRI received an award as a company or organization that is consistently concerned with and has programs for the development of safety culture in the company, as recognized by Concerned Company Award by the World Safety Organization (WSO) Indonesia.

26 October 2021

DAMRI won an award as a Public Institution category for Sufficiently Informative in the 2021 Public Information Openness Award by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia.



SERTIFIKASI

CERTIFICATION

NAMA SERTIFIKASI
CERTIFICATION NUMBER

Sertifikat ISO 45001:2018

TAHUN PEROLEHAN
YEAR

20 November 2020

BADAN PEMBERI SERTIFIKASI
CERTIFIER

TUV Rheinland Indonesia

MASA BERLAKU
VALIDITY PERIOD

20 November 2020 – 19 November 2023





INFORMASI SITUS PERUSAHAAN

CORPORATE WEBSITE INFORMATION



DAMRI senantiasa memastikan kepatuhan terhadap kepentingan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal, dengan referensi acuan pada Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang website perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

DAMRI menggunakan media website untuk memberikan kemudahan akses informasi transparan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya melalui situs resmi Perusahaan <http://damri.co.id>.

DAMRI always ensures compliance with information disclosure to external parties, with reference to the OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning the website of companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

DAMRI uses its website to provide easy access to transparent and accurate information to all stakeholders such as providing a number of reports and other important information through the Company's official website <http://damri.co.id>.

Laporan maupun informasi lainnya yang tersedia di situs DAMRI adalah sebagai berikut:

- Platform pemesanan tiket online
- Informasi umum terkait Perusahaan
- Informasi terkait keterbukaan informasi publik
- Informasi tata kelola Perusahaan.

Secara garis besar, informasi pada situs web DAMRI terdiri atas:

1. Home

Berisi menu tampilan awal website, yakni Informasi Layanan yang berada di sebelah kiri, penjelasan mengenai 7 (tujuh) Segmen Usaha milik DAMRI, serta Berita Terbaru DAMRI.

2. Profil

Informasi mengenai Sejarah, Dewan Pengawas, Direksi, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, serta Penghargaan yang diperoleh Perusahaan.

3. Galeri

- Foto yang berisi kegiatan-kegiatan DAMRI
- Publikasi terkini mengenai siaran pers yang disampaikan oleh Perusahaan

4. Informasi

- Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang berisi antara lain *Board Manual*, *Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis*, *Code of GCG*, *Whistleblowing System*, *Pengendalian Gratifikasi*, *Laporan Keterbukaan Informasi Publik*, *Laporan Tahunan*, dan *Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan*.
- Karier, informasi mengenai lowongan pekerjaan.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan

Reports and other information available on the DAMRI website are as follows:

- Online ticket booking platform
- General information regarding the Company
- Information related to public information disclosure
- Corporate governance information.

In general, the information on the DAMRI website consists of the following :

1. Home

Contains main website display, namely Information Service located on the left, an explanation of the 7 (seven) Business Segments belonging to DAMRI, as well as DAMRI's Latest News.

2. Profile

Information on History, Supervisory Board, Board of Directors, Organizational Structure, Vision and Mission, and Awards obtained by the Company.

3. Gallery

- Photos containing DAMRI activities
- The latest publications regarding press releases submitted by the Company

4. Information

- *Good Corporate Governance (GCG)* which contains, amongst others, *Board Manual*, *Code of Business Conduct and Ethics*, *Code of GCG*, *Whistleblowing System*, *Gratification Control*, *Public Information Disclosure Report*, *Annual Report*, and *Anti-Bribery Management System Guidelines*
- Career, information about job vacancies.

5. Information Management and Documentation Officer (PPID)

PPID functions as the manager and delivery of documents owned by public bodies in accordance

publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di DAMRI.

Menu PPID berisi Home, Profil, Regulasi, Informasi Publik (Informasi secara Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat, Layanan Informasi yang berisi Alur Mekanisme Pengajuan Informasi dan Keberatan, Laporan Layanan Informasi Publik 2021 hingga Permohonan Informasi Publik yang dapat dikirim secara *online* melalui alamat email ppid@damri.co.id atau *offline* dengan mendatangi langsung Kantor Pusat DAMRI di Jalan Matraman Raya No. 25, Jakarta Timur.

6. Logistik

Merupakan link portal website dan informasi khusus DAMRI Logistik yang berisikan Profil, Produk, Layanan, Informasi, dan Kontak.

7. Pengadaan

Merupakan link portal website E-Procurement DAMRI untuk pengadaan barang/jasa, informasi pengadaan antar-unit DAMRI sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di DAMRI yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan fasilitas aplikasi E-Procurement.

8. Computer Assisted Test (CAT)

Link untuk menu sebagai salah satu mekanisme rekrutmen pekerja DAMRI.

with the mandate of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. This service is an online service facility for applicants for public information as a form of implementing public information disclosure at DAMRI.

The PPID menu contains Home, Profile, Regulations, Public Information (Information on a Periodic, Immediate, and At All Times, Information Services which contains the Mechanism for Filing Information and Objections, 2021 Public Information Service Reports to Requests for Public Information which can be sent online through the email address ppid@damri.co.id or offline by visiting DAMRI Headquarters directly at Jalan Matraman Raya No. 25, East Jakarta.

6. Logistics

A website portal link and special information for DAMRI Logistics which contains Profiles, Products, Services, Information, and Contacts.

7. Procurement

A link to the DAMRI E-Procurement website portal for the procurement of goods/services, procurement information between DAMRI units in accordance with the guidelines for the procurement of goods/services applicable at DAMRI which is carried out online using the E-Procurement application facility.

8. Computer Assisted Test (CAT)

Link to the menu as one of the mechanism for recruitment of DAMRI workers.



TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

REPORTING TRANSPARENCY

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sepanjang tahun 2021, DAMRI tidak memiliki kasus yang berkaitan dengan perpajakan. Perusahaan taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai kewajibannya.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Throughout 2021, DAMRI does not have any cases related to taxation. The company complies with tax payment and reporting obligations.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Berbagai informasi, analisis, dan pembahasan kinerja pada Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Nomor: 00400/2.1133/AU.1/06/0259-1/1/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dengan “wajar, dalam semua hal yang material”. Laporan Keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

INCONSISTENCY IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

Various information, analysis, and discussion of performance in this Annual Report refer to the Company's Financial Statements for the years 31 December 2021 and 31 December 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners Number : 00400/2.1133/AU.1/06/0259-1/1/III/2021 dated 29 March 2021 with “reasonable, in all material aspects.” The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI PADA LAPORAN KEUANGAN

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan untuk kepentingan manajemen, Perusahaan telah

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS

As stated in PSAK No. 5 (2015 Adjustment) regarding Operating Segments and for the benefit of management, the Company has presented them according to

menyajikannya menurut pengelompokan (segmen) jenis usaha dan berdasarkan geografis sebagai bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Audit tahun buku 2020.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DIGITAL

Laporan Tahunan DAMRI baik yang disampaikan kepada Pemilik Modal maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan, telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

business type (segment) and based on geography as a form of operating segment reporting, as has been presented in Financial Audit Report financial year 2020.

COMPATIBILITY BETWEEN THE ANNUAL REPORT AND THE DIGITAL ANNUAL REPORT

DAMRI Annual Report, which has been submitted to the Shareholder and uploaded to the Company official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.





Analisis dan Diskusi Manajemen

ANALYSIS AND MANAGEMENT DISCUSSION



TINJAUAN PEREKONOMIAN

ECONOMIC OVERVIEW

Wabah virus Corona atau Covid-19 yang diumumkan oleh WHO pada 11 Maret 2020 sebagai pandemi global masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi perekonomian. Dampak dari pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021 mengakibatkan pendapatan Perusahaan turun sebesar Rp 638.582.623.994 sehingga mencapai kerugian sebesar Rp 152.902.380.435 pada tahun 2021.

Namun, dengan pelonggaran aktivitas ekonomi yang dijalankan Pemerintah Indonesia pada 2021 mulai memberikan dampak positif pada perekonomian. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), Perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi terbesar dicatatkan pada kuartal IV 2021 yang tumbuh 1,06% (q to q) dan 5,02% (y to y). Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi pada kuartal IV/2021 tak lepas dari pertumbuhan mobilitas masyarakat yang signifikan pada periode tersebut.

The outbreak of the Corona virus or Covid-19 which was announced by WHO on 11 March 2020 as a global pandemic is still ongoing until now, hence continuing to create uncertainty related to economic conditions. The impact of the COVID-19 pandemic as of 31 December 2021 resulted in the decrease of the Company's revenue amounting to Rp. 638,582,623,994, with a loss of Rp. 152,902,380,435 in 2021.

Nevertheless, the easing of economic activities by the Government of Indonesia in 2021 has begun to have a positive impact on the economy. Based on the calculation of the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2021 as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp. 16,970.8 trillion and GDP per capita reached Rp. 62.2 million or US\$ 4,349.5. The Indonesian economy in 2021 grew by 3.69%, higher than the achievement in 2020 which experienced a growth contraction of 2.07%.

For the record, the largest economic growth was recorded in the fourth quarter of 2021, which grew 1.06% (q to q) and 5.02% (y to y). According to BPS, Indonesia's fairly high economic growth in the fourth quarter of 2021 could not be separated from the significant growth in people's mobility during that period.



ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI TRANSPORTASI

ANALYSIS ON THE ECONOMY AND TRANSPORTATION INDUSTRY

Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia dan juga seluruh belahan dunia sejak awal 2020 dan terus berlangsung sampai saat ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk kinerja operasional Perusahaan. Meski demikian, sejumlah langkah pemulihan perekonomian yang dijalankan Pemerintah Indonesia sejak pertengahan 2020 melalui berbagai stimulus ekonomi, diikuti dengan relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat termasuk di sektor transportasi telah menunjukkan hasil dalam upaya pemulihan perekonomian.

Sektor transportasi dan pergudangan yang merupakan bidang usaha yang dijalankan oleh DAMRI juga sudah mulai tumbuh sebesar 3,24% pada 2021 setelah sebelumnya juga mengalami kontraksi sebesar 15,04% pada 2020. Ini tak lepas dari pertumbuhan mobilitas masyarakat yang signifikan pada 2021 dibandingkan pada 2020.

Industri pariwisata global juga sudah mulai mengalami pertumbuhan positif sebesar 4% yaitu 415 juta kunjungan pada 2021 dibandingkan 400 juta kunjungan pada 2020 menurut prediksi UNWTO. Meski demikian, angka tersebut masih 72% di bawah jumlah kunjungan sebelum pandemi pada 2019.

Gambaran berbeda masih terjadi di industri pariwisata Indonesia. Dengan masih adanya pembatasan pintu akses keluar masuk negara, menurut data yang dikompilasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2021 hanya 1,558 juta kunjungan atau turun 61% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebanyak 4,053 juta kunjungan.

The Covid-19 pandemic that has hit Indonesia and also all parts of the world since early 2020 and which has continued to this day has slowed economic and industrial growth, including the Company's operational performance. However, a number of economic recovery measures as carried out by the Government of Indonesia since mid-2020 through various economic stimulus, followed by relaxation of restrictions on public activities, including in the transportation sector, have shown results in efforts to recover the economy.

The transportation and warehousing sectors, which is a line of business run by DAMRI, has also started to grow by 3.24% in 2021 after previously experiencing a contraction of 15.04% in 2020. This cannot be separated from the significant growth in community mobility in 2021 compared to 2020.

The global tourism industry has also started to experience positive growth of 4%, namely 415 million visits in 2021 compared to 400 million visits in 2020 according to UNWTO predictions. However, this figure is still 72% below the number of visits before the pandemic in 2019.

A different picture still exists in the Indonesian tourism industry. With restrictions on entry and exit of the country, according to data compiled by the Ministry of Tourism and Creative Economy, foreign tourist arrivals throughout 2021 were only 1.558 million visits, a 61% decrease compared to the 2020 achievement of 4.053 million visits.

Masih adanya pembatasan mobilitas dan berkurangnya intensitas perjalanan dengan menggunakan moda transportasi umum berimbas pada penurunan jumlah pelanggan yang membuat DAMRI harus melakukan berbagai upaya untuk tetap bisa mempertahankan keberlangsungan usaha. Dengan tetap fokus pada perkembangan bisnis transportasi, Perum DAMRI akan meneruskan proses transformasi yang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan pasar, dan fokus pengembangan perekonomian bangsa dan Perusahaan.

Perum DAMRI akan senantiasa bersikap adaptif, menyikapi tantangan bisnis yang ada. Sekalipun optimisme bahwa kondisi akan berangsur membaik, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan terbesar yang potensial mempengaruhi kelangsungan bisnis industri transportasi darat. Kondisi sampai dengan pertengahan 2021 belum memperlihatkan perbaikan signifikan terhadap kondisi operasional dan keuangan Perusahaan. Namun beragam program pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19, termasuk program vaksinasi massal, menumbuhkan keyakinan terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keyakinan masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali seperti kondisi normal sebelumnya.

There are still restrictions on mobility and the reduced intensity of travel using public transportation modes have resulted in a decrease in the number of customers, hence requiring DAMRI to apply various efforts to maintain business continuity. By staying focused on the development of the transportation business, Perum DAMRI will continue the transformation process in line with technological advances, market changes, and the focus on developing the nation's economy and the Company.

Perum DAMRI will always be adaptive, responding to existing business challenges. Despite optimism that conditions will gradually improve, the Covid-19 pandemic is still the biggest challenge that has the potential to affect the business continuity of the land transportation industry. Conditions until mid-2021 have not shown significant improvements to the Company's operational and financial conditions. However, various government programs to suppress the spread of the Covid-19 virus, including the mass vaccination program, have fostered confidence in the recovery of economic growth in line with people's belief that they can return to their normal activities as before.



TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Berdasarkan jumlah perjalanan orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi darat baik itu dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan angkutan umum (bus, taxi, dan lain-lain), dapat diketahui data populasi orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum berdasarkan asal tujuan orang melakukan perjalanan dibandingkan data realisasi orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan bus DAMRI.

Maka dari itu, klasifikasi orang yang melakukan perjalanan orang dikelompokkan sesuai dengan segmen angkutan yang dimiliki DAMRI sebagai berikut:

1. Segmen Antar Kota.
2. Segmen Angkutan Perkotaan.
3. Segmen Angkutan Bandara.
4. Segmen Pariwisata.
5. Segmen Perintis.
6. Segmen Angkutan Barang (Logistik).
7. Segmen Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN).

The number of people travelling by land transportation, either by using private vehicles or public transportation (buses, taxi, and others), can provide data on people conducting their travels using public transportation based on destination, compared to data realization of people travelling using DAMRI buses.

Therefore, the classification of the people travelling can be grouped in accordance to the transportation segment owned by DAMRI, as follow :

1. Inter-City Segment.
2. Urban Transport Segment.
3. Airport Transportation Segment.
4. Tourism Segment.
5. Pioneer Segment.
6. Cargo Transport Segment (Logistics).
7. Transboundary Transport Segment (ALBN).





STRATEGI PERUSAHAAN

CORPORATE STRATEGY

Sesuai dengan kondisi historis yang berawal dari pelayanan transportasi angkutan penumpang, DAMRI berperan sebagai stabilisator. Seiring dengan berkepanjangan pandemi Covid-19, DAMRI masih dalam mode survival di tahun 2021.

Rencana perusahaan untuk melakukan turn around menuju ke perbaikan kondisi ketahanan perusahaan sesuai dengan tahapan peta jalan BUMN 2020-2024 harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di tahun 2021 ketika mobilitas masyarakat belum kembali pulih. Optimisme dalam menghadapi pandemi di awal tahun mengalami penyesuaian pada saat angka penularan Covid meningkat di awal tahun 2021, dan sempat melandai sebentar sebelum meledak di bulan Juli-Agustus 2021. Banyak hal yang telah dilakukan seiring perkembangan tersebut yang meliputi segenap aspek.

In accordance with the historical condition that saw its start as a passenger transportation services, DAMRI acts as a stabilizer. Along with the prolonged Covid-19 pandemic, DAMRI is still in survival mode in 2021.

The Company's plan to conduct a turn-around towards improving the condition of the Company's resilience in accordance with the stages of the 2020-2024 SOE roadmap must be adjusted to the Covid-19 pandemic situation in 2021 when community mobility has not yet recovered. Optimism in dealing with the pandemic at the beginning of the year was adjusted when the number of Covid transmissions increased in early 2021, and briefly slid before exploding in July-August 2021. Many things have been done in response to these developments, and which covers various aspects.

1		Pemulihan likuiditas Liquidity Recovery
2		Pembenahan proses bisnis dan meningkatkan inovasi pada seluruh lini bisnis perusahaan Improving business process and enriching innovation in all of the Company's business lines
3		Pembenahan organisasi perusahaan Improving Company's organization
4		Penyesuaian jumlah armada yang "demand responsive" Adjusting the amount of fleet that is "demand responsive"
5		Penguatan proses digitalisasi di dalam seluruh proses bisnis Strengthening the digitalization process in all business process
6		Mendorong relaksasi regulasi sesuai dengan perbaikan proses bisnis Encouraging relaxation of regulation in accordance with improvement in the business process
7		Pengembangan dan penguatan unit internal menjadi SBU Development and strengthening of internal units to become SBU
8		Sinergi/kolaborasi strategis Strategic synergy and collaboration

PEMULIHAN LIKUIDITAS (PROGRAM PENANGANAN KRISIS)

Salah satu upaya yang dibentuk untuk menangani tekanan-tekanan yang terjadi di tahun 2021 terutama tekanan likuiditas. Kerugian yang signifikan di tahun 2020 dan dilanjutkan dengan memburuknya kondisi makro menyebabkan kondisi likuiditas DAMRI mengalami tekanan yang luar biasa. Merespons hal tersebut dibentuklah Tim Pemulihan Likuiditas, yang mengupayakan pemulihan dari sisi Revenue Management (peningkatan pendapatan), Cost Management (pengendalian beban), dan Cash Management (pengendalian arus kas).

Upaya peningkatan pendapatan, dilakukan melalui peningkatan pendapatan Komersial. Untuk segmen Antar Kota dilakukan beberapa inisiatif, yaitu penguatan pengawasan dan penerapan Laporan Manajemen Bus (LMB) online yang memastikan pendapatan ter-collect dengan maksimal, penguatan pendapatan antar-kota memanfaatkan infrastruktur jalan tol dan jalan raya antar-kota yang dibangun oleh pemerintah/Trans Pulau (Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Kalimantan), serta pembukaan kanal dan saluran pemasaran digital seperti Traveloka, Redbus, Alfamart, dan Indomaret.

Segmen Pemadu Moda (bandara) dilakukan contingency karena pelanggan transportasi udara belum pulih. Langkah tak terduga tersebut adalah menyediakan layanan angkutan penumpang repatriasi, karantina dan pekerja migran bekerja sama dengan Satgas Covid, Kodam, dan BP2TKI. Peningkatan pendapatan pada segmen logistik dilakukan melalui peningkatan penggunaan platform DAMRI Integrated Logistic System (DILS), mendorong pendapatan dari angkutan pupuk dan obat-obatan, serta menjalankan angkutan logistik di pusat industri, pasar, dan pusat keramaian. Sedangkan untuk angkutan Pariwisata dan Charter, difokuskan untuk melayani angkutan karyawan dan perbaikan administrasi borongan dan sistem pemesanan.

LIQUIDITY RECOVERY (CRISIS MANAGEMENT PROGRAM)

One of the efforts formed to deal with the pressures occurring 2021, in particular liquidity pressure. Significant losses in 2020, followed by the continued deterioration of macro conditions caused DAMRI's liquidity conditions to experience tremendous pressure. In response to this, a Liquidity Recovery Team was formed, which seeks recovery in terms of Revenue Management (increase in revenue), Cost Management (controlling expenses), and Cash Management (controlling cash flows).

Efforts to increase income are carried out through increasing Commercial revenue. For the Inter-City segment, several initiatives were carried out, namely strengthening supervision and application of on-line Bus Management Reports (LMB) which ensured maximum revenue was collected, strengthening inter-city income by utilizing toll road infrastructure and inter-city highways built by the government/Trans Islands (Trans Java, Trans Sumatra, and Trans Kalimantan), as well as the opening of digital marketing channels such as Traveloka, Redbus, Alfamart, and Indomaret.

The Intermodal segment (airport) is a contingency because air transportation customers have not recovered. The unexpected step was to provide repatriation, quarantine and migrant worker transportation services in collaboration with the Covid Task Force, Kodam, and BP2TKI. The increase in revenue in the logistics segment was carried out by increasing the use of the DAMRI Integrated Logistics System (DILS) platform, boosting revenue from transporting fertilizers and medicines, as well as running logistics transportation in industrial centers, markets, and crowd centers. As for tourism and charter transportation, it is focused on serving employee transportation and improving wholesale administration and ordering systems.



SINERGI/ KOLABORASI STRATEGIS

Sinergi strategis dalam mendapatkan pendapatan atau pembiayaan tambahan perlu dilakukan dengan cara :

1. Kerja sama operasi dengan Perum PPD di Bali dan Jakarta (untuk layanan Sarbagita yang akhirnya layanan tersebut dihentikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali karena adanya refocusing anggaran ke pos lainnya).
2. Inisiasi kerja sama dengan BPKH untuk membuka layanan angkutan Haji dan Umrah di Arab Saudi telah dilakukan. Selanjutnya perlu kajian lanjutan untuk menilai kelayakan bisnis yang akan dijalankan serta menilai opsi terbaik dalam membuka layanan ini, diharapkan dapat terlaksana di tahun 2022.
3. Inisiasi Kerjasama investasi Bus Listrik dengan beberapa pihak seperti Asian Development Bank (ADB), AAI, dan Edison.

SYNERGY/ STRATEGIC COLLABORATION

Strategic synergy to obtain additional income or financing needs to be done by:

1. Joint operation with Perum PPD in Bali and Jakarta (for the Sarbagita service, which was eventually discontinued by the Bali Provincial Transportation Service due to budget refocused to other posts).
2. The initiation of cooperation with BPKH to open Hajj and Umrah transportation services in Saudi Arabia has been carried out. For next step, further studies are needed to assess its feasibility and assess the best option in opening this service, which is expected to be implemented in 2022.
3. Initiation of Electric Bus investment cooperation with several parties such as the Asian Development Bank (ADB), AAI, and Edison.



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

SALURAN PEMASARAN

Pemasaran diperlukan supaya khalayak dan target pasar mengetahui produk perusahaan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dan tertarik untuk menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan saluran pemasaran yang dinilai efektif dan efisien untuk mencapai target pasar dan audiens lebih luas. Selain informasi produk, konten informasi juga dapat memuat terkait promo yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan minat beli, sosialisasi atau edukasi, dan hiburan. Secara umum, saluran pemasaran yang diterapkan pada tahun 2021 dibagi dalam dua jenis, yaitu saluran pemasaran digital dan saluran pemasaran konvensional. Saluran pemasaran digital yang digunakan oleh DAMRI berupa DAMRI Apps, situs penjualan tiket DAMRI, media sosial, online travel agent (OTA), dan DILS.

Pembahasan lebih lanjut terkait masing-masing saluran pemasaran digital adalah sebagai berikut.

DAMRI Apps

DAMRI Apps merupakan aplikasi milik DAMRI yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pemesanan dan pembelian tiket secara daring tanpa melalui pihak ketiga. DAMRI Apps diluncurkan resmi pada tahun 2019 dan dapat diunduh melalui Google Play Store. Hingga tahun 2021, DAMRI Apps tersedia untuk gawai berbasis sistem operasi Android. Selain melayani pemesanan tiket daring, DAMRI Apps juga menyediakan berbagai kemudahan opsi pembayaran melalui daring melalui kerja sama dengan bank-bank

MARKETING CHANNEL

Marketing is needed so that the audience and target market know the company's products, either in the form of goods and services, and are interested in using them. Therefore, a marketing channel that is considered effective and efficient is needed to reach the target market and a wider audience. In addition to product information, information content can also contain promotions provided by the company to increase buying interest, socialization or education, and entertainment. In general, the marketing channels implemented in 2021 are divided into two types, namely digital marketing channels and conventional marketing channels. Digital marketing channels used by DAMRI include DAMRI Apps, DAMRI ticket sales sites, social media, online travel agents (OTA), and DILS.

Further discussion regarding each digital marketing channel is as follows.

DAMRI Apps

DAMRI Apps is an application owned by DAMRI which functions as a place to order and purchase tickets online without going through a third party. DAMRI Apps was officially launched in 2019 and can be downloaded via the Google Play Store. Until 2021, DAMRI Apps are available for devices based on the Android operating system. In addition to serving online ticket reservations, DAMRI Apps also provides various online payment options through collaboration with Himbara banks (Virtual Account Mandiri, Virtual Account BRI)

himbara (Virtual Account Mandiri, Virtual Account BRI) dan dompet digital (Gopay, OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay). Selain pembayaran langsung melalui aplikasi, bagi pelanggan yang tidak memiliki dompet digital atau bank daring, pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket melalui DAMRI Apps lalu melakukan pembayaran di Indomaret, Alfamart, dan loket Pos Indonesia. Saat ini, rute yang tersedia dan dijual di DAMRI Apps adalah rute bandara, AKAP, AKDP, serta pariwisata.

Media Sosial

Media sosial yang aktif digunakan saat ini oleh DAMRI adalah Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, dan Youtube dengan nama akun @damriindonesia. Di samping peran utama media sosial DAMRI untuk mempromosikan layanan DAMRI, media sosial DAMRI juga dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan (*customer service*), dan humas (*public relation*). Selain unggahan yang bersifat bebas biaya, terdapat layanan iklan media sosial yang umum disebut dengan Ads. Iklan (Ads) ini menyasar khusus pengguna masing-masing media sosial.

Kepentingan media sosial sebagai sarana pelayanan adalah media informasi seperti jadwal, tarif, waktu beroperasi, ketersediaan kursi, dan sebagai sarana penampungan saran dan keluhan pelanggan. Sedangkan fungsi humas (*public relation*) pada media sosial DAMRI adalah untuk memberi informasi terkini seperti prestasi/penghargaan yang berhasil diraih perusahaan, acara-acara kementerian terkait, ucapan selamat untuk BUMN dan instansi pemerintah dalam kesempatan khusus (HUT/pelantikan pejabat tinggi/duka cita), ucapan hari besar nasional dan agama. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19, fungsi media sosial berkembang sebagai salah satu media yang efektif untuk kampanye mengenai pencegahan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah seperti 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas) dan himbauan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

and digital wallets (Gopay, OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay). In addition to direct payments through the application, for customers who do not have a digital wallet or online bank, customers can order tickets through DAMRI Apps and then make payments at Indomaret, Alfamart, and Pos Indonesia counters. Currently, the routes available and sold on DAMRI Apps are airport, AKAP, AKDP, and tourism routes.

Social Media

The social media currently actively used by DAMRI are Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, and Youtube with the account name @damriindonesia. In addition to its main role of promoting DAMRI's services, DAMRI's social media is also used for customer service and public relations purposes. In addition to uploads that are free of charge, there are social media advertising services commonly known as Ads. These ads (Ads) are specifically targeted at users of each social media.

The importance of social media as a service facility is as a medium for information such as schedules, rates, operating hours, seat availability, and as a means of accommodating customer suggestions and complaints. Meanwhile, the function of public relations on DAMRI social media is to provide the latest information such as achievements/awards that have been achieved by the company, related ministry events, congratulatory statements to SOEs and government agencies on special occasions (HUT/inauguration of high officials/condolences), as well as greetings of national and religious holidays. Along with the Covid-19 pandemic, the function of social media has developed into an effective medium for campaigns regarding Covid-19 prevention according to government recommendations such as 5M (washing hands, wearing masks, maintaining distance, avoiding crowds, limiting mobility) and the appeal for a Covid-19 vaccine.

Situs Web DAMRI

DAMRI memiliki dua situs web yaitu situs utama perusahaan (compro.damri.co.id) dan situs web penjualan tiket (damri.co.id) dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Situs perusahaan fokus pada memberikan informasi umum terkait DAMRI sebagai sebuah korporasi. Informasi tersebut mencakup informasi terkait visi misi, nilai organisasi, struktur organisasi DAMRI, segmen-segmen usaha, PPID, serta berita terkini terkait DAMRI. Situs Tiket DAMRI (damri.co.id) fokus pada pemesanan dan pembelian tiket sebagai alternatif pembelian melalui DAMRI Apps. Situs tiket DAMRI disediakan sebagai alternatif pembelian tiket bagi pelanggan yang tidak memiliki gawai yang berbasis Android. Saat ini, rute yang tersedia dan dijual di situs web DAMRI adalah rute bandara, AKAP, dan AKDP.

Online Travel Agent (OTA)

Keberadaan OTA dapat menjadi salah satu saluran pemasaran digital yang efektif. Bekerjasama dengan OTA besar menguntungkan bagi perusahaan karena masing-masing OTA memiliki basis pengguna sendiri. Sebagian besar OTA sudah didukung dengan infrastruktur informasi teknologi yang baik dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang membebani perusahaan. Hingga saat ini, DAMRI telah bekerjasama dengan Traveloka dan RedBus.

DAMRI Integrate Logistic System (DILS)

DILS Merupakan salah satu sistem penerimaan dan pengiriman barang/Paket Ritel menggunakan mobil barang/paket ritel kendaraan bus DAMRI secara digitalisasi yang mulai diterapkan pada tahun 2020 hingga saat ini.

Saluran pemasaran konvensional saat ini masih diperlukan dalam pemasaran khususnya untuk daerah-daerah dengan akses internet terbatas. Pemasaran konvensional yang digunakan adalah media cetak berupa spanduk, poster, selebaran (flyer), pamflet, standing banner, x-banner, dan stiker. In-

DAMRI Website

DAMRI has two websites, namely the company's main website (compro.damri.co.id) and the ticket sales website (damri.co.id) each with different functions. The company website focuses on providing general information regarding DAMRI as a corporation. The information includes information related to the vision and mission, organizational values, DAMRI organizational structure, business segments, PPID, as well as the latest news related to DAMRI. The DAMRI Ticket site (damri.co.id) focuses on booking and purchasing tickets as an alternative to purchasing through DAMRI Apps. The DAMRI ticketing site is provided as an alternative to purchasing tickets for customers who do not have an Android-based device. Currently, the routes available and for sale on the DAMRI website are airport, AKAP, and AKDP routes.

Online Travel Agent (OTA)

The existence of OTA can be one of the effective digital marketing channels. Collaborating with large OTAs is advantageous for the company as each OTA has its own user base. Most OTAs are supported by a good information technology infrastructure and do not require maintenance costs that burden the company. Until now, DAMRI has collaborated with Traveloka and RedBus.

DAMRI Integrate Logistic System (DILS)

DILS is one of the systems for receiving and delivering goods/Retail Packages using digitalized goods cars/retail packages for DAMRI bus vehicles which has been implemented since 2020 until now.

Conventional marketing channels are still needed in marketing, especially for areas with limited internet access. Conventional marketing that are employed is using the print media in the form of banners, posters, flyers (flyers), pamphlets, standing banners, x-banners, and stickers. Most of the information contained in the

formasi yang dimuat dalam media-media cetak tersebut sebagian besar berupa informasi terkait trayek baru atau trayek yang sudah ada kemudian dipasang di area kantor atau pemberangkatan DAMRI serta area-area yang banyak dilewati masyarakat umum. Untuk meningkatkan keterjangkauan layanan DAMRI, didirikan pula booth/loket penjualan di lokasi-lokasi strategis yang memiliki potensi pelanggan yang besar seperti bandara, stasiun, dan terminal.

print media is in the form of information related to new routes or existing routes which are then installed in the office area or DAMRI departures area as well as areas that are often passed by the general public. To increase the reach of DAMRI's services, sales booths/counters have also been established in strategic locations with large customer potential, such as airports, stations, and terminals.

SEGMENTASI PASAR
BERDASARKAN SEGMENT USAHA

MARKET SEGMENT
BASED ON BUSINESS SEGMENT

No No	Segmen Usaha Business Segment	Karakter Pelanggan Customer Character
1	Angkutan Pemandu Moda/Angkutan Bandara Integrated Mode Transport/Airport Transport	Demografi: a. Usia: 12 – 60 tahun b. Gender: pria dan wanita c. Pekerjaan: pelajar/mahasiswa, karyawan d. Pendapatan: middle income, price insensitive Demographics: a. Age: 12 – 60 years old b. Gender: male and female c. Occupation: student, employee d. Income: middle income, price insensitive Psikografi: a. Aktivitas: karyawan yang kerap melakukan perjalanan dinas, karyawan area bandara, orang yang memiliki rumah dan kota tempat kerja terpisah b. Tingkah laku: familiar dengan internet dan gawai, berangkat menyesuaikan jadwal penerbangan c. Nilai: kenyamanan, ketepatan waktu, fasilitas armada Psychographics: a. Activities: employees who frequently travel for business, airport employees, people who work and live in different cities b. Behavior: Familiar with internet and mobile devices, departs according to flight schedule c. Value: convenience, punctuality, fleet facilities Geografi: a. Tinggal atau berasal dari Ibu kota provinsi b. Tinggal atau berasal dari daerah penyangga yang terjangkau trayek dari dan menuju bandara Geography: a. Live or coming from the provincial capital b. Live or coming from satellite regions that is covered by routes to and from the airport

No No	Segmen Usaha Business Segment	Karakter Pelanggan Customer Character
2	Angkutan Dalam Kota <i>Urban Transportation</i>	Demografi: - Usia: 12 – 70 tahun - Gender: pria dan wanita - Pekerjaan: pelajar/mahasiswa, karyawan, pedagang - Pendapatan: low-high income, price insensitive <i>Demographics:</i> <i>Age: 12 – 70 years old</i> <i>Gender: male and female</i> <i>Occupation: student, employee, merchant</i> <i>Income: low-high income, price insensitive</i> Psikografi: - Aktivitas: berangkat ke sekolah, berangkat kuliah, bekerja, berdagang - Tingkah laku: padat di pagi hari ketika jam berangkat kantor dan pulang pada sore hari ketika jam pulang kantor (rush hours) - Nilai: kecepatan, keamanan, ketepatan waktu, harga terjangkau <i>Psychographics:</i> <i>Activities: going to school, to university, working, selling/trading</i> <i>Behavior: packed in the morning during office rush hour and going home in the afternoon during office to home rush hour</i> <i>Value: speed, safety, punctuality, affordable fares</i> Geografi: - Penduduk di area kota - Penduduk dari luar area kota yang bepergian ke kota dengan multimoda <i>Geography:</i> <i>Residents from city area</i> <i>Residents from outside the city area travelling to the city with multimodal transport</i>
3	Angkutan Dalam Kota Dalam Provinsi dan Antar-Kota Antar-Provinsi <i>Inter-City Transport in a Province and Inter-City Transport Inter-Province</i>	Demografi: - Usia: 12 – 70 tahun - Gender: Pria dan Wanita - Pekerjaan: pelajar/mahasiswa, karyawan, pedagang - Pendapatan: low income, price insensitive <i>Demographics:</i> <i>Age: 12 – 70 years old</i> <i>Gender: male and female</i> <i>Occupation: student, employee, merchant</i> <i>Income: low income, price insensitive</i> Psikografi: - Aktivitas: kuliah, bekerja, berdagang, berkunjung ke sanak saudara, wisata - Tingkah laku: karyawan PJK (pulang Jumat kembali Ahad), familiar dengan teknologi dan internet, bepergian ketika ada libur panjang - Nilai: Kenyamanan, kecepatan <i>Psychographics:</i> <i>Activities: going to college, working, selling/trading, visiting families, tourism</i> <i>Behavior: PJK employee (going home Friday coming back Sunday), familiar with technology and internet, travel during long holiday</i> <i>Value: comfort, speed</i> Geografi: - Penduduk dari luar area kota yang bepergian ke kota dengan multimoda <i>Geography:</i> <i>Residents from outside the city area travelling to the city with multimodal transport</i>

No No	Segmen Usaha Business Segment	Karakter Pelanggan Customer Character
4	Angkutan Lintas Batas Negara <i>Transboundary Transport</i>	Demografi: a. Usia: 12 – 60 tahun b. Gender: Pria dan Wanita c. Pekerjaan: pekerja migran, pedagang d. Etnis: Tionghoa e. Pendapatan: middle income, price insensitive <i>Demographics:</i> a. Age: 12 – 60 years old b. Gender: male and female c. Occupation: migrant workers, merchant d. Ethnic: Chinese e. Income: middle income, price insensitive Psikografi: a. Aktivitas: bekerja, berdagang, pulang kampung b. Tingkah laku: bepergian ketika ada peristiwa khusus seperti Imlek c. Nilai: Kenyamanan, keamanan, fasilitas armada, usia armada <i>Psychographics:</i> a. Activities: working, selling/trading, going back to hometown b. Behavior: travelling during special occasions such as Chinese New Year c. Value: comfort, safety, fleet facilities, age of fleet Geografi: a. Penduduk yang berasal dari luar kota b. Penduduk Malaysia c. Penduduk Brunei Darussalam <i>Geography:</i> a. Residents from outside city b. Malaysian residents c. Brunei Darussalam residents
5	Angkutan Perintis <i>Pioneer Transport</i>	Demografi: a. Usia: 18 – 60 tahun b. Gender: Pria dan Wanita c. Pekerjaan: pelajar/mahasiswa, pedagang d. Pendapatan: low-income, highly price sensitive <i>Demographics:</i> a. Age: 18 – 60 years old b. Gender: male and female c. Occupation: student, merchant d. Income: low income, highly price sensitive Psikografi: a. Aktivitas: sekolah, berdagang b. Nilai: ekonomis/harga sangat terjangkau, andalan mobilitas dari desa ke kota terdekat/ibu kota daerah karena satu-satunya angkutan umum yang beroperasi <i>Psychographics:</i> a. Activities: school, trading/selling b. Value: economy/highly affordable fares, mainstay transportation from the village to the nearest city/regional capital as the only operating public transport Geografi: a. Penduduk yang berasal dari daerah 3T dan sulit dijangkau <i>Geography:</i> a. Residents from 3T regions and difficult to reach

No No	Segmen Usaha <i>Business Segment</i>	Karakter Pelanggan <i>Customer Character</i>
6	Angkutan Pariwisata <i>Tourism Transport</i>	Demografi: - Usia: 18 – 60 tahun - Gender: Pria dan Wanita - Pekerjaan: mahasiswa, karyawan, social media influencer, travel blogger - Pendapatan: middle-high income, price insensitive - Pendidikan: SMA-S3 <i>Demographics:</i> <i>Age: 18 – 60 years old</i> <i>Gender: male and female</i> <i>Occupation: student, employee, social media influencer, travel blogger</i> <i>Income: middle-high income, price insensitive</i> <i>Education: Highschool - Doctorate</i> Psikografi: - Aktivitas: berwisata, studi - Gaya Hidup: memiliki hobi traveling - Tingkah laku: well informed, solo travel, group travel, familiar dengan teknologi dan internet, berwisata ketika ada libur panjang - Nilai: keamanan, kepastian rute, jam layanan, tarif, dan fasilitas armada <i>Psychographics:</i> <i>Activities: tourism, study</i> <i>Lifestyle: travelling as a hobby</i> <i>Behavior: well informed, solo travel, group travel, familiar with technology and internet, travel during long holiday</i> <i>Value: safety, route certainty, service hours, tariff, and fleet facilities</i> Geografi: - Pelanggan yang berasal dari kota besar/ perkotaan - Pelanggan yang berasal dari luar provinsi - Penduduk local <i>Geography:</i> <i>Customers from big city/cities</i> <i>Customers from outside the province</i> <i>Local residents</i>
7	Angkutan Logistik <i>Logistic Transport</i>	Demografi: - Usia: 18 – 60 tahun - Gender: Pria dan Wanita - Pekerjaan: Pedagang/Pengusaha - Pendapatan: low-high income, price sensitive <i>Demographics:</i> <i>Age: 18 – 60 years old</i> <i>Gender: male and female</i> <i>Occupation: Merchant/Businessman</i> <i>Income: low-high income, price sensitive</i> Psikografi: - Aktivitas: melakukan pengiriman barang - Tingkah laku: mengirim paket dalam partai sedang-besar dalam dengan frekuensi tinggi, mengirim barang ke daerah yang memiliki trayek DAMRI - Nilai: Kecepatan, kondisi barang ketika sampai tujuan, keamanan barang kiriman <i>Psychographics:</i> <i>Activities: transporting goods</i> <i>Behavior: Sending mid-large package in high frequency, sending goods to areas covered by DAMRI</i> <i>Value: speed, condition of goods until destination, safety of transported goods</i> Geografi: - Pelanggan yang berada di daerah operasional DAMRI <i>Geography:</i> <i>Customers within the operational area of DAMRI</i>



KINERJA OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATION PERFORMANCE FOR EACH BUSINESS SEGMENT

Segmen usaha utama perusahaan meliputi sebagai berikut:

1. Angkutan Bandara
2. Angkutan Antar Kota
3. Angkutan Perkotaan
4. Angkutan Lintas Batas Negara
5. Angkutan Perintis
6. Angkutan Paket/Barang
7. Angkutan Travel/Pariwisata

Penjelasan tiap-tiap segmen usaha telah disampaikan pada sub bagian Produk atau Jasa (Kegiatan Usaha) pada bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini.

The Company's main business segments include the following:

1. Airport Transport
2. Intercity Transport
3. Urban Transport
4. Cross-border Transport
5. Pioneer Transport
6. Freight/Package Transport
7. Travel/Tourism Transport

The explanation of each business segment is elaborated in the Product or Services (Business Activities) sub section in the Profile Section of this Annual Report.

PRODUKTIVITAS SEGMENT

SEGMENT PRODUCTIVITY

TABEL PRODUKTIVITAS SEGMENT

TABLE OF SEGMENT PRODUCTIVITY

TINJAUAN PRODUKSI PER SEGMENT USAHA <i>Production Overview per Business Segment</i>			REALISASI <i>Realization</i>			
No.	Segmen <i>Segment</i>	Uraian <i>Description</i>	2021	2020	Persentase <i>Percentage</i>	Nominal <i>Nominal</i>
1	Angkutan Bandara <i>Airports Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	69,772	78,044	112%	8,272
		Trip <i>Trip</i>	276,424	388,919	141%	112,495
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	21,205	23,768	112%	2,563
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	2,086,574	3,216,267	154%	1,129,693

2	Angkutan Antarkota <i>Intercity Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	66,566	73,692	111%	7,126
		Trip <i>Trip</i>	98,755	145,788	148%	47,033
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	25,079	23,914	95%	(1,165)
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	2,118,602	1,951,423	92%	(167,179)
		Total Pelanggan (ribu pnp-km)** <i>Total Customers</i>	730,770,830	419,137,051	57%	(311,633,779)
3	Angkutan Perkotaan <i>Urban Transportation</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	59,532	84,207	141%	24,675
		Trip <i>Trip</i>	401,822	652,194	162%	250,372
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	11,391	1,549	14%	(9,842)
		Total Pelanggan (ribu pnp-orang)* <i>Total Customers</i>	5,693,989	22,832,437	401%	17,138,448
4	Angkutan Lintas Batas Negara <i>Transboundary Transport</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	1,751	1,787	102%	36
		Trip <i>Trip</i>	1,646	1,568	95%	(78)
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	784	788	101%	4
		Total Pelanggan (ribu pnp-orang)* <i>Total Customers</i>	36,529	34,232	94%	(2,297)
		Total Pelanggan (ribu pnp-km)** <i>Total Customers</i>	17,271,039	16,165,148	94%	(1,105,891)
5	Angkutan Perintis <i>Pioneer Transport</i>	Total Customers	17,271,039	16,165,148	94%	(1,105,891)
		Trip <i>Trip</i>	308,100	319,665	104%	11,565
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	25,499	24,028	94%	(1,471)
		Total Pelanggan (ribu pnp-orang)** <i>Total Customers</i>	1,370,098	1,359,831	99%	(10,267)
		Total Pelanggan (ribu pnp-km)** <i>Total Customers</i>	133,690,742	119,863,298	90%	(13,827,444)
6	Angkutan Paket/Barang <i>Freight/Package Transport</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	13,711	1,835	13%	(11,876)
		Trip <i>Trip</i>	10,867	13,205	122%	2,338
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	3,554	4,524	127%	970
		Total Tonase (ribu ton) <i>Total Tonnage (thousand ton)</i>	47,769	45,445	95%	(2,324)
		Total Tonase (ribu ton-km) <i>Total Tonnage (thousand ton-km)</i>	24,672,948	22,118,438	90%	(2,554,510)

7	Angkutan Travel/Pariwisata <i>Travel/Tourism Transport</i>	Hari Jalan <i>Road Days</i>	22,055	33,845	153%	11,790
		Trip <i>Trip</i>	62,255	139,501	224%	77,246
		Total Perjalanan (ribu km) <i>Total trip (thousand km)</i>	4,623	7,619	165%	2,996
		Total Pelanggan (ribu penumpang) <i>Total customers (thousand pax)</i>	185,238	255,425	138%	70,187
		Total Pelanggan (ribu pnp-orang)* <i>Total Customers</i>	13,754	250	2%	(13,504)

TABEL PENDAPATAN
DAN PROFITABILITAS SEGMENT

TABLE ON SEGMENT INCOME
AND PROFITABILITY



No.	Segmen Segment	Pendapatan Income		Profit		Pertumbuhan Growth	
		2021	2020	2021 (akuntansi)	2020	Pendapatan Income	Profit
1	Angkutan Bandara <i>Airports Transportation</i>	149,717,075	194,213,963	(8.813.446)	(32,357,176)	77.09%	0.00%
2	Angkutan Antar Kota <i>Inter-City Transportation</i>	192,477,400	175,347,154	(9.865.883)	(24,179,742)	109.77%	0.00%
3	Angkutan Perkotaan <i>Urban Transport</i>	61,922,383	140,613,081	(33.621.289)	(59,586,641)	44.04%	0.00%
4	Angkutan Lintas Batas Negara <i>Transboundary Transport</i>	8,345,826	3,004,084	-	(2,991,363)	277.82%	0.00%
5	Angkutan Perintis <i>Pioneer Transportation</i>	151,357,841	153,061,370	6.672.761	2,134,144	98.89%	0.00%
6	Angkutan Paket/ Barang <i>Freight/Package Transport</i>	21,336,017	26,761,826	3.041.559	2,308,477	79.73%	0.00%
7	Wisata <i>Tourism</i>	27,127,409	45,152,516	469.169	12,111,840	-	-



PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

Semasa pandemi Covid-19 menjadi masalah global dari tahun 2020 dan sangat memengaruhi perekonomian, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya menjadi negatif karena pandemi ini. Sektor transportasi merupakan salah satu yang paling berdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kondisi ini tidak berbeda terlalu jauh dengan tahun sebelumnya. Mobilitas masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah dalam rangka pengendalian penularan Covid-19, terutama puncaknya adalah penyebaran varian Delta pada bulan Juli-Agustus 2021.

Prospek usaha penumpang orang sewaktu terjadinya pembatasan mobilitas masyarakat tidak cukup baik, bahkan kondisi yang mulai berangsur membaik dari April-Juni 2021 tiba-tiba harus kembali terpuruk ke dasar karena adanya penyebaran varian Delta yang cukup banyak memakan korban jiwa di Indonesia, bahkan kondisi waktu itu lebih buruk dari tahun 2020. Kondisi mulai perlahan membaik di bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 walaupun masih cukup memprihatinkan. Prospek usaha di segmen bandara (Pemadu Moda) dan Antar Kota yang biasanya menjadi ujung tombak DAMRI, masih belum bisa keluar dari tekanan. Demikian pula sektor Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) yang masih ditutup lintasan perbatasan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk kendaraan umum.

Segmen Pariwisata juga masih terganggu karena pandemi. Segmen Penugasan prospeknya cukup stabil karena pemerintah masih mengalokasikan anggaran penugasan di tengah *refocusing* anggaran pemerintah digunakan untuk penanggulangan

During the Covid-19 pandemic, which became a global problem from 2020 and greatly affected the economy, many countries had negative economic growth due to this pandemic. The transportation sector is one of the most impacted sector by the Covid-19 pandemic. In 2021 this condition did not differ too much from the previous year. The government still limits public mobility in order to control the transmission of Covid-19, especially during the peak spread of the Delta variant in July-August 2021.

The business prospects of people traveling when there is a restriction on community mobility are insufficient. In fact, conditions that had begun to gradually improve from April-June 2021 suddenly free fall due to the spread of the Delta variant which took quite a lot of lives in Indonesia. The situation during that period was even worse than in 2020. Conditions began to slowly improve in October to December 2021, though still quite worrisome. Business prospects in the airport (intermodal) and Inter-City segments, which are usually the spearhead of DAMRI, have not been able to avoid the pressure. Likewise, the Transboundary Transportation (ALBN) sector is still closed by the Malaysian and Indonesian governments for public transportation.

The Tourism segment is also still disrupted due to the pandemic. Assignment segment prospect is quite stable because the government is still allocating assignment budget in the midst of refocusing the government budget to overcoming the Covid-19 pandemic. The com-

pandemi Covid-19. Segmen bus kota yang bersifat komersial menyebabkan kerugian yang cukup besar karena rendahnya *load factor* bus kota. Namun demikian ditengah kesulitan dalam menjalankan trayek bus kota secara komersial, pemerintah memberikan penugasan kepada DAMRI untuk menjalankan layanan bus kota penugasan melalui skema *Buy The Service* (BTS) di Kota Bandung. Hal ini sangat strategis mengingat layanan BTS ini akan dilaksanakan secara masif di beberapa kota ke depannya dan potensi DAMRI sangat besar dalam memenangkan penugasan BTS di beberapa kota lainnya.

Di sisi lain masih ada peluang-peluang usaha lainnya yang dapat dikejar dalam rangka perbaikan kinerja. Peluang di pengangkutan barang cukup menjanjikan karena tidak ada pembatasan layaknya peluang angkutan orang. Beberapa peluang pengangkutan barang seperti angkutan pupuk, angkutan bantuan sosial (bansos), obat-obatan, dan sebagainya diupayakan melalui kerjasama *Business to Business*. Demikian pula untuk mengoptimalkan *load factor* armada yang tidak terserap dalam rute reguler, dilakukan upaya antara lain dengan mendapatkan angkutan karyawan dan angkutan repatriasi bekerjasama dengan Satgas Covid.

Upaya pengendalian biaya juga telah dilakukan melalui beberapa program sentralisasi melalui penerapan *Cash Management System*, memberdayakan *Enterprise Resource Planning* (ERP) FORCA dan sentralisasi pendapatan telah mulai dilakukan untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran setiap cabang serta perusahaan melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Upaya lain yang dilakukan dengan mengoptimalkan trayek-trayek yang ada pada saat pandemi pengaturan armada yang optimal.

commercial city bus segment causes considerable losses due to the low load factor of city buses. However, in the midst of difficulties in running city bus routes commercially, the government assigned DAMRI to run an assigned city bus service through the Buy The Service (BTS) scheme in Bandung City. This is very strategic considering that the BTS service will be implemented massively in several cities in the future and the potential for DAMRI is very large in winning BTS assignments in several other cities.

On the other hand, there are other business opportunities that can be pursued in order to improve performance. Opportunities in the transportation of goods are quite promising because there are no restrictions like in the transportation of passengers. Several opportunities for transportation of goods such as transportation of fertilizers, transportation of social assistance (bansos), medicines, and so on are pursued through Business to Business collaborations. Likewise, to optimize the fleet load factor that is not absorbed on regular routes, efforts have been made, among others, by obtaining employee transportation and repatriation transportation in collaboration with the Covid Task Force.

Efforts to control costs have also been carried out through several centralization programs through the implementation of the Cash Management System, empowering FORCA's Enterprise Resource Planning (ERP), while revenue centralization has begun to control the income and expenses of each branch as well as the company optimizing available resources.

Another effort was made by optimizing the existing routes during the pandemic, hence optimizing management of fleet.



STRATEGI KE DEPAN

STRATEGY FOR THE FUTURE

Di masa mendatang, manajemen akan terus secara aktif memantau dan mengeksplorasi serta menjalankan strategi-strategi penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan serta selalu mendukung dan menjalankan program pemerintah.

Tahun 2022 diharapkan Perusahaan dapat masuk dalam “Phase Rebound”, di mana Perusahaan masih dalam mode *survival*, perusahaan melakukan *turn around* menuju ke perbaikan kondisi ketahanan perusahaan. Berdasarkan kondisi saat ini, Perusahaan menetapkan posisi dari tiap segmen untuk menetapkan strategi yang akan dilakukan dalam tahun 2022.

Berpatokan dengan hal tersebut di atas, beberapa inisiatif strategis Perusahaan yang akan dilakukan dalam tahun 2022 yang sesuai dengan Formulasi Prioritas Kementerian BUMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

In the future, management will continue to actively monitor, explore, and implement adjustment strategies to maintain the Company’s business continuity and always support and implement government programs.

In 2022, it is expected that the Company will enter the “Rebound Phase”, whereby the Company is still in survival mode, the company will make a turn around towards improving the condition of the Company’s resilience. Based on current conditions, the Company determines the position of each segment to map the strategy to be carried out in 2022.

Based on the above, some of the Company’s strategic initiatives that will be carried out in 2022 in accordance with the Priority Formulation of the Ministry of SOEs 2020-2024 are as follows:

No	Prioritas BUMN SOE’s Priority	Strategi Strategy	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives
1	Memberi Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia <i>Providing Social and Economic Value for Indonesia</i>	Strategi segmentasi layanan yang optimal <i>Optimum Segmented Services Strategy</i>	1. Fokus mengembangkan segmen strategis: Bandara, Antar Kota, Logistik, dan Pariwisata yang memaksimalkan layanan antar jemput dan bundling paket wisata. 2. Memenangkan tender Keperintisan di 47 Cabang di seluruh Indonesia, KSPN, dan Tol Laut. 3. Refocusing dari layanan komersial bus kota menjadi fokus memenangkan program Buy The Service (BTS) demi efektivitas pengelolaan segmen Bus Kota 4. Pengembangan pendapatan Non Farebox 1. Focus on developing strategic segments: Airport, Inter-City, Logistics, and Tourism that maximizes shuttle services and tour package bundling. 2. Won the Pioneering tender in 47 Branches throughout Indonesia, KSPN, and the Sea Toll Road. 3. Refocusing from commercial city bus services to focusing on winning the Buy The Service (BTS) program for effectiveness of managing the City Bus segment 4. Non Farebox revenue development

No	Prioritas BUMN SOE's Priority	Strategi Strategy	Inisiatif Strategis Strategic Initiatives
2	Inovasi Business Model <i>Business Model Innovation</i>	Restrukturisasi model bisnis inter-koneksi, distribusi dan logistic <i>Restructuring interconnection, distribution, and logistic business model</i>	5. Pengembangan skema Interkoneksi <i>Hub-Spoke</i> dan Restrukturisasi Cabang 6. Kolaborasi dalam pengembangan segmen logistik 7. Sentralisasi 8. Mengalihkan agen konvensional ke <i>channel</i> non-konvensional melalui perluasan penggunaan e-ticketing. 9. Pengembangan dan penguatan unit Perbengkelan menjadi SBU 10. Membangun layanan umrah dan Haji di Arab Saudi bekerjasama dengan BPKH 5. <i>Development of the Hub-Spoke Interconnection scheme and Branch Restructuring</i> 6. <i>Collaboration in the development of the logistics segment</i> 7. <i>Centralization</i> 8. <i>Switching conventional agents to non-conventional channels through the expansion of the use of e-ticketing.</i> 9. <i>Development and strengthening of Workshop units into SBU</i> 10. <i>Build Umrah and Hajj services in Saudi Arabia in collaboration with BPKH</i>
3	Kepemimpinan Teknologi <i>Technology Leadership</i>	Memanfaatkan teknologi untuk efektivitas kontrol dan efisiensi yang ramah lingkungan <i>Utilizing technology for control effectiveness and efficiency that is environment friendly</i>	11. Optimalisasi kontrol armada melalui <i>command center</i> 12. Penambahan modul ERP untuk menambah efektivitas kontrol 13. Layanan Bus Listrik melalui kolaborasi <i>Joint Operation</i> 11. <i>Optimization of fleet control through the command center</i> 12. <i>Added ERP module to increase control effectiveness</i> 13. <i>Electric Bus Service through Joint Operation collaboration</i>
4	Peningkatan Investasi <i>Increase Investment</i>	Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat <i>Optimizing asset value and creating a healthy investment ecosystem</i>	14. Pengembangan jaringan <i>public transport</i> komersial melalui skema sewa armada / kolaborasi 15. Memaksimalkan rekondisi armada untuk kebutuhan pengembangan trayek 14. <i>Development of a commercial public transport network through a fleet rental/collaboration scheme</i> 15. <i>Maximizing fleet reconditioning for route development needs</i>
5	Pengembangan Talenta <i>Developing Talents</i>	<i>Integrated Talent and Performance Management</i> <i>Integrated Talent and Performance Management</i>	16. Pengembangan <i>Capacity Building</i> yang berfokus pada pengembangan kompetensi, manajerial dan <i>supervisory development</i>, <i>functional development</i>, dan nilai-nilai AKHLAK 17. <i>Performance management</i> melalui pembuatan infrastruktur Sistem <i>Integrated Performance Management System</i> (IPMS); 18. Succession Management untuk meningkatkan <i>talent pool</i> di BOD-1 dan BOD-2 melalui <i>Management Development Program</i>. 19. Review dan evaluasi struktur Cabang untuk mengakomodasi mendukung <i>core business</i> Perusahaan. 16. <i>Capacity Building development which focuses on competency development, Managerial and Supervisory development, Functional development, and AKHLAK values</i> 17. <i>Performance management through the creation of an Integrated Performance Management System (IPMS) infrastructure;</i> 18. <i>Succession Management to increase the talent pool in BOD-1 and BOD-2 through the Management Development Program.</i> 19. <i>Review and evaluation of Branch structure to accommodate supporting the Company's core business.</i>

Investasi untuk Menghadapi Tantangan ke Depan

Tahun 2022 diharapkan Perusahaan dapat memulihkan diri dari kerugian yang besar di tahun 2020-2021 dengan cara mengembalikan kondisi Perusahaan seperti masa sebelum pandemi. Pada fase ini diharapkan kondisi pandemi berangsur membaik dan mulai dilakukan pemulihan bisnis Perusahaan melalui pemanfaatan keunggulan Perusahaan sebelum pandemi sebagai kontributor utama dengan pendekatan yang lebih baik berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Fokus pengembangan yang akan dijalankan adalah memfokuskan ke empat segmen penugasan, yaitu Angkutan Bandara (Pemadu Moda), Angkutan Antar Kota, Angkutan Pariwisata/Charter dan Angkutan Barang (logistik), di samping upaya penanganan layanan Buy The Service dan keperintisan dari Kementerian Perhubungan.

Beberapa investasi yang sedang diupayakan meliputi:

- a. Investasi angkutan haji dan umrah di Arab Saudi yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diharapkan mulai beroperasi tahun 2023
- b. Investasi dan/atau peremajaan armada melalui rekondisi armada ataupun investasi yang pendanaannya diupayakan dari jaminan Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian Keuangan RI dalam memanfaatkan PMK 211 Tahun 2020.
- c. Investasi armada Buy The Service secara optimal hanya dilakukan bila ada kepastian memenangkan kontrak jangka panjang yang sesuai dengan periode investasi yang dilakukan.

Investment to Face Future Challenges

In 2022, it is hoped that the Company will be able to recover from large losses in 2020-2021 by returning the Company's condition to its pre-pandemic period. In this phase, it is hoped that the pandemic conditions will gradually improve and the Company's business recovery will begin by utilizing the Company's advantages before the pandemic as the main contributor, and with a better approach based on previous experience.

The focus of the development that will be carried out is focusing on the four assignment segments, namely Airport Transport (Pemadu Moda), Inter-City Transport, Tourism/Charter Transport, and Logistics Transport, while additionally expanding efforts to win the Buy The Service and pioneering services from the Ministry of Transport.

Some of the investments being pursued include:

- a. Investment in Hajj and Umrah transportation in Saudi Arabia in collaboration with the Hajj Financial Management Agency (BPKH) which is expected to start operating in 2023
- b. Investment and/or fleet rejuvenation through fleet reconditioning or investment whose funding is sought from the guarantee of the Indonesian Infrastructure Guarantee which is an extension of the Indonesian Ministry of Finance in utilizing PMK 211 Year 2020.
- c. Optimum investment in the Buy The Service fleet if there is certainty of winning long-term contracts in accordance with the investment period made.



URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

DESCRIPTION ON COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan terdiri atas:

1. Laporan Keuangan, No. 00431/2.1133/AU.1/06/0259-1/1/III/2022;
2. Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, No. PHHARP-AL/096/LD/LD/2022;
3. Laporan Pengendalian Intern, No. PHHARP-AL/095/PH/LD/2022;
4. Laporan atas Reviu Penilaian Tingkat Kesehatan, No. PHHARP-AL/106/TS/LD/2021;
5. Laporan atas Reviu Key Performance Indicators, No. PHHARP-AL/107/TS/LD/2021; dan
6. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, NO. 00401/2/1133/AU.2/06/0259-1/1/III/2021.

Auditor berpendapat bahwa terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang disajikan menyatakan "WAJAR" dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI per 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020 audit results by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners consisting of:

1. Financial Statements, No. 00431/2.1133/AU.1/06/0259-1/1/III/2022;
2. Report on Compliance with Legislation, No. PHHARP-AL/096/LD/LD/2022;
3. Internal Control Report, No. PHHARP-AL/095/PH/LD/2022;
4. Report on the Health Level Assessment Review, No. PHHARP-AL/106/TS/LD/2021;
5. Report on Key Performance Indicators Review, No. PHHARP-AL/107/TS/LD/2021; and
6. Partnership and Community Development Program Report, NO. 00401/2/1133/AU.2/06/0259-1/1/III/2021.

The auditor is of the opinion that the Financial Statements for Fiscal Year 2020 presented are "UNQUALIFIED OPINION" in all material respects, the financial position of Public Company (Perum) DAMRI as of 31 December 2020, as well as financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Standards Financial Accounting in Indonesia.



LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

COMPREHENSIVE PROFIT AND LOSS STATEMENT

TABEL LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

COMPREHENSIVE PROFIT AND LOSS STATEMENT
TABLE (IN MILLION IDR)

Keterangan	Tahun/ Year		Pertumbuhan Growth	Description
	2021	2020		
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUE
Pendapatan Angkutan	610.940	725.340	-16%	Transportation Revenue
Pendapatan Bukan Angkutan	25.566	10.740	11%	Non-transportation Revenue
Lainnya	2.076	2.256	2%	Others
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	638.583	738.336	-14%	TOTAL REVENUE
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSE
Operasional	521.751	643.460	-19%	Operational
Pemasaran	18.854	27.188	-31%	Marketing
Administrasi dan Umum	242.883	279.599	-13%	Administration and General
JUMLAH BEBAN USAHA	783.488	950.247	-18%	TOTAL OPERATING EXPENSES
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME EXPENSES
Pendapatan Lain-Lain	2.446	658	272%	Other Income
Beban Lain-Lain	12.348	279.599	-13%	Other expenses
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(9.902)	(14.547)	-32%	TOTAL OTHER INCOME (EXPENSES)
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN				FINANCIAL INCOME EXPENSES
Pendapatan Keuangan	446	2.974	-85%	Financial Income
Beban Keuangan	(14.349)	(18.736)	-23%	Financial Expenses
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN	(13.903)	(15.762)	-12%	TOTAL FINANCIAL INCOME EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	(168.710)	(242.220)	-30%	PROFIT BEFORE TAX

Keterangan	Tahun/ <i>Year</i>		Pertumbuhan <i>Growth</i>	<i>Description</i>
	2021	2020		
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK			TAX INCOME (EXPENSES)	
Pajak Kini	-	-	-	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan	15.808	22.143	-29%	<i>Deferred Tax</i>
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK	15.808	22.143	-29%	TOTAL INCOME (EXPENSES) TAX
LABA TAHUN BERJALAN	(152.902)	(220.077)	-31%	CURRENT YEAR PROFIT
PENGHASILAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
Keuntungan (Kerugian) Penurunan Aset	-	(6.652)	-	<i>Profit (Loss) on Asset Depreciation</i>
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	1.706	(77.687)	2296%	<i>Actuarial Profit (Loss)</i>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(151.196)	(304.416)	-50%	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)



LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

FINANCIAL POSITION STATEMENT TABLE
(IN MILLION IDR)



Keterangan	Tahun/ <i>Year</i>		Pertumbuhan <i>Growth</i>	<i>Description</i>
	2021	2020		
ASET			ASSET	
ASET LANCAR			CURRENT ASSET	
Kas dan Setara Kas	53.643	73.875	-27%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha - Setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 9.104.504.802 di 2021 dan Rp 8.765.415.252 di 2020	16.727	24.301	-31%	Accounts Receivable - After deducting allowance for impairment losses of IDR 9,104,504,802 in 2021 and IDR 8,765,415,252 in 2020

Keterangan	Tahun/ Year		Pertumbuhan Growth	Description
	2021	2020		
Piutang Lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.219.983.571 pada 2021 dan Rp 2.631.601.049 pada 2020	6.751	5.427	24%	Other Receivables - after deducting allowance for impairment losses of IDR 3,219,983,571 in 2021 and IDR 2,631,601,049 in 2020
Persediaan	4.780	8.750	-45%	Inventories
Biaya Dibayar di Muka	642	801	-20%	Prepaid Expenses
Uang Muka Pembelian	3.227	12.095	-73%	Down Payment
JUMLAH ASET LANCAR	85.771	125.249	-32%	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS	
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.528.994.929.620 pada 2021 dan Rp 1.433.773.276.359 pada 2020	864.452	945.986	-9%	Fixed Assets - after deducting accumulated depreciation of IDR 1,528,994,929,620 in 2021 and IDR 1,433,773,276,359 in 2020
Investasi Pada Entitas Asosiasi	319	319	0%	Investment in Associates
Aset dalam Proses	525	4.171	-87%	Assets in Progress
Aset Lain-lain	4.457	1.918	132%	Other Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	871.228	953.401	-9%	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	956.998	1.078.650	-11%	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITY AND EQUITY	
LIABILITAS			LIABILITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			SHORT-TERM LIABILITIES	
Utang Usaha	35.611	41.479	-14%	Accounts Payable
Pendapatan Diterima di Muka	4.864	3.377	44%	Unearned Revenue
Beban Akrua	724	1.253	-42%	Accrued Expenses
Utang Pajak	935	1.806	-48%	Taxes Payable
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	17.542	23.738	-26%	Current Maturities of Long Term Bank Loan
Utang Lain-Lain	83.355	51.349	62%	Other Payables
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	143.134	123.002	16%	TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG-TERM LIABILITIES	
Liabilitas Sewa Pembiayaan	-	-		Lease Liability
Liabilitas Pajak Tangguhan	38.805	55.247	-30%	Deferred Tax Liability
Utang Bank Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	161.812	167.104	-3%	Non Current Maturities of Long Term Bank Loan
Utang Investasi	1.191	2.104	-4%	Investment Loan
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	223.780	236.857	-6%	Post-Employment Benefits Liability
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	459.463	461.222	0%	TOTAL LONG-TERM LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	602.598	584.224	3%	TOTAL LIABILITY

Keterangan	Tahun/ Year		Pertumbuhan Growth	Description
	2021	2020		
EKUITAS				EQUITY
Modal Disetor	19.700	19.700	0%	Paid-up Capital
Penyertaan Modal Negara (PMN)	627.721	627.721	0%	State Equity Participation
Bantuan Pemerintah Lainnya yang belum ditentukan statusnya		-		Other unspecified government assistance
Modal Sumbangan	15.207	4.266	255%	Donated Capital
Cadangan Modal	(51.965)	194.252	-127%	Capital Reserves
Penghasilan Komprehensif Lain	(103.359)	(131.437)	-21%	Other Comprehensive Income
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(152.902)	(220.077)	-31%	Profit (Loss) For The Year
TOTAL EKUITAS	354.400	494.425	-28%	TOTAL EQUITY
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	956.998	1.078.649	-11%	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

ASET

Komposisi aset Perusahaan pada tahun 2021 terdiri atas 8,96% aset lancar dan 91,04% aset tidak lancar dari total jumlah aset keseluruhan. Jumlah aset tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 121.652 juta atau 11,27% dari tahun 2020, yaitu dari Rp 1.078.650 juta menjadi Rp 956.998 Juta pada tahun 2020.

Aset Lancar

Perusahaan membukukan aset lancar tahun 2021 sebesar Rp 85.771 juta, turun Rp 39.478 juta atau 31,52% dibanding 2020, yaitu sebesar Rp 125.249 Juta.

Kas dan Setara Kas

Pada tahun 2020, Kas dan Setara Kas tercatat sebesar Rp 53.643 juta, mengalami penurunan Rp 20.232 juta atau 27,39% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 73.875 Juta menjadi Rp 53.643 juta. Penurunan Kas dan Setara Kas diakibatkan peningkatan pengeluaran kas untuk operasional (beban operasional dan karyawan).

ASSETS

The composition of the Company's assets in 2021 consists of 8.96% current assets and 91.04% non-current assets of the total total assets. Total assets in 2021 decreased by IDR 121,652 million or 11.27% from 2020, from IDR 1,078,650 million to IDR 956,998 million in 2020.

Current Assets

The company recorded current assets in 2021 of IDR 85,771 million, a decrease of IDR 39,478 million or 31.52% compared to 2020, which was IDR 125,249 million.

Cash and Cash Equivalents

In 2020, Cash and Cash Equivalents were recorded at Rp. 53,643 million, a decrease of Rp. 20,232 million or 27.39% compared to 2020, which was Rp. 73,875 million to Rp. 53,643 million. Decrease in Cash and Cash Equivalents due to an increase in cash disbursements for operations (operating and employee expenses).

Piutang Usaha

Perusahaan membukukan piutang usaha tahun 2021 sebesar Rp 16.727 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 7.574 juta atau 31,17% dibanding dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 24.301 juta. Penurunan Piutang Usaha seiring menurunnya pendapatan usaha.

Persediaan

Pada tahun 2021 Persediaan tercatat sebesar Rp 4.780 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 3.970 juta atau 45,37% dibanding dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 8.750 juta. Penurunan Persediaan dikarenakan adanya pengurangan pembelian persediaan selama pandemi Covid-19.

Biaya Dibayar di Muka

Perusahaan mencatat biaya di bayar di muka tahun 2021 sebesar Rp 642 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 159 Juta atau 19,85% dibanding dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 801 juta. Penurunan biaya dibayar di muka dikarenakan pengetatan biaya selama pandemi Covid-19.

Uang Muka

Pada tahun 2021, uang muka pembelian sebesar Rp 3.227 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 8.868 juta atau 73,32% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 12.095 juta. Penurunan uang muka pembelian dikarenakan menurunnya uang muka karyawan dan uang muka berupa Jaminan pelaksanaan pekerjaan kontraktual.

Aset Program

Perusahaan mencatat aset program tahun 2021 sebesar Rp 1.475 juta, dengan kenaikan sebesar Rp 468 juta atau 46,47% dibanding tahun 2020 sebesar Rp 1.007 Juta. Kenaikan aset program dikarenakan meningkatnya penempatan dana pensiun di tahun 2021 dibandingkan 2020.

Account Receivables

The company recorded account receivables in 2021 amounting to Rp 16,727 million, a decrease of Rp 7,574 million or 31.17% compared to 2020 which was Rp 24,301 million. Decrease in Accounts Receivable in line with the decline in operating income.

Inventories

In 2021, inventories were recorded at Rp. 4,780 million, a decrease of Rp. 3,970 million or 45.37% compared to 2020, which was Rp. 8,750 million. The decrease in inventory was due to a reduction in inventory purchases during the Covid-19 pandemic.

Prepaid Expenses

The company recorded prepaid expenses in 2021 of IDR 642 million, a decrease of IDR 159 million or 19.85% compared to 2020, which was IDR 801 million. The decrease in prepaid fees is due to the tightening of costs during the Covid-19 pandemic.

Down Payment

In 2021, advances for purchases amounted to Rp. 3,227 million, a decrease of Rp. 8,868 million or 73.32% compared to 2020, which was Rp. 12,095 million. The decrease in advances for purchases was due to a decrease in advances for employees and advances in the form of guarantees for the performance of contractual work.

Program Assets

The company recorded program assets in 2021 of IDR 1,475 million, an increase of IDR 468 million or 46.47% compared to 2020 of IDR 1,007 million. The increase in program assets was due to an increase in the placement of pension funds in 2021 compared to 2020.

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 81.534 juta atau 8,62%, dari tahun 2020 yaitu 945.986 juta menjadi Rp 864.452 juta. Penurunan ini dikarenakan penambahan aset berupa investasi tidak sebanding dengan beban penyusutan aset tetap.

Investasi Pada Entitas Asosiasi

Perusahaan mencatat investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp 319 Juta atau setara dengan jumlah investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2020 dan 2019.

Aset Dalam Proses

Perusahaan mencatat aset dalam proses tahun 2021 sebesar Rp 525 Juta, mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 3.646 juta atau 87,41% dibanding tahun 2020, yaitu sebesar Rp 4.171 juta. Penurunan aset dalam proses disebabkan oleh penurunan jumlah investasi di tahun 2021.

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tercatat tahun 2021 sebesar Rp 4.457 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.539 juta atau 132,38% dibanding tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.918 juta. Kenaikan aset lain-lain disebabkan oleh posisi akun Jaminan tender yang semula sebagai aset lain-lain di tahun 2020, menjadi aset uang muka di tahun 2021.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perusahaan pada tahun 2021 terdiri atas 23,75% liabilitas jangka pendek dan 76,24% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp 18.474 juta atau 3,14% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 584.224 juta menjadi Rp 602.598 juta pada tahun 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Perusahaan mencatat liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 143.134 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 20.132 juta atau 16,37% dibanding

Fixed Assets

Fixed assets in 2021 decreased by IDR 81,534 million or 8.62%, from 2020, which was 945,986 million to IDR 864,452 million. This decrease was due to the addition of assets in the form of investment which was not proportional to the depreciation expense of fixed assets.

Investment in Associates

The Company recorded investments in associate entities of Rp 319 million or equivalent to the total investment in associate entities in 2020 and 2019.

Assets in Progress

The company recorded assets in process in 2021 of IDR 525 million, a significant decrease of IDR 3,646 million or 87.41% compared to 2020, which was IDR 4,171 million. The decrease in assets in progress was due to a decrease in the amount of investment in 2021.

Other Assets

Other assets were recorded in 2021 at IDR 4,457 million, an increase of IDR 2,539 million or 132.38% compared to 2020, which was IDR 1,918 million. The increase in other assets was caused by the account position of the tender guarantee, which was originally in Other Assets in 2020, and becoming down payment asset in 2021.

Liability

The composition of the Company's liabilities in 2021 consists of 23.75% current liabilities and 76.24% long-term liabilities. Total liabilities increased by Rp. 18,474 million or 3.14% from 2020, which was Rp. 584,224 million to Rp. 602,598 million in 2021.

Short-Term Liabilities

The company recorded short-term liabilities in 2021, which was Rp. 143,134 million, an increase of Rp. 20,132 million or 16.37% compared to 2020, which was Rp.

tahun 2020 yaitu sebesar Rp 123.002 Juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lain-lain berupa penundaan beban gaji selama 2020.

Utang Usaha

Perusahaan mencatat utang usaha Perusahaan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 35.611 juta, mengalami penurunan sebesar sebesar Rp 5.868 juta atau 16,48% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 41.479 juta. Penurunan utang usaha diakibatkan karena pengurangan utang pada pihak berelasi serta telah selesainya beberapa pekerjaan di tahun 2021 oleh pihak ketiga sehingga timbul penagihan.

Pendapatan Diterima di Muka

Perusahaan membukukukan pendapatan diterima di muka tahun 2021 sebesar Rp 4.864 juta, naik sebesar Rp 1.487 juta atau 44,03% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 3.377 juta. Kenaikan pendapatan diterima di muka secara pada tahun 2020 disebabkan kenaikan beberapa Pendapatan yg bersifat kontrak dibanding 2020.

Beban Akruai

Beban akrual tahun 2020 tercatat sebesar Rp 724 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 529 Juta atau 42,22% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.253 juta. Penurunan beban akrual diakibatkan berkurangnya beban dan efisiensi terkait dengan jasa atau pembayaran pihak ketiga.

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2021 tercatat sebesar Rp 724 juta, mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 871 juta atau 48,23% dibandingkan utang pajak yang tercatat di tahun 2020 sebesar Rp 1.806 juta. Penurunan utang pajak diakibatkan oleh Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun 2021 mengalami kerugian.

123,002 million. The increase in short-term liabilities was due to an increase in trade payables and other payables in the form of delays in salary expenses during 2020.

Accounts Payables

The Company recorded that the Company's trade payables in 2021 were Rp. 35,611 million, a decrease of Rp. 5,868 million or 16.48% compared to 2020, which was Rp. 41,479 million. The decrease in trade payables was due to the reduction in debt to related parties and the completion of several works in 2021 by third parties resulting in collections.

Unearned Revenues

The company recorded unearned revenue in 2021 amounting to Rp 4,864 million, an increase of Rp 1,487 million or 44.03% compared to 2020 which was Rp 3,377 million. Revenue increase received in advance in 2020 due to increase in some Contractual Income compared to 2020.

Accrued Expenses

Accrued expenses in 2020 were recorded at Rp. 724 million, a decrease of Rp. 529 million or 42.22% compared to 2020, which was Rp. 1,253 million. The decrease in accrued expenses was due to reduced expenses and efficiency related to third party services or payments.

Taxes Payable

The tax payable in 2021 was recorded at IDR 724 million, a significant decrease of IDR 871 million or 48.23% compared to the tax payable recorded in 2020 of IDR 1,806 million. The decrease in tax payable was caused by the Company's Financial Statements in 2021 experiencing a loss.

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Perusahaan mencatat utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 17.542 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 6.196 juta atau 26.10% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 23.738 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya Restruct, yaitu penangguhan/pengurangan pembayaran pokok pinjaman.

Utang Lain-Lain

Perusahaan mencatat utang lain-lain tahun 2021 sebesar Rp 83.355 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 32.006 Juta atau 62,33% dibanding tahun 2020 sebesar Rp 51,349 Juta. Kenaikan utang lain-lain diakibatkan penundaan pembayaran beban gaji karyawan selama pandemi Covid-19.

Liabilitas Jangka Panjang

Perusahaan mencatat liabilitas jangka panjang tahun 2021 sebesar Rp 459.463 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 1.759 Juta atau 0,38% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 461.222 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang diakibatkan karena perusahaan berinvestasi pada aset tetap melalui pembiayaan pihak ketiga.

Liabilitas Sewa Pembiayaan

Pada tahun 2021 tidak terdapat liabilitas sewa pembiayaan.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Perusahaan mencatat liabilitas pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp 38.805 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 16.442 juta atau 29,76% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 55.247 juta. Penurunan liabilitas pajak tangguhan diakibatkan karena perbedaan pengakuan penghitungan penyusutan antara akuntansi fiskal (pajak) dan akuntansi komersial (PSAK).

Current Maturities of Long Term Bank Loan

The company recorded long-term bank loans maturing in one year of Rp. 17,542 million, a decrease of Rp. 6,196 million or 26.10% compared to 2020, which was Rp. 23,738 million. The decrease was caused by the existence of a restructuring, namely the suspension/reduction of loan principal payments.

Other Payables

The company recorded other payables in 2021 amounting to Rp. 83,355 million, an increase of IDR 32,006 million or 62.33% compared to 2020 of IDR 51,349 million. The increase in other debts was due to delays in paying employee salaries during the Covid-19 pandemic.

Long-Term Liabilities

The company recorded long-term liabilities in 2021 of IDR 459,463 million, a decrease of IDR 1,759 million or 0.38% compared to 2020, which was IDR 461,222 million. The decrease in long-term liabilities was caused by the company investing in fixed assets through third party financing.

Lease Liability

In 2021 there is no finance lease liability.

Deferred Tax Liability

The Company recorded a deferred tax liability in 2021 of IDR 38,805 million, a decrease of IDR 16,442 million or 29.76% compared to 2020, which was IDR 55,247 million. Decrease in deferred tax liability due to differences in depreciation calculation between fiscal accounting (tax) and commercial accounting (PSAK).

Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Perusahaan mencatat utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 5.292 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 53.487 juta atau 31,17% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 167.104 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena adanya pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri untuk pembiayaan beban operasional Perintis, KSPN, tol laut/kontrak Pemerintah.

Utang Investasi

Perusahaan mencatat utang investasi tahun 2021 sebesar Rp 1.191 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 913 juta atau 43,39% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.014 juta. Penurunan tersebut diakibatkan karena pada tahun 2020, hanya tercapai 37,34% dari total anggaran dikarenakan kondisi keuangan.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perusahaan pada tahun 2021 sebesar Rp 354.400 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 140.025 juta atau 28,32% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp 494.425 juta. Penurunan disebabkan turunnya saldo laba tahun berjalan karena kerugian Perusahaan.

Non Current Maturities of Long Term Bank Loan

The company recorded long-term bank loans after deducting the portion due in one year of Rp. 5,292 million, a decrease of Rp. 53,487 million or 31.17% compared to 2020, which was Rp. 167,104 million. The decrease was due to a Working Capital Credit (KMK) loan from Bank Mandiri to finance Pioneer operational expenses, KSPN, sea toll roads/Government contracts.

Investment Loans

The company recorded an investment loan in 2021 of IDR 1,191 million, a decrease of IDR 913 million or 43.39% compared to 2020, which was IDR 2,014 million. This decrease was due to the fact that in 2020, only 37.34% of the total budget was reached due to financial conditions.

Equity

The Company's total equity in 2021 was Rp. 354,400 million, a decrease of Rp. 140,025 million or 28.32% compared to 2020, which was Rp. 494,425 million. The decrease was due to a decrease in retained earnings for the year due to the Company's loss.





LAPORAN ARUS KAS

CASHFLOW STATEMENT

TABEL LAPORAN ARUS KAS (DALAM JUTAAN RUPIAH) CASH FLOW STATEMENT TABLE (IN MILLION IDR)

Keterangan	Tahun/ <i>Year</i>		Pertumbuhan <i>Growth</i>	<i>Description</i>
	2021	2020		
AKTIVITAS OPERASI			OPERATION ACTIVITIES	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	643.654	736.806	-13%	Cash and Cash Equivalent
Penerimaan Kas dari Lainnya	6.010	15.967	-62%	Cash Receipts from Others
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(150.833)	(29.931)	500%	Cash Disbursement to Suppliers
Pengeluaran Kas Beban Operasional	(238.063)	(438.280)	-46%	Operating Expenses Cash Expenses
Pengeluaran Kas kepada Karyawan	(233.726)	24.301	-31%	Cash Disbursement to Employees
KAS YANG DIHASILKAN DARI OPERASI	27.043	(24.661)	209%	TOTAL EQUITY
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan	(13.801)	(18.735)	26%	Interest Payments and Finance Charges
Pembayaran Pajak Penghasilan	(1.505)	(18.208)	-92%	Net Cash obtained from(used for) Operating Activities
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGU- NAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	11.737	(61.604)	119%	TOTAL EQUITY
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTMENT ACTIVITIES	
Pengeluaran untuk Perolehan Aset Tetap	(26.120)	(35.466)	26%	Expenditures for Acquisition of Fixed Assets
Penerimaan dari Pelepasan Aset Lainnya	1.002	658	152%	Revenue from the disposal of Other Assets
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGU- NAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(30.598)	(34.808)	-12%	NET CASH OBTAINED FROM (USED FOR) INVESTMENT ACTIVITIES
AKTIVITAS PENDANAAN			FUNDING ACTIVITIES	
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(12.311)	(35.993)	-66%	Long Term Loan Payment
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	60.168	-	Revenue from Long Term Loans
Penerimaan Bantuan Pemerintah	-	-	-	Government Assistance Receipt
Dividen	-	-	-	Dividend
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGU- NAKAN UNTUK) AKTIVITAS PEN- DANAAN	(1.370)	24.175	-106%	NET CASH OBTAINED FROM (USED FOR) FUNDING ACTIVITIES
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(20.232)	(72.224)	-72%	INCREASE (DECREASE) OF NET CASH AND CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	73.875	146.092	-49%	CASH BALANCE AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53.643	73.868	-27%	CASH BALANCE AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR



KEMAMPUAN MEMBAYAR PINJAMAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

THE ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY

TABEL KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG THE ABILITY TO PAY DEBT TABLE

Keterangan	Tahun/ Year		Description
	2021	2020	
Rasio Cepat (%)	64,33%	60%	Quick Ratio (%)
Rasio Lancar (%)	102,86%	101%	Current Ratio (%)
Rasio Utang Terhadap Aset (%)	62,97%	54%	Debt to Asset Ratio (%)
Rasio Utang Terhadap Ekuitas *%)	170,03%	118%	Debt to Equity Ratio (%)
Return on Asset (%)	-15,98%	-20,40%	Return on Asset (%)
Return on Equity (%)	-43,21%	-44,51%	Return on Equity (%)

Kemampuan membayar hutang Perusahaan untuk jangka pendek tecermin dalam rasio-rasio likuiditas, yakni rasio cepat (*quick ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio cepat (*quick ratio*) mengalami penurunan dari 60% pada tahun 2020 menjadi 60% pada tahun 2021. Rasio lancar (*current ratio*) mengalami penurunan dari 101% pada tahun 2020 menjadi 101% pada tahun 2021.

The Company's ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratios, namely the quick ratio and the current ratio. The current ratio is the ratio used to measure the company's ability to pay its short-term obligations by using its current assets. The quick ratio has decreased from 60% in 2020 to 60% in 2021. The current ratio has decreased from 101% in 2020 to 101% in 2021.

TABEL KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ACCOUNTS RECEIVABLE COLLECTIBILITY TABLE

Keterangan	Tahun/ Year		Description
	2021	2020	
Perputaran Piutang (Kali)	5,74	20	Account Receivables Turnover (Time)
Rata-rata Umur Piutang (Hari)	4,55	13	Average Age of Receivables (Days)

Rasio perputaran piutang tahun 2020 mengalami penurunan dari 20 (dua puluh) kali di tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kali di tahun 2020, atau mengalami perubahan selama 18 kali. Sedangkan, rata-rata umur piutang mengalami kenaikan. Secara umum, kolektibilitas piutang Perusahaan dalam kondisi “Tidak Sehat”.

The receivables turnover ratio in 2020 has decreased from 20 (twenty) times in 2020 to 20 (twenty) times in 2020, or has changed 18 times. Meanwhile, the average age of receivables has increased. In general, the collectibility of the Company's receivables is in an “un-healthy” condition.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

TABEL STRUKTUR MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)

CAPITAL STRUCTURE TABLE (IN MILLION IDR)

Keterangan	2021		2020		Description
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					SHORT-TERM LIABILITIES
Utang Usaha	35.611	25%	41.479	34%	Accounts Payable
Pendapatan diterima di Muka	4.864	3.4%	3.377	3%	Prepaid Income
Beban Akrua	724	0,5%	1.253	1%	Accrued Expenses

Keterangan	2021		2020		Description
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	
Utang Pajak	935	1%	1.806	1%	Taxes Payable
Utang Bank Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.542	12%	23.738	19%	Current Maturities of Long Term Bank Loan
Utang Lain-Lain	83.355	58%	51.349	42%	Other Payables
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	143.134	100%	123.002	100%	TOTAL SHORT-TERM LIABILITY
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas Sewa Pembiayaan	-	-	-	-	Lease Liability
Liabilitas Pajak Tangguhan	38.804	8%	55.247	12%	Deferred Tax Liability
Utang Bank Jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	161.811	35%	167.104	36%	Non Current Maturities of Long Term Bank Loan
Utang Investasi	1.191	0%	2.104	0%	Investment Loan
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	223.780	49%	236.857	51%	Post-Employment Benefit Liability
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	459.463	100%	461.222	100%	TOTAL LONG-TERM LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	602.598	63%	584.224	54%	TOTAL LIABILITY
TOTAL EKUITAS	354.400	37%	494.425	46%	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	956.998	100%	1.078.649	100%	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

Struktur modal DAMRI pada 2021 terdiri atas 63% Liabilitas dan 37% Ekuitas. Struktur modal DAMRI pada 2020 terdiri atas 54% Liabilitas dan 46% Ekuitas.

DAMRI's capital structure in 2021 consists of 63% Liabilities and 37% Equity. DAMRI's capital structure in 2020 consists of 54% Liabilities and 46% Equity.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihannya

DAMRI menetapkan kebijakan struktur modal yang lebih menekankan pada penggunaan ekuitas. Struktur Ekuitas DAMRI terdiri atas: Modal Disetor, Penyertaan Modal Negara, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), Modal Sumbangan, Cadangan, dan Saldo Laba (Rugi) Berjalan.

Management Policy on Capital Structure and Basis for Selection

DAMRI has established a capital structure policy that emphasizes the use of equity. DAMRI's Equity Structure consists of: Paid-in Capital, State Equity Participation, Unstated Government Assistance (BPYBDS), Donated Capital, Reserves, and Current Profit (Loss) Balance.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL BOND ON CAPITAL GOODS INVESTMENT

DAMRI memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Pada tahun 2021, DAMRI memiliki perjanjian perikatan yang signifikan dengan vendor sebagai berikut:

DAMRI has material commitments related to investment in capital goods. In 2021, DAMRI has significant agreements with vendors as follows:

NO	PENGADAAN Procurement	UNIT PENGGUNA User	NILAI KONTRAK (RP) Contract Value (IDR)
1	Pengadaan Lisensi Barracuda Email Security Gateway <i>Procurement of Barracuda Email Security Gateway License</i>	Divisi TI	37.400.000
2	Perpanjangan Pengadaan Layanan Nomor Akses Center 1500825 <i>Procurement Extension for Access Center Services Number 1500825</i>	Divisi Pelayanan	252.000.000
3	Pengadaan Sewa-Menyewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Natuna Tahun 2021 <i>Procurement of Production Equipment Rental for Transportation of Cargo in Pioneer Segment in Natuna in 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha	1.626.800.000
4	Pengadaan Sewa-Menyewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Merauke Tahun 2021 <i>Procurement of Production Equipment Rental for Transportation of Cargo in Pioneer Segment in Merauke in 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha	150.000.000
5	Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Merauke Tahun 2021 <i>Loading and unloading of Cargo in Pioneer Segment in Merauke in 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha	247.500.000
6	Perpanjangan Sewa Program Sistem Informa-si Keuangan <i>Rental Extension of Financial Information Program System</i>	Divisi Keuangan	171.600.000
7	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Timika Tahun 2021 <i>Procurement of Production Equipment Rental for Transportation of Cargo in Pioneer Segment in Timika in 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha	487.500.000
8	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika <i>Procurement of Production Equipment Rental for the activities of the National Economic Re-covey Program through the National Tourism Strategic Area (KSPN) Transportation in Mandalika</i>	Divisi Pengembangan Usaha	810.000.000
9	Perpanjangan Pengadaan Minyak Pelumas <i>Extension of Procurement of Oil Lubricant</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik	Sesuai kebutuhan kantor cabang

10	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba <i>Procurement of Production Equipment for Na-tional Economic Recovery Activities (KSPN) in Danau Toba</i>	Divisi Pengembangan Usaha	270.000.000
11	Pengadaan Mobile Point Of Sales (MPOS) <i>Procurement of Mobile Point of Sales</i>	Divisi TI	459.800.000
12	Perpanjangan Pengadaan Lisensi Fortiguard <i>Extension Procurement for Extension of Fortiguard Li-cense</i>	Divisi TI	22.550.000
13	Pengadaan Pembangunan Gedung Mess, Ruang Arsip, Ruang Pantry, dan Mushola Kantor Cabang Pangkal Pinang <i>Procurement for Construction of Mess Build-ing, Archive Room, Pantry, and Prayer room for Pangkal Pinang Branch Office</i>	Divisi Umum	249.000.000
14	Pengadaan Server <i>Procurement of Server</i>	Divisi TI	180.500.000
15	Pengadaan Spare parts Kendaraan <i>Procurement of Spare parts for Vehicles</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik	Sesuai kebutuhan kantor Cabang
16	Sewa alat produksi untuk kegiatan pelayanan angkutan antarmoda World Super Bike (WSBK) Mandalika tahun 2021	Divisi Pengembangan Usaha	543.250.000
17	Pengadaan Perangkat Sistem Monitoring, Keamanan, dan Perilaku Penumpang <i>Procurement of a System Monitoring, Security, and Customer Behavior.</i>	Divisi TI	85.000.000
18	Perpanjangan Lisensi Barracuda Email Security <i>Extension of Barracuda Email Security License</i>	Divisi TI	115.566.000
19	Perpanjangan Layanan Manage Service Con-tact Center Perum DAMRI <i>Extension of Perum DAMRI Manage Service Contact Center</i>	Divisi Pelayanan	303.697.680
20	Perpanjangan pengadaan minyak pelumas <i>Procurement extension of lubricant oil</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik	Sesuai kebutuhan kantor cabang
21	Jasa perawatan dan perbaikan alat produksi <i>Maintenance and Repair Services for produc-tion equipment</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik	Sesuai kebutuhan kantor cabang

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Selama tahun 2021, DAMRI melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dan pelayanan dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan kepada konsumen.

Sumber Dana

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal DAMRI dan utang kepada pihak luar.

PURPOSE OF MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURES

During 2021, DAMRI carried out material commitments for capital expenditures with the aim towards increasing capacity, productivity, and services to consumers.

Source of Funds

Sources of funding for capital expenditures come from DAMRI's internal funds and debts to external parties.

Langkah Perlindungan Risiko Mata Uang

Pada tahun 2021, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Laporan Keuangan DAMRI disusun dalam mata uang Rupiah.

Currency Risk Protection Measures

In 2021, there is no commitment in foreign currencies in accordance with Bank Indonesia Regulations related to the mandatory use of rupiah in every transaction within the territory of the Republic of Indonesia. In addition, DAMRI's Financial Statements are prepared in Rupiah.

PENCAPAIAN TARGET 2021 LAPORAN KEUANGAN LABA RUGI

2021 TARGET ACHIEVEMENT FINANCIAL STATEMENTS PROFIT AND LOSS

TABEL LABA RUGI (DALAM RIBU RUPIAH)

PROFIT AND LOSS TABLE (IN THOUSAND IDR)

No	Uraian	2021	2021	Pencapaian/ Achievement (%)	Description
		RKAP	Realisasi/ Realization		
1	Pendapatan Usaha	550.016.080.000	636.506.471.637	115,73	Operating Revenue
2	Beban Operasional	513.457.140.000	521.750.886.336	101,62	Operating Expenses
3	Beban Pemasaran	17.465.257.000	18.854.489.800	107,95	Marketing Expenses
4	Beban Administrasi dan Umum	216.549.983.000	242.882.680.986	112,16	Administration and General Expenses
5	Laba (Rugi) Usaha	(185.548.488.000)	(144.905.433.128)	78,11	Profit (Loss)
6	Pendapatan dan Beban Lain	(1.028.741.000)	(9.901.903.854)	862,53	Other Income and Expenses
	Pendapatan Lain-lain	8.117.936.000	2.446.047.040	30,13	Other Income
	Beban Lain-lain	(9.146.677.000)	(12.347.977.894)	135	Other Expenses
7	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(186.577.229.000)	(168.710.302.885)	90,42	Profit (Loss) Before Tax
8	Beban Pajak Kini dan Tangguhan	(7.900.007.000)	15.807.912.450		Current and Deferred Tax Burden
9	Laba Tahun Berjalan	(178.677.222.000)	(152.902.390.435)	85,57	Current Year Profit

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN
(DALAM RIBU RUPIAH)

TABLE OF FINANCIAL POSITION STATEMENT
(IN THOUSAND IDR)



No	Uraian	2021 RKAP	2021 Realisasi/ Realization	Pencapaian/ Achievement (%)	Description
ASET					ASSETS
1	Aset Lancar	96.386.602.076	85.770.676.482	88,99	Current Assets
2	Aset Tetap	848.436.043.269	864.452.586.156	101,89	Fixed Assets
3	Investasi Jangka Panjang	319.000.000	319.000.000	100	Long-Term Investment
4	Aset Lain-lain	3.197.851.094	4.456.801.770	100,00	Other Assets
JUMLAH ASET		953.392.633.625	956.998.436.628	139,37	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITY AND EQUITY
5	Liabilitas jangka pendek	177.369.061.734	83.385.759.811	47,01	Short-Term Liabilities
6	Liabilitas Jangka Panjang	460.275.765.691	519.211.805.564	112,80	Long-Term Liabilities
7	Ekuitas	315.747.806.200	354.400.871.253	112,24	Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		953.392.633.625	956.998.436.628	100,38	TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

SDM, ALAT PRODUKSI, DAN PRODUKSI

HR, PRODUCTION EQUIPMENT, AND PRODUCTION

TABEL SDM, ALAT PRODUKSI, DAN PRODUKSI

TABLE OF HR, PRODUCTION EQUIPMENT, AND PRO-
DUCTION



No	Uraian	2021 RKAP	2021 Realisasi/ Realization	Pencapaian/ Achievement (%)	Description
SDM (ORANG)					HR (PEOPLE)
1	Rasio SDM: SO				HR Ratio: SO
ALAT PRODUKSI					PRODUCTION TOOLS
2	Armada	2.726	2.725	99,96	Fleet
3	Siap Guna (SG)	2.377	2.376	99,96	Ready to Use
4	Siap Guna Operasi (SGO)	1.600	1.730	108,13	Ready for Operation
5	Siap Operasi (SO)	1.076	1.017	94,52	Ready to Operate

PRODUKSI				PRODUCTION	
6	Jumlah Hari Jalan	390.492	371.044	95,02	Number of operating days
7	Jumlah Perjalanan (Rit)	2.077.369	1.159.801	55,83	Number of trips
8	Panjang Perjalanan	87.058	93.163	107,01	Travel length
6	Jasa Angkutan:				Transportation services
	Pelanggan (orang)	8.809	7.966	90,43	Customers (people)
	Pelanggan (km)	586.642	647.049	110,30	Customers (km)
	Ton-km	21.553	38.518	178,71	Tonnage - km



TARGET TAHUN 2022

TARGET FOR 2022

TARGET 2022 LAPORAN KEUANGAN LABA RUGI

2022 TARGET FINANCIAL STATEMENTS PROFIT AND LOSS

TABEL LABA RUGI TARGET 2022
(DALAM RIBU RUPIAH)

TABLE OF PROFIT AND LOSS OF 2022 TARGET
(IN THOUSANDS IDR)



No	Uraian	Description	RKAP 2022
			2022 Company Work Plan and Budget
1	Pendapatan Usaha	Operating Revenue	992.461
2	Beban Langsung	Direct Expenses	664.758
3	Laba (Rugi) Kotor	Gross Profit/Loss	327.703
4	Beban Penjualan	Selling Expenses	34.888
5	Beban Umum Administrasi/Ad.	General Administration Expenses	256.423
6	Laba (Rugi) Usaha Bersih	Net Operating Profit/Loss	36.392
7	Pendapatan dan Beban Lain	Other Income and Expenses	12.151
8	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Profit (Loss) Before Tax	48.544
9	Beban Pajak Kini dan Tangguhan	Current and Deferred Tax Burden	(8.386)
10	Laba (Rugi) Bersih	Net Profit and Loss	40.148

ARUS KAS

CASH FLOW

TABEL ARUS KAS TARGET 2022
(DALAM RIBU RUPIAH)

2022 TARGET CASH FLOW TABLE
(IN THOUSANDS IDR)



No	Uraian	Description	RKAP 2022
			2022 Company Work Plan and Budget
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Cash Flow for Operating Activities	100.042
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Cash Flow from Investment Activities	(302.085)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Cash Flow from Financing Activities	220.028
4	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	17.984
5	Kas Bank dan setara Kas Awal	Bank Cash and Initial Cash Equivalents	45.436
6	Kas Bank dan setara Kas Akhir	Bank Cash and Final Cash Equivalents	63.420

LAPORAN POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION STATEMENT

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN
TARGET 2022 (DALAM RIBU RUPIAH)

2022 TARGET FINANCIAL POSITION TABLE
(IN THOUSANDS IDR)



No		Uraian	Description	RKAP 2022
				2022 Company Work Plan and Budget
ASET				ASSETS
1	Aset Lancar		Current Assets	140.340
2	Aset tidak Lancar		Non-current Assets	1.023.580
Jumlah Aset			Total Assets	1.163.920
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITY AND EQUITY
3	Liabilitas Jangka Panjang		Long-Term Liabilities	117.089
4	Liabilitas Jangka Pendek		Short-Term Liabilities	688.194
5	Ekuitas		Equity	358.636
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			Total Liabilities and Equities	1.163.920

PENGELUARAN MODAL

CAPITAL EXPENDITURE

TABEL CAPITAL EXPENDITURE TARGET 2022
(DALAM JUTA RUPIAH)

2022 TARGET CAPITAL EXPENDITURE TABLE
(IN MILLIONS IDR)



No	Uraian	Description	RKAP 2022
			2022 Company Work Plan and Budget
1	Pengadaan Bus dan Truck	Bus and Truck Procurement	136.339
2	Perbaikan	Repair and Maintenance	119.283
3	Peralatan Bengkel	Workshop Equipments	671
4	Bangunan	Building	675
5	Mesin-mesin Kantor	Office Machines	497
6	Inventaris Kantor	Office Inventory	1.525
7	Pengembangan Sistem Administrasi	Administration System Develop-ment	19.462
8	Investasi Usaha Lainnya	Other Business Investment	27.926
Total			306.377



1. Tahun 2022 jumlah SDM ditargetkan sebanyak 5.316 orang atau 101,37% dari prognosa tahun 2021 dengan rasio SDM terhadap bus Siap Operasi (SO) 1: 3,28 dirasiokan lebih efisien dari prognosa 2020 yang rata-rata SO tahun 2020 menurun akibat pandemi Covid-19.
 2. Target armada pada tahun 2021 sebesar 2.726 atau 99,09% dari prognosa tahun 2020.
 3. Target Siap Guna (SG) pada tahun 2021 sebesar 2.377 atau 99,06% dari prognosa tahun 2020.
 4. Target Siap Guna Operasi (SGO) pada 2021 sebesar 1.600 unit atau 97,91% dari prognosa tahun 2020.
 5. Target Siap Operasi (SO) pada tahun 2021 sebesar 1.076 atau meningkat 32,48% dari prognosa tahun 2020. Diproyeksikan investasi pada tahun 2021 menghasilkan produksi mulai triwulan II.
 6. Produksi pada tahun 2021 produksi dari hari jalan, rit, km, dan pelanggan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari prognosa tahun 2020 hal ini disebabkan oleh program pengembangan trayek maupun replacement sehingga meningkatkan jumlah produksi dan hasil produksi baik pelanggan/orang (segmen bus kota, aglomerasi, dan bandara), pelanggan/km (segmen angkutan kota, antar negara dan perintis), serta ton/km untuk angkutan barang.
1. In 2021 the number of human resources is targeted at 5,316 people or 101.37% of the 2020 prognosis with a ratio of HR to Ready for Operation (SO) buses of 1: 3.28, which is more efficient than the 2020 prognosis, whereby the average SO in 2020 decreased due to the pandemic Covid-19.
 2. The fleet in 2021 is 2,880 or 99.09% of the 2020 prognosis.
 3. Ready to Use (SG) in 2021 is 2,615 or 99.06% of the 2020 prognosis.
 4. Ready for Operation (SGO) in 2021 by 2,150 units or 97.91% of the 2020 prognosis.
 5. Ready for Operation (SO) in 2021 is 1,619 or an increase of 32.48% from the prognosis in 2020. It is projected that investment in 2021 will produce production starting in the second quarter.
 6. Production in 2021, production from Operating Days, trips, km, and customers experienced significant growth compared to the 2020 prognosis, this was due to route development and replacement programs, thereby increasing the number of production and production results for both customers/persons (city bus segment, agglomerations, and airports), customers/km (segment of urban, inter-country and pioneer transportation), and tons/km for freight transportation.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tanah Sengketa di Pool Kemayoran

Pada tanggal 12 Januari 2022 kembali dilakukan pertemuan dengan Jajaran Direksi dari P2KK dan Dirut DAMRI, bahwa sehubungan dengan potensial aset yang saat ini ditempati oleh DAMRI untuk menunjang transportasi masyarakat, maka sedang diupayakan penyelesaian permohonan HGB di atas HPL P2KK yang mana tanah tersebut merupakan milik Sekretariat Negara RI.

INFORMATION AND MATERIAL FACTS THAT OCCURRED AFTER DATE OF ACCOUNTANT REPORT

Disputed Land in Kemayoran Pool

On 12 January 2022, another meeting was held with the Board of Directors from P2KK and the President Director of DAMRI, that in relation to the potential assets currently occupied by DAMRI to support public transportation, efforts are being made to complete the application for HGB on HPL P2KK whereby the land belongs to the State Secretariat of the Republic of Indonesia.



URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

DESCRIPTION ON COMPANY BUSINESS PROSPECT



Untuk mengatasi tantangan ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, manajemen melakukan langkah-langkah dengan cara Inisiatif Strategis dari Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha, antara lain:

1. Memaksimalkan proyek penugasan perintis dan KSPN 2021 sejak Februari 2021.
2. Membuka layanan angkutan barang penyambung tol laut yang diinisiasi di Natuna mulai Maret 2021.

To overcome the challenges of uncertainty in economic conditions due to the Covid-19 pandemic, management takes steps by means of Strategic Initiatives from the Directorate of Commercial and Business Development, including:

1. Maximizing the 2021 KSPN and pioneer assignment projects since February 2021.
2. Opening freight services connecting to sea toll initiated in Natuna starting March 2021.

3. Penggunaan aplikasi digitalisasi DAMRI apps untuk semua pembelian tiket <i>online</i> dan pembayaran <i>cashless</i>. 4. Memaksimalkan kerjasama dengan Traveloka, RedBus, Alfamart dan Indomaret untuk meningkatkan jumlah pelanggan secara <i>online</i>. 5. Pengembangan trayek untuk antar kota seperti: a. Trans Kalimantan trayek Palangkaraya–Pangkalan Bun–Pontianak. b. Trans Jawa trayek Jakarta–Malang. c. Trans Sumatra trayek Lampung–Palembang–Bengkulu–Jambi. d. Trans Sulawesi trayek Makassar–Palu. 6. Kolaborasi untuk trayek Transjakarta diwujudkan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Bianglala untuk menggantikan pendapatan di Transjakarta dengan pengoperasian 20 unit bus BRT di trayek Busway Bianglala. 7. Memonitoring lapangan, yaitu dengan memastikan pencatatan jumlah penumpang di LMB sama dengan fisik penumpang serta memastikan pencatatan di LMB dan fisik barang bagasi sesuai dengan penjualan Dils yang berlabel/segel. 8. Pengendalian pola <i>market demand</i> bukan pada rutinitas. 9. Kerja sama dengan PT Garuda Indonesia dan Ayuberga terkait penyediaan bus untuk jemaah haji. 10. Melakukan perjanjian kerja sama dengan Logistic GO To Market Pilot Project–Cluster Transportasi dan Logistik BUMN Binaan Wakil Menteri II. 11. Melakukan kerja sama dengan PT LRT Jakarta. 12. Kerja sama angkutan pupuk dengan PT Petrokimia Gresik sebanyak 3 trayek	3. Use of the DAMRI apps digitization application for all online ticket purchases and cashless payments. 4. Maximizing cooperation with Traveloka, RedBus, Alfamart and Indomaret to increase the number of online customers. 5. Development of inter-city routes such as: a. Trans Kalimantan route Palangkaraya–Pangkalan Bun–Pontianak. b. Trans Java route from Jakarta to Malang. c. Trans Sumatra route Lampung–Palembang–Bengkulu–Jambi. d. Trans Sulawesi route Makassar–Palu. 6. Collaboration for the Transjakarta route is realized through a Joint Operation (KSO) with Bianglala to replace revenue in Transjakarta by operating 20 units of BRT buses on the Bianglala Busway route. 7. Monitoring the field, namely by ensuring that the recording of the number of passengers in the LMB is the same as that of the physical passengers and ensuring that the recording in the LMB and the physical baggage of goods is in accordance with the sale of labeled/sealed Dils. 8. Control of market demand patterns is not routine. 9. Cooperation with PT Garuda Indonesia and Ayuberga regarding the provision of buses for Hajj pilgrims. 10. Entered into a cooperation agreement with the Logistics GO To Market Pilot Project – SOE Transportation and Logistics Cluster guided by the Deputy Minister II. 11. Cooperating with PT LRT Jakarta. 12. Cooperation of fertilizer transportation with PT Petrokimia Gresik for 3 routes



Perusahaan juga menjalankan inisiatif dalam bidang Teknik dan Fasilitas sebagai berikut :

1. Pengendalian armada siap guna (SGO) untuk armada siap operasi (SO) melalui pemilihan armada rusak berat yang sudah tidak dapat beroperasi dan usia di atas 10 tahun agar beban perbaikan berkurang.
2. Digitalisasi perawatan dalam rangka memastikan dilakukannya perawatan berkala.
3. Penyeragaman harga suku cadang.
4. Melakukan penjualan armada (usul afkir) 89 bus dan 249 bus yang dapat memperingan Perusahaan dalam beban *maintenance* dan sekaligus mendatangkan pendapatan.
5. Mekanik terbang (Flying Team)
6. Inisiasi cuci bus otomatis.

The company also carries out initiatives in the fields of Technical and Facilities as follows:

1. Control of the ready-to-use fleet (SGO) for the ready-to-operate (SO) fleet through the selection of heavily damaged fleets that are no longer operational and are over 10 years of age so that the repair burden is reduced.
2. Digitization of maintenance in order to ensure regular maintenance is carried out.
3. Uniform price of spare parts.
4. Conducting fleet sales of 89 buses and 249 buses which can ease the Company's maintenance burden and at the same time generate revenue.
5. Flying Mechanic (Flying Team)
6. Initiation of automatic bus wash.

Selain itu, Perusahaan juga menjalankan Inisiatif bidang keuangan dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Memindahkan kelebihan *headcount* pada cabang yang masih produktif.
2. Mengkaji beberapa opsi terkait Perumahan Karyawan, Pengurangan *Headcount*, Pemotongan Gaji.
3. Merestrukturisasi model kekaryawanan menjadi *Outsource model* dan atau model kontrak *service*.

Dalam pengembangan prospek usaha Perusahaan, DAMRI telah melakukan pengembangan trayek baru untuk jasa angkutan transportasi penumpang dan logistik, melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah/BUMN/BUMD/pihak swasta melalui kajian bisnis. Berikut adalah uraian prospek usaha perusahaan pada tahun , yaitu:

1. Tender Pupuk Indonesia

DAMRI bekerja sama dengan Pupuk Indonesia selaku Holding Company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang jasa transportasi barang hasil jadi pabrik (pupuk) menuju gudang penyimpanan untuk perusahaan PT. Pupuk Kujang dan PT Petrokimia Gresik.

2. Tender AJAP Dirjen Pajak

Dalam kerja sama ini, DAMRI menyediakan angkutan karyawan dari dan menuju Kantor Pusat Dirjen Pajak yang berlokasi di Rawamangun.

3. Subsidi Pemerintah

DAMRI bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dalam menjalankan beberapa segmen usaha.

a. Angkutan Perintis

Pertumbuhan segmen perintis berkisar antara 10-15% per tahun dan merupakan angkutan penugasan dari Kementerian Perhubungan.

In addition, the Company also carries out initiatives in the financial sector by doing the following:

1. Transferring excess *headcount* to branches that are still productive.
2. Examined several options regarding Employee Housing, *Headcount Reduction*, Pay Deductions.
3. Restructuring the employee model into an *Out-sourced model and/or service contract model*.

In developing the Company's business prospects, DAMRI has developed new routes for passenger transportation and logistics services, expanded its business by opening partnerships with the central government/ local government/BUMN/BUMD/private parties through business studies. The following is a description of the company's business prospects, namely:

1. Indonesian Fertilizer Tender

DAMRI cooperates with Pupuk Indonesia as the Holding Company of State-Owned Enterprises (BUMN) in the field of transportation services for factory finished goods (fertilizer) to the storage warehouse for the company PT. Pupuk Kujang and PT Petrokimia Gresik.

2. Tender for AJAP Director General of Taxes

In this collaboration, DAMRI provides transportation for employees to and from the Head Office of the Director General of Taxes, which is located in Rawamangun.

3. Government Subsidy

DAMRI cooperates with the Central Government/Local Government in running several business segments.

a. Pioneer Transport

The growth of the pioneer segment ranges from 10 to 15% per year and is a transportation assignment from the Ministry of Transportation.

b. *Angkutan KSPN*

DAMRI sebagai penyedia angkutan pariwisata berfokus kepada lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu: Labuan Bajo, Morotai, Toraja, Bromo, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Wakatobi, dan Likupang.

c. *Angkutan PEN*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, pemerintah dapat melakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diatur penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan strategis nasional di kawasan pariwisata dan simpul transportasi dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

d. *Angkutan Barang Tol Laut*

Bahwa untuk menunjang pelayanan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, diperlukan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T), dan perbatasan dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

e. *Angkutan Buy The Service (BTS)*

Kegiatan tender yang diselenggarakan oleh Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan dalam Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan di Kota Surakarta dan Medan.

b. *KSPN Transport*

DAMRI as a tourism transportation provider focuses on the location of the National Tourism Strategic Areas (KSPN), namely: Labuan Bajo, Morotai, Toraja, Bromo, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Wakatobi, and Likupang.

c. *PEN Transport*

Based on Government Regulation Number 43 Year 2020, the government can carry out a national economic recovery policy through state spending in accordance with the provisions of laws and regulations, as it has been regulated that the implementation of public passenger transportation services in national strategic areas in tourism areas and transportation nodes can be carried out through assignments to Public Company (Perum) DAMRI.

d. *Sea Toll Freight Transport*

That in order to support goods transportation services from and to underdeveloped, remote, outermost, and border areas, it is necessary to have a public service obligation to transport goods on the road to and from underdeveloped, remote, outermost, and border areas. In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation Number 10 Year 2020 regarding Guidelines for Implementing the Obligation of Public Service Transportation of Goods on the Road from and to disadvantaged, remote, outermost, (T) and border areas can be carried out through assignments to the Public Company (Perum) DAMRI.

e. *Buy The Service (BTS) Transport*

Tender activity organized by the Directorate of Road Transportation of the Ministry of Transportation in the Development of Road-Based Mass Transportation in Urban Areas with Service Purchase Schemes in the City of Surakarta and Medan.

f. Kerja sama dengan PT Pelni

Merupakan langkah kerja sama dengan Perusahaan BUMN di bidang angkutan logistik dalam rangka Sinergitas Pelayanan Publik Angkutan Barang Tol Laut di Jalan dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Peningkatan akses transportasi dan distribusi barang tol laut di jalan dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

g. Kerja sama dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Merupakan langkah kerja sama dengan Perusahaan BUMN (bukan bum?) di bidang angkutan penumpang dalam menyediakan kebutuhan shuttle bus untuk mendukung arus mobilisasi penumpang dari dan ke semua stasiun di Halim, Karawang, Walini, Tegalluar, dan stasiun lain serta bisnis pendukung lainnya.

h. Kerja sama dengan PT Krakatau Tourism Development

Merupakan langkah kerjasama dengan Perusahaan BUMN di bidang pengembangan pariwisata untuk optimalisasi trayek existing DAMRI di Lampung.

i. Kerja sama dengan Lorena

Merupakan langkah kerjasama dengan perusahaan swasta di bidang logistik dengan mengimplementasikan teknologi dalam kegiatan operasionalnya.

j. Kerja Sama Penyusunan Masterplan Cluster Transportasi dan Logistik BUMN

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor S./WK.MBU// tanggal 6 Februari perihal pembentukan Cluster BUMN Binaan Wakil Menteri II terkait Transportasi dan Logistik, terbentuklah Kerja sama antara PT. KAI, Perum DAMRI, Perum PPD, PT. POS, PT.

f. Cooperation with PT Pelni

This is cooperation with state-owned company in the field of logistics transportation in the context of Synergy of Public Service Transportation of Sea Toll Goods on the Road and to Disadvantaged, Remote, Outermost and Border Areas. Increasing access to transportation and distribution of sea toll goods on the road to and from underdeveloped, remote, outermost and border areas.

g. Cooperation with PT. Indonesia China Fast Train (KCIC)

This is with a state-owned company in the field of passenger transportation in providing shuttle bus that is needed to support the flow of passenger mobilization from and to all stations in Halim, Karawang, Walini, Tegalluar, and other stations as well as other supporting businesses.

h. Cooperation with PT Krakatau Tourism Development

This is a cooperation with SOE company in the field of tourism development to optimize the existing DAMRI routes in Lampung.

i. Collaboration with Lorena

This is cooperation with a private company in the logistics sector by implementing technology in their operational activities.

j. Cooperation for the Preparation of the SOE Transportation and Logistics Cluster Master Plan

Based on the SOE Ministry Letter Number S./WK.MBU// dated 6 February regarding the formation of a BUMN Cluster assisted by the Deputy Minister II related to Transportation and Logistics, a collaboration between PT. KAI, Perum DAMRI, Perum PPD, PT.

VTP dengan Boston Consulting Group (BCG) selaku konsultan terpilih.

- k. Kerja sama antara DAMRI dengan Asian Development Bank (ADB): Riset dan Pendanaan Penggunaan Bus Listrik pada Segmen Bandara

Kerjasama antara DAMRI dengan Asian Development Bank (ADB) adalah salah satu bentuk dukungan atas konversi armada segmen bus bandara DAMRI dari bus berbahan bakar fosil menjadi bus listrik (Full Electric Bus).

- l. Kerja sama Antara DAMRI dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengembangkan Joint Venture Company di Arab Saudi

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis di Arab Saudi. Adanya kolaborasi ini menunjukkan adanya sinergitas antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi dalam perluasan jaringan transportasi DAMRI di Timur Tengah.

POS, PT. VTP with Boston Consulting Group (BCG) as the selected consultant.

- k. Cooperation between DAMRI and the Asian Development Bank (ADB): Research and Funding for the Use of Electric Buses in the Airport Segment

The collaboration between DAMRI and the Asian Development Bank (ADB) is one form of support for the conversion of the DAMRI airport bus segment fleet from fossil fuel buses to electric buses (Full Electric Bus).

- l. Cooperation between DAMRI and the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to develop a Joint Venture Company in Saudi Arabia

This collaboration aims to expand business networks in Saudi Arabia. This collaboration shows the synergy between the Government of Indonesia and the Government of Saudi Arabia in expanding the DAMRI transportation network in the Middle East.



URAIAN TENTANG ASPEK PEMASARAN

DESCRIPTION OF MARKETING ASPECTS

Pada tahun 2021, DAMRI telah melaksanakan beberapa kegiatan pemasaran dalam rangka mendukung sasaran di bidang pemasaran, antara lain yaitu:

1. REPETITIVE Meningkatkan pelayanan dan pengalaman pelanggan DAMRI berkomitmen untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pengalaman pelanggan dengan menambah saluran penjualan dan pembayaran tiket guna memberi kemudahan kepada pelanggan dalam pembelian tiket bus melalui DAMRI APPS atau Situs Penjualan Tiket DAMRI (tiket.damri.co.id).

In 2021, DAMRI has carried out several marketing activities in order to support targets in the marketing sector, including:

1. DAMRI is committed to improving customer service and experience by adding channels for ticket sales and payment that would make it easier for customers to purchase bus tickets through DAMRI APPS or DAMRI Ticket Sales Site (tiket.damri.co.id).

2. Meningkatkan *product awareness* pada pelanggan serta penjualan tiket bus pada trayek baru, trayek existing, KSPN, JRC, dan Perintis. Dalam rangka meningkatkan *product awareness* guna meningkatkan penjualan tiket maka DAMRI melakukan promosi secara *online* dan *offline*.
 - a. *Online* : Promosi secara *online* dilakukan melalui pembuatan dan pengunggahan konten terkait trayek-trayek DAMRI pada kanal sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube, memutakhirkan isi dari situs resmi perusahaan melalui website *damri.co.id*, serta melakukan digital ads placement melalui kanal sosial media.
 - b. *Offline* : Promosi secara *online* dilakukan melalui pembuatan dan pembukaan booth-booth, banner, x-banner, flyer, dan backdrop pada momen-momen khusus, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Tahun Baru, dan pada peresmian trayek baru.
3. Pengembangan bidang usaha bersama dengan Pihak swasta/BUMN.

Menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun BUMN dalam hal pengembangan trayek. Pada tahun 2021, Sub Divisi Pemasaran telah melakukan pengembangan trayek segmen angkutan antar kota dengan jenis angkutan *shuttle* antara (satu) kota dengan kota lainnya.
2. Increasing *product awareness* to customers and selling bus tickets on new routes, existing routes, KSPN, JRC, and Perintis. In order to increase *product awareness* to increase ticket sales, DAMRI carries out *online* and *offline* promotions.
 - a. *Online*: *Online* promotion is carried out through the creation and upload of content related to DAMRI routes on social media channels such as Instagram, Facebook, Twitter, and Youtube, updating the contents of the company's official website through the *damri.co.id* website, as well as conducting digital ads placement through social media channels.
 - b. *Offline*: *Online* promotion is done through the creation and opening of booths, banners, x-banners, flyers, and backdrops on special occasions, such as Eid al-Fitr, Christmas Day, New Year's Day, and at the inauguration of new routes.
3. Development of joint business with the private sector/SOE.

Collaborating with the private sector and SOEs in terms of route development. In 2021, the Marketing Sub-Division has developed an inter-city transportation segment route with the type of shuttle transportation between (one) city and another city.



KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

POLICY ON DIVIDEND PAYMENT

Tidak terdapat pembagian dividen yang dijalankan Perusahaan pada tahun 2021.

There is no dividend payment carried out by the Company in 2021.



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

*SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT
IMPLEMENTED BY THE COMPANY (ESOP/MSOP)*

Tidak terdapat program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dijalankan Perusahaan (ESOP/MSOP) pada tahun 2021.

There is no employee and/or management share ownership program (ESOP/MSOP) implemented by the Company in 2021.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Tidak terdapat realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum pada tahun 2021.

There is no realization of the use of the proceeds from the public offering in 2021.



DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

*DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION,
OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING*

Tidak terdapat divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi utang/modal pada tahun 2021.

There were no divestments, mergers/consolidations, acquisitions, or debt/capital restructurings in 2021



INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Tidak terdapat informasi material terkait divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi utang/modal.

There is no material information related to divestments, mergers/consolidations, acquisitions, or debt/capital restructurings.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Sepanjang tahun 2021, DAMRI tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Throughout 2021, DAMRI did not have material transactions containing conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Sepanjang tahun 2021, DAMRI tidak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sehingga tidak terdapat informasi nama pihak, sifat hubungan afiliasi, kewajaran transaksi, alasan dilakukannya transaksi, realisasi transaksi, kebijakan mekanisme review atas transaksi, serta pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Throughout 2021, DAMRI did not have transactions with affiliated parties so that there was no information on the names of parties, the nature of the affiliated relationship, the fairness of the transaction, the reason for the transaction, the realization of the transaction, the policy of the review mechanism for the transaction, as well as the fulfillment of related rules and regulations.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

TABEL NAMA PIHAK
DAN SIFAT HUBUNGAN RELASI

TABLE OF NAME OF PARTIES
AND THE NATURE OF RELATIONSHIPS

NO	PIHAK BERELASI <i>Related Parties</i>	SIFAT BERELASI <i>Nature of Related Parties</i>	TRANSAKSI <i>Transaction</i>
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Institusi Keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah RI <i>Financial Institutions controlled by the Indonesian Government</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Cash and Banks, Deposits placement</i>
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah RI <i>Financial Institutions controlled by the Indonesian Government</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Cash and Banks, Deposits placement</i>
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang dikendalikan oleh Pemerintah RI <i>Financial Institutions controlled by the Indonesian Government</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Cash and Banks, Deposits placement</i>
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Institusi yang dikendalikan oleh Pemerintah RI <i>Financial Institutions controlled by the Indonesian Government</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Cash and Banks, Deposits placement</i>
5	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Institusi yang dikendalikan oleh Pemerintah RI <i>Financial Institutions controlled by the Indonesian Government</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito <i>Cash and Banks, Deposits placement</i>

Kewajaran Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

Realisasi Transaksi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi di antaranya adalah Perusahaan menempatkan dana pada bank Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga.

Transactions Equity

Transactions with related parties have been carried out fairly in accordance with the interests of the Company. The transaction has been carried out in accordance with the laws and regulations and is free from conflicts of interest.

Reason for The Transaction

All transactions with related parties are carried out on the basis of business needs and are aimed at improving the Company's performance.

Transaction Realization

In its business activities, the Company conducts certain transactions with related parties, among which the Company places funds in Government Banks with normal terms and interest rates as applicable to third party bank customers.

TABEL TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
PADA TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
ON THE DATE OF FINANCIAL POSITION STATEMENT
(IN MILLION IDR)



No	Keterangan	Tahun / Year		Pertumbuhan/ Growth (%)	Description
		2021	2020		
1	Kas dan Setara Kas	2.262	3.040	-26%	Cash and cash equivalents
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	26.846	37.919	-29%	
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.783	8.074	-53%	
4	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.024	3.096	-35%	
5	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	462	59	683%	
JUMLAH		33.115	49.147	-33%	TOTAL
DEPOSITO		DEPOSIT			
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	10.000	10.000	0%	
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.403	1.366	3%	
JUMLAH		11.403	11.365	0,5%	TOTAL
PIHAK KETIGA		THIRD PARTY			
1	PT Bank Pembangunan Daerah	3.174	1.128	181%	
2	PT Bank Syariah Indonesia	1.881	-	-	
3	PT Bank Mega Tbk	658	654	1%	
4	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	564	2.348	-76%	
5	PT Bank Bukopin Tbk	298	1.096	-76%	
6	PT Bank Bukopin Syariah	249	248	0,5%	
7	PT Bank Central Asia Tbk	20	20	0%	
8	PT Bank DKI	17	1.110	-98%	
9	PT Bank Rakyat Indonesia Escrow	-	2.550	-	
10	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	1.156	-	
11	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	10	-	
JUMLAH		6.862	10.321	-34%	TOTAL
JUMLAH KESELURUHAN		53.643	73.875	-27%	GRAND TOTAL
TINGKAT BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PER TAHUN		TIME DEPOSIT ANNUAL INTEREST RATE			
1	Kisaran Suku Bunga Deposito	6,20% - 6,60%	5,00% - 5,25%	-	Deposit Interest Rate Range

KEBIJAKAN MEKANISME KAJIAN ATAS TRANSAKSI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme kajian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang direviu oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Selama tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran atas Peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi.

TRANSACTION REVIEW MECHANISM POLICY

Every transaction with a related party must go through a review mechanism in accordance with what has been determined by the Company. All significant transactions and balances with related parties are carried out on normal and fair terms. Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions made with unrelated parties. The terms and conditions of transactions with related parties are generally carried out as with third parties reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Supervisory Board.

Adherence to Related Laws and Rules

During 2020 there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties.





PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES TO THE REGULATION WITH IMPACT TO THE COMPANY

TABEL PERUBAHAN PERATURAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP PERUSAHAAN

TABEL ON CHANGES TO THE REGULATION
WITH IMPACT TO THE COMPANY



NO	PERATURAN <i>Law</i>	DAMPAK <i>Impact</i>
1	Instruksi Pemerintah terkait perpanjangan kebijakan PPKM dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 57 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali. <i>Government instructions regarding the extension of the PPKM policy in the Instruction of the Minister of Home Affairs (Inmendagri) Number 57 Year 2021 regarding PPKM Level 3, Level 2, and Level 1 Covid-19 in the Java-Bali Region.</i>	Bahwa Perusahaan telah menyesuaikan pemberlakuan jadwal kerja sebagai berikut: a. Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi wajib hadir di kantor (full WFO) b. Kepala Divisi mengatur jadwal kerja (WFO) staff pada bagiannya dengan maksimum 75% kehadiran dan memastikan efektivitas karyawan yang melakukan RW. <i>That the Company has adjusted the implementation of the work schedule as follows:</i> a. Head of Division and Head of Sub Division must be present at the office (full WFO) b. The Division Heads manages the work schedule (WFO) of their respective staff with a maximum of 75% attendance and ensures the effectiveness of employees who carry out remote working.
2	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar. <i>Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 51 Year 2021 concerning Extension of the Enforcement, Period and Restriction of Outdoor Activities of Large-Scale Social Restrictions.</i>	Memperpanjang jangka waktu dan pembatasan aktivitas luar rumah (PSBB) terhitung sejak 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021. <i>Extending the period of time and restrictions on outdoor activities (PSBB) starting from 26 January 2021 to 8 February 2021.</i>



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES TO THE REGULATION WITH IMPACT TO THE COMPANY

Pada tahun 2021, tidak ada perubahan kebijakan akuntansi, sehingga tidak terdapat informasi alasan perubahan kebijakan akuntansi dan dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan.

In 2021, there are no changes in accounting policies, hence there is no information on reason for changes in accounting policies and the qualitative impact on the Financial Statement.

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUN- TANSI KEUANGAN (ISAK) STANDAR YANG BERLAKU EFEKTIF PADA TAHUN BERJALAN

IMPLEMENTATION OF NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATION OF FI- NANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (ISAK) STANDARDS EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR

Dalam tahun berjalan, DAMRI telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah Januari.

In the current year, DAMRI has implemented a number of amendments and interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on or after January.

PSAK: (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.

PSAK: (amendment), Statement of Cash Flows on Disclosure Initiatives.

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non kas. Amandemen tersebut tidak menentukan format spesifik untuk mengungkapkan aktivitas pendanaan, namun suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan posisi keuangan.

This amendment requires entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flows and changes in non-cash flows. The amendments do not specify a specific format for disclosing financing activities, but an entity can meet the disclosure objectives by providing a reconciliation between the opening and ending balances of liabilities arising from financing activities in the statement of financial position.

PSAK: (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Kerugian yang Belum Direalisasi.

Amandemen tersebut mengklarifikasi hal berikut:

1. Bila nilai tercatat dari instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap diukur pada nilai wajar yang lebih rendah dari biaya perolehan REPETITIVE dimana dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya perolehan dimana dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya perolehan sehingga timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tanpa mempertimbangkan apakah pemegang instrumen utang tersebut memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, atau apakah besar kemungkinan penerbit akan membayar semua arus kas kontraktual.
2. Ketika suatu entitas menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, dan peraturan perpajakan membatasi penggunaan kerugian untuk pengurangan terhadap jenis penghasilan tertentu (misalnya, kerugian modal hanya dapat dilakukan terhadap keuntungan modal), entitas menilai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan secara gabungan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari jenis penghasilan tersebut, tetapi terpisah dari jenis perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya.
3. Estimasi kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas yang lebih dari jumlah tercatatnya jika ada cukup bukti bahwa kemungkinan besar entitas tersebut akan memenuhinya, dan
4. Dalam mengevaluasi apakah laba kena pajak di masa depan tersedia secara memadai, entitas harus membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan laba kena pajak di masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari

PSAK: (amendment), Income Tax on Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses.

The amendment clarifies the following:

1. If the carrying amount of a debt instrument with a fixed interest rate is measured at fair value which is lower than cost, the tax base is at cost where the tax base is at cost, so that a temporary difference arises which can be deducted without considering whether the holder of the debt instrument expects to recover the carrying amount of the debt instrument through sale or use, or whether it is probable that the issuer will pay all of the contractual cash flows.
2. When an entity assesses whether taxable profit will be available so that deductible temporary differences can be utilized, and taxation regulations restrict the use of losses for deductions against certain types of income (for example, capital losses can only be made on capital gains), the entity assesses temporary differences which are deductible in a combined manner with deductible temporary differences of that type of income, but separately from other types of deductible temporary differences.
3. The estimate of it is probable that future taxable profits may include recovering some of the entity's assets for more than their carrying amounts if there is sufficient evidence that it is probable that the entity will fulfill them, and
4. In evaluating whether sufficient future taxable profits are available, an entity shall compare the deductible temporary differences with future taxable profits that do not include tax deductions resulting from reversing the deductible temporary differences.

pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak pada kinerja keuangan atau posisi keuangan DAMRI. Penerapan amandemen dan interpretasi berikut terhadap standar tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya:

1. PSA : (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi ;
2. PSAK: (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama ;
3. PSAK: (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham, dan;
4. PSAK: (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

ALASAN PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi baru dilakukan sesuai dengan amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah Januari.

DAMPAK KUANTITATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

The adoption of these amendments has no impact on DAMRI's financial performance or financial position. The adoption of the following amendments and interpretations to the standard did not have a material impact on the disclosures or amounts recognized in this year's and prior years' financial statements:

1. PSA : (amendment), Investment Property concerning Transfer of Investment Property;
2. PSAK: (adjustment), Investment in Associate Entities and Joint Ventures;
3. PSAK: (amendment), Share-Based Payments on Classification and Measurement of Share-Based Payment Transactions, and;
4. PSAK: (adjustment), Disclosure of Interest in Other Entities.

REASONS FOR CHANGES IN ACCOUNTING STANDARDS

The adoption of new accounting standards is carried out in accordance with amendments and interpretations of PSAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on or after January.

QUANTITATIVE IMPACT ON FINANCIAL STATEMENT

Until the issuance date of the financial statements, the impact of these standards and interpretations on the financial statement can be known or estimated by management.



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY'S HEALTH LEVEL

KRITERIA PENILAIAN <i>Assessment Criteria</i>		BOBOT <i>Weigh</i>	AUDITED 2021 <i>SKOR/Score</i>
NO	ASPEK KEUANGAN/ <i>Assessment Criteria</i>		
1	Imbalan kepada pemegang saham <i>Return on Equity (RoE)</i>	15,0	1,0
2	Imbalan Investasi <i>Return on Investment (RoI)</i>	10,0	0,0
3	Rasio Kas <i>Cash Ratio (Immediate Solvency)</i>	3,0	3,0
4	Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	4,0	2,0
5	Periode Pengumpulan <i>Collection Periods</i>	4,0	4,0
6	Perputaran Persediaan <i>Inventory Turnover</i>	4,0	4,0
7	Perputaran Total Aset <i>Asset Turnover</i>	4,0	2,0
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Aset Total <i>Own Capital Ratio to Total Assets</i>	6,0	6,0
JUMLAH ASPEK KEUANGAN /NUMBER OF FINANCIAL ASPECT		50,0	22,0
ASPEK OPERASIONAL/ <i>Operational Aspect</i>		DEPOSIT	
1	Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat <i>Services to customers/community</i>	10	9,0
2	Efisiensi, produksi, dan produktivitas <i>Efficiency, production, and productivity</i>	7,0	8,0
3	Pemeliharaan kontinuitas dan produksi <i>Continuity and production preservation</i>	7,0	7,0
4	Peningkatan kualitas pelanggan <i>Customer quality improvement</i>	6,0	5,0
5	Hasil pemeriksaan penugasan pemerintah <i>Government assignment inspection result</i>	5,0	5,0
JUMLAH ASPEK OPERASIONAL/NUMBER OF OPERATIONAL ASPECT		15,0	34,0
ASPEK ADMINISTRASI		ADMINISTRATIVE ASPECT	
1	Laporan Perhitungan Tahunan <i>Annual Calculation Report</i>	3,0	3,0
2	Rancangan RKAP <i>RKAP Draft</i>	3,0	3,0
3	Laporan Periodik <i>Periodic Reports</i>	3,0	3,0

4	Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Performance of the Corporate Social and Environment Responsibility</i>		
	a. Efektivitas penyaluran dana <i>Fund distribution effectiveness</i>	3,0	0
	b. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman <i>Loan repayment collectibility</i>	3,0	0
JUMLAH ASPEK ADMINISTRASI/NUMBER OF ADMINISTRATIVE ASPECT		15,0	9,0
JUMLAH/TOTAL		100,0	65,0



KELANGSUNGAN USAHA

BUSINESS SUSTAINABILITY

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Sampai akhir bulan Maret 2021, DAMRI tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Namun, memasuki awal bulan April hingga Desember, (TAHUN BERAPA) Perusahaan telah terdampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), di mana pemerintah tengah berupaya dalam penanganan, pencegahan, dan penyebaran virus Covid-19 dengan mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DAMRI sebagai perusahaan transportasi jelas mendapatkan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perusahaan menerapkan pembatasan jumlah penumpang yang diangkut, pengetatan dalam syarat bepergian bagi pelanggan, pelarangan angkutan massal pada hari raya besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, juga larangan untuk angkutan haji dan umrah di tahun juga pemberhentian operasi untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN).

MATTERS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT INFLUENCE ON BUSINESS CONTINUITY

Until the end of March 2021, DAMRI did not have matters that could potentially and significantly affect the Company's business continuity. However, at the start of April to December, the Company has been affected by the Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic, whereby the government is working on handling, preventing, and spreading the Covid-19 virus by issuing Large-Scale Social Restrictions (PSBB). DAMRI as a transportation company clearly was significantly impact in terms of business continuity as the company implemented restrictions on the number of passengers transported, tightens travel requirement for customers, prohibits mass transportation on major holidays such as Lebaran, Christmas, and New Year, as well as prohibits transportation for Hajj and Umrah, as well as stopped operations for Transboundary Transportation (ALBN).

PENILAIAN TERHADAP HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan kondisi pencapaian kinerja perusahaan di tahun yang menurun akibat dari pandemi Covid-19, DAMRI masih berusaha untuk dapat memulihkan prospek usaha lebih baik di masa yang akan datang. Dengan demikian, kelangsungan usaha perusahaan akan terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Perusahaan meyakini kelangsungan usaha di masa yang akan datang berdasarkan:

1. Laporan keuangan tahun 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 638.583 juta pada Tahun 2021 .
3. Rasio keuangan Perusahaan tahun menunjukkan bahwa Perusahaan dalam kondisi kurang baik.
4. Hasil total skor tingkat kesehatan perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebesar , atau kriteria "SEHAT" dengan penggolongan "A" atau mengalami peningkatan dari skor 2020 dengan kriteria "SEHAT" dan penggolongan "A".
5. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan

ASSESSMENT OF MATTERS WITH POTEN- TIAL TO SERVE SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

Based on decreasing Company's performance due to the Covid-19 pandemic, DAMRI continues to work towards improving its business prospect in the future. Thus, company's business continuity will be well maintained in the future.

MATTERS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT INFLUENCE ON BUSINESS CONTINUITY

The Company believes in business continuity in the future based on:

1. *The 2021 financial report that is audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners obtaining a fair opinion in all material respects.*
2. *The company managed to record operating income amounting to Rp 638,583 million in 2021.*
3. *The Company's financial ratios for the year show that the Company is in a poor condition.*
4. *The results of the total score of the Company's health level for the year ending in 31 December 2021 amounted to , or the "HEALTH" criteria with the "A" classification or an increase from the 2020 score with the "HEALTH" criteria and the "A" classification.*
5. *There are no lawsuits demanding bankruptcy against the Company.*



SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DAN DIREKSI OLEH OTORITAS

*ADMINISTRATIVE SANCTION IMPOSED BY AUTHORITY TO COMPANY, MEMBER OF
SUPERVISORY BOARD, AND MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS*

Sepanjang tahun 2021 DAMRI tidak mendapat sanksi administrasi oleh otoritas terkait.

Throughout 2021, DAMRI did not receive administrative sanctions by the relevant authorities.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KE- JADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan konsolidasian.

REPORTED FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

There are no important events/events after the date of the financial statement that has a significant effect to the Consolidated Financial Statements.

PENINGKATAN MATERIAL YANG DIKAIT- KAN DENGAN JUMLAH BARANG YANG DIJUAL/BARANG BARU

Pada tahun 2021, tidak terjadi peningkatan yang material dikaitkan dengan jumlah barang yang dijual/barang baru.

MATERIAL IMPROVEMENTS ASSOCIATED WITH NUMBER OF ITEMS SOLD/NEW ITEMS

In 2021, there is no significant material increase associated with the number of goods sold/newly acquired.

Pengembangan Perusahaan

Company Development



INVESTASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KE DEPAN

INVESTMENT TO OVERCOME FUTURE CHALLENGES

Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian tetapi menawarkan peluang pemulihan, strategi yang paling tepat adalah melakukan efisiensi biaya-biaya serta melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Perusahaan. Langkah yang dilakukan di antaranya adalah dengan memperkuat trayek-trayek yang masih cukup banyak pelanggan pada saat pandemi sembari tetap menjaga eksistensi trayek yang ada. Selain itu pengembangan bisnis yang dapat dilakukan pada saat kondisi pandemi adalah dengan mencari bisnis dengan pendapatan yang “pasti”, seperti angkutan kerjasama dengan pemerintah (subsidi). Dengan perluasan jaringan dan melakukan penjangkaran peluang kerjasama dengan pemerintah, dipastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dipergunakan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi Perusahaan.

Untuk menunjang keberlangsungan Perusahaan, strategi yang dikembangkan adalah angkutan logistik, di mana pola kehidupan baru masyarakat (*new normal*) menghadirkan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan perbelanjaan melalui *market place online* sehingga potensi pergerakan barang meningkat signifikan. DAMRI sebagai perusahaan transportasi telah mengembangkan DAMRI Integrated Logistic System (DILS), yaitu sistem yang mengintegrasikan pelayanan angkutan barang dengan kekuatan jaringan yang dimiliki DAMRI di seluruh Indonesia.

In an economic condition filled with uncertainty yet offers opportunities for recovery, the most appropriate strategy is to be costs efficient and optimize available resources of the Company. The steps taken include strengthening routes that still have sizable number of customers during the pandemic while maintaining the existence of existing routes. In addition, business development that can be carried out during a pandemic is to explore businesses with "definite" income, such as transportation services in cooperation with the government (subsidies). Expanding the network and conducting collaborative opportunities with the government ensures that existing resources can be used efficiently and bring benefits to the Company.

To support the Company's sustainability, the strategy that is developed is logistics transportation, whereby the new normal pattern of life presents the potential for the community to carry out shopping activities through online market place so that the potential for movement of goods increases significantly. DAMRI as a transportation company has developed the DAMRI Integrated Logistic System (DILS), which is a system that integrates goods transportation services with the network strength of DAMRI throughout Indonesia.



PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

COMPANY DEVELOPMENT PROJECTS

TABEL PROYEK PENGEMBANGAN USAHA PERUM DAMRI
KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH

TABLE ON DAMRI BUSINESS DEVELOPMENT PROJECTS
IN COOPERATION WITH THE GOVERNMENT

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description	NILAI KONTRAK Contract Value	CABANG PELAKSANA Implementation Unit
Angkutan Penugasan Perintis <i>Pioneer Transportation Assignment</i>	DAMRI melayani daerah-daerah terpencil dan terisolasi yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan lain. Layanan ini merupakan penugasan dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat di area 3TP agar anak-anak dapat bersekolah, biaya logistik dapat berkurang, dan hasil bumi dapat terdistribusikan dengan baik. Tidak banyak perusahaan yang mampu menjalankan layanan perintis ini. Secara historikal, pertumbuhan segmen ini berkisar antara 10-15% per tahun. Salah satu tantangan dari segmen ini adalah peremajaan armada yang sedang diupayakan mendapatkan solusi penyediaan armada baru dari Kementerian Perhubungan. <i>DAMRI serves remote and isolated areas that have not been served by other transportation companies. This service is an assignment from the Government through the Ministry of Transport to meet the transportation needs of communities in the 3TP area so that children can go to school, logistics cost can be reduced, and produce crops are distributed properly. Not many companies are able to operate this pioneering service. Historically, the growth of this segment has ranged from 10-15% per year. One of the challenges of this segment is fleet rejuvenation, of which a new fleet as a solution is currently being sought from the Ministry of Transport.</i>	Rp 121.926.210.366	47 cabang di seluruh Indonesia <i>47 branches in Indonesia</i>

NAMA PROYEK <i>Project Name</i>	KETERANGAN <i>Description</i>	NILAI KONTRAK <i>Contract Value</i>	CABANG PELAKSANA <i>Implementation Unit</i>
Angkutan Penu- gasan Tol Laut <i>Sea Toll Transpor- tation Assignment</i>	Untuk menunjang pelayanan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), diperlukan pelayanan publik angkutan barang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar (3T), dan Perbatasan; pelayanan dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, dengan lokasi layanan di Batam, Merauke, dan Timika. <i>To support goods transportation services to and from underdeveloped, remote, outermost, and border areas (3TP), public goods transport services are needed. In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Transportation Number 10/2020 concerning Guidelines for Implementing the Obligation of Public Service Transportation of Goods on the Road from and to Disadvantaged, Remote, Outermost (3T) and Border Areas; services can be carried out through assignments to Public Company (Perum) DAMRI, with service locations in Batam, Merauke, and Timika.</i>	Rp 7.168.541.360	3 cabang di seluruh Indonesia <i>3 branches in Indone- sia</i>

NAMA PROYEK <i>Project Name</i>	KETERANGAN <i>Description</i>	NILAI KONTRAK <i>Contract Value</i>	CABANG PELAKSANA <i>Implementation Unit</i>
Angkutan Penu- gasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tol Laut <i>National Economic Recovery (PEN) Sea Toll Transportation Assignment</i>	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat melakukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar (3T), dan Perbatasan; pelayanan dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum DAMRI, dengan lokasi layanan di Merauke. <i>A collaborative step between Perum DAMRI and the Indonesian Migrant Workers Protection Agency BPMP for the Departure and Return of Prospective Indonesian Migrant Workers (PMI) from debarkation and embarkation. The basis is the Cooperation Agreement between DAMRI and BPMP Number: 02/KAPKS/XI/2020 Number:3386 /KL004./SPK/00/DU/2020.</i>	Rp 700.000.000	Cabang Merauke <i>Merauke branch</i>

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description	NILAI KONTRAK Contract Value	CABANG PELAKSANA Implementation Unit
Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) <i>National Tourism Strategic Area (KSPN) Transportation</i>	Program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan salah satu program prioritas nasional sehingga memerlukan kolaborasi multisektor. Sebagai langkah nyata dalam mendukung KSPN, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya Perum DAMRI, sebagai pihak yang berkontribusi di pelayanan sektor transportasi darat. DAMRI berkomitmen memberikan pelayanan berupa penyediaan pelayanan angkutan KSPN dan angkutan pariwisata yang terintegrasi, aman, selamat, nyaman, sehat, dan terjangkau dengan menghubungkan antarsimpul transportasi dengan kawasan pariwisata, menyediakan kendaraan yang laik jalan, kondisi interior yang nyaman serta menyediakan anggaran subsidi atau stimulus lainnya. Adapun selama masa pandemi COVID-19, demi kenyamanan dan keamanan penumpang, Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan sesuai standar WHO, yaitu mewajibkan penumpang memakai masker, melakukan jaga jarak, menjaga kapasitas kendaraan (<i>load factor</i>) sebesar 50%, dan penyediaan <i>hand sanitizer</i> di dalam kendaraan serta menerapkan pembelian dan pembayaran daring. Guna mendorong pelayanan KSPN yang lebih maksimal, beberapa hal juga dilakukan di antaranya adalah penerapan Angkutan KSPN yang lebih aman, nyaman, dan promosi layanan KSPN melalui pemasaran digital. Promosi tersebut difokuskan di 15 lokasi KSPN, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Toraja, Bromo, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Likupang, Bukittinggi, Kawah Ijen, Karst Pacitan, dan Bali. Segmen ini merupakan salah satu yang berkelanjutan sejak tahun 2020 bagi DAMRI. Hal ini dimulai saat Perusahaan memenangkan tender untuk angkutan yang melayani KSPN. Dengan berkembangnya layanan KSPN ini, berkembang pula segmen angkutan pariwisata. <i>DAMRI is committed to providing services in the form of KSPN and tourism transportation</i>	Rp 16.956.588.309	15 cabang di seluruh Indonesia <i>15 branches in Indonesia</i>

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description	NILAI KONTRAK Contract Value	CABANG PELAKSANA Implementation Unit
	services that are integrated, safe, secure, comfortable, healthy, and affordable by connecting transportation nodes with tourism areas, providing roadworthy vehicles with comfortable interior conditions, as well as providing subsidized budgets or other stimuli. Meanwhile, during the COVID-19 pandemic, for the convenience and safety of passengers, the Company has implemented health protocols according to WHO standards, namely requiring passengers to wear masks, maintain social distance, maintain vehicle capacity (load factor) by 50%, and provide hand sanitizers inside, as well as implement online purchases and payments. In order to encourage maximum KSPN services, several things were also carried out including the implementation of safer, more comfortable KSPN Transportation, and promotion of KSPN services through digital marketing. Promotion is focused on 15 KSPN locations, namely Lake Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, Toraja, Bromo, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Likupang, Bukittinggi, Ijen Crater, Karst Pacitan, and Bali. This is a sustainable segment for DAMRI since 2020. This started when the Company won a tender for transportation that serves KSPN. With the development of this KSPN service, the tourism transportation segment has also developed.		
Angkutan BTS Bandung dengan Bus Besar <i>BTS Bandung Transportation with Big Bus</i>	Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghadirkan layanan jasa angkutan massal perkotaan yang memperkuat konektivitas dengan program Buy The Service (BTS). Program ini bertujuan agar masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih ke bus. Penggunaan angkutan umum diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) oleh masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat meminimalisasi dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat dari kemacetan, mengurangi polusi udara yang mencemari lingkungan, serta meminimalisasi kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar berasal dari kendaraan bermotor.	Rp 1.998.089.225	Cabang Bandung <i>Bandung branch</i>

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description	NILAI KONTRAK Contract Value	CABANG PELAKSANA Implementation Unit
	Perum DAMRI membuka secara resmi layanan BTS Teman Bus di kawasan Bandung pada Senin, 27 Desember 2021. Kehadiran Teman Bus di Bandung menjadi layanan yang kedelapan dalam program BTS oleh Kementerian Perhubungan RI. Operator yang menjalankan operasional layanan Teman Bus adalah Perum DAMRI dan Big Bird. Angkutan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Bandung Raya, khususnya area Kota Bandung dan sekitarnya yang terkoneksi dengan Terminal Leuwipanjang dan Terminal Dago hingga mencakup wilayah Padalarang, Baleendah, serta Jatinangor. <i>The Ministry of Transport through the Directorate General of Land Transportation provides urban mass transportation services that strengthen connectivity with the Buy The Service (BTS) program. This program aims to make people who originally used private vehicles switch to buses. The use of public transportation is expected to reduce the consumption of fuel oil (BBM) by the community. In addition, this can minimize the impact of economic losses and lost time due to traffic jams, reduce air pollution that pollutes the environment, and minimize traffic accidents, mostly from motorized vehicles.</i> <i>Perum DAMRI officially opened the Teman Bus BTS service in the Bandung area on Monday, 27 December 2021. The presence of Teman Bus in Bandung is the eighth service in the BTS program by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia. The operators running the Teman Bus service are Perum DAMRI and Big Bird. This Bus Rapid Transit (BRT) transportation supports the mobilization of the people of Greater Bandung, especially the Bandung City area and its surroundings which are connected to Leuwipanjang Terminal and Dago Terminal to cover the Padalarang, Baleendah, and Jatinangor areas.</i>		

TABEL PROYEK PENGEMBANGAN USAHA PERUM DAMRI
KEGIATAN KOMERSIAL

TABLE ON PERUM DAMRI COMMERCIAL BUSINESS
DEVELOPMENT PROJECTS

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description	NOMOR KONTRAK Contract Number	MITRA PELAKSANA Partnership Entity
Kerja Sama Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Logistik Darat <i>Synergies and Integration Cooperation with SOEs in Land Logistic Services</i>	Kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN secara umum adalah melanjutkan secara bertahap sinergi kebijakan industrial dan pasar di mana BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan. Kebijakan ini antara lain ditempuh melalui upaya-upaya penciptaan sinergi, transformasi bisnis, dan re-grouping agar lebih efisien dan berdaya saing, pemisahan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat, serta pengoptimalan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-393/BU/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Layanan Logistik Darat; disepakati untuk melakukan Pengembangan Pilot Project Ekosistem Logistik yang sejalan dengan tujuan sinergi BUMN. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kesepakatan para pihak untuk melaksanakan rumusan kerja sama terkait pemanfaatan sumber daya perusahaan yang meliputi namun tidak terbatas pada, melakukan pertukaran wawasan atas bisnis layanan transportasi dan logistik, segala bentuk kerja sama atau kegiatan terkait pengembangan ekosistem digital logistik yang akan diputuskan atau ditetapkan oleh Para Pihak. <i>The policy for developing and fostering SOEs in general is to continue, in stages,</i>	3464.00/AK.001/SPK/00/DPU/2021	PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Kereta Api Logistik, dan PT Pos Logistik Indonesia. <i>PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Kereta Api Logistik, dan PT Pos Logistik Indonesia.</i>

NAMA PROYEK <i>Project Name</i>	KETERANGAN <i>Description</i>	NOMOR KONTRAK <i>Contract Number</i>	MITRA PELAKSANA <i>Partnership Entity</i>
	the synergy between industrial and market policies in which the SOE operates with the company's restructuring and internal policies in accordance to its respective competitive potentials. This policy is pursued, amongst others, through efforts to create synergies, business transformation, and regrouping in order to be more efficient and competitive, separating commercial functions and public services, as well as optimizing the implementation of good corporate governance (GCG) principles. Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-393/BU/12/2020 dated 15 December 2020 concerning the Formation of the Team for Accelerating Synergy Improvement and Integration of State-Owned Enterprises (BUMN) in Land Logistics Services; it was agreed to carry out the Development of a Logistics Ecosystem Pilot Project which is in line with the objectives of SOE synergy. The scope of this Memorandum of Understanding includes the agreement of the parties to formulate cooperation related to the utilization of company resources which includes, but is not limited to, exchanging insights on the transportation and logistics service business, all forms of cooperation or activities related to the development of a digital logistics ecosystem that will be decided or determined by the Parties.		

TABEL PROYEK PENGEMBANGAN USAHA PERUM DAMRI
KERJASAMA INTEGRASI ANTARMODA PIHAK LAIN

TABEL ON PERUM DAMRI BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT INTER-
MODAL INTEGRATION COOPERATION WITH OTHER PARTIES

NAMA PROYEK <i>Project Name</i>	KETERANGAN <i>Description</i>	NOMOR KONTRAK <i>Contract Number</i>
Kementerian Sosial RI <i>Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia</i>	Pemulangan WNI Migran Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan beserta Keluarganya dari Entry Point ke Provinsi Asal <i>Repatriation of Indonesian Migrants Victims of Trafficking in Persons and Victims of Violence and Their Families from the entry point to the province of origin</i>	3471.00/AK.703/SPK/00/DPU/2021
Pemerintah Provinsi Kali- mantan Barat <i>West Kalimantan Provin- cial Government</i>	Kerja Sama Penyediaan Jasa Transportasi Angkutan Orang dan Barang/Logistik di Provinsi Kalimantan Barat <i>Cooperation in the Provision of People and Goods/Logistics Transportation Services in West Kalimantan Province</i>	3568.00/AK.703/SPK/00/DU/2021
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Be- litung <i>Bangka Belitung Islands Provincial Government</i>	Penyelenggaraan Angkutan dan Pemanfaatan Terminal Kota Kabupaten Belitung <i>Implementation of Transportation Services and Utilization of Belitung Regency City Terminal</i>	3461.00/AK.702/SPK/00/DU/2021
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat <i>West Nusa Tenggara Pro- vincial Government</i>	Layanan Angkutan Wisata City Tour di Provinsi Nusa Tenggara Barat <i>City Tour Tourism Transport Services in West Nusa Tenggara Province</i>	3539.00/AK.008/SPK/00/DU/2021
PT Hotel Indonesia Natour <i>Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia</i>	Dukungan terhadap Program Strategis BUMN Ekosistem Pariwisata <i>Support for SOE Strategic Program Tourism Ecosystem</i>	3437.00/AK.008/SPK/00/DU/2021
PT ASDP Indonesia Ferry	Integrasi Ticketing Ferizy di Lintasan Mer- ak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk <i>Ferizy Ticketing Integration on Merak-Bakauheni and Ketapang-Gilimanuk Tracks</i>	3539.00/AK.008/SPK/00/DU/2021
PT LRT Jakarta	Integrasi Antar Moda Angkutan Penumpang dan Bisnis Pendukung Lainnya <i>Intermodal integration between Passenger Trans- port and Other Supporting Businesses</i>	3453.00/AK.001/SPK/00/DU/2021

TABEL PROYEK PENGEMBANGAN USAHA PERUM DAMRI
PENUGASAN LAINNYA

TABEL ON PERUM DAMRI BUSINESS DEVELOPMENT PROJECT

NAMA PROYEK Project Name	KETERANGAN Description
Alokasi Bus Eks PON Papua <i>Former PON Papua Bus Allocation</i>	Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua difasilitasi 428 unit bus yang dikirimkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Total 428 unit bus dari Kemenhub tersebut resmi dikirim menggunakan kapal pada 24 Agustus 2021. Transportasi bus dikirim guna menunjang pelaksanaan PON dari para atlet dan tim <i>official</i> di tiga tempat penyelenggaraan, yaitu Jayapura, Timika, dan Merauke. Fasilitas ini juga untuk menunjang pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua, usai kegiatan PON. Untuk Peparnas, sebanyak 160 unit bus dimodifikasi dengan membuat <i>ramp on/off</i> dengan kemiringan tertentu untuk para atlet yang menggunakan kursi roda. Usai PON dan Peparnas sebagian bus tersebut akan dimanfaatkan untuk melayani angkutan perintis, perkotaan yang pengelolaannya diserahkan ke DAMRI dengan jumlah 147 unit, yang kemudian diperuntukkan di wilayah timur Indonesia (Jayapura, Biak, Merauke, Mimika, Serui, Nabire dan Sarmi). <i>The implementation of the National Sports Week (PON) in Papua was facilitated by 428 buses sent by the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia. A total of 428 bus units from the Ministry of Transport were officially sent by ship on 24 August 2021. Bus transportation was sent to support the implementation of PON for athletes and team officials at three venues, namely Jayapura, Timika, and Merauke. This facility is also to support the implementation of the XVI National Paralympic Week (Peparnas) in Papua, after the PON activities. For Peparnas, as many as 160 buses were modified by making ramp on/off with a certain slope for athletes who use wheelchairs. After PON and Peparnas, some of the buses will be used to serve pioneering and urban transportation, the management of which is handed over to DAMRI with a total of 147 units, intended to serve the eastern part of Indonesia (Jayapura, Biak, Merauke, Mimika, Serui, Nabire and Sarmi).</i>
Angkutan Shuttle dan Angkutan Antarmoda WSBK di DPSP Mandalika <i>Shuttle and WSBK Intermodal Transportation at DPSP Mandalika</i>	Kementerian Perhubungan memastikan kelancaran konektivitas antarmoda transportasi jelang event World Superbike (WSBK) di Mandalika pada 19-21 November 2021 dengan menyediakan bus-bus dengan waktu tunggu 5-10 menit yang menghubungkan antara Mandalika, Bandara Lombok, dan Pelabuhan Gilimas, Kayangan, Bangka, dan Mataram, melalui skema Buy The Service. Melalui Surat Penugasan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.209/1/2/DRJD/2021 tanggal 2 November 2021 perihal Penugasan Pelayanan Angkutan Antarmoda WSBK di DPSP Mandalika 2021, dilakukan penugasan langsung kepada Perum DAMRI untuk pemenuhan layanan transportasi untuk dukungan event WSBK di Mandalika. <i>The Ministry of Transport ensures smooth connectivity between modes of transportation ahead of the World Superbike (WSBK) event in Mandalika on 19-21 November 2021 by providing buses with a waiting time of 5-10 minutes connecting Mandalika, Lombok Airport, and Gilimas Port, Kayangan, Bangka, and Mataram, through the Buy The Service scheme. Through an Assignment Letter from the Director General of Land Transportation of the Ministry of Transport Number AJ.209/1/2/DRJD/2021 dated 2 November 2021 regarding the Assignment of WSBK Intermodal Transport Services at DPSP Mandalika 2021, a direct assignment was made to Perum DAMRI to fulfill transportation services which support the WSBK event in Mandalika.</i>



INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN

INFORMATION TECHNOLOGY INNOVATION ON SERVICES DEVELOPMENT

Sejalan dengan perkembangan digital, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan penting dalam upaya memperluas akses atas produk dan layanan melalui platform digital. Upayanya adalah dengan meningkatkan kapabilitas, dan kapasitas jaringan, serta meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan (*customer experience*) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan standardisasi pelayanan. DAMRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam sistem pelayanan kepada pelanggan setia dan memperluas akses pelanggan dalam pembelian tiket, sejalan dengan peningkatan preferensi pelanggan terhadap transaksi digital. DAMRI terus mengembangkan kapabilitas layanan pelanggan hingga dalam sistem pembelian tiket secara online dan memperluas cara pembayaran. Sepanjang tahun 2021, DAMRI terus melakukan pengembangan melalui pembangunan sistem *Customer Relationship Management*, *e-ticketing system*, dan kanal pembayaran.

a. Customer Relationship Management

Pembuatan sistem *Customer Relation Management* meliputi *Management Dashboard*, *Data-warehouse and Analytic*, *Call Center*, *Campaign System*, *Feedback system*, *Passenger Information System* dan masih akan dilakukan pengembangan pada tahun 2022.

b. E-Ticketing System

Pengembangan *e-ticketing system* dalam inisiatif digitalisasi terus dilakukan dengan memperluas kanal pemesanan tiket bus secara *on-site sales*, *online sales*, dan *online travel*

In line with digital developments, the use of information technology has an important role in efforts to expand access to products and services through digital platforms. The effort is to increase network capability and capacity, as well as improve the quality of customer experience through the use of information technology and service standardization. DAMRI is committed to continue to innovate in its service system to loyal customers and expand customer access in purchasing tickets, in line with increasing customer preferences for digital transactions. DAMRI continues to develop customer service capabilities to the online ticket purchase system and expand payment methods. Throughout 2021, DAMRI will continue to develop through the development of a *Customer Relationship Management* system, *e-ticketing system*, and payment channels.

a. Customer Relationship Management

Development of the *Customer Relation Management* system covers *Management Dashboard*, *Data-warehouse and Analytic*, *Call Center*, *Campaign System*, *Feedback system*, *Passenger Information System*, as well as more development to come in 2022.

b. E-Ticketing System

The development of *e-ticketing system* as a digitalization initiative continues, with expansion to the bus ticket reservation canal though *on-site sales* and *online travel agent (OTA)*, as

agent (OTA), juga mendukung gerakan *cashless payment* melalui kerja sama dengan beberapa *payment gateway* (PG). Salah satu strateginya adalah melalui pemanfaatan *Mobile Point of Sales* (MPOS).

c. Kanal Pembayaran

Kanal pembayaran yang sudah berjalan pada 2021 adalah untuk *Non-Prepaid* yaitu VA Mandiri, kartu debit/kartu kredit, Gopay, LinkAja, OVO. Penambahan yang sudah berjalan di tahun 2021 adalah Indomaret, ShopeePay, dan DANA. Rencana Penambahan sesuai dengan pengembangan kerja sama dari Divisi Komersial, yaitu dengan Alfamart, VA BRI, Pos Indonesia. Sedangkan, *payment channel* untuk *prepaid* yang sedang dikembangkan adalah Brizzi, e-Money, Flash, dan TabCash.

well as supporting the movement towards *cashless payment* though cooperation with various *payment gateway* (PG). One of the strategies is through utilizing *Mobile Point of Sales* (MPOS)

c. Payment Channel

Operational *payment canal* in 2021 is for *non-prepaid*, that is VA Mandiri, debit card/credit card, Gopay, LinkAja, OVO. Additional canal that is already operational in 2021 are Indomaret, ShopeePay, and DANA. Plan for Additional in accordance to the cooperation development from the Commercial Division, namely with Alfamart, VA BRI, Pos Indonesia. While *payment channels* for *prepaid* that are still being developed are Brizzi, e-Money, Flash, and TabCash.





BELANJA MODAL

CAPITAL EXPENDITURE

INVESTASI DI TAHUN 2021

INVESTMENT IN 2021

No	Uraian	2021	2021	(%)	Description
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization		
1	Pengadaan Bus dan Mobil Barang	-	-	-	Procurement of Buses and Cargo Vehicles
2	Perbaikan	1.033.276	1.011.208	97,86	Repair
3	Peralatan Bengkel	667.081	411.352	61,66	Workshop equipment
4	Pengadaan Tanah	-	-	-	Land acquisition
5	Sertifikat Tanah	-	-	-	Land certificate
6	Kendaraan dinas	-	-	-	Official vehicle
7	Bangunan	445.750	221.465	49,68	Building
8	Mesin-mesin Kantor	415.000	290.174	69,92	Office machines
9	Inventaris Kantor	1.461.392	606.540	41,50	Office inventory
10	Pengadaan Sistem Administrasi	642.660	687.224	106,93	Administration system procurement
11	Investasi Usaha Lainnya	-	-	-	Other business investment
TOTAL		4.665.158	3.227.963	69,19	TOTAL

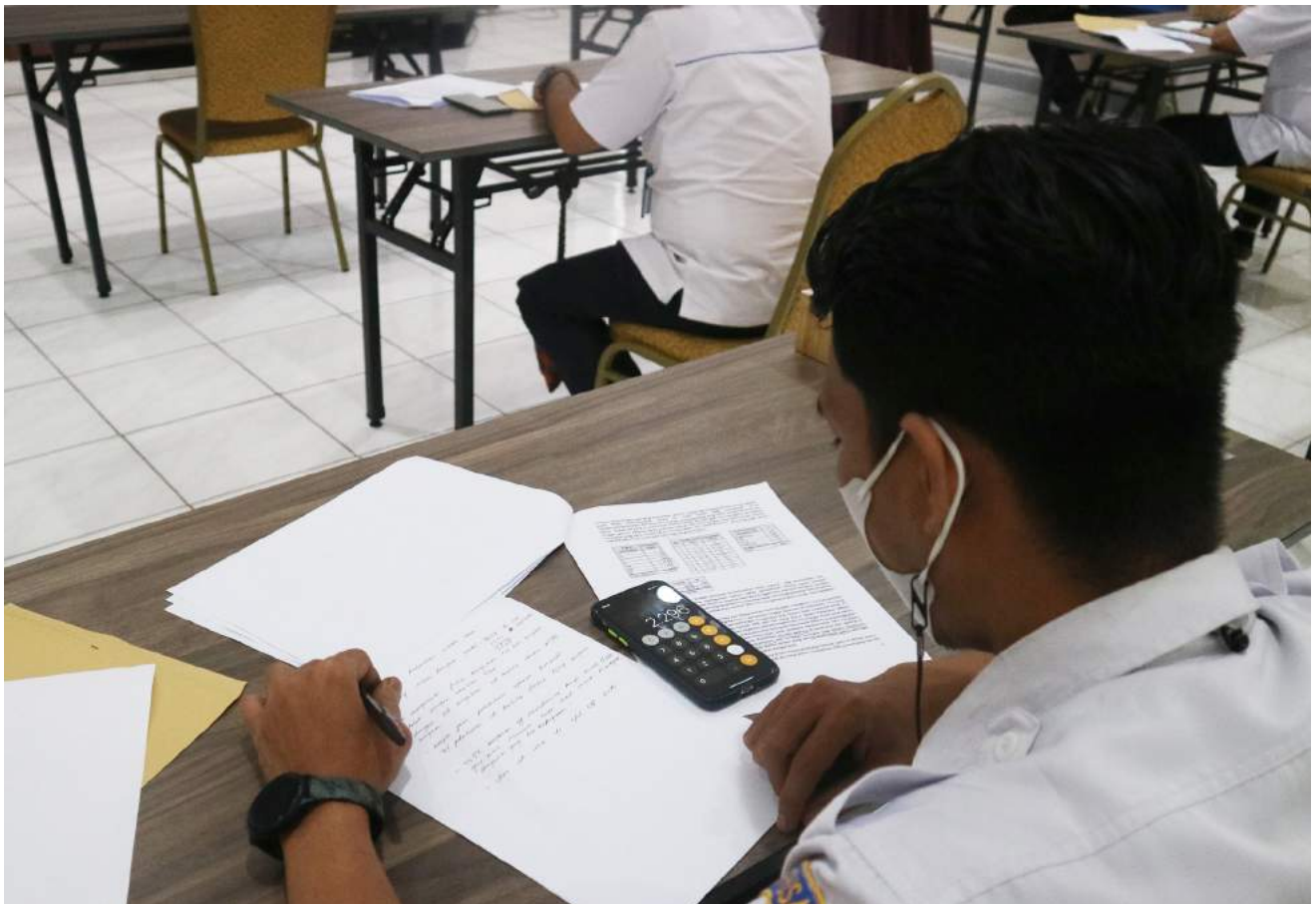
No	Uraian	2021	2021	(%)	Description						
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization								
SUMBER DANA						SOURCE OF FUNDS					
1	Dana internal	4.665.158	3.227.963	69,19	Internal fund						
2	Kredit Bank/MTN	-	-	-	Bank loan/MTN						
3	Bantuan Pemerintah	-	-	-	Government Assistance						
TOTAL		4.665.158	3.227.963	69,19	TOTAL						

Pada tahun 2021 investasi terealisasi sebesar Rp3,23 miliar dari anggaran Rp4,66 miliar atau 69,19%, yang terdiri atas:

1. Perbaikan/rekondisi sebanyak 32 unit;
2. Pengadaan peralatan perbengkelan di Cabang Bandara Soekarno-Hatta, Pontianak, Surabaya, dan cabang cabang yang melayani angkutan perintis;
3. Perbaikan bangunan di Kantor Pusat, Cabang Basoetta, Pangkalpinang, Yogyakarta, dan Jakarta;
4. Pengadaan mesin dan inventaris kantor, baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang.

Investment realization for year 2021 is Rp 3,23 billion from a budget of Rp 4,66 billion or 69,19%, which consists of:

1. Repair/recondition for 32 units;
2. Procurement of workshop equipment at Soekarno-Hatta Airport Branches, Pontianak, Surabaya, and branches that serve pioneer transportation;
3. Building repairs at the Head Office, Basoetta Branch, Pangkalpinang, Yogyakarta, and Jakarta;
4. Procurement of office machines and inventory, both at the Head Office and at branch offices.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

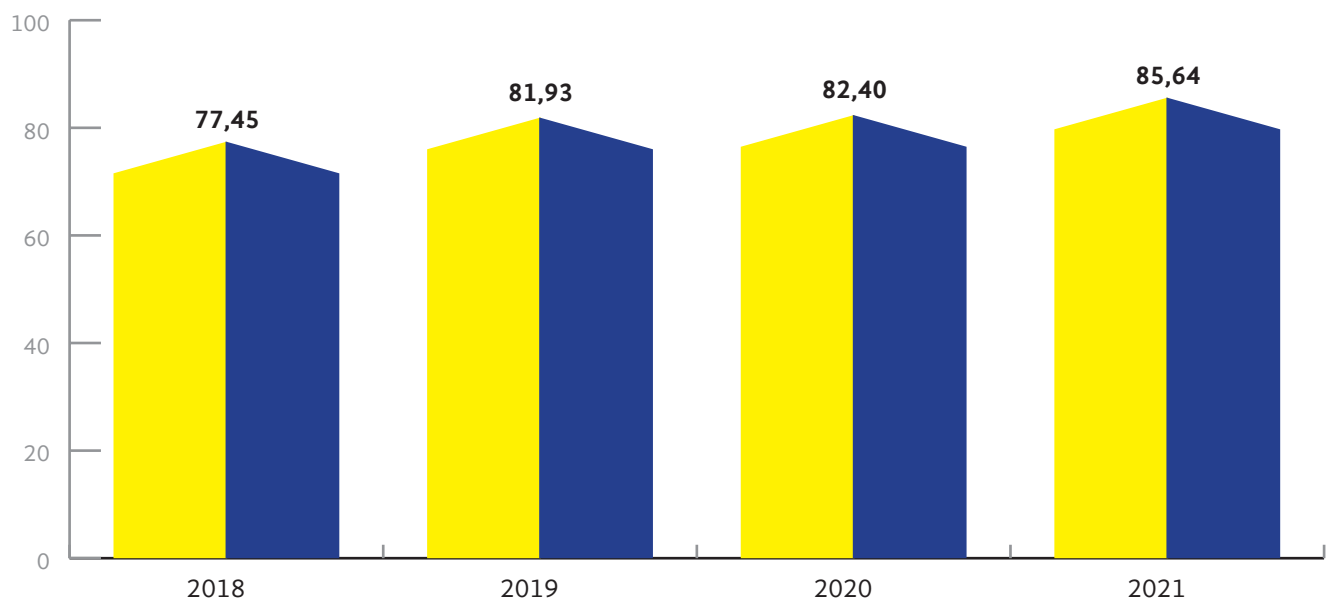


PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ACHIEVEMENTS IN CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Peningkatan skor *assessment* GCG dari 77,457 pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,93 pada tahun 2019, dan kemudian meningkat lagi menjadi 82,40 pada tahun 2020, dan terus meningkat menjadi 85,68 dengan klasifikasi penerapan GCG “Sangat Baik”.

The increase in the GCG *assessment* score from 77.457 in 2018 to 81.93 in 2019, with further increase to 82.40 in 2020, and continues to increase to 85.64 with the classification of GCG implementation “Very Good”.





SOROTAN AKTIVITAS TATA KELOLA TAHUN 2021

2021 HIGHLIGHTS OF GOVERNANCE ACTIVITIES

Untuk memperkuat implementasi GCG, pada tahun 2021 Perusahaan melakukan penyempurnaan kebijakan GCG, sosialisasi dan internalisasi GCG ke unit-unit usaha (Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, dan Kantor Cabang), *monitoring*, dan evaluasi secara berkala, meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan antikorupsi.

In 2021, in order strengthen the implementation of GCG, the Company improved its GCG policies, socialized and internalized GCG to business units (Head Office, Regional Divisional Offices, and Branch Offices), conducted periodic monitoring and evaluation, improved LHKPN reporting compliance, and carried out activities relating to anti-corruption education.





JEJAK LANGKAH IMPLEMENTASI GCG PERUSAHAAN

GCG IMPLEMENTATION MILESTONE

Penyempurnaan Aturan GCG

Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan GCG untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan usaha dan dinamika perkembangan organisasi, yaitu:

1. Pemutakhiran dokumen Pengendalian Gratifikasi
2. Pemutakhiran dokumen Code of Conduct
3. Pemutakhiran dokumen Whistleblowing System

Sosialisasi GCG

Secara berkala, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan internalisasi, pelatihan dan sosialisasi terkait GCG. Materi sosialisasi di antaranya mengenai pengenalan GCG, Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Etika Bisnis yang diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas, Pengendalian Gratifikasi, serta Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Pada tahun 2021, kegiatan sosialisasi GCG dilaksanakan pada saat Rapat Kerja (Raker) Perusahaan yang dihadiri oleh seluruh perwakilan manajemen dari Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, dan Kantor Cabang.

Selain melaksanakan sosialisasi GCG melalui *workshop*; Pedoman GCG, Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Etika Bisnis, dan kebijakan serta panduan tentang praktik GCG lainnya disosialisasikan melalui media intranet Perusahaan (*e-office*) dan *website* yang dapat diakses oleh seluruh karyawan.

Penyempurnaan Aturan GCG

In 2021, the Company made a number of improvements and updates to its GCG policies in order to adapt to the business environment conditions and the dynamics of organizational development, namely:

- 1. Updating Gratification Control document*
- 2. Updating Code of Conduct document*
- 3. Updating the Whistleblowing System document*

GCG Socialization

Periodically, the Company organized internalization, training and socialization activities related to GCG. The socialization materials included the introduction of GCG, Code of Conduct and Business Ethics, followed by the signing of the Integrity Pact, Gratification Control, and Reporting of Alleged Violations (Whistleblowing System).

In 2021, GCG socialization activities held during the Company's Working Meeting (Raker) was attended by all management representatives from the Head Office, Regional Divisional Offices, and Branch Offices.

*In addition to carrying out GCG socialization through workshops; GCG Guidelines, Code of Conduct and Business Ethics, as well as other GCG policies and practices were socialized through the Company's intranet (*e-office*) and website that can be accessed by all employees.*

Kampanye Anti-Korupsi

1. Sosialisasi gratifikasi kepada seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta mitra kerja di Kantor Pusat, Divisi Regional, dan Cabang;
2. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sosialisasi, kampanye, dan pendidikan antikorupsi; dan
3. Publikasi anti-gratifikasi di media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Website).

Anti-Corruption Campaign

1. Socialization of gratuities to all levels of management, employees, and partners at the Head Office, Regional Divisions, and Branches;
2. Cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding anti-corruption socialization, campaigns, and education; and
3. Publication of anti-gratuities on social media (Instagram, Facebook, Twitter, Website).





DASAR PENERAPAN GCG

BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

Sebagai wujud dari komitmen DAMRI untuk mengimplementasikan GCG yang baik secara penuh, Perusahaan memberlakukan berbagai kebijakan dan panduan seperti Pedoman GCG, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Etika Bisnis, Panduan Direksi dan Dewan Pengawas (*Board Manual*), Piagam Komite Dewan Pengawas, Piagam Audit Internal, serta kebijakan turunan lainnya yang dibuat untuk mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
3. Peraturan Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
5. Pedoman GCG DAMRI:
 - a. *Code of Good Corporate Governance*
 - b. *Code of Conduct*
 - c. *Board Manual*
 - d. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
 - e. Pengendalian Gratifikasi

As a manifestation of DAMRI's commitment to properly implement GCG in full, the Company enforces various policies and guidelines such as the GCG Guidelines, *Code of Conduct and Business Ethics*, *Guidelines for the Board of Directors and the Supervisory Board (Board Manual)*, the Charter of the Committee of the Supervisory Board, the Charter Internal Audit, as well as other derivative policies made to support the consistent and continuous implementation of GCG. These policies include the following:

1. Law Number 19 Year 2003 concerning SOE
2. Government Regulation Number 38 Year 2018 concerning Public Company (Perum) DAMRI
3. Regulation of the Minister of SOEs No. SK-01/MBU/2011 Year 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
4. Regulation of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 Year 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
5. DAMRI GCG Guidelines:
 - a. *Code of Good Corporate Governance*
 - b. *Code of Conduct*
 - c. *Board Manual*
 - d. *Whistleblowing System*
 - e. *Gratuity Control*

1. Peraturan tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
2. Piagam Komite Dewan Pengawas
3. Piagam Audit Internal
4. Standard Operating Procedure (SOP) terkait Keterbukaan Informasi
6. Regulation on Report on the Wealth of State Administrator (LHKPN)
7. Charter of the Committee of the Supervisory Board
8. Internal Audit Charter
9. Standard Operating Procedure (SOP) relating to Information Disclosure





TUJUAN PENERAPAN GCG

OBJECTIVE OF GCG IMPLEMENTATION

Penerapan Good Corporate Governance di DAMRI, selain untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, juga untuk mencapai sejumlah tujuan penting sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kinerja dan nilai Perusahaan bagi Pemilik Modal melalui pelaksanaan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.
2. Meningkatkan pengelolaan DAMRI secara profesional, transparan, efisien, serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Pembahasan Bersama, Dewan Pengawas, dan Direksi.
3. Menjadi acuan pengelolaan DAMRI dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial DAMRI terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kelestarian lingkungan di sekitar DAMRI.
4. Meningkatkan *stakeholder's value* dengan memperhatikan *stakeholders* lainnya.
5. Meningkatkan daya saing DAMRI secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

The implementation of Good Corporate Governance in DAMRI, serves not only to comply with the provisions set by the regulator, but is also to achieve a number of important objectives as follows:

1. Maximizing the Company's performance and value for Shareholders through the implementation of the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness so that the Company has high competitiveness.
2. Improving the management of DAMRI in a professional, transparent, efficient manner, as well as encouraging the empowerment of functions and independence of the Joint Discussion Meeting, the Supervisory Board, and the Board of Directors.
3. Serving as a reference for DAMRI management in making decisions and carrying out actions based on high morals and compliance with laws and regulations as well as awareness of DAMRI's social responsibility to stakeholders and environmental sustainability around DAMRI.
4. Increasing stakeholder's value by paying attention to other stakeholders.
5. Improving DAMRI's competitiveness nationally and internationally, thereby increasing market confidence that can encourage flows of investment and sustainable national economic growth.



TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG

STAGES OF GCG IMPLEMENTATION

Pengendalian GCG untuk Setiap Kegiatan Usaha Perusahaan

Setiap kegiatan usaha Perusahaan (*business process*) yang dilaksanakan di DAMRI pada dasarnya harus memenuhi prinsip dasar GCG, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independence*, *Fairness* (TARIF).

Penerapan GCG juga berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen GCG, audit internal, audit eksternal (KAP), serta audit yang dilakukan oleh Komite Audit dan audit BPK.

GCG Control for Every Company's Business Activities

Each of the Company's business activities (*business processes*) carried out at DAMRI must essentially comply with the basic principles of GCG, namely *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independence*, *Fairness* (TARIF).

The implementation of GCG is also based on recommendations from the results of the GCG assessment, internal audit, external audit (KAP), as well as audits conducted by the Audit Committee and the BPK audit.

MATRIKS ASPEK GCG

GCG ASPECT MATRIX



NO.	ASPEK GCG GCG Aspect	PEMENUHAN TERHADAP ASPEK GCG	Fulfillment of GCG Aspect
1	Transparansi <i>Transparency</i>	Pengambilan keputusan/kebijakan didukung oleh informasi atau data yang benar, relevan, tepat, dan akurat serta dilakukan secara terbuka melalui rapat rapat dengan pihak internal dan eksternal terkait.	<i>Decision/policy making is supported by information or data that is accurate, relevant, and precise and is conducted openly in meetings with relevant internal and external parties.</i>
2	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	- Kejelasan atas wewenang dan tanggung jawab atas fungsi, hak, kewajiban dalam organisasi Perusahaan untuk setiap tahapan usulan, kajian usaha/kebijakan, risk management, persetujuan, <i>monitoring</i>, dan evaluasi. - Program/kebijakan yang terukur dan selaras dengan visi, misi, tata nilai, sasaran usaha, dan strategi Perusahaan.	<i>Clarity on authority and responsibility towards functions, rights, and obligations within the Company organization for each stages of proposal, business/policy study, risk management, approval, monitoring, and evaluation.</i> <i>Programs/policies are measurable and in line with the Company's vision, mission, values, business goals, and strategies.</i>

NO.	ASPEK GCG GCG Aspect	PEMENUHAN TERHADAP ASPEK GCG	Fulfillment of GCG Aspect
3	Pertanggung-jawaban <i>Responsibility</i>	Pemenuhan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Perusahaan serta etika bisnis, termasuk aspek lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial.	<i>Compliance with applicable laws and regulations and internal company regulations as well as business ethics, including environmental and social responsibility aspects.</i>
4	Kemandirian <i>Independence</i>	Program/kebijakan dikelola secara profesional dan tidak ada benturan kepentingan/pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun.	<i>The program/policy is managed professionally and there is no conflict of interest/influence or pressure from any party.</i>
5	Kewajaran <i>Fairness</i>	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.	<i>Justice and equality in fulfilling the rights of stakeholder</i>

Pembaruan Dokumen GCG

Pada tahun 2021 dilakukan pembaruan beberapa dokumen GCG yang meliputi:

1. Code of Conduct
2. Whistleblowing System (WBS)
3. Pengendalian Gratifikasi
4. Surat Keputusan Direksi tentang Tim WBS
5. Surat Keputusan Direksi tentang Tim Unit Pengelola Gratifikasi

Adapun pembaruan dokumen GCG tersebut telah disesuaikan dengan beberapa perubahan yang meliputi perubahan Peraturan Pemerintah, pembaruan kebijakan internal Perusahaan, dan hasil rekomendasi dari asesmen GCG pada tahun sebelumnya.

GCG Document Update

In 2021, several GCG documents was updated, which included:

1. Code of Conduct
2. Whistleblowing System (WBS)
3. Gratuity Control
4. Decree of the Board of Directors regarding the WBS Team
5. Decree of the Board of Directors regarding the Gratification Management Unit Team

The update of the GCG document has been adjusted to several changes, which included changes to Government Regulations, updates to the Company's internal policies, and recommendations from the GCG assessment in the previous year.



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

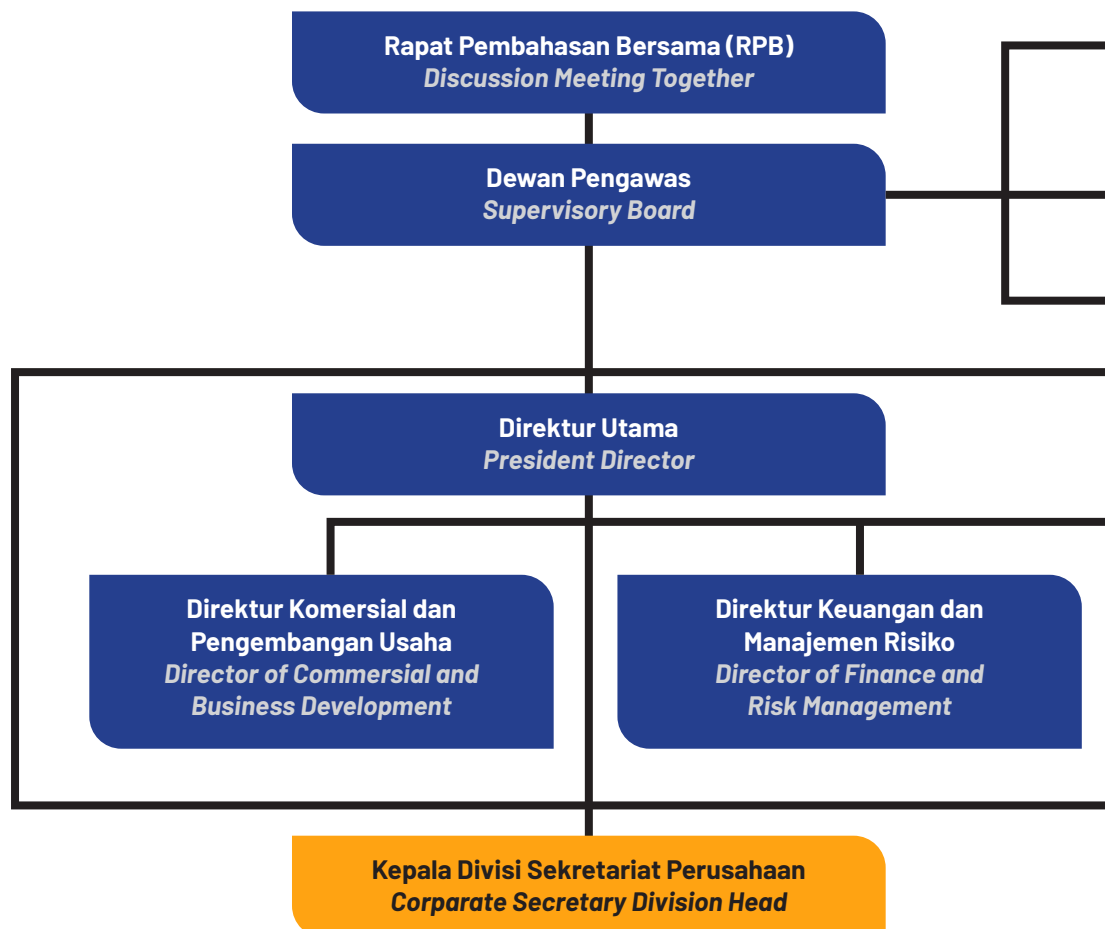
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas organ utama, yaitu Rapat Pembahasan Bersama (RPB), Dewan Pengawas, dan Direksi.

Dewan Pengawas memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya.

The Company Management Structure consists of the main organs, which are the Joint Discussion Meeting (RPB), the Supervisory Board, and the Board of Directors.

The Supervisory Board has an Audit Committee, a Risk Management Monitoring Committee, and a Nomination and Remuneration Committee to assist the Supervisory Board in carrying out its functions and obligations.



Sedangkan Direksi memiliki organ pendukung setingkat Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada para anggota Direksi.

Fungsi pengendalian implementasi GCG berada di bawah tanggung jawab Direktur SDM dan Umum dengan Divisi Sekretariat Perusahaan memiliki akuntabilitas memastikan penyelenggaraan kepatuhan organisasi yang meliputi pengelolaan tata kelola organisasi sesuai dengan ketentuan dan asas penatalaksanaan organisasi/perusahaan yang berlaku.

Meanwhile, the Board of Directors has a supporting organ at the level of the Division Head who is directly responsible to the members of the Board of Directors.

The function of controlling the implementation of GCG is under the responsibility of the Director of Human Resources and General Affairs with the Corporate Secretariat Division having accountability for ensuring the implementation of organizational compliance which includes the management of organizational governance in accordance with applicable provisions and principles of organizational/company management.

Komite Audit
Audit Committee

Komite Pemantauan Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Direktur Teknik dan Fasilitas
Director of Engineering and Facility

**Direktur Sumber Daya Manusia
dan Umum**
*Director of Human Resources
and General Affairs*



KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

DAMRI sebagai perusahaan transportasi darat senantiasa menempatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagai perangkat kebijakan yang mendasari seluruh kegiatan usaha. DAMRI menyadari bahwa keberadaan GCG menuntut penerapan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi (*high compliance*), memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip serta praktik terbaik GCG yang disertai dengan upaya perbaikan demi terwujudnya visi dan misi Perusahaan serta kesinambungan usaha jangka panjang (*sustainable business*).

Dalam penerapan GCG dan dalam hal penyusunan kebijakan, DAMRI telah mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum DAMRI yang menjadi Anggaran Dasar Perusahaan serta standar yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Tahun 2006 yang meliputi 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran dan Kesenjangan. Selain mengacu pada prinsip-prinsip GCG, seluruh penyusunan kebijakan juga berdasarkan pada *Objective Risk and Control*.

DAMRI as a land transportation company always positioned the practice of Good Corporate Governance as a policy tool that underlies all business activities. DAMRI realizes that the existence of GCG demands high compliance with regulations, and is therefore strongly committed to implementing the principles and best practices of GCG accompanied by improvement efforts to realize the Company's vision and mission as well as long-term business.

In implementing GCG and in terms of policy formulation, DAMRI refers to applicable provisions and regulations, including Government Regulation Number 38 Year 2018 concerning Public Company DAMRI which also serves as the Company's Articles of Association, as well as the standards set by the National Committee on Governing Policy (KNKG) Year 2006 which includes 5 (five) basic principles, namely Transparency, Accountability, Independence, as well as Fairness and Equality. In addition to referring to GCG principles, all policy formulation is also based on *Objective Risk and Control*.



PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERDASARKAN OBJECTIVE RISK AND CONTROL SERTA PRINSIP-PRINSIP GCG

POLICY DEVELOPMENT APPROACH BASED ON OBJECTIVE RISK AND CONTROL AND GCG PRINCIPLES

Seluruh proses bisnis di Perusahaan wajib memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) agar peningkatan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan dapat terwujud.

DAMRI memiliki komitmen terhadap penerapan GCG di seluruh lini, baik di Kantor Pusat, Divisi Regional, maupun Cabang. Bentuk komitmen tersebut tercermin dengan pemutakhiran dokumen kebijakan Perusahaan terkait GCG, melaksanakan proses bisnis sesuai dengan nilai-nilai GCG, dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya secara berkala.

Kegiatan kajian internal dan pemutakhiran atas pedoman-pedoman GCG perusahaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi:

1. *Code of Good Corporate Governance* (CoGCG)
2. *Code of Conduct* (CoC)
3. *Board Manual*
4. *Whistleblowing System*
5. *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*

Seluruh karyawan DAMRI juga menandatangani Pakta Integritas yang merupakan bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Hingga akhir 2021, persentase penandatanganan Pakta Integritas oleh Insan DAMRI mencapai 100%.

All business processes in the Company are required to comply with the principles of *Good Corporate Governance* (GCG) so that continuous improvement of the Company's performance can be realized.

DAMRI is committed to the implementation of GCG in all lines, both at the Head Office, Regional Divisions, and Branches. This form of commitment is reflected in updating the Company's policy documents related to GCG, implementing business processes in accordance with GCG values, and evaluating their implementation periodically.

Internal assessment activities and the updating of the GCG guidelines that was carried out in 2021 include the following:

1. *Code of Good Corporate Governance* (CoGCG)
2. *Code of Conduct* (CoC)
3. *Board Manual*
4. *Whistleblowing System*
5. *Gratuity Control Guidelines*

All DAMRI employees have also signed an Integrity Pact which is a form of shared commitment towards compliance with GCG principles. Until the end of 2021, the percentage of signing of the Integrity Pact by DAMRI personnel has reached 100%.

Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik di antaranya tecermin pada peningkatan skor assessment GCG. Pada tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020 skor yang diperoleh adalah 81,93 atau mengalami kenaikan skor sebesar 4,103 poin dari pencapaian di tahun buku sebelumnya sebesar 77,457. Demikian halnya pada penilaian GCG tahun buku 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021, hasil penilaian meningkat lagi menjadi 82,40. Pada penilaian GCG tahun buku 2021, hasil penilaian meningkat kembali menjadi 85,68 dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Kenaikan ini secara umum dikarenakan adanya peningkatan wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG.

The improvement in the quality of the implementation of good governance is reflected in the increase in the GCG assessment score. For the 2019 financial year, which was conducted in 2020, the score obtained was 81.93 or an increase in the score by 4.103 points from the previous financial year of 77.457. Likewise, in the 2020 financial year, the GCG assessment which was completed in 2021, the assessment result increased again to 82.40. In the 2021 financial year, the assessment results increased again to 85.64 with the classification of the quality of GCG implementation "Very Good". This increase is generally due to an increase in the Company's commitment to implementing GCG.



INTERNALISASI GCG

GCG INTERNALIZATION

Manajemen Perusahaan berkomitmen GCG dapat diterapkan di seluruh lini, baik di Kantor Pusat, Divisi Regional, maupun Cabang. Regulasi terkait GCG disiapkan dan dilakukan pengkajian berkala serta pemutakhiran dokumen kebijakan Perusahaan terkait GCG jika diperukan. Manajemen berkomitmen menjadikan proses bisnis sesuai dengan nilai-nilai GCG, termasuk dengan upaya terus-menerus melakukan sosialisasi atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Perusahaan serta penegakan atas implementasinya. Manajemen juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG secara berkala dan perbaikan berkelanjutan.

The Company's management is committed to implementing GCG in all lines, both at the Head Office, Regional Divisions, and Branches. Regulations related to GCG were prepared, reviews were conducted periodically, and Company policy documents related to GCG were updated, when necessary. Management is committed to ensuring that business processes is in accordance with GCG values, including by continuously carrying out efforts to socialize established policies as well as enforcing their implementation. Management also periodically evaluates the implementation of GCG and conducts sustainable improvements.



RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA

JOINT DISCUSSION MEETING

Sepanjang Tahun 2021, perusahaan telah melaksanakan 2 (dua) kali RPB, yaitu RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun 2021 dan RPB Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan untuk Tahun Buku 2020.

Throughout 2021, the company has implemented 2 (two) RPBs, namely the RPB for Ratification of the Company's Work Plan and Budget for 2021 and the RPB for the Corporate Management Accountability Report for the 2020 Fiscal Year.

RPB PENGESAHAN RKAP 2021

JDM ON THE RATIFICATION OF THE COMPANY'S 2021 WORK PLAN AND BUDGET



Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan (Audited) DAMRI Approval of the Annual Report and the ratification of DAMRI's Financial Statement (Audited)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
- Menetapkan rugi bersih tahun berjalan Rp 152.902.380.435
- Menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Pengawas Tahun 2021 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas atas kinerja Tahun Buku 2021, akan ditetapkan secara tersendiri.
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN.
- Hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Decision

- Approved the 2021 Fiscal Year Annual Report, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Supervisory Board and ratified the Company's Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2020 and ratified the Partnership and Community Development Program Report for the 2020 Fiscal Year.
- Determine the net loss for the year Rp 152,902,380,435,-
- Determine the salary/honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021 as well as bonuses for the Board of Directors and Supervisory Board for the performance of the 2020 Financial Year, which will be determined separately.
- Establishing a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Corporate Community Development Program for the 2021 Financial Year, carried out separately by the Minister of SOEs.
- Matters needing attention.

Status: Terealisasi

Status: Realized



DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD

Ketentuan tentang Dewan Pengawas DAMRI ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perum DAMRI pada Bab III tentang Anggaran Dasar Perusahaan bagian kelima dan dituangkan dalam *Board Manual* DAMRI pada Bab 3, serta mematuhi peraturan perundangan terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota Dewan Pengawas

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan *Good Corporate Governance*.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan bidang pengawasan internal dan akuntansi serta sebagai Ketua Komite Audit.
3. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan terhadap pengurusan usaha perusahaan di bidang usaha dan komersial serta sebagai Ketua Komite Pemantauan Manajemen Risiko.

The provision concerning the DAMRI Supervisory Board is established in Government Regulation Number 38 Year 2018 concerning Perum DAMRI in Chapter III concerning the Company's Articles of Association section five, and set forth in DAMRI Board Manual in Chapter 3, and which complies with other relevant laws and regulations.

Duties and Responsibilities of the Chairperson and Member of the Supervisory Board

1. Coordinate the implementation of the duties and supervisory activities of the Supervisory Board and provide direction to the Board of Directors on strategic matters and *Good Corporate Governance*.
2. Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors regarding the management of the Company's business in the field of internal supervision and accounting, as Chairman of the Audit Committee.
3. Carry out the task of supervising and providing direction to the management of the company's business in the business and commercial sector, as the Chair of the Risk Management Monitoring Committee.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Pengawas

Keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas antara lain:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Pada tahun 2021 terdapat beberapa keputusan Direksi yang mendapat persetujuan Dewan Pengawas DAMRI, yaitu:

Decisions Requiring the Approval of the Supervisory Board

Decisions of the Board of Directors that require the approval of the Supervisory Board include the following:

1. Collateralizing fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Cooperating with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, contracts management, leasing assets, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other cooperation with a certain value or period determined by the Minister;
3. Receiving or providing medium-term or long-term loans;
4. To write off bad debts and dead goods from the books;
5. Releasing movable fixed assets with sufficient economic age that is generally up to 5 (five) years; and/or
6. Established 1 (one) organizational structure below the Board of Directors.

In 2021, DAMRI Supervisory Board approved several decisions of the Board of Directors.

NO.	TANGGAL Date	PERIHAL	Considering
1	8 Januari 2021	Tanggapan Dewan Pengawas Atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Response of the Supervisory Board concerning Long Term Company Plan
2	1 April 2021	Tanggapan Dewan Pengawas DAMRI atas Proposal Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Perum DAMRI	Response of DAMRI Supervisory Board concerning Perum DAMRI Proposal to Add Capital State Injection
3	1 April 2021	Dukungan Dewan Pengawas Perum DAMRI atas Permohonan Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Support of DAMRI Supervisory Board concerning Request for National Economic Recovery (PEN) Fund Program
4	5 April 2021	Tanggapan Dewan Pengawas atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Perum DAMRI	Response of the Supervisory Board concerning Approval to Change Perum DAMRI's organizational structure

NO.	TANGGAL Date	PERIHAL	Considering
5	10 Mei 2021	Tanggapan Dewas Perum DAMRI atas Rencana Kerjasama DAMRI dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) utk Angkutan Haji dan Umroh di Kerajaan Arab Saudi	Response of Perum DAMRI Supervisory Board concerning DAMRI cooperation plan with Hajj Financial Management Body (BPKH) for Hajj and Umroh transportation in the Kingdom of Saudi Arabia
6	10 Mei 2021	Tanggapan Penghapusbukuan dan Penandatanganan Aktiva Tetap Tidak Produktif	Response to Removal and Signing of Un-productive Fixed Asset from Bookkeeping Records
7	3 Juni 2021	Tangapan Aas Permohonan Izin Rencana Penjualan Alat Produksi Berupa Bus dan Truck Berusia Lebih dari 10 Tahun (156 unit)	Response to Request for Approval for the Plan to Sell Production Equipment in the forms of Buses and Trucks older than 10 years (156 units)
8	7 Juli 2021	Persetujuan Penunjukan Plt. Direktur Utama	Approval of the Appointment of acting President Director
9	16 Jul 2021	Tanggapan Dewan Pengawas atas Usulan Perubahan RKAP Perum DAMRI Tahun Buku 2021	Response of the Supervisory Board on the Propose Changes to Perum DAMRI RKAP Financial Year 2021
10	8 Oktober 2021	Masukan atas Draf SK SOP Pendayagunaan Aset Tetap Berupa Tanah dan/ atau Bangunan di Lingkungan Perum DAMRI	Input to Draft SK SOP Fixed Asset in the form Land and/or Building in the environment of Perum DAMRI
11	15 Oktober 2021	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2021 Perum DAMRI	Appointment of Public Appointment Office (KAP) to Audit Perum DAMRI Financial Statement and PKBL Financial Statement Year 2021

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Pengawas

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas DAMRI dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas (*Board Manual*)

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas diatur dalam tata laksana kerja Direksi dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) yang berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas dan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dualankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas

Selama tahun 2021 terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dijelaskan pada Bab Laporan Dewan Pengawas dan Direksi.

Term of Service of the Supervisory Board

Member of the Supervisory Board are appointed by the Minister for a term of office of 5 (five) years and can be reappointed for another 1 (one) term of service

Supervisory Board Nomination and Selection Process

The appointment and dismissal of members of the DAMRI Supervisory Board is carried out based on the principles of professionalism and good corporate governance, as stated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Supervisory Board Guidelines and Work Rules (Board Manual)

In more detail, the guidelines and work procedures of the Supervisory Board are regulated in the work procedures of the Board of Directors and the Supervisory Board (Board Manual), which contains instructions for the work management of the Supervisory Board and explains the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand and consistent manner, and can be a reference for the Supervisory Board in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission.

Composition and Basis of Appointment of the Supervisory Board

Throughout 2021, there was 1 (one) change in the composition of the Supervisory Board as described in the Chapter on the Report of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Program Orientasi bagi Dewan Pengawas Baru

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan pelaksanaan program pengenalan anggota Dewan Pengawas yang baru, sesuai dengan perubahan komposisi Dewan Pengawas yang terjadi. Materi program pengenalan meliputi gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Dewan Pengawas baru.

Orientation Program for New Member of the Supervisory Board

Throughout 2021, the Corporate Secretary coordinates the implementation of the introductory program to new members of the Supervisory Board, in accordance with changes in the composition of the Supervisory Board. The introductory program material includes an overview of the Company related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plans, risks, internal control and other strategic issues and topics relevant to the duties of the new member of the Supervisory Board.

PEMBIDANGAN TUGAS DEWAN PENGAWAS

DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD



NAMA Name	JABATAN Position	PEMBIDANGAN TUGAS Assignment
Sam Budigusdian	Ketua Dewan Pengawas <i>Chairman of the Supervisory Board</i>	Pengawas utama yang bertugas melakukan fungsi koordinasi atas semua bidang yang ada di Dewan Pengawas. Selain itu juga sebagai pengawas di bidang kebijakan mendasar Perusahaan dan bidang hukum/perundang-undangan. <i>The main supervisor who is in charge of carrying out the coordination function of all fields in the Supervisory Board. Apart from that, he is also a supervisor of the Company's basic policies and in the area of law/regulation.</i>
Yudi Yudhawan	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Pengawasan bidang Keuangan dan Akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Administrasi Umum, sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. <i>Supervision of Finance and Accounting, Human Resources (HR) and General Administration, as well as concurrently serving as Chairman of the Audit Committee.</i>

NAMA Name	JABATAN Position	PEMBIDANGAN TUGAS Assignment
Yuli Harsono	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Supervisory Board</i>	Pengawasan bidang kebijakan Investasi dan Manajemen Risiko, GCG, dan Teknik sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. <i>Supervision of the areas of Investment and Risk Management, GCG, and Engineering policies as well as serving as Chair of the Risk Management Monitoring Committee.</i>
Teguh Pristiwanto	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Supervisory Board</i>	Pengawasan bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Teknologi Informasi, serta Organisasi dan Tata Laksana. <i>Supervision of the Partnership and Community Development Program (PKBL), Information Technology, and Organization and Management.</i>

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (pusat maupun daerah), dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Pengawas DAMRI telah mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

Term of Service of the Supervisory Board

The Supervisory Board is prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in SOEs, Local Owned Enterprises, Private Owned Enterprises.
2. Leadership of political parties and/or candidates/members of the People's Representative Council (central and regional), and/or candidates for regional heads/deputy regional heads.
3. Other positions in accordance with the provisions of the legislation.
4. Other positions that may cause a conflict of interest.

The DAMRI Supervisory Board has revealed that they do not have concurrent positions beyond those permitted by applicable regulations and that may cause conflicts of interest which are prohibited by laws and regulations.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas DAMRI senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Menghindari aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
2. Mengisi daftar khusus dan diperbarui setiap akhir tahun tentang kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
3. Tidak menanggapi permintaan yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan, dari pihak manapun dan dengan alasan apapun.
4. Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Selama tahun 2021 dilaporkan bahwa Dewan Pengawas tidak memiliki saham, baik di DAMRI maupun perusahaan lain.

Management of Conflict of Interest of the Supervisory Board

The DAMRI Supervisory Board always avoids conflicts of interest, including:

1. Avoiding activities that can affect their independence in carrying out their duties.
2. Filling out a special list that is updated at the end of each year regarding the ownership of shares and or their families in other companies.
3. Not responding to requests that can influence the making of a decision, from any party and for any reason.
4. Not taking advantage of the position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company.
5. Disclosure in the event of a conflict of interest.

Supervisory Board Shares Ownership

During 2021, it was reported that the Supervisory Board did not own any shares, neither in DAMRI nor in any other company.

NAMA Name	JABATAN Position	KEPEMILIKAN SAHAM Shares Ownership	
		DAMRI	PERUSAHAAN LAIN Other companies
Sam Budigusdian	Ketua Dewan Pengawas <i>Chairman of the Supervisory Board</i>	Tidak No	Tidak No
Yudi Yudhawan	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No
Yuli Harsono	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No
Teguh Pristiawanto	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No

Pengawas Independen

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Dewan Pengawas Independen. Per 31 Desember 2021 komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas memenuhi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Independen.

Kriteria Independensi Anggota Dewan Pengawas

Kriteria independensi anggota Dewan Pengawas adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, Pemilik Modal pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Masing-Masing Dewan Pengawas Independen

ASPEK INDEPENDENSI <i>Independency aspect</i>	Sam Budigusdian	Yudi Yudhawan	Yuli Harsono	Teguh Pristiwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Supervisory Board and the Board of Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	√	√	√	√

Independent Supervisory

Members of the Supervisory Board may consist of officials who carry out government affairs and the Independent Supervisory Board. As of 31 December 2021, the composition of 4 (four) members of the Supervisory Board complies with the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises which stipulates that at least 20% (twenty percent) of the total members of the Supervisory Board are Independent Supervisory Boards.

Criteria for Independence of Members of the Supervisory Board

Independence criteria for members of the Supervisory Board is having no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, controlling shareholder or relationship with relevant BUMN, which may affect its ability to act independently.

Independence Statement of each Independent Member of the Supervisory Board

ASPEK INDEPENDENSI <i>Independency aspect</i>	Sam Budigusdian	Yudi Yudhawan	Yuli Harsono	Teguh Pristiwanto
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the Company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Dewan Pengawas <i>Does not have a familial relationship with the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or fellow members of the Supervisory Board Committee</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials, and government</i>	√			

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan secara kolegal maupun individu melalui mekanisme mandiri setiap tahunnya berdasarkan tingkat pencapaian DAMRI dibandingkan dengan target (Key Performance Indicator) yang telah disepakati.

Penilaian terhadap kinerja Dewan Pengawas dilakukan setiap tahun melalui RPB, berdasarkan laporan akuntabilitas tahunan yang disusun oleh Dewan Pengawas tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan DAMRI, dan implementasi GCG, serta pemberian nasihat kepada Direksi.

Supervisory Board Performance Assessment

Performance appraisal of the Supervisory Board is carried out collegially and individually through an independent mechanism every year based on the level of achievement of DAMRI compared to the agreed target (Key Performance Indicator).

Assessment of the performance of the Supervisory Board is carried out annually through the RPB, based on the annual accountability report prepared by the Supervisory Board regarding the implementation of its supervisory duties and responsibilities on management policies, the running of DAMRI management, and implementation of GCG, as well as providing advice to the Board of Directors.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal.
2. Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Pemilik Modal dengan menyebutkan alasannya.
3. Alasan pemberhentian tersebut antara lain dikarenakan:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - b. mengundurkan diri.
4. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pemilik Modal dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas

Remunerasi bagi Dewan Pengawas

Fungsi Nominasi Dan Remunerasi

Fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan organ Dewan Pengawas DAMRI.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas merupakan wewenang Pemilik Modal, dengan acuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Peraturan tersebut ditetapkan pada 25 November 2020 dan mulai berlaku pada 22 Desember 2020.

Mechanism of Dismissal and Resignation of Supervisory Board

The mechanism for the resignation and dismissal of the Supervisory Board is as follows:

1. Appointment and dismissal of members of the Supervisory Board shall be carried out by the Shareholder.
2. Members of the Supervisory Board may at any time be dismissed based on the decision of the Shareholder by stating the reasons.
3. The reasons for the dismissal are among others due to:
 - a. no longer fulfilling the requirements as a member of the Supervisory Board based on Government Regulations and other statutory provisions.
 - b. resignation
4. Resignation from position is done by submitting a letter of resignation to the Shareholder, with copies to members of the Supervisory Board.

Remuneration for members of the Supervisory Board

Nomination and Remuneration Function

The nomination and remuneration functions for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021 are carried out by the Nomination and Remuneration Committee which is an organ of the DAMRI Supervisory Board.

Remuneration Procedure for the Supervisory Board

Establishment of the remuneration for the Supervisory Board is the authority of the Shareholder, with reference to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to SOE Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards SOEs. The regulation was enacted on 25 November 2020 and came into force on 22 December 2020.

Struktur dan Jumlah Nominal atau Komponen Remunerasi Dewan Pengawas

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi DAMRI pada tahun 2021 mengacu kepada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-69/Wk.2.MBU.E/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Hal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum DAMRI Tahun 2021, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, serta usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan pencapaian Perusahaan di tahun terkait.

Besaran remunerasi total yang diterima oleh semua Anggota Dewan Pengawas pada tahun 2021 sebesar Rp 3.450.642.000 (Tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah) dan yang diterima oleh semua anggota Direksi sebesar Rp. 8.405.662.500 (delapan miliar empat ratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Structure and Nominal Amount or Remuneration Component of the Supervisory Board

The remuneration and facilities received by the Supervisory Board and the Board of Directors of DAMRI in 2021 refer to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SR-69/Wk.2.MBU.E/10/2021 dated 4 October 2021 Regarding Determination of the Income of the Board of Directors and Supervisory Board Perum DAMRI 2021, taking into account the provisions of the Articles of Association and applicable laws, as well as the recommendation of the Supervisory Board by considering the Company's achievements in the relevant year.

The total amount of remuneration received by the members of the Supervisory Board in 2021 is IDR 3,450,642,000 (Three billion four hundred fifty million six hundred forty two thousand Rupiah), and the total amount received by the members of the Board of Directors is IDR. 8,405.662,500 (eight billion four hundred five million six hundred sixty two thousand five hundred Rupiah).

Total Remunerasi 2021

The Total Amount of
Remuneration in 2021

Rp 3.450.642.000

Anggota Dewan Pengawas

Rp 8.405.662.500

Anggota Direksi



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan dan untuk kepentingan pengurusan Perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Kewenangan dan Kewajiban Direksi

1. Kewenangan umum Direksi meliputi: menetapkan kebijakan, mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan, mengatur penyerahan kekuasaan kepada Direksi atau pekerja Perusahaan, melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya dan memberikan penjelasan apabila ditanyakan atau diminta oleh anggota Dewan Pengawas dan/atau Menteri.
2. Kewajiban umum Direksi meliputi: mendedikasikan waktu dan semuanya untuk mencapai tujuan Perusahaan; mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; bersikap profesional, mengedepankan efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, serta melaksanakan arahan.
3. Kewenangan dan kewajiban Direksi terkait Rapat Pembahasan Bersama (RPB); mempertanggungjawabkan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir; menyampaikan laporan berkala, mengelola RPB, dan membuat serta memberikan salinan risalah RPB kepada Pemilik Modal.

Duties of the Board of Directors

The Board of Directors is tasked with carrying out all actions related to and for the benefit of the management of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company inside and/or outside the court.

Authorities and Obligations of the Board of Directors

1. The general authority of the Board of Directors includes: setting policies, seeking to achieve the goals and objectives of the Company, arranging the transfer of power to the Board of Directors or employees of the Company, taking all other actions and providing explanations when asked or requested by members of the Supervisory Board and/or the Minister.
2. General responsibilities of the Board of Directors include: dedicating time and everything to achieve the goals of the Company; comply with the Articles of Association and laws and regulations; be professional, prioritize efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness, and carry out directives.
3. Authority and obligation of the Board of Directors in relation to the Joint Discussion Meeting (RPB); to account for the annual report that has been reviewed by the Supervisory Board within a period of no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends; submit periodic reports, manage RPB, and make and provide copies of RPB minutes to Shareholders.

4. Kewenangan dan kewajiban terkait Strategi dan Rencana Kerja
 - a. Menetapkan visi, misi, *values*, dan strategi Perusahaan;
 - b. Menyiapkan, menyampaikan, dan menjelaskan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri;
 - c. Memastikan tercapainya sasaran dan target dalam RJPP dan RKAP.
5. Kewenangan dan kewajiban terkait Sumber Daya Manusia
 - a. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - b. Menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi sistem perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, penempatan pekerja dan jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi;
 - c. Memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi pekerja sesuai jabatan;
 - d. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk satuan kerja dan jabatan dalam organisasi secara obyektif dan transparan;
 - e. Meminta persetujuan Dewan Pengawas terkait dengan pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Audit Intern, dan jabatan struktural lainnya;
 - f. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan. Jika hal tersebut melampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
4. *Authority and obligation related to Strategy and Work Plan*
 - a. *Establish the Company's vision, mission, values, and strategy;*
 - b. *Prepare, submit, and explain the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Company's Work Plan and Budget (RKAP) to obtain approval from the Minister;*
 - c. *Ensure the achievement of targets in the RJPP and RKAP.*
5. *Authority and obligation related to Human Resources*
 - a. *Prepare the organizational structure of the Company complete with details and duties;*
 - b. *Develop and implement human resource management guidelines which include human resource planning systems, recruitment, selection, placement of workers and positions in the Company's organizational structure, promotions and demotions as well as transfers;*
 - c. *Ensuring the implementation of employee competency improvement according to respective position;*
 - d. *Carry out measurement and performance appraisal for work units and positions within the organization in an objective and transparent manner;*
 - e. *Request approval from the Supervisory Board regarding the appointment of the Corporate Secretary, Head of the Internal Audit Division, and other structural positions;*
 - f. *Regulating provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company's employees. If this exceeds the obligations stipulated in the provisions of the legislation, it must obtain prior approval from the Minister.*

6. Kewenangan dan Kewajiban terkait Laporan a. Membuat, menjelaskan, dan menyerahkan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahkan; b. Menyusun sistem akuntansi dan laporan keuangan serta menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit; c. Menyampaikan laporan berkala dan laporan khusus/lainnya sesuai ketentuan atau permintaan Dewan Pengawas dan/atau Menteri. 7. Kewenangan dan Kewajiban terkait Dokumentasi a. Memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen lain; b. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, risalah rapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain.	6. Authority and obligation to the Report a. Prepare, explain, and submit annual reports, including financial reports to the Minister for approval and ratification; b. Prepare accounting systems and financial reports and submit them to a Public Accountant for audit; c. Submit periodic reports and special/other reports in accordance with the provisions or requests of the Supervisory Board and/or the Minister. 7. Authorities and obligations related to Documentation a. Maintain the minutes of the Supervisory Board's meeting, the minutes of the Board of Directors' meeting, the annual report, the Company's financial documents, and other documents; b. Maintain at the domicile of the Company, the minutes of the Supervisory Board meeting and the minutes of the Board of Directors meeting, annual reports, financial documents, and other document.

Tanggung Jawab Direksi

1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
3. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud di atas apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan usaha Perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Responsibilities of the Board of Directors

1. Carry out duties in good faith and full of responsibility.
2. Responsible fully and personally for the loss of the Company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.
3. Members of the Board of Directors are not responsible for the losses as referred to above if they can prove that:
 - a. the loss is not due to his fault or negligence;
 - b. has managed the Company's business in good faith and prudence;
 - c. does not have a conflict of interest;
 - d. have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss

4. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.
5. Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

4. Actions taken by members of the Board of Directors outside the decision taken at the meeting of the Board of Directors become a personal responsibility until said action is approved by the meeting of the Board of Directors.
5. On behalf of the Company, the Minister may file a lawsuit against a member of the Board of Directors who due to his/her fault or negligence has caused a loss to the Company.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Role and responsibilities
Setia N. Milatia Moemin	Direktur Utama <i>Presiden Director</i>	Direktur Utama mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan pemeriksaan internal, pengelolaan strategi perusahaan, dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Membawahkan Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Satuan Pengawasan Internal, dan Divisi Hukum. <i>The President Director has the main task of planning, controlling, and carrying out the development of internal audit activities, corporate strategy management, and established Company policies. In charge of the Corporate Secretariat Division, the Internal Control Unit Division, and the Legal Division.</i>
Sandry Pasambuna	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha <i>Commercial and Business Development Director</i>	Direktorat Komersial dan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan di pengembangan bisnis, komersial, dan hubungan pelanggan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab untuk menangani kepengurusan secara umum dan pada bidang komersial dan pengembangan usaha DAMRI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar DAMRI. Membawahkan Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Komersial dan Pemasaran dan Divisi Operasi. <i>The Directorate of Commercial and Business Development has the main task of planning, controlling, and carrying out activities in business development, commercial, and customer relations in accordance with established Company strategies and policies and is responsible for handling general management in the commercial and business development of DAMRI as stipulated in DAMRI's Articles of Association. In charge of the Business Development Division, Commercial and Marketing Division and Operations Division.</i>

NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Role and responsibilities
Joni Prasetyanto	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan dalam kegiatan bidang keuangan perusahaan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab untuk menangani kepengurusan pada bidang keuangan DAMRI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar DAMRI. Membawahkan Divisi Akuntansi dan Divisi Keuangan. <i>The Directorate of Finance has the main task of planning, controlling, and carrying out guidance in the company's financial sector in accordance with established Company strategies and policies, and is responsible for handling the management of DAMRI's financial sector as stipulated in DAMRI's Articles of Association. In charge of the Accounting Division and the Finance Division.</i>
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Engineering and Facilities Director</i>	Direktorat Teknik dan Fasilitas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan bidang teknik sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab untuk menangani kepengurusan pada bidang teknik dan fasilitas DAMRI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar DAMRI. Membawahkan Divisi Perencanaan dan Fasilitas Teknik dan Divisi Perawatan dan Pemeliharaan. <i>The Directorate of Engineering and Facilities has the main task of planning, controlling, and carrying out development of technical field activities in accordance with established Company strategies and policies, and is responsible for the general management of DAMRI's engineering and facilities as stipulated in DAMRI's Articles of Association. In charge of the Planning and Facilities Engineering Division and the Maintenance and Maintenance Division</i>
Siti Inda Suri	Direktur SDM dan Umum <i>Human Resources and General Affairs Director</i>	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan dalam kegiatan bidang Sumber Daya Manusia, Pembelajaran SDM, Hubungan Pekerja, dan Layanan SDM serta Umum sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab untuk menangani kepengurusan pada bidang SDM dan Umum DAMRI sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar DAMRI. Membawahkan Divisi Kapital Manusia, Divisi Umum, dan Divisi Layanan Pengadaan. <i>The Directorate of Human Resources and General Affairs has the main task of planning, controlling, and carrying out development activities in the fields of Human Resources, Human Resources Learning, Worker Relations, and Human Resources and General Services in accordance with established Company policies and strategies, and is responsible for general management in the Human Resources and General Affairs of DAMRI as stipulated in the Articles of Association of DAMRI. In charge of the Human Capital Division, the General Division, and the Procurement Services Division.</i>

NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Role and responsibilities
Seluruh Direksi <i>All directors</i>		Seluruh Direksi mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab terhadap proses transformasi, pengembangan digitalisasi perusahaan, perencanaan perusahaan, manajemen risiko, proses pengadaan, pelayanan dan keselamatan, serta hukum sesuai dengan strategi dan kebijakan Perusahaan, meliputi: 1. Divisi Manajemen Transformasi 2. Divisi Pelayanan dan Divisi Keselamatan 3. Divisi Teknologi Informasi 4. Divisi Perencanaan Korporasi dan Manajemen Risiko 5. Divisi Layanan Pengadaan 6. Divisi Hukum <i>The entire Board of Directors has the main duties and responsibilities towards the transformation process, the development of corporate digitalization, corporate planning, risk management, procurement processes, services and safety, and law in accordance with the Company's strategies and policies, including:</i> 1. Transformation Management Division 2. Service Division and Safety Division 3. Information Technology Division 4. Corporate Planning and Risk Management Division 5. Procurement Services Division 6. Legal Division

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatan berakhir, diberhentikan, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi.

Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, kecuali karena meninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dilakukan oleh Menteri
 - a. Persyaratan Anggota Direksi.
 - b. Persyaratan formal: Anggota Direksi adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dan dihukum karena tindak pidana.
 - c. Persyaratan material: Anggota Direksi lulus seleksi dan memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
 - d. Menandatangani kontrak manajemen.
 - e. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga.
 - f. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Term of Office of the Board of Directors

The term of office for members of the Board of Directors is 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) more term of office. The position of a Member of the Board of Directors ends when he dies, his term of office ends, is dismissed, or no longer fulfills the requirements as a Member of the Board of Directors.

Members of the Board of Directors who resign before or after their term of office ends, except for death, are still responsible for their actions for which the Minister has not received their accountability.

1. Appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall be carried out by the Minister
 - a. Requirements for Members of the Board of Directors.
 - b. Formal requirements: Members of the Board of Directors are people who are capable of carrying out legal actions, and have never been declared bankrupt, become Members of the Board of Directors or Members of the Supervisory Board who are found guilty of causing the company to be declared bankrupt and sentenced to criminal acts.
 - c. Material requirements: Members of the Board of Directors pass the selection and meet the requirements of expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and have a high dedication to advancing and developing the Company.
 - d. Sign a management contract.
 - e. Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are prohibited from having blood family relations up to the third degree.
 - f. Meet other requirements as determined by the Articles of Association and laws and regulations.

2. Komposisi dan Keanggotaan Direksi
 - a. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
 - c. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi ditetapkan oleh Menteri atau dapat didelegasikan kepada Dewan Pengawas.
 - d. Nomenklatur dan jumlah Direktur disesuaikan dengan jumlah Direktur yang diangkat Menteri BUMN. Susunan Direksi DAMRI terdiri atas:
 - 1) Direktur Utama
 - 2) Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
 - 3) Direktur Keuangan
 - 4) Direktur Teknik dan Fasilitas
 - 5) Direktur SDM dan Umum

Pedoman dan Tata Tertib Direksi (Board Manual)

Dalam hubungannya dengan organ Perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Tata Laksana Kerja (Board Manual) pada Bab II. Board Manual tersebut menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Selama Tahun 2021 terdapat 1 (satu) kali perubahan komposisi Direksi sebagaimana dijelaskan pada Bagian Laporan Dewan Pengawas dan Direksi.

2. Composition and Membership of the Board of Directors
 - a. The number of members of the Board of Directors is determined by the Minister according to need.
 - b. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, one member of the Board of Directors is appointed as the President Director.
 - c. The composition and division of duties and authorities of the Board of Directors are determined by the Minister or can be delegated to the Supervisory Board.
 - d. The nomenclature and the number of Directors are adjusted to the number of Directors appointed by the Minister of SOEs. The composition of DAMRI's Board of Directors is the following:
 - 1) President Director
 - 2) Director of Commercial and Business Development
 - 3) Finance Director
 - 4) Director of Engineering and Facilities
 - 5) HR and General Affairs Director

Board of Directors Guidelines and Code of Conduct (Board Manual)

Chapter II of the Board Manual regulates the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in relation to other Company organs. The Board Manual serve as a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission, whereby it is hoped that high work standards will be achieved in line with GCG principles.

Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors

In 2021, there was 1 (one) change in the composition of the Board of Directors as described in the Section on the Reports of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Program Orientasi Bagi Direktur Baru

Sekretaris Perusahaan mengkoordinasikan pelaksanaan program pengenalan anggota Direksi yang baru, sesuai dengan perubahan komposisi Direksi yang terjadi sepanjang tahun 2021. Program pengenalan untuk Direksi baru pada tahun 2021 diselenggarakan pada 12-15 Januari 2021 di Kantor Pusat DAMRI. Hal-hal yang disampaikan kepada anggota Direksi yang baru adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, gambaran Perusahaan (yang berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya), kewenangan dalam pendelegasian, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit, keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Pembidangan Tugas Direksi dan Pendelegasian Wewenang

Hak dan wewenang direksi bertindak atas nama direksi serta mewakili perusahaan

1. Setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Direktur Utama untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.

Orientation Program for New Directors

The Corporate Secretary coordinates the implementation of the introduction program for new members of the Board of Directors, in accordance with changes in the composition of the Board of Directors that occurred throughout 2021. The introduction program for new Directors in 2021 was held in 12-15 January 2021 at DAMRI Head Office. Materials conveyed to the new members of the Board of Directors included information on the implementation of GCG principles, a description of the Company (related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues), authority relating to delegation, internal and external audits, internal control systems and policies including the Audit Committee, information on the duties and responsibilities of the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as matters that are forbidden.

Division of Duties of the Board of Directors and Delegation of Authority

The rights and authority of members of the Board of Directors acting on behalf of the Board of Directors and representing the company

1. Each member of the Board of Directors has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.
2. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company inside and/or outside the court.
3. In the absence of the President Director, a member of the Board of Directors is appointed by the President Director to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.

4. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka urutan-urutan anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan adalah:
 - a. Salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi yang ada; atau
 - b. Salah seorang anggota Direksi yang paling lama menjabat; atau
 - c. Salah seorang anggota Direksi yang paling lama menjabat dan yang tertua dalam usia.
 5. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.
4. In the event that the President Director does not make an appointment, the order of the members of the Board of Directors authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company is:
 - a. One member of the Board of Directors appointed by the existing Board of Directors;
 - b. One of the longest serving members of the Board of Directors;
 - c. One of the longest serving members of the Board of Directors and the oldest in age.
 5. The Board of Directors has the right to appoint one or more persons as representatives or proxies to carry out certain legal actions by granting special powers as stipulated in the power of attorney.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Jabatan Rangkap

- a. Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - 1) anggota direksi atau anggota komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain, BUMD, atau badan usaha milik swasta;
 - 2) jabatan struktural dan fungsional dalam instansi atau lembaga Pemerintah;
 - 3) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 4) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Direksi, jika tidak mengundurkan diri maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari.

Policy on Concurrent Positions of Directors

Concurrent Position

- a. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:
 - 1) a member of the Board of Directors or a member of the Commissioner/Supervisory Board of another SOE, Local-Owned Enterprise, or private-owned company;
 - 2) structural and functional positions in government agencies or institutions;
 - 3) other positions that may cause a conflict of interest;
 - 4) members of the Board of Directors who hold other positions must resign from their former positions no later than 30 (thirty) days from the date of their appointment as members of the Board of Directors, if they do not resign, their position as members of the Board of Directors ends with the lapse of 30 (thirty) days.

b. Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi kosong:

- 1) Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi atau pihak lain untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
- 2) Jika Menteri belum mengangkat anggota Direksi yang kosong, maka Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya;
- 3) Jika anggota Direksi berakhir masa jabatan dan Menteri belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota Direksi;
- 4) Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong selain anggota Direksi yang masih menjabat memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tetapi tidak termasuk santunan purna jabatan

c. Seluruh Jabatan Direksi Kosong

Apabila oleh suatu sebab seluruh jabatan Direksi kosong:

- 1) Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
- 2) Jika Menteri belum mengangkat anggota Direksi yang kosong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas (secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang atau lebih) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri;

b. Vacancies in the Board of Directors

If for certain reason, a vacancy occur in the Board of Directors:

- 1) The Minister within a maximum period of 30 (thirty) days from the date of the vacancy, appoints a member of the Board of Directors or another party to fill the vacancy;
- 2) If the Minister has not appointed a member to fill the vacant position in the Board of Directors, the Supervisory Board shall appoint another member of the Board of Directors;
- 3) If a member of the Board of Directors has ended his term of office and the Minister has not appointed a new member of the Board of Directors, the member of the Board of Directors whose term of office has ended may be appointed by the Minister as the acting executor of the duties of the vacant position in the Board of Directors;
- 4) Acting executor of the vacant position in the Board of Directors, other than existing members of the Board of Directors, receive the same salary and allowances or facilities as the vacant position in the Board of Directors, but not including post-employment benefits

c. All Positions of the Board of Directors Vacant
If for any reason all the positions of the Board of Directors are vacant:

- 1) The Minister within a maximum period of 30 (thirty) days from the date of the vacancy, appoints a member of the Board of Directors to fill the vacancy;
- 2) If the Minister has not appointed a member of the Board of Directors to fill the vacancy, the Company is temporarily managed by the Supervisory Board (jointly or by appointing one or more members) or another party appointed by the Minister;

- 3) Jika seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belum menetapkan penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat ditetapkan oleh Dewan Pengawas atau Menteri untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama; dan
- 4) Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong, selain Dewan Pengawas, memperoleh gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong, tetapi tidak termasuk santunan purna-jabatan.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila yang bersangkutan berperkara dengan Perusahaan di depan pengadilan; atau jika yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
2. Dalam hal terjadi kondisi benturan kepentingan anggota direksi, Perusahaan diwakili oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk dari dan oleh anggota Direksi lain.
3. Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semua anggota Direksi, Perusahaan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
4. Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakili Perusahaan jika terjadi kondisi benturan kepentingan yang melibatkan semua anggota Direksi dan tidak ada Dewan Pengawas atau dalam kondisi seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

- 3) If all positions of the Board of Directors are vacant due to the end of their term of office and the Minister has not determine the successor, all members of the Board of Directors whose term of office has ended may be appointed by the Supervisory Board or the Minister to carry out their work as acting executor of the duties of members of the Board of Directors with the same duties, authorities and obligations;
- 4) The acting executor for the vacant position in the Board of Directors, other than the Supervisory Board, receive the same salary and allowances and/or facilities as the vacant position, but does not include post-employment benefits.

Management of Conflicts of Interest of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if the person concerned has a case with the Company before the court; or if the person concerned has interests that conflict with the interests of the Company.
2. In the event of a conflict of interest of members of the Board of Directors, the Company is represented by a member of the Board of Directors appointed from and by other members of the Board of Directors.
3. In the event of a conflict of interest involving all members of the Board of Directors, the Company is represented by the Supervisory Board or by a person appointed by the Supervisory Board.
4. The Minister appoints another party to represent the Company in the event of a conflict of interest involving all members of the Board of Directors and that there is no Supervisory Board or in the event that all members of the Board of Directors or Supervisory Board have a conflict of interest with the Company.

Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota Direksi DAMRI telah melaporkan kepemilikan saham (pengendali) yang dimiliki. Direksi tidak memiliki saham baik di DAMRI maupun perusahaan lain.

Board of Directors Shares Ownership

All members of DAMRI Board of Directors has reported concerning (controlling) ownership of shares. Board of Directors reported not owning shares either in DAMRI nor other companies.

NAMA Name	JABATAN Position	KEPEMILIKAN SAHAM Shareholding	
		DAMRI	PERUSAHAAN LAIN Other companies
Setia N. Milatia Moemin	Direktur Utama <i>Presiden Director</i>	Tidak No	Tidak No
Sandry Pasambuna	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha <i>Commercial and Business Development Director</i>	Tidak No	Tidak No
Joni Prasetyanto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Finance and Risk Management Director</i>	Tidak No	Tidak No
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Engineering and Facilities Director</i>	Tidak No	Tidak No
Siti Inda Suri	Direktur SDM dan Umum <i>Human Capital and General Affairs Director</i>	Tidak No	Tidak No

Pengembangan Kompetensi Direksi

DAMRI memiliki kebijakan Program Peningkatan Kapabilitas sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
2. Program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
3. Setiap Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang mengikuti program peningkatan kapabilitas, harus membuat laporan dan berbagi informasi/pengetahuan dengan yang Anggota Direksi/Dewan Pengawas lainnya.

Board of Directors Competency Development

DAMRI has the following Capability Improvement Program policies:

1. The capability improvement program is implemented in order to improve the effectiveness of the work of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.
2. The capability improvement program must be included in the work plan and budget of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.
3. Each Member of the Board of Directors and/or Member of the Supervisory Board who participates in the capability improvement program, must make a report and share information/ knowledge with other Members of the Board of Directors/Supervisory Board.

Pengembangan kompetensi Direksi dapat dilihat dari bab sumber Daya Manusia sub-bab Pelatihan Direksi dalam Laporan Tahunan 2020.

The development of competence of the Board of Directors is described in the chapter on Human Resources, sub section the Board of Directors Training in the 2020 Annual Report.

Pelaksanaan Tugas Direksi Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun oleh Pemilik Modal dan Dewan Pengawas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB), berdasarkan laporan akuntabilitas yang disusun oleh Direksi tentang pencapaian indikator yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar DAMRI.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RPB.
3. Pencapaian realisasi dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DAMRI.

Selain mekanisme tersebut, kinerja Direksi juga dinilai melalui realisasi kontrak manajemen antara Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal DAMRI.

Realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) dalam Kontrak Manajemen pada Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: (Kontrak Manajemen terlampir)

Implementation of the Duties of the Board of Directors Board of Directors Performance Assessment

The performance appraisal of the Board of Directors is carried out annually by the Shareholders and the Supervisory Board in the Joint Discussion Meeting (RPB), based on the accountability report prepared by the Board of Directors regarding the achievement of indicators which include:

1. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance to DAMRI Articles of Association*
2. *Implementation of the results of RPB decisions.*
3. *Achievement of the realization of the DAMRI Annual Work Plan and Budget.*

In addition to this mechanism, the performance of the Board of Directors is also assessed through the realization of a management contract between the Board of Directors, the Supervisory Board, and DAMRI's Shareholders.

Realization of Key Performance Indicators (KPI) in Management Contracts in 2021 with the following details:

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun Key Performance Indicator (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RPB dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Penyusunan KPI mengacu pada Surat Kementerian BUMN Nomor: S-08/S.MBU/2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Kinerja Unggul pada BUMN.

Hasil Kinerja Direksi secara kolegal dilaporkan oleh Dewan Pengawas di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas, selanjutnya dievaluasi oleh Pemilik Modal dalam RPB yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RPB.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi diajukan oleh Direksi yang ditetapkan dalam RPB, yaitu keuangan dan pasar, fokus pelanggan, efektivitas produk dan proses, fokus tenaga kerja, kepemimpinan, dan agen pembangunan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Pengawas melaporkan hasil kinerja Direksi secara kolegal dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) untuk dievaluasi dan disahkan oleh Pemilik Modal.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Sampai dengan tahun 2021, DAMRI tidak memiliki komite di bawah Direksi.

Procedure for the Implementation of the Board of Directors' Performance Assessment

At the beginning of each year, the Board of Directors is required to compile a Key Performance Indicator (KPI) which is an elaboration of the RKAP that is ratified by the RPB and set forth in a management contract. The preparation of KPI refer to the Decree of the Ministry of SOEs Number: S-08/S.MBU/2013 concerning Guidelines for Determining KPIs and Excellent Performance Criteria for SOEs.

The results of the Board of Directors' performance Assessment are collegially reported by the Supervisory Board in the Supervisory Board's Supervisory Task Report, then evaluated by the Shareholders in the RPB which is stated in the approval and ratification of the Company's Annual Report by the RPB.

Board of Directors Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors is proposed by the Board of Directors and set out in the RPB, namely finance and market, customer focus, product and process effectiveness, workforce focus, leadership, and development agency.

The Party Conducting the Assessment

The Supervisory Board reports the results of the Board of Directors' performance collegially in the Joint Discussion Meeting (RPB) to be evaluated and approved by the Shareholders.

Assessment of Committees Under the Board of Directors

Until 2021, DAMRI does not have a committee under the Board of Directors.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Direksi

Pemberhentian Anggota Direksi Sewaktu-waktu

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasan bahwa pada kenyataannya Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Direksi badan usaha milik negara;
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Mengundurkan diri
2. Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan Perusahaan, dapat memberhentikan anggota Direksi.
3. Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4. Keputusan pemberhentian diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan pemberhentian.

Mechanism for Dismissal and Resignation of Directors

Dismissal of Members of the Board of Directors at any time

1. *Members of the Board of Directors may be dismissed before their term of office ends based on a Ministerial decision by stating the reasons that in fact the Member of the Board of Directors concerned:*
 - a. *Unable to fulfill its obligations as agreed in the management contract;*
 - b. *Unable to carry out their duties properly;*
 - c. *Not implementing the Articles of Association and/or the provisions of laws and regulations;*
 - d. *Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the country;*
 - e. *Taking actions that violate ethics and/or propriety that should have been respected as a Member of the Board of a state-owned company;*
 - f. *Found guilty by a court decision that has permanent legal force;*
 - g. *Resignation*
2. *The Minister based on other reasons deemed appropriate for the interests and objectives of the Company, may dismiss members of the Board of Directors.*
3. *The plan to dismiss members of the Board of Directors shall be notified to the concerned member of the Board of Directors orally or in writing by the Minister or an appointed official.*
4. *The decision to dismiss is taken after the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself which is submitted in writing to the Minister or the appointed official within a maximum period of 14 (fourteen) days from the date of notification of dismissal.*

5. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada poin 4 dianggap telah terpenuhi.
6. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
7. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 6, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat

Pemberhentian Anggota Direksi sementara

1. Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, terdapat indikasi merugikan Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
2. Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas dengan izin Menteri.
3. Pemberhentian sementara, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri dan Direksi.
4. Pemberitahuan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
5. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dan mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

5. In the event that the dismissed member of the Board of Directors has defended himself or expressed no objection to his planned dismissal at the time of notification, the time provision as referred to in point 4 is deemed to have been fulfilled.
6. As long as the termination plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned must carry out duties properly.
7. Dismissal for reasons as referred to in points 2 and 6, is dishonourable dismissal

Temporary Dismissal of Members of the Board of Directors

1. The Supervisory Board may dismiss members of the Board of Directors temporarily if the members of the Board of Directors act contrary to Government Regulations, there are indications of harming the Company, neglecting their obligations, or there are urgent reasons relating to the Company.
2. The decision of the Supervisory Board regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors shall be made in accordance with the procedures for making decisions of the Supervisory Board with the permission of the Minister.
3. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons causing the action with a copy to the Minister and the Board of Directors.
4. The notification is delivered within a maximum period of 2 (two) days after the date of the stipulation of the temporary suspension.
5. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to run the management of the Company and represent the Company, both inside and outside the court.

6. Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Menteri harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) telah lewat dan Menteri tidak mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pengunduran Diri Direksi

1. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Menteri, Dewan Pengawas, dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari, maka tanggal efektif tetap dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri. Jika surat pengunduran diri tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, anggota Direksi berhenti dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri oleh Menteri.
3. Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggal efektif yang diminta, anggota Direksi yang mengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri diterima Menteri.

6. Within 60 (sixty) days after the temporary dismissal, the Minister must decide whether to revoke or strengthen the decision on the temporary dismissal after the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself.
7. In the event that the period of 60 (sixty) days as referred to in paragraph 6 (six) has elapsed and the Minister has not made a decision, the temporary suspension will be cancelled.

Resignation of Members of the Board of Directors

1. Each member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying the Company in writing with a copy to the Minister, the Supervisory Board, and other members of the Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his resignation.
2. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days, the effective date will still be counted as 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received by the Minister. If the resignation letter does not state the effective date of resignation, the member of the Board of Directors will automatically resign as of 30 (thirty) days from the date of receipt of the resignation letter by the Minister.
3. If the Minister does not make a decision up to 30 (thirty) days or until the requested effective date, the concerned members who resigned will automatically resigned on the 30th (thirty) day counted from the date the resignation letter was received Minister.



RAPAT DEWAN PENGAWAS, RAPAT DIREKSI, DAN RAPAT BERSAMA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI

MEETINGS OF SUPERVISORY BOARD, MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE JOINT MEETINGS OF SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, Direksi mengadakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi, dengan kehadiran anggota Direksi sebagaimana Tabel berikut.

Board of Directors Meetings

Throughout 2021, the Board of Directors conducted 12 (twelve) Board Meetings, with details on the following table below

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat yang Harus Dihadiri Total meetings to attend	Total Kehadiran Total attendance	Persentase Kehadiran Attendance percentage
Setia Nurul Milatia Moemin	Direktur Utama <i>Presiden Director</i>	12	12	100
Sandry Pasambuna	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha <i>Director of Commercial and Business Development</i>	12	12	100
Joni Prasetyanto *	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	11	11	100
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Director of Engineering and Facilities</i>	12	12	100
Siti Inda Suri	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Director of Human Capital and General Affairs</i>	12	12	100

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat yang Harus Dihadiri Total meetings to attend	Total Kehadiran Total attendance	Persentase Kehadiran Attendance percentage
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Director of Engineering and Facilities</i>			
Siti Inda Suri	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Director of Human Capital and General Affairs</i>			

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi

Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Tanggal Date	Peserta Participants	Kehadiran Presence	Agenda Agenda
5 Februari 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/Performance Desember 2020
01 Maret 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/Performance Januari 2021
18 Maret 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Permasalahan Aset Asset Problems

Tanggal Date	Peserta Participants	Kehadiran Presence	Agenda Agenda
29 April 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance Februari-Maret 2021
28 Mei 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance April 2021
9 Juli 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	8 peserta/participants	Kinerja/performance Mei 2021
28 Juli 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance Juni 2021
27 Agustus 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance Juli 2021

Tanggal Date	Peserta Participants	Kehadiran Presence	Agenda Agenda
24 September 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja / performance Agustus 2021
29 Oktober 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	RKAP 2022 dan Kinerja/Perfor- mance September 2021
30 November 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance Oktober 2021
28 Desember 2021	Sam Budigusdian Teguh Pristiwanto Yudi Yudhawan Yuli Harsono Setia N Milatia Moemin Arifin Siti Inda Suri Sandri Pasambuna Joni Prasetyanto	9 peserta/participants	Kinerja/performance November 2021

Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan

Frequency of Joint Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Total Rapat yang Harus Dihadiri Total meetings to attend	Total Kehadiran Total attendance	Persentase Kehadiran Attendance percentage
Sam Budigusdian	Ketua Dewan Pengawas <i>Chairman of the Supervisory Board</i>	12	12	100
Yudi Yudhawan	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	12	12	100
Yuli Harsono	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	12	12	100
Teguh Pristiwanto	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	12	10	83,33
Setia Nurul Milatia Moemin	Direktur Utama <i>Presiden Director</i>	12	10	83.33
Sandry Pasambuna	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha <i>Director of Commercial and Business Development</i>	12	12	100
Joni Prasetyanto *	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	12	12	100
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Director of Engineering and Facilities</i>	12	12	100
Siti Inda Suri	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Director of Human Capital and General Affairs</i>	12	12	100

* Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 8 Januari 2021.

* *Serves as Director of the Company since 8 January 2021.*



HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

AFFILIATION BETWEEN MEMBER OF SUPERVISORY BOARD, BOARD OF DIRECTORS, AND MAIN/CONTROLLING SHAREHOLDER

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas

Supervisory Board Affiliation

NAMA Name	JABATAN Position	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN Affiliated with		
		DIREKSI Director	DEWAN PENGAWAS Supervisory Board	PEMILIK MODAL/ PENGENDALI Owner/Controlling shareholder
Sam Budigusdian	Ketua Dewan Pengawas <i>Chairman of the Supervisory Board</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Yudi Yudhawan	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Yuli Harsono	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Teguh Pristiwanto	Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Advisory Board</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliation

NAMA Name	JABATAN Position	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN Affiliated with		
		DIREKSI Director	DEWAN PENGAWAS Supervisory Board	PEMILIK MODAL/ PENGENDALI Owner/Controlling shareholder
Setia Nurul Milatia Moemin	Direktur Utama <i>Presiden Director</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Sandry Pasambuna	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha <i>Director of Commercial and Business Development</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Joni Prasetyanto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Arifin	Direktur Teknik dan Fasilitas <i>Director of Engineering and Facilities</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Siti Inda Suri	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Director of Human Capital and General Affairs</i>	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Hubungan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 DAMRI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian Pemegang Saham Utama dan Pengendali DAMRI adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Main and/or Controlling Shareholders Relations

As of December 31, 2021, DAMRI is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Accordingly, the Main and Controlling Shareholder of DAMRI is the Government of the Republic of Indonesia.



REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

REMUNERATION FOR SUPERVISORY BOARD AND BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi

Fungsi Nominasi Dan Remunerasi

Fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan organ Dewan Pengawas DAMRI.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas merupakan wewenang Pemilik Modal, dengan acuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Peraturan tersebut ditetapkan pada 25 November 2020 dan mulai berlaku pada 22 Desember 2020.

Remuneration Policy for the Supervisory Board and the Board of Directors

Nomination and Remuneration Function

The nomination and remuneration functions for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2021 are carried out by the Nomination and Remuneration Committee which is an organ of the DAMRI Supervisory Board.

Procedure for Determining the Remuneration of the Supervisory Board

Determination of the remuneration for the Supervisory Board is the authority of the Shareholder, with reference to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 concerning the Fifth Amendment to SOE Regulation Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards SOEs. The regulation was enacted on 25 November 2020 and came into force on 22 December 2020.

Struktur dan Jumlah Nominal atau Komponen Remunerasi Dewan Pengawas

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi DAMRI pada tahun 2021 mengacu kepada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-69/Wk.2.MBU.E/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Hal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum DAMRI Tahun 2021, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, serta usulan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan pencapaian Perusahaan di tahun terkait.

Besaran remunerasi total yang diterima oleh semua Anggota Dewan Pengawas pada tahun 2021 sebesar Rp 3.450.642.000 (Tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah) dan yang diterima oleh semua anggota Direksi sebesar Rp. 8.405.662.500 (delapan miliar empat ratus lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).

Structure and Nominal Amount or Remuneration Components for the Supervisory Board

The remuneration and facilities received by the Supervisory Board and the Board of Directors of DAMRI in 2021 refer to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SR-69/Wk.2.MBU.E/10/2021 dated 4 October 2021 regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and Supervisory Board Perum DAMRI 2021, taking into account the provisions of the Articles of Association and applicable laws, as well as the proposal of the Supervisory Board taking into account the Company's achievements in the relevant year.

The total amount of remuneration received by the members of the Supervisory Board in 2021 is IDR 3,450,642,000 (Three billion four hundred fifty million six hundred forty two thousand Rupiah), and the total amount received by the members of the Board of Directors is IDR. 8,405.662,500 (eight billion four hundred five million six hundred sixty two thousand five hundred Rupiah).

Total Remunerasi 2021

*The Total Amount of
Remuneration in 2021*

Rp 3.450.642.000

Anggota Dewan Pengawas

Rp 8.405.662.500

Anggota Direksi



ORGAN PENUNJANG DEWAN PENGAWAS

SUPERVISORY BOARD SUPPORTING ORGANS

Sekretaris Dewan Pengawas

Dewan Pengawas DAMRI dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari luar Perusahaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas DAMRI bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Pengawas.
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas.

Secretary to the Supervisory Board

The Supervisory Board of DAMRI is assisted by the Secretary of the Supervisory Board who comes from outside the Company, who is appointed and dismissed by and is responsible to the Supervisory Board. The Secretary of DAMRI Supervisory Board is in charge of carrying out the secretarial duties of the Supervisory Board. The Supervisory Board may establish a Secretariat of the Supervisory Board which is led by a Secretary of the Supervisory Board whose task is to assist the smooth running of administrative activities in the implementation of the duties and responsibilities of the Supervisory Board.

Duties and Responsibility of Secretary to the Supervisory Board

1. Prepare meetings, including meeting materials (*briefing sheet*) of the Supervisory Board.
2. Prepare the minutes of the Supervisory Board meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Administer the Supervisory Board's documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents.
4. Prepare a draft Work Plan and Budget for the Supervisory Board.
5. Draft the reports of the Supervisory Board.
6. Carry out other duties from the Supervisory Board.

Profil Sekretaris Dewan Pengawas

Profile of Secretary to the Supervisory Board

NAMA Name	Prabowo
JABATAN Position	Sekretaris Dewan Pengawas <i>Secretary to Supervisory Board</i>
PERIODE JABATAN Term in office	2019-2021, 2021-2023
RIWAYAT PENDIDIKAN Educational background	D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan STIE Jakarta (2010) <i>Diploma of Financial Management and Banking from STIE Jakarta (2010)</i>
PENGALAMAN KERJA Work experience	Staf Keuangan di Kementerian BUMN (2013 - sekarang) <i>Finance staff at the Ministry of SOEs (2013 - present)</i>



Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

The Task of Secretary to Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas dengan didukung staf Sekretariat Dewan Pengawas telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2021 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

The Secretary to the Supervisory Board, supported by the staff of the Secretariat of the Supervisory Board, has compiled the main points of the 2020 work program with the following realizations:

- Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Pengawas, dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi.
- Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Pengawas atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pengawas, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2021.
- Bekerja sama dengan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Pengawas, termasuk laporan Dewan Pengawas kepada Pemilik Modal.
- Preparing meeting materials, compiling minutes of meetings, and administering in an orderly manner the holding of the Meetings of the Supervisory Board, Meetings of the Committees under the Supervisory Board, and Joint Meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors.
- Provide input and information to the Supervisory Board on matters of concern to the Supervisory Board, among others related to the policies and strategies of the Board of Directors in order to achieve the strategic targets in the 2021 RKAP.
- Cooperate with the Committees under the Supervisory Board in fulfilling the obligations of the Supervisory Board, including the Supervisory Board's report to the Shareholders.

4. Mengoordinasikan penyelenggaraan kunjungan kerja Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas.
 5. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas, termasuk menyusun konsep persetujuan Dewan Pengawas atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
 6. Mengoordinasikan keikutsertaan Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Pengawas/Komite.
 7. Bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi bagi anggota Dewan Pengawas yang baru.
 8. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
4. Coordinate the implementation of working visits of the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board.
 5. Administering correspondence between the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board, including drafting the approval of the Supervisory Board on matters proposed by the Board of Directors for approval from the Supervisory Board.
 6. Coordinate the participation of the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board in training/seminars/other competency development activities in accordance with the supervisory area of each member of the Supervisory Board/Committee.
 7. Cooperate with the Corporate Secretary to prepare an orientation program for new members of the Supervisory Board.
 8. Carry out other duties to support the smooth running of the supervisory and advisory duties carried out by the Supervisory Board.

Komite di Bawah Dewan Pengawas

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas dibantu 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Rapat Pembahasan Bersama (RPB). Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komite bersifat independen dan mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Committees Under the Supervisory Board

In 2021, the Supervisory Board was assisted by 3 (three) Committees, namely the Audit Committee, the Risk Management Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee which were formed and dismissed by the Supervisory Board and reported to the Joint Discussion Meeting (RPB). The term of office of the Committee members may not be longer than the term of office of the Supervisory Board in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) term. The Committee is independent, both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the Supervisory Board.



KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit DAMRI membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

1. Melakukan *review* atas perencanaan audit Divisi Satuan Pengawasan Internal.
2. Melakukan *review* atas pelaksanaan audit yang dilakukan Divisi Satuan Pengawasan Internal untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit.
3. Melakukan kajian atas pelaporan Divisi Satuan Pengawasan Internal.
4. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah langkah yang diperlukan dalam laporan Divisi Satuan Pengawasan Internal tidak ditindaklanjuti.
5. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Divisi Satuan Pengawasan Internal.
6. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan.

Basis for Establishing the Audit Committee

DAMRI Audit Committee assists the Supervisory Board in carrying out its duties and supervisory functions on matters related to the quality of financial information, internal control systems, effectiveness of external and internal auditor examinations, effectiveness of risk management implementation and compliance with applicable laws and regulations.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In accordance with the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee include, amongst others:

1. *Review the audit planning of the Internal Control Division Unit.*
2. *Review the implementation of the audit conducted by the Internal Control Unit Division to ensure that the audit has been carried out according to the plan and that audit supervision has been carried out adequately to ensure the quality of the audit.*
3. *Conduct a study on the reporting of the Internal Audit Unit Division.*
4. *Conduct an assessment of the follow-up to the audit results and then taking the necessary steps in the report of the Internal Control Unit Division, in the event it is not followed up.*
5. *Communicating periodically with the Internal Control Unit Division.*
6. *Reviewing the quality of financial information to be issued by the Company.*

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) DAMRI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. 01/DP/11/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Penetapan Draft Piagam Komite Audit Menjadi Piagam Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Wewenang Komite Audit

Tugas Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Pengawas terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas serta mengidentifikasi hal-hal yang merupakan perhatian Dewan Pengawas, yang antara lain meliputi:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan perusahaan yang dilakukan manajemen serta menilai pelaksanaan pemeriksaan/pemantauan yang dilakukan oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI), maupun auditor eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang ada.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem manajemen Perusahaan dan pelaksanaan serta hasil penilaiannya.
3. Memastikan bahwa Laporan Keuangan dan hasil pemeriksaan/pemantauan pelaksanaan kegiatan Perusahaan serta informasi lainnya yang disampaikan kepada Pemilik Modal telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan lain yang ada.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Committee Charter

DAMRI's Audit Committee Charter was established based on the Decree of the Supervisory Board No. 01/DP/11/2015 dated 10 February 2015 regarding the Establishment of the Draft Audit Committee Charter to become the DAMRI Public Company (Perum) Audit Committee Charter.

Authority of the Audit Committee

The task of the Audit Committee is to provide an independent professional opinion to the Supervisory Board on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board and identify matters that are of concern to the Supervisory Board, which include:

- 1. Assessing the implementation of company activities carried out by management and assessing the implementation of inspection/monitoring carried out by the Internal Control Unit (SPI) Division, as well as external auditors so that implementation and reporting that does not meet existing standards and regulations can be prevented.*
- 2. Provide recommendations regarding the improvement of the Company's management system and its implementation as well as the results of its assessment.*
- 3. Ensure that the Financial Statements and the results of the inspection/monitoring of the Company's activities as well as other information submitted to the Shareholders were carried out in accordance with existing guidelines and other provisions.*
- 4. Identifying matters that require the attention of the Supervisory Board.*
- 5. Carry out other tasks assigned by the Supervisory Board as long as it is within the scope of duties and obligations of the Supervisory Board based on the provisions of the prevailing laws and regulations.*

Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Pengawas

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit.

Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 pada 31 Desember 2021, susunan anggota Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Performance Assessment of the Audit Committee by the Supervisory Board

During 2021, the Supervisory Board determined that the Audit Committee had carried well its duties and responsibilities, in line with the Audit Committee Charter.

Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

Until the end of the 2021 financial year on 31 December 2021, the composition of the members of the Company's Audit Committee is as follows:

NAMA Name	JABATAN Position	SK PENETAPAN Appointment Decree	KEAHLIAN Expertise	KETERANGAN Remarks
Yudi Yudhawan	Ketua Komite Audit <i>Audit Committee Chairman</i>	SK.04/II/2021	Hukum, Manajemen, Keuangan, Audit <i>Legal Management Finance Audit</i>	Anggota Dewan Pengawas Perusa- sahaan
Rahmat Rama- dahan	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	SK.06/DP/III/2021	Ekonomi, Manajemen Keuangan, Audit <i>Economics, Manage- ment, Finance, Audit</i>	-
Dadang Mulyana	Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	SK.11/DP/IX/2021	Ekonomi, Manajemen Keuangan, Audit <i>Economics, Manage- ment, Finance, Audit</i>	-

Profile Komite Audit

Ketua Komite Audit

Yudhi Yudhawan

Profile of Audit Committee

Chair of Audit Committee

Profil disajikan pada profil Dewan Pengawas

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Rahmat Ramadhan



Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009) dan pernah menjalani visiting student di International Islami University of Malaysia, Kuala Lumpur (2006-2007). Saat ini juga bekerja sebagai konsultan senior pada PT Dwimitra Solusi Sejahtera (sejak 2017). Berpengalaman sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi pada PT Radian Kharisma Wisata (2015-2017), staf auditor PT Minamas Gemilang (2013-2017), Kepala Tata Usaha di Bukit Timur Estate, PT Sampoerna Agro Tbk (2011-2013), asisten dosen di Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah (2009-2011), dan staf akuntansi PT Qira Artha Sarana (2008-2010).

He earned a Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, Faculty of Economics, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2009) and has been a visiting student at the International Islamic University of Malaysia, Kuala Lumpur (2006-2007). Currently also working as a senior consultant at PT Dwimitra Solusi Sejahtera (since 2017). Experienced as Finance and Accounting Manager at PT Radian Kharisma Wisata (2015-2017), auditor staff at PT Minamas Gemilang (2013-2017), Head of Administration at Bukit Timur Estate, PT Sampoerna Agro Tbk (2011-2013), assistant lecturer at the Faculty Economics of UIN Syarif Hidayatullah (2009-2011), and accounting staff of PT Qira Artha Sarana (2008-2010).

Dadang Mulyana



Menamatkan pendidikan Magister Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2005) serta dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program Diploma III (1987) dan Strata IV (1993). Berkarier di PT Indofarma Tbk pada periode 2004-2021 dengan berbagai jabatan serta di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada periode 1987-2004.

Graduated with a Master's in Business Administration from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2005) and from the State College of Accountancy (STAN) Diploma III (1987) and Strata IV (1993) programs. Career at PT Indofarma Tbk in the period 2004-2021 with various positions and at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in the period 1987-2004.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite, atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Independency of Audit Committee Members

All members of the Audit Committee who come from independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or fellow members of the Committee, or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.

TABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

TABLE OF THE INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE MEMBER

ASPEK INDEPENDENSI <i>The independency aspect</i>	Yudhi Yudhawan	Rahmat Ramadhan	Dadang Mulyana
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Supervisory Board and the Board of Directors</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the Company</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have a family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials, and government</i>		✓	✓



KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dalam memantau secara berkala dan merekomendasikan perbaikan terhadap manajemen risiko yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Risk Appetite korporat.
3. Evaluasi dan rekomendasi dalam setiap pelaksanaan investasi dalam RKAP melalui pengendalian anggaran.
4. Monitoring dan evaluasi serta mengkaji pengembangan sistem informasi dan komunikasi DAMRI.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) ditetapkan oleh DAMRI pada 30 Juni 2013.

Foundation for the Establishment of the Risk Management Committee

The Risk Management Monitoring Committee was formed to assist the implementation of the duties and functions of the Supervisory Board in monitoring periodically and recommending improvements to the risk management that was implemented and developed by the Company.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. *Monitoring and evaluating the implementation of risk management.*
2. *Monitoring and evaluating the implementation of the corporate Risk Appetite.*
3. *Evaluation and recommendation in every investment implementation in RKAP through budget control.*
4. *Monitoring and evaluation as well as reviewing the development of the DAMRI information and communication system.*

Risk Management Committee Charter

The Risk Management Monitoring Committee (KPMR) Charter was established by DAMRI on 30 June 2013.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Piagam Komite Pemantauan Manajemen Risiko.

Performance Assessment of the Risk Management Committee

During 2021, the Supervisory Board considered that the Risk Management Monitoring Committee had carried out its duties and responsibilities properly in accordance with the Risk Management Monitoring Committee Charter.

Struktur, Keanggotaan, Kualifikasi Pendidikan, dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Structure, Membership, Qualification, Education, and Expertise of the Risk Management Committee

NAMA Name	JABATAN Position	SK PENETAPAN Letter of Appointment	KEAHLIAN Expertise	KETERANGAN Remarks
Yuli Harsono	Ketua Komite PMR <i>Committee Chair</i>	SK.03/II/2021	Hukum, Tata Kelola, Peraturan Perundang-undangan <i>Legal, Governance, Laws and Regulations</i>	Anggota Dewan Pengawas Perusahaan
Yodi Armawidiatmo	Anggota Komite PMR <i>Committee Member</i>	SK.13/XII/2019	Ekonomi, Keuangan, Manajemen Risiko <i>Economy, Finance, Risk Management</i>	-
Sri Purwanto	Anggota Komite PMR <i>Committee Member</i>	SK.02/I/2021	Ekonomi, Keuangan, Manajemen Risiko <i>Economy, Finance, Risk Management</i>	-

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profile of Risk Management Monitoring Committee

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko

Chair of Risk Management Monitoring Committee

Yuli Harsono

Profil disajikan pada profil Dewan Pengawas

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Yodi Armawidiatmo



Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Diploma 3 (D3) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997), Diploma 4 (D4) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2002), dan Magister Manajemen (S2) dari Universitas Budi Luhur (2015). Selain menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, beliau juga menjabat sebagai Managing Partner KJA Yodi Armawidiatmo (Accountant Firm) dan Managing Director PT Dwimitra Solusi Sejahtera (DSS Company). Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, beliau juga menjabat sebagai Head Group Compliance Office (GCO) Sime Darby Plantation Berhad (Juli 2016–November 2018), Deputy Head, Group Corporate Assurance (Internal Audit) Sime Darby Berhad (November 2007–Juni 2016), Manager Internal Audit Kumpulan Guthrie Berhad (2003–November 2007), Senior Consultant/Auditor Kantor Akuntan Publik PT Sysinfo Graha Widya dan Kantor Akuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan (2002–2003), Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1997–2002).

Served as a Member of the Risk Management Monitoring Committee since 2019. He obtained a Diploma 3 (D3) from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997), Diploma 4 (D4) from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2002), and a Masters in Management (S2) from Budi University Luhur (2015). In addition to serving as a Member of the Risk Management Monitoring Committee, he also serves as Managing Partner of KJA Yodi Armawidiatmo (Accountant Firm) and Managing Director of PT Dwimitra Solusi Sejahtera (DSS Company). Prior to serving as a Member of the Risk Monitoring Committee, he also served as Head of Group Compliance Office (GCO) of Sime Darby Plantation Berhad (July 2016–November 2018), Deputy Head, Group Corporate Assurance (Internal Audit) of Sime Darby Berhad (November 2007–June 2016).), Internal Audit Manager of Guthrie Berhad Group (2003–November 2007), Senior Consultant/Auditor of PT Sysinfo Graha Widya Public Accounting Firm and Dani Sudarsono & Rekan Public Accounting Firm (2002–2003), Auditor of the Financial and

Development Supervisory Agency (1997-2002). Experienced as Finance and Accounting Manager at PT Radian Kharisma Wisata (2015-2017), auditor staff at PT Minamas Gemilang (2013-2017), Head of Administration at Bukit Timur Estate, PT Sampoerna Agro Tbk (2011-2013), assistant lecturer at the Faculty Economics of UIN Syarif Hidayatullah (2009-2011), and accounting staff of PT Qira Artha Sarana (2008-2010).

Sri Purwanto



Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1988; gelar (S2) Manajemen Keuangan dari Syracuse University, New York Amerika Serikat pada tahun 1999; dan gelar (S3) Ekonomi Manajemen Jasa dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2015. Pernah menjabat sebagai Service Quality, Network and Electronic Banking Division Bank BTN (2014-2016), Customer Care Division Head Bank BTN (2013-2014), Promotion dan Product Development Department Head Bank BTN (2010-2013), Branch Manager Bank BTN (2006-2010), Deputy Branch Manager (2002-2006), Risk Manager, Compliance Manager, R&D Manager, Corporate Planner, Liason Officer Bank BTN dengan beberapa konsultan (Deutch Bank, Hay Consultant, Booz Allen Hamilton, PWC, Ernst & Young, Arthur Andersen dll), Bank Duta Internal Control Auditor of KJA (1993-2001). Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan sejak 2016 sampai dengan 7 Januari 2021.

Bachelor (S1) in Accounting from Diponegoro University, Semarang in 1988; degree (S2) in Financial Management from Syracuse University, New York United States in 1999; and a degree (S3) in Service Management Economics from Trisakti University, Jakarta in 2015. Has served as Service Quality, Network and Electronic Banking Division of Bank BTN (2014-2016), Customer Care Division Head of Bank BTN (2013-2014), Promotion and Product Development Department Head of Bank BTN (2010-2013), Branch Manager of Bank BTN (2006-2010), Deputy Branch Manager (2002-2006), Risk Manager, Compliance Manager, R&D Manager, Corporate Planner, Liason Officer of Bank BTN with several consultants (Deutch Bank, Hay Consultant, Booz Allen Hamilton, PWC, Ernst & Young, Arthur Andersen etc.), Bank Duta Internal Control Auditor of KJA (1993-2001). Served as Director of Finance of the Company from 2016 until January 7, 2021.

Independensi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite, atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Independency of the Members of Risk Management Monitoring Committee

All members of the Audit Committee who come from independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or fellow members of the Committee, or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.

TABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

TABLE OF THE INDEPENDENCY OF RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEMBER



ASPEK INDEPENDENSI <i>The independency aspect</i>	Yuli Harsono	Yodi Armawidiatmo	Sri Purwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Supervisory Board and the Board of Directors</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the Company</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have a family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials, and government</i>		✓	✓



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh DAMRI pada 1 April 2020

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

A. Terkait Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur penilaian pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, Dewan Pengawas, pejabat eksekutif Perusahaan kepada Dewan Pengawas;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal;
3. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
4. Mengevaluasi Piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Nomination and Remuneration Committee Charter

Nomination and Remuneration Committee Charter established by DAMRI on 1 April 2020

Foundation for the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is established to assist in the implementation of the duties and function of the Supervisory Board.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

A. Relating to the Nomination Function

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for evaluating the selection and/or replacement of members of the Board of Directors, Supervisory Board, executive officers of the Company to the Supervisory Board;*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Directors and/or Supervisory Board to the Supervisory Board to be submitted to the Shareholders;*
3. *Assist the Supervisory Board in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board;*
4. *Evaluate the Committee Charter periodically in accordance with the development of relevant laws and regulations;*

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas
 6. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
 8. Memberikan usulan/rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas;
 9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai pihak independen yang menjadi anggota komite audit (KA) dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).
5. *Provide recommendations to the Supervisory Board regarding:*
 - a. *The composition of the positions of the members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board;*
 - b. *Policies and criteria required in the nomination process;*
 - c. *Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board*
 6. *Assist the Supervisory Board in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material;*
 7. *Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board;*
 8. *Provide proposals/recommendations for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to the Supervisory Board;*
 9. *Provide recommendations to the Supervisory Board regarding independent parties who are members of the audit committee (KA) and the Risk Management Monitoring Committee (KPMR).*

B. Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik remunerasi yang bersifat tetap maupun bersifat variabel;
2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan pada kinerja risiko, kewajiban, sasaran, dan strategi jangka panjang Perusahaan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Relating to the Remuneration Function

1. *Ensure that the Company has a transparent remuneration system and applies a prudent principle in providing remuneration, both fixed and variable remuneration;*
2. *Conduct regular evaluations of the implementation of remuneration policies;*
3. *Evaluate the remuneration policy based on the performance of the Company's risks, reasonableness, targets and long-term strategy, fulfillment of reserves as regulated in the provisions of laws and regulations;*

4. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Pengawas mengenai:
 - a. Struktur dan besaran remunerasi
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal; dan
 - c. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
5. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Mengevaluasi Piagam Komite secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat eksekutif, serta pegawai secara keseluruhan
8. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas

C. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pengawas

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Pengawas Perum DAMRI pada 1 April 2020.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas menilai bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. *Submit evaluation results and recommendations to the Supervisors regarding:*
 - a. *Structure and amount of remuneration*
 - b. *Remuneration policy for the Board of Directors and Supervisory Board to be submitted to the Shareholders; and*
 - c. *Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors*
5. *Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions of the legislation*
6. *Evaluate the Committee Charter periodically in accordance with the development of the provisions of the legislation*
7. *Evaluating the remuneration system/policy for the Supervisory Board, Board of Directors, and executive officers, as well as employees as a whole*
8. *Assisting the Supervisory Board in conducting performance appraisals in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board*

C. Conduct other activities provided by the Supervisory Board

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee Charter was stipulated by DAMRI Supervisory Board on 1 April 2020.

Performance Assessment of the Risk Management Committee

The Supervisory Board views that the Nomination and Remuneration Committee has properly implemented its duties and responsibilities throughout 2021.

Struktur, Keanggotaan, Kualifikasi Pendidikan, dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Structure, Membership, Qualification, Education, and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

NAMA Name	JABATAN Position	SK PENETAPAN Letter of Appointment	KEAHLIAN Expertise	KETERANGAN Remarks
Sam Budigusdian	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Chairman</i>	SK.05/DP/II/2021	Hukum, Peraturan Perundang-undangan <i>Legal, Laws and Regulations</i>	Profil disajikan pada profil Dewan Pengawas <i>The profile is presented in Supervisory Board profile section.</i>
Teguh Pristiwanto	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Member</i>	SK.05/DP/II/2021	Hukum, Peraturan Perundang-undangan <i>Legal, Laws and Regulations</i>	Profil disajikan pada profil Dewan Pengawas <i>The profile is presented in Supervisory Board profile section.</i>

TABEL INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE
NOMINASI DAN REMUNERASI

TABLE OF THE INDEPENDENCY OF NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE MEMBER



ASPEK INDEPENDENSI <i>The independency aspect</i>	Sam Budigusdian	Teguh Pristiwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Supervisory Board and the Board of Directors</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan <i>Does not have a share ownership relationship in the Company</i>	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Does not have a family relationship with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee</i>	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah <i>Do not serve as administrators of political parties, officials, and government</i>	✓	



SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta menjaga kepatuhan DAMRI terhadap hukum dan peraturan-undangan. Sekretariat Perusahaan juga mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra dan reputasi Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

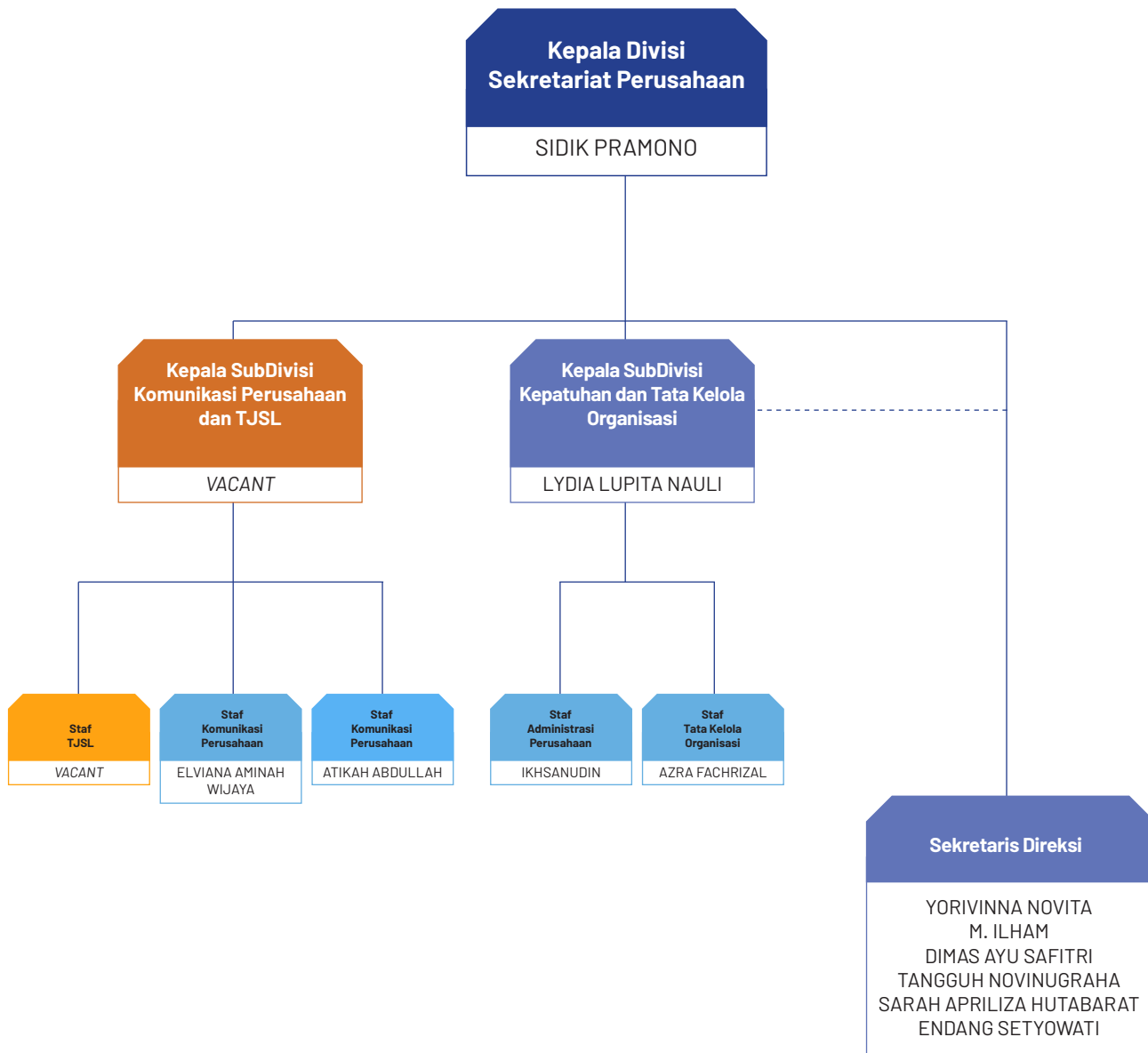
Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan bersifat wajib. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas, sebagaimana diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan-undangan yang berlaku.

The Corporate Secretary is the liaison officer between the Company and stakeholders and ensure and maintains DAMRI's compliance with laws and regulations. The Corporate Secretariat also has the mission to support the creation of a positive image and reputation of the Company, consistently and continuously through the management of effective communication programs to all stakeholders.

Basis for Appointment of Corporate Secretary

The implementation of the Corporate Secretary function is mandatory. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board, as regulated in the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are regulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Struktur Sekretaris Perusahaan *Structure of Corporate Secretary*



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi antara lain:

1. Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
2. Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) yang meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemilik Modal, regulator, lembaga lain, dan publik;
3. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
5. Membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
6. Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut;
7. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, risalah Rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas, dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
8. Tugas dan tanggung jawab lainnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan melakukan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi GCG dan memastikan pencapaian indeks GCG dengan skor 80.
2. Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*).

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary include the following:

1. *In charge of the Corporate Secretariat;*
2. *As a liaison officer covering the Company's relationship with the Shareholders, regulators, other institutions, and the public;*
3. *Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;*
4. *Provide information needed by the Board of Directors and the Supervisory Board periodically and/or at any time if requested;*
5. *Planning, implementing, and controlling communication activities to the internal and external public;*
6. *Keep up-to-date the development of relevant regulations and ensuring that the Company complies with these regulations;*
7. *Administering and storing Company documents, including but not limited to the Special Register, minutes of Board of Directors Meetings, Supervisory Board meetings, and Joint Discussion Meetings (RPB);*
8. *Other duties and responsibilities, as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021

Throughout 2021, the Corporate Secretary performed the following duties, amongst others:

1. *Conducting GCG socialization and ensuring the achievement of the GCG index with a score of 80.*
2. *Preparing the Company's Annual Report*

- Memastikan efektivitas pengelolaan peraturan perusahaan.
- Memastikan terlaksananya pengelolaan surat-menyurat dan dokumentasi informasi Perusahaan.
- Memastikan seluruh perangkat perusahaan mengikuti standar guideline Perusahaan.
- Memastikan efektivitas terlaksananya pengelolaan komunikasi dengan media, pembuatan materi komunikasi, dan penggunaan media sosial untuk promosi/komunikasi tentang Perusahaan.
- Mengelola keterlibatan dalam Forum Humas BUMN dan Kementerian Perhubungan.
- Melakukan pengelolaan kegiatan protokoler untuk Direksi.

- Ensure the effectiveness of the management of company regulations.
- Ensure the implementation of the management of correspondence and documentation of Company information.
- Ensuring that all company equipment follows the Company's standard guidelines.
- Ensuring the effectiveness of managing communication with the media, making communication materials, and using social media for promotion/communication about the Company.
- Manage participation in the SOE Public Relations Forum and the Ministry of Transportation Public Relations Forum.
- Manage protocol activities for the Board of Directors.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

NAMA <i>Name</i>	Sidik Pramono *
JABATAN <i>Position</i>	Sekretaris Perusahaan (Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan) <i>Corporate Secretary (Head of Corporate Secretariat Division)</i>
KEWARGANEGARAAN <i>Nationality</i>	Indonesia
USIA TEMPAT, TANGGAL LAHIR <i>Age, place and date of birth</i>	46 tahun, per 31 Desember 2021 Sukoharjo, 20 September 1975
DOMISILI <i>Domicile</i>	Kota Tangerang, Indonesia
DASAR HUKUM PENGANGKATAN <i>Legal basis of appointment</i>	Diangkat sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: 0783.01/KP.303-304/SK/00/DU/XI-2020 tanggal 10 November 2020. <i>Appointed as Head of Corporate Secretariat Division based on the Decree of the Board of Directors Perum DAMRI Number 0783.01/KP.303-304/SK/00/DU/XI-2020 dated 10 November 2020.</i>
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN <i>Academic background</i>	Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2021), Magister Administrasi dari Program Pascasarjana Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2013), dan Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (1999). <i>Doctor of Administration Sciences University of Indonesia (2021), Master of Administration Post-graduate Administration and Public Policy Program University of Indonesia (2013), and Bachelor of Mining Institute Technology Bandung (1999).</i>

PENGALAMAN KERJA <i>Work experience</i>	Pernah berkarier sebagai wartawan harian Kompas (2001-2013), Communication Manager dan Communication and External Expert pada PT Weda Bay Nickel (2013-2014), Corporate Secretary and Corporate Planning pada PT Bhakti Energi Persada (2014-2018), External Relations Manager pada PT Adaro Energy Tbk (2017), dan Head of External Relations Support pada Adaro MetCoal Companies (2017-2018), Corporate Secretary Servo Railway (2018-2019), dan VP Corporate Secretary PT Cisadane Sawit Raya Tbk (2019-2020). <i>Previous career as a reporter for Kompas Daily (2001-2013), Communication Manager and Communication and External Expert at PT Weda Bay Nickel (2013-2014), Corporate Secretary and Corporate Planning at PT Bhakti Energi Persada (2014-2018), External Relations Manager at PT Adaro Energy Tbk (2017), and Head of External Relations Support pada Adaro MetCoal Companies (2017-2018), Corporate Secretary Servo Railway (2018-2019), and VP Corporate Secretary PT Cisadane Sawit Raya Tbk (2019-2020).</i>
RANGKAP JABATAN <i>Dual positions</i>	Di dalam Perusahaan: <i>Inside the Company:</i> - Di luar Perusahaan: <i>Outside the Company:</i> -
HUBUNGAN AFILIASI <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau pemegang saham utama <i>Has no affiliation with members of the Supervisory Board, Board of Directors, or main shareholders</i>

* menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sampai dengan 21 Desember 2022

** served as Corporate Secretary until 21 December 2022*

Selanjutnya Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Direktur SDM dan Umum Perusahaan Siti Inda Suri. Profil Plt. Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Profil Direksi Perusahaan.

Thereafter, Acting Corporate Secretary for the Company was held by Director for Human Resources and General Affairs Siti Inda Suri. Profile of Acting Corporate Secretary can be viewed at Profile of Company Board of Directors.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL MONITORING SYSTEM

Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

Divisi Satuan Pengawasan Internal DAMRI telah dilengkapi dengan Piagam Audit (Audit Charter) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Nomor: SK.571/KU.302/DAMRI-2016 tanggal 20 Desember 2016. Piagam Audit menjelaskan visi dan misi, sasaran dan tujuan, kedudukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peran, wewenang, struktur organisasi, persyaratan kualifikasi tenaga pemeriksa, ruang lingkup pemeriksaan, kode etik pemeriksaan intern, norma pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan hubungan kerja. Audit Charter disusun sebagai pedoman bagi SPI DAMRI untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan.

Kepala Divisi Divisi Satuan Pengawasan Internal saat ini dijabat oleh Taryono berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.770/ KP.303.304/DAMRI-2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Satuan Pengawasan Internal.

Internal Control Unit

The Internal Audit Unit (SPI) Division is located at the Head Office and is directly responsible to the President Director for realizing an internal control system that can ensure the implementation of the Company's duties in accordance with the mandate received and with applicable regulations, with reference to the principles of efficiency and effectiveness as well as basic GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

DAMRI Internal Audit Unit Division has been equipped with an Audit Charter as stipulated in the Decree of the Board of Directors of DAMRI Public Company (Perum) Number: SK.571/KU.302/DAMRI-2016 dated 20 December 2016. The Audit Charter explains the vision and mission, goals and objectives, position, scope, duties and responsibilities, roles, authorities, organizational structure, qualification requirements of auditors, scope of audit, internal audit code of ethics, audit norms, audit procedures, and work relations. The Audit Charter was prepared as a guideline for DAMRI's SPI to be able to carry out its authority, duties and responsibilities in a professional, competent, independent and accountable manner, so that it can be accepted by all relevant parties in carrying out the Company's activities.

The current Head of the Internal Audit Unit Division is Taryono based on the Decree of the Board of Directors No. SK.770/KP.303.304/DAMRI-2018 concerning the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Satuan Pengawasan Internal

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal sebagaimana yang terkandung di dalam Piagam Audit Satuan Pengawasan Internal mencakup:

1. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek di bidang pengawasan internal Perusahaan;
2. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berikut anggarannya, meliputi *financial audit*, *operational audit*, dan *compliance audit* serta audit yang bersifat khusus pada obyek pemeriksaan unit/satuan kerja, proyek/produk, maupun program berdasarkan risiko (*Risk-Based Audit*).
3. Menyampaikan PKPT yang telah ditandatangani oleh Kepala SPI melalui Direktur Utama kepada Dewan Pengawas c.q. Komite Audit untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
4. Menyusun sasaran mutu Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) selaras dengan sasaran Perusahaan, menetapkan metode pengukuran, menjabarkan dalam program kerja, dan melaporkan realisasi pencapaiannya;
5. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem dan prosedur serta operasional Perusahaan pada semua bagian dan bidang kegiatan Perusahaan secara berkelanjutan;
6. Memberikan saran perbaikan atas tingkat efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan pengelolaan Perusahaan;
7. Melaksanakan inspeksi/sidak di lapangan guna mengetahui kondisi serta mendapatkan yang sebenarnya terhadap situasi tertentu;
8. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
9. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditandatangani Kepala DAI kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas c.q. Komite Audit;

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit Division

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit as contained in the Internal Audit Unit Charter include:

1. Prepare Long-Term, Medium-Term and Short-Term Work Plans in the Company's internal control sector;
2. Prepare the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget, including financial audits, operational audits, and compliance audits as well as audits that are specific to the object of inspection of units/work units, projects/products, and risk-based programs (*Risk-Based Audit*).
3. Submitting the PKPT which has been signed by the Head of SPI through the President Director to the Supervisory Board c.q. the Audit Committee to obtain the approval of the Supervisory Board;
4. Develop quality targets for the Internal Audit Unit (SPI) Division in line with the Company's goals, determine measurement methods, describe them in the work program, and report on the realization of their achievements;
5. Carry out routine inspections in accordance with the Annual Examination Work Program (PKPT) by conducting analysis and evaluation of the Company's systems and procedures as well as operations in all parts and areas of the Company's activities on an ongoing basis;
6. Provide suggestions for improvement on the level of efficiency and effectiveness in the Company's management activities;
7. Carry out inspections / inspections in the field to find out the conditions and acquire actual information on certain situations;
8. Prepare and document the Examination Working Paper (KKP);
9. Submit the Audit Result Report which has been signed by the Head of DAI to the President Director and the Supervisory Board c.q. Audit Committee;

1. Memantau tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan disposisi Direktur Utama;
2. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkelanjutan;
3. Memberi pendapat, saran, pertimbangan dan konsultasi yang obyektif atas hasil pemeriksaan sebagai acuan dan pedoman terkait fungsi pengawasan kepada Direktur Utama.

Wewenang Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal memiliki wewenang:

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kewajiban audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan.
3. Memasuki seluruh area perusahaan dan meninjau tempat usaha, daerah lingkungan kerja, daerah kepentingan, dan lokasi aset Perusahaan.
4. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakan.
5. Menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dalam rangka inspeksi/sidak lapangan guna mengetahui kondisi serta mendapatkan informasi yang sebenarnya terhadap situasi tertentu.
6. Meminta informasi pada rekanan untuk klarifikasi terhadap volume pekerjaan dan harga pada objek yang diperiksa.
7. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau Komite Audit.
8. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau Komite Audit.
9. Mengadakan koordinasi kegiatan dengan Auditor Eksternal.

10. Monitoring the follow-up to the Examination Result Report (LHP) in accordance with the disposition of the President Director;
11. Improving the competence of internal audit through continuous education and training;
12. Provide opinions, suggestions, considerations and objective consultation on the results of the examination as a reference and guideline related to the supervisory function to the President Director.

Authority of the Internal Audit Unit Division

The Internal Audit Unit Division has the authority to:

1. Develop, amend, and carry out internal audit obligations including determining the procedures and scope of audit work.
2. Requesting information and explanations from all levels of management and employees in the context of the examination.
3. Entering all areas of the company and reviewing the place of business, the work environment, areas of interest, and the location of the Company's assets.
4. Access to all documents, records, personal and physical, information on the object of the audit that is being carried out.
5. Issuing an Assignment Order (SPT) in the context of field inspections to determine conditions and obtain actual information on certain situations.
6. Requesting information from partners for clarification of the volume of work and prices on the object being inspected.
7. Communicating directly with the Board of Directors, Supervisory Board, and/or the Audit Committee.
8. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Supervisory Board, and/or the Audit Committee.
9. Coordinate activities with the External Auditor.

10. Kewenangan lainnya yang diberikan dan ditetapkan secara khusus oleh Direktur Utama atas audit-audit tertentu.
11. SPI melakukan penilaian dan analisis atas aktivitas yang dikaji/diaudit dan tidak mempunyai kewenangan dalam hal dan tanggung jawab atas aktivitas yang dikaji/diaudit tersebut.

10. Other powers given and specifically assigned by the President Director for certain audits.
11. SPI conducts an assessment and analysis of the activities being reviewed/audited and does not have the authority and responsibility for the activities being reviewed/audited.

Komposisi Divisi Satuan Pengawasan Internal

Sampai dengan 31 Desember 2021, komposisi personel Divisi Satuan Pengawasan Internal DAMRI yang memiliki kompetensi terdiri atas 12 (dua belas) orang sebagai berikut:

- Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal: 1 (satu) orang,
- Pengawas Area: 4 (empat) orang,
- Pemeriksa/Auditor: 7 (tujuh) orang.

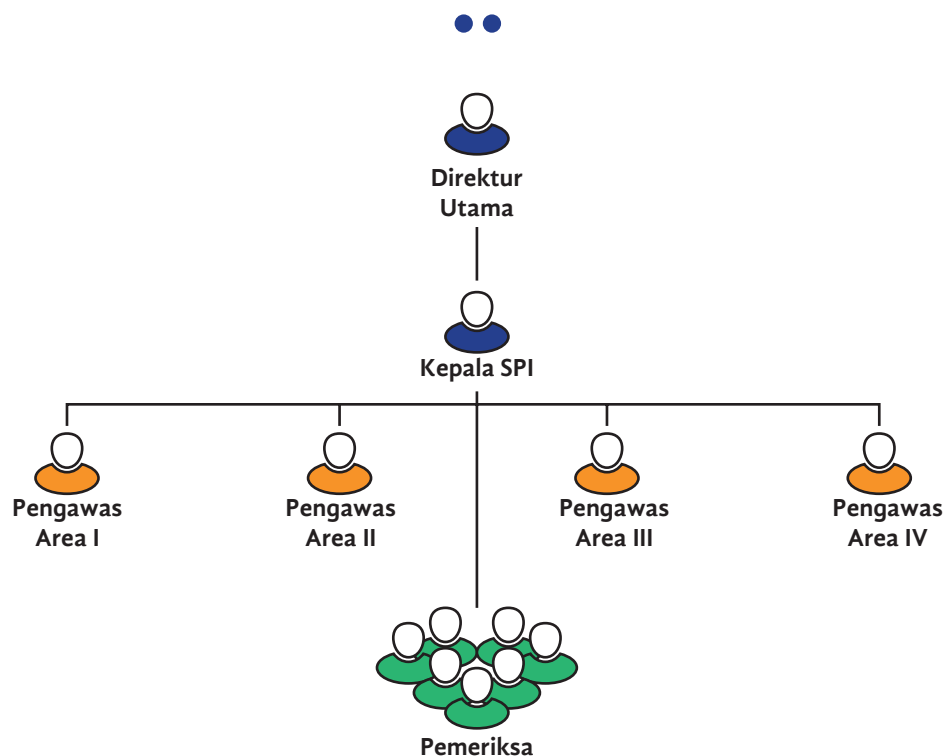
Composition of the Internal Audit Unit Division

As of 31 December 2021, the personnel composition of DAMRI Internal Audit Unit Division who have competence consists of 12 (twelve) people as follows:

- Head of Internal Audit Unit Division: 1 (one) person,
- Area Supervisor: 4 (four) people,
- Examiner/Auditor: 7 (seven) people.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

ORGANIZATION STRUCTURE OF INTERNAL SUPERVISION UNIT DIVISION



Kedudukan Divisi Satuan Pengawasan Internal

Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan unit kerja Direktur Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan membawahkan para Pengawas Area yang mengkoordinir para Pemeriksa atau Auditor dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal pada wilayah kerja sebagai berikut:

1. Pengawas Area I, meliputi audit seluruh unit kerja Perusahaan di bawah binaan Divisi Regional I, Kantor Pusat, dan SBU;
2. Pengawas Area II, meliputi audit seluruh unit kerja Perusahaan di bawah binaan Divisi Regional II;
3. Pengawas Area III, meliputi audit seluruh unit kerja Perusahaan di bawah binaan Divisi Regional III;
4. Pengawas Area IV, meliputi audit seluruh unit kerja Perusahaan di bawah binaan Divisi Regional IV.

Profil Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal

Kepala Divisi SPI: Taryono

Menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal sejak 2016. Beliau memperoleh gelar Sarjana (S1) Teknik Bangunan dari IKIP Negeri pada tahun 1995 dan Magister (S2) Manajemen Transportasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2011.

Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal, beliau menjabat sebagai Pengawas di Divisi Satuan Pengawasan Internal (2014-2016), Pemeriksa di Divisi Satuan Pengawasan Internal (2012-2014), Kepala Seksi Tata Usaha Cabang Bandar Lampung (2014), Kepala Seksi Anggaran dan Akuntansi Divisi Regional I (2012-2014).

Position of the Internal Audit Unit Division

Internal Audit Unit (SPI) Division is a work unit under the President Director led by a Division Head and supervises the Area Supervisors who coordinate the Examiners or Auditors in carrying out internal control activities in the following work areas:

1. Area I Supervisor, covering the audit of all work units of the Company under the supervision of Regional Division I, Head Office, and SBU;
2. Area II Supervisor, covering the audit of all work units of the Company under the supervision of Regional Division II;
3. Area III Supervisor, covering the audit of all work units of the Company under the supervision of Regional Division III;
4. Area IV Supervisor, covering the audit of all work units of the Company under the supervision of Regional Division IV.

Profile of the Head of Internal Audit Unit Division

Head of SPI Division: Taryono

Served as Head of Internal Audit Unit Division since 2016. He obtained a Bachelor (S1) degree in Building Engineering from IKIP in 1995 and a Masters (S2) in Transportation Management from Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta in 2011.

Prior to serving as Head of the Internal Audit Unit Division, he served as Supervisor in the Internal Audit Unit Division (2014-2016), Examiner in the Internal Audit Unit Division (2012-2014), Head of Administration Section for Bandar Lampung Branch (2014), Head of Budget Section and Accounting Division Regional I (2012-2014).

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Divisi Satuan Pengawasan Internal

Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

The Party Appointing and Dismissing the Internal Audit Unit Division

The Head Internal Audit Unit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Supervisory Board.

SERTIFIKASI PROFESI ANGGOTA DIVISI SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL

PROFESSION CERTIFICATE MEMBER OF INTERNAL
AUDIT UNIT DIVISION



NO.	NAMA Name	JABATAN Position	KUALIFIKASI DIKLAT Education and Training Qualification	PENDIDIKAN Education
1	Taryono	Kepala Divisi <i>Division Head</i>	Sertifikat PIA	S2
2	Bimin	Pengawas Area I <i>Area I Supervisor</i>	DDA, Fraud	S1
3	Diki Ashiddiki	Pengawas Area II <i>Area II Supervisor</i>	DDA, Fraud	S2
4	Yanto Heriyanto	Pengawas Area III <i>Area III Supervisor</i>	DDA, AO	S2
5	Agus Setiono	Pengawas Area IV <i>Area IV Supervisor</i>		S2
6	Nyoman Gede Agusrana	Pemeriksa <i>Auditor</i>	DDA, AO	S1
7	Wahyono	Pemeriksa <i>Auditor</i>	DDA, AO	S1
8	Jani Pratiwi	Pemeriksa <i>Auditor</i>	DDA	S1
9	Andi Unni Astriani	Pemeriksa <i>Auditor</i>	DDA	S1
10	Heri Affandi	Pemeriksa <i>Auditor</i>		D3
11	Giatno Santoso	Pemeriksa <i>Auditor</i>		S1
12	Ratna Ningsih	Pemeriksa <i>Auditor</i>		S1

PIA: Profesional Internal Audit

DDA: Dasar-dasar Audit

AO: Audit Operasional

Kode Etik Auditor

Pemeriksa Intern DAMRI harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik sebagai berikut:

1. Jujur, obyektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas tinggi serta mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya.
2. Mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas.
3. Mampu memegang rahasia pejabat.
4. Menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataan.
5. Berusaha meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya guna memelihara kompetensi, moralitas, dan menjunjung tinggi kehormatan korporasi.
6. Membangun komunikasi antar-auditor untuk kepentingan perusahaan dan tugasnya.
7. Berpedoman pada norma-norma pemeriksaan.
8. Menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas ilegal atau yang tidak sepatutnya dilakukan.
9. Berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pemberi tugas maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya dalam bertindak secara independen.
10. Dalam menerima perintah/penugasan di luar kegiatan pemeriksaan dan di luar kegiatan operasional Perusahaan, Pemeriksa Intern harus mampu menanggalkan identitas selaku Pemeriksa.
11. Tidak merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional Perusahaan.
12. Dilarang melakukan pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau yang bersifat subjektif.

Auditor Code of Ethics

DAMRI Internal Auditors must adhere to and comply with the following Code of Ethics:

1. Honest, objective, careful, wise, responsible, courageous and have high integrity and are able to act independently in carrying out their duties and obligations.
2. Able to maintain the trust given by the assignor.
3. Able to hold the secrets of officials.
4. Use all of his abilities to obtain sufficient evidence to support the statement.
5. Strive to improve skills and effectiveness in carrying out their work in order to maintain competence, morality, and uphold the honor of the corporation.
6. Establishing inter-auditor communication for the benefit of the Company and its duties.
7. Guided by inspection norms.
8. Refrain from taking part in illegal or inappropriate activities.
9. Trying to avoid activities that may cause a conflict of interest to the assignor or create prejudice that can doubt his ability to act independently.
10. In receiving orders/assignments outside the activities of the examiner and outside the operational activities of the Company, the Internal Auditor must be able to remove his identity as the Examiner.
11. Not holding concurrent duties directly in the Company's operational activities.
12. Prohibited from conducting inspections that have the potential to cause a conflict of interest and/or are subjective in nature.

Pelaksanaan Tugas Divisi Satuan Pengawasan Internal 2021

Pemeriksaan (Reguler)

Pemeriksaan bersifat Reguler/berkala tahun 2021 sebanyak 17 Kantor Cabang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap Cabang dibawah binaan Divisi Regional I Jakarta sebanyak 4 Kantor Cabang, sebagai berikut:
 - a. Logistik
 - b. Aceh
 - c. Pekanbaru
 - d. Basoetta
2. Pemeriksaan terhadap Cabang di bawah binaan Divisi Regional III Surabaya sebanyak 5 Kantor Cabang, sebagai berikut:
 - a. Yogyakarta
 - b. Purworejo
 - c. Cilacap
 - d. Purwokerto
3. Pemeriksaan terhadap Cabang di bawah binaan Divisi Regional III Surabaya sebanyak 5 Kantor Cabang, sebagai berikut:
 - a. Mataram
 - b. Denpasar
 - c. Malang
 - d. Ende
 - e. Kefamenanu
4. Pemeriksaan terhadap Cabang di bawah binaan Divisi Regional IV Papua sebanyak 4 Kantor Cabang, sebagai berikut:
 - a. Merauke
 - b. Sarmi
 - c. Namlea
 - d. Sorong Selatan

Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan bersifat Khusus (*Investigation Audit*) tahun 2021 sebanyak 10 Obyek Pemeriksaan, terdiri atas 2 Divisi pada Kantor Pusat, Divisi Regional I, dan 7 Kantor Cabang, dengan uraian sebagai berikut:

Implementation of the Duties of the Internal Audit Unit Division 2021

Inspection (Regular)

Regular/periodic inspections in 2021 in 17 Branch Offices, with the following descriptions:

1. Examination of Branches under the guidance of the Regional Division I Jakarta as many as 4 Branch Offices, as follows:
 - a. Logistics
 - b. Aceh
 - c. Pekanbaru
 - d. Basoetta
2. Examination of Branches under the guidance of Regional Division III Surabaya as many as 5 Branch Offices, as follows:
 - a. Yogyakarta
 - b. Purworejo
 - c. Cilacap
 - d. Purwokerto
3. Examination of Branches under the guidance of Regional Division III Surabaya as many as 5 Branch Offices, as follows:
 - a. Mataram
 - b. Denpasar
 - c. Malang
 - d. Ende
 - e. Kefamenanu
4. Examination of Branches under the guidance of Regional Division IV Papua as many as 4 Branch Offices, as follows:
 - a. Merauke
 - b. Sarmi
 - c. Namlea
 - d. South Sorong

Investigative Audit

Investigation Audit in 2021 were conducted to as many as 10 Audit Objects, consisting of 2 Divisions at the Head Office, Regional Division I, and 7 Branch Offices, with the following description:

1. Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat (PKBL)
2. Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik
3. Divisi Regional I Jakarta
4. Bandar Lampung
5. Logistik
6. Pontianak
7. Manado
8. Denpasar
9. Palu
10. Waingapu

Cek Posisi

Melakukan cut off dengan melakukan inventarisasi aset, pencatatan kewajiban, dan pertanggungjawaban pejabat lama yang akan diserahkan ke pejabat baru, meliputi Kantor Cabang sebagai berikut:

1. Bandara Soekarno Hatta
2. Batam
3. Divisi Regional II Semarang
4. Gorontalo
5. Logistik
6. Palu

Studi Banding

Pada tahun 2021, Divisi Satuan Pengawasan Internal tidak melakukan studi banding dikarenakan pandemi Covid-19.

Pendidikan dan Pelatihan

Sebanyak 3 (tiga) personel mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI, YPIA, dan EBIF 21 secara e-learning, webinar via zoom sebanyak 5 (lima) sertifikat.

Counterpart

Pemeriksaan oleh pihak eksternal (KAP) dengan menyajikan data yang diperlukan.

1. Head Office Corporate Secretariat Division (PKBL)
2. Engineering Facility Development and Planning Division
3. Regional Division I Jakarta
4. Bandar Lampung
5. Logistics
6. Pontianak
7. Manado
8. Denpasar
9. Palu
10. Waingapu

Check Position

Performing a cut off by taking inventory of assets, obligations and responsibilities of departing officials to be submitted to new officials, including in the following Branch Offices:

1. Soekarno Hatta Airport
2. Batam
3. Regional Division II Semarang
4. Gorontalo
5. Logistics
6. Palu

Comparative Study

In 2021, the Internal Audit Unit Division did not conduct a comparative study due to the Covid-19 pandemic.

Education and Training

A total of 3 (three) personnel attended trainings organized by the Corruption Eradication Commission (KPK), BPK RI, YPIA, and EBIF 21 by e-learning, webinar via zoom with 5 (five) certificates.

Counterpart

Examination by an external party (KAP) by presenting the required data.

Monitoring

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Sebanyak 262 temuan dari 27 obyek pemeriksaan, Sesuai Rekomendasi (SR) sebanyak 164 temuan yang telah ditindaklanjuti oleh auditee serta dilengkapi data dokumen yang cukup, Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut (BS & DPTL) sebanyak 98 temuan dan Belum Ditindaklanjuti (BD) nihil.
2. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) untuk tahun 2006 sebanyak 5 temuan dengan 9 rekomendasi, sudah Sesuai Rekomendasi (SR) sebanyak 8 temuan dan Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut (BS & DPTL) sebanyak 1 temuan.
3. Monitoring Tindak Lanjut hasil audit pihak eksternal KAP tahun 2020 sebanyak 20 temuan, sudah Sesuai Rekomendasi (SR) sebanyak 12 temuan dan Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut (BS & DPTL) sebanyak 8 temuan.
4. Monitoring Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dengan membuat laporan secara periodik setiap Triwulan I, II, III, dan IV ke BPK-RI, tembusan Dewan Pengawas Perum DAMRI dan Direksi Perum DAMRI.

Monitoring

1. Follow-up Monitoring of Internal Audit Result. A total of 262 findings from 27 objects of examination, According to Recommendation (SR) as many as 164 findings have been followed up by the auditee and equipped with sufficient document data, 98 findings are Not Sufficient and in Follow-Up Process (BS & DPTL), and 0/nil has not been followed up (BD)
2. Follow-up Monitoring of External Audit Results Follow-up monitoring of external audit results of the Supreme Audit Agency (BPK-RI) for 2006 consisted of 5 findings with 9 recommendations, 8 findings were in line with the According to Recommendation (SR), and 1 Not Sufficient and In the process of Follow-Up (BS & DPTL)
3. Follow-up monitoring of audit results from external party KAP in 2020 with 20 findings, with 12 findings in line with According to Recommendation (SR) and 8 findings in Not Sufficient and In the Follow-up Process (BS & DPTL)
4. Monitoring the Compensation Claims Settlement Process (TGR), by making periodic reports every Quarter I, II, III, and IV to BPK-RI, copies to the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum DAMRI.

REALISASI OBYEK PEMERIKSAAN DAN TINDAK
LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2021

REALIZATION OF THE AUDIT OBJECT AND FOL-
LOW-UP AUDIT RESULTS IN 2020

NO.	PROGRAM	KETERANGAN Description
1	Audit Kinerja dan Khusus Tahun 2021 <i>Performance audit</i>	27 Obyek Audit terdiri dari: 17 Audit Kinerja & 10 Audit Khusus 27 Audit Object consists of : 17 Performance Audit & 10 Investigative Audit
2	Non Audit a. Pendampingan Audit Eksternal (KAP) b. Cek Posisi <i>Non-audit</i> a. Assistance to the external audit (KAP) b. Position Check	a. Menyajikan data yang diperlukan b. 5 Kantor Cabang, 1 Divisi Regional a. Present necessary data b. 5 Branch Offices, 1 Regional Division

NO.	PROGRAM	KETERANGAN <i>Description</i>
3	Pendidikan dan pelatihan sesuai tahapan bidang audit <i>Training according to the stages of the audit sector</i>	3 Personel Diklat Via Zoom dari KPK, BPK RI, YPIA dan EBIF 21 <i>3 Personnel Diklat Via Zoom organized by KPK, BPK RI, YPIA dan EBIF 21</i>
4	Monitoring tindak lanjut hasil Audit Internal <i>Monitoring the follow up on the result of Internal Audit</i>	262 Temuan Dari 27 Obyek Pemeriksaan • 164 Sesuai Rekomendasi (SR) • 98 Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut (BISA & DPTL) • 0 Belum Ditindaklanjuti (BD) <i>262 Findings from 27 Examination Object</i> • 164 According to Recommendation (SR) • 98 Not Sufficient and In Process of Follow Up (BISA & DPTL) • 0 Not Followed Up (BD)
5	Monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal (KAP) tahun 2020 <i>Monitoring the follow up on the result of 2020 external audit (KAP)</i>	20 Temuan pada Tahun 2020 12 Temuan sudah Sesuai Rekomendasi (SR) 8 Temuan masih Belum Sesuai Rekomendasi BS & DPTL <i>20 Findings in 2020</i> <i>12 Findings According to Recommendation (SR)</i> <i>8 Findings Not According to Recommendation BS & DPTL</i>
6	Monitoring proses penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) dan pelaporan <i>Monitoring of the settlement process of claims of compensation (TGR) and reporting</i>	Laporan Periode Triwulan I,II,III & IV 2021 <i>Report for the Quarterly Period I, II, III & IV 2021</i>
7	Monitoring tindak lanjut hasil audit eksternal (BPK-RI) <i>Monitoring the follow up on the results of external audit (BPK RI)</i>	Audit Tahun 2006 Sebanyak 5 Temuan dengan 9 Rekomendasi, 8 Sesuai Rekomendasi, 1 Belum Sesuai Rekomendasi dan Proses Tindak Lanjut Audit Tahun 2018 (Kinerja Tahun 2016, 2017, dan Semester I Tahun 2018) Sebanyak 20 Temuan dengan 58 Rekomendasi : 35 Sesuai Rekomendasi, 23 Belum Sesuai Rekomendasi dan Proses Tindak Lanjut <i>Audit 2006</i> <i>5 Findings with 9 Recommendations, 8 According to Recommendation, 1 Not According to Recommendation and in Follow Up Progress</i> <i>Audit Year 2018 (Performance for Year 2016, 2017, and Semester I Year 2018)</i> <i>20 Findings with 58 Recommendation : 35 According to Recommendation, 23 Not Sufficient and in Follow Up Process</i>

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Uraian Sistem Pengendalian Internal

DAMRI sedang dalam proses penyusunan dokumen pedoman Sistem Pengendalian Internal yang didasarkan pada COSO *Framework Principles*, namun secara umum telah diterapkan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan. Tujuan pengendalian internal adalah:

1. Mewujudkan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan manajemen yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pendapat, masukan, dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan yang bersifat independen, obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan sistematis, berbasis manajemen risiko, pengendalian internal, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam ruang lingkup *financial audit*, *compliance audit*, serta audit yang bersifat khusus.

Komponen utama sistem pengendalian internal yang diterapkan DAMRI terdiri atas 5 (lima) unsur utama yang saling berkaitan, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), serta Pemantauan (*Monitoring*).

Uraian mengenai masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

A. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi semua komponen pengendalian yang lain.

Lingkungan pengendalian yang merupakan prinsip sistem pengendalian internal yang efektif:

Internal Control System (SPI)

Description of Internal Control System

DAMRI is in the process of formulating an Internal Control System guideline that is based on the COSO *Framework Principles*, but in general it has been applied in carrying out the Company's business activities. The objectives of internal control are:

1. Realizing compliance with management policies set out in the applicable regulations.
2. Provide opinions, input, and objective considerations as well as consulting services to management and other work units related to the supervisory function that is independent, objective with the aim of increasing added value and improving the Company's operations through a systematic approach, based on risk management, internal control, and the principles of *Good Corporate Governance (GCG)* in the scope of financial audits, compliance audits, and investigative audits.

The main components of the internal control system implemented by DAMRI consist of 5 (five) main inter-related elements, namely the *Control Environment*, *Risk Assessment*, *Control Activities*, *Information and Communication*, and *Monitoring*.

The description of each component is as follows:

A. Control Environment

The control environment is the foundation for all other control components.

The control environment is the principle of an effective internal control system:

1. Integritas dan Etika

Untuk meningkatkan integritas dan etika kerja seluruh insan DAMRI, dilakukan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kode etik (aturan perilaku)
- b. Dewan Pengawas dan Direksi memberikan keteladanan (*role model*)
- c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan kebijakan dan prosedur maupun pelanggaran terhadap aturan perilaku
- d. Memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dalam hal adanya tindakan yang tidak mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku
- e. Seluruh kebijakan, standar, dan prosedur operasional, baik kegiatan utama (*core business*) maupun kegiatan pendukung (*supporting activity*) harus didokumentasikan secara tertulis, disosialisasikan, dipahami, diterapkan, dan diawasi penerapannya.

2. Komitmen terhadap Kompetensi

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam Perusahaan
- b. Spesifik dalam menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan tertentu dan dituangkan dalam persyaratan yang diperlukan
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk membantu para pekerja mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
- d. Mengangkat pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis
- e. Mengelola sumber daya manusia, termasuk dalam proses pengangkatan dan penempatan pekerja yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan perilakunya

3. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

- a. Kebijakan penerimaan karyawan dan *training* SDM yang kompeten

1. Integrity and Ethics

To improve the integrity and work ethic of all DAMRI personnel, the following methods are carried out:

- a. Develop and establish a code of ethics (rules of conduct)
- b. The Supervisory Board and the Board of Directors serve as role models
- c. Enforce appropriate disciplinary action for deviations from policies and procedures as well as violations of the rules of conduct
- d. Provide explanations and accountability in the event of actions that do not follow applicable policies and procedures
- e. All policies, standards, and operational procedures, both core business and supporting activities, must be documented in writing, disseminated, understood, implemented, and monitored for implementation.

2. Commitment towards Competence

- a. Identify and determine the activities needed to complete the tasks and functions of each position in the Company
- b. Be specific in determining the competencies required for each particular activity and to set it forth in the required requirements
- c. Organizing training and mentoring to help workers maintain and improve competence
- d. Appointing officials who have managerial ability and technical experience
- e. Manage human resources, including in the process of hiring and placing workers according to their skills, knowledge and behavior

3. Human Resources Policies and Practices

- a. HR recruitment policies and training of competent employees

- b. Melakukan perbaikan yang tepat
 - c. *Reward and Punishment*
 - d. Kebijakan pegawai untuk ketaatan terhadap standar etika dan moral
4. Struktur Organisasi
- a. Struktur Organisasi disusun dengan memperhatikan dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dalam RJPP, yang memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan memonitor operasi.
 - b. Setiap pegawai harus memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem pengendalian internal
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wewenang diberikan kepada bawahan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan Perusahaan
 - b. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan peran dan fungsi mereka
 - c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab memperhatikan aspek penerapan sistem pengendalian internal
6. Partisipasi Dewan Pengawas dan Komite Audit

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berperan penting untuk efektivitas pengendalian internal dan mengawasi pengelolaan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Pengawas bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pengawas selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Board Manual, dan Etika Dewan Pengawas yang telah disepakati.

- b. *Make proper corrections*
 - c. *Rewards and Punishments*
 - d. *Employee policies for adherence to ethical and moral standards*
4. *Organizational Structure*
- a. *The Organizational Structure is prepared by taking into account and in accordance with the strategy as set out in the RJPP, which provides a framework for planning, implementing, controlling, and monitoring operations.*
 - b. *Every employee must understand their respective roles and functions in the internal control system*
5. *Delegation of Authority and Responsibility*
- Appropriate delegation of authority and responsibility must be carried out by taking into account the following matters:*
- a. *Authority is given to subordinates in accordance with the level of responsibility in achieving Company goals*
 - b. *Authorized employees understand that the given powers and responsibilities are related to their roles and functions*
 - c. *Employees who are authorized understand that the implementation of authority and responsibility takes into account aspects of the implementation of the internal control system*
6. *Participation of the Supervisory Board and the Audit Committee*

Supervisory Board

The Supervisory Board plays an important role in the effectiveness of internal control and supervise the management of the Company and provides advice to the Board of Directors. The Supervisory Board is responsible for ensuring that the Board of Directors under any circumstances has the ability to carry out their duties. The Supervisory Board always adheres to the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, the Board Manual, and the Ethics of the Supervisory Board that have been agreed upon.

Komite Audit

Komite Audit membantu tugas Dewan Pengawas dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal dan ketaatan dalam penerapannya, kecukupan pelaporan, dan pengungkapan laporan.

1. **Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen**
Filosofi dan gaya operasi manajemen sangat berpengaruh terhadap bentuk sistem pengendalian internal Perusahaan. Selain itu sifat dan intensitas komunikasi antar level manajemen, kebijakan manajemen, target keuangan maupun target operasi lainnya, juga berpengaruh terhadap bentuk dan sifat lingkungan pengendalian.

B. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko merupakan komponen yang mengawali proses pengendalian internal secara keseluruhan. Komponen ini juga sangat menentukan bentuk desain sistem pengendalian.

- a. Manajemen mendesain sistem pengendalian internal yang dibutuhkan oleh Perusahaan berdasarkan identifikasi dan penilaian risiko-risiko.
- b. Tujuan Perusahaan harus dikomunikasikan dan didelegasikan ke semua level dan unit kerja, sampai dengan individu, pada saat itu mereka harus memahami dan dapat mengidentifikasi risiko atas masing-masing tujuan, serta merumuskan bentuk desain pengendalian spesifik yang mereka butuhkan.
- c. Perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi dan menilai risiko untuk terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif
- d. Secara berkala pengendalian internal perlu direviu secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul.
- e. Hal utama dalam penilaian risiko adalah kesadaran (*awareness*) seluruh pegawai dan pimpinan manajemen bahwa setiap kegiatan aktivitas pengelolaan Perusahaan, memiliki risiko yang harus dikelola.

Audit Committee

The Audit Committee assists the Supervisory Board in assessing the adequacy of the internal control system and compliance with its implementation, reporting adequacy, and disclosure report.

7. **Philosophy and Operational Management Style**
The philosophy and operating style of management greatly influence the form of the Company's internal control system. In addition, the nature and intensity of communication between levels of management, management policies, financial targets and other operating targets, also affect the shape and nature of the control environment.

B. Risk Assessment

Risk assessment is a component that initiates the overall internal control process. This component also determines the shape of the design of the control system.

- a. Management designs the internal control system required by the Company based on the identification and assessment of risks.
- b. Company objectives must be communicated and delegated to all levels and work units, up to individuals, at which time they must understand and be able to identify risks for each objective, and formulate the specific control design forms they need.
- c. The Company continuously identifies and assesses risks to create a reliable and effective Internal Control System
- d. Periodically, internal control needs to be reviewed appropriately in the event that there are risks that have not been controlled, both existing risks and emerging risks.
- e. The main thing in risk assessment is the awareness of all employees and management leaders that every activity in the management of the Company has risks that must be managed.

C. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian diperlukan untuk mencegah dan menangani terjadinya suatu peristiwa risiko. Aktivitas pengendalian meliputi pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Aktivitas pengendalian dituangkan dalam dokumen tertulis berupa kebijakan dan prosedur yang harus ditaati dalam melaksanakan arahan manajemen serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut telah dipatuhi secara konsisten sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap peran dan fungsi atau kegiatan operasional sehari-hari.

Aktivitas pengendalian harus melibatkan semua tingkatan manajemen mulai Direksi sampai dengan karyawan.

Aktivitas pengendalian yang harus ditetapkan pada semua tingkatan manajemen terdiri atas:

- **Kajian Manajemen (Top Level Reviews)**
Berdasarkan laporan rutin maupun informasi lain yang diterima, Direksi melakukan reviu untuk menilai pencapaian kinerja perusahaan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan target/standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat deviasi negatif atau adanya kinerja yang tidak mencapai target, harus diketahui penyebabnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- **Direct Functional of Activity Management**
Kajian lebih dalam dilaksanakan oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal, yaitu:
 - a. Melakukan reviu terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi Manajemen Risiko
 - b. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data operasional dan keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi
 - c. Melakukan reviu terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan tindakan perbaikan (corrective actions)

C. Control Activities

Control activities are needed to prevent and manage the occurrence of a risk event. Control activities include operational control and financial control. Control activities are stated in a written document in the form of policies and procedures that must be adhered to in carrying out management directives as well as a verification process to ensure that these policies and procedures have been consistently adhered to as activities that are inseparable from every role and function or daily operational activities.

Control activities must involve all levels of management from the Board of Directors to employees.

Control activities that must be established at all levels of management consist of:

- **Management Studies (Top Level Reviews)**
Based on routine reports and other submitted information, the Board of Directors conducts a review to assess the achievement of the Company's performance to be compared with the previous period and with the targets/standards that have been set. If there is a negative deviation or performance that does not reach the target, the cause must be identified so that the necessary corrective action can be taken immediately.
- **Direct Functional of Activity Management**
An in-depth study was carried out by the Internal Control Unit Division, namely:
 - a. Reviewing the risk assessment (risk profile report) produced by the Risk Management Division
 - b. Analyzing operational data, both data related to risk as well as operational and financial data, namely verifying details and transaction activities
 - c. Reviewing the realization of the implementation of the work plan and budget, in order to identify the causes of significant deviations and determine corrective actions

- Pengendalian Sistem Informasi
 - a. Perusahaan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan data transaksi dan melaksanakan prosedur otoritas sesuai prosedur standar
 - b. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu:
 - Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan, dan pemeliharaan software, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, server, *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal
 - Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan dalam mengelola transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.
 - Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - a. Dilaksanakan untuk menjamin adanya pengamanan fisik terhadap aset Perusahaan
 - b. Meliputi kegiatan pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Perusahaan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendalian, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.
- Information System Control
 - a. The company verifies the accuracy and completeness of transaction data and carries out authority procedures according to standard procedures
 - b. Information system control activities can be classified into two criteria, namely:
 - General controls covering control over data center operations, procurement systems, and software maintenance, access security, and application system development and maintenance. This general control is applied to mainframes, servers, user workstations, as well as internal-external networks
 - Application controls are applied to the programs used to manage transactions and to ensure that all transactions are correct, accurate and properly authorized. In addition, application control must be able to ensure the availability of an effective audit process and to check the correctness of the audit process in question.
 - Physical Asset Control
 - a. Implemented to ensure physical security of the Company's assets
 - b. Covering activities securing assets, records, and limited access to computer programs and data files, as well as comparing the value of the Company's assets and liabilities with the values stated in the control records, in particular checking the value of assets on a periodic basis.

D. Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi menjadi bagian yang vital dalam sistem pengendalian internal Perusahaan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa Perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien, andal dalam pelaporan keuangan, serta taat terhadap peraturan yang berlaku.

D. Information and Communication

The information and communication component is a vital part of the Company's overall internal control system to ensure that the Company operates effectively and efficiently, is reliable in financial reporting, and complies with applicable regulations.

Diperlukan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu oleh semua lini manajemen hingga individu yang berada pada posisi *first line of defense*.

Demikian halnya dengan komunikasi yang menjamin bahwa semua Insan DAMRI mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam Perusahaan. Informasi terkait visi, misi, strategi dan tujuan perusahaan harus dapat dikomunikasikan (*cascaded*) dengan baik oleh Direksi kepada *second layer* (Kepala Divisi, Area Manager, dan General Manager) sehingga memiliki pemahaman yang sama. Hal ini penting karena mereka dengan fungsi dan perannya masing-masing bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap terwujudnya visi, terlaksananya misi, diterapkannya strategi, dan tercapainya tujuan Perusahaan.

Para *second layer management* ini merancang sistem, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa mandat yang diterima dari Direksi dapat dikomunikasikan (*cascaded*) kepada bawahannya untuk dilaksanakan serta dapat dikendalikan dan informasinya dapat dikomunikasikan kepada Direksi sebagai *feedback*.

E. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan, baik yang dilakukan secara rutin (*on going basis*) oleh *first line of defense* dan atasannya, maupun evaluasi terpisah oleh Direksi, Dewan Pengawas, maupun Auditor Internal/Eksternal, dimaksud untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tetap berjalan dengan efektif. Sistem Pengendalian Internal yang baik harus dapat memonitor dirinya sendiri. Hal ini berarti, para *first line of defense* yang setiap hari melakukan kegiatan operasional harus melakukan pemantauan secara terus-menerus.

Hal yang sangat penting dalam pemantauan adalah dapat mengetahui kelemahan sistem dan prosedur dalam rangka memperbaiki proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

Relevant, accurate, and timely information is required by all management lines to individuals who are in the *first line of defense* position.

Likewise with communication which ensures that all DAMRI personnel have access to information in accordance with their roles and responsibilities within the Company. Information related to the Company's vision, mission, strategy and objectives must be properly cascaded by the Board of Directors to the second layer (Division Head, Area Manager, and General Manager) so that they have the same understanding. This is important because they, with their respective functions and roles, are responsible for contributing to the realization of the vision, the implementation of the mission, the implementation of the strategy, and the achievement of the Company's goals.

The second layer management designs systems, procedures, and policies to ensure that the mandate received from the Board of Directors can be cascaded to their subordinates to be implemented and controlled and the information can be communicated to the Board of Directors as *feedback*.

E. Monitoring

Monitoring, whether carried out on an *on going basis* by the *first line of defense* and their superiors, as well as separate evaluations by the Board of Directors, Supervisory Board, and Internal/External Auditors, is intended to ensure that the control system continues to run effectively. A good Internal Control System must be able to monitor itself. This means, the *first line of defense* who carry out operational activities every day must carry out continuous monitoring.

Important in monitoring is being able to identify weaknesses in systems and procedures in order to improve business processes to be more effective and efficient.

Kesesuaian dengan COSO Internal Control Framework

Berdasarkan uraian sistem pengendalian internal di atas, DAMRI telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO internal control framework yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan *monitoring*.

Hasil Kajian Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 2020

DAMRI menindaklanjuti temuan dari sejumlah auditor seperti KAP, BPK, dan SPI, serta terus memonitor tindak lanjut pelaksanaan rekomendasinya, baik di Kantor Pusat, Divisi Regional, maupun Cabang. Selama tahun 2021, seluruh sistem pengendalian internal DAMRI terbukti dapat berjalan cukup efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAMRI telah memenuhi elemen-elemen pengendalian internal.

Compatibility with COSO Internal Control Framework

Based on the above description of the internal control system, DAMRI has implemented an internal control system in accordance with the COSO internal control framework which includes environment control, risk assessment, control activities, information and communication, and *monitoring*.

Results of the 2020 Internal Control System Implementation Study

DAMRI follows up on the findings of a number of auditors such as KAP, BPK, and SPI, and continues to monitor the follow-up implementation of its recommendations, both at the Head Office, Regional Divisions, and Branches. During 2021, the entire DAMRI internal control system proved to be quite effective. This shows that DAMRI has complied with the elements of internal control.





MANAJEMEN RISIKO

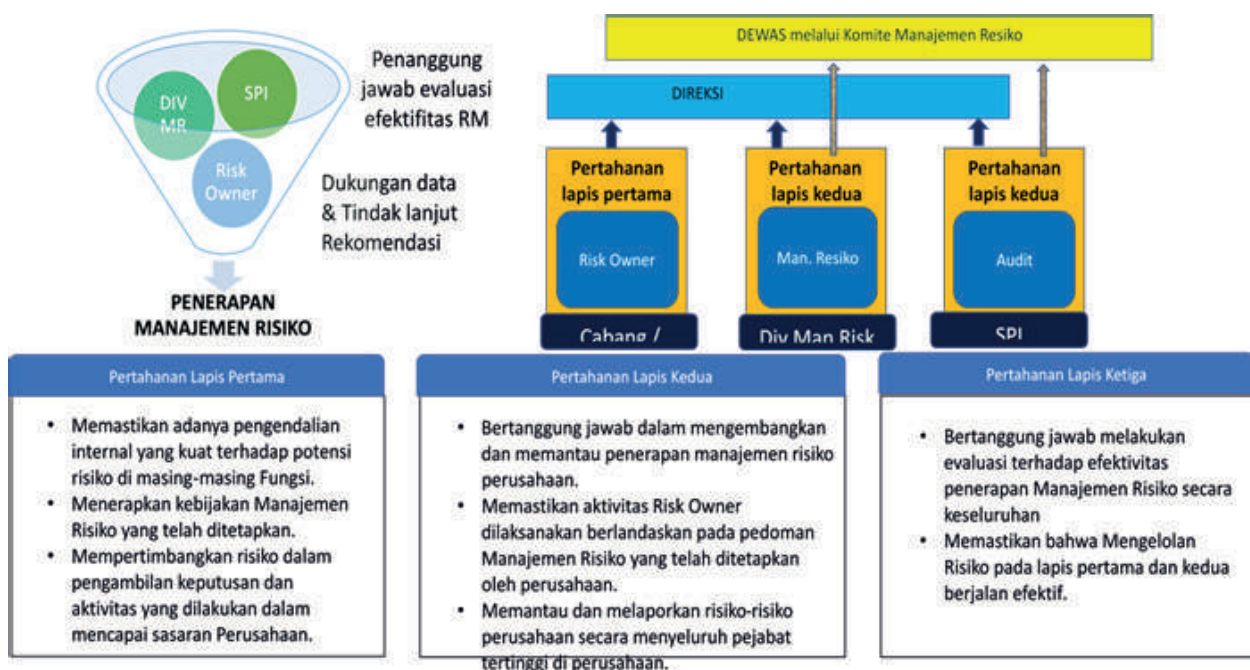
RISK MANAGEMENT

Sistem Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko dalam perusahaan transportasi merupakan bagian integral dari proses bisnis Perusahaan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, serta tumbuh menjadi budaya bagi seluruh personel Perusahaan sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN. Manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan outcome Perusahaan dan mengurangi dampak negatif dari risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko harus difokuskan sesuai konteks yang telah ditetapkan. DAMRI berorientasi pada keselamatan/keamanan (*safety*) dan kualitas layanan (*services*) dan peningkatan laba perusahaan (*profit*).

Risk Management System

Risk management policies in transportation companies are an integral part of the Company's business processes and decision-making by management, and has grown into a culture for all Company personnel in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. Risk management is carried out with the aim of identifying and exploiting opportunities to improve the Company's outcomes and reduce the negative impact of risks. Risk is defined as the possibility of something happening that will have an impact on the achievement of goals. Risk must focus on the defined context. DAMRI is oriented towards safety and quality of services and increasing company profits.



Setiap unit kerja di lingkungan Perusahaan harus menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko bagi lingkungan kerja masing-masing. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko sebagaimana dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Direktorat, serta Divisi, Kantor Divisi Regional, dan Kantor Cabang dari Perusahaan sebagai unit yang memiliki risiko dan selanjutnya disebut sebagai unit pemilik risiko (*risk owner*).

Pimpinan unit kerja Perusahaan sebagai merupakan pemilik risiko, secara berkala membuat laporan tentang penerapan dan pengembangan manajemen risiko kepada Direktur Utama.

Proses manajemen risiko yang sistematis terdiri atas:

1. Penetapan konteks
2. Identifikasi risiko
3. Analisis risiko
4. Evaluasi risiko
5. Penanganan risiko
6. Monitoring dan review
7. Komunikasi dan konsultasi
8. Pencatatan dan pelaporan

Penetapan konteks sebagaimana dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan dan pengendalian suatu unit kerja di mana manajemen risiko akan diterapkan. Identifikasi risiko sebagaimana lokasi, sebab, dampak dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit kerja Perusahaan. Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan konteks. Identifikasi risiko dituangkan dalam formulir identifikasi risiko.

Analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan memulai risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya yang dapat dilakukan dengan bantuan formulir pengukuran risiko serta mengikuti ketentuan umum mengenai konsekuensi dan kemungkinan terjadinya risiko sebagai berikut:

Each work unit within the Company must implement and develop risk management for their respective work environment. Implementation and development of risk management as implemented by all work units of the Directorate, as well as Divisions, Regional Divisional Offices, and Branch Offices of the Company as units that have risk and hereinafter referred to as risk owner units.

The head of the Company's work units, as risk owners, periodically reports on the implementation and development of risk management to the President Director.

A systematic risk management process consists of:

- 1. Context setting*
- 2. Risk identification*
- 3. Risk analysis*
- 4. Risk evaluation*
- 5. Risk management*
- 6. Monitoring and review*
- 7. Communication and consulting*
- 8. Recording and reporting*

Determination of context as carried out by outlining the background, scope, objectives, and environmental conditions and control of a work unit where risk management will be applied. Identify risks as to the location, cause, impact and process of occurrence of risk events that can hinder, reduce, or delay the achievement of the Company's work unit targets. Risk identification is carried out by taking into account the context. Risk identification is described in the risk identification form.

Risk analysis is carried out by looking at the source of risk and the level of control that exists, followed by reviewing risk from side of consequences and the possibility of occurrence which can be done with the help of a risk measurement form and following the general provisions regarding the consequences and the possibility of risk occurring as follows:

Kemungkinan terjadinya risiko dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

1. Kategori “Rare” atau tidak mungkin terjadi; apabila dapat terjadi dalam kurun waktu > 1 tahun.
2. Kategori “Unlikely” atau jarang terjadi; apabila dapat terjadi dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
3. Kategori “Moderate” atau bisa terjadi; apabila dapat terjadi dalam kurun waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan.
4. Kategori “Likely” atau sangat mungkin terjadi; apabila dapat terjadi dalam kurun waktu 1 bulan sampai dengan 3 bulan.
5. Kategori “Almost Certain” atau hampir pasti terjadi; apabila terjadi dalam kurun waktu < 1 bulan.

Konsekuensi risiko diukur dengan 12 (dua belas) kriteria dampak, yaitu:

1. Produksi
2. Keuangan
3. SDM
4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
5. Kepatuhan
6. Hukum
7. Eksternal
8. Pemasaran
9. Reputasi
10. Penyuluhan
11. TI
12. Output

Tingkatan dampak dibagi dalam lima kategori, yaitu Insignificant, Minor, Moderate, Significant, dan Catastrophic.

Level risiko dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Low; pewarnaan hijau tua dengan akuntabilitas tidak diperlukan tindakan dan dipantau oleh level staf.

Possible risks can be divided into 5 (five) categories, namely:

1. Category “Rare” or unlikely to occur; if it can occur within a period of > 1 year.
2. “Unlikely” category or rare; if it can occur within a period of 6 months to 1 year.
3. Category “Moderate” or may occur; if it can occur within a period of 3 months to 6 months.
4. “Likely” category or very likely to occur; if it can occur within 1 month to 3 months.
5. “Almost Certain” category or almost certain to occur; if it occurs within a period of < 1 month.

Risk consequences are measured by 12 (twelve) impact criteria, namely:

1. Production
2. Finance
3. HR
4. Occupational Health and Safety
5. Compliance
6. Law
7. External
8. Marketing
9. Reputation
10. Bribery
11. IT
12. Output

The level of impact is divided into five categories, namely Insignificant, Minor, Moderate, Significant, and Catastrophic.

The risk level is divided into 4 (four) categories, namely:

1. Low; dark green, accountability no action required and monitored by staff level.

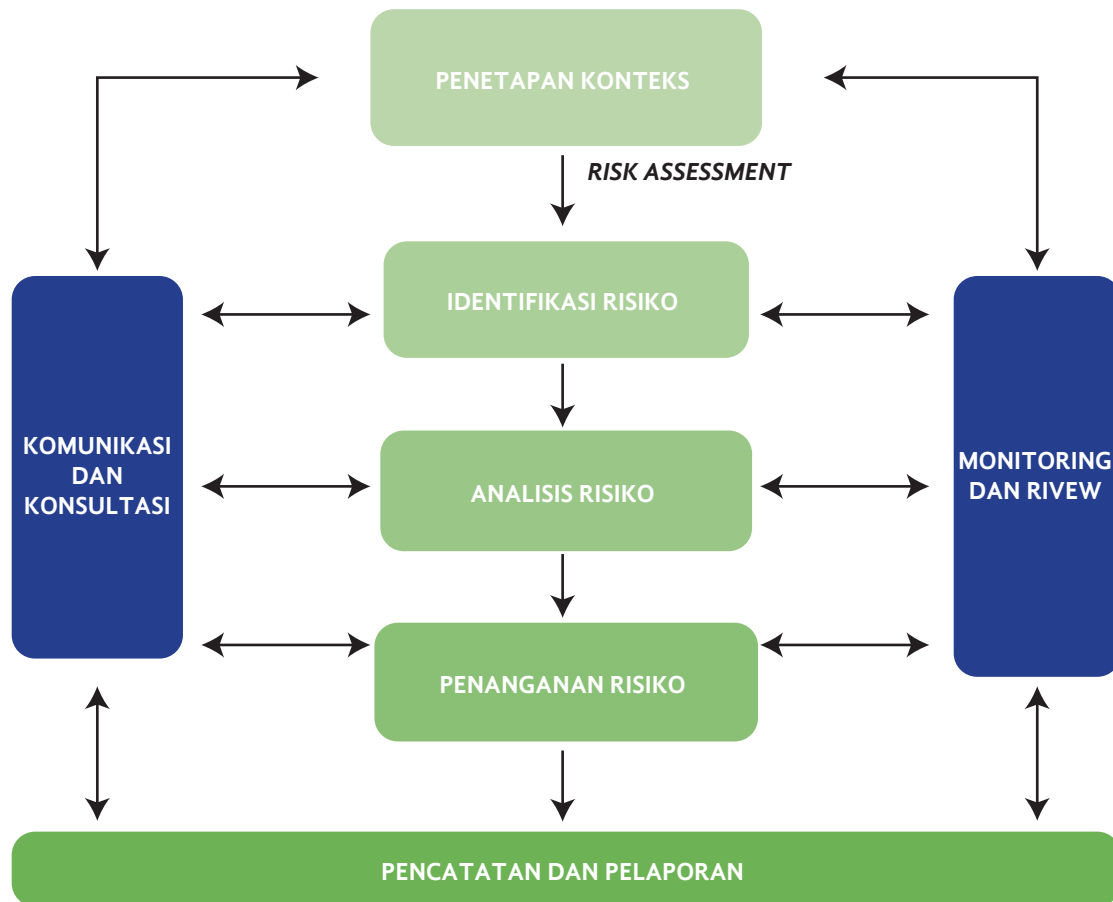
1. *Low to Moderate; pewarnaan hijau muda dengan akuntabilitas diambil tindakan jika diperlukan, dipantau, dan dikendalikan oleh level Kepala Subdivisi/Manager.*
2. *Moderate; pewarnaan kuning dengan akuntabilitas diambil tindakan jika sumber daya tersedia, dipantau, dan dikendalikan oleh level Kepala Divisi/Area Manager.*
3. *Moderate to High; pewarnaan merah muda (atau oranye) dengan akuntabilitas diperlukan untuk tindakan mengelola risiko, dipantau, dan dikendalikan oleh level Direktorat.*
4. *High; pewarnaan merah dengan akuntabilitas diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko, dipantau, dan dikendalikan oleh level Direktur Utama/Dewan Pengawas*
2. *Low to Moderate; light green, accountability action is taken when necessary, monitored and controlled by the Head of Subdivision/Manager level.*
3. *Moderate; yellow, accountability action is taken if the resource is available, monitored and controlled by the Head of Division/Area Manager level.*
4. *Moderate to High; pink (or orange), accountability is required for actions to manage risk, monitored and controlled by the Directorate level.*
5. *High; red, accountability required immediate action to manage risk, monitored, and controlled by the President Director/Supervisory Board level*

Evaluasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi atau pilihan tindakan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik serta dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko, yaitu dengan cara mendeskripsikan perihal bagaimana suatu risiko akan ditangani. Rencana penanganan risiko dapat dilakukan dengan bantuan formulir penanganan risiko.

Monitoring dan kajian dilakukan secara berkala melalui proses pemantauan efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Setiap unit kerja pemilik risiko dalam Perusahaan dapat meminta konsultasi dalam penerapan manajemen risiko kepada unit pengelola dan kepatuhan manajemen risiko. Pencatatan dan pelaporan dilakukan terhadap seluruh proses manajemen risiko untuk dokumentasi serta dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

Risk evaluation is carried out by identifying the various options or choices of available risk management actions and deciding the best risk treatment options and continuing with the development of a risk mitigation plan, namely by describing how a risk will be handled. Risk management plan can be carried out with the help of the risk management form.

Monitoring and review is carried out periodically through the process of monitoring the effectiveness of risk management plans, strategies, and risk management systems. Communication and consultation is carried out by developing communication with internal and external stakeholders. Each risk-owning work unit within the Company may request consultation on the implementation of risk management from the risk management and compliance management unit. Recording and reporting is carried out on the entire risk management process for documentation and is reported to related parties.



Jenis-Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Dasar pelaksanaan Manajemen Risiko adalah Surat Keputusan Direksi Nomor SK.0708.00/UM.001/SK/00/DU/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan DAMRI.

Risiko Produksi

Risiko produksi dapat berasal dari kegiatan operasional yang berkaitan dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan pengangkutan menggunakan bus termasuk proses perawatannya yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola produktivitas alat yang baik dan benar sehingga mendatangkan pendapatan dari bisnis usaha. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang kurang baik mempunyai risiko produksi untuk mengalami kerugian. Risiko operasional suatu perusahaan tergantung dari jenis, bentuk, dan skala bisnisnya masing-masing.

Types of Risk and its Management

The basis for implementing Risk Management is the Decree of the Board of Directors Number SK.0708.00/UM.001/SK/00/DU/2020 concerning Guidelines for Risk Management in DAMRI.

Production Risk

Production risk can come from operational activities, from preparation to implementation of bus transportation, including its maintenance in connection with the ways to manage equipment productivity properly which would bring revenue to the business. Companies that have a poor management system have a production risk of experiencing losses. The operational risk of a company depends on the type, form, and scale of each business.

Risiko Keuangan

Risiko keuangan adalah segala macam risiko yang berkaitan dengan keuangan, biasanya diperbandingkan dengan risiko non-keuangan seperti risiko operasional. Jenis risiko keuangan misalnya adalah risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko ini timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target keuangan usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan perusahaan.

Tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal sebagai risiko pasar.

Risiko SDM

Tenaga kerja merupakan aset paling berharga dan menentukan dalam operasi Perusahaan. Segmentasi SDM selalu memiliki risiko yang berhubungan langsung antara Perusahaan dengan pegawainya dan perlu dikelola risikonya. Pada dasarnya Perusahaan telah mengambil risiko yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ketika Perusahaan memutuskan untuk menerima seseorang bekerja. Perusahaan harus membayar gaji yang memadai bagi pekerjaannya serta memberikan jaminan sosial yang diwajibkan menurut perundang-undangan. Di samping itu Perusahaan juga harus memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta membayar tunjangan jika tenaga kerja mendapat kecelakaan.

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kegagalan dalam proses produksi. Mempekerjakan pekerja yang tidak terampil, kurang pengetahuan, sembrono, atau lalai dapat menimbulkan risiko yang serius terhadap keselamatan.

Financial Risk

Financial risk is all kinds of risks related to finance, usually compared to non-financial risks such as operational risk. Types of financial risk, for example, are exchange rate risk, interest rate risk, and liquidity risk. This risk arises due to the uncertainty of the financial targets of a business or the financial size of the business. The business financial target is the target amount set by the entrepreneur within a certain period of time. While the measure of business finance is the financial condition of the business which can be in the form of cash flow, operating profit, and company growth.

The objective of financial risk management is to minimize potential losses arising from unexpected changes in the prices of currencies, credit, commodities and equities. The risk of price volatility encountered is known as market risk.

HR Risk

Manpower is the most valuable and decisive asset in the Company's operations. HR segmentation always has risks that are directly related to the Company and its employees and need to be managed. Basically the Company has taken risks related to employment when the Company decides to hire someone to work. Companies must pay adequate salaries for their workers and provide social security that is required by law. In addition, the Company must also provide occupational safety and health protection and pay benefits if the workforce gets an accident.

Labor is one of the elements that can trigger or cause accidents or failures in the production process. Employing unskilled, uninformed, reckless or negligent workers can pose a serious risk to safety.

Risiko Keselamatan

Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik yang merupakan bagian integral dari manajemen transportasi. Sasaran utama program keselamatan dan kesehatan kerja adalah mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan melalui proses identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya. Transportasi darat, laut, dan udara merupakan salah satu lingkungan kerja yang rawan terjadinya kecelakaan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Fungsi Kepatuhan merupakan tindakan yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Perusahaan, penilaian risiko kepatuhan sangatlah penting. Penilaian risiko kepatuhan akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang bisa muncul pada lini bisnis, produk, atau layanan tertentu serta *quality control*. Dengan begitu, penilaian risiko kepatuhan dapat dipakai untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut (mitigasi risiko).

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen Perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi Perusahaan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antarnegara.

Safety Risk

Occupational safety and health risk management (K3) is an effort to manage K3 risk to prevent unwanted accidents in a comprehensive, planned, and structured manner in a good system which is an integral part of transportation management. The main objective of the occupational safety and health program is to manage risks to prevent accidents or unwanted events through the process of hazard identification, risk assessment and control. Land, sea and air transportation is a work environment that is prone to accidents.

Compliance Risk

Compliance risk is losses, either directly or indirectly, caused by non-compliance with applicable laws and regulations. The Compliance Function is an *ex-ante* (preventive) action to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as the business activities carried out by the Company are in accordance with applicable laws and regulations.

For the Company, compliance risk assessment is very important. Compliance risk assessment will be used to identify various risks that may arise in certain business lines, products or services as well as quality control. That way, a compliance risk assessment can be used to manage and reduce these risks (risk mitigation).

Legal Risk

Legal risk is the risk that arises due to the inability of the Company's management to manage the emergence of legal problems that can cause losses or bankruptcy for the Company. Legal risks can come from operations, agreements with third parties, legal uncertainty and negligence in applying the law, obstacles in the litigation process for claim settlement, and jurisdictional issues between countries.

Risiko Eksternal

Bencana alam maupun non-alam merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja termasuk oleh Perum DAMRI dan dapat terjadi setiap saat tanpa bisa diduga waktu, bentuk, dan kekuatannya. Bencana dapat berupa angin topan atau badai, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, ataupun letusan gunung berapi. Bencana non alam bisa berupa chaos akibat demonstrasi. Di samping korban jiwa, bencana alam juga mengakibatkan kerugian material yang sangat besar yang memerlukan waktu pemulihan yang lama.

Di Indonesia, bencana alam merupakan ancaman serius bagi setiap usaha atau kegiatan. Indonesia berada di pertemuan lempeng yang meningkatkan risiko terjadinya gempa. Indonesia berada di antara dua benua dan dua lautan luas yang berpengaruh terhadap pola cuaca dan iklim. Indonesia juga memiliki rantai gunung berapi yang masih aktif. Oleh karena itu, faktor bencana alam harus diperhitungkan sebagai risiko yang dapat terjadi setiap saat.

Risiko Pemasaran

Perusahaan memperhitungkan risiko pasar seperti adanya penolakan terhadap produk atau mungkin tuntutan hukum dari masyarakat konsumen atau larangan beredarnya produk di masyarakat oleh lembaga yang berwenang. Risiko lain yang berkaitan dengan pasar dapat berupa persaingan pasar. Dalam era pasar terbuka, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk atau jasa yang disukainya dan sangat kritis terhadap mutu, harga, layanan, dan jaminan keselamatannya. Setiap produk yang bersaing di pasar bebas menghadapi risiko untuk ditinggalkan konsumen.

External Risk

Natural and non-natural disasters are risks faced by everyone, including Perum DAMRI and can occur at any time without the prediction of time, form, and strength. Disasters can be in the forms of hurricanes or storms, earthquakes, tsunamis, landslides, floods, or volcanic eruptions. Non-natural disasters can be in the form of chaos due to demonstrations. In addition to the loss of life, natural disasters also cause enormous material losses that require a long recovery time.

In Indonesia, natural disasters are a serious threat to any business or activity. Indonesia is located between major tectonic plates which increase the risk of earthquakes. Indonesia is also located between two continents and two vast oceans that influence weather and climate patterns. Indonesia also has a chain of volcanoes that are still active. Hence, natural disaster factor must be taken into account as a risk that can occur at any time.

Marketing Risk

The company takes into account market risks such as rejection of the product or possible lawsuits from the consumer community or a ban on the circulation of the product in the community by authorized institution. Another risk related to the market can be in the form of market competition. In the open market era, consumers have the freedom to choose the product or service they like and are very critical of quality, price, service, and safety assurance. Every product that competes in the free market runs the risk of being abandoned by consumers.

Risiko Reputasi

Kemajuan teknologi informasi telah membuat perhatian terhadap risiko reputasi meningkat. Peningkatan kapabilitas masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara massal, mudah, cepat, dan tanpa membayar, telah berhasil meningkatkan dampak dan intensitas risiko reputasi yang diemban Perusahaan. Risiko reputasi adalah dampak positif atau negatif yang dihasilkan reputasi, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menghadapi risiko reputasi, Manajemen Risiko juga dapat membantu Perusahaan dalam mempersiapkan pertahanan berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu menghadapi risiko reputasi. Dengan mempersiapkan kebijakan dan prosedur ini, Perusahaan diharapkan dapat membangun reputasi yang baik terhadap *stakeholders* secara konsisten dan kontinu. Kebijakan dan prosedur ini juga harus mencakup protokol yang dipersiapkan untuk masa krisis reputasi, yang dapat muncul kapan saja akibat hal tak terduga. Protokol ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi manajemen krisis reputasi dan dapat membantu Perusahaan untuk mengelola kepanikan *stakeholders* dan mengembalikan nama baik Perusahaan.

Risiko Penyuapan

Tidak ada peraturan yang dapat membuat suatu perusahaan kebal dari penyuapan. Itulah dasar Perusahaan memandang bahwa risiko penyuapan juga harus dikelola dan dimitigasi dengan baik dengan cara harus mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah hal itu terjadi.

Reputational Risk

Advances in information technology have led to increased attention to reputational risk. Increasing the public's capability to obtain and disseminate information in bulk, easily, quickly, and free of charge, has succeeded in increasing the impact and intensity of reputational risk borne by the Company. Reputational risk is the positive or negative impact generated by reputation, which can affect the achievement of organizational goals.

In dealing with reputation risk, Risk Management can also assist the Company in preparing defenses in the form of policies and procedures to help deal with reputational risk. By preparing these policies and procedures, the Company is expected to be able to build a good reputation with stakeholders consistently and continuously. These policies and procedures should also include protocols prepared for times of reputational crises, which can arise at any time due to unforeseen circumstances. This protocol is expected to be a guide for reputation crisis management and can help the Company to manage stakeholder panic and restore the good name of the Company.

Bribery Risk

There is no regulation that can make a company immune from bribery. That is the basis of the Company's view that the risk of bribery must also be managed and mitigated properly by taking all possible steps to prevent it from happening.

Salah satunya adalah dengan menggunakan identifikasi risiko yang merupakan salah satu langkah yang bagus untuk mengurangi potensi masalah ini. Untuk memastikan upaya mitigasi bekerja secara efektif, Perusahaan harus secara konsisten mengimplementasikannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Menerapkan sistem juga berarti bahwa Perusahaan memiliki integritas untuk melakukan tata kelola korporasi yang baik dan melindungi nilai serta nama baik Perusahaan.

Risiko Teknologi Informasi

Aspek teknologi di samping bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas juga mengandung berbagai risiko. Penggunaan mesin modern, misalnya, dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan pengurangan tenaga kerja. Teknologi juga bersifat dinamis dan terus berkembang dengan inovasi baru. Perusahaan yang buta terhadap perkembangan teknologi akan mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi yang lebih baik.

Penerapan teknologi yang lebih baik oleh pesaing akan mempengaruhi produk, biaya, dan kualitas yang dihasilkan sehingga dapat menjadi ancaman bagi Perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan teknologi harus mempertimbangkan dampak risiko yang ditimbulkan.

Risiko Output

Risiko *output* atau bisa disebut risiko untuk mengukur kinerja atas suatu target dari suatu unit. Perusahaan perlu mengukur kinerja atas target untuk melindungi agar unit tidak keluar jalur dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

One way is to use risk identification which is a good way to reduce this potential problem. To ensure that mitigation efforts work effectively, the Company must consistently implement them in daily operational activities. Implementing the system also means that the Company has the integrity to carry out good corporate governance and protect the values and reputation of the Company.

Information Technology Risk

Aspects of technology besides being useful for increasing productivity also carries various risks. The use of modern machinery, for example, can lead to the risk of accidents and reduction of manpower. Technology is also dynamic and continues to evolve with new innovations. Companies that are blind to technological developments will experience setbacks and cannot compete with other companies that use better technology.

The application of better technology by competitors will affect the product, cost, and quality produced so that it can become a threat to the Company. Therefore, the selection and use of technology must consider the impact of the risks.

Output Risk

Output risk is also a risk to measure the performance of a target of a unit. Companies need to measure performance against targets to protect the unit from going off track in carrying out its work activities in order to achieve predetermined targets.

Hasil Kajian Tahun 2021

Aktivitas Perusahaan mengandung berbagai macam risiko, antara lain risiko keuangan, risiko produksi, risiko keselamatan, dan risiko sumber daya manusia. Pada tahun 2021 masih berada pada tahap pemulihan atas bencana pandemi Covid-19 sehingga terdapat risiko-risiko yang perlu mendapat perhatian seperti risiko keuangan, risiko produksi, risiko keselamatan, dan risiko sumber daya manusia.

Manajemen risiko adalah sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau bisnis. Tujuan manajemen risiko adalah meminimalisir dampak kerugian pada organisasi dan mempertahankan nilai maksimal yang ada pada seluruh aktivitas organisasi dan untuk meningkatkan kinerja (*performance*) suatu organisasi/perusahaan.

Pada tahun 2021, fungsi manajemen risiko yang semula dijalankan oleh Divisi Perencanaan Korporasi dan Manajemen Risiko di bawah Direktur Utama diubah menjadi dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Unit Manajemen Risiko mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai atas risiko produksi, keuangan, SDM, K3, kepatuhan, hukum, eksternal, pemasaran, reputasi, penyuapan, TI, dan output.

Pada tahun 2021, implementasi manajemen risiko di Perusahaan telah pada tahap *development*, di mana pada organisasi telah terbangun pola yang berulang dalam melakukan tata kelola manajemen risiko namun aktivitasnya belum terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik secara formal sehingga perlu peningkatan konsistensi dalam implementasinya.

2021 Study Results

The Company's activities contain various kinds of risks, including financial risk, production risk, safety risk, and human resource risk. In 2021, we are still in the recovery stage of the Covid-19 pandemic disaster, so there are risks that require attention, such as financial risks, production risks, safety risks, and human resource risks.

Risk management is a set of procedures and methodologies that are used to identify, measure, monitor and control risks arising from business or business activities. The purpose of risk management is to minimize the impact of losses on the organization and maintain the maximum value that exists in all organizational activities and to improve the performance of an organization/company.

In 2021, the risk management function which was originally carried out by the Corporate Planning and Risk Management Division under the President Director was changed to being carried out by the Risk Management Division under the Finance and Management Director. The Risk Management Unit identifies, evaluates, and carries out hedging activities for risks concerning production, financial, HR, OHS, compliance, legal, external, marketing, reputation, bribery, IT and output.

In 2021, the implementation of risk management in the Company has been at the development stage, where the organization has built a repeating pattern in carrying out risk management governance but its activities have not been formally defined and documented properly, so it is necessary to increase consistency in its implementation.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION GOVERNANCE

RKAP 2021

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021, rencana kerja Divisi Teknologi Informasi secara umum pada 2021 diuraikan sebagaimana berikut

RKAP 2021

Based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021, the general work plan of the Information Technology Division in 2021 is described as follows:

NO.	PROGRAM KERJA	TARGET
1	Customer Service	Membangun aplikasi passenger information system di titik keberangkatan pelanggan, seperti kemayoran, Gambir, pool Lampung, Bandung dan Pontianak <i>Develop a passenger information system applications at customer departure points, such as Kemayoran, Gambir, Lampung, Bandung and Pontianak pools</i>
2	Operation Bus System	Membangun sistem aplikasi operasional bus di Bandara Soekarno-Hatta <i>Develop a bus operational application system at Soekarno-Hatta Airport</i>
3	SIMA Keuangan yang terintegrasi	Membangun aplikasi ERP DAMRI untuk diterapkan di Kantor Pusat dan semua cabang <i>Develop a DAMRI ERP application to be implemented at the Head Office and all branches</i>
4	Digitalisasi Pajak	Aplikasi Pembayaran dan pelaporan pajak secara tersistem dan terintegrasi dengan internal DAMRI <i>Payment application and tax reporting systemic and integrated with internal DAMRI</i>
5	Integrasi aplikasi payroll, FORCA, dan pajak	Membuat API untuk pengintegrasian antar aplikasi <i>Creating APIs for integration between applications</i>
6	Penguatan Infrastruktur Jaringan Kantor Pusat	Pembelian 9 perangkat access point (harga per unit Rp1.700.000) kemudian dilakukan penggantian perangkat access point yang sudah usang dan pemasangan pada titik baru <i>Purchase of 9 access point devices (price per unit Rp. 1,700,000) to replace the old access point devices and to install it at new points</i>
7	Penguatan infrastruktur jaringan Cabang (Bandwidth Internet, VPN, Network Device)	Sentralisasi manajemen jaringan komputer Perum DAMRI (Mikrotik RB750G untuk SD WAN / L2TP), agar akses dari dan ke aplikasi DAMRI lebih aman dan TI Kantor Pusat bisa memajemen akses internet yang ada di kantor cabang sehingga dapat digunakan secara optimal <i>Centralized management of Perum DAMRI's computer network (Mikrotik RB750G for SD WAN / L2TP), so that access to and from the DAMRI application is safer and Head Office IT can manage internet access at branch offices so that it can be used optimally</i>

NO.	PROGRAM KERJA	TARGET
8	Penguatan Security Infrastruktur Jaringan, Server dan Aplikasi (Fire-wall, Monitoring & Alert, Vulnerability)	BuRpsuite professional Penetration Test tools; Security Center Alibaba cloud; Domain *.damri.co.id; Rapid SSL *.damri.co.id. <i>BuRpsuite professional Penetration Test tools; Alibaba cloud Security Center; Domain *.damri.co.id; Rapid SSL *.damri.co.id</i>
9	Vulnerability Management	Membangun sistem keamanan yang terpusat dalam memantau celah keamanan pada server, jaringan, device user dan aplikasi DAMRI <i>Build a centralized security system to monitor security vulnerabilities on servers, networks, device users and DAMRI applications</i>
10	Alat Pendukung Toolkit Jaringan dan Server	Dapat memenuhi kebutuhan alat dalam melakukan tracking/ maintenance/ instalasi jaringan <i>Able to meet equipment needs to be able to do tracking/maintenance/network installation</i>
11	Control and Evaluation	Dilakukan pada perangkat berikut: • USB Wireless Adapter • Switch 8 Port • Switch 16 Port • Perkabelan listrik • Bracket ubahan • Konverter DVI to HDMI • Kabel HDMI <i>Performed on the following devices:</i> • USB Wireless Adapter • 8 Port Switch • 16 Port Switch • Electrical wiring • Custom bracket • DVI to HDMI converter • HDMI cable
12	Subscribe Development Software Tools (Post-man, Google API, Office 365, Apple Developer)	• Menggunakan layanan MAP dari Google API untuk absensi • Berlangganan Office 365 Selama 1 Tahun • Pendaftaran untuk iOS Developer • <i>Using MAP service from Google API for attendance monitoring</i> • <i>Subscribe to Office 365 for 1 year</i> • <i>Registration for iOS Developer</i>
13	Video Conference	Sewa akun Zoom selama 1 tahun <i>Rent a Zoom account for 1 year</i>
14	E-ticketing	• Pembuatan ticket box untuk beberapa cabang • Pengadaan MPOS untuk kebutuhan penjualan tiket • <i>Creating ticket boxes for several branches</i> • <i>Procurement of MPOS for ticket sales</i>
15	Fleet Management	• Mempermudah dalam pelacakan armada dan perhitungan kilometer dengan menggunakan GPS • Menyediakan harddisk untuk menunjang penyimpanan data kerja. • <i>Simplify fleet tracking and kilometer calculation using GPS</i> • <i>Provide hard disk to support work data storage.</i>
16	Komunikasi	Menyediakan alat komunikasi antar armada dan koordinator lapangan <i>Providing tools of communication for field coordinators with fleets</i>
17	Sistem monitoring dan ruang kontrol	• Sistem CCPD (Command Centre Perum DAMRI) • Video Wall System (Screen, PC, Software) • Control Room • <i>CCPD system (Command Center Perum DAMRI)</i> • <i>Video Wall System (Screen, PC, Software)</i> • <i>Control Room</i>

Rencana Pengembangan TI

Berikut rencana pengembangan Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2021, berdasarkan penjabaran Master Plan TI 2020-2024.

Sub Divisi TI Pengembangan

- 1) *Fleet Management System*
 - SIMA Operasi
 - SIMA Teknik
 - Rampcheck
 - Passenger Information System
 - LMB Online
- 2) *Sales Management System*
 - Pengembangan DAMRI Apps Multi-Platform
 - Pengembangan E- Ticketing System
 - Sales Planning System
 - Pengembangan SIMA Logistic
- 3) *Financial Management System*
 - Pembuatan SIMA Keuangan (ERP)
 - Digitalisasi Pajak
- 4) *Human Resource Information System*
 - My DAMRI
 - Pembuatan Sistem CAT (Computer Assisted Test)
 - Pengembangan Aplikasi HRIS
- 5) *Office Digitalization System*
 - Pengembangan E- Office
 - Pembuatan E- Procurement
- 6) *Customer Relationship Management*
- 7) *Management Reporting*

Sub Divisi TI Operasi

- 1) *Jaringan dan Infrastruktur*
 - Pembaruan ISP jaringan server dan Kantor Pusat
 - Restruktur dan migrasi server DAMRI Pusat dan cabang
 - Restruktur dan migrasi server cloud
 - DAMRI Drive
 - Virtual meeting
 - Restruktur IP Configuration Kantor Pusat

IT Development Plan

The following is the development plan for the Information Technology Division in 2021, based on the description of the 2020-2024 IT Master Plan.

IT Development Sub Division

- 1) *Fleet Management System*
 - SIMA Operation
 - SIMA Engineering
 - Rampcheck
 - Passenger Information System
 - LMB Online
- 2) *Sales Management System*
 - Multi-Platform DAMRI Apps Development
 - Development of E-Ticketing System
 - Sales Planning System
 - SIMA Logistics Development
- 3) *Financial Management System*
 - Making SIMA Finance (ERP)
 - Tax Digitization
- 4) *Human Resource Information System*
 - My DAMRI
 - Making CAT (Computer Assisted Test) System
 - HRIS Application Development
- 5) *Office Digitalization System*
 - E-Office Development
 - E-Procurement Creation
- 6) *Customer Relationship Management*
- 7) *Management Reporting*

IT Operations Sub Division

- 1) *Network and Infrastructure*
 - ISP network server and Headquarters update
 - Restructuring and migration of DAMRI Headquarter and branch offices server
 - Cloud server restructuring and migration
 - DAMRI Drive
 - Virtual meeting
 - Headquarters IP Configuration Restructuring

- 2) Security
- VPN Client
 - Bandwidth management dan filter internet
 - Standarisasi keamanan akses server
 - Standarisasi backup file and DB Server
 - Monitoring penggunaan internet
 - Alert and monitoring jaringan dan server

Rencana Pengembangan TI 2021

PPA Online GPS CCTV

Data rangkuman pemasangan sudah terealisasi 56 unit di Basoetta, 17 unit di Bandung, 19 unit di Pontianak, 10 unit, Lampung, dan 20 sisa 24 unit yg belum terpasang.

DILS

Sudah 15 Cabang yang menjalankan sistem DILS, yaitu Pontianak, Lampung, Bandung, Bogor, Logistik, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Purwokerto, Cilacap, Samarinda, Tanjung Selor, Banjarmasin, dan Bengkulu.

Digitalisasi E-Ticketing Agen dengan Perangkat MPOS (Mobile Point Of Sales)

Salah satu masalah yang muncul terkait biaya pengadaan di masing-masing agen karena perangkat yang dibutuhkan harus sepaket, di antaranya perangkat komputer, printer *thermal* (untuk mencetak tiket), printer biasa (untuk cetak manifest, AP3 untuk keberangkatan).

Payment Channel dan OTA

Kanal pembayaran yang sudah berjalan adalah non-prabayar, yaitu VA Mandiri, kartu debit/kartu kredit, Gopay, LinkAja, dan OVO. Penambahan yang sudah berjalan di tahun ini adalah Indomaret, ShopeePay, dan DANA. Rencana Penambahan sesuai dengan pengembangan kerja sama dari Divisi Komersial yaitu Alfamart, VA BRI, Pos Indonesia. Kanal pembayaran untuk prabayar yang sedang dikembangkan adalah Brizzi, e-Money, Flash, dan TabCash.

- 2) Security
- VPN Client
 - Bandwidth management and internet filters
 - Standardization of server access security
 - Standardization of backup files and DB Server
 - Internet usage monitoring
 - Alert and monitoring of network and server

IT Development Plan 2021

PPA Online GPS CCTV

The summary data for the installation has been realized 56 units in Basoetta, 17 units in Bandung, 19 units in Pontianak, 10 units, Lampung, and the remaining 20 units that have not been installed.

DILS

15 branches have the DILS system running, namely Pontianak, Lampung, Bandung, Bogor, Logistics, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Purwokerto, Cilacap, Samarinda, Tanjung Selor, Banjarmasin, and Bengkulu.

Digitizing E-Ticketing Agent with MPOS (Mobile Point Of Sales) Devices

One of the problems that arise is related to procurement costs at each agent because the equipment needed must be in a package, including computers, thermal printers (to print tickets), ordinary printers (to print manifests, AP3 for departures).

Payment Channels and OTA

The payment channels that are already running are non-prepaid, namely VA Mandiri, debit/credit cards, Gopay, LinkAja, and OVO. Additional payment channels have been added this year, namely Indomaret, ShopeePay, and DANA. Planned addition is in accordance with the development of cooperation from the Commercial Division, namely Alfamart, VA BRI, Pos Indonesia. Payment channels for prepaid that are being developed are Brizzi, e-Money, Flash, and TabCash.

Online Travel Agent (OTA)

OTA yang telah berjalan adalah Traveloka, Redbus. Ada rencana penambahan kerja sama dari Divisi Komersial, yaitu Indomaret (UAT Production), Alfamart (UAT Development), dan PT Pos Indonesia.

Pengembangan Sistem Secara In-house

SIMA Teknik

Pembuatan sistem SIMA Teknik terbaru. Terdapat pembaruan dari sisi keamanan, bahasa pemrograman maupun dari desain sistem. Sedang proses migrasi data dari sistem lama ke baru dengan target sosialisasi pada triwulan ketiga.

Rekrutmen

Website untuk publik digunakan untuk publikasi lowongan pekerjaan di DAMRI.

CAT

Sistem untuk tes daring calon pegawai DAMRI maupun tes kemampuan pegawai DAMRI yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan situs Recruitment.

HRIS

Sistem Aplikasi yang mengakomodasi keseluruhan data karyawan. Pengembangan fokus ke Laporan Nominatif serta Administrasi Pegawai.

Sima Umum

Sistem Administrasi Barang (Permintaan, Persetujuan, Stock, Inventarisasi).

E-Office

Sistem yang mengakomodasi kebutuhan administrasi surat-menyurat di lingkungan DAMRI. Untuk pengembangan adalah optimalisasi fitur Search, Auto Format Compose Surat, dan pengambilan nomor dengan kewajiban harus mengunggah draf surat.

Online Travel Agent (OTA)

OTAs that have been running are Traveloka, Redbus. The Commercial Division have plans to add more co-operation, namely with Indomaret (UAT Production), Alfamart (UAT Development), and PT Pos Indonesia.

In-house System Development

SIMA Technical

Making the latest Technical SIMA system. There are updates in terms of security, programming language and system design. In the process of migrating data from the old to the new system, with the target of socialization in the third quarter.

Recruitment

The website for the public is used for the publication of job vacancies at DAMRI.

CAT

System for the online test of prospective DAMRI employees as well as to test the capability of DAMRI employees, which will be integrated with the Recruitment website.

HRIS

Application system that accommodates all employee data. Development of focus on Nominative Reports and Employee Administration.

General Sima

Goods Administration System (Request, Approval, Stock, Inventory).

E-Office

A system that accommodates the administrative needs of correspondence within DAMRI. For development is the optimization of the Search feature, Auto Format Compose Letters, and retrieval of numbers with the obligation to upload a draft letter.

Rampchek

Sistem untuk melakukan pengecekan kendaraan (QA dan QC). Saat ini sistem sudah terintegrasi dengan FMS untuk data bus, yang selanjutnya akan dilakukan integrasi dengan SIMA Teknik dan SIMA Operasi.

CRM

Customer Relationship Management adalah sistem yang mengakomodasi segala pelaporan dari pelanggan, proses penyelesaiannya, serta penyerahan terhadap divisi yang bersangkutan.

Rampchek

A system for checking vehicles (QA and QC). Currently the system has been integrated with FMS for bus data, which will then be integrated with SIMA Teknik and SIMA Operations.

CRM

Customer Relationship Management is a system that accommodates all reports from customers, the completion process, and submission to the division concerned.

Perkembangan Kerja Sub-Divisi TI

IT Sub-Division Work Development

Pengembangan

Development

PROGRAM KERJA Work Program	PENCAPAIAN Achievement
SIMA Operasi <i>SIMA Operations</i>	Penambahan kode flag pada master trayek <i>Adding flag code to master routes</i>
SIMA Teknik <i>SIMA Technical</i>	Pembuatan laporan bahan bakar <i>Creating gasoline report</i>
SIMA Umum <i>SIMA General</i>	Master barang <i>Master goods</i>
SIMA Keuangan <i>SIMA Financial</i>	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Rampcheck	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
CRM	Pembaharuan konsep sistem - sosialisasi ke cabang <i>Update to system concept - socialization to branch offices</i>
E-Budgeting	Pengembangan system <i>System development</i>
DILS	Sosialisasi untuk cabang yang belum menjalankan <i>Socialization to branch offices that has yet to implement</i>
DAMRI Apps	UAT FAQ & Alfamart point menunggu PKS selesai - payment Pos UI <i>UAT FAQ & Alfamart point waiting completion of PKS - payment Pos UI</i>
E-Ticketing	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Web Reservation	Perbaikan tampilan jam keberangkatan - phone mandatory <i>Improvement in the display of departure time - phone mandatory</i>
Rekrutmen <i>Recruitment</i>	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
MPOS	Penambahan fitur agen <i>Adding agent feature</i>

PROGRAM KERJA Work Program	PENCAPAIAN Achievement
Dashboard Sales	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Sales Plan	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Payment	Pengembangan Android - UAT Pos Indonesia (Payment) - UAT Briva Online <i>Development of Android - UAT Pos Indonesia (Payment) - UAT Briva Online</i>
OTA Integration	UAT Indomaret Production
E-Office	Optimalisasi fitur search - auto format compose surat - mengambil nomor harus upload draf surat <i>Optimization of search feature - auto format compose of letter - taking a number must upload draft of letter</i>
HRIS	Laporan nominatif - administrasi pegawai <i>Nominative report - employee administration</i>
ACT	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Website DAMRI	Tidak ada perubahan <i>No change</i>
Inventaris kerja sama <i>Cooperation Inventory</i>	Sudah digunakan Divisi Hukum <i>Has been used by the Legal Division</i>
Management Report	Dalam proses integrasi seluruh dashboard <i>In integration process all dashboard</i>
Fleet Monitoring	Tahap diskusi awal terkait rancangan system <i>Initial discussion stage relating to system design</i>

Operasi

Operation

PROGRAM KERJA Work Program	PENCAPAIAN Achievement
Survei Kepuasan TI <i>IT Satisfaction Survey</i>	Dilakukan setiap bulan dengan hasil data untuk analisis permasalahan. <i>Conducted every month whereby the resulting data is utilized for problem analysis</i>
Promo BRI Botani	100% menyelesaikan tahap training lapangan titik Botani dan Basoetta <i>100% completing field training Botani dan Basoetta point</i>
Project D'Kirim.Com	Sudah berjalan di Cabang Logistik dan Surakarta, menyusul Cabang Surabaya selesai piloting dan menunggu PKS untuk kelanjutan kerja sama. <i>Operational in Logistic and Surakarta Branch, followed by Surabaya Branch completing piloting and waiting for PKS for follow up to cooperation.</i>
Mapping Akun Email Berdasarkan Jabatan <i>Mapping of Email Account Based on Position</i>	Koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan. <i>Coordination with Corporate Secretary.</i>
Analysis Cost Benefit Cloud Server X On Premise Server	Telah selesai dianalisis sesuai dengan kebutuhan. <i>Analysis completed in accordance to need.</i>

PROGRAM KERJA Work Program	PENCAPAIAN Achievement
Profil Risiko Divisi TI <i>Risk Profile IT Division</i>	Dilakukan setiap bulan dengan hasil data untuk analisis permasalahan. <i>Conducted every month with resulting data utilized for problem analysis.</i>
Analisis Cost And Benefit System Pengawasan Armada Antara	Telah selesai dianalisis sesuai dengan kebutuhan. <i>Analysis completed in accordance to need.</i>
Penguatan Keamanan Jaringan <i>Strengthening of Network Security</i>	• Email Security Barracuda (Selesai/<i>Done</i>) • Firewall Alibaba (Selesai/<i>Done</i>) • Firewall Fortinet (Selesai/<i>Done</i>)
Workshop dan Training TI <i>Workshop and IT Training</i>	Telah selesai dilakukan dan menunggu rencana kerja yang akan disusun oleh Divisi Kapital Manusia. <i>Completed and waiting for work plan that will be prepared by Human Capital Division</i>
Wifi on Bus	Menunggu persetujuan Kajian ISP dari Cabang Lampung yang ditandatangani oleh GM Lampung. <i>Waiting for ISP Study approval from Lampung Branch, signed by GM Lampung</i>
Telegram Alert Monitoring	Telah selesai dikerjakan sehingga Telegram menjadi media untuk pemantauan jaringan dan perangkat server DAMRI. <i>Completed, Telegram becoming the platform for network monitoring and DAMRI server equipment</i>
Siem (Server)	Telah selesai dianalisis sesuai dengan kebutuhan. <i>Analysis completed in accordance to need.</i>
Internet Call Center	Telah selesai dilakukan pemasangan internet untuk area call center. <i>Internet installed for call center area.</i>
Pembaruan OS dan Security Server <i>Update of OS and Security Server</i>	Telah selesai disesuaikan dengan permintaan Divisi Teknologi Informasi. <i>Adjusted in accordance to request from Information Technology Division.</i>
POC SIM Card IoT	Proses pencabutan perangkat karena tidak dapatkan solusi sinyal yang baik. <i>Equipment removal process due to not finding the solution to having good signal.</i>
Risk Awareness	Pengisian dilakukan oleh manajemen Divisi Teknologi Informasi. <i>Conducted by Information Technology Division.</i>
Pengadaan Cloud <i>Cloud Procurement</i>	Izin Prinsip menunggu persetujuan sesuai dengan format KAK yang telah disesuaikan. <i>Principle Permit waiting approval in accordance to the adjusted KAK format.</i>
Pengembangan Aplikasi E-Meeting Proses Review TI Pengembangan <i>E-Meeting Development Process Review IT Development</i>	Pengembangan sudah berjalan 50% dan menunggu form SIT dari Sub-Divisi Pengembangan. <i>Development has reached 50% and waiting for SIT form from Development Sub-Division.</i>
Project Integrasi KAI KAI Integration Project	Proses menunggu UAT Prod. <i>Process waiting for UAT Prod.</i>
Instalasi Server Development <i>Server Development Installation</i>	Proses pengerjaan. <i>In progress.</i>

PROGRAM KERJA Work Program	PENCAPAIAN Achievement
Tata Kelola Teknologi Informasi DAMRI 2021-2026 <i>Information Technology Management DAMRI 2021-2026</i>	Dalam tahap tinjauan seluruh Divisi DAMRI. <i>In review stage of all DAMRI Division.</i>
Tindak Lanjut Penarikan MPOS Wizard dan Pengadaan MPOS Baru <i>Follow Up to MPOS Wizard Withdrawal and Procurement of New MPOS</i>	Sudah bersurat ke cabang Basoetta dan mendapat respons dengan melakukan pengadaan bertahap penggantian peralatan perbulan 4 unit. <i>Letter has been sent to Basoetta, which responded with procurement of equipments done in stages, replacing 4 units per month.</i>
Manajemen Kontrak Aplikasi <i>Contract Management Application</i>	Dalam perkembangan: • DILS (komersial) • E-Budgeting (restruktur) • E-Office (restruktur) • HRIS <i>In development:</i> • DILS (commercial) • E-Budgeting (restructure) • E-Office (restructure) • HRIS
GPS Only	Pemasangan berkurang menjadi 491 unit, ditunda 217 unit, aktif 275 GPS di Basoetta, Surabaya, dan Logistik <i>Installation reduced to 491 units, postponed 217 units, active GPS 275 units in Basoetta, Surabaya, and Logistik</i>
Pengadaan MPOS <i>MPOS Procurement</i>	Penjadwalan untuk pertemuan dengan Basoetta dan vendor untuk pengadaan MPOS di Basoetta sebanyak 30 unit. Total pembelian MPOS hingga Desember 2021 sebanyak 22 unit dari 60 Unit. Penyelesaian PKS skema pembelian rampung. Proses penambahan skema sewa dalam pengadaan. <i>Meeting scheduled between Basoetta and vendor for procurement of MPOS in Basoetta for 30 units. Total MPOS procurement until December 2021 is 22 units from 60 units. PKS procurement scheme completed. Process of adding rent scheme in procurement.</i>
SK Komite <i>Decree Committee</i>	Dalam tahapan tinjauan dan perbaikan oleh Direksi DAMRI. <i>Review and improvement stage by DAMRI Board of Directors.</i>
Replikasi Basis Data Lokal dan Cloud <i>Replication of Local and Cloud Data Basis</i>	Ditahan. <i>On hold.</i>
Penguatan Jaringan Pusat Pengadaan Poin Akses <i>Strengthening of Central Network Procurement Access Point</i>	• Menunggu proses pengadaan oleh Divisi Layanan Pengadaan • Perawatan Access Point yang sudah ada • Membuat desain app yang baru setiap lantai dengan menggunakan Poin Akses yang tidak kedaluwarsa • <i>Waiting for procurement process by Procurement Services Division</i> • <i>Maintenance of existing Access Point</i> • <i>Creating new design app for each floor using Poin Access that has not expired</i>
Pemantauan GPS dan CCTV <i>GPS and CCTV Monitoring</i>	• Pemasangan CCTV di Banjarmasin sedang dilakukan koordinasi dengan Cabang Bandung dan Divisi Teknik untuk MDVR yang salah pengiriman • Estimasi pemasangan CCTV di Banjarmasin pada Desember minggu ke-3 • <i>CCTV Installation in Banjarmasin is in progress, in coordination with Bandung Branch and Technical Division for MDVR that was shipped incorrectly</i> • <i>CCTV installation estimation in Banjarmasin in week 3 for December</i>



PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pada tahun 2021, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan pengadaan untuk alat produksi, pengadaan umum, dan pengadaan bidang teknologi informasi.

In 2021, the Goods and Services Procurement Division has carried out procurements for production equipment, general procurement, and procurement of information technology.

TABEL PENGADAAN BARANG DAN JASA 2021

TABLE OF 2021 PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

NO	PENGADAAN Procurement	UNIT PENGGUNA User Unit	NOMOR KONTRAK Contract Number	TANGGAL KONTRAK Contract Date	NILAI KONTRAK Contract Value
1.	Pengadaan Lisensi Barracuda Email Security Gateway <i>Procurement of Barracuda Email Security Gateway License</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	3413.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	11 Januari 2021	37.400.000,00
2.	Pengadaan Pendampingan Kuasa Hukum Duplikasi Tiket Penumpang di Kantor Cabang Angkutan Basoetta <i>Procurement of Legal Assistance for Duplication of Passenger Tickets in Basoetta Transportation Branch Office</i>	Divisi SDM <i>Human Resource Division</i>	3416.01/KU.103/SPK/00/LP/2021	29 Januari 2021	45.000.000,00
3.	Addendum II HR Database dan Payroll Sistem <i>Addendum II HR Database and Payroll System</i>	Divisi SDM <i>Human Resource Division</i>	3420.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	9 Februari 2021	-
4.	Pengadaan Konsultan Jasa Penilaian Aset 66 unit Kendaraan Articulated Bus koridor 1 & 8 <i>Procurement for Consultancy Services for Assessment of Asset 66 units Articulated Bus Vehicles corridor 1 & 8</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Planning</i>	3424.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	16 Februari 2021	33.495.000,00

5.	Perpanjangan Pengadaan Layanan Nomor Akses Center 1500825 <i>Extension of Procurement for Access Number Center 1500825 Services</i>	Divisi Pelayanan <i>Services Division</i>	3432.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	02 Maret 2021	252.000.000,00
6.	Pengadaan Jasa Competency Training Perum DAMRI <i>Procurement for Competence Training Services Perum DAMRI</i>	Divisi SDM <i>Human Resources Division</i>	3435.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	08 Maret 2021	49.500.000,00
7.	Pengadaan Sewa Menyewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Natuna Tahun 2021 <i>Procurement for Rental of Production Equipment for Pioneer Transportation of Goods in Natuna Year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1Q3sK014xHM-DUcpb-9z202nUw9-lu9eZho/view?usp=sharing	31 Maret 2021	1.626.800.000,00
8.	Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Natuna Tahun 2021 <i>Pioneer Goods Handling Work in Natuna Year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1YYRwF-FRe70k0cQY9yUD-7DPKef0tBa0Uv/view?usp=sharing	31 Maret 2021	612.500.000,00
9.	Pengadaan Sewa menyewa Alat Produksi untuk angkutan Barang Perintis di Merauke Tahun 2021 <i>Procurement for rental of Production Equipment for Pioneer Transportation of Goods in Merauke Year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1Jd6yV2B-solS00oyrtRU32Hvz-JMUeDjmb/view?usp=sharing	10 April 2021	150.000.000,00
10.	Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Merauke Tahun 2021 <i>Goods handling</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1NWVRnv-v83loREmCVn08BZi-ykjYDsQpM7/view?usp=sharing	10 April 2021	247.500.000,00
11.	Pengadaan Jasa Penerjemah Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris untuk keperluan Annual Report Tahun 2020 <i>Procurement of Translator Services from Indonesian Language to English Language for the purpose of 2020 Annual Report</i>	Divisi Sekretariat Perusahaan <i>Corporate Secretariat Division</i>	3442.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	15 April 2021	11.000.000,00

12.	Adendum Pertama Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Pajak <i>First Addendum Work Extension Procurement of Tax Application</i>	Divisi Keuangan <i>Financial Division</i>	3454.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	26 April 2021	
13.	Perpanjangan Sewa Program Sistem Informasi Keuangan Perum DAMRI <i>Rental Extension of Financial Information System Program Perum DAMRI</i>	Divisi Keuangan <i>Financial Division</i>	3458.01/KU.103/SPK/00/LP/2021	03 Mei 2021	171.600.000,00
14.	Pengadaan Jasa Perencanaan Keuangan (<i>Finance Planner</i>) <i>Procurement of Finance Planner</i>	Divisi Keuangan <i>Financial Division</i>	3480.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	01 Juni 2021	44.000.000,00
15.	Pengadaan Photoshoot Dewan Pengawas dan Direksi Perum DAMRI <i>Procurement of DAMRI Board of Trustees and Directors Photoshoot</i>	Divisi Sekretariat Perusahaan <i>Corporate Secretariat Division</i>	008/SPMK/DLP-DAMRI/VI/2021	04 Juni 2021	7.000.000,00
16.	Pengadaan Jasa Penilaian Appraisal 89 unit Alat produksi tidak Produktif <i>Procurement of Assessment Services Appraisal of 89 units of production equipment that are no longer productive</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Planning Division</i>	3644.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	18 Juni 2021	130.000.000,00
17.	Pengadaan Jasa Penilaian Aset 6 unit Lokasi Tanah Perum DAMRI <i>Procurement of Asset Assessment Services of 6 units of Land Location Perum DAMRI</i>	Divisi Umum <i>General Division</i>	3465.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	18 Juni 2021	74.800.000,00
18.	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Timika Tahun 2021 <i>Procurement for Rental of Production Equipment for Pioneer Goods Transportation in Timika Year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1i-Mwea_Vm47N_C-zS3e3SZlp-W9ljAx6h/view?usp=sharing	21 Juni 2021	487.500.000,00
19.	Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Timika Tahun 2021 <i>Pioneer Goods Handling Work in Timika Year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1cBcq-jDMpbYRiTACR6uS-0b0XNXwc2Qgcm/view?usp=sharing	21 Juni 2021	159.667.200,00

20.	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika <i>Procurement Rental Production Equipment for National Economic Recovery (PEN) Activities through National Tourism Strategic Area (KSPN) in Mandalika</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1Yh-jOTy1RDsIMZ01AzZN-r7ghWSWtQna07/view?usp=sharing		810.000.000,00
21.	Perpanjangan Pengadaan Minyak Pelumas <i>Extension of Procurement for Lubricating Oil</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Facility Division</i>	3472.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	06 Juli 2021	Sesuai kebutuhan kantor cabang <i>In accordance to the needs of Branch offices</i>
22.	Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba <i>Procurement of Rental for Production Equipment for National Economic Recovery (PEN) Activity through National Tourism Strategic Area (KSPN) in Danau Toba</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development Division</i>	https://drive.google.com/file/d/1cde-0hecnKS2t-FDNW-Z1u5UBbHmP9yKva/view?usp=sharing	02 Agustus 2021	270.000.000,00
23.	Pengadaan Mobile Point Of Sales (MPOS) Perum DAMRI <i>Procurement of Mobile Point of Sales (MPOS) Perum DAMRI</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	3481.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	03 Agustus 2021	459.800.000,00
24.	Perpanjangan Pengadaan Lisensi Fortiguard Perum DAMRI <i>Extension of Procurement of Fortiguard License Perum DAMRI</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	IN/RA0248 / 030/SPPBJ/DLP-DAMRI/VIII/2021	26 Agustus 2021	22.550.000,00
25.	Pengadaan Pembangunan Gedung Mess, Ruang Arsip, Ruang Pantry dan Mushola Perum DAMRI Kancab Pangkal Pinang <i>Procurement for the development of the Mess Building, Archive Room, Pantry, and Mushola Perum DAMRI Kancab Pangkal Pinang</i>	Divisi Umum <i>General Division</i>	3488.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	19 Agustus 2021	249.000.000,00

26.	Pengadaan Jasa Pengamanan Kancab Basoetta <i>Procurement for Security Services Kancab Basoetta</i>	Kantor Cabang Baso <i>Basoetta Branch Office</i>	3490.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	24 Agustus 2021	324.348.000,00
27.	Pengadaan Pekerjaan Pengamanan Kantor Cabang Lampung di Pemasaran Stasiun Gambir <i>Procurement for Office Security Lampung Branch in Stasiun Gambir Marketing</i>	Kantor Cabang Bandar Lampung <i>Bandar Lampung Branch Office</i>	3505.00/UM.001/SPK/00/LP/2021	23 September 2021	162.852.000,00
28.	Pengadaan Server <i>Procurement for Server</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	3516.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	08 Oktober 2021	180.500.000,00
29.	Adendum Pertama Jasa Assessment Potensi dan Kompetensi Karyawan Perum DAMRI <i>First Addendum Assessment Services of Employee Potential and Competence Perum DAMRI</i>	Divisi SDM <i>Human Resources Division</i>	3517.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 01/ADN01-SPK/MOV/X/2021	12 October 2021	2.550.000,00
30.	Pengadaan Jasa Advokat untuk Kantor Pusat <i>Procurement for Legal Services for Head Office</i>	Divisi Hukum <i>Legal Division</i>	3524.00/TF.101/SPK/00/LP/2021	29 October 2021	360.000.000,00
31.	Pengadaan spare parts kendaraan merk Isuzu <i>Procurement of spare parts for vehicles merk Isuzu</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Planning Division</i>	3525.00/TF.101/SPK/00/LP/2021	02 November 2021	Sesuai kebutuhan kantor Cabang
32.	Pengadaan KJPP Appraisal Penghapusbukuan Alat Produksi (bus dan truk) 349 unit <i>Procurement for KJPP Appraisal Asset Write-Off of Production Equipment (buses and trucks) 349 units</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Planning Division</i>	3527.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0189/UM.GEAR/2021	11 November 2021	293.700.000,00

33.	Sewa alat produksi untuk kegiatan pelayanan angkutan antarmoda World Superbike (WSBK) Mandalika tahun 2021 <i>Rental of production equipment for World Superbike intermodal transportation services year 2021</i>	Divisi Pengembangan Usaha <i>Business Development</i>	3462.00/KL.004/SPK/ D3.O/GM/ 2021	17 November 2021	543.250.000,00
34.	Pengadaan Jasa KAP Audit Keuangan Tahun 2021 <i>Procurement for KAP Financial Audit Year 2021</i>	Divisi Akuntansi <i>Accounting Division</i>	3530.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & A.151/XI/2021/PD	19 November 2021	430.000.000,00
35.	Pengadaan jasa konsultan untuk studi kelayakan peremajaan armada bus dan pengadaan fasilitas pendukung (TI dan perbengkelan) milik Perum DAMRI atas rencana fasilitas kredit investasi proyek yang akan dilakukan penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) <i>Procurement of consultant for feasibility study of rejuvenation of bus fleets and procurement of supporting facilities (IT and workshop) owned by Perum DAMRI based on the planned credit facility for project investment which will receive a guarantee from PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)</i>	Divisi Perencanaan Korporasi <i>Corporate Planning Division</i>	3533.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	30 November 2021	80.000.000,00
36.	Pengadaan Jasa Penilaian Aset BPKB (bus) 165 unit <i>Procurement for Appraisal of BPKB asset (bus) 165 units</i>	Divisi Keuangan <i>Financial Division</i>	3535.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 220/2.0044-00/ANA-U/NL/XII/2021	09 December 2021	132.000.000,00
37.	Pengadaan Jasa Konsultan Pendampingan Perencanaan Keuangan dan Aktivitas pengajuan peminjaman Dana <i>Procurement of Consultant Services for Financial Planning and Loan Funds Proposal Activity</i>	Divisi Perencanaan Korporasi <i>Corporate Planning Division</i>	3532.01/KU.103/SPK/00/LP/2021	10 December 2021	42.352.200,00
38.	Pengadaan Perangkat Sistem Monitoring, Keamanan dan Perilaku Penumpang <i>Procurement of Monitoring System Equipment and Passengers Behavior</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	044/SPPBJ/DLP-DAMRI/XII/2021	04 December 2021	85.000.000,00

39.	Pengadaan Jasa Assessment Risk Management Maturity pada Perum DAMRI <i>Procurement for Assessment Risk Management Maturity Services Perum DAMRI</i>	Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	3540.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	17 December 2021	75.000.000,00
40.	Perpanjangan Lisensi Barracuda Email Security Perum DAMRI <i>Extension of Barracuda Email Security Perum DAMRI License</i>	Divisi TI <i>IT Division</i>	3542.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	23 Desember 2021	115.566.000,00
41.	Perpanjangan Layanan Manage Service Contact Center Perum DAMRI <i>Extension of Manage Service Contact Center Services Perum DAMRI</i>	Divisi Pelayanan <i>Services Division</i>	3629.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	31 Desember 2021	303.697.680,00
42.	Pengadaan jasa konsultan aktuarial untuk PSAK 24 tahun 2021 <i>Procurement for actuarial services for PSAK 24 year 2021</i>	Divisi SDM <i>Human Resources Division</i>	3630.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	31 Desember 2021	39.600.000,00
43.	Perpanjangan pengadaan minyak pelumas <i>Extension for procurement of lubricating oil</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fastek <i>Development and Technical Facility Planning Division</i>	3631.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	31 Desember 2021	Sesuai kebutuhan kantor cabang <i>In accordance to the needs of Branch offices</i>
44.	Jasa perawatan dan perbaikan alat produksi merk hino <i>Maintenance and repair services of production equipment merk hino</i>	Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik <i>Development and Technical Facility Planning Division</i>	3631.00/KU.103/SPK/00/LP/2021	31 Desember 2021	Sesuai kebutuhan kantor cabang <i>In accordance to the needs of Branch offices</i>



AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Akuntan Publik, Nama Akuntan, dan Upah Periode Lima Tahun Terakhir

Public Accountant, Accountant Names and Fee in The Last Five Years

TAHUN Year	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant	KANTOR AKUNTAN PUBLIK Public Accounting Firm	PERIODE Period	UPAH (Rp) Fee (Rp)
2021	Drs. Sikanto Pawiroatmodjo, Ak., CA, ACPA, MM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Kedua Second	430.000.000
2020	Drs. Sikanto Pawiroatmodjo, Ak., CA, ACPA, MM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Pertama First	396.000.000
2019	Drs. Pamudji, Ak., CA, CPA	Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan	Pertama First	415.666.000
2018	Dra. Ellua Noorlisyati, Ak., CPA, CA	Ellya Noorlisyati & Rekan	Pertama First	319.441.000
2017	Indra Soesetiawan, Ak., CPA, CA	Djoko, Sidik, & Indra	Kedua Second	269.775.000

Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik

- Melaksanakan audit prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI (Key Performance Indicator) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Melaksanakan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2021.
- Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Pengendalian Internal tahun buku 2021.
- Melaksanakan audit atas Pengendalian Internal tahun buku 2021.
- Melaksanakan audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Scope of Assignment of the Public Accounting Firm

- Carry out procedural audits of the Report on the Results of Performance Evaluation and Achievement of KPI (Key Performance Indicator) for the financial year ended 31 December 2021.
- Conduct an audit of the Financial Statements for the 2021 financial year.
- Conduct an audit of compliance with laws and regulations on Internal Control for the 2021 financial year.
- Conduct an audit of Internal Control for the 2021 financial year.
- Conduct an audit of Financial Statements for the Partnership and Community Program for the financial year ended 31 December 2021.



KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

POLICY ON THE FULFILMENT OF CREDITORS' RIGHTS

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), Perum DAMRI melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK.0984/HK.003/DAMRI-2019 tertanggal 25 Februari 2019 telah menetapkan Hak dan Kewajiban Perusahaan terhadap Kreditur. Kebijakan ini sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam melakukan pinjaman kepada Kreditur dengan tujuan menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perusahaan.

In the context of implementing good corporate governance, Perum DAMRI through the Decree of the Board of Directors Number SK.0984/HK.003/DAMRI-2019 dated 25 February 2019 has determined the rights and obligations of the Company towards creditors. This policy serves as a guideline on loans for the Company to Creditors with the aim of maintaining the fulfillment of Creditors' rights and maintaining the trust given by Creditors to the company.

Hak Perusahaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

- Memperoleh pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Kreditur
- Memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Perusahaan
- Mendapat layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan
- Mengajukan keberatan perhitungan bunga pinjaman dan provisi jangka waktu dan lainnya kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dan Perusahaan
- Memperoleh kembali dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan pinjaman

Company's Rights in Fulfilling Creditor's Rights

- *Obtaining a loan as agreed with the Creditor*
- *Obtaining data/information relating to recording the utilization and realization of credit facilities and payment of obligations that have been made by the Company*
- *Receive services from Creditors as agreed*
- *Submit objection on calculation of loan interest, term provisions and others, to the Creditor if there is a discrepancy in the calculation between the Creditor and the Company*
- *Retrieve the original documents that are used as collateral / loan collateral*

Kewajiban Perusahaan

- Melakukan pembayaran utang pokok, bunga, serta provisi dan beban lainnya kepada Kreditor tepat waktu
- Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman
- Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditor
- Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi pinjaman yang digunakan di atas kepentingan Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
- Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan paling lambat enam bulan setelah tutup buku tahunan yang bersangkutan
- Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan
- Memberitahukan kepada Kreditor apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perusahaan
- Memberitahukan kepada Kreditor pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan
- Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan setiap ada perubahan
- Tidak mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain terhadap agunan yang telah diagunkan kecuali atas izin Kreditor
- Melakukan penarikan pinjaman atas dasar standar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat besaran

Company Obligation

- *Making a principal payment on loan, interest, as well as other provisions and expenses to the Creditor in a timely manner*
- *Provide information in a transparent, accurate, and timely manner both at the time of request or use of loans*
- *Maintain financial ratios in accordance with the ratios agreed with the Creditors*
- *Prioritize the settlement of all obligations arising from the loans over the interests of Perum DAMRI Branch Office*
- *Submit the annual audited financial report no later than six months after the end of the financial year*
- *Utilizing the loan in accordance with the credit purpose as has been agreed*
- *Notify Creditors of any change in the composition of the Company's management and/or shareholders*
- *Notify Creditors of dividend distribution to the Company's shareholders*
- *Submit a copy of the deed of amendment to the Company's Articles of Association every time there is a change*
- *Not binding himself as a guarantor of debt or pledging the Company's assets to other parties against the collateral that has been pledged except with the permission of the Creditor*
- *Make loan withdrawals on the basis of standards on target, on time, and on the right amount*



STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

BUSINESS ETHICS STANDARD

Pedoman perilaku dan etika bisnis merupakan panduan yang berisikan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku seluruh Insan DAMRI dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Pedoman perilaku dan etika bisnis Perusahaan mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan dengan cara yang adil dan seimbang. Kode etik bisnis DAMRI dibangun atas fondasi yang kuat dari visi, misi, tata nilai, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usaha DAMRI.

DAMRI telah memiliki Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Etika Bisnis sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 0755.00/H K.003/SK/00/DU/2020 tertanggal 3 November 2020. Keputusan tersebut merupakan pembaruan atas Pedoman Kode Etik yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas pada 5 Maret 2019.

Pedoman tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan DAMRI yang meliputi Dewan Pengawas, Direksi, pekerja waktu tidak tertentu, pekerja waktu tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan Perusahaan; mitra usaha; pelanggan; pemasok; dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Pokok-Pokok Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Pedoman tersebut mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan bagi Insan DAMRI dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan. Hubungan tersebut mencakup hubungan dengan Insan DAMRI, dengan pelanggan/konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemerintah (regulator), pemilik modal, mitra usaha, pesaing, dan juga dengan media massa.

The code of conduct and business ethics is a guide that contains the principles that govern the behavior of all DAMRI personnel in implementing corporate values. The Company's code of conduct and business ethics regulates the principles and behaviors that must be applied in interacting with stakeholders in a fair and balanced manner. DAMRI's code of business ethics is built on a strong foundation of vision, mission, values, and good corporate governance principles in running DAMRI's business.

DAMRI already has a Code of Conduct and Business Ethics as stated in the Decree of the Board of Directors Number: 0755.00/H K.003/SK/00/DU/2020 dated 3 November 2020. This decision is an update of the Code of Ethics that has been issued by the President Director and Supervisory Board on 5 March 2019.

These guidelines must be complied with and implemented by all DAMRI Personnel, which include the Supervisory Board, the Board of Directors, permanent employees, contract employees, supporting service workers working within the Company; business partners; customers; suppliers; and other interested parties.

Principles of the Code of Business Conduct and Ethics

These guidelines reflect the actions and values that serve as guidelines for DAMRI Personnel in interacting with all stakeholders. These relationships include relationships with DAMRI personnel, with customers/consumers, suppliers, creditors, the community and the surrounding environment, the government (regulators), shareholders, business partners, competitors, and also with the mass media.

Sementara, standar etika jajaran manajemen dan karyawan yang diatur dalam Pedoman tersebut mencakup perilaku sebagai pimpinan terhadap bawahan, perilaku bawahan kepada pimpinan, perilaku sebagai rekan kerja, hak atas kekayaan intelektual, dan etika dalam rapat. Pedoman Perilaku juga mengatur mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi Perusahaan; penggunaan aset Perusahaan; perilaku asusila, narkoba, obat terlarang, perjudian, dan merokok; pencatatan data Perusahaan dan penyusunan laporan; informasi orang dalam; benturan kepentingan; dan aktivitas politik.

Pemberlakuan Pedoman Perilaku

Secara rutin sosialisasi Pedoman Perilaku dilaksanakan untuk membangun kesadaran seluruh Insan DAMRI untuk melaksanakan Pedoman Perilaku sebagai bagian tidak terpisahnya dalam praktik bisnis dan kinerja seluruh Insan DAMRI. Setiap pimpinan unit kerja dalam Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya sosialisasi Pedoman Perilaku.

Sanksi

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam Perusahaan, di antaranya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) DAMRI dengan Serikat Pekerja DAMRI. Tingkatan dan jenis sanksi adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the ethical standards of management and employees as regulated in the Guidelines include behavior as a leader towards subordinates, behavior of subordinates towards leaders, behavior as co-workers, intellectual property rights, and ethics in meetings. The Code of Conduct also regulates the confidentiality of Company data and/or information; use of Company assets; immoral behavior, narcotics, illegal drugs, gambling, and smoking; recording of Company data and preparation of reports; inside information; conflict of interest; and political activity.

Dissemination of the Code of Conduct

Socialization of the Code of Conduct is carried out routinely to build awareness of all DAMRI Personnel to implement the Code of Conduct as an integral part of the business practices and performance of all DAMRI Personnel. Each head of the work unit within the Company is responsible for ensuring the implementation of the socialization of the Code of Conduct.

Penalty

Violations of the Code of Conduct will be sanctioned in accordance with applicable rules and regulations within the Company, including DAMRI Collective Labor Agreement (PKB) with DAMRI Workers Union. The levels and types of sanctions are as follows:

DISIPLIN RINGAN <i>Light Sanction</i>	DISIPLIN SEDANG <i>Medium Sanction</i>	DISIPLIN BERAT <i>Severe Sanction</i>
1. Teguran Lisan <i>Verbal warning</i>	1. Peringatan Tertulis I dan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun <i>Written Warning I and postponement of Periodic Salary Increase for a maximum of 1 (one) year</i>	1. Peringatan Tertulis III dan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 2 (dua) tahun <i>Written Warning III for Postponement of Periodic Salary Increase and Promotion for a maximum of 2 (two) years</i>

DISIPLIN RINGAN <i>Light Sanction</i>	DISIPLIN SEDANG <i>Medium Sanction</i>	DISIPLIN BERAT <i>Severe Sanction</i>
2. Peringatan Tertulis I <i>Written Warning I</i>	2. Peringatan Tertulis II dan Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 2 (dua) tahun <i>Written Warning II for Postponement of increase and rank for a maximum of 2 (two) years</i>	2. Peringatan Tertulis III dan Pembebasan dari jabatan atau demosi jabatan serta Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 3 (tiga) tahun <i>Written Warning III for dismissal from the Department or demotion as well as Deferment of Promotion for a maximum of 3 (three) years</i>
3. Peringatan Tertulis II <i>Written Warning II</i>	3. Peringatan Tertulis III dan Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 3 (tiga) tahun <i>Written Warning III for Postponement of increase and rank for maximum 3 (three) years</i>	3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri <i>Resignation with honor not self requested</i>

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud di atas tidak harus diberikan secara berurutan, tetapi dapat diberikan sesuai dengan tingkat berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan dan terhadap pelanggaran yang diberikan hukuman ringan atau sedang, apabila setelah diberikan hukuman tetap melakukan pelanggaran yang sama dapat diberikan hukuman Sedang dan/atau Berat.

Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, karyawan yang diduga melakukan pelanggaran wajib diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan tahapan pemeriksaan pelanggaran, kecuali untuk hukuman disiplin tingkat ringan.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Jumlah pelanggaran kode etik selama tahun 2021 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) pelanggaran dan setelah ditindaklanjuti dengan diberikan sanksi sebagai berikut:

The types of sanctions referred to above do not have to be given sequentially, but can be given in accordance with the level of severity of the violation committed and for violations that are given a light or moderate penalty, if after being given the punishment they continue to commit the same violation, they can be given a Medium and/or Heavy punishment.

Prior to being subject to disciplinary punishment, employees suspected of committing violations must be examined in accordance with the stages of examining violations, except for light disciplinary penalties.

Number of Violations and Sanctions Given

The number of violations of the code of ethics during 2021 was 83 (eighty three) violations, with the following follow up sanctions:



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI

MANAGING CONFLICT OF INTEREST AND RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES

Insan Perum DAMRI senantiasa menghindari benturan kepentingan dengan:

1. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak-pihak lain.
3. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
4. Membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan CoC yang ditetapkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun.
5. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan Perusahaan.
6. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
7. Tidak memegang jabatan apapun pada Perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan Perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
8. Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam kerja dan selalu mengungkapkan serta melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar Perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan izin.

Perum DAMRI personnel always avoid conflicts of interest by doing the following:

1. *Carry out duties and obligations by prioritizing the economic interests of the Company over personal or family economic interests, as well as other parties.*
2. *Not abusing position for personal, family, or other parties' interests or gains.*
3. *In the case of discussions and decision-making that contain elements of a conflict of interest, the parties concerned are not allowed to participate.*
4. *Make a statement that there is no conflict of interest for every decision that has been made by him and has implemented the CoC set by the Company at the end of each year.*
5. *Does not have a business that is directly related to the Company's activities.*
6. *Do not take advantage of confidential information and business data of the Company for interests outside the Company.*
7. *Does not hold any position in other companies/institutions that wish to and/or are currently conducting business relations with the Company or those who wish to and/or are currently competing with the Company.*
8. *Not doing any work or profession outside the Company during working hours and always disclosing and reporting any interests and/or activities outside the Company during working hours to his superiors in stages to obtain permission.*



PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM

INSIDER TRANSACTION PREVENTION

Insan Perum DAMRI yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.

Perum DAMRI personnel who have access to material information may not abuse their position and work in disclosing material information that may harm the interests of the Company.





PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION POLICY

Perusahaan berkomitmen untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam praktik bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, setiap Insan DAMRI melakukan interaksi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang memungkinkan terjadinya praktik pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Perusahaan berkepentingan agar Insan DAMRI menghindari tindakan dan praktik yang mengarah pada bentuk gratifikasi tersebut, sehingga diperlukan pengendalian penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

DAMRI telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 0736.00/H-K.003/SK/00/DU/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Pada prinsipnya setiap Insan DAMRI yang karena jabatannya dan/atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dan/atau keluarga intinya dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak ketiga. Gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan hadiah/ cenderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan DAMRI yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

The company is committed to fighting corruption, collusion and nepotism (KKN) in its business practices. In carrying out the Company's business activities, every DAMRI Personnel interacts and cooperates with various parties, which creates opportunities for practices of giving and/or requesting gratuities from one party to another. It is in the company's interest that DAMRI personnel avoid actions and practices that lead to this form of gratification, so it is necessary to control the receipt of gratification in a transparent and accountable manner, through a series of activities that involve the active participation of government agencies, the business world, and the community to establish a gratification control environment.

DAMRI already has Gratification Control Guidelines as stated in the Decree of the Board of Directors Number: 0736.00/H-K.003/SK/00/DU/2020 dated 26 October 2020.

In principle, every DAMRI Personnel due to their position and/or contrary to their duties and obligations and/or their immediate family is prohibited from receiving or requesting gratuities directly or indirectly from any third party. Gratification is defined as a gift in a broad sense, which includes the giving and/or receipt of gifts/souvenirs and entertainment, both received domestically and abroad and carried out using electronic means or without electronic means, given or received by DAMRI personnel which occurs because it is related to his position/authority in the Company which can cause a conflict of interest and/or affect his independence in work and is contrary to his obligations or duties.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi memuat ketentuan mengenai hal yang dilarang dan diperbolehkan, sehingga dapat mencegah dan melindungi Insan DAMRI dalam menjalankan tugasnya, bebas dari tindakan yang berpotensi pada tindak pidana suap atau korupsi, serta pertimbangan profesional yang taat terhadap hukum. Setiap Insan DAMRI yang menerima gratifikasi, baik secara langsung atau tidak langsung, wajib melaporkannya, termasuk melaporkan penolakan penerimaan gratifikasi dari setiap pihak ketiga. Laporan disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai mekanisme yang telah diatur.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) DAMRI meliputi UPG Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, dan Kantor SBU/Cabang. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0741.00/HK.003/SK/00/DU/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor Pusat, susunan UPG Kantor Pusat diketuai oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dengan anggota Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Audit Intern/Satuan Pengawasan Internal, dan Kepala Divisi Kapital Manusia.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor Pusat

UPG Kantor Pusat merupakan unit yang melaksanakan analisis, *monitoring*, evaluasi, dan juga pelaporan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi.

Adapun kewajiban dan tugas UPG Kantor Pusat DAMRI antara lain adalah:

Gratification Control Management

The Gratification Control Guidelines contain provisions regarding what is prohibited and allowed, so as to prevent and protect DAMRI personnel in carrying out their duties, free from potential acts of bribery or corruption, as well as professional judgment that obeys the law. Every DAMRI Personnel who receives gratification, either directly or indirectly, must report it, including reporting the refusal to accept gratification from any third party. Reports are submitted to the Gratification Control Unit (UPG) or directly to the Corruption Eradication Commission (KPK) according to the regulated mechanism.

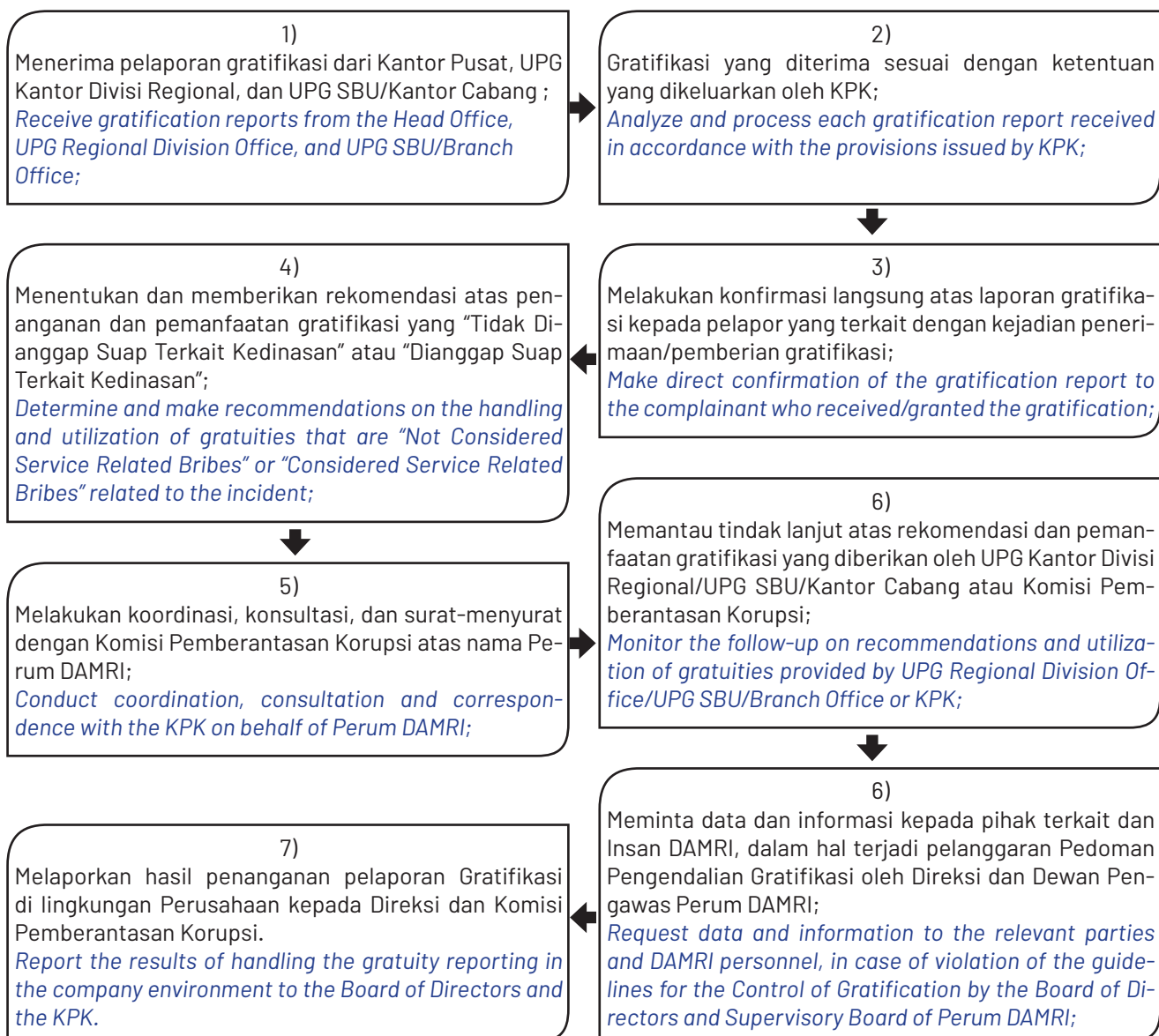
Manager of Gratification Reporting

The Gratification Control Unit (UPG) of DAMRI includes the Head Office UPG, Regional Division Offices, and SBU/Branch Offices. In accordance with the Decree of the Board of Directors Number: 0741.00/HK.003/SK/00/DU/2020 dated 26 October 2020 regarding the Establishment of the Head Office Gratification Control Unit (UPG), the composition of the Head Office UPG is chaired by the Head of the Corporate Secretariat Division with the following members Head of the Legal Division, Head of the Internal Audit Division/Internal Monitoring Unit, and the Head of the Human Capital Division.

Duties and Responsibilities of the Gratification Control Unit (UPG) Head Office

UPG Head Office is a unit that carries out analysis, monitoring, evaluation, and also reports regularly to the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding gratuities.

The obligations and duties of the DAMRI Head Office UPG include:



Mekanisme Pelaporan

Setiap Insan DAMRI wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi kebijakan gratifikasi kepada Insan DAMRI pada setiap tingkatan/jenjang organisasi dan juga para pemangku kepentingan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi yang dikelola oleh Perusahaan. Secara berkala Direksi DAMRI juga mengeluarkan surat pengumuman/instruksi kepada seluruh Insan DAMRI terkait larangan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, termasuk menjelang hari-hari besar keagamaan.

Laporan Gratifikasi 2021

Selama tahun 2021, terdapat 3 (tiga) laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perum DAMRI, yang terdiri atas 2 (dua) laporan penerimaan dan 1 (satu) laporan penolakan gratifikasi.

Monitoring dan Evaluasi

Sepanjang tahun 2021, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perum DAMRI menyampaikan laporan berkala triwulanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direksi Perusahaan. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPK terhadap implementasi Program Pengendalian Gratifikasi, nilai yang diperoleh UPG Perum DAMRI adalah 92,5 atau berada pada peringkat ke-23 dari 138 instansi BUMN/anak perusahaan BUMN/BUMD.

Reporting Mechanism

Every DAMRI Personnel is required to report the acceptance and/or rejection of gratuities that are considered bribes and gratifications in official work settings to the UPG no later than 7 (seven) working days from the receipt and/or rejection of gratuities.

Gratification Policy Socialization

Socialization of the gratification policy to DAMRI personnel at every level of the organization as well as stakeholders. Socialization is carried out through various communication channels managed by the Company. The DAMRI Board of Directors periodically issues announcements/instructions to all DAMRI personnel regarding the prohibition of receiving and/or granting gratuities, including ahead of religious holidays.

2021 Gratification Report

Throughout 2021, there were 3 (three) reports of acceptance and/or rejection of gratuities submitted to the Gratification Control Unit (UPG) of Perum DAMRI, which consisted of 2 (two) acceptance reports and 1 (one) gratification rejection report.

Monitoring and Evaluation

Throughout 2021, Perum DAMRI's Gratification Control Unit (UPG) submitted quarterly periodic reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Company's Board of Directors. The results of monitoring and evaluation carried out by the KPK on the implementation of the Gratification Control Program, the value obtained by UPG Perum DAMRI is 92.5 or is ranked 23rd out of 138 BUMN/BUMD/BUMD agencies.



PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) *MANAGEMENT OF STATE ADMINISTRATOR'S WEALTH REPORT*

Pengelolaan LHKPN diatur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 2778/KP.004/SK/00/DU/XII-2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman tersebut mengatur tentang wajib lapor, tata cara penyampaian, unit pengelola, dan sanksi pelanggaran.

Insan DAMRI yang menjadi wajib lapor LHKPN adalah para anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Unit Bisnis, Area Manager (AM), dan General Manager (GM). Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan periodik setiap satu tahun sekali dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Divisi Kapital Manusia merupakan unit pengelola yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan monitoring serta evaluasi kepatuhan pelaporan LHKPN oleh para wajib lapor. Monitoring penyampaian LHKPN telah diselenggarakan secara komputerisasi. Monitoring dapat dilakukan secara real time, baik oleh pengelola maupun oleh wajib lapor.

The management of LHKPN is regulated by the Decree of the Board of Directors Number: 2778/KP.004/SK/00/DU/XII-2019 dated 31 December 31 2019 regarding the State Administrators Assets Report (LHKPN). The guidelines regulate mandatory reporting, submission procedures, management units, and sanctions for violations.

DAMRI personnel who are obliged to report LHKPN are members of the Supervisory Board, members of the Board of Directors, Division Heads, Heads of Business Units, Area Managers (AM), and General Managers (GM). Submission of LHKPN while serving is carried out periodically once a year and submitted no later than 31 March of the following year.

The Human Capital Division is a management unit tasked with coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK) and monitoring and evaluating compliance with LHKPN reporting by reporting entities. Monitoring the submission of LHKPN has been carried out in a computerized manner. Monitoring can be done in real time, either by the manager or by the reporting person.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) diperkenalkan sejak tahun 2014 untuk memperkuat pelaksanaan GCG yang memberikan jalan bagi seluruh Insan DAMRI dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis maupun fraud, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Perusahaan telah menyediakan media khusus pelaporan pelanggaran melalui surat, email maupun website.

Implementasi WBS diharapkan menjadi salah satu metode pendeteksian dini mengenai tindakan pelanggaran yang terindikasi terjadi di DAMRI. Penerapan WBS juga diharapkan bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perusahaan apabila mekanisme internal sebagaimana telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan atau diberlakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran/penyimpangan dan/atau disalahgunakan oleh Insan DAMRI. Hal ini diharapkan dapat mendorong upaya mewujudkan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, terciptanya lingkungan kerja yang bersih, bertanggung jawab dan berintegritas, serta melindungi para pemangku kepentingan.

The Whistleblowing system (WBS) was introduced in 2014 to strengthen the implementation of GCG which provides a way for all DAMRI personnel and other stakeholders to report indications of violations of the Code of Business Ethics and fraud, based on evidence that can be accounted for and with good intentions. The company has provided special platform for reporting violations by mail, email or website.

The implementation of WBS is expected to be one of the methods for early detection of violations that are indicated to have occurred at DAMRI. The implementation of WBS is also expected to minimize potential risks that can harm the Company if the internal mechanisms as established cannot be implemented or enforced to prevent violations/deviations and/or misuse by DAMRI personnel. This is expected to encourage efforts to create a more transparent and accountable organizational culture, create a clean, responsible and integrity work environment, as well as protect stakeholders.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Submission of Report on Violation

Submission Violation Report

Laporan terkait WBS dapat disampaikan dengan saluran yang telah disediakan sebagai berikut:

Reports related to WBS can be submitted through the following channels:



Web Site

www.damri.co.id



Email

pengaduanwbs-direksi@damri.co.id
pengaduanwbs-dewas@damri.co.id



Surat

Letter

Surat resmi yang ditujukan sesuai dugaan pelanggaran dengan memberi kode WBS, yang dapat diantar langsung melalui pos ke DAMRI dengan alamat:
Letters contain report of alleged violation is given WBS code and delivered directly via mail to DAMRI to the addresses below:

Direksi DAMRI
u.p. Tim Pengelola WBS
DAMRI Board of Director
u.p. WBS Management Team
Jalan Matraman Raya No. 25
Jakarta Timur - 13140

Dewan Pengawas DAMRI
u.p. Tim Pengelola WBS
DAMRI Supervisory Board
u.p. WBS Management Team
Jalan Matraman Raya No. 25
Jakarta Timur - 13140

Perlindungan Bagi Whistleblower

Pelapor, baik Insan DAMRI atau stakeholders wajib mencantumkan identitas yang jelas meliputi nama pelapor, alamat rumah/kantor, email, dan nomor kontak yang dapat dihubungi disertai dengan bukti pendukung atas laporan pelanggaran yang disampaikan.

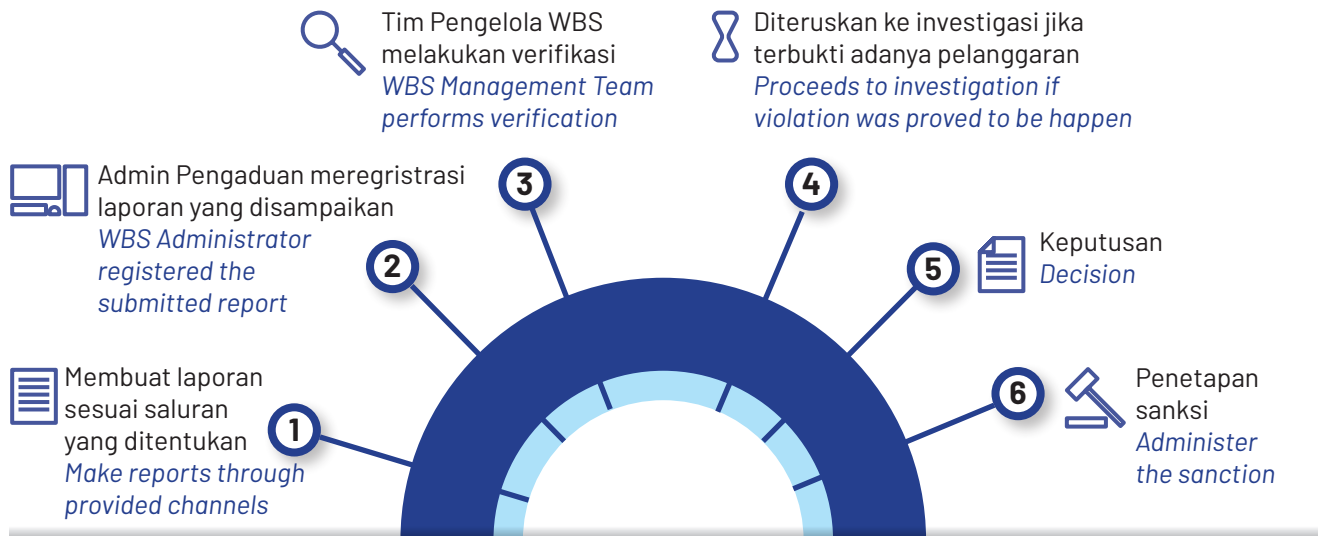
Pada prinsipnya WBS menganut prinsip rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartiality*), ketidakberpihakan (*independent*), dan non-repudiasi (perlindungan balasan). Melalui sistem ini, Insan DAMRI atau stakeholders yang melaporkan dugaan pelanggaran akan diberikan perlindungan oleh Perusahaan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh terlapor.

Whistleblower Protection

The complainant, both DAMRI personnel or stakeholders, must state clearly its identity, including the name of the complainant, home/office address, email, and contact number that can be contacted along with supporting evidence to support the violation report submitted.

In principle, WBS adheres to the principles of confidentiality, impartiality, independent and non-repudiation. Through this system, DAMRI personnel or stakeholders who report suspected violations will be given protection by the Company, both in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

Alur Penanganan Pengaduan Whistleblowing System



Flow of Managing Complaints in the Whistleblowing System

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pelaporan WBS dikelola oleh Tim Pengelola WBS yang terdiri atas Tim WBS jalur Direksi dan Tim WBS jalur Dewan Pengawas. Pembentukan Tim Pengelola WBS menjadi kewenangan Direksi apabila pengaduan pelanggaran berkaitan dan/atau dilakukan oleh Insan DAMRI; sementara kewenangan pembentukan berada pada Dewan Pengawas apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan organ penunjang Dewan Pengawas. Pada jalur Direksi, Ketua Tim Pengelola WBS adalah Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola berasal dari beberapa divisi, yaitu Divisi Satuan Pengawasan Internal, Divisi Kapital Manusia, Divisi Hukum, dan Divisi Sekretariat Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0738.00/HK.003/SK/00/DU/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Whistleblowing System (WBS) Jalur Direksi.

Party Managing Complaints

WBS reporting is managed by the WBS Management Team consisting of the WBS Team from the Board of Directors and the WBS Team from the Supervisory Board. The establishment of the WBS Management Team becomes the authority of the Board of Directors if the violation complaint is related to and/or made by DAMRI personnel; while the establishment authority falls to the Supervisory Board if a violation is suspected to have been committed by member of the Board of Directors, member of the Supervisory Board, and supporting organs of the Supervisory Board. On the Board of Directors line, the Head of the WBS Management Team is the Head of the Internal Audit Unit Division with the membership composition of the Management Team coming from several divisions, namely the Internal Audit Unit Division, Human Capital Division, Legal Division, and Corporate Secretariat Division in accordance with the Board of Directors Decree Number: 0738.00/ HK.003/SK/00/DU/2020 dated 26 October 2020 regarding the Formation of the Whistleblowing System Team (WBS) by the Board of Directors.

Selanjutnya, dengan merujuk pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System (WBS)*, Direksi bertanggung jawab untuk membentuk Tim Investigasi atas pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Insan DAMRI di setiap jenjang organisasi Perusahaan. Ketua Tim Investigasi jalur Direksi adalah Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal.

Sementara, pada jalur Dewan Pengawas, Ketua Tim Pengelola WBS adalah Ketua Dewan Pengawas. Susunan dan tugas Tim Pengelola WBS jalur Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

Jumlah Pengaduan, Tindak Lanjut, dan Sanksinya

Sepanjang tahun 2021, tidak ada pengaduan yang disampaikan kepada Tim Pengelola WBS jalur Direksi, baik melalui surat, email, maupun website yang telah disediakan.

Furthermore, by referring to the Guidelines for the Whistleblowing System (SPP) or the Whistleblowing System (WBS), the Board of Directors is responsible for establishing an Investigation Team for complaints of violations allegedly committed by DAMRI personnel at every level of the Company's organization. The Head of the Investigation Team for the Board of Directors is the Head of the Internal Audit Unit Division.

Meanwhile, in the line of the Supervisory Board, the Chairman of the WBS Management Team is the Chairman of the Supervisory Board. The composition and duties of the WBS Management Team through the Supervisory Board is determined by the decision of the Supervisory Board.

Number of Complaints, Follow Up, and the Sanctions

Throughout 2021, no complaints were submitted to the WBS Management Team of the Board of Directors, either by letter, email, or the website.



PERMASALAHAN HUKUM PERUSAHAAN

CORPORATE LEGAL CASES

Perkara Penting Yang Dihadapi oleh Perusahaan

Important Cases Faced by the Company

POKOK PERKARA <i>Subject Matter</i>	STATUS <i>Status</i>	RISIKO YANG DIHADAPI DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN <i>Risks Faced and Nominal Value of Claims/Lawsuits</i>
Permasalahan hukum berakhirnya kerjasama DAMRI SBU TJBW dengan PT TransJakarta dan dampaknya terhadap karyawan <i>Legal issues concerning the termination of DAMRI SBU TJBW cooperation with PT TransJakarta and its impact on employees</i>	Selesai <i>Completed</i>	Kesepakatan pembayaran uang pisah/kompensasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) terhadap karyawan yang masih memiliki sisa masa kontrak. <i>The agreement to pay severance pay/compensation of Rp. 2,000,000 (two million Rupiah) to employees who still have the remaining contract period.</i>

Perkara Penting yang Dihadapi oleh Entitas Anak

Important Cases Faced by Subsidiaries

Sampai dengan 31 Desember 2021 DAMRI tidak memiliki entitas anak sehingga tidak terdapat informasi terkait perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

As of 31 December 2021, DAMRI does not have a subsidiary, so there is no information regarding important cases faced by the subsidiary.

Perkara Penting Yang Dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi

Important Cases Faced by the Supervisory Board and the Board of Directors

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi.

Throughout 2021, there were no important cases faced by the Supervisory Board and the Board of Directors.

Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Administrative Sanctions by Relevant Authorities

Sepanjang tahun 2021 DAMRI tidak mendapat sanksi administrasi oleh otoritas terkait.

Throughout 2021 DAMRI did not receive administrative sanctions by the relevant authorities.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/ atau Politik

Uraian terkait dengan pemberian dana kegiatan sosial disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 DAMRI tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

Descriptions related to the provision of funds for social activities are submitted in the Corporate Social Responsibility section which is an integral part of this Annual Report. As for the provision of funds for political activities, during 2021 DAMRI did not provide funds for political activities nor to political parties.





AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Website

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk setiap konten berita menyangkut informasi dan publikasi dari Perusahaan. Website Perseroan: www.damri.co.id

Media Massa

Media massa merupakan mitra untuk menyebarluaskan informasi terbaru mengenai Perusahaan. Materi publikasi Perusahaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Portal BUMN

Website yang dikelola Kementerian BUMN menyediakan halaman untuk seluruh BUMN, termasuk DAMRI. Materi diperbarui setiap kali Perusahaan memiliki informasi yang layak diketahui oleh publik. Materi yang disampaikan meliputi antara lain berita dan kegiatan Perusahaan, aksi korporasi dan proyek strategis, serta pengadaan dan lowongan pekerjaan.

Access to Company Information and Data

Website

The Corporate Secretary is responsible for any news content regarding information and publications from the Company. Company website: www.damri.co.id

Mass Media

The mass media is a partner in disseminating the latest information about the Company. The Company's publication materials are delivered by the Corporate Secretary.

SOE Portal

The website managed by the Ministry of SOEs provides pages for all SOEs, including DAMRI. Materials are updated whenever the Company has information worthy of being known by the public. The materials presented include, amongst others, Company news and activities, corporate actions and strategic projects, as well as procurement and job vacancies.



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ASSESSMENT ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Kriteria Penilaian

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dilakukan dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG tahun buku 2021 dilaksanakan pada periode 2022. Pelaksana penilaian adalah PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group). Sebelumnya, pihak yang melakukan penilaian GCG DAMRI untuk tahun buku 2020 adalah tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (metode self assessment); tahun buku 2019 adalah PT Adikarya Gemilang Solusindo; tahun buku 2018; tahun buku 2018 oleh PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group); dan tahun buku 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Skor Penilaian Masing-masing Kriteria

Tahun Buku <i>Book Year</i>	2018	2019	2020	2021
Skor Penilaian GCG <i>GCG Assessment Score</i>	77,5	81,93	82,4	85,64

Access to Company Information and Data

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out using the parameters developed by the Ministry of State-Owned Enterprises in accordance with the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

The Party Conducting the Assessment

The assessment of the implementation of GCG for the 2021 financial year is carried out in the period of 2022. The implementer of the assessment is PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group). Previously, the party that carried out the DAMRI GCG assessment for the 2020 financial year was a team coordinated by the Head of the Corporate Secretariat Division (self-assessment method); the 2019 financial year is PT Adikarya Gemilang Solusindo; fiscal year 2018 by PT Multi Utama Indojava (MUC Consulting Group); and the 2017 fiscal year by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Assessment Score for Each Criteria

BAB	ASPEK PENILAIAN GCG GCG assessment aspect	BOBOT Score	CAPAIAN TAHUN 2021 2021 achievement		KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG GCG Implementation Quality Classification
			SKOR Score	% CAPAIAN Percentage of achievement	
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,73	96,10	Sangat Baik <i>Very Good</i>
II	Pemilik Modal dan RPB <i>Shareholders</i>	9,00	8,62	95,76	Sangat Baik <i>Very Good</i>
III	Dewan Pengawas <i>Supervisory Board</i>	35,00	31,67	90,49	Sangat Baik <i>Very Good</i>
IV	Dewan Pengawas <i>Supervisory Board</i>	35,00	30,59	87,40	Sangat Baik <i>Very Good</i>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,41	82,36	Baik <i>Good</i>
VI	Aspek Lain <i>Other aspect</i>	7,00	0,63	12,50	-
Skor keseluruhan <i>Total score</i>		100,00	85,68	85,68	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Classification of GCG Implementation Quality</i>		Sangat Baik <i>Very Good</i>			

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian

Berdasarkan parameter *assessment* yang diujikan, disimpulkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) DAMRI telah memiliki sistem dan infrastruktur dalam mendukung penerapan GCG di Perusahaan. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standar dan praktik terbaik, tapi tetap masih memerlukan peningkatan di sejumlah area. Hasil penilaian penerapan GCG Tahun 2021 menghasilkan 125 rekomendasi.

Recommendations and Follow Up to Scores Result

Based on the assessment parameters, it is concluded that the Public Company (Perum) DAMRI already has the system and infrastructure to support the implementation of GCG in the Company. Some aspects of the assessment are close to standards and best practices, but still need improvement in a number of areas. The results of the 2021 GCG implementation assessment resulted in 125 recommendations.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang sebelumnya lebih dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), merupakan kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

SOE Social and Environmental Responsibility Program, previously known as the Partnership and Community Development Program (PKBL), reflects the Company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, social, environment, as well as law and governance with the principle of more integration, more targeted with more measurable impact, as well as can be accounted for and part of the Company's business approach.





KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

COMMITMENT TO THE SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITY

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat; DAMRI sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi darat, berupaya untuk memberikan kontribusi melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Landasan kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DAMRI sepanjang tahun 2020 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 88 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/ M- BU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan berbagai perubahannya dengan perubahan terakhir adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/M- BU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan baru tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/ 04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

In order to encourage economic activities and growth as well create job opportunities, business opportunities, and community empowerment; DAMRI as one of the SOEs engaged in land transportation services, seeks to contribute through the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL).

The foundations of DAMRI's Social and Environmental Responsibility Program activities throughout 2020 include:

1. Law Number 19 Year 2003 Article 88 concerning State-Owned Enterprises
2. Government Regulation Number 47 Year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/M-BU/2007 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business and the Community Development Program and its various amendments with the latest amendment being the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-08/ MBU/2013 dated 10 September 2013 regarding the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State
4. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 dated 8 April 2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. The new provision is an amendment to the Regulation of the Minister of SOEs PER- 02/ MBU/04/2020 concerning the Third Amendment

to the Regulation of the Minister of SOEs PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for SOEs.

Selain berpedoman pada landasan peraturan di atas, DAMRI berkomitmen untuk menjaga konsistensi praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai upaya untuk menyelaraskan kegiatan TJSL dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals/SDGs. Program TJSL yang dijalankan oleh Perum DAMRI berorientasi pada 4 (empat) pilar, yakni Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Terdapat 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan Program TJSL Perusahaan, yakni Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat).

In addition to being guided by the above regulatory framework, DAMRI is committed to maintaining the consistency of Good Corporate Governance (GCG) practices as an effort to align CSR activities with the Sustainable Development Goals (SDGs). The CSR program run by Perum DAMRI is oriented towards 4 (four) pillars, namely the Social Pillar, the Economic Pillar, the Environmental Pillar, and the Law and Governance Pillar. There are 5 (five) Sustainable Development Goals that are prioritized in the implementation of the Company's CSR Program, namely Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), Goal 17 (Partnerships to Achieve Goals), Goal 3 (Healthy and Prosperous Lives), Goal 2 (No Hunger), and Goal 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).





INFORMASI MENGENAI METODE DAN LINGKUP UJI TUNTAS TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

INFORMATION ABOUT METHODS AND SCOPE OF DUE DILIGENCE ON THE SOCIAL, ECONOMY, AND ENVIRONMENT IMPACT OF CORPORATE ACTIVITIES

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan telah memenuhi prinsip:

1. Terintegrasi, yang berdasarkan analisis risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan Perusahaan; terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
3. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Perusahaan telah menjalani uji tuntas terhadap kegiatan tanggung jawab Perusahaan yang meliputi:

- a. Survei kepuasan karyawan,
- b. Survei pelanggan,
- c. Survei kepuasan pemasok,
- d. Focus group discussion, dan
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta laporan manajemen Triwulanan

Perusahaan telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di masing-masing Kantor Cabang. Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja jasa pelayanan dari perspektif pelanggan dengan survei kepuasan dan loyalitas pelanggan. Survei pelanggan dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga transparansi, independensi, dan akuntabilitas hasil.

The Company always ensures that the Company's social responsibility activities comply with the following principles:

1. Integrated, based on risk analysis and business processes that are related to stakeholders;
2. Targeted, namely having a clear direction to achieve the Company's goals; the impact is measurable, namely having a contribution and providing benefits that result in change or added value for stakeholders and the company;
3. Accountability, which means can be accounted for in order to keep away from potential abuse and irregularities.

The Company has conducted due diligence on its obligation activities, including through :

- a. Employee satisfaction survey,
- b. Customer survey,
- c. Supplier satisfaction survey,
- d. Focus group discussions, and
- e. Company Work Plan and Budget (RKAP) as well as the Quarterly management report

The Company has provided a forum for customer complaints through various channels in each Branch offices. The Company monitors and evaluates service performance from a customer perspective through customer satisfaction and loyalty surveys. Customer surveys are conducted by third parties to maintain transparency, independence and accountability of results.



INFORMASI MENGENAI STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU TERPENGARUH OLEH AKTIVITAS PERUSAHAAN

INFORMATION ABOUT IMPORTANT STAKEHOLDER WHO ARE IMPACTED OR AFFECTED BY CORPORATE ACTIVITIES

DAMRI mengidentifikasi pemangku kepentingan-nya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perusahaan, yakni pelanggan, Pemilik Modal dan investor, karyawan, Pemerintah, dan mitra kerja. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, isu terkait Pemangku Kepentingan DAMRI dapat dilihat pada tabel berikut:

DAMRI identifies its stakeholders based on their relevance and relationships with the Company, namely customers, Capital Owners and investor, employees, Government, and business partners. Based on these identified stakeholders, issues related to DAMRI Stakeholders can be seen in the following table:

Pemangku Kepentingan Stakeholders		Topik Utama yang Diajukan Main Concerns
	Pelanggan Customers	Hubungan komersial, retensi pelanggan, kualitas layanan Commercial relationship, customer retention, service quality
	Pemilik Modal Capital Owner	Dividen, pengembangan usaha, tata kelola manajemen Dividend, business development, management governance
	Karyawan Employees	Ketenagakerjaan, kesejahteraan Employment, welfare
	Pemerintah Government	Pembangunan, pengembangan usaha, investasi Development, business development, investment
	Mitra Kerja Partners	Hubungan komersial Commercial relationship



INFORMASI MENGENAI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK AKTIVITAS PERUSAHAAN

INFORMATION ABOUT SOCIAL, ECONOMY, AND ENVIRONMENT ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF CORPORATE ACTIVITIES

Dalam memaparkan isu-isu, data, dan informasi terkini yang relevan dengan hak para pemangku kepentingan, DAMRI melakukan *focus group discussion* para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah sebagai berikut:

In presenting the latest issues, data, and information relevant to the rights of stakeholders, DAMRI conducts stakeholder focus group discussions. The following are important social, economic, and environmental issues that have been identified:

Isu Penting Main Issues	Keterangan	Remarks
Kinerja Ekonomi <i>Economic performance</i>	Menggambarkan pencapaian dan kinerja DAMRI selama tahun pelaporan	<i>Describe DAMRI's achievement and performance during the reporting year</i>
Anti-korupsi <i>Anti-corruption</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI dalam mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan kecurangan (<i>fraud</i>)	<i>Describing DAMRI's commitment to the realization of clean and fraud free workplace</i>
Kepatuhan Lingkungan <i>Environment compliance</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI dalam mewujudkan dan menjalankan seluruh kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan, yaitu menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait dengan lingkungan, pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, serta perbaikan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>).	<i>Describes DAMRI's commitment to realizing and carrying out all operating activities that are environmentally sound, namely complying with laws and regulations and other requirements related to the environment, preventing environmental pollution, and improving the environmental management system that is sustainable (continuous improvement)</i>
Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI dalam mengendalikan risiko kecelakaan di tempat kerja yang dapat berpengaruh pada produktivitas.	<i>Describes DAMRI's commitment in controlling the risk of accidents in the workplace that can affect productivity.</i>
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and training</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI dalam memberikan pelatihan serta peningkatan kompetensi secara merata, aktif, dan berkesinambungan untuk menciptakan sumberdaya manusia kompeten, berkualitas, dan berkinerja tinggi.	<i>Describes DAMRI's commitment in providing training and competency improvement in an equitable, active, and sustainable manner to create competent, quality, and high-performing human resources .</i>
Masyarakat Setempat <i>Local communities</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI untuk menopang kesejahteraan masyarakat setempat melalui bimbingan ataupun bantuan.	<i>Describes DAMRI's commitment to support the welfare of the local community through guidance or assistance.</i>
Sosial Ekonomi <i>Socio-economic</i>	Menggambarkan komitmen DAMRI dalam memberikan kebutuhan pelanggan dan menerapkan program-program yang fokus dan berorientasi pelanggan.	<i>Describes DAMRI's commitment in providing customer needs and implementing customer-focused and customer-oriented programs.</i>



INFORMASI MENGENAI LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

INFORMATION ABOUT THE SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WHICH IS CONSIDERED AS OBLIGATION AND THOSE BEYOND OBLIGATION

Perusahaan juga melakukan kajian terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting tanggung jawab sosial. Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Peraturan-peraturan yang telah dipatuhi oleh Perusahaan antara lain sebagai berikut:

The company also reviews all regulations related to important social responsibility issues. The company has carried well its social responsibilities that are obligations and which exceed obligations. The regulations that have been complied with by the Company include the following:

Kegiatan Activity	Dasar Regulasi Regulatory Basis
Ketenagakerjaan <i>Employment</i>	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <i>Law No. 13/2003 concerning Manpower</i>
Keselamatan Kerja <i>Work Safety</i>	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. <i>Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health</i> 2. <i>Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems</i>
Lingkungan Hidup <i>Environment</i>	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Law No. 19 of 2003 on State-owned Enterprises and Law Number 40 Year 2007 on Limited Company and in accordance with Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management</i>
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan <i>Partnership Program and Community Development Program</i>	Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-09/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang sekaligus mengubah Peraturan Menteri Nomor PER-07/MBU/05/2015. PER-09/MBU/05/2015 ini telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut: a. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Kegiatan Activity	Dasar Regulasi Regulatory Basis
	c. PER-02/MBU/04/2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. <i>Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/ MBU/05/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises which at the same time amends the Ministerial Regulation No. PER-07/MBU/05/2015. PER-09/ MBU/05/2015 has undergone several changes as follows:</i> a. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-09/MBU/05/2015 concerning Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises; b. PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-09/MBU/05/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises; c. PER-02/MBU/04/2020 Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER-09/MBU/05/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises.
Program Anti-Korupsi <i>Anti-Corruption Program</i>	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Act No. 20 of 2001 on the Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Corruption Eradication. 2. Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 10 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 concerning Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Eradication Commission Corruption Crimes as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.



INFORMASI MENGENAI STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA *STAKEHOLDER* ENGAGEMENT DAN MENINGKATKAN NILAI UNTUK PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PEMEGANG SAHAM

*INFORMATION ABOUT COMPANY'S STRATEGY AND WORK PROGRAM IN HANDLING SOCIAL, ECONOMY, AND ENVIRONMENT ISSUES IN THE *STAKEHOLDER* ENGAGEMENT AND INCREASING VALUE OF *STAKEHOLDER* AND SHAREHOLDER*

Isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perusahaan dengan dimilikinya rencana kerja dan anggaran yang relevan.

Social, economic, and environment issues were managed effectivity by the Company through relevant work and budget plans.

Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Metode Pelibatan <i>Engagement method</i>	Frekuensi <i>Frequency</i>
Pelanggan <i>Customer</i>	1. Temu pelanggan di beberapa Kantor Cabang 2. Pertemuan langsung dengan pelanggan 3. <i>Customer Award</i>	1. Minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di beberapa Kantor Cabang. 2. Minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di beberapa Kantor Cabang. 3. 1 (satu) tahun 1 (satu) kali di beberapa Kantor Cabang.
Karyawan <i>Employee</i>	Pertemuan dengan Serikat Pekerja <i>Meeting with the Worker Union</i>	Minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun <i>Minimum 2 (two) times in 1 (one) year</i>
Pemerintah <i>Government</i>	Pelaporan Kerja <i>Performance reporting</i>	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah terkait <i>Conducted throughout the year according to the invitation from the relevant government</i>
Mitra Kerja <i>Partners</i>	Proses operasional <i>Operational process</i>	Sepanjang tahun <i>Throughout the year</i>



INFORMASI MENGENAI BERBAGAI PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN

INFORMATION ABOUT VARIOUS PROGRAMS THAT EXCEED THE MINIMUM LIABILITY OF THE COMPANY RELEVANT TO ITS BUSINESS

Selain memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan, DAMRI juga memiliki berbagai macam kebijakan internal yang telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilaksanakan oleh DAMRI pada 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Bantuan Sosial;
- b. Program Kemitraan (Mitra Binaan)

In addition to complying with various laws and regulations, DAMRI also has various internal policies that have been well implemented.

The Social and Environmental Responsibility activities carried out by DAMRI in 2021 are as follows:

- a. Social Assistance Program;
- b. Partnership Program (Foster Partners)





INFORMASI MENGENAI PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

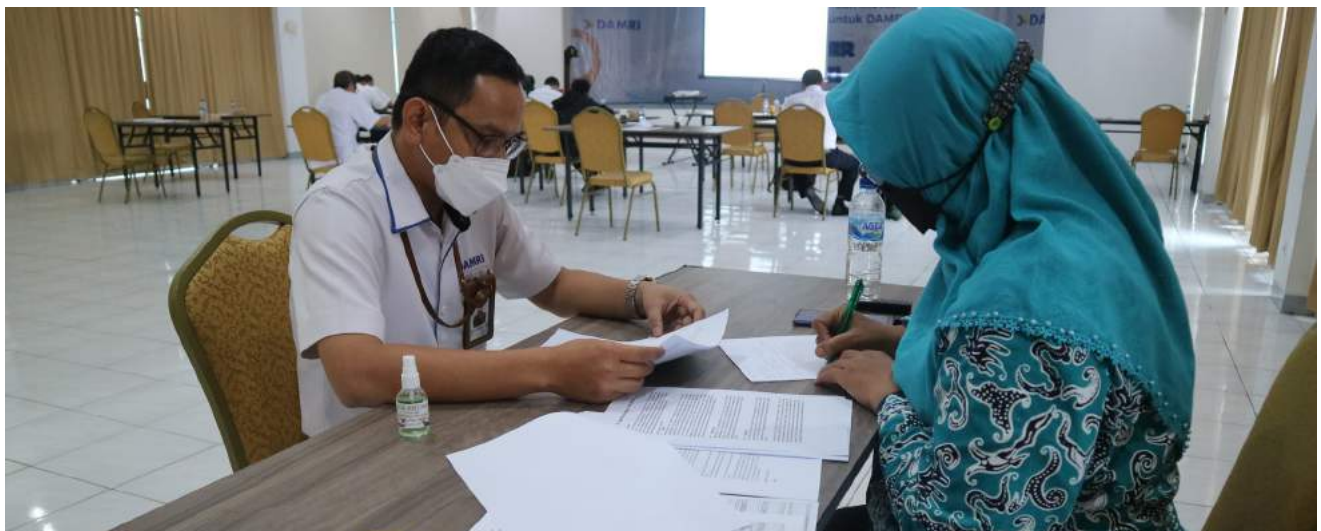
INFORMATION ABOUT FINANCING AND SOCIAL RESPONSIBILITY BUDGET

Untuk tahun 2021 DAMRI melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 261.334.000 yang ditetapkan dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2021. Anggaran tersebut terdiri atas alokasi untuk Program Tanggung Sosial dan Lingkungan sebesar Rp 200.000.000 yang berasal dari Perusahaan dan Program Pendanaan UMK sebesar Rp 61.334.000 dengan menggunakan dana pengembalian angsuran dan jasa.

Selama 2021, DAMRI telah menyalurkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar Rp 91.813.237; sedangkan Program Pendanaan UMK belum terealisasi.

In 2021, DAMRI implemented the Social and Environmental Responsibility Program with a budget of Rp. 261,334,000, which is stipulated in the Minutes of Meeting regarding the Work Plan and Budget for the 2021 Social and Environmental Responsibility Program. The budget consists of an allocation for the Social and Environmental Responsibility Program of Rp. 200.000.000, which came from the Company and from the UMK Funding Program amounting to Rp. 61.334.000, using installment refunds and services.

Throughout 2021, DAMRI has dispersed Social and Environmental Responsibility Programs amounting to Rp. 91.813.237; while the UMK Funding Program has not been realized.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA (HAM)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

Informasi Tentang Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial *Core Subject Hak Asasi Manusia*

Komitmen dan kebijakan Perusahaan atas Hak Asasi Manusia (HAM) berlandaskan pada Universal Declaration of Human Rights yang mengakui penegakan hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan kultural serta Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak dalam Bekerja. Perusahaan juga menerapkan praktik-praktik ketenagakerjaan serta hak asasi manusia sesuai Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait penegakan HAM di DAMRI pada tahun 2021 antara lain memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan dan calon karyawan, baik pria maupun wanita untuk bergabung bersama Perusahaan. Pengakuan tersebut juga mencakup persamaan hak dalam memperoleh apresiasi atau promosi kerja serta tidak mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun selain kinerja dalam bekerja di Perusahaan.

DAMRI memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin meninggalkan pekerjaan. Perusahaan juga telah memiliki sarana penanganan keluhan-kesah karyawan dan mekanisme diskusi untuk penyelesaian persoalan industrial. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja DAMRI. Selama tahun 2021 tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi yang diajukan pegawai kepada Perusahaan.

INFORMATION ON THE COMMITMENT AND SOCIAL RESPONSIBILITY WITH HU- MAN RIGHTS AS CORE SUBJECT

The Company's commitment and policies on Human Rights are based on the Universal Declaration of Human Rights which recognizes the enforcement of civil rights, political rights, economic, social and cultural rights as well as the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. The company also implements labor practices and human rights in accordance with the Job Creation Law Number 11 year 2020.

The implementation of social responsibility related to human rights enforcement at DAMRI in 2021, among others, provides equal opportunities to employees and prospective employees, both male and female, to join the Company. The acknowledgment also includes equal rights in obtaining work appreciation or promotion and does not recognize discrimination in any form other than performance in working at the Company.

DAMRI is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM) which includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permission to leave work. The company also has facilities for handling employee complaints and discussion mechanisms to resolve industrial problems. This policy is contained in the Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the DAMRI Workers Union. During 2021 there were no complaints related to violations of labor practices and human rights violations including incidents of discrimination submitted by employees to the Company.

Informasi Tentang Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Core Subject Hak Asasi Manusia

DAMRI menekankan pada hak asasi manusia terkait ketenagakerjaan dengan fokus hubungan kerja yaitu meliputi pengakuan para pihak, jaminan para pihak, kewajiban dan fasilitas Serikat Pekerja, waktu kerja, keluhan-kesah, bipartit, dan tripartit. Pengelolaan hubungan industrial dimulai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memayungi kepentingan pekerja dan Perusahaan dalam aspek ketenagakerjaan.

Information on Formulation of the Com- pany's Scope of Social Responsibility with Human Rights as Core Subject

DAMRI emphasizes human rights related to employment with a focus on working relations, which includes the recognition of the parties, guarantees of the parties, obligations and facilities of the Labor Union, working hours, complaints, bipartite, and tripartite. The management of industrial relations begins with the implementation of the Collective Labor Agreement (PKB) which covers the interests of workers and the Company within the employment aspect.

Informasi Tentang Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Perusahaan menargetkan untuk senantiasa membina hubungan industrial secara proporsional serta menciptakan hubungan yang sinergis, *mutual understanding, mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit*. Selain itu, kegiatan tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas dan kinerja Perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat membawa pengaruh kepada peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan harapan stakeholder.

Information on Planning Social Respon- sibility in the Human Rights Field

The company targets itself to always develop a proportional industrial relations as well as create relationships that are synergic, have mutual understanding, mutual respect, mutual trust, and of mutual benefits. In addition, activities related to human rights responsibilities are expected to have a positive impact on increasing the productivity and performance of the Company, so that in the end it can have an impact on increasing employee welfare in accordance with stakeholder expectations.

Informasi Tentang Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia meliputi:

1. Pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pekerja.
Perusahaan telah mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang didirikan secara sah yang mewakili anggotanya untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan perundingan dengan manajemen mengenai hubungan kerja. Serikat Pekerja juga telah mengakui bahwa Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin dan menjalankan Perusahaan sesuai dengan kebijakan manajemen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DAMRI menjamin untuk tidak melakukan diskriminasi atau tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pekerja yang dipilih oleh Serikat Pekerja atau ditunjuk oleh Pengurus menjadi Wakil Serikat Pekerja di dalam kapasitasnya untuk melaksanakan tugas. Perusahaan juga menjamin untuk menyelesaikan dengan Serikat Pekerja atas setiap keluhan pekerja, baik yang diajukan secara langsung kepada Pengusaha maupun melalui Serikat Pekerja.

DAMRI memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan yang tidak mengikat serta perizinan/dispensasi untuk menunjang kegiatan operasional dan melaksanakan program kerja serikat pekerja. Dalam hal ini, Perusahaan menyediakan fasilitas ruang kantor kesekretariatan beserta kelengkapannya yang memadai. Hal ini merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk pencegahan pelanggaran HAM.

Informasi Tentang Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Activities in corporate social responsibility related to human rights include:

1. *Recognition and guarantee for Trade Unions.* The company has recognized that the Labor Union is a legally established workers' organization that represents its members to coordinate, consult, and negotiate with management regarding employment relations. The Labor Union has also acknowledged that the Company has the right and obligation to lead and run the Company in accordance with management policies with due observance of applicable regulations.

DAMRI guarantees not to discriminate or pressure, either directly or indirectly, against workers who are selected by the Trade Union or appointed by the Management as Representatives of the Trade Union in their capacity to carry out their duties. The Company also guarantees to resolve with the Labor Union any employee complaints, whether submitted directly to the Employer or through the Trade Union.

DAMRI provides facilities support and non-binding funding as well as permits/dispensations to support operational activities and carry out trade union work programs. In this case, the Company provides secretarial office space facilities and adequate supplement. This is one of the Company's efforts to prevent human rights violations.

2. Waktu kerja, lembur, cuti, dan izin meninggalkan pekerjaan

Perusahaan telah menetapkan waktu kerja, lembur, cuti dan izin meninggalkan pekerjaan dan upah lembur dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Jumlah hari kerja pada unit kerja Kantor Pusat dan Divisi Regional adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; Jumlah hari kerja pada Kantor Cabang adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu; Untuk alasan-alasan tertentu, pimpinan unit kerja dapat menetapkan secara lain mengenai jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu bagi karyawannya.
- b. Jumlah jam kerja karyawan adalah 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk waktu istirahat, dengan ketentuan: 8 (delapan) jam sehari bagi yang melaksanakan waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu; 7 (tujuh) jam sehari bagi yang melaksanakan waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja lembur dan besaran uang lembur diatur secara tersendiri oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Cuti tahunan diberikan kepada karyawan setelah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus terhitung sejak pengangkatannya, dan berhak memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja yang diambil maksimal 2 (dua) kali pengambil.
- e. Cuti sakit diberikan kepada Pekerja yang sakit minimal selama 1 (satu) hari dan maksimal selama 1 (satu) tahun berdasarkan surat keterangan dokter/dokter ahli.

2. Working time, overtime, leave, and permission to leave work.

The company has determined working time, overtime, leave and leave from work and overtime pay with due observance of the following human rights principles:

- a. The number of working days in the Head Office and Regional Division work units is 5 (five) days in 1 (one) week; The number of working days at the Branch Office is 6 (six) days in 1 (one) week; For specific reasons, the head of the work unit may have different determination on the number of working days in 1 (one) week for its employees.
- b. The number of employee working hours is 40 (forty) hours in 1 (one) week excluding rest time, provided that: 8 (eight) hours a day for those who work 5 (five) days a week; 7 (seven) hours a day for those who work 6 (six) days in 1 (one) week.
- c. Provisions regarding the implementation of overtime work and the amount of overtime pay are regulated separately by each work unit according to their needs.
- d. Annual leave is given to employees after working for at least 1 (one) year continuously starting from their appointment, and they are entitled to annual leave for 12 (twelve) working days which is taken a maximum of 2 (two) times.
- e. Sick leave is given to workers who are sick for a minimum of 1 (one) day and a maximum of 1 (one) year based on a doctor's certificate/expert doctor.

- f. Cuti bersalin diberikan kepada Pekerja wanita yang melahirkan. Lama cuti bersalin adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah persalinan.
- g. Cuti gugur kandungan diberikan kepada Pekerja wanita maksimal 45 (empat puluh lima) hari dengan menyertakan surat rekomendasi dokter.
- h. Izin tidak masuk kerja diluar waktu cuti dapat diberikan kepada karyawan dengan keperluan sebagai berikut:
 - Karyawan yang bersangkutan menikah, diberikan izin selama 5 (lima) hari kerja;
 - Mengkhitan anak, diberikan izin selama 2 (dua) hari kerja;
 - Membaptis anak, diberikan izin selama 2 (dua) hari kerja;
 - Menatahkan gigi anak, diberikan izin 2 (dua) hari kerja;
 - Menikahkan anak, diberikan izin 3 (tiga) hari kerja;
 - Anggota keluarga meninggal dunia, diberikan izin selama 3 (tiga) hari kerja;
 - Istri melahirkan, diberikan izin 2 (dua) hari kerja;

Perusahaan memiliki mekanisme pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan HAM yang merupakan salah satu bagian dari laporan manajemen. Laporan manajemen senantiasa dikaji oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

Pada tahun 2021, DAMRI telah mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia (termasuk biaya tunjangan cuti untuk karyawan DAMRI) sebesar Rp. 189.398.262 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua Rupiah).

- f. Maternity leave is given to female workers who give birth. The length of maternity leave is 1.5 (one and a half) months before delivery and 1.5 (one and a half) months after delivery.
- g. Miscarriage leave is given to female workers for a maximum of 45 (forty five) days by attaching a doctor's recommendation letter.
- h. Permission to not go to work outside of leave days can be given to employees with the following requirements:
 - The employee concerned is married, given permission for 5 (five) working days;
 - Circumcision of children, given permission for 2 (two) working days;
 - Baptizing children, given permission for 2 (two) working days;
 - To fix the child's teeth, permission is given for 2 (two) working days;
 - Marrying children, given permission for 3 (three) working days;
 - Family member dies, permission is granted for 3 (three) working days;
 - Wife gives birth, given permission for 2 (two) working days;

The company has a mechanism for reporting the results of the implementation of human rights activities which is one part of the management report. Management reports are constantly reviewed by the Board of Directors and the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.

In 2021, DAMRI has incurred costs for corporate social responsibility related to human rights (including the cost of leave allowances for DAMRI employees) of Rp. 189,398,262 (one hundred and eighty-nine million three hundred ninety-eight thousand two hundred and sixty-two Rupiah).

Informasi Tentang Capaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Sepanjang tahun 2021, DAMRI tidak memperoleh penghargaan terkait hak asasi manusia.

Information on Achievements and Awards for Social Responsibility Initiatives in the Human Rights Field

Throughout 2021, DAMRI did not receive any awards related to human rights.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PRAKTIK OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONAL PRACTICES

Informasi Tentang Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial

DAMRI telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakannya operasi yang adil di antaranya kebijakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan Whistleblowing System (WBS). Kebijakan tersebut dibangun di atas fondasi yang kuat dari visi, misi, serta tata nilai Perusahaan yang diimplementasikan di seluruh fungsi serta seluruh wilayah operasional Perusahaan.

Dengan kebijakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di industri transportasi, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Tentang Rumusan Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Core Subject Operasi Yang Adil

Lingkup kegiatan operasi yang adil antara lain meliputi pencegahan fraud, whistleblowing system (WBS), penghormatan terhadap hak intelektual (HAKI), larangan gratifikasi/penerimaan hadiah/cenderamata, dan hiburan, aktivitas politik dan sosial, serta pencegahan benturan kepentingan.

Information About Social Responsibility Commitment And Policy

DAMRI already has various policies that regulate the implementation of fair operations, including the policies on the Code of Business Conduct and Ethics and the Whistleblowing System (WBS). This policy is built on a strong foundation of the Company's vision, mission, and values which are implemented in all functions and all operational areas of the Company.

With its Code of Business Conduct and Ethics policy, the Company is committed to complying with all government regulations and applying applicable standards in the transportation industry, both in the field of governance and in business practices in general. The Code of Business Conduct and Ethics is a form of commitment and compliance with applicable laws and regulations.

Information About Formulation of the Scope of Corporate Social Responsibility Core Subject Fair Operation

The scope of fair operations includes prevention of fraud, whistleblowing system (WBS), respect for intellectual rights (HAKI), prohibition of gratification/acceptance of gifts/souvenirs, and entertainment, political and social activities, as well as prevention of conflicts of interest.

Informasi Tentang Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

DAMRI menargetkan seluruh Insan DAMRI untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan serta menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan dan dapat membangun reputasi Perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berupaya menegakkan kebijakan-kebijakan terkait dengan operasi yang adil sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, yang selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

Information on Planning Social Responsibility in the field of Fair Operations

DAMRI targets all DAMRI personnel to behave well in carrying out all Company activities and to create a healthy and comfortable working atmosphere within the Company. This is expected to minimize the opportunity for irregularities to occur and can build a good reputation for the Company. Therefore, the Company always strives to enforce policies related to fair operations so as to increase the value of the Company's stakeholders, which in turn will have an impact on increasing the value of the Company.

Informasi Tentang Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi yang Adil

Pencegahan *Fraud*

Fraud adalah tindakan kecurangan, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan atau gratifikasi, penggelapan, penipuan, maupun pemerasan di lingkungan Perusahaan. Sebagai bagian dari semangat untuk menciptakan BUMN Bersih, Perusahaan melakukan pendekatan preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan reminder tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang harus dilakukan seluruh Insan DAMRI setiap tahun serta kegiatan pelatihan dan promosi anti korupsi di lingkungan Perusahaan.

Information on the Implementation of the Social Responsibility Initiative in the Field of Fair Operations

Fraud Prevention

Fraud is an act of fraud, corruption, theft, violation of company policies and regulations, conflict of interest, bribery or gratification, embezzlement, fraud, or extortion within the Company. As part of the spirit to create a Clean SOE, the Company takes a preventive and curative approach to prevent fraud. The preventive approach is carried out through socialization and reminders about the Code of Business Conduct and Ethics that must be carried out by all DAMRI personnel every year as well as anti-corruption training and promotion activities within the Company.

Whistleblowing System (Wbs)

Whistleblowing system diperkenalkan sejak tahun 2014 untuk memperkuat pelaksanaan GCG yang memberikan jalan bagi seluruh Insan DAMRI dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis maupun *fraud*, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik. Perusahaan telah menyediakan media khusus pelaporan pelanggaran melalui surat, email, maupun *website*.

Penghormatan Terhadap Hak Intelektual (HAKI)

Dalam menjalankan bisnis, DAMRI senantiasa menghargai karya seseorang atau institusi dan memberikan penghormatan terhadap hak intelektual seseorang atau institusi. Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. DAMRI mengedepankan sikap:

1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
2. Seluruh Insan DAMRI harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual milik perusahaan.
3. Insan DAMRI harus menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.
4. Seluruh Insan DAMRI harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan. DAMRI berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud.

Larangan Gratifikasi/Penerimaan Hadiah/Cenderamata dan Hiburan

Insan DAMRI dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cenderamata dan/atau hiburan dari setiap pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis atau pesaing DAMRI, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau

Whistleblowing System (Wbs)

The Whistleblowing system was introduced in 2014 to strengthen the implementation of GCG which provides a way for all DAMRI personnel and other stakeholders to report indications of violations of the Code of Business Conduct and Ethics as well as *fraud*, based on evidence that can be accounted for and with good intentions. The company has provided special media for reporting violations by mail, email, or *website*.

Respect for Intellectual Rights (Haki)

In running a business, DAMRI always respects the work of a person or institution and gives respect to the intellectual rights of a person or institution. Intellectual property rights are intangible property that is the result of creativity such as patents, copyrights, and trademarks. DAMRI puts forward the following attitude:

1. Respect the intellectual property rights of others.
2. All DAMRI personnel must actively participate in protecting the intellectual property rights of the company.
3. DAMRI personnel must comply with the laws and regulations governing intellectual property rights.
4. All DAMRI personnel must inform the work they produce both during and outside working hours, if the work is related to the business or operations of the Company. DAMRI is entitled to all the benefits (*exclusive benefits*) of the patent, and others related to the work in question.

Prohibition of Gratuities/Receipt of Gifts/Souvenirs and Entertainment

DAMRI personnel are prohibited from receiving or requesting directly or indirectly gifts/souvenirs and/or entertainment from any party who does not have a business relationship or is a competitor of DAMRI, which aims to obtain information, or something that

sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kedudukan/jabatan. Insan DAMRI yang ditawarkan/diberikan hadiah/cenderamata dan/atau hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi wajib melakukan penolakan dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dan memberikan penjelasan tentang kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

Aktivitas Politik dan Sosial DAMRI

Memberikan hak bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi politik, dan mengharuskan Direksi dan karyawan untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perusahaan dalam urusan politik.

Pencegahan Benturan Kepentingan

Dalam menghadapi adanya benturan kepentingan, setiap Insan DAMRI dilarang untuk:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi keputusan DAMRI dalam proses pengadaan untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman, atau perusahaan di mana keluarga atau teman adalah pejabat pengambil keputusan.
2. Melibatkan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan yang harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan maupun pemimpin unit Pengelola SDM.

Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi kepada vendor terkait dengan operasi yang adil yang telah dituangkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa.

is not justified by the applicable laws and regulations, or to influence a party to do and/or not to do something related to the position/position. DAMRI personnel who are offered/given gifts/souvenirs and/or entertainment that are not in accordance with the provisions stipulated in the Gratification Control Guidelines must politely reject the offer/gift and provide an explanation of these policies and rules to Third Parties.

DAMRI Political and Social Activities

Gives employees the right to express political aspirations, and requires the Board of Directors and employees to comply with all laws and regulations governing the Company's involvement in political affairs.

Prevention of Conflicts of Interest

In the face of a conflict of interest, every DAMRI Personnel is prohibited from:

1. *Engaging in decision-making or try to influence DAMRI's decisions in the procurement process for the benefit of companies owned by family or friends, or companies where family or friends are the decision-making officials.*
2. *Involve families in business relationships to avoid conflicts of interest. All forms of transactions carried out with involvement must be avoided and discussed in advance with superiors and leaders of the HR Management unit.*

The company always conducts socialization to vendors related to fair operations which have been stated in the guidelines for the procurement of goods and services.

Mekanisme Penanganan Konflik

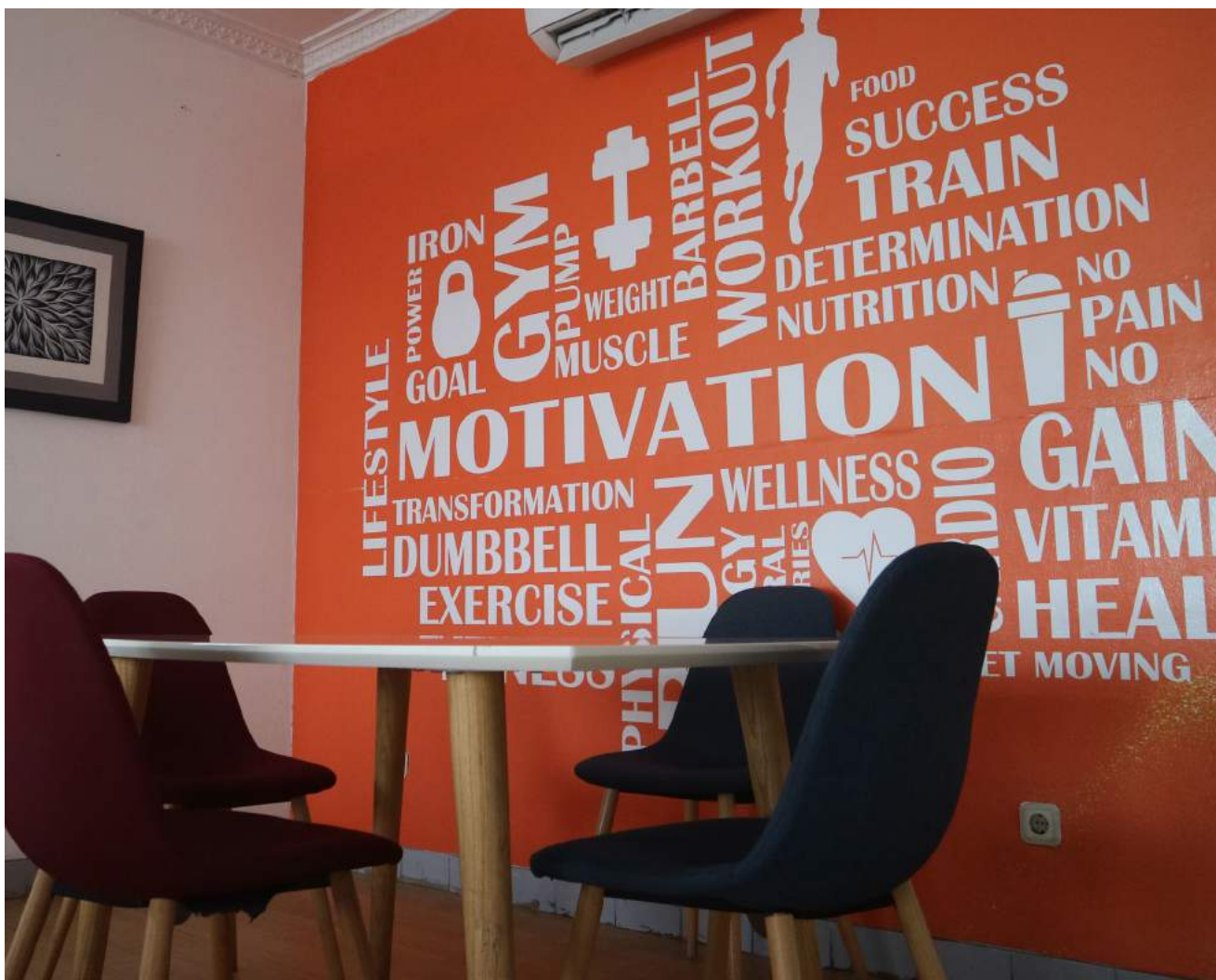
Penanganan konflik terkait operasi yang adil dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system* dan *code of conduct*. Uraian tentang *whistleblowing system* dan *code of conduct* disajikan dalam tata kelola perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Stakeholder berharap bahwa mekanisme *whistleblowing system* dan *code of conduct* ditegakkan sehingga bisa meningkatkan nilai para pemangku kepentingan Perusahaan, selanjutnya akan memberikan dampak pada peningkatan nilai Perusahaan.

Conflict Handling Mechanism

The handling of conflicts related to fair operations is carried out through the implementation of a *whistleblowing system* and a *code of conduct*. A description of the *whistleblowing system* and *code of conduct* is presented in corporate governance in this Annual Report.

Stakeholders hope that the *whistleblowing system* mechanism and *code of conduct* are enforced so that they can increase the value of the Company's stakeholders, which in turn will have an impact on increasing the value of the Company.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENT

Perusahaan mengedepankan perilaku ramah lingkungan dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional. Hal ini berlandaskan pada komitmen Perusahaan untuk tumbuh berkembang bersama lingkungan sebagai salah satu *stakeholder* utama yang vital bagi DAMRI. Selain efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengelolaan limbah sesuai standar ramah lingkungan di Kantor Pusat dan seluruh jaringan operasional DAMRI, Perusahaan juga terus mengoptimalkan pemeliharaan armada sesuai dengan standar baku lingkungan.

The Company prioritizes environmentally friendly behavior in all of its business and operational activities. This is based on the Company's commitment to grow together with the environment as one of the main stakeholders that is vital to DAMRI. In addition to efficient use of resources and waste management in accordance with environmentally friendly standards at the Head Office and throughout DAMRI's operational network, the Company also continues to optimize fleet maintenance in accordance with environmental standards.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN K3

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT AND HSE

Karyawan merupakan aset penting yang berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Oleh karenanya, Insan DAMRI termasuk keluarganya mendapatkan fasilitas kesehatan dari Kantor. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen atas kesehatan karyawan, beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawab sosial terhadap para pegawai antara lain:

- a. membentuk Tim Tanggap Krisis Covid-19 (mulai dari pembentukan Tim Satgas Covid-19, tindakan secara preventif dan kuratif);
- b. pembagian APD (Alat Pelindung Diri) Covid-19;
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai;
- d. melaksanakan vaksinasi kepada seluruh pegawai di seluruh bagian Perusahaan saat pandemi Covid-19;
- e. menerapkan physical distancing, baik pada kegiatan perkantoran maupun kepada pelanggan.

Selain untuk karyawan DAMRI, pada tahun 2021 Perusahaan juga turut serta memberikan banyak informasi tentang K3 untuk pelanggan lewat akun resmi media sosial DAMRI antara lain :

- a. Informasi tentang DAMRI meraih sertifikasi ISO 45001:2018 yang fokus pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Employees are important assets that contribute greatly to the achievement of the Company's goals. Therefore, DAMRI personnel, including their families, receive health facilities from the office. As a form of compliance with applicable laws and regulations and commitment to employee health, several activities that are socially responsible for employees include:

- a. forming a Covid-19 Crisis Response Team (starting from the formation of the Covid-19 Task Force Team, taking preventive and curative actions);
- b. distribution of PPE (Personal Protective Equipment) Covid-19;
- c. conduct health checks on all employees;
- d. carry out vaccinations for all employees in all parts of the Company during the Covid-19 pandemic;
- e. implement physical distancing, both in office activities and to customers.

In addition to DAMRI employees, in 2021 the Company also provided a lot of information about K3 to customers through DAMRI's official social media accounts, including:

- a. Information about DAMRI achieving ISO 45001:2018 certification which focuses on Occupational Health and Safety Management System;

- b. Terkait perjalanan di masa pandemi Covid-19 antara lain, informasi tentang DAMRI yang selalu mendukung peraturan Pemerintah dengan memastikan setiap pelanggan memenuhi persyaratan yang berlaku, seluruh pramudi dan petugas DAMRI melayani perjalanan dengan aman karena telah divaksinasi Covid-19 secara lengkap, DAMRI menghadirkan Ion Plasmacluster atau penyaring udara yang efektif menghilangkan virus, bakteri, jamur, debu, dan kuman hingga 99%;
 - c. Lewat akun resmi media sosial DAMRI juga memberikan informasi tentang manfaat vaksinasi covid-19 dan jenisnya.
- b. Regarding travel during the Covid-19 pandemic, among others, information about DAMRI which always supports Government regulations by ensuring that every customer meets the applicable requirements, DAMRI drivers and officers travel safely because they have been vaccinated against Covid-19 completely, DAMRI presents Plasmacluster Ions or an air filter that effectively removes up to 99% of viruses, bacteria, fungi, dust and germs;
 - c. DAMRI's official social media account also provides information about the benefits of COVID-19 vaccination.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CONSUMENT

Target/Rencana Kegiatan pada Tahun 2021 yang Ditetapkan Manajemen

Sebagai perusahaan jasa transportasi publik, pelayanan prima kepada pelanggan menjadi komitmen paling di tengah pandemi Covid-19. DAMRI senantiasa berupaya untuk menerapkan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial terhadap pelanggan diwujudkan melalui layanan strategis yang meliputi:

1. Menerapkan protokol kesehatan yang lengkap;
2. Menekan penyebaran COVID-19 seperti melakukan desinfeksi kendaraan, penyediaan alat pelindung diri untuk pengemudi dan petugas yang melakukan kontak langsung dengan pelanggan, menyediakan fasilitas *hand sanitizer*, dan kebijakan lainnya;
3. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelanggan dengan memastikan area keberangkatan, selama perjalanan maupun area kedatangan kondusif dan bebas dari tindak kriminal;
4. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, mulai dari kemudahan pembelian tiket, kenyamanan area tunggu, kenyamanan armada dan keramahan petugas;
5. Meningkatkan kemudahan akses informasi dan layanan DAMRI dengan menyediakan beberapa media informasi seperti media sosial, DAMRI Apps serta *website*;
6. Menyediakan pusat pengaduan pelanggan DAMRI melalui beberapa *customer touch points*, mulai *contact center*, media sosial, email *customer service*, dan *website*;

2021 Activities Target/Plan as Determined by Management

As a public transportation service company, excellent service to customers is the most important commitment in the midst of the Covid-19 pandemic. DAMRI always strives to implement social responsibility towards customers. Social responsibility towards customers is realized through strategic services which include the following:

1. Implement complete health protocols;
2. Suppressing the spread of COVID-19 such as carrying out vehicle disinfection, providing personal protective equipment for drivers and officers who make direct contact with customers, providing hand sanitizer facilities, and other policies;
3. Provide security and safety guarantees for customers by ensuring that the departure area, during the trip and in the arrival area, is conducive and free from crime;
4. Improving the quality of services provided to customers, starting from the ease of purchasing tickets, the convenience of the waiting area, the comfort of the fleet and the friendliness of the officers;
5. Improve the ease of access to DAMRI information and services by providing several information channel such as social media, DAMRI Apps and websites;
6. Provide a DAMRI customer complaint center through several customer touch points, starting from contact centers, social media, customer service emails, and websites;

7. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental dan penting.

Komitmen DAMRI untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan didasari oleh keberadaan pelanggan sebagai salah satu pemangku kepentingan dan partner utama dalam menjamin keberlangsungan usaha.

Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)

Penilaian kualitas dan jaminan layanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pelanggan ketika pelanggan sudah mempercayai menggunakan jasa moda transportasi DAMRI.

Pada tahun 2021, DAMRI telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan QA QC sebanyak 2 (dua) periode, yakni 30-6 April 2021 dan 16-17 Desember 2021 dengan menggunakan aplikasi Rampcheck QA QC di lokasi sebagai berikut, yakni Pool Pengendapan Bandara Soekarno Hatta, Pool DAMRI Kemayoran, Pool DAMRI Tipar dan Pugar, serta Pool DAMRI Bogor sebagai langkah kesiapan DAMRI menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru.

Adapun indikator-indikator yang ditetapkan terdiri atas 28 indikator yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Indikator kritis tambahan yang menjadi concern SLA SLG di masa kenormalan baru adalah terkait penyediaan APD untuk pengemudi dan helper, jarak tempat duduk (*physical distancing*), dan cairan sanitasi tangan (*hand sanitizer*).

7. Placing customer satisfaction as a form of service that is fundamental and important.

DAMRI's commitment to always provide excellent service to customers is based on the presence of customers as one of the stakeholders and main partner in ensuring business continuity.

Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC)

Assessment of the quality and guarantee of services provided by the company to customers when customers have put their trust in DAMRI's transportation mode services.

In 2021, DAMRI has monitored and evaluated the implementation of QA QC activities for 2 (two) periods, namely 30-6 April 2021 and 16-17 December 2021 using the Rampcheck QA QC application at the following locations, namely the Soekarno Hatta Airport Deposition Pool, Pool DAMRI Kemayoran, Pool DAMRI Tipar and Pugar, and Pool DAMRI Bogor, as steps towards DAMRI's readiness to face Christmas and New Year transportation.

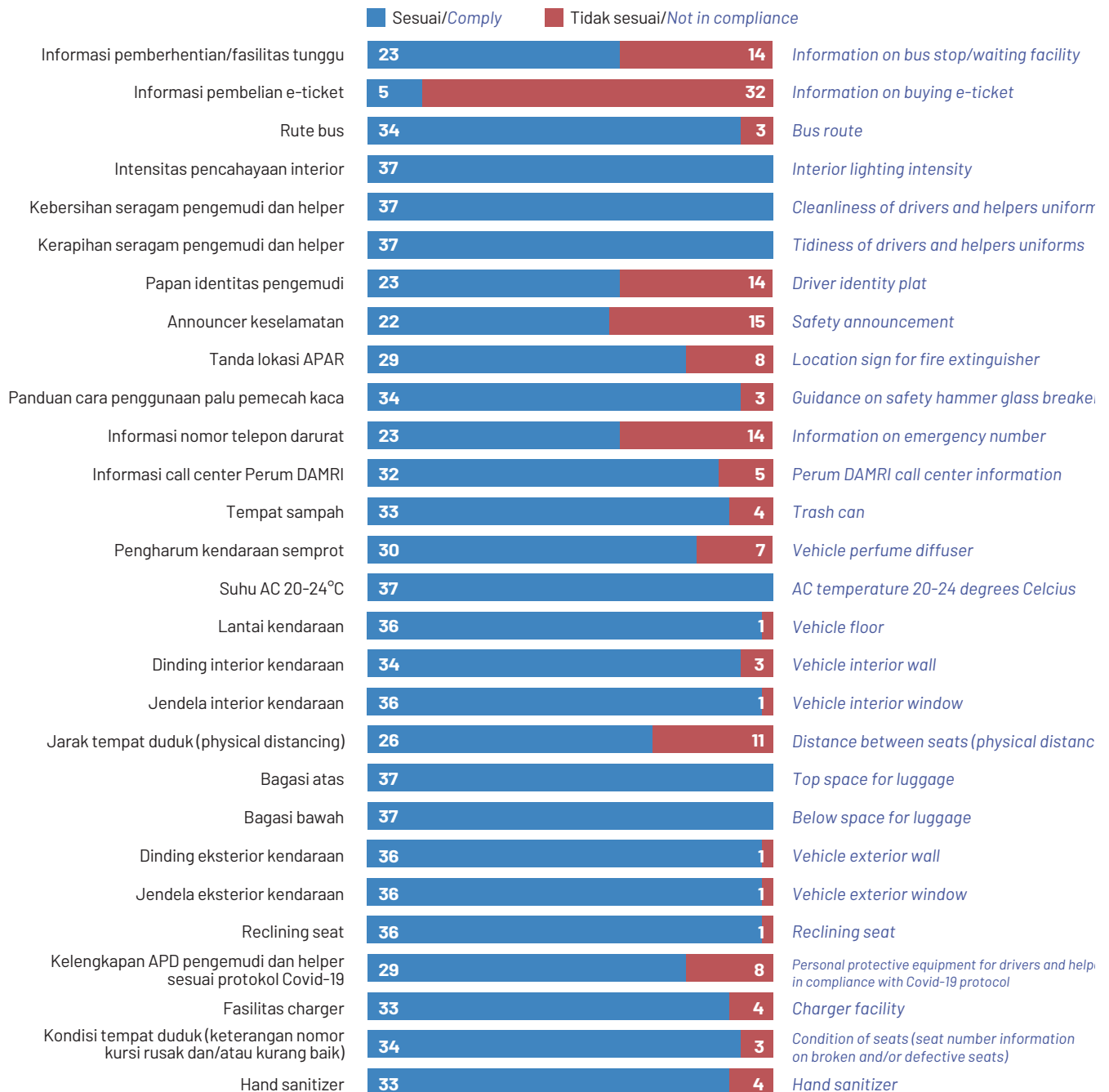
The set indicators consist of 28 indicators that have been adapted to health protocols during the Covid-19 pandemic. Additional critical indicators of concern to SLA SLG in the new normal are related to the provision of PPE for drivers and helpers, seating distance (*physical distancing*), and hand sanitizer.

No	Atribut	Attribute
1	Kelengkapan APD pengemudi dan helper sesuai protokol Covid-19 (masker, sarung tangan, face shield)	Personal protective equipment for drivers and helpers in compliance with Covid-19 protocol (mask, hand gloves, faceshield)
2	Kebersihan seragam pengemudi dan helper	Cleanliness of drivers and helpers uniforms
3	Kerapian seragam pengemudi dan helper	Tidiness of drivers and helpers uniforms
4	Informasi pemberhentian/fasilitas tunggu selanjutnya	Information on bus stop/waiting facility
5	Informasi pembelian e-ticket	Information on buying e-ticket
6	Rute bus	Bus route
7	Intensitas pencahayaan interior	Interior lighting intensity
8	Papan identitas pramudi (1 buah)	Driver identity plat (1 piece)
9	Announcer keselamatan	Safety announcement
10	Tanda Lokasi APAR	Location sign for fire extinguisher
11	Panduan cara penggunaan palu pemecah kaca (minimal 4 buah)	Guidance on safety hammer glass breaker (at least 4)
12	Informasi nomor telepon darurat (1 buah)	Information on emergency number (1 piece)
13	Informasi call center Perum DAMRI (2 buah)	Perum DAMRI call center information (2 pieces)
14	Tempat sampah (2 buah)	Trash can (2 pieces)
15	Pengharum kendaraan semprot (depan, belakang)	Vehicle perfume diffuser (front, rear)
16	Suhu AC 20-24°C	AC temperature 20-24 degrees Celcius
17	Fasilitas charger	Charger facility
18	Lantai kendaraan	Vehicle floor
19	Dinding interior kendaraan	Vehicle interior wall
20	Jendela interior kendaraan	Vehicle interior window
21	Jarak tempat duduk (physical distancing)	Distance between seats (physical distancing)
22	Kondisi tempat duduk (pemberian keterangan nomor kursi rusak dan/atau kurang baik)	Condition of seats (seat number information on broken and/or defective seats)
23	Reclining seat	Reclining seat
24	Bagasi atas	Top space for luggage
25	Bagasi bawah	Below space for luggage
26	Dinding eksterior kendaraan	Vehicle exterior wall
27	Jendela eksterior kendaraan	Vehicle exterior window
28	Hand sanitizer	Hand sanitizer

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan QA & QC Periode 30-6 April 2021

Monitoring and Evaluation of QA & QC Implementation for the Period of 30-6 April 2021 1

Diagram Kesesuaian Komponen Quality Assurance (QA) Diagram on Component in Compliance with Quality Assurance (QA)



Dari hasil survei lapangan terhadap 37 kendaraan yang dilakukan inspeksi, terdapat 5 (lima) indikator paling dominan yang belum memenuhi Service Quality, yaitu:

1. Jarak tempat duduk (*physical distancing*) baru diterapkan sebanyak 26 kendaraan
2. Informasi pemberhentian/fasilitas tunggu berikutnya hanya terdapat pada 23 kendaraan.
3. Informasi nomor telepon darurat dan papan identitas pengemudi hanya terdapat di 23 Kendaraan
4. Announcer keselamatan hanya terdapat di 22 kendaraan
5. Informasi pembelian tiket hanya terdapat pada 5 kendaraan.

Based on the results of a field survey of 37 vehicles that were inspected, there were 5 (five) dominant indicators that did not meet Service Quality, namely:

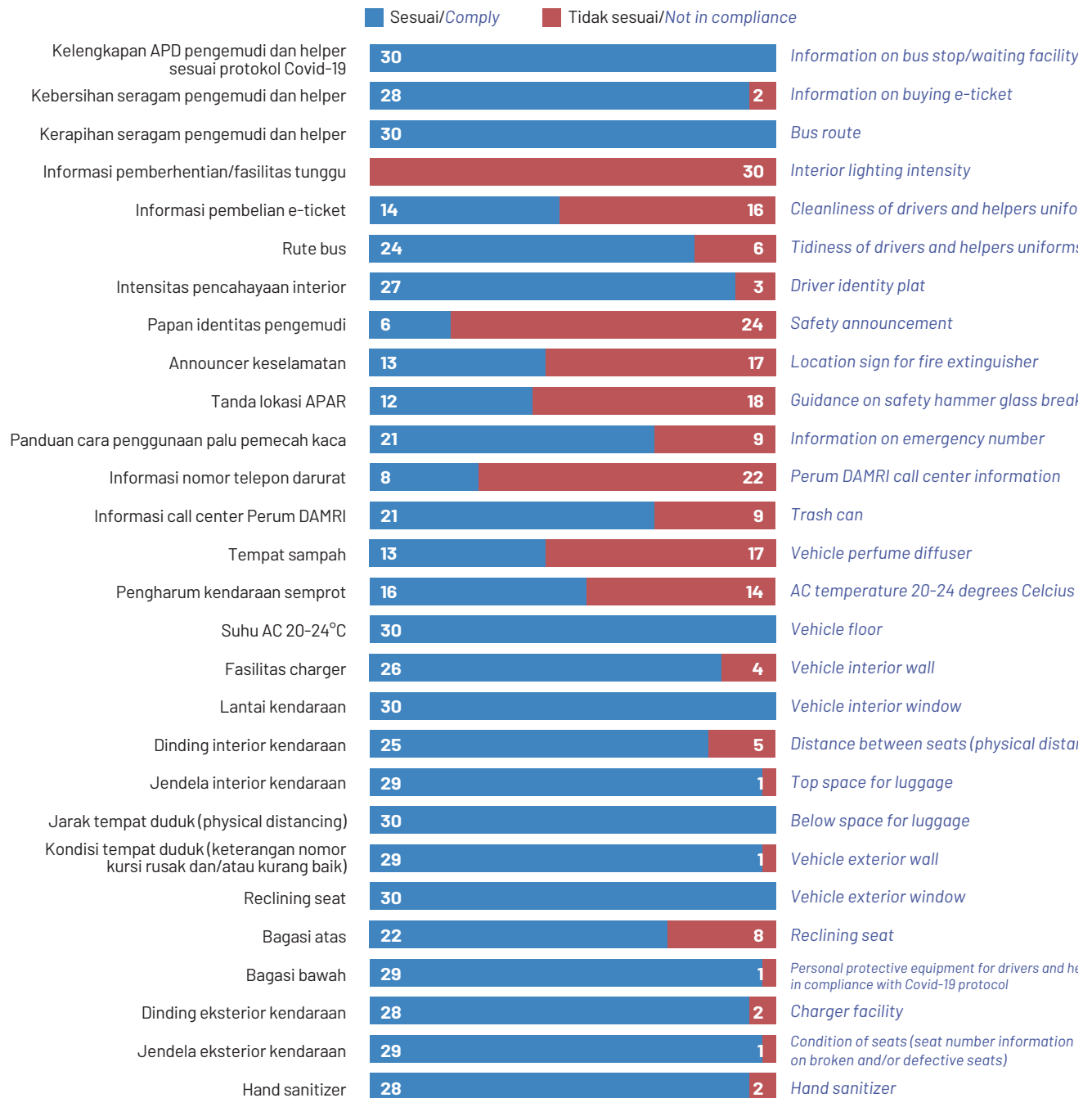
1. Seating distance (*physical distancing*) has only been applied to 26 vehicles
2. Information on the next stop/waiting facility is only available on 23 vehicles.
3. Information on emergency telephone numbers and driver identification boards can only be found on 23 Vehicles
4. Safety announcements are only available in 22 vehicles
5. Ticket purchase information is only available on 5 vehicles.



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan QA & QC Periode 16-17 Desember 2021

Monitoring and Evaluation of QA & QC Implementation for the Period of 16-17 Desember 2021 1

Diagram Kesesuaian Komponen Quality Assurance (QA) Diagram on Component in Compliance with Quality Assurance (QA)



Dari hasil survei lapangan terhadap 30 kendaraan yang dilakukan inspeksi, terdapat 8 (delapan) indikator paling dominan yang tidak terdapat dalam Service Quality:

1. Informasi pemberhentian/fasilitas tunggu selanjutnya
2. Informasi pembelian e-ticket
3. Papan identitas pramudi (1 buah)
4. Announcer keselamatan
5. Tanda lokasi APAR
6. Informasi nomor telepon darurat (1 buah)
7. Tempat sampah yang hanya ada 1 (satu) buah
8. Pengharum kendaraan semprot

From the results of a field survey of 30 vehicles that were inspected, there were 8 (eight) most dominant indicators that were not included in Service Quality:

1. *Information on the next stop/waiting facility*
2. *E-ticket purchase information*
3. *Driver identification board (1 piece)*
4. *Safety Announcer*
5. *Fire extinguisher location sign*
6. *Information on Emergency telephone number (1 piece)*
7. *There is only 1 (one) trash can*
8. *Spray vehicle deodorizer*



Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG)

Perusahaan berkomitmen sebagai penyedia jasa pemuatan penumpang di bandara guna memperoleh persepsi yang sama dan efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Pemuatan Penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. DAMRI memiliki perjanjian Services Level Agreement (SLA) dengan pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berisi tentang Services Level Guarantee (SLG).

Lima aspek Kriteria Persyaratan SLA-SLG adalah:

1. Pelayanan (100%)
2. Personel (100%)
3. Fisik Kendaraan (100%)
4. Pengendalian (100%)
5. Sanksi (100%)

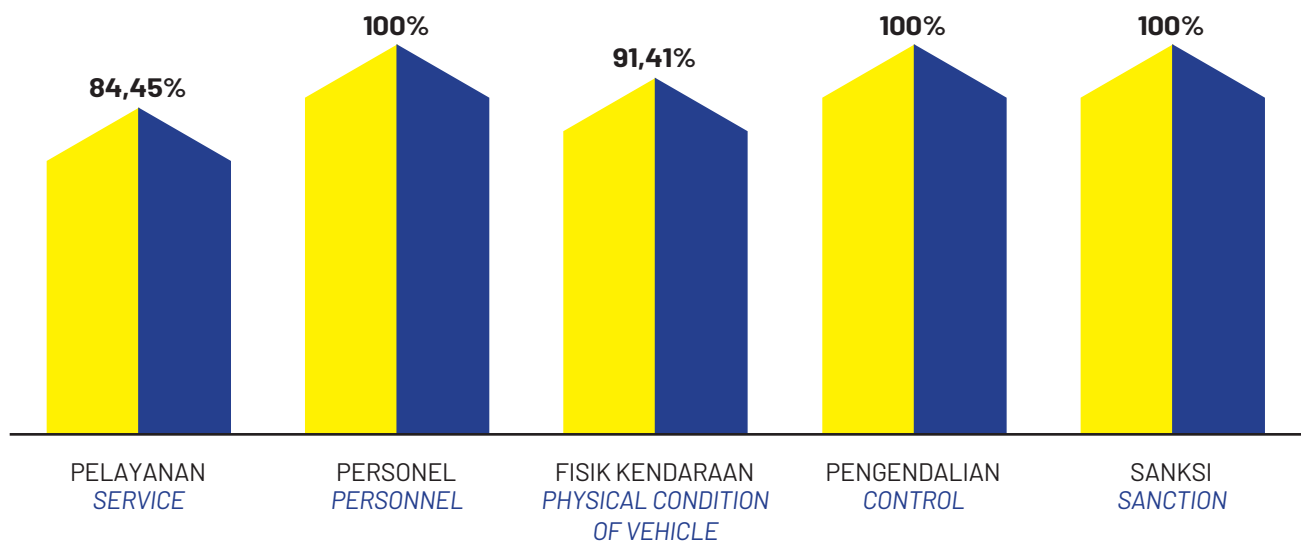
Service Level Agreement (SLA) and Service Level Guarantee (SLG)

The company is committed as a provider of mode integration services at the airport in order to obtain the same perception and be effective in improving services to users of mode integration services at Soekarno-Hatta International Airport. DAMRI has a Services Level Agreement (SLA) with the manager of Soekarno-Hatta International Airport which contains the Services Level Guarantee (SLG).

The five aspects of the SLA-SLG Requirements Criteria are:

1. Service (100%)
2. Personnel (100%)
3. Physical Vehicle (100%)
4. Control (100%)
5. Sanctions (100%)

Ketercapaian SLA dan SLG Fullfillment of SLA and SLG



No	Kriteria Pelayanan <i>Service Criteria</i>	Target <i>Target</i>	Nilai Ketercapaian <i>Value of Fulfillment</i>	Gap Tindakan Perbaikan <i>Corrective Action Gap</i>
1	Memberikan fasilitas kemudahan pemesanan dan pembayaran tiket <i>Providing facility for easy ticket booking and payment</i>	100%	13,5%	86%
2	Kepastian mendapatkan kursi/nomor kursi <i>Certainty of getting a seat/seat number</i>	100%	0,0%	100%

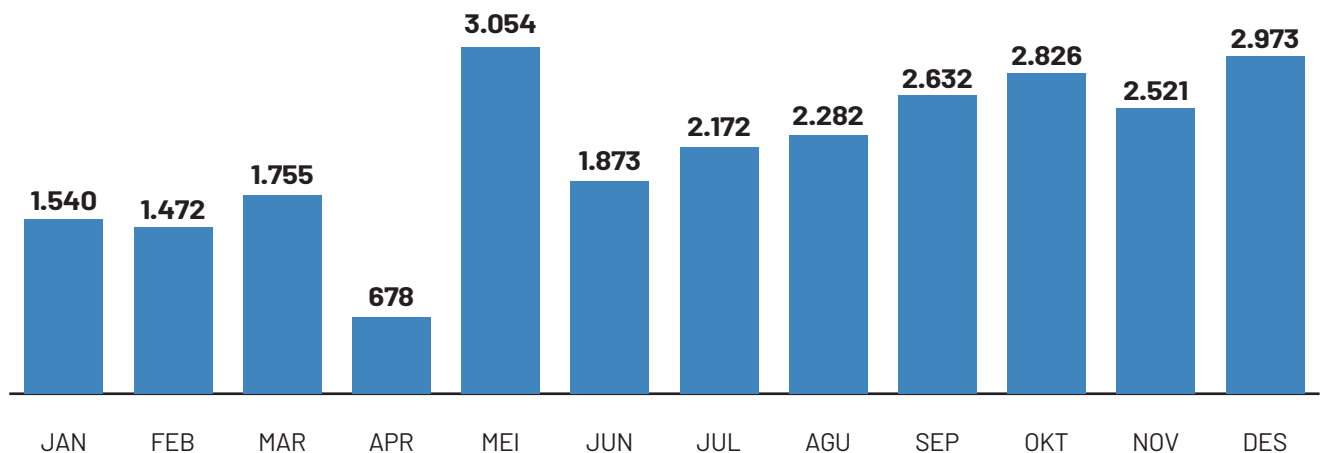
No	Kriteria Fisik Kendaraan <i>Service Criteria</i>	Target <i>Target</i>	Nilai Ketercapaian <i>Value of Fulfillment</i>	Gap Tindakan Perbaikan <i>Corrective Action Gap</i>
1	Kendaraan berusia 5 tahun dibuktikan STNK dalam kondisi laik operasi <i>5 year old vehicle proven by car registration in operating conditions</i>	100%	78,4%	22%
2	Interior kendaraan dalam keadaan rapi, bersih, dan wangi <i>Vehicle interior in tidy, clean, and perfumed condition</i>	100%	95,9%	4%
3	Tersedia informasi gangguan keamanan, stiker berisi nomor telepon/SMS pengaduan/contact center <i>Information availability on safety disturbance, sticker containing telephone number/complaint SMS number/contact center</i>	6%	5,2%	1%
4	Tersedia alat pemukul kaca paling sedikit 2 (dua) unit <i>Availability of safety hammer glass breaker at least 2 (two) units</i>	3%	2,8%	0,2%
5	Tersedia buku panduan penumpang, cara penggunaan fasilitas tanggap darurat saat terjadi kecelakaan <i>Availability of passenger guidance book, instruction on using emergency facility during accidents</i>	3%	2,8%	0,2%
6	Tersedia fasilitas kebersihan tempat sampah <i>Availability of trash cans</i>	3%	2,7%	0,3%
7	Reclining seat <i>Reclining seat</i>	3%	2,9%	0,1%
8	Tersedia APAR 2 (dua) tabung @ 3kg <i>Availability of 2 (two) fire extinguisher cannisters @ 3kg</i>	6%	4,7%	1,3%

Informasi dan Pengaduan Pelanggan

1. Dalam rangka memberikan pelayanan prima melalui aksesibilitas pelanggan, DAMRI menyediakan fasilitas pusat informasi dan pengaduan pelanggan yang dapat diakses melalui beberapa beberapa saluran, antara lain:

- Contact Center dengan hotline (021) 1500-825
- Website Perusahaan: www.damri.co.id
- Email Perusahaan: humas@damri.co.id
- Email Customer Service: cs@damri.co.id
- Twitter: @damriindonesia
- Instagram : @damriindonesia

2. Jumlah pengaduan yang masuk melalui contact center 1500-825, email, dan media sosial selama tahun 2021 adalah sebanyak 25.778 dengan rincian sebagai berikut:



- Informasi sebanyak 21.448
- Barang hilang/rusak/tertinggal sebanyak 216
- Pengaduan pelayanan sebanyak 2.849
- Informasi paket sebanyak 632
- Informasi sewa bus 109
- Saran sebanyak 65
- Telepon terputus 459

Information and Customers Complaint

1. In order to provide excellent service through customer accessibility, DAMRI provides information center and customer complaints facilities that can be accessed through several channels, including:

- Contact Center with hotline (021) 1500-825
- Company Website: www.damri.co.id
- Company Email: humas@damri.co.id
- Customer Service Email: cs@damri.co.id
- Twitter: @damriindonesia
- Instagram : @damriindonesia

2. The number of complaints that came in through contact center 1500-825, email, and social media during 2021 was 25,778, with the following details:

- Informasi sebanyak 21.448
- Barang hilang/rusak/tertinggal sebanyak 216
- Pengaduan pelayanan sebanyak 2.849
- Informasi paket sebanyak 632
- Informasi sewa bus 109
- Saran sebanyak 65
- Telepon terputus 459

Survei Kepuasan Pelanggan

DAMRI melakukan survei kepuasan pelanggan setiap tahunnya untuk mengetahui :

- Profil pelanggan baik secara demografis, geografis maupun psikografis,
- Bagaimana perilaku pelanggan dalam menggunakan DAMRI dan layanan transportasi publik lainnya,
- Kepuasan pelanggan serta aspek-aspek pelayanan yang masih memiliki kekurangan di mata pelanggan.

Melalui hasil survei ini, DAMRI dapat merumuskan strategi pelayanan ke depannya dengan melakukan tindakan perbaikan atas aspek pelayanan yang masih kurang dan menyediakan *expected service* yang dibutuhkan pelanggan.

Tingkat kepuasan pelanggan diukur berdasarkan konsep Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index/CSI*). Metode CSI bertujuan untuk mendapatkan suatu nilai yang memberikan ukuran secara keseluruhan dari suatu kualitas pelayanan. Metode CSI membandingkan penilaian pelanggan antara harapan/*importance* dengan kinerja/*performance*. Dimensi penilaian dalam kuesioner ini menggunakan teori *Service Quality* yang terdiri atas *Tangible*, *Empathy*, *Responsiveness*, *Reliability* dan *Assurance* (TERRA).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 dilakukan secara internal oleh Divisi Pelayanan dengan metode penyebaran kuesioner melalui sistem digitalisasi yang dibagikan melalui aplikasi DAMRI Apps dan media sosial dan secara langsung melalui titik-titik keberangkatan pelanggan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 2 November - 30 November 2021 dengan responden sebanyak 2.400 orang.

Customer Satisfaction Survey

DAMRI conducts customer satisfaction survey annually to acquire the following information:

- Customer profiles either demographically, geographically or psychologically,
- How customers behave in using DAMRI and other public transportation services,
- Customer satisfaction and service aspects that still have shortcomings in the eyes of customers.

Through the results of this survey, DAMRI can formulate a service strategy going forward by taking corrective actions on aspects of services that are still lacking and providing the expected service that customers need.

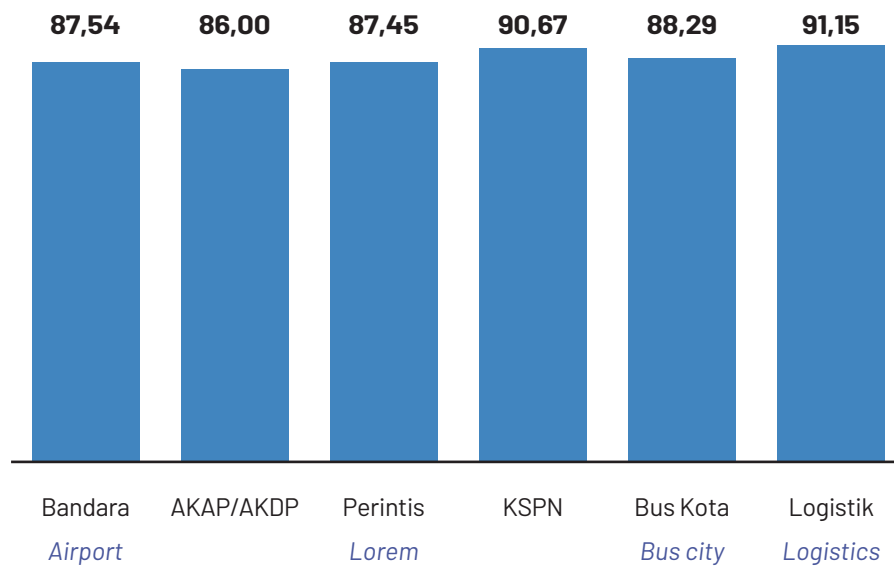
The level of customer satisfaction is measured based on the concept of the Customer Satisfaction Index (CSI). The CSI method aims to obtain a value that provides an overall measure of service quality. The CSI method compares customer ratings between expectations/*importance* and performance. The dimensions of the assessment in this questionnaire use the *Service Quality* theory which consists of *Tangible*, *Empathy*, *Responsiveness*, *Reliability* and *Assurance* (TERRA).

The 2021 Customer Satisfaction Survey will be carried out internally by the Service Division with the method of distributing questionnaires through a digitized system that is distributed through the DAMRI Apps application and social media and directly through customer departure points. The distribution of questionnaires was carried out on 2 November - 30 November 2021 with 2,400 respondents.

Kegiatan tanggung jawab sosial terkait konsumen telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan seluruh segmen tahun 2021 sebesar 87,07 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 79,96.

Consumer-related social responsibility activities have had a positive impact on increasing customer satisfaction. The survey results show that the level of customer satisfaction for all segments in 2021 was 87.07, an increase compared to 2020 which was 79.96.

Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) Per Segmen
Customer Satisfaction Index (CSI) Per Segment





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Kebijakan dan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Core Subject Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menggunakan pendekatan yang difokuskan mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah operasional DAMRI didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan DAMRI adalah:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

Policy and Commitment to Corporate So- cial Responsibility Core Subject Social and Community Development

In carrying out its social and environmental responsibilities, the Company has a policy of using an approach that is focused on encouraging people's economic activities and growth as well as creating job opportunities, business opportunities, and community empowerment. The implementation of the Social and Environmental Responsibility Program in the DAMRI operational area is based on the Regulation of the Minister State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 dated 8 April 2021 regarding the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

The objectives of DAMRI's Social and Environmental Responsibility Program are:

1. Providing benefits for economic development, social development, environmental development, as well as legal and governance development for the Company;
2. Contribute to the creation of added value for the Company with the principle of integrated, targeted, and measurable impact, as well as being accountable;
3. Fostering micro and small businesses, as well as communities around the Company, to be more resilient and independent.

Informasi Tentang Isu-Isu Sosial yang Relevan dengan Perusahaan

Isu-isu sosial yang relevan dengan Perusahaan meliputi pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui Program Kemitraan untuk masyarakat dan komunitas di wilayah operasional DAMRI. Program Kemitraan yang dilakukan DAMRI untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif.

Selain itu, DAMRI juga melaksanakan Program Bantuan Sosial yang bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Program sosial ini diharapkan bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara DAMRI dan masyarakat. Hubungan harmonis menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perusahaan.

Information About Social Issues Relevant to the Company

Social issues relevant to the Company include community social empowerment through the Partnership Program for the people and communities in DAMRI's operational areas. The Partnership Program carried out by DAMRI is to improve the ability of small businesses to become strong and independent through utilizing SOE funds. Through the assistance provided, it is hoped that all Foster Partners can further develop, become independent, and discover their potentials that would allow their respective products to be more competitive.

In addition, DAMRI has also implemented a Social Assistance Program aimed at increasing community resilience in the face of the Covid-19 pandemic. This social program is expected to create a harmonious and mutually beneficial relationship between DAMRI and the community. Harmonious relationship creates a conducive climate for the continuity of business activities and safeguarding the Company's assets.



Informasi Tentang Risiko Sosial yang Dikelola Perusahaan

Risiko sosial yang dihadapi oleh Perusahaan terkait dengan isu sosial di antaranya adalah adanya risiko piutang macet/bermasalah terkait penyaluran dana Program Kemitraan. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 belum ada penyelesaian terhadap piutang macet/bermasalah, di mana penyaluran mayoritas dilaksanakan pada tahun 1996-1997 sebesar Rp 131.242.338 (seratus tigapuluh satu juta duaratus empatpuluh dua ribu tigaratus tigapuluh delapan Rupiah). Pada saat itu telah dilakukan evaluasi ke tempat usaha Mitra Binaan dan sudah tidak berpotensi tertagih dikarenakan alamat Mitra Binaan sudah tidak diketahui dengan adanya pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan serta pemilik usaha meninggal dunia dan usaha bangkrut.

Information About Social Risk Managed by the Company

The social risks faced by the Company concerning social issues include the risk of bad/problematic debt, in relation to the distribution of the Partnership Program funds. Until the Fourth Quarter of 2021, there has been no settlement in the bad/problematic debt, whereby the majority of the funds distribution occurred in 1996 – 1996 amounting to Rp 131,242,338 (one hundred thirty one million two hundred forty two thousand three hundred and thirty eight Rupiah). At that time, an evaluation had been carried out at the Foster Partner's place of business and it was no longer potentially collectible because the Foster Partner's address was unknown due to the expansion of villages/kelurahan and subdistricts as well as the death of the business owner and the business went bankrupt.

Informasi Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Lingkup Program Kemitraan pada tahun 2021 adalah dengan menyalurkan bantuan kepada 81 (delapan puluh satu) mitra di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Lingkup kegiatan Program Bantuan Sosial adalah penyaluran bantuan berupa:

1. Pembelian masker, hand sanitizer, dan disinfektan
2. Rapid/swab/PCR test
3. Pembelian multivitamin

Information on the Scope and Formulation of Social Responsibility in the Field of Social and Community Development

The scope of the Partnership Program in 2021 is to distribute assistance to 81 (eighty one) partners in DKI Jakarta, Banten, West Java, DI Yogyakarta, Central Java, East Java, East Nusa Tenggara, and South Sumatra.

The scope of activities of the Social Assistance Program is the distribution of assistance in the form of:

1. Purchasing of masks, hand sanitizers, and disinfectants
2. Rapid/swab/PCR test
3. Purchasing of multivitamins

Target/Rencana Kegiatan pada Tahun 2021 yang Ditetapkan Manajemen

A. Program Kemitraan

Rencana Kerja manajemen terkait dengan program kemitraan meliputi upaya preventif dan upaya penyehatan kembali. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan meningkatnya pinjaman macet yang dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pinjaman (termasuk proses evaluasi dan analisis yang akurat serta pemberlakuan jaminan) serta optimalisasi dan mengintensifkan fungsi pembinaan, monitoring, dan penanganan langsung untuk memantau perkembangan usaha Mitra Binaan dan kedisiplinan Mitra Binaan dalam penggunaan dana pinjaman dan dalam pengembalian pinjaman. Upaya penyehatan kembali pinjaman macet dilakukan melalui prosedur penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020, tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Aturan tersebut menyebutkan, Program Kemitraan BUMN dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

Untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam aturan tersebut, DAMRI melakukan seleksi ketat dan memberikan kesempatan pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki produk dengan daya saing tinggi namun memiliki keterbatasan dalam pemasaran, SDM, manajemen, permodalan, dan teknologi.

Target/Plan of Activities in 2021 as Determined by Management

A. Partnership Program

Management Work Plan related to the partnership program includes preventive and rehabilitative efforts. Preventive efforts are efforts to prevent the increase in bad debts by applying precautionary principles in the loan disbursement process (including an accurate evaluation and analysis process as well as the application of collateral) as well as optimizing and intensifying the functions of coaching, monitoring, and direct collection to monitor the business development of the Foster Partners and their discipline in the use of loan funds and in repaying loans. Efforts to rehabilitate bad debts are carried out through rescheduling and reconditioning procedures in accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 dated 8 April 2021 concerning Social Responsibility Program and State-Owned Enterprises Environment, as an improvement to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/04/2020, 2 April 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program. The regulation states that the BUMN Partnership Program is carried out to improve the ability of small businesses to become strong and independent through the use of SOE funds.

To fulfill the mandate contained in the regulation, DAMRI conducts strict selection and provides opportunities for small entrepreneurs who have highly competitive products but have limitations in marketing, human resources, management, capital, and technology.

Terhadap para pengusaha yang telah terpilih untuk menjadi mitra Binaan, DAMRI memberikan bantuan dengan beberapa metode berikut:

1. Pemberian pinjaman modal kerja;
2. Pemberian wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajerial;
3. Keikutsertaan Mitra Binaan pada beragam pameran dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan pemasaran produk, investasi, maupun kerja sama bisnis; dan
4. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan seluruh Mitra Binaan dapat lebih berkembang, menjadi mandiri, dan menemukan potensi-potensi yang membawa produk Mitra Binaan menjadi lebih kompetitif.

B. Program Bantuan Sosial

Rencana Kerja manajemen terkait dengan program Bantuan Sosial disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/04/2020, tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Sasaran Program Bantuan Sosial adalah masyarakat sekitar wilayah operasional DAMRI dengan sifat bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan terciptanya pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan) antara DAMRI dengan masyarakat, yaitu dengan terciptanya iklim yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perusahaan (assets safeguarding).

For entrepreneurs who have been selected to become Fostered partners, DAMRI provides assistance with the following methods:

- 1. Providing working capital loans;*
- 2. Providing knowledge and skills to develop their respective businesses in the form of managerial education and training;*
- 3. Participation of Fostered Partners in various exhibitions in order to open and develop product marketing networks, investments, and business cooperation;*
- 4. Through the assistance provided, it is hoped that all Foster Partners can develop further, become independent, and discover potentials that make the Foster Partners' products more competitive.*

B. Social Assistance Program

Management Work Plans related to the Social Assistance program are prepared in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-05/MBU/04/2021 dated 8 April 2021 regarding the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises as an improvement to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/04/2020, dated 2 April 2020 concerning the Third Amendment on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program.

The target of the Social Assistance Program is the community around the DAMRI operational area and intended for community empowerment activities so that it is hoped that a harmonious and mutualistic relationship between DAMRI and the community will be created, namely by creating a conducive climate for the continuity of business activities and safeguarding the Company's assets.

Kegiatan Bantuan Sosial DAMRI telah mendapat perhatian positif dari masyarakat umumnya dan masyarakat sekitar Perusahaan pada khususnya. Kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung dilaksanakan dengan berbagai sektor sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Kegiatan yang Dilakukan dan Dampak Atas Kegiatan Tersebut

Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan

Program Kemitraan berupa Pendanaan UMK yang menjadi Mitra Binaan pada tahun 2021 tidak terealisasi.

Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Sosial

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran DAMRI tahun 2021, penyaluran Program Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp 261.334.000 dengan realisasi penyaluran sebesar 35%:

D. Biaya Yang Dikeluarkan

Program Kemitraan pada tahun 2021 tidak ada penyaluran bantuan kemitraan. Sedangkan, realisasi Program Bantuan Sosial tahun 2021 dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp 91.813.237.

DAMRI's Social Assistance activities have received positive attention from the general public, as well as the community around the Company in particular. Social activities that directly touch the community are carried out in various sectors in accordance with applicable regulations.

C. Conducted Activities and its Impacts

Implementation of the Partnership Program Activities

The Partnership Program in the form of UMK Funding that will become Foster Partners in 2021 has not been realized.

Implementation of Social Assistance Program Activities

Based on DAMRI's 2021 Work Plan and Budget, the distribution of the Social Assistance Program is budgeted at Rp. 261,334,000 with the realization of disbursement amounting to 35%.

D. Expenses

In 2021, there was no distribution of partnership assistance in the Partnership Program. Meanwhile, that year, the Social Assistance Program distribute assistance to the community with funds disbursement amounting to Rp. 91.813.237.

Program Bantuan <i>Aid programs</i>	Jumlah Dana <i>Amount of fund</i>
Pembelian masker, hand sanitizer, dan disinfektan	Rp 26.001.000
Rapid/Swab/ PCR test	Rp 65.127.625
Pembelian multivitamin	Rp 684.512
Jumlah	Rp 91.813.237

Pernyataan Tanggung Jawab Manajemen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Tahun Buku 2021, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Management Responsibility Statement

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI for the fiscal year 2021 has been duly disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the information on this annual report. This statement was duly prepared

Jakarta, 30 Juni 2022

Dewan Pengawas
Supervisory Board



Sam Budigusdian
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board



Yuli Harsono
Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member



Henda Tri Retnadi
Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

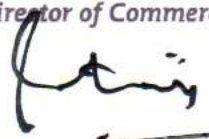
Direksi
Board of Directors



Setia N. Milatia Moemin
Direktur Utama
President Director



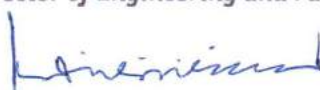
Dadan Rudiansyah
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Director of Commercial and Business Development



Joni Prasetyanto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Arifin
Direktur Teknik dan Fasilitas
Director of Engineering and Facilities



Siti Inda Suri
Direktur SDM dan Umum
Director of Human Capital and General Affairs



MOROD

New
DAMRI



Laporan Keuangan

Financial Statement

31 Desember 2021



PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021

AUDITED
2021

Daftar Isi/ *Table of Contents*

Halaman/ *Page*

Surat Pernyataan Direksi / *Director's Statement*

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditors' Report*

Laporan Keuangan / *Financial Statements*

Laporan Posisi Keuangan / <i>Statements of Financial Position</i>	1 - 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	4 - 5
Laporan Perubahan Ekuitas / <i>Statements of Changes in Equity</i>	6 - 7
Laporan Arus Kas / <i>Statements of Cash Flows</i>	8 - 9
Catatan atas Laporan Keuangan / <i>Notes to Financial Statements</i>	10 - 165

PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2021 DAN 2020
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING
RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
31 December 2021 AND 2020

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

1. Nama/Name Alamat kantor/Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address (as in identity card) or other identity Nomor telepon/Telephone No. Jabatan/Title	: : : : : :	Setia N.Milatia Moemin Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 13140 Jl.Hj.Abu No.19 ,Cilandak, Jakarta Selatan 0218583131 ext hunt Direktur Utama/President Director
2. Nama/Name Alamat kantor/Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address (as in identity card) or other identity Nomor telepon/ Telephone No. Jabatan/ Title	: : : : : :	Joni Prasetyanto Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur 13140 Jl.H.Amar Raya No.53, Duren Sawit Jakarta Timur 0218583131 ext hunt Direktur / Director

menyatakan bahwa :

declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	1. Responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesia Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	3. a. All information contained in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner; b. The Company's financial statements do not contain incorrect material information or fact, nor do they omit material information or fact
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.	4. We are responsible for the Company internal control systems

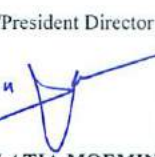
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, : 23 Maret / 23 March 2021

Direktur Utama/President Director

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko /
Director of Finance & Risk Management


SETIA N. MILATIA MOEMIN


JONI PRASETIYANTO

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : 00431/2.1133/AU.1/06/0259-2/1/III/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI

*Board of Supervisors and Directors
Perusahaan Umum (Perum) DAMRI*

Laporan atas laporan keuangan

Report on the financial statements

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI ("the Entity"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and Standards on Auditing based on State Finance Audit Standards (SPKN) established by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 29932121 (Hunting) & +62 21 3144003 • Fax: +62 21 29932113 & +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 13 atas laporan keuangan, Perusahaan belum mengakui kepemilikan (belum mencatat sebagai aset) nilai bus yang diserahkan oleh Kementerian Perhubungan yang telah dioperasikan sejak 2016 sebanyak 419 unit bus dengan nilai sebesar Rp375.871.800.000 yang telah dikonfirmasi berdasarkan Surat Konfirmasi Bus Bantuan Pemerintah No. UM.303/2/18/DJPD/2022 dan belum memperhitungkan beban penyusutan pada laporan keuangan.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI as of 31 December 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

As disclose in Note 13 to the financial statements, the Entity has not recognized ownership (not recorded as an asset) the value of the buses handed over by the Ministry of Transportation which have been operated since 2016 consisting of 419 buses with value amounting to Rp 375,871,800,000 which has been confirmed based on the Government Assistance Bus Confirmation Letter No. UM.303/2/18/DJPD/2022 and has not calculated depreciation expenses on its financial statements.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Keseluruhan bus tersebut masih tercatat dalam Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan diserahkan kepada Perum DAMRI untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional dan selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian dan menerima/mengelola pendapatannya.

The entire bus is still recorded in the Inventory List as State Property (BMN) at the Directorate General of Land Transportation Ministry of Transportation and handed over to Perum DAMRI to be used in operational tasks and subsequently obliged to provide maintenance/operating costs and receive/manage the income.

Kami membawa perhatian pada Catatan 38 atas laporan keuangan 31 Desember 2021 mengenai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan Perusahaan turun sebesar Rp 99.752.586.417 sehingga mencapai kerugian sebesar Rp 152.902.380.435 pada tahun 2021. Pandemi masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga menimbulkan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi perekonomian. Langkah-langkah manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara Inisiatif Strategis Komersial dan Pengembangan Usaha yang telah diungkapkan dalam Catatan 38 tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

We bring attention to Note 38 to the financial statements as of 31 December 2021, concerning the impact of COVID-19 pandemic which resulting in a decrease in the Company's revenues by Rp 99,752,586,417, thus experiencing loss amounting to Rp 152,902,380,435 as of 2021. The pandemic is still ongoing up to the issuance of the financial statements so that it creates uncertainty related to economic conditions. Management's steps to overcome these conditions are by conducting Strategic Commercial and Business Development Initiatives which have been disclosed in Note 38. Our opinion is not modified in this respect.

Hal lain

Other matter

Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor. PHHARP-AL/096/PH/LD/2022 dan Laporan Pengendalian Intern nomor. PHHARP-AL/095/PH/LD/2022, masing-masing disajikan dalam laporan tersendiri.

Reports of Compliance with Statutory Regulations number. PHHARP-AL/096/PH/LD/2022 and Internal Control Report number. PHHARP-AL/095/PH/LD/2022 are presented separately.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Sikanto, Ak., CA., CPA., Asean CPA, MM
Izin Akuntan Publik/ Public Accountant License No. AP.0259
Izin Usaha KAP/ Business License No. 855/KM.1/2017

Jakarta, 23 Maret 2022/ March 2022

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Financial Position
31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	3c,5	53.642.670.656	73.874.659.298	Cash and cash equivalents
Piutang usaha- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 9.104.504.802 pada tahun 2021 dan Rp 8.765.415.252 pada tahun 2020	3d, 3e, 3f, 3g,6	16.727.144.244	24.301.465.371	Accounts Receivable - net of allowance for impairment loss amounting to Rp 9,104,504,802 in 2021 and Rp 8,765,415,252 in 2020
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.219.983.571 dan Rp 2.631.601.049 pada tahun 2021 dan 2020	3d, 3e,3f, 3h,7	6.750.957.012	5.426.901.415	Other receivables - net of allowance for impairment loss amounting to Rp 3,219,983,571 and Rp 2,631,601,049 in 2021 and 2020
Persediaan	3g, 3i,8	4.780.423.739	8.749.760.084	Inventories
Biaya dibayar dimuka	3j, 9	641.876.888	800.553.717	Prepaid expenses
Uang muka	10	3.227.603.943	12.095.093.495	Advances
Jumlah aset lancar		85.770.676.482	125.248.433.380	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset program	12	1.474.783.495	1.007.497.689	Plan assets
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.528.994.929.620 pada tahun 2021 dan Rp 1.433.773.276.359 pada tahun 2020	3l, 13	864.452.586.156	945.985.928.283	Fixed assets- accumulated depreciation amounting to Rp 1,528,994,929,620 in 2021 and Rp 1,433,773,276,359 in 2020
Investasi pada entitas asosiasi	3k, 14	319.000.000	319.000.000	Investment in associates
Aset dalam proses	3l, 15	524.588.725	4.170.746.658	Assets in progress
Aset lain-lain	16	4.456.801.770	1.918.001.594	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		871.227.760.146	953.401.174.224	Total non current assets
JUMLAH ASET		956.998.436.628	1.078.649.607.604	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Financial Position (continued)
31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	17	35.611.991.205	41.479.023.152	Accounts payable
Pendapatan diterima dimuka	18	4.864.256.926	3.376.516.487	Unearned revenues
Beban akrual	19	723.899.758	1.253.605.961	Accrued expenses
Utang pajak	3v, 11a	934.848.713	1.805.698.662	Taxes payable
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	3t, 20a	17.542.099.112	23.738.099.112	Current maturities of long term bank loan
Utang sewa	3d, 3o, 21	101.856.770	-	Lease liabilities
Utang lain-lain	22	83.355.256.993	51.349.314.588	Other payables
Jumlah liabilitas jangka pendek		143.134.209.477	123.002.257.962	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non current liabilities
Utang investasi DPLK	23	33.875.967.550	-	DPLK investment payables
Liabilitas pajak tangguhan	3v, 11c	38.804.604.621	55.246.550.648	Deferred tax liabilities
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3t, 20b	161.811.808.911	167.103.908.022	Long term bank loan net of current maturities
Utang sewa	3d, 3o, 21	1.191.420.334	2.014.310.039	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	3s, 24	223.779.554.482	236.857.552.293	Employee benefit
Jumlah liabilitas jangka panjang		459.463.355.898	461.222.321.002	Total non current liabilities
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
<i>Dipindahkan</i>		602.597.565.375	584.224.578.964	<i>Carrying forward</i>

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain
31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income
31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
pindahan		602.597.565.375	584.224.578.964	<i>brought forward</i>
EKUITAS				EQUITY
Modal disetor	25.1	19.700.000.000	19.700.000.000	<i>Paid up capital</i>
Penyertaan Modal				<i>State Equity</i>
Negara (PMN)	25.2	627.721.000.110	627.721.000.110	<i>Participation (PMN)</i>
Modal sumbangan	25.3	15.207.129.000	4.266.253.000	<i>Donated capital</i>
Cadangan modal	25.4	(51.965.392.184)	194.252.022.047	<i>Capital reserves</i>
Penghasilan				<i>Other comprehensive</i>
komprehensif lain	25.5	(103.359.485.238)	(131.436.835.517)	<i>income</i>
Rugi tahun berjalan		(152.902.380.435)	(220.077.411.000)	<i>Loss for the year</i>
JUMLAH EKUITAS		354.400.871.253	494.425.028.640	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS				TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS		956.998.436.628	1.078.649.607.604	AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements, which are an integral part of the Financial Statements

Jakarta, 23 Maret/ March 2022



Setia N. Milatia Moemin
Direktur Utama/
President Director



Joni Prasativanto
Direktur Keuangan/
Finance Director

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income (continued)
 For the year ended
 31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
PENDAPATAN USAHA				OPERATING REVENUES
Pendapatan angkutan	26	610.940.101.658	725.339.822.754	Transportation revenues
Pendapatan bukan angkutan	27	25.566.369.979	10.739.682.796	Non transportation revenues
Lainnya	28	2.076.152.357	2.255.704.861	Others
Jumlah Pendapatan Usaha		638.582.623.994	738.335.210.411	Total Operating Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Operasional	29	521.750.886.336	643.459.570.115	Operating
Pemasaran	30	18.854.479.800	27.187.548.495	Marketing
Administrasi dan umum	31	242.882.680.986	279.599.143.835	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		783.488.047.122	950.246.262.445	Total Operating Expenses
RUGI USAHA		(144.905.423.128)	(211.911.052.034)	LOSS FROM OPERATION
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan lain-lain	32	2.446.047.040	658.304.841	Other income
Beban lain-lain	32	(12.347.977.894)	(15.205.054.439)	Other expenses
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		(9.901.930.854)	(14.546.749.598)	Total Other Income (Expenses)
PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN				FINANCE INCOME (COST)
Pendapatan keuangan	33	445.720.503	2.973.680.848	Finance income
Beban keuangan	33	(14.348.659.406)	(18.735.813.321)	Finance cost
Jumlah (Beban) Keuangan		(13.902.938.903)	(15.762.132.473)	Total Finance Income (Cost)
RUGI SEBELUM PAJAK		(168.710.292.885)	(242.219.934.105)	LOSS BEFORE TAX
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK				TAX INCOME (EXPENSES)
Pajak kini	11b	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	11c	15.807.912.450	22.142.523.105	Deferred tax
Jumlah Beban Pajak		15.807.912.450	22.142.523.105	Total Income (Expenses) Tax
RUGI TAHUN BERJALAN				LOSS FOR THE YEAR
Dipindahkan		(152.902.380.435)	(220.077.411.000)	Carrying forward

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income (continued)
 For the year ended
 31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2021	2020	
RUGI TAHUN BERJALAN				LOSS FOR THE YEAR
Pindahan	(152.902.380.435)	(220.077.411.000)		Brought forward
PENGHASILAN (RUGI)				OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN				INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan				Items that will not be
direklasifikasikan ke laba rugi				reclassified to profit or loss
				Gain (loss) on
Keuntungan (kerugian) penurunan aset	-	(6.652.056.000)		decline in assets value
Keuntungan (kerugian) aktuarial	1.706.444.647	(77.686.710.387)		Actuarial gains (loss)
JUMLAH PENGHASIAN				TOTAL OTHER
(RUGI)				COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN	(151.195.935.788)	(304.416.177.387)		INCOME (LOSS)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements, which are an integral part of the Financial Statements

Jakarta, 23 Maret/ March 2022



Setia N. Milatia Moemin
 Direktur Utama/
 President Director



Joni Prasetyanto
 Direktur Keuangan/
 Finance Director

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of changes in equity
For the year ended
31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)										
Urutan	Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid up capital	Penyertaan modal Negara/ State Equity Participation	Bantuan Pemerintah yang belum Ditentukan Statusnya/ Undefined Status of Government Assistance	Modal sumbangan/ Donated Capital	Cadangan modal/ Capital Reserves	Penghasilan Komprehensif lain/ Other Comprehensive Income	Saldo Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	Jumlah/ Total	Description
Saldo		19.700.000.000	627.721.000.110	-	4.266.253.000	150.989.606.842	(53.031.234.775)	43.262.415.205	792.908.040.382	Balance as of 1 January 2020
Cadangan modal	25.4	-	-	-	-	43.262.415.205	-	(43.262.415.205)	-	Capital reserves
Penghasilan komprehensif		-	-	-	-	-	-	-	-	Comprehensive
Tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	income for the year
Penyesuaian imbalan pasca		-	-	-	-	-	-	-	-	Adjustments on last year post-
Kerja tahun lalu		-	-	-	-	-	(18.961.721.264)	-	(18.961.721.264)	employment benefit
Imbalan pasca kerja		-	-	-	-	-	(52.791.823.478)	-	(52.791.823.478)	Employee benefit
Revaluasi aset		-	-	-	-	-	(6.652.056.000)	-	(6.652.056.000)	Asset revaluation
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(220.077.411.000)	(220.077.411.000)	Loss for the year
Saldo		19.700.000.000	627.721.000.110	-	4.266.253.000	194.252.022.047	(131.436.835.517)	(220.077.411.000)	494.425.028.640	Balance as of 31 December 2020
31 Desember 2020										carried forward
dipindahkan										

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of changes in equity (continued)
 For the year ended
 31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)										
Uraian	Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid up capital	Penyertaan modal Negara/ State Equity Participation	Bantuan Pemerintah yang belum Ditentukan Statusnya/ Undefined Status Of Government Assistance	Modal sumbangan/ Donated Capital	Cadangan modal/ Capital Reserves	Penghasilan Komprehensif lain/ Other Comprehensive	Saldo Laba (Rugi)/ Profit (Loss)	Jumlah/ Total	Description
Saldo 31 Desember 2020 pindahan		19.700.000.000	627.721.000.110	-	4.266.253.000	194.252.022.047	(131.436.835.517)	(220.077.411.000)	494.425.028.640	Balance as of 31 December 2020 brought forward
Cadangan modal Penambahan Modal sumbangan Penyesuaian imbalan pasca kerja tahun lalu	25.4 25.3	- -	- -	- -	- 10.940.876.000	-(220.077.411.000) -	- -	220.077.411.000 -	- 10.940.876.000	Capital reserves Additional Donated capital Adjustments on last year post- employment benefit
Imbalan pasca kerja Rugi tahun berjalan		- -	- -	- -	- -	-(26.140.003.231) -	26.370.905.632 1.706.444.647	- -	230.902.401 1.706.444.647	Employee benefit Employee benefit Loss for the ear
		-	-	-	-	-	-(152.902.380.435)	(152.902.380.435)	(152.902.380.435)	
Saldo 31 Desember 2021		19.700.000.000	627.721.000.110	-	15.207.129.000	(51.965.392.184)	(103.359.485.238)	(152.902.380.435)	354.400.871.253	Balance as of 31 December, 2021
Jakarta, 23 Maret/ March 2022										

Jakarta, 23 Maret/ March 2022


Setia N. Milatia Moemin
 Direktur Utama/
 President Director


Joni Prasativanto
 Direktur Keuangan/
 Finance Director

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan See accompanying Notes to the Financial Statements, which are an integral part of the Financial Statements

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Arus Kas
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Cash Flows)
For the years ended
31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2021	2020	
AKTIVITAS OPERASI:			OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	643.654.732.443	736.806.043.582	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari lainnya	6.009.939.836	15.967.373.345	Other cash receipts
Pengeluaran kas kepada pemasok	(150.833.669.308)	(29.931.022.143)	Cash paid to supplier
Pengeluaran kas beban operasional	(238.062.560.333)	(438.280.510.723)	Cash paid for operating expenses
Pengeluaran kas kepada karyawan	(233.725.864.924)	(309.222.804.986)	Cash paid to employees
Kas yang Digunakan untuk Operasi	27.042.577.714	(24.660.920.925)	Cash Used in Operations
Pembayaran Bunga & Beban Keuangan	(13.801.082.133)	(18.734.805.671)	Interest & Financial Charges Paid
Pembayaran Pajak Penghasilan	(1.504.883.525)	(18.207.724.562)	Income Taxes Paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	11.736.612.056	(61.603.451.158)	Net Cash Used in Operating Activities
AKTIVITAS INVESTASI:			INVESTING ACTIVITIES:
Pengeluaran untuk perolehan aset tetap	(26.120.028.708)	(35.465.803.199)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	1.001.814.475	657.769.841	Cash receipts from disposal of fixed assets
Penambahan aset lainnya	(5.480.273.649)	-	Other assets addition
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(30.598.487.882)	(34.808.033.358)	Net Cash from Used in Investing Activities
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES:
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	(12.310.988.816)	(35.992.769.514)	Payment of long term loans
Penerimaan pinjaman jangka panjang	-	60.168.040.000	Acceptance of long-term loans
Penerimaan Bantuan Permerintah	10.940.876.000	-	Receipt of government assistance
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(1.370.112.816)	24.175.270.486	Net Cash Provided from Financing Activities

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Laporan Arus Kas (lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2021

Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI
Statements of Cash Flows (continued)
 For the years ended
 31 December 2021

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2021	2020	
KAS DAN			CASH AND
SETARA KAS	(20.231.988.642)	(72.224.283.936)	CASH EQUIVALENTS
SALDO KAS DAN			CASH AND
SETARA KAS			CASH EQUIVALENTS AT
AWAL TAHUN	73.874.659.298	146.091.972.029	BEGINNING OF THE YEAR
SALDO KAS			CASH AND
DAN SETARA KAS			CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN	53.642.670.656	73.867.688.093	AT END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements, which are an integral part of the Financial Statements

Jakarta, 23 Maret / March 2022


Setia N. Milatia Moemin
 Direktur Utama/
 President Director


Joni Prasetyanto
 Direktur Keuangan/
 Finance Director

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI didirikan pada tanggal 25 November 1946 yang pada awalnya merupakan gabungan dari dua usaha angkutan di zaman pendudukan Jepang yaitu "Jawa Unyu Zigyosha" dan "Zidosha Sokyoku". Pada tahun 1945, kedua usaha angkutan berubah nama menjadi "Djawatan Pengangkutan" untuk angkutan barang dan "Djawatan Angkutan Darat" untuk pengangkutan penumpang dibawah pengelolaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berdasarkan Menteri Perhubungan RI No. 01/DAM/46, kedua djawatan itu digabungkan menjadi "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblrik Indonesia", yang disingkat menjadi DAMRI.

Tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 tahun 1961, yang kemudian BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1984 dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002, status PN DAMRI beralih menjadi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

b. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha

Dalam menjalankan usahanya Perum DAMRI berkedudukan di Jl. Matraman Raya No. 25, Jakarta Timur 13140.

a. Establishment and General Information

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI was established on 25 November 1946 which was originally a merger of two freight businesses in Japanese colonial era, namely "Jawa Unyu Zigyosha" and "Zidosha Sokyoku". In 1945 are both of the freight companies changed their names to "Djawatan Pengangkutan" for freight transportation and "Djawatan Angkutan Darat" for passenger transportation under the management of Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Based on Decree of Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia No.01/DAM/46, the two freight agencies were merged into "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblrik Indonesia" abbreviated as DAMRI.

In 1961, DAMRI's status was changed to General Governing Body of State Companies (BPUPN) based on Government Regulation No. 233 in 1961, which then BPUPN was removed and DAMRI was established as State Enterprise (PN) in 1965. Based on Government Regulation No. 30 of 1984 and which then amended with Government Regulation No. 31 in 2002, PN DAMRI status was changed to Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

b. Office and Business Location

Perum DAMRI is located at Jl. Matraman Raya No. 25, East Jakarta 13140.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

**b. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha
(lanjutan)**

Perum DAMRI memiliki 4 Kantor Divisi Regional, yaitu Kantor Divisi Regional I di Jakarta, Kantor Divisi Regional II di Semarang, Kantor Divisi III di Surabaya, Kantor Divisi Regional IV di Jayapura dan Kantor *Strategic Business Unit* (SBU) di Jakarta.

Sedangkan kegiatan pelayanan operasional terdapat di seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan layanan sebanyak 57 Kantor Cabang dan 1 Kantor *Strategic Business Unit* (SBU), yaitu:

- 1) Kantor Divisi Regional I: Cabang Banda Aceh, Cabang Medan, Cabang Padang, Cabang Jambi, Cabang Palembang, Cabang Pangkal Pinang, Cabang Bengkulu, Cabang Batam, Cabang Bandar Lampung, Cabang Travel, Cabang Angkutan Barang, Cabang Angkutan Khusus Bandara (UAKB) Soekarno-Hatta Jakarta, Cabang Serang, Cabang Bogor, Cabang Bandung, dan Cabang Pekanbaru.
- 2) Kantor Divisi Regional II: Cabang Purworejo, Cabang Purwokerto, Cabang Cilacap, Cabang Pontianak, Cabang Banjarmasin, Cabang Palangkaraya, Cabang Samarinda, Cabang Yogyakarta, Cabang Surakarta, dan Cabang Tanjung Selor.

1. GENERAL (continued)

**b. Office and Business Location
(continued)**

Perum DAMRI has 4 Regional Division Offices, namely the Office of Regional Division I in Jakarta, Office of Regional Division II in Semarang, Office of Division III in Surabaya, Office of Regional Division IV in Jayapura and Office of Strategic Business Unit (SBU) in Jakarta.

DAMRI have service network of 57 Branch Offices and 1 Strategic Business Unit (SBU) office, as follows:

- 1) Regional Division I Office: Banda Aceh Branch, Medan Branch, Padang Branch, Jambi Branch, Palembang Branch, Pangkal Pinang Branch, Bengkulu Branch, Batam Branch, Bandar Lampung Branch, Travel Branch, Freight Transportation Branch, Soekarno-Hatta Airport Special Transportation Branch (UAKB) Jakarta, Serang Branch, Bogor Branch, Bandung Branch, and Pekanbaru Branch.
- 2) Regional Division II Office: Purworejo Branch, Purwokerto Branch, Cilacap Branch, Pontianak Branch, Banjarmasin Branch, Palangkaraya Branch, Samarinda Branch, Yogyakarta Branch, Surakarta Branch, and Tanjung Selor Branch.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tempat Kedudukan dan Lokasi Usaha (lanjutan)

- 3) Kantor Divisi Regional III: Cabang Malang, Cabang Ponorogo, Cabang Banyuwangi, Cabang Pamekasan, Cabang Denpasar, Cabang Mataram, Cabang Kupang, Cabang Waingapu, Cabang Kefamenanu, Cabang Ende, Cabang Kendari, Cabang Palu, Cabang Mamuju, Cabang Surabaya, Cabang Jember, Cabang Makassar, Cabang Manado, dan Cabang Gorontalo.
- 4) Kantor Divisi Regional IV: Cabang Jayapura, Cabang Merauke, Cabang Sorong, Cabang Manokwari, Cabang Biak, Cabang Nabire, Cabang Serui, Cabang Mimika, Cabang Ambon, Cabang Halmahera, Cabang Sorong Selatan, Cabang Sarmi, dan Cabang Namlea.
- 5) Kantor *Strategic Business Unit (SBU)*: Transjakarta Koridor 1 & 8.

c. Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perum DAMRI, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha sebagai berikut:

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pengusahaan jasa angkutan jalan dan jasa lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

1. GENERAL (continued)

b. Office and Business Location (continued)

- 3) *Regional Division III Office: Malang Branch, Ponorogo Branch, Banyuwangi Branch, Pamekasan Branch, Denpasar Branch, Mataram Branch, Kupang Branch, Waingapu Branch, Kefamenanu Branch, Ende Branch, Kendari Branch, Palu Branch, Mamuju Branch, Surabaya Branch, Jember Branch, Makassar Branch, Manado Branch, and Gorontalo Branch.*
- 4) *Regional Division IV Offices: Jayapura Branch, Merauke Branch, Sorong Branch, Manokwari Branch, Biak Branch, Nabire Branch, Mimika Branch, Ambon Branch, Halmahera Branch, South Sorong Branch, Sarmi Branch, and Namlea Branch.*
- 5) *Office of Strategic Business Unit (SBU): Transjakarta Corridor 1 & 8.*

c. Nature, Purpose and Objective of the Company

In accordance with Article 8 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 38 of 2018 dated 6 August 2018 Perum DAMRI's, purpose, objectives and business activities are as follows:

The Company has the intent and purpose to participate in implementing and supporting the policies and programs of the Central Government and Regional Governments in the field of economy and national development in general, especially in the field of road transport services and other services as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce goods and services based on the principle of good corporate governance.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Kegiatan Perusahaan

d. The Company's Activities

Dalam melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama, sebagai berikut:

In carrying out its purpose and objectives, the Company carries out its main business activities, as follows:

- 1) Jasa angkutan penumpang dan barang untuk umum;
- 2) Penugasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa angkutan perintis, angkutan perkotaan dan penugasan lainnya dalam bidang angkutan;
- 3) Jasa penyewaan sarana angkutan;
- 4) Jasa keagenan penyediaan sarana angkutan;
- 5) Jasa titipan dan pengiriman barang/pos melalui angkutan jalan;
- 6) Jasa lainnya di bidang angkutan jalan.

- 1) *Passenger and goods public transportation services;*
- 2) *Assignments from Central Government and Regional Government in the form of pioneer transportation, urban transportation and other assignments in the transportation sector;*
- 3) *Transportation equipment rental services;*
- 4) *Agency services providing transportation facilities;*
- 5) *Safekeeping and shipping of goods/post via road transport;*
- 6) *Other services in the field of road transportation.*

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

In addition to the main business activities referred to above, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of potential resources that are already owned and/ or controlled by the Company, as long as it financially supports the main business activities, as determined by the Minister.

(1). Angkutan Pemadu Moda

(1). Shuttle Bus Transportation

Transportasi Pemadu Moda merupakan salah satu segmen layanan yang beroperasi dari dan menuju bandara. Segmen ini melayani ibu kota dan bandara lain di Indonesia.

Shuttle Bus transportation is one of the service segments operating from and to the airport. This segment serves the capital city and other airports in Indonesia.

Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini akan terus memberikan pelayanan terbaiknya dengan tarif relatif murah, aman dan nyaman.

This segment operates to increase customer satisfaction in providing safe, comfortable and affordable services.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Kegiatan Perusahaan (lanjutan)

d. The Company's Activities (continued)

(1). Angkutan Pemadu Moda (lanjutan)

(1). Shuttle Bus Transportation (continued)

Pelayanan Angkutan Pemadu Moda meliputi jaringan pelayanan 26 kota di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Cabang yang melayani Angkutan Pemadu Moda yaitu Banda Aceh, Basoetta, Bandung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Pontianak, Samarinda, Surakarta, Yogyakarta, Banyuwangi, Ende, Kendari, Kupang, Makassar, Mataram, Surabaya, Gorontalo, Manado, Ambon dan Jayapura.

Shuttle Bus transportation service covers 26 cities in Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan and Papua. Branches that operate Shuttle Bus transportation are Banda Aceh, Basoetta, Bandung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Pontianak, Samarinda, Surakarta, Yogyakarta, Banyuwangi, Ende, Kendari, Kupang, Makassar, Mataram, Surabaya, Gorontalo, Manado, Ambon and Jayapura.

(2). Angkutan Antar Kota

(2). Inter-City Transportation

Pelayanan Angkutan Antar Kota meliputi jaringan pelayanan 35 kota besar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Cabang yang melayani Angkutan Antar Kota yaitu Banda Aceh, Bandar Lampung, Basoetta, Bandung, Bengkulu, Bogor, Jakarta, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Cilacap, Palangkaraya, Pontianak, Purwokerto, Purworejo, Samarinda, Surakarta, Tanjung Selor, Banyuwangi, Denpasar, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Mataram, Palu, Pamekasan, Ponorogo, Gorontalo, Manado, Sarmi, Sorong dan Sorong Selatan.

The Inter-City Transport Service includes a service network of 35 major cities in Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan and Papua. Branches that serve Inter-City Transportation are Banda Aceh, Bandar Lampung, Basoetta, Bandung, Bengkulu, Bogor, Jakarta, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Cilacap, Palangkaraya, Pontianak, Purwokerto, Purworejo, Samarinda, Surakarta, Tanjung Selor, Banyuwangi, Denpasar, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Mataram, Palu, Pamekasan, Ponorogo, Gorontalo, Manado, Sarmi, Sorong and Sorong Selatan.

Angkutan Antar Kota terdiri dari Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Intercity Transportation consists of City Transportation within the Province (AKDP) and Inter-City Inter-Province Transportation (AKAP).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Kegiatan Perusahaan (lanjutan)

(2). Angkutan Antar Kota (lanjutan)

- a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek.
- b. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek.

(3). Angkutan Kota

Angkutan Bus Kota adalah sebuah moda transportasi perkotaan yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. Pelayanannya meliputi jaringan trayek kota (dalam wilayah Kota, Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten). Jaringan Pelayanan meliputi Banda Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Medan, Palembang, SBU TJBW Koridor 1 & 8, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Mataram, Surabaya, Gorontalo, Manado dan Sarmi.

Berdasarkan Perjanjian no. 446/EKS-DO/PT.TJ/I/2021 pada tanggal 08 Januari 2021 telah dibuat Pemberitahuan Tertulis Pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara PT Transportasi Jakarta dan Perum Damri yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2021.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Activities (continued)

(2). Inter-City Transportation (continued)

- a. *Inter-City Transportation within the Province (AKDP) is transportation from one city to another that passes through regencies/ cities in one province by using public bus bound in routes.*
- b. *Inter-Province City transportation (AKAP) is transportation from one city to another that passes between regencies/ cities through more than one province by using public bus bound in routes.*

(3). City Transport

City Transport is an urban transportation mode that refers to public transportation with a predetermined route. Its services include the city route network (within the City, Provincial and Regency Capitals). The service network covers Banda Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Medan, Palembang, SBU TJBW Corridor 1 & 8, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Mataram, Surabaya, Gorontalo, Manado and Sarmi

Based on Agreement no. 446/EKS-DO/PT.TJ/I/2021 dated 8 January 2021 it has been made the Written Notice of Termination of the Cooperation Agreement between PT Transportasi Jakarta and Perum Damri which expires on 11 January 2021.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Kegiatan Perusahaan (lanjutan)

- (4). Angkutan Lintas Batas Negara
Angkutan Antar Negara adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melintasi batas negara dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek. Perum DAMRI memelopori transportasi lintas-batas antar Negara Indonesia - Malaysia, dengan trayek Pontianak (Indonesia) - Kuching (Malaysia). Selain itu Perusahaan Umum (Perum) DAMRI juga melayani trayek Pontianak - Bandar Sri Begawan (Brunai Darussalam).

- (5). Angkutan Perintis
Angkutan perintis adalah angkutan yang melayani daerah-daerah terisolir sebagai angkutan perintis, dimana di daerah tersebut belum tersedia sarana angkutan yang memadai dengan tarif terjangkau.

Kegiatan ini dilaksanakan di 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Adapun Kantor Cabang Perum DAMRI yang melayani Angkutan Perintis antara lain: Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kaltara, Mataram, Kupang, Ende, Waingapu, Kefamenanu, Mamuju, Kendari, Palu, Jayapura, Sorong, Serui, Biak, Nabire, Mimika, Manokwari, Merauke, Ambon, Halmahera, Gorontalo, Manado, Batam, Bandung, Bogor, Pekanbaru, Palangkaraya, Cilacap, Makassar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Ponorogo, Namlea, Sarmi, Sorong Selatan.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Activities (continued)

- (4). Cross-border Transportation
Transportation between countries is transportation from one city to another that crosses national borders by using bus. Perum DAMRI is a pioneers of cross-border transportation between Indonesia and Malaysia, with Pontianak (Indonesia) - Kuching (Malaysia) and Pontianak - Bandar Sri Begawan (Brunai Darussalam) routes.

- (5). Pioneer Transportation
Pioneer Transportation is a transportation service that serves isolated areas as pioneer transportation, where adequate transportation facilities at affordable rates are not yet available in the area.

This activity was carried out in 47 regencies/cities throughout Indonesia. Perum DAMRI Branch Office that serves Pioneer Transportation includes: Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Kaltara, Mataram, Kupang, Ende, Waingapu, Kefamenanu, Mamuju, Kendari, Palu, Jayapura, Sorong, Serui, Biak, Nabire, Mimika, Manokwari, Merauke, Ambon, Halmahera, Gorontalo, Manado, Batam, Bandung, Bogor, Pekanbaru, Palangkaraya, Cilacap, Makassar, Jember, Banyuwangi, Denpasar, Ponorogo, Namlea, Sarmi, Sorong Selatan.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

d. Kegiatan Perusahaan (lanjutan)

- (6). Angkutan Paket/ Barang
Angkutan Barang adalah kegiatan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lainnya melalui jalan darat dan menggunakan mobil barang (Truk/Box).

Disamping melayani angkutan barang reguler juga melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk tujuan Jambi, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, dan Mataram. Angkutan barang Perum DAMRI tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain angkutan barang/paket Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Makassar, Merauke.

- (7). Angkutan Travel atau Pariwisata
Unit Angkutan Travel merupakan salah satu unit kerja pada Perum DAMRI yang khusus melayani angkutan travel atau pariwisata dengan menggunakan kendaraan microbus dan bus besar. Selain Angkutan travel atau pariwisata yang ada di Jakarta, juga di Kantor Cabang Perum DAMRI yang lainnya di wilayah Indonesia.

1. GENERAL (continued)

d. The Company's Activities (continued)

- (6). Freight Transportation
Freight Transportation is a land based activity to send goods from one place to another using Van or Truck.

Besides serving regular freight transportation, the Company also cooperates with PT Pos Indonesia (Persero) for Jambi, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang and Mataram destinations. Goods transport of Perum DAMRI is spread in several regions in Indonesia, among others, goods/packages transportation in Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Makassar, Merauke.

- (7). Travel or Tourism Transportation
This unit specifically serves point to point travel or tourism transport using microbus and large bus vehicles. In addition to the travel or tourism transport in Jakarta, the travel and tourism transportations are also spread in other branch offices of Perum DAMRI throughout Indonesia.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

e. Organisasi Perusahaan

(1). Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum DAMRI Nomor SK-274/MBU/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum DAMRI dan Nomor SK-29/MBU/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum DAMRI, susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

	2021		2020
Ketua	Sam Budigusdian	Muhammad Salim	Chairman
Anggota	Yudi Yudhawan	Yudi Yudhawan	Member
Anggota	Yuli Harsono	Yuli Harsono	Member
Anggota	Teguh Pristiwanto	Teguh Pristiwanto	Member

(2). Susunan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum DAMRI Nomor SK-168/MBU/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum DAMRI dan Nomor SK-173/MBU/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perum DAMRI, susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah:

1. GENERAL (continued)

e. The Company's Organization

(1). Board of Supervisors

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Representative of the Government as Capital Owner of Perum DAMRI Number SK-274/MBU/08/2020 dated 31 August 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum DAMRI and Number SK- 29/MBU/01/2021 dated 28 January 2021 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum DAMRI, the composition of the Supervisory Board as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

(2). Board of Directors

Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Representative of the Government as Capital Owner of Perum DAMRI Number SK-168/MBU/05/2020 dated 29 May 2020 regarding the appointment of Members of the Board of Directors of Perum DAMRI and Number SK-173 /MBU/05/2021 dated 21 May 2021 regarding Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of Perum DAMRI, the composition of the Board of Directors as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Organisasi Perusahaan (lanjutan)

e. The Company's Organization (continued)

(2). Susunan Direksi (lanjutan)

(2). Board of Directors (continued)

	2021	2020	
Direktur Utama	Setia N. Milatia Moemin	Setia N. Milatia Moemin	President Director
Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha	Sandry Pasambuna	Sandry Pasambuna	Director of Commercial and Business Development
Direktur Teknik dan Fasilitas	Arifin	Arifin	Director of Technical and Facilities
Direktur Keuangan	Joni Prasetyanto	Sri Purwanto	Director of Finance
Direktur SDM dan Administrasi Umum	Siti Inda Suri	Siti Inda Suri	Director of HR and General Administration

(3). Susunan Komite Audit

(3). Audit Committee Structure

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. SK-29/MBU/01/2021 tanggal 28 Januari 2021, susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2021 dan berdasarkan SK no. SK.12/DP/IX/2019 tanggal 2020, sebagai berikut:

Based on Decree of the Board of Supervisors No. SK-29/MBU/01/2021 dated 28 January 2021, the composition of the Audit Committee as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Ketua	Yudi Yudhawan	Yudi Yudhawan	Chairman
Anggota	Rahmat Ramadhan	Sofyan Bantasyam	Member
Anggota	Dadang Mulyana	Fitriansyah Monasfaly	Member

f. Sumber Daya Manusia (SDM)

f. Employees

Posisi SDM sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak 4.349 orang, terjadi penurunan sebanyak 756 orang dari tahun sebelumnya. Posisi SDM pada tahun 2021 terdiri dari Karyawan PKWTT sebanyak 3.647 orang mengalami kenaikan sebanyak 279 orang dan Karyawan PKWT sebanyak 702 orang mengalami penurunan sebanyak 477 orang.

The number of employees of the Company as of 2021 was 4,349 employees, decreased by 756 employees from the previous year. The employment type consists of 3,647 permanent employees, increased by 279 employees and 702 non permanent, decreased by 477 employees.

	2021	2020	
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tetap (PKWTT)	3.647	3.926	Indefinite Time Employment Agreement
Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT)	702	1.179	Specific Time Employment Agreement
Jumlah	4.329	5.105	Total

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

g. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko

g. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management

Seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Mewajibkan penggunaan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional kegiatan usaha, dan memberikan pedoman yang lebih terinci bagi BUMN untuk menerapkan GCG berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

As stated in Decree of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises, SOE is required to make GCG principles as operational basis of business activities, and provide more detailed guidelines for SOE to implement GCG based on the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perum DAMRI pada tahun 2019 memperoleh skor 81,93 dengan skor maksimum 100. Terdapat lima aspek *governance* yang telah dilakukan penilaian tersebut, meliputi (1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan dengan capaian skor 6,70; (2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal dengan capaian skor 8,47; (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dengan capaian skor 29,90; (4) Direksi, dengan capaian skor 29,76; dan (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dengan capaian skor 7,10.

Further, based on the results of the assessment of the implementation of Good Corporate Governance of Perum Damri in 2019, the Company received a score of 81.93 with a maximum score of 100. There are five aspects of governance that have been assessed, which are (1) Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance Continuously with a score of 6.70; (2) Shareholders and GMS/Capital Owners with a score of 8.47; (3) Board of Commissioners / Board of Supervisors, with a score of 29.90; (4) Directors, with a score of 29.76; and (5) Information Disclosure and Transparency, with a score of 7.10.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

h. Penerapan Manajemen Risiko

Perum DAMRI telah menerapkan Manajemen Risiko di lingkungan Perum DAMRI sesuai Surat Keputusan Direksi No. 0708/UM.001/SK/00/DU/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Perum DAMRI.

Perum DAMRI juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02/DP/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Perum DAMRI; Nomor: SK.13/DP/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perum DAMRI; Nomor: SK.02/DP/I/2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perum DAMRI.

Susunan Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko, sebagai berikut:

	2021	2020	
Ketua	Yuli Harsono	Teguh Pristiwanto	Chairman
Anggota	Yodi Armawidiatmo	Bambang Ali Priambodo	Member
Anggota	Sri Purwanto	Yodi Armawidiatmo	Member

h. Implementation of Risk Management

Perum DAMRI has implemented Risk Management within Perum DAMRI according to the Decree of the Board of Directors Number: 0708/UM.001/SK/00/DU/2020 dated 23 October 2020 concerning Guidelines for Risk Management in Perum DAMRI.

Perum DAMRI has also formed a Risk Management Committee in accordance with the Decree of the Board of Commissioners Number: SK.02/DP/VII/2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Risk Management Monitoring Committee for Perum DAMRI; Number: SK.13/DP/XII/2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Perum DAMRI; Number: SK.02/DP/I/2021 concerning the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

The composition of the Chairman and Members of the Risk Management Committee is as follows:

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

i. Modal

Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, terdiri atas:

Modal disetor sebesar Rp 19.700.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah), Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 627.721.000.110 (enam ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah), Modal Sumbangan sebesar Rp 4.266.253.000 (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sebagai berikut:

- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 22 (Amandemen), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020), "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020), "Akuntansi Wa'd", dan

1. GENERAL (continued)

i. Equity

The Company's equity is state property that is separated and not divided into shares, consisting of:

Paid up capital of Rp 19,700,000,000 (nineteen billion seven hundred million rupiahs), State Equity Participation (PMN) of Rp 627,721,000,110 (six hundred twenty seven billion seven hundred twenty one thousand one hundred and ten rupiah), Donated Capital of Rp 4,266,253,000 (four billion two hundred sixty six million two hundred fifty-three thousand rupiah).

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATIONS OF SFAS ("IFAS")

a. Standards Effective in the Current Year

As of the issuance date of these financial statements, management is still studying the impact that may arise from the adoption of new standards and interpretations as well as amendments or adjustments to standards that have been issued but are not yet effective. Standards, interpretations, amendments and adjustments that are effective for financial years beginning on or after 1 January 2021 are as follows:

- SFAS 112, "Accounting for Endowment";
- SFAS 22 (Amendment), "Business Combination on Definition of Business";
- SFAS 110 (Improvement 2020), "Accounting for Sukuk";
- SFAS 111 (Improvement 2020), "Accounting for Wa'd", and

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) DAN
INTERPRETASI STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)
BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**a. Standar yang Berlaku Efektif pada
Tahun Berjalan (lanjutan)**

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen masih sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru serta amandemen ataupun penyesuaian terhadap standar yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Standar, interpretasi, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sebagai berikut (lanjutan) :

- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62, Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan”,
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71, “Instrumen Keuangan”,
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73, “Sewa”

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED
STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (“SFAS”)
AND INTERPRETATIONS OF SFAS
(“IFAS”) (continued)**

**a. Standards Effective in the Current Year
(continued)**

As of the issuance date of these financial statements, management is still studying the impact that may arise from the adoption of new standards and interpretations as well as amendments or adjustments to standards that have been issued but are not yet effective. Standards, interpretations, amendments and adjustments that are effective for financial years beginning on or after 1 January 2021 are as follows (continued) :

- Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55, Amendment to SFAS 60, Amendment to SFAS 62, and Amendment to SFAS 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.

Standards and amendments to standards effective for the period beginning on or after 1 January 2022, with early adoption is permitted are:

- Amendment to SFAS 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets about Onerous Contracts”,
- Annual Improvement 2020 to SFAS 71, “Financial Instrument”,
- Annual Improvement 2020 to SFAS 73, “Leases”

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan Perusahaan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar dan basis akrual kecuali untuk penyusunan laporan arus kas Perusahaan pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Pada umumnya biaya historis didasarkan pada nilai wajar yang didasarkan atas pertukaran suatu barang atau jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Perusahaan memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

3. ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The Company's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The Company's financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values and using accrual basis except for the Company's statement of cash flow at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan keuangan Perusahaan, pengukuran dan pengungkapan nilai wajar ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali untuk transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto (*net realizable value*) dalam PSAK 14 atau nilai pakai (*value in use*) dalam PSAK 48.

Selain itu, untuk pelaporan laporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan kedalam level 1, 2, atau 3 berdasarkan peringkat dimana perhitungan nilai wajar diamati dan signifikansi atas input masukan untuk perhitungan nilai wajar secara keseluruhan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Input level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses Perusahaan pada tanggal pengukuran;
- 2 Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- 3 Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas tertentu.

Laporan arus kas Perusahaan disusun dengan menggunakan metode tidak langsung.

c. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation (continued)

Fair value for measurement and for disclosure purposes in these Company's financial statements is determined on such basis, except for leasing transactions that are within the scope of SFAS 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in SFAS 14 or value in use in SFAS 48.

In addition, for financial reporting purposes, fair value measurements are categorized into level 1, 2 or 3 based on the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety, which are described as follows:

- 1 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;*
- 2 Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- 3 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.*

The Company's statements of cash flows are prepared using the indirect method.

c. Cash and Cash Equivalents

For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan

1. Aset keuangan

**Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021**

1.1. Klasifikasi

Mulai 1 Januari 2021, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis di mana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments

1. Financial assets

Accounting policies from 1 January 2021

1.1 Classification

From 1 January 2021, the Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the Company's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen Keuangan

d. Financial Instruments (continued)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

**Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)**

**Accounting policies from
1 January 2021 (continued)**

1.2 Pengukuran

1.2 Measurement

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Instrumen utang

Debt Instrument

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Perusahaan mengklasifikasikan instrumen utangnya:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Accounting policies from
1 January 2021 (continued)

1.2 Measurement (continued)

Debt Instrument (continued)

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
 31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak
 1 Januari 2021 (lanjutan)**

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan k
 penghasilan komprehensif lain,
 kecuali untuk pengakuan
 keuntungan atau kerugian
 penurunan nilai, pendapatan
 bunga dan keuntungan dan
 kerugian selisih kurs yang diakui
 dalam laba rugi. Ketika aset
 keuangan dihentikan
 pengakuannya, keuntungan atau
 kerugian kumulatif yang
 sebelumnya diakui di penghasilan
 komprehensif lain direklasifikasi
 dari ekuitas ke laba rugi dan
 diakui dalam
 keuntungan/(kerugian) lain-lain.
 Pendapatan bunga dari aset
 keuangan tersebut dimasukkan ke
 dalam pendapatan keuangan
 dengan menggunakan metode
 suku bunga efektif. Keuntungan
 dan kerugian selisih kurs
 disajikan dalam keuntungan dan
 kerugian lain-lain dan beban
 penurunan nilai pada beban lain-
 lain.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Accounting policies from
 1 January 2021 (continued)**

1.2 Measurement (continued)

Debt Instrument (continued)

- Fair value through other
 comprehensive income
 (FVOCI): Assets held to
 collect contractual cash flows
 and to sell financial assets,
 where the cash flows of these
 assets are only payments of
 principal and interest,
 measured at fair value
 through other comprehensive
 income. Changes in the
 carrying amount are made
 through other comprehensive
 income, except for the
 recognition of impairment
 gains or losses, interest
 income and foreign exchange
 gains and losses which are
 recognized in profit or loss.
 When a financial asset is
 derecognized, the cumulative
 gain or loss previously
 recognized in other
 comprehensive income is
 reclassified from equity to
 profit or loss and recognized
 in other gains/(losses).
 Interest income from these
 financial assets is included in
 financial income using the
 effective interest rate method.
 Foreign exchange gains and
 losses are presented in other
 gains and losses and
 impairment charges under
 other expenses.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Accounting policies from
1 January 2021 (continued)

1.2 Measurement (continued)

Debt Instrument (continued)

- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.

Equity instrument

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas (lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/ (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Accounting policies from
1 January 2021 (continued)

1.2 Measurement (continued)

Equity instrument (continued)

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gain/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)**

1.2 Pengukuran (lanjutan)

**Saling hapus dari instrumen
keuangan (lanjutan)**

- a) Lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau
- b) Lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Pada awal transaksi, Perusahaan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai, beserta tujuan manajemen risiko dan strategi pelaksanaan transaksi lindung nilai. Perusahaan juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai sangat efektif dalam menghapus dampak perubahan nilai wajar atau arus kas item yang dilindung nilai.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Accounting policy from
1 January 2021 (continued)**

1.2 Measurement (continued)

**Offsetting of financial Instruments
(continued)**

- a) *hedges of the fair value of recognised assets or liabilities or unrecognized firm commitment (fair value hedge); or*
- b) *hedges of a particular risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow hedge).*

At the inception of the hedge relationship, the Company documents the economic relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objectives and strategy for undertaking various hedging transactions. The Company also documents its assessment, both at hedge inception and on an ongoing basis, of whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)

1.2 Pengukuran (lanjutan)

Saling hapus dari instrumen
keuangan (lanjutan)

Nilai wajar penuh derivatif lindung nilai diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo yang tersisa untuk item yang dilindung nilai melebihi 12 (dua belas) bulan, dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 (dua belas) bulan. Derivatif yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek.

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Accounting policies from
1 January 2021 (continued)

1.2 Measurement (continued)

Offsetting of financial Instruments
(continued)

The full fair value of a hedging derivative is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of hedged item is more than 12 (twelve) months, and as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months. Trading derivatives are classified as a current asset or liability.

For trade receivables, the Company applies the simplified approach permitted by SFAS 71, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)**

Penurunan nilai atas aset keuangan

Standar ini membahas klasifikasi dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan, model penurunan nilai yang baru dan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai. Klasifikasi dan model penurunan nilai yang baru berdasarkan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap pengukuran dan provisi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya diakui Perusahaan berdasarkan PSAK 55 – Instrumen Keuangan: “Pengakuan dan Pengukuran”.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang berdasarkan PSAK 55. Aset keuangan tersebut memenuhi kriteria PSAK 71 untuk klasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, karena instrumen keuangan ini dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan kas, yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk model penurunan nilai, Perusahaan telah menghitung kerugian kredit yang diperkirakan dari aset keuangan dan menentukan bahwa jumlahnya tidak material.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

**Accounting policy from
1 January 2021 (continued)**

Impairment of financial assets

This standard addresses the classification and measurement of financial assets and liabilities, new impairment model and new rules for hedge accounting. The new classification and new impairment model do not have material impact to the measurement and the provision for impairment of financial assets previously recognized by the Company based on SFAS 55 – Financial Instruments: “Recognition and Measurement”.

As 31 December 2021, the Company only has financial assets classified as loans and receivables under SFAS 55. Those financial assets meet the SFAS 71 criteria for classification at amortized cost, because these financial instruments are held within a business model whose objective is to collect the cash flows, which represent solely payments of principal and interest. For the impairment model, the Company has calculated expected credit losses on financial assets and determined that the amount is not material.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)**

**Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset Keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perusahaan memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu di antara (a) Perusahaan secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

**Accounting policy from
1 January 2021 (continued)**

**Derecognition of financial assets
and liabilities**

Financial Assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass through" arrangement, and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi sejak
1 Januari 2021 (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui di laba rugi.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan Perusahaan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Accounting policy from
1 January 2021 (continued)

Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

e. Transactions with Related Parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in SFAS No. 7 "Related Party Disclosures". All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the Company's financial statements.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Piutang Usaha dan Piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Provisi atas penurunan nilai diestimasi berdasarkan penelaahan manajemen atas kolektibilitas masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Pencatatan penurunan nilai wajar piutang dan kerugian penurunan nilai piutang dihitung dengan metode individual dengan memperhitungkan diskonto dari arus kas masa depan. Piutang dihapuskan dalam tahun dimana piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

Pengelompokan piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan yakni: pihak berelasi dan pihak ketiga. Ketentuan terkait dengan pihak berelasi.

Piutang usaha dan piutang lain-lain dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual Perusahaan atas arus kas yang berasal dari piutang tersebut telah kadaluarsa, yaitu ketika aset di transfer dan ketika seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan telah di transfer kepada pihak lain.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Account Receivable and Other Receivable

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. Provision for impairment is estimated based on management's review of the collectability of the individual receivables at the end of the year. The recording of impairment in fair value of accounts receivable and impairment loss on receivables is calculated using the individual method by taking into account any discount on future cash flows. Accounts receivable are written off in the year in which they are determined to be uncollectible.

Trade and other receivables are classified as: related parties and third parties. Provisions relating to related parties.

Trade and other receivables are derecognized when the Company's contractual rights to cash flows from these receivables have expired, that is, when the assets are transferred and when all the risks and rewards of ownership of the financial assets have been transferred to other parties.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Penyisihan Penurunan Nilai

Penyisihan penurunan nilai dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang usaha tidak dapat ditagih. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih piutang tersebut dihapuskan terhadap akun penyisihan, setelah memperoleh persetujuan.

Penyisihan penurunan nilai telah dihitung sesuai dengan SK No. 0362.00/HK.003/SK/00/DU-2020, tanggal 23 Juni 2020. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih terkait umur piutang, piutang yang disisihkan harus memenuhi syarat bahwa nasabah secara nyata sudah tidak mampu membayar lagi, dengan skema persentase penyisihan sebagai berikut :

No.	Jatuh Tempo/ Due Date	% Penyisihan Piutang/ Allowance for Accounts Receivable
1	0-1 Tahun/year	2%
2	1 – 2 Tahun/year	20%
3	2 – 3 Tahun/year	40%
4	3 – 4 Tahun/year	60%
5	4 – 5 Tahun/year	80%
6	>5 Tahun/year	100%

Penyisihan piutang tidak menghapus kewajiban penagihan dan pembayaran atas piutang.

Perusahaan pada awalnya menyisihkan piutangnya berdasarkan SK No. 0362.00/HK.003/SK/00/DU-2020, tanggal 23 Juni 2020 dan pada 31 Desember 2021 Perusahaan telah menyisihkan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Allowance for Impairment

An allowance for impairment is provided when there is objective evidence that trade receivables are not collectible. When trade receivables are uncollectible, they are written off against the allowance account, after obtaining approval.

Allowance for impairment has been calculated in accordance with Decree No. 0362.00/HK.003/SK/00/DU-2020, dated 23 June 2020. The allowance for doubtful accounts is not cumulative but is applied at the end of each budget period in accordance with the development of receivables quality. The allowance for doubtful accounts is related to the age of the receivables, the receivables set aside must meet the requirements that the customer is clearly unable to pay anymore, with the percentage allowance scheme as follows:

Allowance for receivables does not write off the obligation to collect and pay receivables.

The Company initially set aside its receivables based on Decree No. 0362.00/HK.003/SK/00/DU-2020, dated 23 June 2020 and on 31 December 2021, the Company has set aside using the effective interest rate method.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Piutang Tak Tertagih

Jumlah penyisihan piutang pegawai/karyawan dicatat sebagai piutang tak tertagih. Piutang pegawai yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena alasan pegawai yang bersangkutan pensiun/meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu, pegawai berhenti/diberhentikan dan tidak mampu serta alamatnya tidak jelas, serta debitur pailit atau alamatnya tidak jelas, setelah diperhitungkan dengan hak-hak pegawai yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dihapusbukukan dan dibebankan sebagai beban lain-lain setelah disetujui usulan penghapusannya.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI No: 0371.00/HK.003/SSK/00/DU/2020, memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pelaksanaan No: 01/PN/1978 tanggal 1 Januari 1978 tentang Tugas Kewajiban Seksi Operasi dan Seksi Administrasi pasal 1 Tugas dan Kewajiban Seksi Administrasi, pasal 4 Pengiriman Laporan Setasiun, pasal 5 Penyimpanan dan Pengamanan Arsip, pasal 6 Penyempurnaan Bentuk-bentuk, pasal 7 Penggunaan Bukti Kas AK/2 dan Pelaksanaan Tugas Verifikasi.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Uncollectible Accounts Receivable

The receivables allowance from employees is recorded as uncollectible accounts. Employee receivables that are clearly uncollectible because the employee concerned has retired/died and his heirs are unable to pay, the employee has resigned/been terminated and is incapacitated and the address is unclear, and bankrupt debtor with unclear address, after being calculated with employee rights the person concerned can be proposed to be written off and charged as other expenses after the proposal for write-off is approved.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Based on the Decree of the Board of Directors of Perum DAMRI No: 0371.00/HK.003/SSK/00/DU/2020, decided to revoke and declare invalid for Regulation No: 01/PN/1978 dated 1 January 1978 concerning Duties and Responsibilities of Operating Section and Administration Section Article 1 Duties and Obligations of the Administration Section, Article 4 Delivery of Station Reports, Article 5 Storage and Safeguarding of Archives, Article 6 Completion of Forms, Article 7 Use of AK/2 Cash Evidence and Implementation of Verification Tasks.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Persediaan (lanjutan)

Sebagaimana dengan dicabutnya peraturan tersebut, maka bentuk-bentuk administrasi keuangan yang di antaranya berupa AK/1 Bukti Penerimaan Kas, AK/2 Bukti Kas Pengganti Kuitansi, AK/3 Buku Tabelaris, AK/4 Buku Kas, AK/5 Buku Piutang, AK/6 Buku Utang, AK/7 Buku Pengawasan Anggaran, AK/11 Ikhtisar Piutang, AK/12 Ikhtisar Utang, AK/14 Nota HRK, AK/16 Surat Permintaan Sewa Angkutan Borongan, AK/17 Faktur, AK/25 Sirkulasi Keuangan dan AK/26 Kartu Pos, Pembukuannya dinyatakan tidak berlaku lagi, serta diganti dengan bentuk administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan metode garis lurus.

k. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Inventories (continued)

With the revocation of the regulation, the forms of financial administration include AK/1 Proof of Cash Receipts, AK/2 Proof of Cash Substitute for Receipts, AK/3 Table Books, AK/4 Cash Books, AK/5 Accounts Receivable, AK /6 Accounts Payable, AK/7 Budget Control Book, AK/11 Summary of Accounts Receivable, AK/12 Debt Summary, AK/14 HRK Memorandum, AK/16 Letter of Request for Wholesale Transportation Lease, AK/17 Invoice, AK/25 Financial Circulation and AK/26 Postcard, the bookkeeping is declared no longer valid, and replaced with a form of financial administration in accordance with applicable regulations.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

k. Investments in Associates

The Company's has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies. A joint venture is arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net assets of the joint arrangement. Joint control is contractual agreement to share control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Investasi pada Entitas Asosiasi
(lanjutan)

Penghasilan operasi aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan Perusahaan interim dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan Perusahaan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Perusahaan dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Perusahaan telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas kewajiban entitas asosiasi.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investments in Associates (continued)

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these Company's financial statements using the equity method of accounting, except when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance with SFAS 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the Company's statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Company's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Company's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate), the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Investasi pada Entitas Asosiasi
(lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi.

Setiap kelebihan dari kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investments in Associates (continued)

Investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of the acquisition over the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the investee is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment.

Any excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of the acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of SFAS 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Company's investment in an associate. When necessary, the carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Investasi pada Entitas Asosiasi
(lanjutan)

Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55.

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investments in Associates (continued)

Any impairment loss recognized is not allocated to each asset that forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Company measures the retained interest at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with SFAS 55.

The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Company accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Perusahaan mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Ketika Perusahaan mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi tetapi Perusahaan terus menggunakan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait).

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Perusahaan hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Perusahaan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investments in Associates (continued)

Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Company reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Company reduces its ownership interest in an associate but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When the Company conducts transactions with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate is recognized in the Company's financial statements only to the extent of interests in the associate that is not related to the Company.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

1. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan (*at cost*) setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan.

Untuk aset tetap perolehan secara tunai dinilai berdasarkan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, seperti harga beli dan seluruh beban yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan dengan ketentuan bahwa:

- Potongan pembelian dibukukan sebagai pengurangan biaya perolehan aset tetap, sebagai mana sifatnya yang merupakan pengurangan dalam harga beli;
- Untuk aset tetap yang diperoleh dengan valuta asing dicatat dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi yaitu pada saat penandatanganan kontrak.

Untuk aset tetap yang diperoleh secara kredit, dinilai berdasarkan nilai perolehannya, tetapi bunga atas pembelian kredit dicatat sebagai beban.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost after deducting accumulated depreciation, except for land that is not depreciated.

For fixed assets, cash acquisition is valued based on the expenses incurred to obtain fixed assets, such as the purchase price and all expenses incurred until the asset is ready for use in the Company's business activities provided that:

- *Purchase deductions are recorded as a reduction in the acquisition cost of fixed assets, as is the nature of a reduction in the purchase price;*
- *For fixed assets obtained with foreign currencies, it is recorded using the exchange rate at the time of the transaction, that is, when signing the contract.*

For fixed assets acquired on credit, they are valued at their acquisition cost, but interest on purchases of credit is recorded as expenses.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Perusahaan telah mengevaluasi dan mengubah estimasi akuntansi berkaitan dengan masa manfaat ekonomis aset tetap alat produksi (Bus/Truk), sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) DAMRI No.SK.005/KU.101/DAMRI-2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Perubahan Estimasi Akuntansi Perum DAMRI terhadap Pola Perhitungan Penyusutan Aset/Aktiva Tetap Alat Produksi. Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No.SK.180/KU.107/DAMRI-2018. Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak bulan Januari 2018, sebagai berikut:

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

The Company has evaluated and amended accounting estimates relating to the economic useful lives of fixed assets of production equipment (Buses/Trucks), in accordance with Directors' Decree of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI No.SK.005/KU.101/DAMRI-2018 dated 24 December 2018 concerning Amendment to DAMRI's Accounting Policies Against the Pattern of Calculation of Depreciation of Assets/Fixed Assets of Production Equipment No.SK.180/KU.107/DAMRI-2018. This decree applies retroactively from January 2018, as follows:

Keterangan/ Description	Masa Manfaat sebelum Perubahan/ Useful Lives before Change of SK.180/KU.107/DAMRI-2018	Masa Manfaat setelah Perubahan/Useful Lives after Change of SK.005/KU.101/DAMRI-2018
1. Aset Tetap (Alat Produksi)/ Fixed Assets (Production Tools) :		
a. Bus Baru (Ekonomi & Non Ekonomi)/ New Bus (Economy & Non Economy)		
- Bus Besar/ Big Bus	8 tahun/ 8 years	10 tahun/ 10 years
- Bus Medium atau Mini Bus/ Medium Bus or Mini Bus	8 tahun/ 8 years	10 tahun/ 10 years
- Articulated Bus/ Articulated Bus	8 tahun/ 8 years	8 tahun/ 8 years
b. Bus Baru (Perintis) Bus Medium atau Mini Bus/ New Bus (Pioneer) Medium Bus or Mini Bus		
c. Bus Bukan Baru/ Not New Bus	6 tahun/ 6 years	6 tahun/ 6 years
d. Retrofit/ Rekondisi/ Perbaikan Bus atau Truk/ Retrofit/ Recondition/ Repair of Buses or Trucks (Engine Assy/ Compac Engine/ Short Block)		
	4 tahun/ 4 years	5 tahun/ 5 years
2. Perubahan Estimasi Akuntansi/ Changes in Accounting Estimates		
a. Nilai Buku/ Book Value	-	-
b. Nilai Residu/ Residual value	5%	20%

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap non bus/truk (alat produksi) kecuali tanah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap/ <i>Types of Fixed Assets</i>	Masa Manfaat/ <i>Useful Life</i>
Bangunan/ <i>Building</i>	20 tahun/ 20 years
Kendaraan Dinas/ <i>Vehicles</i>	4 tahun/ 4 years
Mesin-mesin Bengkel/ <i>Workshop Machineries</i>	4 tahun/ 4 years
Suku Cadang/ <i>Spare Parts</i>	4 tahun/ 4 years
Mesin-Mesin Kantor/ <i>Office Machineries</i>	4 tahun/ 4 years
Inventaris Kantor/ <i>Office Equipment</i>	4 tahun/ 4 years

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimum setiap akhir tahun buku, dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Perusahaan juga menerapkan kebijakan kapitalisasi terhadap biaya yang timbul, yang berkaitan dengan aset tetap, sebagai berikut:

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Fixed assets Non-bus/truck (production equipment) except for land are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least each year end and the effect of any changes in estimate is accounted for on a prospective basis.

The Company also applies a capitalization policy to costs incurred, which are related to fixed assets, as follows:

No.	Uraian/ <i>Description</i>	Non Kapitalisasi/ <i>Non Capitalization</i>
1.	Masa Manfaat/ <i>Benefit Time</i>	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>
2.	a. Pembelian/ <i>Purchase</i>	Kurang dari Rp 2.000.000 per unit/ <i>Less than Rp 2,000,000 per unit</i>
	b. Biaya Perbaikan/ <i>Cost of repairs</i>	Kurang dari Rp 2.000.000 per unit/ <i>Less than Rp 2,000,000 per unit</i>
3.	Sifat dan Tujuan:/ <i>Nature and Purpose:</i>	
	a. Penambahan/ <i>Asset Expansion</i>	Tidak menambah/ Memperluas aset yang ada/ <i>Not add/ Expand existing assets</i>
	b. Penggantian/ <i>Replacement</i>	Tidak menambah/ memperluas/ <i>Not adding/ expanding</i>
	c. Perbaikan dan Pemeliharaan/ <i>Repair and Maintenance</i>	Perbaikan dan pemeliharaan menjaga agar aset tetap dalam kondisi baik/ <i>Repair and maintenance to keep the assets in good condition</i>
4.	Bunga Pinjaman/ <i>Loan Interest</i>	Setelah aset selesai dibangun/ <i>After the asset is completed</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

1. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam proses dinyatakan sebesar biaya perolehan atas rekondisi atau rehab aset produksi maupun biaya perolehan atas pengerjaan aset penunjang bangunan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Pinjaman yang tidak spesifik digunakan untuk perolehan, konstruksi atau produksi aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tertentu terhadap jumlah pengeluaran untuk perolehan aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap saldo pinjaman terkait selama periode tersebut, tidak termasuk jumlah pinjaman yang spesifik digunakan untuk perolehan aset tertentu lainnya.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Fixed Assets (continued)

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service of fixed assets, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably.

Fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of fixed assets, is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Construction in progress is stated at the cost of reconditioning or rehabilitating production assets as well as the cost of working on building supporting assets. Construction in progress is transferred to the respective fixed assets account when complete and ready to use. The accumulated costs will be transferred to the respective property, plant and equipment accounts when co

For borrowings that are not specific to the acquisition, construction or production of qualifying assets, the amount capitalized is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the total outstanding borrowings during the period, excluding borrowings directly attributable to financing of other qualifying assets.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Aset tidak lancar tersedia untuk dijual

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum yang diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

n. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Non-current assets held for sale

Non-current assets held for sale (or disposal group) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (or disposal group) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell.

n. Impairment of Non-Financial Asset

At the end of each reporting period, Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that the asset has been impaired. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated to determine the extent of the impairment loss (if any). If it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit of the asset.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan
(lanjutan)

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi kecuali aset tersebut dicatat sebesar nilai revaluasi, dimana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika rugi penurunan nilai dipulihkan, nilai tercatat aset (atau unit penghasil kas) meningkat menjadi estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkan, akan tetapi peningkatan nilai tercatat tidak boleh melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan dan tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) di tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada nilai revaluasi, dalam hal tersebut pemulihan rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Impairment of Non-Financial Asset
(continued)

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of an asset (or cash generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss has been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of impairment loss is treated as a revaluation increase.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK no. 73 "Sewa", yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal awal suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasi, Perusahaan menilai apakah:

- a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi; dan
- b) Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases

From 1 January 2020, the Company has adopted SFAS no. 73 "Leases", which sets the requirements for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as "operating leases". This policy is applied to contracts entered into or amended on or after 1 January 2020.

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- a) The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified; and*
- b) The Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal awal atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset-hak guna dan liabilitas sewa.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either :

- *The Company has the right to operate the asset; or*
- *The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa yang meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases (continued)

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Sewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai-Rendah

Perusahaan memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk negosiasi dan pengaturan sewa yang ditambahkan dalam nilai tercatat aset sewa dan Perusahaan mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan dari pelanggan atas jasa yang akan diberikan. Pendapatan diterima dimuka diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diukur dengan menggunakan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Perusahaan. Pendapatan disajikan secara bersih.

o. Leases (continued)

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.

p. Unearned Revenue

Unearned revenues represent receipts from customers for services which have not been rendered. Unearned revenues are recorded as revenues when service is rendered.

q. Recognition of Income and Expenses

Revenue is measured using the fair value of the benefits received or receivable in the normal business activities of the Company. Income is presented in a net manner.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK no. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Perusahaan mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu Perusahaan sebagai kompensasi atas diserahkannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas jasa tersebut).

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Recognition of Income and Expenses

The Company has adopted SFAS no. 72: Revenue from Contracts with Customers, effective on or after 1 January 2020. The Company requires revenue recognition to fulfill five steps of assessment:

- Identify contract(s) with a customer;
- Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer services that are distinct
- Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring promised services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
- Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected costplus margin;
- Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring promised goods or service to a customer (which is when the customer obtains control of that service).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)

Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Beban diakui pada saat terjadi.

s. Imbalan Pasca-Kerja

(1) Kewajiban Pensiun

Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT AXA Mandiri Financial Service.

Nilai Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan merupakan Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti (NKKIP) pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program imbalan karyawan, disesuaikan dengan biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Recognition of Income and Expenses
(continued)

Interest income from a financial asset is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Dividend income from investment in shares is recognized when the shareholders' rights to receive such dividend have been established.

Expenses are recognized when incurred.

s. Post-Employment Benefits

(1) Pension Obligations

The Company enrolls its employees in the Financial Institution Pension Fund (DPLK) program whose management is handed over to PT AXA Mandiri Financial Service.

The liability recognized in the statement of financial position are the present value of the defined benefit pension plans at the statement of financial position date deducted by the fair value of the employee benefit program assets, adjusted with past service costs and unrecognized actuarial gains/losses.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

(1) Kewajiban Pensiun (lanjutan)

Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti dihitung berdasarkan jumlah imbalan yang telah dihimpun (*accrued*) tanggal laporan posisi keuangan dengan memperhitungkan gaji proyeksi pada saat jatuhnya liabilitas pembayaran.

(2) Kewajiban pasca kerja lainnya

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pasca-kerja yang diberikan bagi para karyawan yang telah diputus hubungan kerjanya, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha dengan Serikat Pekerja tahun 2018.

Prakiraan biaya imbalan pesangon diakru sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program imbalan pasti. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Post-Employment Benefits (continued)

(1) Pension Obligations (continued)

Defined benefit liabilities are calculated every year by an independent actuary using the projected unit credit method. The Defined Benefit Employee Pension Plan is calculated based on total accrued benefits at the statement of financial position date by calculating projected salaries at the payment maturity date.

(2) Other post-employment benefit obligation

The Company provides a post-employment benefit program which is given to employees whose employment has terminated, based on the 2018 Collective Labor Agreement between the employer and the Worker Union.

The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by independent actuaries.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan Perusahaan merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

t. Provisi

Provisi diakui bila Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

u. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Perusahaan terdiri dari biaya pengurusan dan perpanjangan sertifikat HGB. Hak atas tanah diamortisasi sepanjang umur hukum hak, yaitu antara 5 sampai 30 tahun.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Post-Employment Benefits (continued)

The amount recognized as the liability for employee benefits in the Company's statements of financial position is the present value of the defined employee benefit obligation.

t. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

u. Intangible Assets

The Company's intangible assets consist of management fees and extension of building rights certificate. Land rights are amortized over the life of the legal term, which is between 5 until 30 years.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Beban pajak kini Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the Company's statement of profit or loss and other comprehensive income statement because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and fiscal losses can be utilized.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Pajak Penghasilan (lanjutan)

v. Income Tax (continued)

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk keseluruhan perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the Company's financial statements and the corresponding tax bases used in the calculation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized in the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara yang Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui diluar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas, dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau pada saat perlakuan akuntansi pada bisnis kombinasi. Dalam hal bisnis kombinasi, efek pajak termasuk dalam akuntansi untuk bisnis kombinasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Perusahaan kena pajak yang sama atau Perusahaan kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

3. ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Income Tax (continued)

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current tax and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except to the extent that the income tax arises from transactions or events that are recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognized outside profit or loss or on the accounting treatment of a business combination. In the case of a business combination, tax effects are included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI
DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah tercatat aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan Perusahaan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

i. Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dimasa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sama. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

**4. CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS AND ESTIMATES**

Key Sources of Estimation Uncertainty

The preparation of the Company's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that has an effect to the carrying amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the Company's financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from those estimates.

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, that have the significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

i. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

Management has estimated the useful lives of fixed assets based on utilization of assets expected to be supportable with business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI
DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS AND ESTIMATES
(continued)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

*Key Sources of Estimation Uncertainty
(continued)*

i. Estimasi Masa Manfaat atas Aset Tetap
(lanjutan)

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

i. Estimated Useful Lives of Fixed Assets
(continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

ii. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Beban dari program imbalan pasca kerja dan nilai kini dari kewajiban pensiun ditentukan oleh penilaian aktuaris dengan menggunakan beberapa asumsi diantaranya tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian. Kewajiban imbalan pasca kerja sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Nilai tercatat liabilitas telah diungkapkan dalam Catatan 24.

ii. Post-Employment Benefits Obligation

The cost of employee benefits obligation plan and present value of the pension obligation are determined based on actuarial valuation which uses various assumptions such as discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increase and mortality rates. The employee benefits obligation is highly sensitive to changes in the assumptions. The carrying amount of the obligation is disclosed in Note 24.

iii. Penurunan Nilai Piutang

Perusahaan menilai atas penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direvisi secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

iii. Impairment Loss of Receivables

The Company assesses for impairment of receivables at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgement on the assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between estimate and actual loss.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
 For the years ended
 31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2021	2020	
Kas	2.262.128.214	3.040.195.519	Cash on Hand
Bank:			Banks:
Pihak Berelasi:			Related parties:
PT Bank Mandiri			PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk	26.845.806.318	37.918.611.918	(Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk	3.783.375.131	8.073.734.639	(Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk	2.024.199.452	3.095.792.500	(Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk	462.003.779	59.208.923	(Persero) Tbk
Jumlah	33.115.384.680	49.147.347.980	Total
Pihak Ketiga:			Third parties:
PT Bank Pembangunan Daerah	3.174.231.875	1.128.216.185	PT Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Syariah Indonesia	1.881.317.889	-	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Mega Tbk	658.000.262	654.362.984	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk	564.422.195	2.347.888.840	Agroniaga Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	298.070.927	1.096.445.416	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Bukopin Syariah	248.900.117	248.042.164	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank Central Asia Tbk	19.883.482	20.279.926	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI	17.255.959	1.109.776.363	PT Bank DKI
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Escrow	-	2.550.305.194	Escrow
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah	-	1.155.689.458	Syariah
PT Bank Muamalat			PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk	-	10.349.869	Indonesia Tbk
Jumlah	6.862.082.706	10.321.356.399	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(continued)

	2021	2020	
Deposito:			Deposits:
Pihak Berelasi:			Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	Agroniaga Tbk
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk	1.403.075.056	1.365.759.400	(Persero) Tbk
Jumlah	11.403.075.056	11.365.759.400	Total
Jumlah	53.642.670.656	73.874.659.298	Total

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun: Interest rate per annum on time deposit:

	2021	2020	
Kisaran Suku Bunga Deposito	6,20%-6,60%	5,00%-5,25%	Deposit Interest Rate Range

6. PIUTANG USAHA

6. ACCOUNTS RECEIVABLE

	2021	2020	
Pihak Berelasi	12.902.429.248	8.101.171.180	Related Parties
Pihak Ketiga	12.929.219.798	24.965.709.443	Third Parties
Jumlah	25.831.649.046	33.066.880.623	Total
Penyisihan Kerugian			Allowance for
Penurunan Nilai	(9.104.504.802)	(8.765.415.252)	Impairment Loss
Jumlah	16.727.144.244	24.301.465.371	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

Berdasarkan Debitur:

By Debtor:

	2021	2020	
Pihak Berelasi:			<i>Related Parties:</i>
KODAM JAYA	6.476.000.000	-	KODAM JAYA
Asosiasi Perusahaan Pelayanan			<i>Asosiasi Perusahaan Pelayanan</i>
Pemulangan TKI	2.658.072.000	2.658.072.000	<i>Pemulangan TKI</i>
PT Daerah Perusahaan			<i>PT Daerah Perusahaan</i>
Mitra Patriot	1.522.703.500	-	<i>Mitra Patriot</i>
BPTD Wilayah XIII			<i>BPTD Wilayah XIII</i>
PROV. SULSEL dan SULBAR	303.799.695	403.851.650	<i>PROV. SULSEL dan SULBAR</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	29.184.240	958.800.000	<i>PT Angkasa Pura II (Persero)</i>
BPTD WILAYAH XIV			<i>BPTD WILAYAH XIV</i>
PROV. KALBAR	-	1.201.241.993	<i>PROV. KALBAR</i>
DISHUB Batam	-	404.861.071	<i>DISHUB Batam</i>
Kemenuh	-	573.675.615	<i>Kemenuh</i>
Lainnya (rata-rata dibawah Rp300 juta)	1.912.669.813	1.900.668.851	<i>Others (mostly below Rp 300 million)</i>
Jumlah	12.902.429.248	8.101.171.180	Total
Pihak Ketiga:			<i>Third Parties:</i>
PT Aerotrans (haji)	2.965.816.375	2.965.816.375	<i>PT Aerotrans (haji)</i>
PT Pos Logistik	1.797.666.032	664.198.379	<i>PT Pos Logistik</i>
Pelanggan Sewa Bus	1.348.770.000	325.870.000	<i>Bus Rental Customers</i>
PT Trinusa Travelindo	389.268.878	-	<i>PT Trinusa Travelindo</i>
PT Rizky Jaya	316.005.000	316.005.000	<i>PT Rizky Jaya</i>
PT Bianglala Metropolitan	313.124.508	-	<i>PT Bianglala Metropolitan</i>
Agus CK	150.848.000	311.808.000	<i>Agus CK</i>
Pelanggan Umum			<i>General Customer of</i>
Damri Apps	63.867.091	856.805.323	<i>Damri Apps</i>
Perwakilan Paket Solo	25.308.500	441.734.707	<i>Solo Package Representative</i>
PT Daerah Perusahaan			<i>PT Daerah Perusahaan</i>
Mitra Patriot	-	1.500.292.300	<i>Mitra Patriot</i>
PT Transportasi Jakarta			<i>PT Transportasi Jakarta</i>
Brunei Darussalam	-	8.290.760.357	<i>Brunei Darussalam</i>
Agen Pemasaran Sintang	-	992.002.000	<i>Agen Pinoh/Kris</i>
Perwakilan Paket Djuanda	-	958.100.589	<i>Juanda Package Representative</i>
Lainnya (rata-rata dibawah Rp300 juta)	5.558.545.414	7.342.316.413	<i>Others (average below Rp 300 million)</i>
Jumlah	12.929.219.798	24.965.709.443	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha timbul atas penyewaan dan atau pemakaian bus oleh pihak ketiga atau pemerintah (perintis) yang pembayarannya dilakukan secara periodik setelah jasa diberikan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga. Tidak diadakan pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang kepada pihak berelasi karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Penyisihan piutang usaha pada 31 Desember 2021 telah menggunakan metode suku bunga efektif sesuai dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	2021	2020	
Saldo awal	8.765.415.252	6.584.390.572	Beginning balance
Penambahan	2.631.363.447	2.181.024.680	Addition
Pengurangan	(2.292.273.897)	-	Deduction
Saldo akhir	9.104.504.802	8.765.415.252	Ending balance

6. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

Accounts receivable arise from the rent and/or use of buses by third parties or government (pioneer) whose payments are made periodically after the services are provided.

Management believes that the allowance for impairment losses from third parties is adequate. Management also believes that there are no significant concentrations on credit risk in third party receivable. No allowance for impairment loss was provided on receivables from related parties, as management believes that all such receivables are collectible.

Allowance for trade receivables as of 31 December 2021 has used the effective interest rate method in accordance with SFAS 71 "Financial Instruments".

Changes in the allowance for impairment loss:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

7. PIUTANG LAIN-LAIN

7. OTHER RECEIVABLES

	2021	2020	
Pegawai/ Karyawan	9.957.898.263	8.058.502.464	Employee
Lainnya	13.042.320	-	Others
Jumlah	9.970.940.583	8.058.502.464	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.219.983.571)	(2.631.601.049)	Allowance for impairment loss
Jumlah	6.750.957.012	5.426.901.415	Total
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:			
Management believes that the allowance for impairment of other receivables is sufficient to cover possible losses arising from uncollectible receivables. Changes in the allowance for impairment loss:			
	2021	2020	
Saldo Awal	2.631.601.049	3.849.978.231	Beginning Balance
Penambahan (pengurangan)	588.382.522	(1.218.377.182)	Addition (deduction)
Saldo Akhir	3.219.983.571	2.631.601.049	Ending Balance

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	2021	2020	
Suku Cadang	3.302.256.474	6.427.642.655	Spare Parts
Pelumas	362.248.085	470.611.067	Lubricant
Suku Cadang AC	356.300.388	434.450.848	Spare Parts of AC
Ban Luar/ Dalam	330.893.253	546.819.821	Outer/ Inner Tyre
Suku Cadang Service/ Perbaikan	150.059.001	310.784.489	Service/ Repair Spare Parts
Karcis Bus	139.464.231	152.482.492	Bus Ticket
Alat Tulis Kantor	114.803.214	169.704.712	Office Stationery
Bahan Pakaian Dinas	12.250.000	145.295.000	Uniforms Material
Ban Vulkanisir	12.149.093	91.969.000	Retread Tyre
Jumlah	4.780.423.739	8.749.760.084	Total

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan baik dari kebakaran, banjir dan risiko lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pihak manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh risiko-risiko tersebut di atas. Selain itu, Perusahaan tidak melakukan penurunan nilai persediaan berdasarkan kondisi fisik dan penempatannya pada tanggal laporan keuangan.

The Company does not insure inventories from fire, flood and other risks for the year ended 31 December 2021 and 2020. Management believes that there are no losses caused by the risks mentioned above. In addition, the Company does not reduce the value of inventories based on the physical condition and location at the date of the financial statements.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan.

As of 31 December 2021 and 2020, no inventory was used as collateral.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	2021	2020	
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	427.049.417	551.710.050	Land and Building Tax (PBB)
Pajak Kendaraan	143.592.388	136.057.000	Vehicle Tax
Asuransi Kendaraan	66.955.083	-	Vehicle Insurance
Izin Trayek	4.280.000	62.120.000	Route License
Sewa Kantor, Bangunan, Shelter	-	50.666.667	Offices, Buildings, Shelters Rent
Jumlah	641.876.888	800.553.717	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

10. UANG MUKA

10. ADVANCES

	2021	2020	
Beban usaha karyawan	2.754.224.357	6.324.200.047	Operating expenses employees
Persediaan	299.822.565	1.843.699.138	Spare part
Jaminan pelaksanaan	173.557.021	3.927.194.310	Contract Bond
Jumlah	3.227.603.943	12.095.093.495	Total

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	2021	2020	
Pajak Pertambahan Nilai	614.485.648	904.410.814	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 23	204.311.730	7.705.460	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 21	98.678.602	794.770.589	Income Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	15.965.089	2.461.507	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Penghasilan Pasal 22	1.407.644	96.350.292	Income Tax Article 22
Jumlah	934.848.713	1.805.698.662	Total

b. Manfaat (Beban) Pajak

b. Tax Benefits (Expenses)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi secara komersil dan perhitungan menurut rekonsiliasi, sebagai berikut:

The reconciliation between pre-tax profit according to the commercial income statement and the calculation according to the tax reconciliation is as follows:

	2021	2020	
Pajak Kini			Current tax
Laba (Rugi)			Profit (Loss)
sebelum Pajak	(168.710.292.885)	(242.219.934.105)	before Tax
Beda Temporer:			Temporary Difference:
Imbalan Kerja	18.511.640.772	(13.302.626.218)	Employee Benefit
Penyisihan Piutang	3.219.745.968	2.181.024.680	Allowance for Receivable
Penyusutan Aset Tetap	43.450.604.150	41.343.816.718	Depreciation of Fixed Assets
Penyusutan Aset Hak Guna	908.215.000	699.591.886	Depreciation of Right of Use
Jumlah	66.090.205.890	30.921.807.066	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

b. Manfaat (Beban) Pajak (lanjutan)

b. Tax Benefits (Expenses) (continued)

	2021	2020	
Beda Tetap:			<i>Fixed Difference:</i>
Jamuan			<i>Entertainment for</i>
Tamu/ Relasi	2.370.747.662	2.307.429.784	<i>Guest/Relation</i>
Sumbangan	1.079.321.998	1.382.445.841	<i>Donations</i>
Perayaan Hari Besar	1.011.939.778	1.472.267.774	<i>Commemoration Day Event</i>
Administrasi pajak	60.775.292	18.217.928	<i>Tax administration</i>
Pajak penghasilan	8.433.156.467	8.909.119.017	<i>Income tax</i>
Bunga Deposito	34.043.129	2.022.825.277	<i>Interest Deposit</i>
Pendapatan Sewa	2.618.335.412	1.354.266.196	<i>Rent Income</i>
Jumlah	15.608.319.738	17.466.571.817	Total
	2021	2020	
Laba (Rugi) Fiskal sebelum			<i>Fiscal Profit (Loss) before</i>
Kompensasi			<i>Fiscal Loss</i>
Rugi Fiskal	(87.011.767.257)	(193.831.555.222)	<i>Compensation</i>
Akumulasi Laba (Rugi)			<i>Accumulated Fiscal Profit</i>
Fiskal	(87.011.767.257)	(193.831.555.222)	<i>(Loss)</i>
Penghasilan Kena Pajak	(87.011.767.257)	(193.831.555.000)	<i>Taxable Income</i>
Tarif Pajak	22%	22%	<i>Tax Rate</i>
Taksiran Pajak			<i>Estimated</i>
Penghasilan	-	-	<i>Income Tax</i>
Dikurangi			<i>Less</i>
Pajak dibayar dimuka			<i>Prepaid taxes</i>
- PPh pasal 23	-	-	<i>Income Tax Article 23</i>
- PPh pasal 25	-	-	<i>Income Tax Article 25</i>
Pajak penghasilan badan			
kurang bayar	-	-	<i>Underpayment of income tax</i>

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak (lanjutan)

Pada tahun 2018, Perusahaan mengubah estimasi umur ekonomis aset tetap alat produksi yang semula 5 tahun dengan nilai residu 20% menjadi 10 tahun dengan nilai residu 5%, hal ini menyebabkan beda temporer dengan perhitungan pajak. Perhitungan penyusutan secara komersil sebesar Rp 113.229.325.267 dan fiskal sebesar Rp 69.778.721.117 sehingga terjadi beda temporer sebesar Rp 43.450.604.150.

Perhitungan pajak penghasilan (PPH) badan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah suatu perhitungan normatif yang dibuat untuk tujuan pelaporan keuangan akhir tahun.

c. Pajak Tangguhan

Akun ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (PSAK 46).

Perbedaan temporer dari pengakuan beban dan pendapatan antara Perusahaan dengan perpajakan terdiri dari beban penyusutan, beban penyesuaian piutang usaha, jasa produksi, dan imbalan pasca kerja.

Perhitungan kewajiban pajak tangguhan, sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

b. Tax Benefits (Expenses) (continued)

In 2018, the Company changed the estimated economic life of fixed assets of production equipment from 5 years with residual value of 20% to 10 years with residual value of 5%, this causes temporary differences with tax calculations. Commercial depreciation calculations amounted to Rp 113,229,325,267 and fiscal depreciation amounted to Rp 69,778,721,117 resulting in temporary differences amounting to Rp 43,450,604,150.

Calculation of corporate income tax (PPH) for 2021 and 2020 is a normative calculation made for the purpose of year-end financial reporting.

c. Deferred Tax

This account represents the amount of tax income payable for future period as a result of differences in taxable temporary differences (SFAS 46).

Temporary differences in recognition of expenses and income between the Company and tax authority consist of: depreciation, allowance for bad debt, profit sharing, and post-employment benefits.

Calculation of deferred tax liabilities is as follows:

	31 Des 2020/ 31 Des 2020	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi / Charged (credited) to the income statement /		Dibebankan ke pendapatan Komprehensif lain / Charged to other compre- hensive income		31 Des 2021/ 31 Dec 2021
		Tahun berjalan/ Current Year	Penyesuaian/ Adjustment	Tahun berjalan/ Current Year	Penyesuaian/ Adjustment	
Pajak tangguhan						
Akumulasi Penyusutan						Deferred tax
Aset Tetap	(111.552.140.134)	9.559.132.913	-	-	-(101.993.007.221)	Accumulated depreciation of fixed asset
Akumulasi Penyusutan						Accumulated depreciation
Aset Hak Guna	153.910.215	199.807.300	-	-	- 353.717.515	on right of use
Penyesuaian Piutang	4.043.017.767	708.344.113	-	-	- 4.751.361.880	Allowance
Penyesuaian Bonus	-	-	-	-	-	for Receivable
Imbalan Pasca Kerja	52.108.661.504	4.072.560.970	1.268.067.154	634.033.577	- 58.083.323.205	Allowance for Bonus
	(55.246.550.648)	14.539.845.296	1.268.067.154	634.033.577	- (38.804.604.621)	Employee benefit

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Pajak Tangguhan (lanjutan)

c. Deferred Tax (continued)

31 Des 2019/ 31 Des 2019	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi / Charged (credited) to the income statement		Dibebankan ke pendapatan Komprehensif lain / Charged to other compre- hensive income		31 Des 2020/ 31 Dec 2020
	Tahun berjalan/ Current Year	Penyesuaian/ Adjustment	Tahun berjalan/ Current Year	Penyesuaian/ Adjustment	
Pajak tangguhan					Deferred tax
Akumulasi Penyusutan					<i>Accumulated depreciation</i>
Aset Tetap (119.508.336.843)	9.095.639.678	(1.139.442.969)	-	(111.552.140.134)	<i>of fixed asset</i>
Akumulasi Penyusutan					<i>Accumulated depreciation</i>
Aset Hak Guna -	153.910.215	-	-	153.910.215	<i>on right of use</i>
Penyisihan Piutang 3.563.192.337	479.825.430	-	-	4.043.017.767	<i>Allowance for Receivable</i>
Penyisihan Bonus 3.777.555.413	(3.777.555.413)	-	-	-	<i>Allowance for Bonus</i>
Imbalan Pasca Kerja 48.787.594.263	2.926.577.766	14.403.568.396	(14.009.078.921)	52.108.661.504	<i>Employee benefit</i>
(63.379.994.830)	8.878.397.676	13.264.125.427	(14.009.078.921)	(55.246.550.648)	

12. ASET PROGRAM

12. PLAN ASSETS

Pada tanggal 27 Januari 2020, Perusahaan mengalihkan aset program melalui perjanjian novasi No. 04/05/AMFS-DPLK/PPUKP.2020 tentang pengelolaan dana program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP) antara DPLK PT Bank Mandiri Tbk, DPLK PT Axa Mandiri Financial Service dan Perum DAMRI.

On 27 January 2020 the Company transferred program assets through the novation agreement No. 04/05/AMFS-DPLK/PPUKP.2020 regarding the management of pension program funds for severance pay compensation (PPUKP) between DPLK PT Bank Mandiri Tbk, DPLK PT Axa Mandiri Financial Service and Perum DAMRI.

Perusahaan telah menempatkan dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Axa Mandiri untuk pembayaran Program Pensiun, sebagai berikut :

The Company has placed funds into Financial Institution Pension Fund PT Axa Mandiri for payment of the Pension Program, as follows :

	2021	2020	
Saldo Awal	1.007.497.689	1.974.109.289	<i>Beginning Balance</i>
Penempatan Dana:			<i>Funds Placement:</i>
Penempatan Dana Pensiun	8.300.000.000	24.700.000.000	<i>Pension Fund Deposit</i>
Hasil Penempatan Dana Pensiun	40.247.955	77.359.255	<i>Profit of Pension Fund Deposit</i>
Sub jumlah	9.347.745.644	26.751.468.544	<i>Subtotal</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pembayaran Manfaat Pensiun	7.872.962.149	25.743.970.855	<i>Pension Benefit Payment</i>
Subjumlah	7.782.962.149	25.743.970.855	<i>Subtotal</i>
Jumlah	1.474.783.495	1.007.497.689	<i>Total</i>

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

2021						
	Saldo Awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Harga Perolehan:						Acquisition Cost:
Aset Tetap						Fixed Assets
Tanah	19.531.593.720	58.800.000	-	-	19.590.393.720	Land
Bangunan	50.187.226.480	4.796.387.136	-	959.984.455	55.943.598.071	Building
Bus	2.208.358.450.800	18.167.366.980	19.019.348.981	6.491.969.886	2.213.998.438.685	Bus
Truk	35.935.281.978	-	-	-	35.935.281.978	Truck
Kendaraan Dinas	20.304.573.537	342.645.000	-	(390.119.512)	20.257.099.025	Vehicle
Mesin						Workshop
Bengkel	6.753.477.742	357.854.545		(91.934.750)	7.019.397.537	Machineries
Suku Cadang	7.842.847.368	762.391.527	-	(2.590.000)	8.602.648.895	Spare Part
Peralatan						Office
Kantor	9.091.190.784	448.690.757	-	(301.311.000)	9.238.570.541	Equipment
Inventaris						Office
Kantor	19.265.430.677	795.892.763	-	(78.367.673)	19.982.955.767	Inventories
Aset Hak Guna						Rights of use Assets
Kendaraan	2.352.685.564	-	-	-	2.352.685.564	Vehicle
Bangunan	136.445.993	390.000.000	-	-	526.445.993	Building
Subjumlah	2.379.759.204.643	26.120.028.708	19.019.348.981	6.587.631.406	2.393.447.515.776	Subtotal
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan:						Depreciation:
Aset Tetap						Fixed Assets
Bangunan	27.839.754.017	2.349.060.513	-	8.749.998	30.197.564.528	Building
Bus	1.321.818.803.753	106.035.147.200	18.017.534.505	-	1.409.836.416.448	Bus
Truk	30.124.685.017	114.186.807	-	-	30.238.871.824	Truck
Kendaraan	17.696.529.410	1.004.683.119	-	-	18.701.212.529	Vehicle
Mesin						Workshop
Bengkel	6.281.570.389	235.586.079	-	-	6.517.156.468	Machineries
Suku Cadang	6.307.162.467	631.676.474	-	-	6.938.838.941	Spare Part
Peralatan						Office
Kantor	7.438.704.494	577.526.196	-	-	8.016.230.690	Equipment
Inventaris						Office
Kantor	15.566.474.926	1.383.106.379	-	(8.749.999)	16.940.831.306	Inventories
Aset Hak Guna						Rights of use assets
Kendaraan	654.109.888	818.840.000	-	-	1.472.949.888	Vehicle
Bangunan	45.481.998	89.375.000	-	-	134.856.998	Building
Subjumlah	1.433.773.276.359	113.239.187.767	18.052.281.587	-	1.528.994.929.620	Subtotal
Nilai Buku	945.985.928.283				864.452.586.156	Book Value

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

2020						
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan:						Acquisition Cost:
Aset Tetap						Fixed Assets
Tanah	19.531.593.720	-	-	-	19.531.593.720	Land
Bangunan	48.821.049.412	1.366.177.068	-	-	50.187.226.480	Building
Bus	2.232.279.977.966	39.147.276.625	63.068.803.791	-	2.208.358.450.800	Bus
Truk	36.741.440.259	-	806.158.281	-	35.935.281.978	Truck
Kendaraan Dinas	20.026.623.537	280.421.000	2.471.000	-	20.304.573.537	Vehicle
Mesin						Workshop
Bengkel	6.622.359.002	131.118.740	-	-	6.753.477.742	Machineries
Suku Cadang	7.832.847.368	10.000.000	-	-	7.842.847.368	Spare Part
Peralatan						Office
Kantor	8.696.464.496	394.726.288	-	-	9.091.190.784	Equipment
Inventaris						Office
Kantor	18.107.866.321	1.189.737.356	32.173.000	-	19.265.430.677	Inventories
Aset Hak Guna						Rights of use Assets
Kendaraan	-	2.352.685.564	-	-	2.352.685.564	Vehicle
Bangunan	-	136.445.993	-	-	136.445.993	Building
Subjumlah	2.398.660.222.081	45.008.588.634	63.909.606.072	-	2.379.759.204.643	Subtotal
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan:						Depreciation:
Aset Tetap						Fixed Assets
Bangunan	25.624.295.712	2.215.458.305	-	-	27.839.754.017	Building
Bus	1.244.481.879.402	130.932.834.579	53.595.910.228	-	1.321.818.803.753	Bus
Truk	30.692.057.729	198.477.647	765.850.359	-	30.124.685.017	Truck
Kendaraan	16.534.487.879	1.162.041.531	-	-	17.696.529.410	Vehicle
Mesin						Workshop
Bengkel	6.056.005.020	225.565.369	-	-	6.281.570.389	Machineries
Suku Cadang	5.749.291.421	557.871.046	-	-	6.307.162.467	Spare Part
Peralatan						Office
Kantor	6.840.075.765	598.628.729	-	-	7.438.704.494	Equipment
Inventaris						Office
Kantor	14.274.342.233	1.297.192.743	5.060.050	-	15.566.474.926	Inventories
Aset Hak Guna						Rights of use assets
Kendaraan	-	654.109.888	-	-	654.109.888	Vehicle
Bangunan	-	45.481.998	-	-	45.481.998	Building
Subjumlah	1.350.252.435.161	137.887.661.835	54.366.820.637	-	1.433.773.276.359	Subtotal
Nilai Buku	1.048.407.786.920				945.985.928.283	Book Value

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 16 Februari 2021, Perusahaan melakukan penilaian ulang atas nilai wajar 66 unit bis Zhongtong cabang SBU Transjakarta Koridor 1 & 8, dengan jasa penilai independen. Hasil perhitungan nilai wajar appraisal menurut KJPP Susanto Salman & Rekan No. 00003/2.0158-00/PP/11/0519/1/II/21 atas 66 unit bus tersebut sebesar Rp 4.402.944.000.

Perhitungan ulang nilai wajar 66 unit bus didasari pada berakhirnya Kontrak Kerjasama Investor dan Operator Bus untuk SBU Transjakarta Koridor 1&8 No. 212/PJ-PT.TJ./I/2019 tanggal 11 Januari 2021.

Pada tanggal 25 Oktober 2021, Perusahaan menerima bus bantuan dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk Dipergunakan dalam Tugas-Tugas Operasional No. KU.003/64/BASTO-AJ/ BS/SATKER-DAJ/X/2021 perihal Pengadaan 52 (lima puluh dua) unit Bus Besar BRT Euro II Engine dan 15 (lima belas) unit Bus Ukuran Sedang AC Engine (Sarana Pemadu Moda) sebesar Rp 70.262.600.000.

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perusahaan menerima bus bantuan dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk Dipergunakan dalam Tugas-Tugas Operasional No. KU.003/BAST-BRT/3/III/SATKER-DAMRI/2018 perihal Pengadaan 184 (seratus delapan puluh empat) Unit Bus Perintis dan No. KU.003/BAST-BRT/2/III/SATKER-DAMRI/2018 perihal Pengadaan 168 (seratus enam puluh delapan) Unit Bus Perintis dengan total sebesar Rp 305.609.200.000.

13. FIXED ASSETS (continued)

On 16 February 2021, the Company conducted revaluation on fair value of 66 units of Zhongtong buses, SBU Transjakarta Corridor 1 & 8 branches, using independent appraisal services. The results of calculation of the fair value valuation according to KJPP Susanto Salman & Partners No.00003/2.0158-00/PP/11/0519 /1/II/21 for the 66 bus units is amounting to Rp 4,402,944,000.

The Company reassesses the fair value of 66 bus units in connection with the termination of Cooperation Contract between Investors and Bus Operators for SBU Transjakarta Corridor 1 & 8 No. 212/PJ-PT.TJ./I/2019 dated 11 January 2021.

On 25 October 2021, the Company received support bus from the Ministry of Transportation based on the Minutes of Handover of Work Results to be Used in Operational Tasks No. KU.003/ 64/ BASTO-AJ/BS/SATKER-DAJ/X/2021 regarding the Procurement of 52 (fifty two) units of Big Bus BRT Euro II Engine and 15 (fifteen) units of Medium Size Bus AC Engine (Shuttle Bus) in the amount of Rp. 70,262,600,000.

On 8 March 2018, the Company received bus assistance from the Ministry of Transportation based on the Minutes of Handover of Work Results to be Used in Operational Tasks No. KU.003/BAST-BRT/3/III/SATKER-DAMRI/2018 regarding the Procurement of 184 (one hundred and eighty four) Pioneer Bus Units and No. KU.003/BAST-BRT/2/III/SATKER-DAMRI/2018 Regarding the Procurement of 168 (one hundred and sixty eight) Pioneer Bus Units with a total of Rp 305,609,200,000.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Sesuai dengan Berita Acara yang telah disebutkan di atas, total aset-aset atas Bus Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 375.871.800.000 dan telah dikonfirmasi kepada Kementerian Perhubungan berdasarkan surat No. UM/303/2/18/DJPD/2022 yang belum diakui kepemilikannya oleh Perusahaan dan telah dioperasikan sejak 2016.

Pelepasan aset tetap berupa bus adalah sebagai berikut :

	2021	2020	
Hasil Pelepasan	19.019.348.981	63.909.606.072	Proceeds
Dikurangi :			Less :
Nilai tercatat	(18.017.534.505)	(54.366.820.637)	Carrying value
Rugi atas Pelepasan Aset Tetap	1.001.814.476	9.542.785.435	Loss on Disposal of fixed assets

Rugi atas pelepasan aset tetap tersebut tercatat pada beban administrasi dan umum (Catatan 31).

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2021	2020	
Beban operasional (Catatan 29)			Operating expenses (Note 29)
Aset produksi	106.149.334.007	131.131.312.227	Production assets
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)			General and administrative expenses (Note 31)
Aset penunjang	6.181.638.759	6.056.757.722	Supporting assets
Aset hak guna	908.215.000	699.591.886	Rights of use assets
Jumlah	113.239.187.766	137.887.661.835	Total

Pada tahun 2021, Perusahaan mereklasifikasi atas aset penunjang berupa kendaraan dinas, mesin bengkel, suku cadang, peralatan kantor, dan inventaris kantor yang sudah rusak menjadi aset yang tidak produktif sebesar Rp 896.922.435 (Catatan 16.4).

Aset dalam proses yang telah selesai pada tahun 2021 berupa Rehab Bus di reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp 6.491.969.886 dan Aset Penunjang di reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp 959.984.445 (Catatan 13 dan Catatan 15).

13. FIXED ASSETS (continued)

In accordance with the Minutes of handover mentioned above, the assets of the State Capital Participation Bus amounting to Rp 375,871,800,000 and has been confirmed to the Ministry of Transportation based on letter no. UM/303/2/18/DJPD/2022 which have not been recognized for their ownership by the Company and have been operating since 2016.

Disposal of fixed assets in the form of buses are as follows:

Loss on disposal of fixed assets is recorded in general and administrative expenses (Note 31).

Depreciation expenses were allocated to the following:

In 2021, the Company reclassified its supporting assets in the form of official vehicles, workshop machineries, spare parts, office equipment, and office inventory that have been damaged into non-productive assets amounting to Rp 896,922,435 (Note 16.4).

Assets in process which have been completed in 2021 in the form of Rehab Buses was reclassified to fix assets amounting to Rp 6,491,969,886 and supporting assets was reclassified to fix assets amounting to Rp 959,984,445 (Note 13 and Note 15).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 14. INVESMENT IN ASSOCIATE

		Persentase		
	Bidang Usaha/ Main Business	Tempat Kedudukan/ Domicile	Kepemilikan/ Percentage of Ownership	
			2021	2020
PT Jogja Tugu Trans	Pengelolaan Sistem Transportasi/ Management of the Transportation System	Yogyakarta	10,55 319.000.000	319.000.000
Jumlah/ Total			319.000.000	319.000.000

Sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Haryanto, SH. No. 45 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jogja Tugu Trans, dijelaskan bahwa Perusahaan telah menerima pembagian dividen tahun 2012 sebesar Rp.53.269.998 (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan pembayaran dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap pertama tanggal 23 September 2014 sebesar Rp26.634.994.
2. Tahap kedua tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 26.634.994.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jogja Tugu Trans No.0167/SK-JTT/B/VIII/2019 tentang Pembayaran Dividen Tahun 2015 sebesar 100% Direksi PT Jogja Tugu Trans. Perusahaan memperoleh pembagian dividen sebesar Rp 8.808.104.

Sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jogja Tugu Trans No. 04/JTT-RUPS/VI/2021 tertanggal 19 Juni 2021 Perilah Penetapan dan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja PT Jogja Tugu Trans.

In accordance with the Deed of Notary Muhammad Haryanto, SH. No. 45 dated 24 January 2014 regarding the Decision Statement of the General Meeting of Shareholders of PT Jogja Tugu Trans, it is explained that the Company has received dividend distribution in 2012 amounting to Rp.53,269,998 (fifty three million two hundred sixty nine thousand nine hundred ninety eight rupiah) with payment in 2 (two) stages, namely:

1. *The first stage on 23 September 2014 amounted to Rp.26,634,994.*
2. *The second stage on 31 December 2014 amounted to Rp26,634,994.*

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Jogja Tugu Trans No.0167/SK-JTT/B/VIII/2019 concerning Dividend Payments in 2015 amounting to 100% of the Directors of PT Jogja Tugu Trans. The company received dividend distribution of Rp 8,808,104.

In accordance with the Decree of the General Meeting of Shareholders of PT Jogja Tugu Trans No. 04/JTT-GMS/VI/2021 dated 19 June 2021 The terms for the determination and ratification of changes to the Work Plan and Revenue and Expenditure Budget of PT Jogja Tugu Trans.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
(lanjutan)

Pada tahun 2021, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Tutup Buku Tahun 2020 pada tanggal 6 Desember 2021 diusulkan pembagian laba dengan persentase sebagai berikut :

Dividen/ <i>Dividend</i>	40%	122.865.968
Cadangan Umum/ <i>General Reserve</i>	55%	168.940.707
Dana Pesangon/ <i>Severance Pay</i>	5%	15.358.246
Jumlah/ <i>Total</i>		307.164.921

Berikut rincian usulan pembagian laba tahun 2020 untuk masing-masing pemegang saham:

No.	Nama Pemegang Saham/ <i>Shareholders</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Jumlah Lembar Saham/ <i>Total Shares</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Pembagian Dividen/ <i>Dividend Distribution</i>
1	Koperasi Kopata	993.000.000	993	33%	40.345.869
2	Koperasi Aspada	588.000.000	588	19%	23.890.605
3	Koperasi Pemuda	588.000.000	588	19%	23.890.605
4	Koperasi Puskopkar	534.000.000	534	18%	21.696.570
5	Damri	321.000.000	321	11%	13.042.320
	Jumlah/ <i>Total</i>	3.024.000.000	3,024	100%	122.865.968

Atas usulan pembagian dividen di atas Perusahaan telah mencatat bagiannya (Catatan 27).

14. INVESMENT IN ASSOCIATE
(continued)

In 2021, it has been done in the General Meeting of Shareholders for 2020 fiscal year on 6 December 2021 to propose the distribution of profits with the following percentage:

The following are the details of the proposed profit sharing for 2020 for each shareholder:

Based on the dividend distribution proposal above, the Company has recorded its share (Note 27).

15. ASET DALAM PROSES

15. ASSETS IN PROGRESS

	2021	2020	
Alat Produksi	417.585.692	2.672.870.912	<i>Production Equipment</i>
Alat Penunjang	107.003.033	1.497.875.746	<i>Supporting Equipment</i>
Jumlah	524.588.725	4.170.746.658	<i>Total</i>

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Damri No.SK 1397/HK.001/DAMRI-2019 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa, memutuskan bahwa Divisi Pengguna/ Kantor Cabang/ Kantor Divre/ User yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sampai dengan nilai Rp 75.000.000.000 dilakukan oleh Kantor Cabang.

Based on the Decree of the Board of Directors of Perum Damri No. SK 1397/HK.001/DAMRI-2019 concerning Standard Operations and Procedures for Procurement of Goods/Services, it is decided that the User Division/Branch Office/Divre Office/User which has the duties of authority and responsibility can carry out the procurement of goods and services up to a value of Rp 75,000,000,000 is carried out by the Branch Office.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

15. ASET DALAM PROSES (lanjutan)

Aset dalam proses alat produksi merupakan penyelesaian perbaikan *body*, yang tersebar di seluruh cabang Perum DAMRI.

Perusahaan mengadakan Kontrak Pengerjaan Pengadaan Renovasi Gedung Kantor Perum DAMRI Cabang Serang dengan CV Teknik Perkasa No. 98/KL.001/VIII/2018 tertanggal 03 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 435.970.880 dan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Pengerjaan tersebut telah mencapai tahap 100% persentase penyelesaian.

Perum Damri mengadakan kerjasama dengan PT Piala Mas Industri mengenai Kontrak Pengerjaan Rekondisi Body (Retrofit) 3 (tiga) Unit Bus Besar AC Super Eksekutif, 1 (satu) Unit Bus Besar AC Bisnis Cabang Pontianak dan 4 (empat) Unit Bus Besar AC Eksekutif Cabang Bandar Lampung dengan No. 0035/KU.103/SPK/00/LP/2019 tertanggal 30 Desember 2019. Nilai kontrak senilai Rp 5.444.000.000 (lima milyar empat ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Jasa No. 0039.00/BAST.DAMRI/00/TPP.AP.VII.2020 perihal Pengerjaan Retrofit 12 (dua belas) Unit Bus Besar AC Eksekutif Angkutan Bandara Pemandu Moda bagian dari Pekerjaan Retrofit 12 (dua belas) Unit Bus Besar AC Eksekutif Angkutan Pemandu Moda, 8 (delapan) Unit Bus Besar AC Eksekutif Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Cabang Bandar Lampung, 4 (empat) Unit Bus Besar AC Eksekutif Cabang Purwokerto dan 3 (tiga) Unit Bus Medium Antar Kota Dalam Provinsi Cabang Manado, telah mencapai tahap 100% persentase penyelesaian.

15. ASSETS IN PROGRESS (continued)

Assets in the process of production equipment represent the completion of body repairs, which are scattered throughout branches of Perum DAMRI.

The Company entered into Contract for the Procurement of Renovation of Perum DAMRI Office Building Serang Branch with CV Teknik Perkasa No. 98/KL.001/VIII/2018 dated 03 September 2018 with a contract value of Rp 435,970,880 and an implementation period of 120 (one hundred and twenty) calendar days. The work has reached the 100% percentage completion stage.

Perum Damri entered into agreement with PT Piala Mas Industri concerning the Body Reconditioning Work Contract (Retrofit) 3 (three) AC Super Executive Big Bus Units, 1 (one) Pontianak Branch AC Business Big Bus and 4 (four) Bandar Lampung Branch Big AC Executive Bus Units with agreement No. 0035/KU.103/SPK/00/LP/2019 dated 30 December 2019. The contract value is Rp. 5,444,000,000 (five billion four hundred forty-four million Rupiah) with a working period of 90 (ninety) calendar days.

On 20 July 2020, based on the Minutes of the Procurement Handover Service No. 0039.00/BAST.DAMRI/00/TPP.AP.VII.2020 regarding Retrofit Work on 12 (twelve) AC Executive Bus Units for Airport Shuttle Bus Transport as part of Retrofit Work for 12 (twelve) AC Executive Big Bus Units for Shuttle Bus Transport, 8 (eight) AC Executive Bus Units for Inter-City Inter-Provincial Transportation at Bandar Lampung Branch, 4 (four) AC Executive Big Bus Units at Purwokerto Branch and 3 (three) Inter-City Medium Bus Units in Manado Branch Province, have reached the 100% percentage completion stage.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

16. ASET LAIN-LAIN

16. OTHER ASSETS

	2021	2020	
Persediaan yang akan dihapuskan	2.071.304.422	883.936.267	<i>Inventories that will be written off</i>
Aset tetap tidak produktif	896.922.435	-	<i>Not-productive fixed assets</i>
Tanah sengketa	546.541.000	546.541.000	<i>Disputed land</i>
Jaminan tender	494.128.894	-	<i>Guarantee of tender</i>
Hak atas tanah – bersih	370.178.549	394.259.210	<i>Land rights – net</i>
Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam - bersih	77.726.470	93.265.117	<i>Land Lease to Batam Authority- net</i>
Jumlah	4.456.801.770	1.918.001.594	Total

Berikut ini penjelasan atas aset lain-lain:

The following is an explanation of other assets:

1) Tanah Sengketa

1) *Disputed Land*

Tanah sengketa merupakan saldo tanah yang masih bermasalah dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

The disputed land is land balance which still has problems with third parties as of 31 December 2021 and 2020, as follows:

	Luas (m2)/ Area (sqm)	2021	2020	
Pool DAMRI Kemayoran	12.230	419.641.000	419.641.000	<i>DAMRI's pool in Kemayoran</i>
Stasiun DAMRI Biak	7.500	112.500.000	112.500.000	<i>DAMRI's station in Biak</i>
Jl. Sosa Monyet, Mataram	960	14.400.000	14.400.000	<i>Jl. Sosa Monyet, Mataram</i>
Jumlah		546.541.000	546.541.000	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

1) Tanah Sengketa (lanjutan)

a). Tanah Pool Kemayoran

Bahwa tanah Pool Kemayoran merupakan tanah Eigendom Verponging No. 20499 dan sudah dicatat dalam inventaris aset tetap milik Perum DAMRI dengan luas 12.230m² berdasarkan Surat Penetapan Menteri Keuangan No. 40/KMK.011/1987 tanggal 24 Januari 1987 dan Pengesahan Menteri Perhubungan RI No.138/KU.404/ PHB-86 tanggal 10 September 1986, sesuai surat dari Direksi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran (DP3KK) tanggal 26 Mei 1990, tanah yang dipakai Perum DAMRI di Jl. Angkasa No.17B Kemayoran tersebut akan diruisslag oleh DP3KK dan proses pelaksanaannya telah terbentuk tim ruisslag antara Perusahaan Umum (Perum) DAMRI dan DP3KK dan ruisslagnya sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan RI, namun sampai saat ini belum direalisasikan oleh DP3KK.

b). Tanah di Stasiun Perum DAMRI Biak

Bahwa tanah tersebut berdasarkan inventarisasi aset sudah tercatat dalam inventaris aset milik Perum DAMRI dengan luas 7.500 m² berdasarkan Penetapan Surat Menteri Keuangan No. 40 tanggal 24 Januari 1987 dan Pengesahan Menteri Perhubungan RI No.139/KU.404/ PHB-86 tanggal 10 September 1986, asal tanah tersebut merupakan sewa dari Orang Belanda yang bernama J. Van Tongeren dari tahun 1964 setelah Irian Barat merdeka.

16. OTHER ASSETS (continued)

1) Disputed Land (continued)

a). Land Kemayoran Pool

Kemayoran Pool land is the land registered as Eigendom Verponging No. 20499 and has been recorded in the inventory of fixed assets belonging to Perum DAMRI with land area of 12,230 sqm based on the Decree of the Minister of Finance No. 40/KMK.011/1987 dated 24 January 1987 and Ratification of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No.138/KU.404/PHB-86 dated 10 September 1986, according to a letter from the Board of Directors of the Construction Implementation of Kemayoran Complex (DP3KK) dated 26 May 1990, land used by Perusahaan Umum (Perum) DAMRI at Jl. Angkasa No.17B Kemayoran will be taken over by DP3KK and the implementation process has been formed by the dispatch team between Perum DAMRI and DP3KK and the bill has received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, but DP3KK has not yet realized it.

b). Land at Perum DAMRI's station in Biak

The land has been recorded in the inventory of assets owned by Perum DAMRI with an area of 7,500 sqm based on Decree of the Minister of Finance No. 40 dated 24 January 1987 and Ratification from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia No.139/KU.404/PHB-86 dated 10 September 1986, provided that the land was originally leased from a Dutchman named J. Van Tongeren from 1964 after the independence of West Irian.

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

16. OTHER ASSETS (continued)

c). Tanah Jl. Sosa Monyet, Mataram – NTB

Tanah Jl. Sosa Monyet Mataram sudah tercatat dalam aset Perum DAMRI berdasarkan Penetapan Surat Menteri Keuangan RI No. 40 tanggal 24 Januari 1987 dan Pengesahan Menteri Perhubungan RI No.138/KU.404/PHB-86 tanggal 10 September 1986 dengan luas 960m², dengan 4 (empat) unit rumah dinas. Pada tahun 1977, Perum DAMRI membeli tanah tersebut dari Yayasan Kas Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanah tersebut sekarang sudah beralih kepemilikannya kepada pihak lain karena adanya jual beli yang dilakukan oleh Pegawai DAMRI Mataram yang pada waktu itu menempati rumah dinas milik Perum DAMRI, sehingga rumah dinas tersebut saat ini sudah ditempati dan dikuasai oleh orang lain.

Tanggal 20 September 2021 melalui Surat Nomor: 6618.00/UM.001/SKU/00/DSU/2021, DAMRI meminta pendapat hukum untuk penyelesaian aset tanah tersebut.

c). Tanah Jl. Sosa Monyet, Mataram - NTB

The land at Jl. Sosa Monyet, Mataram - NTB has been recorded in Perum DAMRI assets based on Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 40 dated 24 January 1987 and Ratification of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No.138/KU.404/PHB-86 dated 10 September 1986 with an area of 960sqm, with 4 (four) official housing units. In 1977, Perum DAMRI bought the land from Yayasan Kas Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, which now has changed its ownership to another party due to the sale and purchase carried out by DAMRI Mataram's employees who at that time occupied the house owned by Perum DAMRI, so that the house is currently being occupied by other people.

On 20 September 2021, through Letter Number: 6618.00/UM.001/SKU/00/DSU/2021, DAMRI requested a legal opinion for the settlement of the land assets.

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

16. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

16. OTHER ASSETS (continued)

2) Hak Guna Bangunan (HGB)

Merupakan biaya yang diamortisasi selama 20 tahun, sebagai berikut:

2) Building Rights

Building rights represent cost amortized for 20 years, as follows:

	2021	2020	
Aset Tidak Berwujud	481.613.214	481.613.214	Intangible Assets
Akumulasi Amortisasi	(111.434.665)	(87.354.004)	Accumulated Amortization
Jumlah	370.178.549	394.259.210	Total

3) Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)

Uang Tahunan adalah Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) merupakan pembayaran hak sewa tanah di Batam sesuai Surat Perjanjian No.1618/SPJ/KA-AT/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996, sebagai berikut:

3) Land Lease to Batam Authority

Land Lease to Batam Authority is land right in Batam Based on the Agreement Letter No. 1618/SPJ/KA-AT/XII/1996 dated 24 December 1996, as follows:

	2021	2020	
Nilai UWTO	466.159.400	466.159.400	UWTO Value
Akumulasi Amortisasi			Accumulated Amortization
UWTO	(388.432.930)	(372.894.283)	UWTO
Jumlah	77.726.470	93.265.117	Total

Amortisasi atas Uang Wajib Tahunan Otorita Batam dibebankan selama 30 tahun atau lebih kurang 3,33% per tahun.

Amortization of Land Lease to Batam Authority is charged for 30 years or approximately 3.33% per annum.

4) Aset Tidak Produktif

Aset tidak produktif merupakan aset-aset penunjang yang telah rusak dan tidak dapat diperbaiki, berikut rincian:

4) Non-Productive Fixed Assets

Non-productive fixed assets are supporting assets that have been damaged and cannot be repaired, as follows:

Kendaraan Dinas/ Vehicle	390.119.512
Peralatan Kantor/ Office Equipment	290.811.000
Inventaris Kantor/ Office Inventories	121.467.173
Mesin Bengkel/ Machineries	91.934.750
Suku Cadang/ Spare Part	2.590.000
Total	896.922.435

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

17. UTANG USAHA

17. ACCOUNTS PAYABLE

	2021	2020	
Pihak Berelasi			<i>Related Parties:</i>
PT Angkasa Pura II	652.543.208	840.767.371	<i>PT Angkasa Pura II</i>
PT Angkasa Pura I	353.691.979	-	<i>PT Angkasa Pura I</i>
BPKPD Surabaya	244.819.780	110.210.300	<i>BPKPD Surabaya</i>
KEMENTERIAN			<i>Ministry of</i>
PERHUBUNGAN	-	124.921.956	<i>Transportation</i>
Lainnya (rata-rata dibawah Rp 100 juta)	73.874.820	57.019.381	<i>Others (mostly below Rp 100 million)</i>
Subjumlah	1.324.929.787	1.132.919.008	<i>Subtotal</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties:</i>
PT Piala Mas	11.879.661.465	12.684.618.799	<i>PT Piala Mas</i>
PT Jasaraharja Putera	2.500.377.869	2.473.071.053	<i>PT Jasaraharja Putera</i>
PT Hartono Raya Motor	1.108.446.761	783.297.829	<i>PT Hartono Raya Motor</i>
Konsultan BCG	1.000.000.000	1.000.000.000	<i>BCG Consultant</i>
Mulia Motor	812.360.662	1.000.157.864	<i>Mulia Motor</i>
PT Himalaya Makmur Jaya	790.269.200	870.218.200	<i>PT Himalaya Makmur Jaya</i>
PT Indotyre Mandiri Sentosa	714.852.393	619.773.887	<i>PT Indotyre Mandiri Sentosa</i>
Toko Sinar Motor	651.529.000	621.852.000	<i>Toko Sinar Motor</i>
Surabaya Mandiri	581.667.000	565.926.000	<i>Surabaya Mandiri</i>
Binar Berlian Gading Jakarta	571.658.000	641.619.878	<i>Binar Berlian Gading Jakarta</i>
PT Karunia Motor	490.204.999	637.678.150	<i>PT Karunia Motor</i>
Pegawai Harian			<i>Operating employee paid daily</i>
Operasional (non formal)	410.168.390	737.596.001	<i>(non formal)</i>
PT PBM Sarana Bandar Nasional	384.974.480	-	<i>PT PBM Sarana Bandar Nasional</i>
Bintang Energi	374.063.100	-	<i>Bintang Energi</i>
Toko Sumber Raya Gorontalo	347.643.400	352.143.400	<i>Toko Sumber Raya Gorontalo</i>
Ragam Amanah Cipta	337.077.326	315.804.205	<i>Ragam Amanah Cipta</i>
CV Laksana	315.163.920	364.699.348	<i>CV Laksana</i>
PT Jaya Makmur Terus	302.498.478	499.722.108	<i>PT Jaya Makmur Terus</i>
PT Bianglala Metropolitan	-	1.000.000.000	<i>PT. Bianglala Metropolitan</i>
Toko Pulau Hijau Jakarta	-	634.947.125	<i>Toko Pulau Hijau Jakarta</i>
CV New Cahaya Timur	-	474.545.454	<i>CV New Cahaya Timur</i>
CV Sumber Mandiri Motor	-	377.581.000	<i>CV Sumber Mandiri Motor</i>
PT Indomina Pusaka	-	341.702.039	<i>PT Indomina Pusaka</i>
Karya Jaya Motor (Travel)	-	340.434.750	<i>Karya Jaya Motor (Travel)</i>
PT Jakarta Utilitas Ppropertindo	-	338.443.758	<i>PT Jakarta Utilitas Ppropertindo</i>
Lainnya (rata-rata dibawah Rp 300 juta)	10.714.444.975	12.670.271.296	<i>Others (mostly below Rp 300 million)</i>
Subjumlah	34.287.061.418	40.346.104.144	<i>Subtotal</i>
Jumlah	35.611.991.205	41.479.023.152	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

18. UNEARNED INCOME

	2021	2020	
Agen	550.686.660	311.742.660	<i>Agent</i>
Dinas Perhubungan			<i>Department of Transportation</i>
Kabupaten Gianyar	531.608.681	-	<i>Gianyar District</i>
Kementrian Perhubungan – BTS	1.508.439.747	-	<i>Ministry of Transportation–BTS</i>
KOPERASI MANDIRI	331.534.293	454.753.793	<i>KOPERASI MANDIRI</i>
PT Angkasa Pura II	274.660.000	1.332.705.760	<i>PT Angkasa Pura II</i>
Loket	258.199.320	401.325.244	<i>Counter</i>
Kementerian Perhubungan	227.541.993	180.759.634	<i>Ministry of Transportation</i>
BPTD Wilayah IV Provinsi			<i>BPTD Region IV</i>
Riau dan Provinsi Kepri	225.021.077	-	<i>Riau dan Kepri Province</i>
Redbus	104.174.464	-	<i>Redbus</i>
Traveloka dan Damri Apps	-	323.220.832	<i>Traveloka and Damri Apps</i>
Lain-lain	852.390.691	372.008.564	<i>Other</i>
Jumlah	4.864.256.926	3.376.516.487	<i>Total</i>

19. BEBAN AKRUAL

19. ACCRUED EXPENSES

	2021	2020	
Utang Biaya			<i>The Company/ employee</i>
Perusahaan/Pegawai	723.899.758	1.253.605.961	<i>cost debt</i>
Jumlah	723.899.758	1.253.605.961	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK

20. BANK LOANS

- a. Bagian Utang Bank Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:

- a. *Current Maturities of Long Term Bank Loan*

	2021	2020	
PT Bank Mandiri Tbk	12.250.000.000	20.000.000.000	<i>PT Bank Mandiri Tbk</i>
PT Bank BRI			<i>PT Bank BRI</i>
Syariah Tbk	4.302.099.112	-	<i>Syariah Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia			<i>PT Bank Rakyat Indonesia</i>
Agroniaga Tbk	990.000.000	3.738.099.112	<i>Agroniaga Tbk</i>
Jumlah	17.542.099.112	23.738.099.112	<i>Total</i>

- b. Bagian Utang Bank Jangka Panjang

- b. *Long Term Bank Loans*

	2021	2020	
PT Bank Rakyat Indonesia			<i>PT Bank Rakyat Indonesia</i>
Agroniaga Tbk	92.112.200.890	92.112.200.890	<i>Agroniaga Tbk</i>
PT Bank BRI			<i>PT Bank BRI</i>
Syariah Tbk	74.991.707.133	78.729.806.244	<i>Syariah Tbk</i>
PT Bank Mandiri Tbk	12.250.000.000	20.000.000.000	<i>PT Bank Mandiri Tbk</i>
Jumlah	179.353.908.022	190.842.007.134	<i>Total</i>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(17.542.099.112)	(23.738.099.112)	<i>Less of loan due within one year</i>
Jumlah	161.811.808.911	167.103.908.022	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank

c. Bank Loan Agreement

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk

(i) Pada tanggal 06 Juni 2017 Perusahaan memperoleh fasilitas Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (IMBT) dengan No. R.038/OL-CBG/06/2017 dengan nilai perolehan Aktiva Ijarah sebesar Rp 10.150.000.000 dan total harga sewa sebesar Rp 2.175.906.250.

(i) On 6 June 2017 the Company obtained the Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (IMBT) facility through letter No. R.038/OL-CBG/06/2017 with the acquisition value of Ijarah Assets amounting to Rp 10,150,000,000 and total rental price of Rp 2,175,906,250.

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali 15 unit Bus BRT dengan jangka waktu kontrak sewa selama 48 bulan dan jaminan 15 bus BRT, notarill.

This facility is used to refinance 15 BRT Buses with a lease term of 48 months and guarantee for 15 BRT buses, notarized.

(ii) Pada tanggal 20 Juni 2017 Perusahaan memperoleh fasilitas Murabahah dengan No. R.47/OL-CBG/06-2017 dengan nilai harga jual setelah uang muka senilai Rp 50.723.804.992.

(ii) On 20 June 2017 the Company obtained a Murabahah facility through letter No. R.47/OL-CBG/06-2017 with the selling price after down payment amounting to Rp 50,723,804,992.

Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 30 unit bus baru untuk Bandara Soekarno Hatta dengan jangka waktu selama 48 bulan dan jaminan notarill.

This facility is used to purchase 30 new buses for Soekarno Hatta Airport with a period of 48 months and a notarized guarantee.

(iii) Pada tanggal 25 Oktober 2017 Perusahaan memperoleh fasilitas Ijarah Murabahah Bittamlik dengan No. R.97/OL-CBG/10-2017 dengan nominal biaya sewa sebesar Rp 5.933.812.705.

(iii) On 25 October, 2017 the Company obtained the Ijarah Murabahah Bittamlik facility through letter No. R.97/OL-CBG/10-2017 with nominal rental fee of Rp 5,933,812,705.

Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali 8 unit Bus BRT dengan jangka waktu selama 48 bulan dan jaminan 8 Unit Bus BRT dan notarill.

This facility is used to refinance 8 units of BRT Buses for a period of 48 months and guaranteed by 8 units of BRT Buses and notarized.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk (lanjutan)

(iv) Pada tanggal 20 Februari 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas *Uncommitted Lf Murabahah Interchangeable* IMBT sesuai dengan perjanjian kredit No. R.024/OL/CBD/02-2019 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp.155.000.000.000.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian 40 unit bus baru Angkutan Pemandu Moda untuk trayek Bandara Soekarno-Hatta dan *Refinancing* 22 unit bus untuk modal kerja operasional. Fasilitas memiliki jangka waktu 48 bulan termasuk masa tenggang selama 6 bulan dengan tingkat imbal hasil sebesar 11,5%.

Jaminan

Berlaku *Cross Collateral* dan *Cross Default* atas seluruh pinjaman dan fasilitas Perum DAMRI

- 98 unit BRT merk Hino R 260 dan 30 Unit Bus Mercedes Benz Type OH 1526 III
- 40 Unit kendaraan (bus)-baru untuk trayek bandara Soekarno-Hatta. Fidusia notariil min 125% dari plafon
- 22 Unit kendaraan (bus)-used merk Hino R 260 tahun 2014. Fidusia notariil minimal sebesar Rp 17.446.110.000.

20. BANK LOANS (continued)

c. Bank Loan Agreement (continued)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk (continued)

(iv) On 20 February 2019, the Company obtained an *Uncommitted Lf Murabahah IMBT interchangeable facility* in accordance with the credit agreement No. R.024/OL/CBD/02-2019 with a total facility of Rp.155,000,000,000.

The credit facility is used to purchase 40 units of shuttle bus for the Soekarno-Hatta Airport route and refinancing 22 buses for operational working capital. Period of this facility is 48 months including a grace period of 6 months with yield of 11.5%.

Collaterals

Cross Collateral and *Cross Default* are applied for all loans and facilities of Perum DAMRI

- 98 units of Hino R 260 BRT and 30 units of Mercedes Benz Bus Type OH 1526 III
- 40 brand new vehicles (buses) for the Soekarno-Hatta airport route. Notarized Fiducia minimum 125% of the ceiling
- 22 Units of vehicles (buses) - used of Hino R 260 brand in 2014. Notarized fiducia at least Rp 17,446,110,000.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk (lanjutan)

- (v) Pada tanggal 12 Maret 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas *Uncommitted Lf Murabahah Interchangeable* IMBT sesuai dengan perjanjian kredit No. R.035/OL/CBD/03-2019 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp.155.000.000.000.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian 34 unit bus baru Angkutan Pemandu Moda untuk trayek Bandara Soekarno – Hatta. Fasilitas memiliki jangka waktu 48 bulan termasuk masa tenggang selama 6 bulan.

Jaminan
Berlaku *Cross Collateral* dan *Cross Default* atas seluruh pinjaman dan fasilitas Perum DAMRI

- 98 unit BRT merk Hino R 260 dan 30 Unit Bus Mercedes Benz Type OH 1526 III
- 40 Unit kendaraan (bus)-baru untuk trayek bandara Soekarno-Hatta. Fidusia notariil minimal 125% dari plafon
- 22 Unit kendaraan (bus)-used merk Hino R 260 tahun 2014. Fidusia notariil minimal sebesar Rp 17.446.110.000.

20. BANK LOANS (continued)

c. Bank Loan Agreement (continued)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,
Tbk (continued)

- (v) On 12 March 2019, the Company obtained an *Uncommitted Lf Murabahah Interchangeable* IMBT credit facility in accordance with the credit agreement No. R.035/OL/CBD/03-2019 with a total facility of Rp. 155,000,000,000.

The credit facility is used for the purchase of 34 new shuttle buses for the Soekarno-Hatta Airport route. Period of this facility is 48 months including a grace period of 6 months.

Collaterals
Cross Collateral and Cross Default are applied for all loans and facilities of Perum DAMRI

- 98 units of Hino R 260 BRT and 30 units of Mercedes Benz Bus Type OH 1526 III
- 40 brand new vehicles (buses) for the Soekarno-Hatta airport route. Notarized fiducia minimum 125% of the ceiling
- 22 Units of vehicles (buses) - used of Hino R 260 brand in 2014. Notarized fiducia at least Rp 17,446,110,000.

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk (lanjutan)

1) PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk (continued)

Jaminan

Collaterals

Berlaku *Cross Collateral* dan *Cross Default* atas seluruh pinjaman dan fasilitas Perum DAMRI

Cross Collateral and Cross Default are applied for all loans and facilities of Perum DAMRI

- 98 unit BRT merk Hino R 260 dan 30 Unit Bus Mercedes Benz Type OH 1526 III
- 40 Unit kendaraan (bus)-baru untuk trayek bandara Soekarno-Hatta. Fidusia notariil minimal 125% dari plafon
- 22 Unit kendaraan (bus)-used merk Hino R 260 tahun 2014. Fidusia notariil minimal sebesar Rp 17.446.110.000.

- 98 units of Hino R 260 BRT and 30 units of Mercedes Benz Bus Type OH 1526 III
- 40 brand new vehicles (buses) for the Soekarno-Hatta airport route. Notarized fiducia minimum 125% of the ceiling
- 22 Units of vehicles (buses)-used of Hino R 260 brand in 2014. Notarized fiducia at least Rp 17,446,110,000.

Saldo Pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

The loan balance as of 31 December 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
34 unit bus baru (Bandara Soekarno-Hatta)	43.620.822.810	43.620.822.810	34 units of brand new bus (Soekarno-Hatta Airport)
Modal kerja operasional			Operational working capital
22 unit bus dari Refinancing	7.004.716.981	7.004.716.981	22 bus units from Refinancing
5 unit + 1 unit bus besar Lampung & Basoetta	8.071.504.415	8.071.504.415	5 units + 1 unit of big bus Lampung & Basoetta
Modal kerja (30 unit Bus Soekarno Hatta)	16.149.505.719	16.149.505.719	Working capital (30 units of Soekarno-Hatta Bus)
Dana Refinancing	2.378.906.250	2.378.906.250	Refinancing Fund
Dana Rekondisi dari Refinancing	1.504.350.069	1.504.350.069	Recondition Fund from Refinancing
Jumlah	78.729.806.244	78.729.806.244	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi sesuai dengan perjanjian kredit No. B.133A/SPPK/ADK-OPK/01/2021 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp95.000.000.000.

On 19 June 2019, the Company obtained an Investment Credit facility in accordance with the credit agreement No. B.055/SPPK/ADK-OPK/06/2019 with total facility of Rp95,000,000,000.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian 104 unit bus baru dan 58 unit bus rekondisi dengan rincian sebagai berikut:

The credit facility is used to purchase 104 new bus units and 58 reconditioned bus units with the following details:

Bus baru/ new buses	Karoseri/ Brand	Unit	Jaminan/ Collateral	Nilai/ Amount (Rp)
Toyota Hi Ace	Toyota	38	Fidusia/Fiducia	16.451.377.050
Medium Long Pemadu Moda/ Medium long shuttle bus	Piala Mas	15	Fidusia/Fiducia	15.079.012.500
Medium Long Pemadu Moda/ Medium long shuttle bus	Laksana	31	Fidusia/Fiducia	31.163.292.500
Medium Long Pemadu Moda/ Medium long shuttle bus	Laksana	20	Fidusia/Fiducia	20.113.860.000
		104 Unit		82.807.542.050
Bus rekondisi/ Reconditioned bus	Karoseri/ Brand	Unit	Jaminan/ Guarantee	Nilai/ Amount (Rp)
Bus rekondisi/ Reconditioned bus	Piala Mas	34	Fidusia/Fiducia	20.849.999.996
Bus rekondisi/ Reconditioned bus	Laksana	12	Fidusia/Fiducia	7.650.000.000
Bus rekondisi/ Reconditioned bus	Laksana	12	Fidusia/Fiducia	7.464.800.004
		58		35.964.800.000

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (lanjutan)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (continued)

Jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 11,50% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

The loan period is 48 months from the date of the contract with interest rate at 11.50% per annum and it is *reviewable*.

Pada tanggal 11 September 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi sesuai dengan perjanjian kredit No. B.130.A/SPPK/ADK-OPK/12/2019 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 16.823.040.000.

On 11 September 2019, the Company obtained an investment credit facility in accordance with the credit agreement No. B.130.A/SPPK/ADK-OPK/12/2019 with total facilities of Rp 16,823,040,000.

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembelian 5 unit Mercedes Benz OH.1626/29EIII dan 17 unit Isuzu Type NQR 71 dengan rincian sebagai berikut :

The credit facility was used to purchase 5 units of Mercedes Benz OH.1626/29EIII and 17 units of Isuzu Type NQR 71 with details as follows:

No	Agunan Pokok/ <i>Principal collaterals</i>	Jumlah	Pengikatan/ Bind	
	Jenis Barang/ <i>Type of goods</i>		Jenis/Type of <i>binding</i>	Nilai/Amount
1.	Big Bus Mercedes Benz OH.1626/29 E.III	5	Fidusia/ <i>Fiducia</i>	8.987.500.000
2	Bus Medium Isuzu Type NQR 71	17	Fidusia/ <i>Fiducia</i>	12.041.300
Plafon Kredit/Credit plafond				16.823.040.000

Jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 11,50% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

The loan period is 48 months from the date of the contract with interest rate at 11.50% per annum and it is *reviewable*.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,
Tbk (lanjutan)

2) PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga, Tbk (continued)

Pada tanggal 6 April 2020, Perusahaan memperoleh 2 fasilitas restrukturisasi kredit investasi sesuai dengan perjanjian kredit No. B.030/SPPK/ADKOPK/04/2020 yang merujuk pada perjanjian kredit No. B.055/SPPK/ADKOPK/06/2019 Akta No 20 tanggal 25 Juni 2019 (KI-PTA 1) dan No. B.130.A/SPPK/ADK-OPK/12/2019 Akta No 28 tanggal 28 Januari 2020 (KI-PTA 2).

On 6 April 2020, the Company obtained 2 investment credit restructuring facilities in accordance with the credit agreement No. B.030/SPPK/ADKOPK/04/2020 which refers to the credit agreement No. B.055/SPPK/ADK-OPK/06/2019 Deed No. 20 dated 25 June 2019 (KI-PTA 1) and No. B.130.A/SPPK/ADK-OPK/12/2019 Deed No. 28 dated 28 January 2020 (KI-PTA 2).

Pada perjanjian KI-PTA 1 perubahan terjadi pada nilai pengikatan yang semula Rp 118.772.342.050 menjadi Rp 107.300.590.500 dengan sisa plafon setelah restrukturisasi sebesar Rp 75.289.160.889.

In the KI-PTA 1 agreement, there was a change in the binding value from Rp 118,772,342,050 to Rp 107,300,590,500 with the remaining plafond after restructuring amounting to Rp 75,289,160,889.

Jangka waktu pinjaman berubah dari 48 bulan sejak tanggal akad menjadi 57 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 11% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

The loan period is changed from 48 months from the contract date to 57 months from the contract date with interest rate at 11% per annum and it is reviewable.

Pada perjanjian KI-PTA 2 perubahan terjadi pada jangka waktu pinjaman semula 48 bulan sejak tanggal akad menjadi 56 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 11% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

In the KI-PTA 2 agreement, the change occurred in the loan term from originally 48 months from the date of the contract to 56 months from the date of the contract with interest rate at 11% per annum and is reviewable.

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

d. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

d. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (lanjutan)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (continued)

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perusahaan menerima restrukturisasi fasilitas kredit dengan perjanjian kredit No: B.133A/SPPK/ADK-OPK/01/2021 merujuk pada Surat Permohonan Perusahaan No. 4415.00/KU-401/SKU/00/DU/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

On 20 January 2021, the Company accepted the restructuring of its credit facility with credit agreement No: B.133A/SPPK/ADKOPK/01/2021 referring to the Company's Application Letter No. 4415.00/KU-401/SKU/00/DU/2020 dated 16 December 2020 with the following terms and conditions:

Pada perjanjian KI-PTA 1 perubahan terjadi pada nilai pengikatan yang semula Rp 118.772.342.050 menjadi Rp 107.300.590.500 dengan sisa plafon setelah restrukturisasi sebesar Rp 75.289.160.889.

In the KI-PTA 1 agreement, there was a change in the binding value from Rp 118,772,342,050 to Rp 107,300,590,500 with the remaining plafond after restructuring amounting to Rp 75,289,160,889.

Jangka waktu pinjaman berubah dari 57 bulan sejak tanggal akad menjadi 69 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 9,5% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

The loan period is changed from 57 months from the contract date to 69 months from the contract date with interest rate at 9.5% per annum and it is reviewable.

Pada perjanjian KI-PTA 2 perubahan terjadi pada jangka waktu pinjaman semula 56 bulan sejak tanggal akad menjadi 68 bulan sejak tanggal akad dengan suku bunga 9,5% setiap tahunnya dan bersifat *reviewable*.

In the KI-PTA 2 agreement, the change occurred in the loan period from originally 56 months from the date of the contract to 68 months from the date of the contract with interest rate at 9.5% per annum and is reviewable.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,
Tbk (lanjutan)

5) PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga, Tbk (continued)

Jaminan Kredit/ Collaterals

No	Agunan Pokok Jenis Barang/ Type of goods as principal collaterals	Karoseri/ Brand	Unit	Pengikatan/ Bind	
				Jenis/ Type of binding	Nilai/ Amount
KI PTA I					
Bus Baru / New bus					
1	Toyota HI Ace	Toyota	38	Fidusia/ Fiducia	16.451.377.050
2	Medium Long Pemadu Moda/ Medium long shuttle bus	Piala Mas	15	Fidusia / Fiducia	15.079.012.500
3	Medium Long Pemadu Moda Medium long shuttle bus	Laksana	31	Fidusia/ Fiducia	31.163.292.500
4	Medium Long Pemadu Moda Medium long shuttle bus	Laksana	20	Fidusia/ Fiducia	20.113.860.000
Bus Rekondisi / Reconditioned bus					
1	Bus Rekondisi/ Reconditioned bus	Piala Mas	16	Fidusia/ Fiducia	10.284.384150
2	Bus Rekondisi/ Reconditioned bus	Piala Mas	14	Fidusia/ Fiducia	8.592.614.300
3	Bus Rekondisi/ Reconditioned bus	Laksana	9	Fidusia/ Fiducia	5.616.050.000
Sub Jumlah/Subtotal KI PTA I					107.300.590.500
KI PTA II					
Bus Baru/ New bus					
1	Big Bus Mercedes Benz OH. 1626/29 E.III	Laksana	5	Fidusia/ Fiducia	8.987.500.000
2	Bus Medium Izusu Type NQR 71	Tugas Anda	17	Fidusia/ Fiducia	12.041.300.000
Sub Jumlah/ Subtotal KI PTA II					21.028.800.000
Jumlah/ Total					128.329.390.500

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

2) PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,
Tbk (lanjutan)

2) PT Bank Rakyat Indonesia
Agroniaga, Tbk (continued)

	2020	2019	
38 unit Hiace dan 20 unit <i>medium long</i>	25.342.829.172	27.292.277.569	38 units of Hiace and 20 units of <i>medium long</i>
66 unit <i>medium long</i>	31.039.771.679	33.427.446.423	66 units of <i>medium long</i>
Rekondisi 16 unit	7.825.187.229	8.226.478.882	16 units of reconditioning bus
Rekondisi 14 unit bus besar Pemadu Moda	6.701.401.374	6.873.232.179	14 units of big shuttle bus reconditioned
Rekondisi 9 unit bus besar Lampung & Purwokerto	4.379.971.435	4.492.278.395	9 units of big bus reconditioned- Lampung and Purwokerto
17 <i>Medium Isuzu</i> dan 5 Unit Aneg	16.823.040.000	-	17 units of <i>Medium Isuzu</i> and 5 units Aneg
Jumlah	92.112.200.889	80.311.713.448	Total

3) PT Bank Mandiri

3) PT Bank Mandiri

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja –
Transaksional

a. Working Capital Credit Facility -
Transactional

Pada tanggal 8 Juni 2020, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit modal kerja – transaksional dari Bank Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp 120.000.000.000 yang bersifat *revolving* transaksional.

On 8 June 2020, the Company obtained a working capital credit loan - transactional from Mandiri Bank with a credit limit of Rp 120,000,000,000 which is transactional revolving.

Fasilitas kredit modal kerja ini digunakan untuk pembiayaan operasional modal kerja Perusahaan terkait kontrak *Public Service Obligation* (PSO)/Subsidi Perintis dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tahun 2020 dan 2021. Jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit, suku bunga kredit 9,25%. Bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri.

This working capital credit facility is used to finance the Company's working capital operations related to the Public Service Obligation (PSO)/Pioneer Subsidies and National Tourism Strategic Area (KSPN) contracts in 2020 and 2021. The loan period is 1 year from the signing of the credit agreement, the loan interest rate is 9,25%. Interest is subject to change according to the applicable provisions in PT Bank Mandiri.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

3) PT Bank Mandiri (lanjutan)

b. Fasilitas Kredit Modal Kerja –
Rekening Koran

Pada tanggal 8 Juni 2020, perusahaan memperoleh pinjaman kredit modal kerja – rekening koran dari Bank Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp 20.000.000.000 yang bersifat *revolving* transaksional.

Fasilitas kredit modal kerja ini digunakan untuk pembiayaan operasional modal kerja Perusahaan. Jangka waktu pinjaman 1 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Suku bunga kredit 9,25% dan bunga dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri.

Kedua Pinjaman ini dijamin dengan :

- Piutang usaha Perusahaan sebesar Rp 35,1 miliar, diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 15 miliar.
- Persediaan Perusahaan sebesar Rp 13,1 miliar, diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5 miliar.

20. BANK LOANS (continued)

c. Bank Loan Agreement (continued)

3) PT Bank Mandiri (continued)

b. Working Capital Credit Facility –
Checking Account

On June 8, 2020, the company obtained a working capital credit loan - a checking account from Mandiri Bank with a credit limit of Rp 20,000,000,000 which is transactional revolving.

This working capital credit facility is used to finance the Company's operations. The loan period is 1 year from the signing date of the credit agreement. The loan interest rate is 9.25% and the interest is subject to change according to the applicable provisions of PT Bank Mandiri.

Both of these loans are secured by:

- Accounts receivables of the Company amounting to Rp 35.1 billion, bound fiduciary with guarantee value amounting to Rp. 15 billion.
- The Company's inventories amounting to Rp. 13.1 billion, bound fiduciary with guarantee value amounting to Rp. 5 billion.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

3) PT Bank Mandiri (lanjutan)

3) PT Bank Mandiri (continued)

Kedua Pinjaman ini dijaminkan dengan (lanjutan) :

Both of these loans are secured by (continued) :

- 2 bidang tanah berupa :
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 708 tahun 2011 dengan HGB yang berakhir pada tahun 2041, berikut tanah dan bangunan, serta sarana pelengkap atas nama Perum DAMRI dengan nilai agunan sebesar Rp 115,7 miliar dan akan diikat hak tanggungan I sebesar Rp 90 miliar.
 - ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 872 tahun 2011 dengan HGB yang berakhir pada tahun 2031, berikut tanah dan bangunan, serta sarana pelengkap atas nama Perum DAMRI dengan nilai agunan sebesar Rp 66,3 miliar dan akan diikat hak tanggungan I sebesar Rp 50 miliar.

- 2 plots of land in the form of:
 - j. Building Rights Certificate (SHGB) No. 708 of 2011 with HGB ending in 2041, along with land and buildings, as well as complementary facilities in the name of Perum DAMRI with building value of Rp 115.7 billion and will be tied with mortgage I amounting to Rp 90 billion.
 - ii. Building Rights Certificate (SHGB) No. 872 of 2011 with HGB ending in 2031, along with land and buildings, as well as complementary facilities in the name of Perum DAMRI with building value of Rp 66.3 billion and will be tied with mortgage I amounting to Rp 50 billion.

Seluruh aset yang dijaminkan diikat secara *joint collateral* dan *cross default* dengan fasilitas Kredit Modal Kerja - Rekening Koran, dan biaya yang timbul menjadi beban Perum DAMRI.

All pledged assets are bound by joint collateral and cross default with the Working Capital Credit - Checking Account facility, and the costs incurred will be borne by Perum DAMRI.

	2021	2020	
Kredit Modal Kerja	20.000.000.000	20.000.000.000	Working Capital Credit
Jumlah	20.000.000.000	20.000.000.000	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

20. UTANG BANK (lanjutan)

20. BANK LOANS (continued)

c. Perjanjian Utang Bank (lanjutan)

c. Bank Loan Agreement (continued)

3) PT Bank Mandiri (lanjutan)

3) PT Bank Mandiri (continued)

Selama fasilitas kredit, Perum
DAMRI berkewajiban untuk :

During the credit facility, Perum
DAMRI is obliged to :

1. Menjaga rasio kini keuangan minimal 100%,
2. Ratio EBITDA to I minimal 200%,
3. DSCR {Rasio antara EBITDA/ (Bunga Berjalan+Angsuran Pokok)} minimal 100%.

1. Maintain a Financial Ratio Current Ratio of at least 100%,
2. EBITDA to I ratio of at least 200%,
3. DSCR {The ratio between EBITDA /(Current Interest + Principal Installment)) at least 100%.

21. UTANG SEWA

21. LEASE LIABILITIES

	2021	2020	
Jangka Panjang :			Long Term :
PT Cakra Transport Utama	1.089.021.947	1.818.141.947	PT Cakra Transport Utama
PT Pracico Multi Finance	102.398.387	102.398.387	PT Pracico Multi Finance
Tn. Fui Kim Fung	-	93.769.705	Mr. Fui Kim Fung
Subjumlah	1.191.420.334	2.014.310.039	Subtotal
Jangka Pendek :			Short Term :
PT Astra Sedaya Finance	94.892.615	-	PT Astra Sedaya Finance
CV Sinar Pagi	6.964.155	-	CV Sinar Pagi
Subjumlah	101.856.770	-	Subtotal
Jumlah	1.293.277.104	2.014.310.039	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

21. UTANG SEWA (lanjutan)

Perum DAMRI melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Cakra Transport Utama melalui surat No: 3299.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tertanggal 15 Juni 2020 perihal Penyewaan 4 (empat) unit Kendaraan Operasional Direksi, dengan jangka waktu sewa selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Kendaraan ditandatangani.

Biaya Sewa untuk 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Pajero Exceed 4x2 A/T sebesar 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah) per bulan atau sebesar Rp 633.600.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) untuk total keseluruhan biaya sewa.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT Astra Sedaya Finance No. 01200205002023779 tertanggal 15 Mei 2019, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Toyota All New Rush Tahun 2019 dengan nilai objek pembiayaan sebesar Rp 280.365.000 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dan tarif suku bunga efektif sebesar 6,05% atau 11,15%.

Jangka waktu pembiayaan 48 (empat puluh delapan) bulan atau sampai dengan 15 Juni 2022. Hutang pokok pembiayaan sebesar Rp 233.831.988 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah) dan biaya bunga sebesar Rp 57.048.012 (lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu dua belas Rupiah).

21. LEASE LIABILITIES (continued)

Perum DAMRI entered into Cooperation Agreement with PT Cakra Transport Utama through letter number: 3299.00/ KU.103/ SPK/ 00/LP/2020 dated 15 June 2020 regarding the rental of 4 (four) units of Operational Vehicles from the Board of Directors, with a rental period for 48 (forty eight) months as of the signing of the Vehicle Handover Certificate.

Rental fee for 1 (one) unit of Mitsubishi Pajero Exceed 4x2 A/T Vehicle is 13,200,000 (thirteen million two hundred thousand Rupiah) per month or Rp. 633,600,000 (six hundred thirty three million six hundred thousand Rupiah) for the total cost of the rental.

Based on the Multipurpose Financing Agreement of PT Astra Sedaya Finance No. 01200205002023779 dated 15 May 2019, for financing 1 (one) unit of Toyota All New Rush Year 2019 with a financing object value of Rp 280,365,000 (two hundred eighty million three hundred sixty five thousand Rupiah). With effective interest rate of 6. 05% or 11.15%.

The financing period is 48 (forty eight) months or until 15 June 2022. The principal payable is Rp. 233,831,988 (two hundred and thirty three million eight hundred and thirty one thousand nine hundred and eighty eight Rupiah) and the interest fee is Rp. 57,048.012 (fifty seven million forty eight thousand and twelve Rupiah).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

22. UTANG LAIN-LAIN

22. OTHER LIABILITIES

	2021	2020	
Utang Hak-hak Karyawan	60.422.508.468	40.301.186.357	<i>Benefits for employees</i>
Titipan			<i>Deposit of Employee</i>
BPJS Ketenagakerjaan	20.610.802.725	7.523.703.088	<i>social security (BPJS)</i>
Uang Jaminan :			<i>Collateral :</i>
Pengemudi	1.353.273.527	-	<i>Driver</i>
Mitra Usaha	740.524.096	-	<i>Business Partner</i>
Iklan	-	37.500.000	<i>Advertising</i>
Jasa Produksi	216.039.850	1.132.499.285	<i>Profit Sharing</i>
Titipan:			<i>Deposits:</i>
Jasa Raharja	12.108.327	2.327.822.443	<i>Jasa Raharja</i>
BPJS Kesehatan	-	26.603.415	<i>Employee health security</i>
Jumlah	83.355.256.993	51.349.314.588	<i>Total</i>

Jasa produksi merupakan pembagian yang diberikan kepada pegawai dari Direksi, atau dari sebagian laba tahunan. Pemberian ini diberikan dalam satu tahun sekali.

Profit sharing represents part of remuneration given to employees of the Board of Directors, or from a portion of annual profits. This remuneration is given once a year.

Uang hak-hak karyawan merupakan utang atas penundaan pembayaran gaji karyawan dan juga utang pembayaran pesangon yang masih belum dibayarkan oleh Perusahaan.

Employee entitlement money represents a debt for postponement of employee salary payments and also outstanding severance pay payable by the Company.

23. UTANG INVESTASI DPLK

23. DPLK INVESTMENT DEBT

	2021	2020	
Pembayaran manfaat			<i>Payment of Old Age</i>
Jaminan Hari Tua	33.875.967.550	-	<i>Security benefits</i>
Jumlah	33.875.967.550	-	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

23. UTANG INVESTASI DPLK (lanjutan)

Utang investasi DPLK per 31 Desember 2021 sebesar Rp 33.875.967.550 merupakan utang perusahaan atas pembayaran manfaat JHT dari hasil perhitungan aktuarial independen KKA NUCHRIWAN.

24. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen KKA NUCHRIWAN melalui kontrak No. 3630.00/KU.103/SPK/00/LP/2021, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Tingkat bunga diskonto per tahun	6,38%	6,25%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%	8%	Annual salary increase rate
Usia pensiun	56 thn/years old	56 thn/years old	Retirement age
Tabel mortalita	TMI-III-2011	TMI-III-2011	Mortality table

Rekonsiliasi Aset dan Kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan:

	2021	2020	
(Liabilitas)/ Kekayaan bersih awal tahun	236.857.552.293	186.482.547.046	(Liability)/ Net worth at the beginning of the year
Imbalan kerja tahun berjalan	26.594.354.966	25.978.852.730	Employee benefits for the period
Penghasilan (beban) komprehensif lain	(2.340.478.224)	63.677.631.465	Other comprehensive income (expenses)
Pembayaran manfaat	(37.331.874.553)	(39.281.478.948)	Payment of benefits
(Liabilitas)/ Kekayaan bersih akhir tahun	223.779.554.482	236.857.552.293	(Liability)/ Net worth at the end of the year

23. DPLK INVESTMENT DEBT (continued)

DPLK investment's payable as of December 31, 2021 amounting to 33,875,967,550 is the company's debt for the payment of JHT benefits from the results of independent actuarial calculations of KKA NUCHRIWAN.

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The Company recorded employee benefit liabilities for the year ended 31 December 2021 based on the results of actuarial calculations carried out by An independent actuary, KKA NUCHRIWAN with contract No. 3630.00/KU.103/SPK/00/LP/2021, using the "Projected Unit Credit" method. The main assumptions used for the actuarial calculations are as follows:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

24. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA
(lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES
(continued)

Rekonsiliasi Perusahaan pada akumulasi
penghasilan komprehensif lain:

*The Company's reconciliation on
accumulation of other comprehensive
income:*

	2021	2020	
Penghasilan komprehensif awal tahun	135.670.587.504	71.992.956.039	<i>Comprehensive income, beginning of the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(2.340.478.224)	63.677.631.465	<i>Other comprehensive income, current</i>
Penghasilan komprehensif akhir tahun	133.330.109.280	135.670.587.504	<i>Comprehensive income, end of the year</i>

Perhitungan beban manfaat karyawan yang
diakui di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain adalah:

*Calculation of employee benefit costs
recognized in the statement of profit or loss
and other comprehensive income is as
follows:*

	2021	2020	
Jasa kini	11.790.757.948	12.496.164.579	<i>Current service</i>
Bunga neto atas liabilitas (aset)	14.803.597.018	13.482.688.151	<i>Net interest on liability (asset)</i>
Jumlah beban manfaat karyawan	26.594.354.966	25.978.852.730	<i>Total employee benefit expenses</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

25. EKUITAS

25. EQUITY

Merupakan modal awal yang terbentuk pada saat perubahan menjadi Perusahaan Umum, Modal Disetor, Penyertaan Modal Negara, BPYBDS, Modal Sumbangan, Cadangan dan Saldo Laba (Rugi), sebagai berikut:

Represents the initial capital formed at the time of change into Public Company, Paid Up Capital, State Equity Participation, Undefined Status of Government Assistance, Donated Capital, Capital Reserve and Balance of Profit (Loss), as follows:

	2021	2020	
Modal Disetor	19.700.000.000	19.700.000.000	<i>Paid up capital</i>
Penyertaan Modal			<i>State equity</i>
Negara (PMN)	627.721.000.110	627.721.000.110	<i>participation (PMN)</i>
Modal Sumbangan	15.207.129.000	4.266.253.000	<i>Donated capital</i>
Cadangan Modal	(51.965.392.184)	194.252.022.047	<i>Capital reserve</i>
Penghasilan			<i>Other comprehensive</i>
Komprehensif Lain	(103.359.485.238)	(131.436.835.517)	<i>income</i>
Rugi Tahun Berjalan	(152.902.380.435)	(220.077.411.000)	<i>Profit for the year</i>
Jumlah	354.400.871.253	494.425.028.640	<i>Total</i>

25.1 Modal Disetor

25.1 Paid Up Capital

Merupakan modal yang terbentuk pada tanggal 29 September 1982 pada waktu awal perubahan bentuk menjadi Perum dan telah disahkan sebagai modal awal Perusahaan Umum (Perum) DAMRI berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.001/1987 tanggal 24 Januari 1987 dengan nilai sebesar Rp19.700.000.000.

Represents the capital that was formed on 29 September 1982 at the beginning of the change of form to Perum and was approved as the initial capital of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 40/KMK.001/1987 dated 24 January 1987 with a value of Rp19,700,000,000.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

25. EKUITAS (lanjutan)

25. EQUITY (continued)

25.2 Penyertaan Modal Negara (PMN)

25.2 State Equity Participation (PMN)

Merupakan bantuan pemerintah berupa bus dan suku cadang yang diterima secara bertahap, sebagai berikut:

Represents government assistance in the form of buses and gradually received spare parts, as follows:

	2021	2020	
PP No. 32 tahun 1990	55.085.835.288	55.085.835.288	Government Regulation No. 32 of 1990
PP No. 94 tahun 2000	38.359.786.217	38.359.786.217	Government Regulation No. 94 of 2000
PP No. 21 tahun 2001	4.608.000.000	4.608.000.000	Government Regulation No. 21 of 2001
PP No. 66 tahun 2002	2.346.433.980	2.346.433.980	Government Regulation No. 66 of 2002
PP No. 60 tahun 2003	5.512.000.000	5.512.000.000	Government Regulation No. 60 of 2003
PP No. 27 tahun 2006	5.385.000.000	5.385.000.000	Government Regulation No. 27 of 2006
PP No. 35 tahun 2012	134.861.710.570	134.861.710.570	Government Regulation No. 35 of 2012
PP No. 115 tahun 2012	11.048.422.000	11.048.422.000	Government Regulation No. 115 of 2012
PP No. 7 tahun 2014	31.844.050.000	31.844.050.000	Government Regulation No. 7 of 2014
PP No. 12 tahun 2015	27.874.850.000	27.874.850.000	Government Regulation No. 12 of 2015
PP No. 45 tahun 2018	310.794.912.055	310.794.912.055	Government Regulation No. 45 of 2018
Jumlah	627.721.000.110	627.721.000.110	Total

25.3 Modal Sumbangan

25.3 Donated Capital

Perusahaan mendapatkan modal sumbangan/ hibah, berupa:

The Company receives donation/ grant capital, in the form of:

	2021	2020	
2 (dua) unit Bus Hino Dutro 110 LD, dari Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bus Perintis No.27/SKPLLAJM/VI/2009.	538.890.000	538.890.000	2 (two) units of the 110 LD Hino Dutro Bus, from the Maluku Provincial Government through the Maluku Province Transportation Agency based on minutes of handover of pioneer bus No.27/SKPLLAJM/VI/2009.
Sebidang tanah seluas 4.000 m ² terletak di Desa Lala, Kabupaten Lala kepada Perum DAMRI Cabang Namlea	250.000.000	100.000.000	A plot of land with an area of 4,000 sqm located in Lala Village, Lala Regency to Perum Damri Namlea Branch

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

25. EKUITAS (lanjutan)

25.3 Modal Sumbangan

	2021	2020	
Bangunan pool DAMRI Manokwari terletak di Sowi Kabupaten Manokwari, berdasarkan BAST No.:900/09/BA/HUBKO MINFO/2016	3.627.363.000	3.627.363.000	Pool building at DAMRI Manokwari located in Sowi Manokwari Regency, based on BAST No.: 900/09/BA/HUBKOMIN FO/2016
Hibah ambulans Jasa Raharja Putra di cabang Jakarta	318.000.000	-	Jasa Raharja Putra ambulance donation at the Jakarta branch
Hibah Bangunan Cabang Sorong melalui Dinas Perhubungan Kota Sorong	4.368.606.000	-	Sorong Branch Building Grant through the Sorong City Transportation Office
Hibah 11 unit Microbus Cabang Sarmi berdasarkan Berita Acara No.648/003/ba-dishub/2018	6.104.270.000	-	Grant of 11 units of Microbus Sarmi Branch based on Minutes No.648/003/ba-dishub/2018
Jumlah	15.207.129.000	4.266.253.000	Total

25.4 Cadangan Modal

Tahun 2021
Sesuai dengan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan (audited) Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tahun buku 2021 No. S-456/MBU/06/2021 tanggal 29 Juni 2021, menetapkan laba bersih Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tahun 2020 seluruhnya dialokasikan sebagai cadangan sebesar Rp 220.077.411.000, sebagai berikut:

- Dividen/ Dividend : -
- Bina Lingkungan/ Environmental Guidance : -
- Cadangan/ Reserves : Rp (220.077.411.000)

25. EQUITY (continued)

25.3 Donated Capital

25.4 Capital Reserves

In 2021
Based on the approval and ratification of the annual report and financial reports (audited) of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 2021 No. S-456/MBU/06/2021 dated 29 June 2021, determines the net income of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI in 2020 are all allocated as reserves, dividend and environmental guidance amounting to Rp 220,077,411,000 as follows:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

25. EKUITAS (lanjutan)

25. EQUITY (continued)

25.4 Cadangan Modal

25.4 Capital Reserves

Tahun 2020

Sesuai dengan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan (audited) Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tahun buku 2019 No. S-538/MBU/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, menetapkan laba bersih Perusahaan Umum (Perum) DAMRI tahun 2019 seluruhnya dialokasikan sebagai cadangan sebesar Rp 43.262.415.205, sebagai berikut:

- Dividen/ <i>Dividend</i>	:	-
- Bina Lingkungan/ <i>Environmental Guidance</i>	:	-
- Cadangan/ <i>Reserves</i>	:	43.262.415.205

In 2020

Based on the approval and ratification of the annual report and financial reports (audited) of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 2019 No. S-538/MBU/07/2020 dated 29 July 2020, determines the net income of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI in 2019 are all allocated as reserves, dividend and environmental guidance amounting to Rp 43,262,415,205 as follows:

25.5 Penghasilan Komprehensif Lain

25.5 Other Comprehensive Income

Penghasilan (beban) komprehensif lain, yaitu berasal dari transaksi yang menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Dalam hal ini untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp (103.359.485.238) dan Rp (131.436.835.517) yang berasal dari perhitungan aktuaris dan diakui sebagai penghasilan (beban) komprehensif lain.

Other comprehensive income (expenses), is derived from transactions which according to Financial Accounting Standards are items that are not reclassified to profit or loss. In this case for 2021 and 2020 this account is amounting to Rp (103,359,485,238) and Rp (131,436,835,517) originating from the calculation by an actuary and recognized as other comprehensive income (expenses).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
 For the years ended
 31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

26. PENDAPATAN ANGKUTAN

26. TRANSPORTATION REVENUES

	2021	2020	
Pendapatan Operasional:			<i>Operating income:</i>
Angkutan Penumpang	427.320.992.832	521.744.390.192	<i>Passenger transportation</i>
Angkutan Barang	29.093.013.731	31.231.280.030	<i>Freight transportation</i>
Jumlah	456.414.006.563	552.975.670.222	<i>Total</i>
Pendapatan Operasional dari subsidi:			<i>Operating income from subsidies:</i>
Perintis	109.296.693.664	109.396.407.381	<i>Pioneer</i>
KSPN	23.867.635.786	42.893.064.611	<i>KSPN</i>
Pelayanan Masyarakat	13.654.846.158	15.693.799.471	<i>Public service obligation</i>
Angkutan Barang Perintis	6.244.300.383	4.495.394.853	<i>Pioneer Freight</i>
Pemerintah Daerah	1.472.025.669	107.123.627	<i>Regional government</i>
Jumlah	154.535.501.660	172.585.789.943	<i>Total</i>
Potongan Harga	(9.406.565)	(221.637.411)	<i>Discount</i>
Jumlah Pendapatan Usaha	610.940.101.658	725.339.822.754	<i>Total operating revenue</i>

27. PENDAPATAN BUKAN ANGKUTAN

27. NON TRANSPORTATION REVENUES

	2021	2020	
Ganti rugi pihak ketiga-bersih	22.936.686.268	8.651.993.996	<i>Third party compensation-net</i>
Sewa Lahan dan Bangunan	2.618.335.412	1.354.266.196	<i>Land and building rent</i>
Iklan/ Reklame	6.389.000	720.856.222	<i>Advertising</i>
Denda	4.959.299	12.566.382	<i>Penalty</i>
Jumlah	25.566.369.979	10.739.682.796	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

28. LAINNYA

28. OTHERS

	2021	2020	
Komisi Locket	1.023.140.591	895.518.720	Counter commission
Kompensasi Pihak Ketiga	219.880.999	150.049.063	Third party compensation
Pembatalan Tiket	152.542.483	128.884.378	Ticket cancellation
Lainnya	680.588.284	1.081.252.700	Others
Jumlah	2.076.152.357	2.255.704.861	Total

Penjualan lainnya adalah *extra service*, *extra cover*, pemakaian karcis bus, bongkar muat barang, konsensi usaha, dan marketing fee.

Other sales are *extra service*, *extra cover*, use of bus tickets, loading and unloading of goods, business concessions, and marketing fees.

29. BEBAN OPERASIONAL

29. OPERATING EXPENSES

	2021	2020	
BEBAN LANGSUNG:			DIRECT EXPENSES:
Beban Bahan Bakar	123.505.370.375	148.066.223.703	Fuel expenses
Beban Kendaraan:			Vehicle expenses:
Ban Luar/Dalam	19.372.586.027	22.989.144.252	Outside/ inside tyre
Pelumas	4.902.106.570	6.330.334.071	Lubricant
Ban Vulkanisir	333.124.540	611.543.820	Retread tyre
Tambal Ban	164.252.495	830.406.397	Tyre patches
Sub jumlah	148.277.440.007	178.827.652.243	Subtotal
Beban Personalia:			Personnel Expenses:
Gaji & Tunjangan:			Salaries and allowances:
Pengemudi Bus & Truk	84.229.160.632	113.356.079.766	Bus & Truck Driver
Mitra	19.296.053.242	22.472.407.468	Partner
Pegawai Teknik	18.181.786.650	21.870.988.533	Technical Staff
Uang Dinas Jalan:			Out of Pocket Expenses:
Pengemudi	40.343.151.506	44.337.853.643	Driver
Sub jumlah	162.050.152.030	202.037.329.410	Subtotal
BEBAN TIDAK LANGSUNG:			INDIRECT EXPENSES:
Beban Penyusutan:			Depreciation Expenses:
Penyusutan Bus	106.035.147.200	130.932.834.579	Bus Depreciation
Penyusutan Truk	114.186.807	198.477.648	Truck Depreciation
Sub jumlah	106.149.334.007	131.131.312.227	Subtotal

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

29. BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)

29. OPERATING EXPENSES (continued)

	2021	2020	
Beban Pemeliharaan & Perawatan:			<i>Repair and maintenance expenses:</i>
Ganti Material/ Parts lainnya	19.716.119.064	27.971.348.979	<i>Other spare part replacement</i>
Pencucian Bus	5.568.900.855	8.292.545.076	<i>Bus cleaning</i>
Pemakaian Kampas			<i>Clutch brake</i>
Rem Kopling	2.555.353.753	2.604.341.867	<i>lining usage</i>
Pemakaian Filter			<i>Oil, diesel</i>
oli solar udara	2.310.296.455	2.680.406.626	<i>and air filter</i>
Servis Bengkel Luar	2.111.496.367	2.239.118.901	<i>Outer workshop service</i>
Pengecatan <i>Body</i>	2.609.014.653	2.893.999.457	<i>Bus body paints</i>
Perbaikan Suku Cadang	2.106.376.518	2.803.005.989	<i>Repair of spare parts</i>
Pemakaian Suku Cadang AC	1.060.360.799	1.745.028.144	<i>Air conditioner spare parts</i>
Pemakaian <i>Bearing, Bush</i>	1.045.252.373	1.158.403.879	<i>Bearing, bush usage</i>
Perawatan			<i>Maintenance of</i>
Mesin Bengkel	999.838.959	146.531.617	<i>workshop machinery</i>
Pemakaian <i>Fan-belt</i> , air accu	899.145.768	1.436.961.599	<i>Fan-belt, battery liquid</i>
Ganti Peralatan/ Perlengkapan	655.557.596	1.874.353.151	<i>Equipment/ tools replacement</i>
Pemakaian Freon	304.122.014	422.356.123	<i>Refrigerant</i>
Perbengkelan	147.194.007	459.286.776	<i>Workshop</i>
Material Anti Karat <i>Body</i>	35.188.575	373.338.678	<i>Ruse proofing material</i>
Pemakaian Bahan-bahan Kimia	20.649.701	60.957.695	<i>Chemicals</i>
Gas Oksigen	1.071.000	15.518.003	<i>Use of oxygen gas</i>
Sub jumlah	42.145.938.457	57.177.502.560	<i>Subtotal</i>
Beban Lainnya:			<i>Other expenses:</i>
Penyebrangan	28.210.198.730	28.109.666.569	<i>Ferry services</i>
Karcis Tol	12.909.441.153	13.824.673.895	<i>Toll ticket</i>
Sewa Kendaraan Operasional	5.641.730.856	9.299.577.918	<i>Vehicle rent</i>
Asuransi Operasional	4.745.032.546	7.656.567.159	<i>Operating insurance</i>
Pengamanan Lintas	1.319.408.739	3.472.768.578	<i>Street guard</i>
Sewa Lahan	3.343.837.728	3.465.968.905	<i>Land rent</i>
Surat-Surat Kendaraan	2.875.249.130	2.662.825.357	<i>Vehicle license</i>
Pajak Kendaraan	2.340.056.530	2.000.319.000	<i>Vehicle tax</i>
Kendaraan Kecelakaan	1.190.753.763	507.712.781	<i>Vehicle accident</i>
Terminal	432.647.660	2.799.036.693	<i>Bus station</i>
Pengangkutan	119.665.000	486.656.820	<i>Freight</i>
Sub jumlah	63.128.021.835	74.285.773.676	<i>Subtotal</i>
Jumlah	521.750.886.336	643.459.570.115	<i>Total</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

30. BEBAN PEMASARAN

30. MARKETING EXPENSES

	2021	2020	
Komisi Agen	5.593.413.193	5.351.281.213	Agent commission
Extra Service	5.088.483.618	5.762.502.556	Extra service
Konsesi Usaha	3.895.623.906	9.387.619.257	Business concessions
Bongkar Muat Barang	2.830.792.185	2.216.266.414	Unloading goods
Promosi	580.027.267	1.130.650.244	Promotion
Marketing Fee	249.608.500	1.170.234.896	Marketing fee
Lainnya	616.531.131	2.168.993.915	Others
Jumlah	18.854.479.800	27.187.548.495	Total

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2021	2020	
Gaji & Tunjangan	88.324.232.192	97.918.364.361	Salaries and allowances
Imbalan Pasca Kerja	26.540.205.709	25.978.852.730	Employee benefits
Makan/ Minum Pegawai	24.912.402.473	21.506.328.618	Employee meal expenses
Transport	21.864.891.054	22.029.830.710	Transportation
Hak-hak Karyawan	21.634.690.052	17.460.652.769	Employee rights
Pajak dan Retribusi	14.971.491.182	18.207.724.562	Tax and retribution
Kantor	11.471.045.212	12.359.683.582	Office
Penyusutan			Depreciation of
Alat Penunjang	6.181.638.760	6.056.757.722	supporting tools
Perjalanan Dinas	5.097.702.874	4.733.809.714	Official travel
Jamuan Tamu Dinas/ Relasi	5.026.687.703	3.669.435.016	Entertainment
Penyisihan Piutang	3.219.745.968	2.181.024.680	Bad debt allowance
Operasional Kendaraan Dinas	2.737.522.889	3.635.851.849	Operational vehicle service
Perawatan Bangunan/			Building maintenance/
Inventaris	2.305.062.763	2.862.205.970	inventory
Asuransi Non Operasional	1.943.809.047	2.633.897.251	Non-operational insurance
Perayaan Hari Besar	1.493.708.680	1.472.267.774	Commemoration day
Sumbangan	1.373.923.728	5.563.421.756	Donation
Penyusutan			Depreciation
Aset Hak Guna	908.215.000	699.591.886	of Right of use assets
Pakaian Dinas	803.755.750	774.660.400	Official uniform
Bonus	736.527.776	645.375.694	Bonus
Saldo Dipindahkan	241.547.258.812	251.038.995.327	Balance Carry Forward

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI **31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE**
(lanjutan) **EXPENSES** (continued)

Saldo Pindahan	241.547.258.812	251.038.995.327	Balance Brought Forward
Ongkos kirim alat produksi	551.061.776	741.545.437	Shipping of production tools
Rapat Dinas	349.872.185	1.835.370.905	Official meeting
Biaya Lelang	88.984.801	831.046.280	Auction fee
Imbalan Pasca Kerja Pesangon	77.024.196	24.894.886.909	Employee benefits
Surat Kabar	37.399.500	50.327.258	Newsletter
Amortisasi HGB	24.080.661	24.080.661	Amortization of HGB
Penurunan Nilai Aset	-	649.258.283	Impairment of assets
Lain-lain	206.999.055	182.891.058	Others
Jumlah	242.882.680.986	279.599.143.835	Total

32. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN **32. OTHER INCOME (EXPENSE)**

	2021	2020	
Penjualan Aset	2.050.069.034	257.825.591	Sale of Assets
Penjualan Barang Bekas	395.978.006	400.479.250	Sale of Used Goods
Subumlah	2.446.047.040	658.304.841	Subtotal
Beban Lain-lain:			Other Expenses:
Jasa Pihak Ketiga	(5.471.125.698)	(10.894.960.654)	Third Party Services
Denda	(4.403.383.462)	(510.249.458)	Fine
Ganti Rugi Pihak Ketiga	(1.471.654.258)	(3.799.844.327)	Third Party Compensation
Pelepasan Aset	(1.001.814.476)	-	
Subjumlah	(12.347.977.894)	(15.205.054.439)	Subtotal
Jumlah	(9.901.930.854)	(14.546.749.598)	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

33. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN **33. FINANCE (COST) INCOME**

	2021	2020	
Pendapatan Keuangan:			<i>Finance Income:</i>
Bunga Deposito	34.043.129	2.022.825.277	<i>Deposit Interest</i>
Jasa Giro	411.677.374	950.855.570	<i>Current Account Services</i>
Beban Keuangan:			<i>Finance Cost:</i>
Bunga Pinjaman	(13.573.814.680)	(17.022.593.146)	<i>Interest Expenses</i>
Administrasi Bank	(774.844.726)	(1.712.212.524)	<i>Bank Administration</i>
Denda Leasing	-	(1.007.650)	<i>Leasing Penalty</i>
Jumlah	(13.902.938.903)	(15.762.132.473)	<i>Total</i>

34. BUS PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BELUM DICATAT **34. UNDEFINED STATUS OF GOVERNMENT ASSISTANCE-BUS**

Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya merupakan hasil proyek dari Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat yang telah diserahkan atau dioperasikan oleh Perusahaan yang belum dapat dijadikan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara karena belum diterbitkannya Peraturan Pemerintahnya.

Sampai dengan akhir 2018, Bantuan Pemerintah yang belum Ditentukan Statusnya (BPYPDS) semua telah menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).

Undefined Status of Government Assistance is the result of a project from the Ministry of Transportation of the Directorate General of Land Transportation that has been submitted or operated by the Company but cannot be recorded as additional State Equity Participation because the Government Regulation has not been issued yet.

Until the end of 2018, Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS) has all become State Equity Participation (PMN).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

34. BUS PENYERTAAN MODAL NEGARA
YANG BELUM DICATAT (lanjutan)

34. UNDEFINED STATUS OF
GOVERNMENT ASSISTANCE-BUS
(continued)

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) yang diterima sesuai terbitnya Berita Acara Serah Terima untuk Dioperasikan (BASTO) dan dicatat sebagai aset BPYBDS untuk yang sudah diterbitkan BASTO nya pada tahun 2018, sebagai berikut:

Undefined Status of Government Assistance (BPYBDS) received in accordance with the issuance of the Minutes of Handover to Operate (BASTO) and recorded as BPYBDS assets after the BASTO is issued in 2018 is as follows:

No BAST/BASTO No/tanggal/ BAST/BASTO No/ Date	Jenis Aset/ Assets Type	2018
1. PL.301/16/10/DJPD/2013/tanggal 21 Juni 2013 diubah menjadi KU.003/3/10/SATKER-25-Mar-15/ PL.301/16/10/DJPD/2013/ dated 21 June 2013 changed to KU.003/3/10/SATKER-25-Mar-15	60 unit Bus Medium Hino Type 130 MDBL/ 60 units of Medium Hino Type 130 Bus MDBL	23.988.300.000
2. 01/BAST/SDBSTB/IV/2014 30-Apr-14	10 unit bus Medium Hino type/ 10 units of Medium Bus Hino Type	4.967.000.005
3. KU.003/3/11/SATKER-25-Mar-15	45 unit bus ukuran sedang (perintis)/ 45 units of medium-sized bus (pioneer)	18.762.975.000
4. PL.301/5/4/SDBSTP/IV/2015	10 unit bus ukuran sedang AC (Pemadu Moda)/10 units of medium-sized buses AC (Intermodal/shuttle bus)	5.484.600.000
5. PL301/6/4/SDBSTP /IV/2015-07Apr-15	15 bus ukuran besar AC (BRT)/ 15 large size AC buses (BRT)	16.905.537.000
6. PL.301/1/4/SDBSTPIV/201-24Apr-15	15 bus Aglomerasi/ 15 Agglomeration Bus	178.969.000.050
7. KU.003/47/1/SATKER-LLAAJ/2016	75 unit bus Perintis Non AC/ 75 units of Non AC Pioneer buses	33.742.500.000
8. KU.003/47/1/SATKER-LLAJ/2016	50 unit Bus Perintis AC/ 50 units of AC Pioneer buses	27.975.000.000
9. KU.003/64/BASTO-AJ/BS/SATKER -DAJ/X/2021	52 unit bus besar (BRT)/ 52 units of big-sized bus (BRT)	61.345.100.000
10. KU.003/64/BASTO-AJ/BS/SATKER -DAJ/X/2021	15 unit bus sedang AC/ 15 units of AC medium-sized bus	8.917.500.000
Jumlah/ Total		375.871.800.000

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**34. BUS PENYERTAAN MODAL NEGARA
YANG BELUM DICATAT (lanjutan)**

Berdasarkan notulen rapat rekonsiliasi nilai BPYDS per semester I tahun 2018 pada tanggal 18 Juli 2018 antara Kasubdit KDN II Kementerian Keuangan RI dengan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI diperoleh hasil, sebagai berikut:

- (i) Untuk seluruh BMN yang telah dioperasikan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima definitif, dan telah tercatat pada laporan keuangan BUMN sebagai BPYBDS yang perolehannya sebelum 31 Desember 2018, penyelesaian menggunakan mekanisme penambahan PMN sebagaimana diatur dalam UU APBN.
- (ii) Berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional No. KU.003/BAST-BRT/2/II/SATKER-DAMRI/2018 dan No. KU.003/BAST-BRT/3/III/SATKER-DAMRI/2018 masing-masing menyatakan bahwa Satuan Kerja Direktorat Angkatan Darat dan Multimoda menyerahkan 169 unit bus BRT EURO II Engine Model 2 pintu (APBN-P) dan 184 unit bus Perintis kepada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 197.991.400.000 dan Rp 107.617.800.000 atau seluruhnya sebesar Rp 305.609.200.000, belum dicatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2019 karena masih menunggu reviu dari BPKP.

**34. UNDEFINED STATUS OF
GOVERNMENT ASSISTANCE-BUS
(continued)**

Based on the minutes of the reconciliation meeting BPYDS value as of semester I of 2018 dated 18 July 2018 between the Head of Sub Directorate of KDN II Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, the following results were obtained:

- (i) *For all BMN which has been operated by SOE based on the handover definitive, and has been recorded in the SOE financial statements as BPYBDS which were obtained before 31 December 2018, the settlement is using the mechanism of adding state equity participation as stipulated in the UU APBN.*
- (ii) *Handover minutes of work results to be used in operational tasks No. KU.003/BAST-BRT/2/II/ SATKER-DAMRI/2018 and No. KU.003/BASTBRT/3/III/SATKER-DAMRI/2018 each stated that the Directorate of Army and Multimodal Work Unit handed over 169 units of 2-doors BRT EURO II Engine Model (APBN-P) and 184 units of Pioneer buses to Perusahaan Umum (Perum) DAMRI amounting to Rp 197,991,400,000 and Rp 107,617,800,000 or a total of Rp 305,609,200,000, has not been recorded as a fixed assets in the 2019 financial statements because it is still awaiting review from the BPKP (Indonesia's Finance and Development Supervisory Agency).*

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**34. BUS PENYERTAAN MODAL NEGARA
YANG BELUM DICATAT (lanjutan)**

(iii) Berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional No. KU.003/64/BASTO-AJ/BS/SATKER-DAJ/X/2021 menyatakan bahwa Satuan Kerja Direktorat Angkutan Jalan (likuidasi Satker Bina Sistem Transportasi Perkotaan) Tahun Anggaran 2015 berupa pengadaan 52 (lima puluh dua) unit Bus Besar BRT Euro II Engine dan 15 (lima belas) unit Bus Ukuran Sedang AC Engine (Sarana Pemadu Moda) kepada Perum DAMRI dengan harga perolehan sebesar Rp 70.262.600.000, telah dicatat sebagai aset tetap.

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi diantaranya adalah Perusahaan menempatkan dana pada Bank Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana berlaku untuk nasabah bank pihak ketiga. (Lihat Catatan 5)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal laporan posisi keuangan, sebagai berikut:

**34. UNDEFINED STATUS OF
GOVERNMENT ASSISTANCE-BUS
(continued)**

(iii) Handover minutes of work results to be used in operational tasks No. KU.003/64/BASTOAJ/BS/SATKER-DAJ/X/2021 states that the Directorate's Work Unit (liquidation of the Urban Transportation System Development Unit) for Fiscal Year 2015 is in the form of procurement of 52 (fifty two) Euro BRT Big Bus units II Engine and 15 (fifteen) units of Medium Size Bus AC Engine (shuttle bus) to Perum DAMRI with acquisition cost of Rp 70,262,600,000, have been recorded as fixed assets.

35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company carries out certain transactions with related parties including placing funds in Government Banks with the terms and normal interest rates as applicable to customers of third party banks. (See Note 5)

Transactions with related parties at the statement of financial position date are as follows:

	2021	2020	
Deposito (Catatan 5)			Deposits (Note 5)
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Agro Niaga Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	Agro Niaga Tbk
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk	1.394.713.051	1.365.759.400	(Persero) Tbk
Jumlah	11.365.759.400	11.365.759.400	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

	2021	2020	
Piutang			Accounts Receivable
Pihak Berelasi:			Related Parties:
KODAM JAYA	6.476.000.000	-	KODAM JAYA
Asosiasi Perusahaan Pelayanan			Asosiasi Perusahaan Pelayanan
Pemulangan TKI	2.658.072.000	2.658.072.000	Pemulangan TKI
PT Daerah Perusahaan			PT Daerah Perusahaan
Mitra Patriot	1.522.703.500	-	Mitra Patriot
BPTD Wilayah XIII			BPTD Wilayah XIII
PROV. SULSEL dan SULBAR	303.799.695	403.851.650	PROV. SULSEL dan SULBAR
PT Angkasa Pura II (Persero)	29.184.240	958.800.000	PT Angkasa Pura II (Persero)
BPTD WILAYAH XIV			BPTD WILAYAH XIV
PROV. KALBAR	-	1.201.241.993	PROV. KALBAR
DISHUB Batam	-	404.861.071	DISHUB Batam
Kemenhub	-	573.675.615	Kemenhub
Lainnya (rata-rata dibawah Rp300 juta)	1.912.669.813	1.900.668.851	Others (mostly below Rp 300 million)
Jumlah	12.902.429.248	8.101.171.180	Total
Utang			Accounts payable
Pihak Berelasi :			Related Parties:
PT Angkasa Pura II	652.543.208	840.767.371	PT Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura I	353.691.979	-	PT Angkasa Pura I
BPKPD Surabaya	244.819.780	110.210.300	BPKPD Surabaya
KEMENTERIAN			Ministry of
PERHUBUNGAN	-	124.921.956	Transportation
Lainnya (rata-rata dibawah Rp 100 juta)	73.874.820	57.019.381	Others (mostly below Rp 100 million)
Jumlah	1.324.929.787	1.132.919.008	Total

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **35. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

	2021	2020	
Utang Bank (Catatan 20)			Bank Loan (Note 20)
PT Bank Mandiri Tbk	12.250.000.000	20.000.000.000	PT Bank Mandiri Tbk
Jumlah	12.250.000.000	20.000.000.000	Total

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi, sebagai berikut:

The nature of relationships and types of material transactions with related parties are as follows:

No.	Pihak berelasi/ <i>parties</i>	<i>Related</i>	Sifat berelasi/ <i>relationship</i>	<i>Nature of</i>	Jenis transaksi/ <i>Type of transaction</i>
1)	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Mandiri	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Pemerintah RI/ <i>Institutions Controlled by the Indonesian Government</i>	yang oleh <i>Financial</i>	Penempatan Kas dan Bank, Deposito/ <i>Placement of Cash and Banks, Deposits</i>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Risiko Tingkat Bunga

a. Interest Rate Risk

Risiko bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko bunga terkait dengan sewa pembiayaan.

Interest risk is the risk that the fair value or contractual cash flows that come from a financial instrument will be affected by changes in market interest rates. The Company's exposure to interest risk is related to finance leases.

Tabel berikut adalah nilai tercatat berdasarkan jatuh temponya atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko bunga:

The following table is the carrying amount based on the maturity of the Company's financial assets and liabilities related to interest risk:

31 Desember 2021 / December 2021

	Suku Bunga dan Deposito / Interest Rates and Deposits (%)	Jatuh Tempo dalam satu tahun/ Due in one year	Jatuh tempo pada tahun ke-2 / Due in the 2nd year	Jumlah / Total	
Keterangan:					Description:
Aset:					Assets:
Kas dan					Cash and
Setara Kas	6,20-6,60	53.642.670.656	-	53.642.670.656	Cash Equivalents
Liabilitas:					Liability:
Utang Sewa					Finance lease
Pembiayaan	-	1.293.277.104	-	1.293.277.104	payable

31 Desember 2020 / December 2020

	Suku Bunga dan Deposito / Interest rates and deposits (%)	Jatuh Tempo dalam satu tahun/ Due in one year	Jatuh tempo pada tahun ke-2 / Due in the 2nd year	Jumlah / Total	
Keterangan:					Description:
Aset:					Assets:
Kas dan					Cash and
Setara Kas	6,60 - 7,50	73.874.659.298	-	73.874.659.298	Cash Equivalents
Liabilitas:					Liability:
Utang Sewa					Finance lease
Pembiayaan	-	2.014.310.039	-	2.014.310.039	payable

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau kurs kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Perusahaan tidak memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan penelaahan secara berkala atas piutang untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko kredit terutama terkait dengan piutang usaha.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)

b. Exchange Rate Risk

Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash rate of a financial instrument will be affected by changes in exchange rates. The Company has no exposure in foreign currencies arising from its operational transactions.

Credit risk is the risk that the Company will experience a loss arising from the customer or the counterparty who failed to meet its contractual obligations. Management believes that there is no significant concentrated credit risk. The Company controls credit risk by conducting periodic reviews of receivables to reduce the amount of uncollectible accounts. The Company's exposure to credit risk is mainly related to trade accounts receivable.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of loss that arises because the Company does not have sufficient cash flow to cover its obligations. The following is the maturity schedule of financial assets and liabilities based on undiscounted contractual payments as of 31 December 2021 and 2020.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2021 / December 2021

	< 1 tahun/ < year	1-2 tahun/ 1-2 years	> 3 tahun/ > years	Jumlah/ Total	
ASET					ASSETS
Kas dan					Cash and
Setara Kas	53.642.670.656	-	-	53.642.670.656	Cash equivalents
Piutang Usaha	16.727.144.244	-	-	16.727.144.244	Accounts receivable
Piutang Lain-lain	6.750.957.012	-	-	6.750.957.012	Other receivables
Persediaan	4.780.423.739	-	-	4.780.423.739	Inventories
Biaya dibayar dimuka	641.876.888	-	-	641.876.888	Prepaid expenses
Uang muka	3.227.603.943	-	-	3.227.603.943	Advances
Jumlah Aset	85.770.676.482	-	-	85.770.676.482	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang Usaha	35.611.991.205	-	-	35.611.991.205	Accounts payable
Pendapatan					Unearned
diterima dimuka	4.864.256.926	-	-	4.864.256.926	revenues
Beban akrual	723.899.758	-	-	723.899.758	Accrued expenses
Utang Pajak	934.848.713	-	-	934.848.713	Taxes payable
Utang Bank	17.542.099.112	-	-	17.542.099.112	Bank loans
Utang sewa	101.856.770	-	-	101.856.770	Lease liabilities
Utang Lain-lain	2.321.945.800	-	-	2.321.945.800	Other payables
Jumlah Liabilitas	62.100.898.284	-	-	62.100.898.284	Total liabilities
Selisih	23.669.778.198			23.669.778.198	Difference

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2020 / December 2020

	< 1 tahun/ < year	1-2 tahun/ 1-2 years	> 3 tahun/ > years	Jumlah/ Total	
ASET					ASSETS
Kas dan					Cash and
Setara Kas	73.874.659.298	-	-	73.874.659.298	Cash equivalents
Piutang Usaha	24.301.465.371	-	-	24.301.465.371	Accounts receivable
Piutang Lain-lain	5.426.901.415	-	-	5.426.901.415	Other receivables
Persediaan	8.749.760.084	-	-	8.749.760.084	Inventories
Biaya dibayar dimuka	800.553.717	-	-	800.553.717	Prepaid expenses
Uang muka	12.095.093.495	-	-	12.095.093.495	Advances
Jumlah Aset	125.248.433.380	-	-	125.248.433.380	Total Assets
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang Usaha	41.424.048.152	-	-	41.424.048.152	Accounts payable
Pendapatan diterima dimuka	3.376.516.487	-	-	3.376.516.487	Unearned revenues
Beban akrual	1.253.605.961	-	-	1.253.605.961	Accrued expenses
Utang Pajak	1.805.698.662	-	-	1.805.698.662	Taxes payable
Utang Bank	23.738.099.112	-	-	23.738.099.112	Bank loans
Utang Lain-lain	51.349.314.589	-	-	51.349.314.589	Other payables
Jumlah Liabilitas	122.947.282.963	-	-	122.947.282.963	Total liabilities
Selisih	2.301.150.417			2.301.150.417	Difference

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**
(lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Perusahaan mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh *Unit Treasury* dibawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. *Unit Treasury* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

**36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT**
(continued)

c. *Liquidity Risk (continued)*

Financial Risk Management

The Company's activities contain a variety of financial risks, such as market risk (including foreign exchange rate risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Overall, a financial risk management program of the Company aims to minimize losses on the value of assets and liabilities that can arise from movements in foreign exchange rates and movements in interest rates. Management has a written policy for foreign exchange risk management, mostly through time deposit placements and hedging to anticipate the risk of foreign exchange fluctuations for a period of 3 to 12 months.

The function of financial risk management is run by the Treasury Unit under policies approved by the Board of Directors. The Treasury Unit identifies, evaluates and hedges financial risks.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
(continued)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Management (continued)

Berikut ini risiko-risiko keuangan yang
dimitigasi oleh Perusahaan.

*The following are the financial risks
mitigated by the Company.*

	2021	2020	
Pinjaman yang diberikan dan piutang:			<i>Loans and receivables:</i>
Kas dan Setara Kas	53.642.670.656	73.874.659.298	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang Usaha	16.727.144.244	24.301.465.371	<i>Accounts receivable</i>
Piutang Lain-lain	6.750.957.012	5.426.901.415	<i>Other receivables</i>
Jumlah	77.120.771.912	103.603.026.084	<i>Total</i>
Liabilitas Keuangan:			<i>Financial liabilities:</i>
Utang Usaha	35.611.991.205	41.424.048.152	<i>Accounts Payable</i>
Beban Akrua	723.899.758	1.253.605.961	<i>Accrued Expenses</i>
Utang Bank	17.542.099.112	23.738.099.112	<i>Loan from Banks</i>
Liabilitas Sewa			<i>Lease</i>
Pembiayaan	1.293.277.104	2.014.310.039	<i>Payables</i>
Jumlah	55.171.267.179	68.430.063.264	<i>Total</i>

Nilai wajar diidentifikasi sebagai jumlah
dimana instrumen tersebut dapat
dipertukarkan di dalam transaksi terkini
antara pihak yang berkeinginan dan
memiliki pengetahuan yang memadai
melalui suatu transaksi yang wajar,
bukan dalam penjualan yang dipaksakan
atau penjualan likuidasi.

*Fair value is identified as the amount in
which the instrument can be exchanged
in the current transaction between
knowledgeable, willing parties in an
arm's length transaction, not in forced
sales or liquidation sales.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
 For the years ended
 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
 (lanjutan)

36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
 (continued)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

Financial Risk Management (continued)

Perusahaan menggunakan hirarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

The Company uses the following hierarchy to determine the fair value of financial instruments:

Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.

Level 1 : Fair value is measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for similar assets or liabilities.

Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Level 2 : Fair value is measured based on valuation techniques, where all inputs that have a significant effect on fair value can be observed directly or indirectly.

Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Level 3 : Fair value is measured based on valuation techniques, where all inputs that have a significant effect on fair value cannot be observed either directly or indirectly.

Semua instrumen keuangan yang disajikan didalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Metode dan asumsi di bawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

All financial instruments presented in the statement of financial position as of 31 December 2021 and 2020 are recorded at amortized cost. The methods and assumptions below are used to estimate the fair value for each class of financial instruments:

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

**36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**
(lanjutan)

Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)

a. Aset Keuangan Lancar dan Liabilitas
Keuangan Jangka Pendek

Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang diasumsikan sama dengan nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

b. Aset Keuangan tidak Lancar dan
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang

Nilai wajar dari aset keuangan tidak lancar dan liabilitas keuangan jangka panjang diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terikat dan manajemen tidak dapat menentukan kapan aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi. Estimasi nilai wajar dari utang sewa pembiayaan didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko kredit Perusahaan dan menggunakan suku bunga bebas risiko untuk instrumen yang serupa.

**36. THE OBJECTIVE AND POLICIES OF
FINANCIAL RISK MANAGEMENT**
(continued)

Financial Risk Management (continued)

a. Current Financial Assets and Short-term Financial Liabilities

The fair value of current financial assets and short-term financial liabilities that are due within one year or less are assumed to be the same as their carrying values because of their short-term nature.

b. Non-Current Financial Assets and Long-term Financial Liabilities

The fair value of non-current financial assets and long-term financial liabilities is assumed to be equal to cash value to be received or paid because the maturity is not stated in bound contracts and management cannot determine when the long-term financial assets and financial liabilities will be realized and paid off. The estimated fair value of debt under finance lease is based on the discounted value of future cash flows adjusted to reflect the Company's credit risk and use risk-free interest rates for similar instruments.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki perikatan dan kontinjensi serta memperoleh pendapatan dari reklame/ iklan melalui berbagai kontrak pemasangan iklan baik melalui agensi maupun langsung dengan perusahaan terkait, yaitu:

- 1) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: KU.003/KONTDJKMP/2/SKDAJ/1/2021 tanggal 6 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (kedua) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Subsidi Angkutan Antar moda KSPN Danau Toba.
- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: KU.003/KONT-DJKMP/1/SKDAJ/1/2021 tanggal 6 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (kedua) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Subsidi Angkutan Antar moda KSPN Borobudur.
- 3) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: KU.003/KONT-DJKMP/30/SKDAJ/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Subsidi Angkutan Antar moda KSPN Mandalika.
- 4) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: KU.003/KONT-DJKMP/12/SKDAJ/1/2021 tanggal 18 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tentang Subsidi Angkutan Antar moda KSPN Labuan Bajo.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

As of 31 December 2021 and 2020, the Company has entered into agreements and contingencies as well as obtaining revenue from billboards/ advertisements through various advertising contracts either through agencies or directly with related companies, namely :

- 1) Based on the Agreement/Contract No: KU.003/KONTDJKMP/2/SKDAJ/1/2021 dated 6 January 2021, the Company entered into the second addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation regarding the Subsidy for Intermodal Transportation of the Lake Toba KSPN.
- 2) Based on the Letter of Agreement/Contract No: KU.003/KONT-DJKMP/1/SKDAJ/1/2021 dated 6 January 2021, the Company entered into the second addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, regarding Subsidies for Intermodal Transport of the Borobudur KSPN.
- 3) Based on the Agreement/Contract No: KU.003/KONT-DJKMP/30/SKDAJ/VII/2021 dated 19 July 2021, the Company entered into the first addendum of Cooperation Agreement (first) with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, regarding Subsidies for Intermodal Transport of the Mandalika KSPN.
- 4) Based on the Letter of Agreement/Contract No: KU.003/KONT-DJKMP/12/SKDAJ/1/2021 dated 18 January 2021, the Company entered into the first addendum of Cooperation Agreement (first) with the Ministry of Transportation of the Directorate General of Land Transportation regarding Subsidies for Intermodal Transport of the Labuan Bajo KSPN.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 5) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/5/SKDAJ/1/2021 tanggal 6
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kedua)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antar moda
KSPN Tanjung Kelayang.
- 6) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/9/SKDAJ/1/2021 tanggal 8
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama dengan
Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat tentang
Subsidi Angkutan Antar moda KSPN
Wakatobi.
- 7) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/8/SKDAJ/1/2021 tanggal 8
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama dengan
Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat tentang
Subsidi Angkutan Antar moda KSPN
Morotai.
- 8) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/4/SKDAJ/1/2021 tanggal 6
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kedua)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antar moda
KSPN Tanjung Lesung.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 5) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/5/SKDAJ/1/2021 dated
6 January 2021, the Company entered
into the second addendum of
Cooperation Agreement with the
Ministry of Transportation, Directorate
General of Land Transportation
regarding the Subsidy for Intermodal
Transport of the Tanjung Kelayang.
- 6) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/9/SKDAJ/1/2021 dated
8 January 2021, the Company entered
into a Cooperation Agreement with the
Ministry of Transportation of the
Directorate General of Land
Transportation regarding the Subsidy
for Intermodal Transport of the
Wakatobi KSPN.
- 7) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/8/SKDAJ/1/2021 dated
8 January 2021, the Company entered
into a Cooperation Agreement with the
Ministry of Transportation of the
Directorate General of Land
Transportation regarding the Subsidy
for Intermodal Transport of the Morotai
KSPN.
- 8) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/4/SKDAJ/1/2021 dated
6 January 2021, the Company entered
into the second addendum
of Cooperation Agreement with the
Ministry of Transportation of the
Directorate General of Land
Transportation regarding the Subsidy
for Intermodal Transport of the Tanjung
Lesung KSPN.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 9) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/3/SKDAJ/1/2021 tanggal 6
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kedua)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antar moda
KSPN Bromo.
- 10) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/32/SKDAJ/VII/2021 tanggal 19
Juli 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kedua)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antar moda
KSPN Likupang.
- 11) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-DJKMP
/7/SKDAJ/1/2021 tanggal 18 Januari
2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antarmoda
KSPN Toraja.
- 12) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/15/SKDAJ/1/2021 tanggal 18
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antarmoda
KSPN Bukittinggi.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 9) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-DJKMP
/3/SKDAJ/1/2021 dated 6 January 2021,
the Company entered into the second
addendum of Cooperation Agreement
with the Ministry of Transportation,
Directorate General of Land
Transportation, regarding Subsidies for
Intermodal Transport of the Bromo
KSPN.
- 10) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-DJKMP/
32/SKDAJ/VII/2021 dated 19 July
2021, the Company entered into the
second addendum of Cooperation
Agreement with the Ministry of
Transportation, Directorate General of
Land Transportation regarding the
Subsidy for Intermodal Transport of the
Likupang KSPN.
- 11) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-DJKMP/7
/SKDAJ/1/2021 dated 18 January 2021,
the Company entered into the first
addendum of Cooperation Agreement
(first) with the Ministry of
Transportation of the Directorate
General of Land Transportation
regarding the Subsidy for Intermodal
Transport of the Toraja KSPN.
- 12) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/15
/SKDAJ/1/2021 dated 18 January 2021,
the Company entered into the first
addendum of Cooperation Agreement
(first) with the Ministry of
Transportation of the Directorate
General of Land Transportation
regarding the Subsidy for Intermodal
Transport of the Bukittinggi KSPN.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 13) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/14/SKDAJ/1/2021 tanggal 18
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antarmoda
KSPN Kawah Ijen.
- 14) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/16/SKDAJ/1/2021 tanggal 18
Januari 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antarmoda
KSPN Pacitan.
- 15) Berdasarkan Surat Perjanjian/
Kontrak No: KU.003/KONT-
DJKMP/28/SKDAJ/VII/2021 tanggal 19
Juli 2021, Perusahaan mengadakan
perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu)
dengan Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
tentang Subsidi Angkutan Antarmoda
KSPN Bali.
- 16) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak
nomor: PL.107/1/1/SP PPK. 04/BPTD-
1/2021 tanggal 04 Januari 2021,
Perusahaan mengadakan perjanjian
kerjasama dengan Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah I – Provinsi
Aceh tentang Subsidi Operasional
Angkutan Jalan di 9 (sembilan) lintasan.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 13) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/14/SKDAJ/1/2021 dated 18
January 2021, the Company entered
into the first addendum of Cooperation
Agreement (first) with the Ministry of
Transportation of the Directorate
General of Land Transportation
regarding the Subsidy for Intermodal
Transport of the Ijen Crater KSPN.
- 14) Based on the Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/16/SKDAJ/1/2021 dated 18
January 2021, the Company entered
into the first addendum of Cooperation
agreement (first) with the Ministry of
Transportation, Directorate General of
Land Transportation on Intermodal
Transportation Subsidy for the Pacitan
KSPN.
- 15) Based on Letter of Agreement/
Contract No: KU.003/KONT-
DJKMP/28/SKDAJ/VII/2021 dated 19
July 2021, the Company entered into the
first addendum of Cooperation
Agreement with the Ministry of
Transportation, Directorate General of
Land Transportation, regarding
Subsidies for Intermodal Transport of
the Bali KSPN.
- 16) Based on the Agreement/Contract
number: PL.107/1/1/SP PPK. 04/BPTD-
1/2021 dated 4 January 2021, the
Company entered into a cooperation
agreement with the Ministry of
Transportation, Directorate General of
Land Transportation, Land
Transportation Management Center
Region I – Aceh Province regarding
Road Transport Operational Subsidies
on 9 (nine) tracks.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 17) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.101/01/BPTD-IX/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX – Provinsi Jawa Barat tentang Subsidi Angkutan Keperintisan Bandung.
- 18) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.107/2/1/LLAJ/BPTD-IV/2021 tanggal 01 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV – Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Kepulauan Riau (6 Trayek).
- 19) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: K02.LPG/BPTD WIL-VI/APBN/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI – Provinsi Bengkulu dan Lampung tentang Subsidi Angkutan Jalan Perintis Provinsi Bengkulu.
- 20) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.101/02/BPTD-IX/I/2021 tanggal 01 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX – Provinsi Jawa Barat tentang Subsidi Angkutan Keperintisan Bogor.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 17) Based on the Agreement/Contract number: PL.101/01/BPTD-IX/I/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement to carry out a package delivery with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region IX – West Java Province on the Bandung Pioneer Transport Subsidy.
- 18) Based on the Agreement/Contract number: PL.107/2/1/LLAJ/BPTDIV/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region IV – Riau Province and Riau Island Province regarding Subsidies for Pioneer Bus Operations for Riau Islands Province (6 Routes).
- 19) Based on the Agreement/Contract number: K02.LPG/BPTDWILVI/APBN/I/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region VI – Bengkulu and Lampung Provinces regarding subsidies for Bengkulu Province Pioneer Road Transportation.
- 20) Based on the Agreement/Contract number: PL.101/02/BPTD-IX/I/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement to carry out a package delivery with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region IX – West Java Province on the Bogor Pioneer Transport Subsidy.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 21) Berdasarkan Perjanjian No. 3437.01/KU.104/SPK/00/DU/2021 tanggal 12 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT. HIN tentang Dukungan Terhadap Program Strategis BUMN Ekosistem Pariwisata.
- 22) Berdasarkan Perjanjian No. 3453.00/AK.001/SPK/00/DU/2021 tanggal 26 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT LRT tentang Integrasi Antar Moda Angkutan Penumpang dan Bisnis Pendukungnya.
- 23) Berdasarkan Perjanjian No. 3513.00/KL.004/SPK/00/DPU/2021 tanggal 29 September 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PRNI tentang Kerjasama dibidang Percetakan dan Angkutan Logistik.
- 24) Berdasarkan Perjanjian No. 3484.00/AL.303/SPK/00/DU/2021 tanggal 12 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KALogistic tentang Kolaborasi Pengembangan Bisnis.
- 25) Berdasarkan Perjanjian No. 3468.00/AL.301/SPK/00/DPU/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Berkah Jalur Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis Kurir Logistik Berbasis Platform Digital.
- 26) Berdasarkan Perjanjian No. 3515.00/KL.004/SPK/00/DPU/2021 tanggal 5 November 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT. Kimia Farma tentang Kerjasama Angkutan Logistik.
- 27) Berdasarkan Perjanjian No. 3539.00/AK.008/SPK/00/DU/2021 tanggal 25 November 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Jababeka tentang Rencana Kerjasama Angkutan Umum.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 21) Based on Agreement No. 3437.01/KU.104/SPK/00/DU/2021 dated 12 April 2021, The Company entered into a partnership with PT HIN on Support for Tourism Ecosystem BUMN Strategic Programs.
- 22) Based on Agreement No. 3453.00/AK.001/SPK/00/DU/2021 dated 26 April 2021 the Company entered into a partnership with PT LRT on Integration Between Passenger Transport Modes and Its Supporting Business.
- 23) Based on Agreement No. 3513.00/KL.004/SPK/00/DPU/2021 dated 29 September 2021, the Company entered into a collaboration with PRNI on Cooperation in the Printing and Logistics Field.
- 24) Based on Agreement No. 3484.00/AL.303/SPK/00/DU/2021 dated 12 August 2021, the Company entered into a collaboration with KALogistic on Business Development Collaboration.
- 25) Based on Agreement No. 3468.00/AL.301/SPK/00/DPU/2021 dated 28 June 2021, the Company entered into a partnership with PT Berkah Jalur Logistik on Development Cooperation Plans, Development and Management of Digital Platform-Based Logistics Courier Business.
- 26) Based on Agreement No. 3515.00/KL.004/SPK/00/DPU/2021 dated 5 November 2021, the Company entered into a partnership with PT. Kimia Farma on Logistics Transport Cooperation.
- 27) Based on Agreement No. 3539.00/AK.008/SPK/00/DU/2021 dated 25 November 2021, the Company entered into a collaboration with Jababeka regarding the Public Transport Cooperation Plan.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 28) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3435.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 034/DDI-DAMRI/BFR/III/21 3 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT DAYA DIMENSI INDONESIA tentang Pengadaan *Competency training* Perum DAMRI.
- 29) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3465.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0174/PN.GEAR/2021 18 Juni 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KJPP Guntur Eki Andri & Rekan tentang Pengadaan Konsultan Jasa Penilaian Aset 6 (enam) Lokasi Tanah/Bangunan Perum DAMRI Tahun 2021.
- 30) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3644.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0173/PN.GEAR/2021 18 Juni 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KJPP Guntur Eki Andri & Rekan tentang Pengadaan Konsultan Jasa Penilaian Penghapusbukuan Alat Produksi (Bus) Tidak Produktif Tahun 2021.
- 31) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3488.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 009/CV.INPRA/VIII-2021 19 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan CV INDHI PRATAMA tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Mess, Ruang Arsip, Ruang Pantry, dan Mushola Kantor Perum DAMRI Cabang Pangkalpinang.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 28) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3435.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 034/DDI-DAMRI/BFR/III/21 3 August 2021, the Company entered into a partnership with PT DAYA DIMENSI INDONESIA regarding the Procurement of Competency Training for Perum DAMRI.
- 29) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3465.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0174/PN.GEAR/2021 18 June 2021, the Company entered into a collaboration with KJPP Guntur Eki Andri & Partners regarding the Procurement of Consultants for Asset Assessment Services of 6 (six) Land/Building Locations of Perum DAMRI in 2021.
- 30) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3644.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0173/PN.GEAR/2021 18 June 2021, the Company entered into a collaboration with KJPP Guntur Eki Andri & Partners regarding the Procurement of Consultants for Assessment Services for Writing Off Unproductive Production Equipment (Bus) Years 2021.
- 31) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3488.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 009/CV.INPRA/VIII-2021 19 August, 2021, the Company entered into a collaboration with CV INDHI PRATAMA regarding the Construction of the Mess Building, Archives Room, Pantry Room, and Mosque of the DAMRI Perum Office Pangkalpinang Branch.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 32) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3490.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 017/METRO/SKPP-DAMRI/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Metro Multi Powerindo tentang Penyediaan Tenaga Pengamanan Kantor Pada Perum DAMRI Angkutan Bandara Soekarno-Hatta.
- 33) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3505.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 018/METRO/SKPP-DAMRI/2021 tanggal 23 September 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Metro Multi Powerindo tentang Tenaga Pengamanan Kantor Cabang Perum DAMRI Bandar Lampung di Pemasaran Stasiun Gambir.
- 34) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3524.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan JHON GIRSANG & ASSOCIATES tentang Pengadaan Jasa Advokat atau Konsultan Hukum.
- 35) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3527.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0189/UM.GEAR/2021 tanggal 16 November 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KJPP Guntur Eki Andri & Rekan tentang Pengadaan Jasa Penilaian Penghapusbukuan Alat Produksi (Bus Besar, Bus Medium, Microbus, & Truk) Tidak Produktif Sebanyak 349 Unit Tahun 2021.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 32) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3490.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 017/METRO/SKPP-DAMRI/2021 dated 24 August 2021, the Company entered into a partnership with PT Metro Multi Powerindo regarding the Provision of Office Security Personnel at Perum DAMRI for Soekarno-Hatta Airport Transportation
- 33) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3505.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 018/METRO/SKPP-DAMRI/2021 dated 23 September 2021, the Company entered into a partnership with PT Metro Multi Powerindo regarding Security Personnel for Perum DAMRI Bandar Lampung Branch Office at Gambir Station Marketing.
- 34) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3524.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 dated 29 October 2021, the Company entered into a partnership with JHON GIRSANG & ASSOCIATES regarding the Procurement of Advocates or Legal Consultants.
- 35) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3527.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & SUB.0189/UM.GEAR/2021 dated 16 November 2021, the Company entered into a collaboration with KJPP Guntur Eki Andri & Partners regarding Procurement of Appraisal Services for Writing Off 349 Units of Unproductive Production Equipment (Big Bus, Medium Bus, Microbus, & Trucks).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

36) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3530.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & A/151/XI/2021/PD tanggal 19 November 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN tentang Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Perum DAMRI Tahun Buku 2021.

37) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3535.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 220/2.0044-00/ANA-U/NL/XII/2021 tanggal 12 September 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KJPP AMIN, NIRWAN, ALFIANTORI, & REKAN tentang Pengadaan Jasa Penilai Asset 165 Unit Bus Perum DAMRI.

38) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3540.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 17 Desember 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT RAP Asia Consulting tentang Pengadaan jasa *Assesment Risk Management Maturity* Pada Perum DAMRI.

39) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3462.00 I KL.OO4I SPK/ D3.OIUGM/ 2021 tanggal 17 Nop 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KOPERASI SERBA USAHA LOMBOK BARU tentang Sewa Alat Produksi Untuk Kegiatan Pelayanan Angkutan Antar moda World Super Bike (WSBK) Mandalika Tahun 2021.

40) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3525.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 tanggal 11 Februari 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA tentang Pengadaan Spare Part Kendaraan Merk Isuzu.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

36) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3530.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & A/151/XI/2021 /PD dated 19 November 2021, the Company entered into a partnership with KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & PARTNERS regarding the Procurement of Public Accountant Firm Services (KAP) for the Audit of the Financial Statements of Perum DAMRI for the 2021 Fiscal Year.

37) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3535.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 220/2.0044-00/ANA-U/NL/XII/2021 dated 12 September 2021, the Company entered into a partnership with KJPP AMIN, NIRWAN, ALFIANTORI, & PARTNERS regarding the Procurement of Asset Appraisal Services 165 Bus Units of Perum DAMRI.

38) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3540.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 17 December 2021 The company entered into a partnership with PT RAP Asia Consulting on Procurement of Risk Management Maturity Assessment Services at Perum DAMRI.

39) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3462.00 I KL.OO4I SPK/ D3.OIUGM/2021 dated 17 November 2021, the Company entered into a collaboration with KOPERBA BUSINESS LOMBOK BARU regarding Rental of Production Equipment for World Super Bike (WSBK) Mandalika Intermodal Transport Service Activities in 2021.

40) Based on the Letter of Agreement/ Contract No. 3525.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 dated 11 February 2021, the Company entered into a partnership with PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA regarding the Procurement of Isuzu Brand Vehicle Spare Parts.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 41) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3632.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT HINO MOTORS SALES INDONESIA tentang Jasa Perawatan dan Perbaikan Alat Produksi Merk Hino.
- 42) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3631.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT PERTAMINA LUBRICANTS tentang Perpanjangan Pengadaan Minyak Pelumas.
- 43) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3630.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KKA Nurichwan tentang Pengadaan Jasa Konsultan Aktuaria untuk PSAK 24 Tahun 2021.
- 44) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3533.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 30 November 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan KJPP RUKY, SAFRUDIN & REKAN tentang Pengadaan Jasa Konsultan untuk Studi Kelayakan Peremajaan Armada Bus an Pengadaan Fasilitas Pendukung (IT Dan Perbengkelan) Milik Perum Damri Atas Rencana Fasilitas Kredit Investasi Proyek Yang Akan Dilakukan Penjaminan Oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 41) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3632.00/TF.101/SPK/00/LP/2021 dated 31 December 2021, the Company entered into a partnership with PT HINO MOTORS SALES INDONESIA regarding Maintenance and Repair Services for Hino Brand Production Equipment.
- 42) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3631.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 31 December 2021, the Company entered into a partnership with PT PERTAMINA LUBRICANTS regarding the Extension of the Procurement of Lubricant Oil.
- 43) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3630.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 31 December 2021, the Company entered into a collaboration with KKA Nurichwan on the Procurement of Actuarial Consulting Services for SFAS 24 Year 2021.
- 44) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3533.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 30 November 2021, the Company entered into a collaboration with KJPP RUKY, SAFRUDIN & PARTNERS on the Procurement of Consultant Services for Feasibility Study of Bus Fleet Rejuvenation and Procurement of Supporting Facilities (IT and Workshop) Owned by Perum Damri on the Plan Project Investment Credit Facility to be Underwritten by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 45) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 001/KONTRAK/DAMRI-BTM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG NATUNA tentang Pengadaan Sewa Menyewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Natuna Tahun 2021.
- 46) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No.002/KONTRAK/DAMRI-BTM/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG NATUNA tentang Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Natuna Tahun 2021.
- 47) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3432.01/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 2 Maret 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Infomedia Nusantara tentang Perpanjangan Pengadaan Layanan Nomor Akses Center 1500825.
- 48) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 21/KU.103/SPK/00/GM/2021 tanggal 10 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SARANA BANDAR LOGISTIK CABANG MERAUKE tentang Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Merauke Tahun 2021.
- 49) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 22/KU.103/SPK/00/GM/2021 tanggal 10 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT. SARANA BANDAR LOGISTIK CABANG MERAUKE tentang Pengadaan Sewa Menyewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Merauke Tahun 2021.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 45) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 001/KONTRAK/DAMRI-BTM/III/2021 dated 31 March 2021, the Company entered into a partnership with PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG NATUNA regarding the Procurement of Leases to Rent Production Equipment for Pioneer Goods Transportation is in Natuna in 2021.
- 46) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 002/KONTRAK/DAMRI-BTM/III/2021 dated 31 March 2021, the Company entered into a partnership with PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG NATUNA regarding Pioneer Loading and Unloading Work in Natuna in 2021.
- 47) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3432.01/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 02 March 2021, the Company entered into a partnership with PT Infomedia Nusantara regarding Extension of Service Procurement Center Access Number 1500825.
- 48) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 21/KU.103/SPK/00/GM/2021 dated 10 April 2021, the Company entered into a partnership with PT SARANA BANDAR LOGISTIK CABANG MERAUKE regarding Pioneer Loading and Unloading Work in Merauke in 2021.
- 49) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 22/KU.103/SPK/00/GM/2021 dated 10 April 2021, the Company entered into a partnership with PT. SARANA BANDAR LOGISTIK CABANG MERAUKE regarding Procurement of Rental of Production Equipment for Pioneer Goods Transportation in Merauke in 2021.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 50) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3445.00/KU.103/SPK/00LP/2021 tanggal 16 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Duta Pratama Teknologi tentang Pengadaan upgrade Server Kantor Pusat Perum DAMRI.
- 51) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3320.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 9 February 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Info Bisnis Solusi tentang Addendum Pertama Perpanjangan Waktu Pengadaan HR Database dan Payroll system.
- 52) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3454.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 008/ADD-I/MPK-DAMRI/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Mitra Pajakku tentang Addendum Pertama Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Pajak.
- 53) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 88/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG TIMIKA tentang Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Angkutan Barang Perintis di Timika Tahun 2021.
- 54) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 89/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 21 Juni 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG TIMIKA tentang Pekerjaan Bongkar Muat Barang Perintis di Timika Tahun 2021.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 50) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3445.00/KU.103/SPK/00LP/2021 dated 16 April 2021, the Company entered into a collaboration with Duta Pratama Teknologi regarding Procurement of Server upgrades for Perum DAMRI Head Office.
- 51) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3320.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 9 February 2021, the Company entered into a partnership with PT. Info Bisnis Solusi about First Addendum of Extension period of Procurement of HR Database and Payroll system.
- 52) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3454.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & 008/ADD-I/MPK-DAMRI/IV/2021 dated 26 April 2021, the Company entered into a partnership with PT. Mitra Pajakku regarding the First Addendum to the Extension of Time for Tax Application Procurement Work.
- 53) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 88/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 21 June 2021, the Company entered into a partnership with PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG regarding Procurement of Production Equipment Rental for Pioneer Goods Transportation in Timika in 2021.
- 54) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 89/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 21 June 2021, the Company entered into a partnership with PT SARANA BANDAR NASIONAL CABANG TIMIKA regarding Pioneer Loading and Unloading Work in Timika in 2021.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 55) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 256/KU.103/SPK/VII/GM/2021 tanggal 1 July 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT PUNCAK BERKAH BERSAMA GOTRANS tentang Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Mandalika.
- 56) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 225/KU/SPK/00/LP/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT. GOE INDONESIA TOURS tentang Pengadaan Sewa Alat Produksi untuk Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba.
- 57) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3479.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & K005-02/A.PD/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Ibu Riko Damarintyas, CA tentang Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Akuntansi.
- 58) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3481.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA tentang Pengadaan *Mobile Point Of Sales* (MPOS) Perum DAMRI.
- 59) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3459.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 10 Mei 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Hartono Raya Motor tentang Adendum Kedua Perubahan Harga Pengadaan Suku Cadang Melalui Program OSPS.

- 55) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 256/KU.103/SPK/VII/GM/2021 dated 1 July 2021, the Company entered into a partnership with PT PUNCAK BERKAH BERSAMA GOTRANS regarding Procurement of Production Equipment Rental for National Economic Recovery Activities (PEN) through Transportation for National Tourism Strategic Areas (KSPN) in Mandalika.
- 56) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 225/KU/SPK/00/LP/2021 dated 2 August 2021, the Company entered into a partnership with PT. GOE INDONESIA TOURS concerning Procurement of Production Equipment Rental for National Economic Recovery Activities (PEN) through Transportation for National Tourism Strategic Areas (KSPN) in Lake Toba.
- 57) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3479.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 & K005-02/A.PD/VIII/2021 dated 2 August 2021, the Company entered into a collaboration with Mrs. Riko Damarintyas, CA regarding the Procurement of Accounting System Consultant Services.
- 58) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3481.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 3 August 2021, the Company entered into a partnership with PT SOFTORB TECHNOLOGY INDONESIA regarding the Procurement of Mobile Point Of Sales (MPOS) for Perum DAMRI.
- 59) Based on the Letter of Agreement/Contract No. 3459.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 10 May 2021, the Company entered into a partnership with PT Hartono Raya Motor regarding the Second Addendum to Changes in Prices for Procurement of Spare Parts through the OSPS Program.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

- 60) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3472.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 9 Juli 2021 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT PERTAMINA LUBRICANTS tentang Perpanjangan Pengadaan Minyak Pelumas.
- 61) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No. 3458.01/KU.103/SPK/00/LP/2021 tanggal 03 Mei 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Sinergi Informatika Semen Indonesia tentang Perpanjangan Sewa Program Sistem Informasi Keuangan Perum DAMRI.
- 62) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 16/SP-PERINTIS/SATKER-BPTD WIL.V-JMB/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V – Provinsi Jambi tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan (Lelang Tidak Mengikat).
- 63) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: K01.LPG/BPTD WIL-VI/APBN/I/2021 tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI – Provinsi Bengkulu dan Lampung tentang Subsidi Angkutan Jalan Perintis Provinsi Lampung.

**37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)**

- 60) Based on the Letter of Agreement/ Contract No. 3472.00/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 9 July 2021, the Company entered into a partnership with PT PERTAMINA LUBRICANTS regarding the Extension of the Procurement of Lubricating Oil.
- 61) Based on the Letter of Agreement/ Contract No. 3458.01/KU.103/SPK/00/LP/2021 dated 03 May 2021, the Company entered into a partnership with PT Semen Indonesia Informatics Synergy regarding Lease Extension of Perum DAMRI's Financial Information System Program.
- 62) Based on the Agreement/Contract number: 16/SP-PERINTIS/SATKER-BPTD WIL.V-JMB/XII/2020 dated 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement to carry out a work package with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Regional Land Transportation Management Center. V – Jambi Province on Road Transport Operational Subsidy (Unbinding Auction).
- 63) Based on the Agreement/Contract number: K01.LPG/BPTD WIL-VI/APBN/I/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region VI – Bengkulu and Lampung Provinces regarding Subsidy for Pioneer Road Transportation in Lampung Province.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

64) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.107/1/1/PPK.II/BPTD-II/I/SP/DMR/2021 tanggal 5 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara tentang Subsidi Operasional Bus Perintis (7 Trayek).

65) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.107/395/KONTRAK/PRT.DAMRI/BPTD-III/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III – Provinsi Sumatera Barat tentang Subsidi Operasional Bus Perintis 7 Lintasan (Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya dan Kab. Padang Pariaman).

66) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.001/1/PERINTIS.SUMSEL/BPTD.VII/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII – Provinsi Sumatera Selatan tentang Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Sumatera Selatan.

67) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.001/2/PERINTIS.BABEL/BPTD.VII/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII – Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Bangka Belitung.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

64) Based on the Agreement/Contract number: PL.107/1/1/PPK.II/BPTD-II/I/SP/DMR/2021 5 dated January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Commitment Making Officer for Road Traffic and Transportation Activities. Land Transportation Manager Region II North Sumatra Province regarding Subsidies for Pioneer Bus Operations (7 Routes).

65) Based on the Agreement/Contract number: PL.107/395/KONTRAK/PRT.DAMRI/BPTD-III/XII/2020 dated 30 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region III – Province West Sumatra on Operational Subsidy for Pioneer 7 Track Buses (West Pasaman District, Dharmasraya District and Padang Pariaman District).

66) Based on the Agreement/Contract number: KU.001/1/PERINTIS.SUMSEL/BPTD.VII/I/2021 dated 2 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region VII – South Sumatra Province concerning Subsidies for Pioneer Transport Operations in South Sumatra Province.

67) Based on the Agreement/Contract number: KU.001/2/PERINTIS.BABEL/BPTD.VII/I/2021 dated 2 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region VII – South Sumatra Province and Bangka Belitung concerning Operational Subsidy for Pioneer Transport of Bangka Belitung Province.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 68) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No:01/SPPBJ-LLAJ/BPTD-IV/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV – Provinsi Riau dan Kepulauan Riau tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Riau 2 Trayek.
- 69) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.003/19/4/Satker BPTD-Banten/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII – Provinsi Banten tentang Subsidi Operasional Bus Perintis 5 Perintis.
- 70) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.107/12/13/BPTD-KALSEL /2020 tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV – Provinsi Kalimantan Selatan tentang Subsidi Operasi Bus Perintis.
- 71) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.102/12/5/PPK2-BPTDX/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X – Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Prov Jawa Tengah (Teluk Penyu-Nusa Wungu).

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 68) Based on the Agreement/Contract No: 01/SPPBJ-LLAJ/BPTD-IV/XII/2020 dated 29 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region IV – Riau Province and Riau Islands regarding Subsidies Riau Province Pioneer Bus Operations 2 Routes.
- 69) Based on the Agreement/Contract number: KU.003/19/4/Satker BPTD-Banten/2020 dated 29 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region VIII – Banten Province regarding Bus Operational Subsidies Pioneers 5 Pioneers.
- 70) Based on the Agreement/Contract number: PL.107/12/13/BPTD-KALSEL /2020 dated 30 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XV – South Kalimantan Province regarding Bus Operation Subsidies Pioneer.
- 71) Based on the Agreement/Contract number: PL.102/12/5/PPK2-BPTDX /XII/2020 dated 29 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region X – Central Java Province and D.I. Yogyakarta regarding Subsidies for Road Transport Operations in Central Java Province (Teluk Turtle-Nusa Wungu).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

72) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: PL.107/13/8/BPTDXVI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI – Provinsi Kalimantan Tengah tentang Subsidi Operasi Bus Perintis.

73) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.003/1/5/BPTD-KALTIMRA/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV – Provinsi Kalimantan Selatan tentang Subsidi Operasi Bus Perintis Di Provinsi Kalimantan Timur.

74) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.003/1/6/BPTD-KALTIMRA/2021 tanggal 4 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII – Provinsi Kalimantan Utara tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Sebanyak 3 Trayek.

75) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 01/SP.SOAJ-WB/BPTD.XI/ADD-I/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Addendum (kesatu) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI – Provinsi Jawa Timur tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan Di Provinsi Jawa Timur (Wilayah barat).

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

72) Based on the Agreement/Contract number: PL.107/13/8/BPTDXVI/XII/2020 dated 30 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XVI – Central Kalimantan Province regarding Bus Operation Subsidies. Pioneer.

73) Based on the Agreement/Contract number: KU.003/1/5/BPTD-KALTIMRA/2021 dated 4 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XV – South Kalimantan Province regarding Bus Operation Subsidies. Pioneers in East Kalimantan Province.

74) Based on the Agreement/Contract number: KU.003/1/6/BPTD-KALTIMRA/2021 dated 4 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XVII – North Kalimantan Province regarding Bus Operational Subsidies. Pioneer A total of 3 Routes.

75) Based on the Agreement/Contract No: 01/SP.SOAJ-WB/BPTD.XI/ADD-I/II/2021 dated 8 February 2021, the Company entered into an Addendum Cooperation agreement (first) with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XI – East Java Province concerning Subsidies for Road Transport Operations in East Java Province (West Region).

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

**37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

76) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/3/BPTD-XII/2020 tanggal 04 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (kesatu) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII – Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

77) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.103/12/148/BPTD-XIX/2020 tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX – Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat tentang penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan subsidi operasional angkutan jalan perintis Provinsi Sulawesi Barat, Cabang Mamuju.

78) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.103/12/149/BPTD-XIX/2020 tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX – Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat tentang penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan subsidi operasional angkutan jalan perintis Provinsi Sulawesi Barat, Cabang Makassar.

**37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)**

76) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/3/BPTD-XII/2020 dated 4 January 2021, the Company entered into an Addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XII – West Nusa Tenggara Province on Subsidies for Road Transport Operations in the Province of West Nusa Tenggara.

77) Based on the Agreement/Contract No: PL.103/12/148/BPTD-XIX/2020 dated 28 December 2020, the Company entered into a Cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XIX – South and West Sulawesi Province regarding the appointment of provider for the implementation of the operational subsidy package for pioneering road transportation in West Sulawesi Province, Mamuju Branch.

78) Based on the Agreement/Contract No: PL.103/12/149/BPTD-XIX/2020 dated 28 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XIX – South and West Sulawesi Province regarding the appointment of provider for the implementation of the operational subsidy package for pioneering road transportation in West Sulawesi Province, Makassar Branch.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

79) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 01/BPTDNTT-KTR/SOAJ-K/NTT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII – Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Wilayah Kupang.

80) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: KU.003/001/I/BPTD-SULTRA/2021 tanggal 02 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII – Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan Perintis.

81) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 03/BPTDNTT-KTR/SOAJ-KF/NTT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII – Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Wilayah Kefamenanu.

82) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/I/BPTD-GTO/2021 tanggal 01 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII – Provinsi Gorontalo tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

79) Based on the Agreement/Contract number: 01/BPTDNTT-KTR/SOAJ-K/NTT/XII/2020 dated 31 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XIII – East Nusa Tenggara Province regarding Road Transport Operational Subsidy in Kupang Region.

80) Based on the Agreement/Contract number: KU.003/001/I/BPTD-SULTRA/2021 dated 2 January 2021, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XVIII – Southeast Sulawesi Province concerning Transportation Operational Subsidies Pioneer Road.

81) Based on the Agreement/Contract number: 03/BPTDNTT-KTR/SOAJ-KF/NTT/XII/2020 dated 31 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XIII – East Nusa Tenggara Province regarding Road Transport Operational Subsidy in Kefamenanu Area.

82) Based on Letter of Agreement/Contract No: PL.107/1/I/BPTD-GTO/2021 dated 1 January 2021, the Company entered into a Cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XII – Gorontalo Province regarding Road Transport Operational Subsidies.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 83) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 02/BPTDNTT-KTR/SOAJ-E/NTT/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII – Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Wilayah Ende.
- 84) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/21/8/BPTD-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII – Provinsi Bali dan Nusa Tenggara tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan Provinsi Bali.
- 85) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.104/09d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 tanggal 05 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (Keempat) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII – Provinsi Maluku tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Trayek Kabupaten Maluku Tenggara.
- 86) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.104/08d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 tanggal 05 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (Keempat) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII – Provinsi Maluku tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Trayek Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 83) Based on the Agreement/Contract No: 02/BPTDNTT-KTR/SOAJ-E/NTT/XII/2020 dated 31 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XIII – East Nusa Tenggara Province regarding Road Transport Operational Subsidy in the Ende Region.
- 84) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/21/8/BPTD-XII/2020 dated 30 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XII – Bali and Nusa Tenggara Provinces regarding Subsidies of Bali Provincial Road Transport Operations.
- 85) Based on the Agreement/Contract No: PL.104/09d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 dated 5 November 2021, the Company entered into the fourth Addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XXIII – Maluku Province regarding Subsidies for Pioneer Bus Routes for Southeast Maluku Regency.
- 86) Based on the Agreement/Contract No: PL.104/08d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 dated 5 November 2021, the Company entered into the fourth Addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XXIII – Maluku Province regarding Subsidies for Pioneer Bus Routes for Tanimbar Islands Regency.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 87) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.104/07d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 tanggal 05 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Kerjasama Adendum (Keempat) dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII – Provinsi Maluku tentang Subsidi Operasional Bus Perintis Trayek Pulau Ambon – Pulau Seram.
- 88) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/12/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Biak Provinsi Papua.
- 89) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: KU 003/02/BPTD-XXIV/DAMRI/I/2021 tanggal 2 Desember 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV – Provinsi Maluku Utara tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Maluku Utara.
- 90) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/10/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Jayapura Provinsi Papua.

37. AGREEMENT AND CONTINGENCIES
(continued)

- 87) Based on the Agreement/Contract No: PL.104/07d/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XI/2021 dated 5 November 2021, the Company entered into the fourth Addendum of Cooperation Agreement with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XXIII – Maluku Province regarding Subsidies for Pioneer Bus Operations for Ambon Island – Seram Island.
- 88) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/12/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Biak, Papua Province.
- 89) Based on the Agreement/Contract No: KU 003/02/BPTD-XXIV/DAMRI/I/2021 dated 2 December 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XXIV – North Maluku Province on Road Transportation Operational Subsidies in North Maluku.
- 90) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/10/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation Region XXV – Papua and West Papua Province on Road Transport Operational Subsidies in Jayapura, Papua Province.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 91) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/19/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Manokwari Provinsi Papua Barat.
- 92) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/14/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Merauke Provinsi Papua.
- 93) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/11/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Nabire Provinsi Papua.
- 94) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.104/10/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII – Provinsi Maluku tentang Subsidi Operasi Bus Perintis Trayek Pulau Buru.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 91) *Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/19/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into cooperation with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Manokwari, West Papua Province.*
- 92) *Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/14/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into cooperation with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Merauke, Papua Province.*
- 93) *Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/11/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Nabire, Papua Province.*
- 94) *Based on the Agreement/Contract No: PL.104/10/SP/PPK-AJ/BPTD-XXIII/XII/2020 dated 30 December 2020, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center Region XXII – Maluku Province on the Subsidy for Pioneer Bus Operations for the Buru Island Route.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 95) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/13/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Serui Provinsi Papua.
- 96) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/17/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Sorong Provinsi Papua Barat.
- 97) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/18/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
- 98) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: PL.107/1/15/BPTD-WIL.XXV/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV – Provinsi Papua dan Papua Barat tentang Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Timika Provinsi Papua.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 95) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/13/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Serui, Papua Province.
- 96) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/17/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into a collaboration with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Sorong, West Papua Province.
- 97) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/18/BPTD-WIL.XXV/2021 dated January 14, 2021, the Company entered into cooperation with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in South Sorong, West Papua Province.
- 98) Based on the Agreement/Contract No: PL.107/1/15/BPTD-WIL.XXV/2021 dated 14 January 2021, the Company entered into cooperation with the Ministry of Transportation, Directorate General of Land Transportation, Land Transportation Management Center for Region XXV – Papua and West Papua Provinces regarding Road Transport Operational Subsidy in Timika, Papua Province.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 99) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3358.00/AK.703/SPK/00/DU/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan ASDP tentang Kerjasama Korporasi di Pelabuhan Eksekutif Merak-Bakauheni.
- 100) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3383.00/AA.009/SPK/00/DPU/2020 tanggal 02 November 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA tentang kerahasiaan metode pembayaran digital.
- 101) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3386.00/KL.004/SPK/00/DU/2020 tanggal 10 November 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan BP2MI tentang kerjasama pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia.
- 102) Berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: 3356.00/KU.103/SPK/00/DTF /2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asian Auto International tentang uji coba *prototype bus medium (rear engine)*.
- 103) Berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak No: 3361.00/AK.1204/SPK/00/DU/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Maros Pangkep.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 99) *Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3358.00/AK.703/ SPK/00/DU/2020 dated 19 October 2020, the Company entered into a collaboration with ASDP regarding Corporate Cooperation at the Merak-Bakauheni Executive Port.*
- 100) *Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3383.00/AA.009/SPK/ 00/DPU/2020 dated 2 November 2020, the Company entered into a collaboration with PT AIRPAY INTERNATIONAL INDONESIA regarding Confidentiality of Digital Payment Methods.*
- 101) *Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3386.00/KL.004/SPK/ 00/DU/2020 dated 10 November 2020, the Company entered into a collaboration with BP2MI regarding cooperation on the departure and return of Indonesian migrant workers.*
- 102) *Based on the Letter of Agreement/ Contract number: 3356.00/KU.103/SPK/ 00/DTF/2020 dated 20 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Asian Auto International regarding the trial of a prototype medium bus (rear engine).*
- 103) *Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3361.00/AK.1204/SPK /00/DU/2020 dated 19 October 2020, the Company entered into a collaboration with the Regional Government of the Province of Sulawesi Selatan regarding the Development of Geopark Maros Pangkep Tourism Area.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 104) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No : 3343.00/AA.702/SPK/00/DU/2020 tanggal 11 September 2020, Perusahaan mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara DAMRI dengan PT Bina Karya (Persero) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aset Lahan dan Bangunan di Lokasi Milik Perum DAMRI.
- 105) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3354.00/AA.007/SPK/00/DPU/2020 tanggal 1 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Karya Utama Perdana tentang pelayanan angkutan pepadu moda Jakarta-Bandung.
- 106) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3290.00/AK.701/SPK/00/DU/2020 tanggal 15 Mei 2020, Perusahaan mengadakan nota kesepahaman dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Kerja Sama Transportasi Terpadu Pelayanan Terminal Penumpang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
- 107) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3334.00/AA.009/SPK/00/DPU/2020 tanggal 20 Juli 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerahasiaan dengan PT Klik Indomaret Sukses.
- 108) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3244.01/AK.701/SPK/00/DU/2020 tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan mengadakan nota kesepahaman dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tentang kerja sama pengembangan *Benoa maritime tourism hub* pelabuhan Benoa.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 104) *Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3343.00/AA.702/SPK/00/DU/2020 dated 11 September 2020, the Company conducted a Memorandum of Understanding (MoU) between DAMRI and PT Bina Karya (Persero) regarding Development and Management of Land and Building Assets in a location owned by Perum DAMRI.*
- 105) *Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3354.00/AA.007/SPK/00/DPU/2020 dated 1 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Karya Utama Perdana regarding the Jakarta-Bandung shuttle service.*
- 106) *Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3290.00/AK.701/SPK/00/DU/2020 dated 15 May 2020, the Company entered into a memorandum of understanding with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) regarding Integrated Transportation Cooperation for Passenger Terminal Services of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).*
- 107) *Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3334.00/AA.009/SPK/00/DPU 2020 dated 20 July 2020, the Company entered into a confidentiality agreement with PT Klik Indomaret Sukses.*
- 108) *Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3244.01/AK.701/SPK/00/DU/2020 dated 14 February, 2020, the Company entered into a memorandum of understanding with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) regarding the Benoa Maritime Tourism Hub Cooperation Agreement at Benoa Harbor.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 109) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3342.00/AK.001/SPK/00/PU/2020 tanggal 1 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerahasiaan dengan PT Niras Finland tentang perjanjian kerjasama pengimplementasian proyek bus listrik di rute-rute bandara.
- 110) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3286.00/AK.209/SPK/00/KP/2020 tanggal 9 April 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Hotel Indonesia Group tentang Pemberian Pelayanan Transportasi untuk Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 111) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3389.01/KL.003/SPK/00/DU/2020 tanggal 18 November 2020, Perusahaan mengadakan MoU dengan PT Spora Tehnika Indonesia tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Konversi Bus Listrik pada Armada Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.
- 112) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3374.00/KL.004/SPK/00/DU/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerahasiaan dengan PT Eka Sari Lorena tentang kerja sama logistik.
- 113) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 33291.00/AK.701/SPK/00/DU/2020 tanggal 28 April 2020, Perusahaan mengadakan nota kesepahaman dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang integrasi antar moda angkutan penumpang dan barang.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 109) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3342.00/AK.001/SPK/00/PU/2020 dated 1 September 2020, the Company entered into a confidentiality agreement with PT Niras Finland regarding the cooperation agreement for the implementation of electric bus projects on airport routes.
- 110) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3286.00/AK.209/SPK/00/KP/2020 dated 9 April 2020, the Company entered into an agreement with Hotel Indonesia Group regarding the Provision of Transportation Services for Health Workers of the Special Capital Region of Jakarta.
- 111) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3389.01/KL.003/SPK/00/DU/2020 dated 18 November 2020, the Company entered into an MoU with PT Spora Tehnika Indonesia regarding Cooperation in the Development of Electric Bus Conversion in the Fleet of Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.
- 112) Based on the Agreement Letter/ Contract No: 3374.00/KL.004/SPK/00/DU/2020 dated 27 October 2020, the Company entered into a confidentiality agreement with PT Eka Sari Lorena regarding logistical cooperation.
- 113) Based on the Letter of Agreement/ Contract No : 3291.00/AK.701/SPK/00/DU/2020 dated 28 April 2020, the Company entered into a memorandum of understanding with PT Kereta Api Indonesia (Persero) regarding integration between passenger and freight transportation modes.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 114) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3385.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 13 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Krisbow Indonesia tentang Pengadaan Peralatan Bengkel untuk Kantor Cabang yang berada di Divisi Regional III dan IV Perum DAMRI.
- 115) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3297.00/AA.704/SPK/00/KP/2020 tanggal 10 Juni 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Ibibo Group Indonesia tentang penjualan tiket bus Perum DAMRI.
- 116) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3352.00/KU.103.SPK/00/LP/2020 tanggal 7 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Mitra Pajakku tentang pengadaan aplikasi perpajakan Perum DAMRI.
- 117) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3337.00/KU.103/SPK/00/TI/2020 tanggal 22 April 2020, Perusahaan mengadakan addendum kedua perjanjian kerjasama dengan PT Midtrans.
- 118) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 3281.00/KL.006/SPK/00/TI/2020 tanggal 18 Maret 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Central Asia, Tbk. tentang layanan penerimaan pembayaran e-ticketing di DAMRI menggunakan flazz.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 114) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3385.00/KU.103/SPK/00 /LP/2020 dated 13 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Krisbow Indonesia regarding the Procurement of Workshop Equipment for Branch Offices in Regional Division III and IV of Perum DAMRI.
- 115) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3297.00/AA.704/SPK/00 / KP/2020 dated 10 June 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Ibibo Group Indonesia regarding the sale of Perum DAMRI bus tickets.
- 116) Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3352.00/ KU.103.SPK/00/LP/2020 dated 7 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Mitra Pajakku regarding the procurement of Perum DAMRI tax application.
- 117) Based on the Agreement Letter/ Contract number: 3337.00/KU.103/ SPK/00/TI/2020 dated 22 April 2020, the Company entered into a second addendum to the cooperation agreement with PT Midtrans.
- 118) Based on the Letter of Agreement/ Contract number: 3281.00/KL.006/ SPK/00/TI/2020 dated 18 March 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Bank Central Asia, Tbk. regarding e-ticketing payment acceptance services at DAMRI using flazz.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 119) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 3315.00/KU.203/SPK/00/DSU/2020 tanggal 22 Juli 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Iskandar Gani tentang sewa menyewa lahan milik Perum DAMRI di Jalan Raya Pelabuhan Merak II Tamansari Pulomerak.
- 120) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 3350.00/KU.103/SPK/00/LP/20 tanggal 1 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang layanan *manage service contact center* Perum DAMRI.
- 121) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak nomor: 490/SPS/PKS/XI/2020 tanggal 20 November 2020 Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sigma Prima Solusindo tentang Pekerjaan Jasa Aktuaria terkait Imbalan pasca Kerja Karyawan.
- 122) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3357.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sumber Mas Autorindo tentang pengadaan *global positioning system* (GPS) dan *closed circuit television* (CCTV) pada armada Perum DAMRI.
- 123) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3299.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 15 Juni 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Cakra Transport Utama tentang penyewaan 1 (satu) unit kendaraan operasional Direksi Perum DAMRI tahun 2020 (*repeat order*).

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 119) Based on the Letter of Agreement/ Contract number: 3315.00/KU.203/SPK/00/DSU/2020 dated 22 July 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Iskandar Gani regarding the lease of land owned by Perum DAMRI at Jalan Raya Pelabuhan Merak II, Tamansari Pulomerak.
- 120) Based on the Letter of Agreement/ Contract Number: 3350.00/KU.103/SPK/00/LP/20 dated 1 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk concerning Perum DAMRI's *manage service contact center* services.
- 121) Based on the Letter of Agreement/ Contract number: 490/SPS/PKS/XI/2020 on 20 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Sigma Prima Solusindo regarding Actuarial Service Work related to Post-employment Benefits.
- 122) Based on the Agreement Letter/ Contract No: 3357.00/KU.103/SPK/ 00/LP/2020 dated 13 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Sumber Mas Autorindo regarding the procurement of a global positioning system (GPS) and closed circuit television (CCTV) on fleet of Perum DAMRI.
- 123) Based on the Agreement Letter/ Contract No: 3299.00/KU.103/SPK/ 00/LP/2020 dated 15 June 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Cakra Transport Utama regarding the rental of 1 (one) unit of operational vehicle for the Board of Directors of Perum DAMRI in 2020 (*repeat order*).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 124) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3293.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 19 Mei 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Husin Pongkor Simbolon Law Office tentang pengadaan jasa advokat atau konsultan hukum.
- 125) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3292.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 19 Mei 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Dutagaruda Piranti Prima tentang lingkup pekerjaan dan jangka waktu.
- 126) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3275.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 8 April 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Resik Nyaman Sejahtera tentang penyedia tenaga kerja *front liner (helper)* untuk Cabang Angkutan Bandara Soekarno-Hatta.
- 127) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3250.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 26 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Tunas Ridean, Tbk Cabang Jatinegara tentang pengadaan 28 unit mikrobis Toyota Hi-ace commuter manual untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pangkal Pinang, Serang, Malang Halmahera, Kendari, Manado, dan Makassar yang merupakan bagian dari pengadaan 55 unit mikrobis Toyota Hi-ace commuter manual untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- 128) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3351.01/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT TUV Rheinland Indonesia tentang pengadaan jasa audit eksternal dan sertifikasi ISO 45001:2018 Perum DAMRI Tahun 2019.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 124) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3293.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 19 May 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Husin Pongkor Simbolon Law Office regarding the procurement of advocate or legal consultant services.
- 125) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3292.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 19 May 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Dutagaruda Piranti Prima regarding the scope of work and time frame.
- 126) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3275.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 8 April 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Resik Nyaman Sejahtera regarding front liner (helper) labor providers for the Soekarno-Hatta Airport Transportation Branch.
- 127) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3250.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 26 February 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Tunas Ridean, Tbk, Jatinegara Branch regarding the procurement of 28 units of manual Toyota Hi-ace commuter microbus for the National Tourism Strategic Area (KSPN) transportation in Pangkal Pinang, Serang, Malang Halmahera, Kendari, Manado, and Makassar which is part of the procurement of 55 units of manual Toyota Hi-ace commuter microbus for National Tourism Strategic Area KSPN Transportation.
- 128) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3351.01/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 2 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT TUV Rheinland Indonesia regarding procurement of external audit services and certification of ISO 45001: 2018 Perum DAMRI 2019.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 129) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3249.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 26 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Plaza Auto Prima Cabang Pemuda Rawamangun tentang pengadaan 3 (tiga) unit mikrobus Toyota Hi-ace commuter manual untuk angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Serang yang merupakan bagian dari pengadaan 55 unit mikrobus toyota Hi-ace commuter manual untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- 130) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3279.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 28 April 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan CV New Cahaya Timur tentang pekerjaan rekondisi body 15 (lima belas) unit bus rapid transit (BRT) menjadi bus reguler untuk pelayanan segmen antar kota antar provinsi (AKAP) di Kantor Cabang Makassar sebagai bagian dari pekerjaan rekondisi body 75 (tujuh puluh lima) unit bus rapid transit (BRT) menjadi bus reguler untuk pelayanan segmen antar kota antar provinsi (AKAP) di Kantor Cabang Palembang, Cabang Bandara Soekarno Hatta, Cabang Bandung, Cabang Surabaya, dan Cabang Makassar.
- 131) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3300.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 16 Juni 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan CV Anugrah Multi Solusi Teknik tentang rekondisi body baru 1 (satu) unit bus besar kode 5680 untuk Angkutan Antar Kota Kantor Cabang Palembang.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 129) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3249.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 26 February 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Plaza Auto Prima, Pemuda Rawamangun Branch regarding the procurement of 3 (three) manual Toyota Hi-ace commuter microbus units for the National Tourism Strategic Area (KSPN) transportation in Serang which is part of the procurement of 55 units of manual Toyota Hi-ace commuter for the National Tourism Strategic Area Transport (KSPN).
- 130) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3279.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 28 April 2020, the Company entered into a cooperation agreement with CV New Cahaya Timur regarding the body recondition work of 15 (fifteen) bus rapid transit (BRT) units to become a regular bus for intercity and interprovincial (AKAP) segment services in Makassar Branch Office as part of the body recondition work of 75 (seventy five) units of bus rapid transit (BRT) to become regular buses for intercity and interprovincial (AKAP) segment services in Palembang Office Branch, Soekarno Hatta Airport Office Branch, Bandung Office Branch, Surabaya Office Branch, and Makassar Office Branch.
- 131) Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3300.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 16 June 2020, the Company entered into a cooperation agreement with CV Anugrah Multi Solusi Teknik regarding the recondition of a new body of 1 (one) large bus code 5680 for Inter-City transportation in Palembang Branch .

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)
For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 132) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3254.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Artemis Kreasi Gemilang tentang pengadaan konsultan digital marketing.
- 133) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3252.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 28 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Dutagaruda Piranti Prima tentang pengadaan jasa outsourcing tenaga kerja supir dan asisten supir untuk Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Perum DAMRI tahun 2020.
- 134) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3344.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 21 September 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Daya Dimensi Indonesia tentang pengadaan jasa konsultasi competency training di Perum DAMRI.
- 135) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3256.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 tanggal 13 Maret 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Info Bisnis Solusi tentang pengadaan Aplikasi *Human Resource (HR) Database* dan *Payroll System* Perum DAMRI.
- 136) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3393.00/AA.009/SPK/00/DPU/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Klik Indomaret Sukses tentang reservasi dan payment point tiket DAMRI secara *host to host*.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 132) *Based on the Agreement Letter/ Contract No: 3254.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 9 March 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Artemis Kreasi Gemilang regarding the procurement of digital marketing consultants.*
- 133) *Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3252.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 28 February 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Dutagaruda Piranti Prima regarding the procurement of outsourcing services for driver workers and assistant drivers for National Tourism Strategic Area KSPN Transportation of Perum DAMRI in 2020.*
- 134) *Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3344.00/KU.103/SPK/00/LP/2020 dated 21 September 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Daya Dimensi Indonesia regarding the procurement of competency training consulting services at Perum DAMRI.*
- 135) *Based on the Letter of Agreement / Contract No: 3256.00 / KU.103 / SPK / 00 / LP / 2020 dated 13 March, 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Info Bisnis Solusi regarding the procurement of DAMRI's Human Resource (HR) Database and Payroll System Applications.*
- 136) *Based on the Letter of Agreement/ Contract No: 3393.00/AA.009/SPK/00/DPU/2020 dated 14 October 2020, the Company entered into a cooperation agreement with PT Klik Indomaret Sukses regarding reservation and payment points for DAMRI tickets by host to host.*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 137) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 3396.00/UM.001/SPK/00/LP/2020 tanggal 4 Desember 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tentang pelaksanaan audit laporan keuangan Perum DAMRI tahun buku 2020.
- 138) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0334/KL.006/SPK/IV-2019 tanggal 30 April 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo tentang Layanan Penyediaan Wifi Solution untuk Bus Perusahaan Umum DAMRI.
- 139) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0332/KL.003/DU-2019 tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Jasa Raharja (Persero) tentang Sistem Integrasi Data Penumpang Umum DAMRI.
- 140) Perusahaan mengadakan MoU Nomor: 0299/KL.003/SPK/III- 2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tentang Persiapan Kerjasama Pemanfaatan Sumber Daya untuk Pelaksanaan Transportasi Multi Moda di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- 141) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 259/KU.103/SPK/II-2019/2019 tanggal 15 Februari 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional tentang Perpanjangan Jangka Waktu Nota Kesepahaman Rencana Kerjasama Optimalisasi Aset Lahan Strategis.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 137) Based on the Letter of Agreement/Contract No: 3396.00/UM.001/SPK/00/LP/2020 dated 4 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners regarding the audit of the financial statements of Perum DAMRI financial year 2020.
- 138) Based on the Agreement/Contract Number: 0334/KL.006/SPK/IV-2019 dated 30 April 2019, the Company entered into a partnership with PT Jakarta Infrastructure Propertindo about Providing Wifi Solution Service for Buses of Perusahaan Umum DAMRI.
- 139) Based on the Agreement/Contract Number: 0332/KL.003/DU-2019 dated 3 May 2019, the Company entered into a partnership with PT Jasa Raharja (Persero) concerning DAMRI's Public Passenger Data Integration System.
- 140) The Company entered into an MoU Number: 0299/KL.003/SPK/III-2019 on 27 March 2019 with PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) concerning the Preparation of Partnership on the Use of Resources for the Implementation of Multi-Mode Transportation in the Environment of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- 141) Based on the Agreement/Contract Number: 259/KU.103/SPK/II-2019/2019 dated 15 February 2019, the Company entered into a partnership with the Perusahaan Umum (PERUM) Development Of National Housing about the Extension of the Memorandum of Understanding of the Strategic Land Asset Optimization Cooperation Plan.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 142) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0375/KL.004/SPK/VI-2019 tanggal 04 Juli 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PERUM PPD tentang Kerjasama Bisnis Penyediaan Layanan Transportasi Darat dan E-ticketing.
- 143) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KL.701/II/12/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia tentang Penyewaan Lahan Peruntukan Halte Angkutan dan Ruang Tunggu Penumpang Bus DAMRI.
- 144) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0017/AK.701/SPK/00/DU/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) tentang Layanan Angkutan Moda.
- 145) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: PJ-10/023A/LG DCP tanggal 01 Agustus 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Danareksa Capital tentang Perjanjian Kerahasiaan.
- 146) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0149/KU.103/I- 2019 tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Telkom tentang Perpanjangan Call Center.
- 147) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0374/KU.103/VI-2019 tanggal 17 Juni 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Sisi tentang Implementasi Sistem Informasi Akutansi dan Keuangan Platform FORCA ERP Fase II.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 142) Based on the Agreement/Contract Number: 0375/KL.004/SPK/VI-2019 dated 4 July 2019, the Company entered into a partnership with PERUM PPD regarding Business Cooperation in the Provision of Land Transportation and E-ticketing Services.
- 143) Based on the Agreement/Contract Number: KL.701/II/12/KA-2019 dated 12 February 2019, the Company entered into a partnership with PT Kereta Api Indonesia on Land Rental Allocation of DAMRI Passenger Bus Stations and Waiting Room.
- 144) Based on the Agreement/Contract Number: 0017/AK.701/SPK/00/DU/2019 dated 23 October 2019, the Company entered into a partnership with PT Hotel Indonesia Natour (Persero) about Shuttle Transport Services.
- 145) Based on the Agreement/Contract Number: PJ-10/023A /LG-DCP dated 1 August 2019, the Company entered into a partnership with PT Danareksa Capital regarding Confidentiality Agreement.
- 146) Based on the Agreement/Contract Number: 0149/KU.103/I-2019 dated 31 December 2018, the Company entered into a partnership with PT Telkom about the Call Center Extension.
- 147) Based on the Agreement/Contract Number: 0374/KU.103/VI-2019 dated 17 June 2019, the Company entered into a partnership with PT Sisi on the Implementation of FORCA ERP Accounting and Financial Information System Phase II.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

37. PERIKATAN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- 148) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KL.701/II/12/KA-2019 tanggal 12 Februari 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT KAI tentang Sewa Lahan Gambir.
- 149) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak No: 0018.00/KU.103/SPK/00/LP/2019 tanggal 30 Oktober 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT. Resik Nyaman Sejahtera tentang Penyedia Tenaga Kerja *Front Liner (helper)* untuk Cabang Angkutan Bandara Soekarno-Hatta.
- 150) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0418/KU.103/SPK/VIII-2019 tanggal 13 Agustus 2019 Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Pertamina Lubricants tentang Addendum Kontrak Pengadaan Minyak Pelumas (Oli).
- 151) Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 0003.00/KU.103/SPK/00/LP/2019 tanggal 08 Agustus 2019, Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Nixxon Putra Gemilang tentang Kontrak Pengadaan Cat Kendaraan Merk Sikkens.

37. AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(continued)

- 148) Based on the Agreement/Contract Number: KL.701/II/12/KA-2019 dated 12 February 2019, the Company entered into a partnership with PT KAI about Gambir Land Lease.
- 149) Based on the Agreement/Contract No: 0018.00/KU.103/SPK/00/LP/2019 dated 30 October 2019, the Company entered into a partnership with PT Resik Nyaman Sejahtera about Providers of Front Liner Workers (helper) for the Soekarno-Hatta Airport Transportation Branch.
- 150) Based on the Agreement Letter/Contract Number: 0418/KU.103 /SPK /VIII-2019 dated 13 August 2019, the Company entered into a partnership with PT Pertamina Lubricants regarding Addendum on Lubricating Oil Procurement Contract (Oli).
- 151) Based on the Agreement/Contract Number: 0003.00/KU.103/SPK/00/LP/2019 dated 8 August 2019, the Company entered into a partnership with PT Nixxon Putra Gemilang about a Sikkens Brand Vehicle Paint Procurement Contract.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**38. KONDISI BISNIS PERUSAHAAN DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA**

Wabah virus corona (COVID-19) pertama kali diidentifikasi di Wuhan (Cina) mendekati akhir tahun 2019. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi darurat global (*global emergency*). Sejak itu, banyak kasus COVID-19 yang telah didiagnosa, termasuk di negara-negara lain. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemik.

Dampak dari pandemi COVID-19 per 31 Desember 2021 mengakibatkan pendapatan Perusahaan turun sebesar Rp 152.902.380.435 sehingga mencapai kerugian sebesar Rp 220.077.411.000 pada tahun 2020. Pandemi masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga menimbulkan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi perekonomian.

**38. THE COMPANY'S BUSINESS
CONDITION AND GOING CONCERN**

The corona virus (COVID-19) outbreak was initially identified in Wuhan (China), close to end of 2019. On 30 January 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak as "Global emergency". Since then, more cases of COVID-19 have been diagnosed, including in other countries. The first case of COVID-19 in Indonesia was announced on 2 March 2020 by the Indonesian President. Subsequently, on 11 March 2020, WHO declared the outbreak as pandemic.

The impact of the COVID-19 pandemic as of 31 December 2021, resulting in a decrease in the Company's revenues by Rp 152,902,380,435, thus experiencing loss amounting to Rp 220,077,411,000 as of 2020. The pandemic is still ongoing as of the issuance of the financial statements so that it creates uncertainty related to economic conditions.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

38. KONDISI BISNIS PERUSAHAAN DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA
(lanjutan)

Manajemen melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara Inisiatif Strategis dari Komersial dan Pengembangan Usaha, antara lain :

1. Memaksimalkan proyek penugasan perintis dan KSPN 2021 sejak bulan Februari 2021.
2. Membuka layanan angkutan barang penyambung tol laut yang diinisiasi di Natuna mulai bulan Maret 2021.
3. Penggunaan aplikasi digitalisasi DAMRI apps untuk semua pembelian tiket online dan pembayaran *cashless*.
4. Memaksimalkan kerjasama dengan Traveloka, RedBus, Alfamart dan Indomaret untuk meningkatkan jumlah pelanggan secara online.
5. Pengembangan trayek untuk antar kota seperti :
 - a. Trans Kalimantan trayek Palangkaraya – Pangkalanbun – Pontianak.
 - b. Trans Jawa trayek Jakarta – Malang.
 - c. Trans Sumatra trayek Lampung – Palembang – Bengkulu – Jambi.
 - d. Trans Sulawesi trayek Makassar – Palu.
6. Kolaborasi untuk trayek Transjakarta diwujudkan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Bianglala untuk menggantikan pendapatan di Transjakarta dengan pengoperasian 20 unit bus BRT di trayek Busway Bianglala.

38. THE COMPANY'S BUSINESS
CONDITION AND GOING CONCERN
(continued)

Management takes steps to overcome the condition by implementing Strategic Initiatives from Commercial and Business Development, including :

1. Maximize the project assignment of pioneers and KSPN 2021 since February 2021.
2. Opening sea toll connecting freight services initiated in Natuna starting in March 2021.
3. Use of the DAMRI apps digitization application for all online ticket purchases and cashless payments.
4. Maximizing cooperation with Traveloka, RedBus, Alfamart and Indomaret to increase the number of online customers.
5. Development of inter-city routes such as:
 - a. Trans Kalimantan route Palangkaraya – Pangkalanbun – Pontianak.
 - b. Trans Java route from Jakarta to Malang.
 - c. Trans Sumatra route Lampung – Palembang – Bengkulu – Jambi.
 - d. Trans Sulawesi route Makassar – Palu.
6. Collaboration for the Transjakarta route is realized through Joint Operations (KSO) with Bianglala to replace revenue in Transjakarta by operating 20 units of BRT buses on the Bianglala Busway route.

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir

31 Desember 2021 dan 2020

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

(continued)

For the years ended

31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**38. KONDISI BISNIS PERUSAHAAN DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA**
(lanjutan)

Manajemen melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara Inisiatif Strategis dari Komersial dan Pengembangan Usaha, antara lain : (lanjutan)

7. Memonitoring lapangan, yaitu dengan memastikan pencatatan jumlah penumpang di LMB sama dengan fisik penumpang serta memastikan pencatatan di LMB dan fisik barang bagasi sesuai dengan penjualan *Dils* yang ber label/ segel.
8. Pengendalian pola *market demand* bukan pada rutinitas.
9. Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia dan Ayuberga terkait penyediaan bus untuk jemaah haji.
10. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Logistic GO To Market Pilot Project – Cluster Transportasi & Logistik BUMN Binaan Wakil Menteri II.
11. Melakukan kerjasama dengan PT LRT Jakarta.
12. Kerjasama angkutan pupuk dengan PT Petrokimia Gresik sebanyak 3 trayek.

Inisiatif dalam bidang Teknik dan Fasilitas sebagai berikut :

1. Pengendalian armada siap guna (SGO) untuk armada siap operasi (SO) melalui pemilihan armada rusak berat yang sudah tidak dapat beroperasi dan usia diatas 10 tahun agar beban perbaikan berkurang.
2. Digitalisasi perawatan dalam rangka memastikan dilakukannya perawatan berkala.
3. Penyeragaman harga spare part.

**38. THE COMPANY'S BUSINESS
CONDITION AND GOING CONCERN**
(continued)

Management takes steps to overcome the condition by implementing Strategic Initiatives from Commercial and Business Development, including : (continued)

7. Monitoring the field, by ensuring that the recording of the number of passengers in the LMB is the same as that of the physical passengers and ensuring that the recording in the LMB and the physical goods of baggage are in accordance with the sale of labeled/sealed *Dils*.
8. Control of not a routine market demand patterns.
9. Cooperation with PT Garuda Indonesia and Ayuberga regarding the provision of buses for Hajj.
10. Entered into a cooperation agreement with Logistics GO To Market Pilot Project – Transportation & Logistics Cluster SOEs Assisted by Deputy Minister II.
11. Cooperating with PT LRT Jakarta.
12. Cooperation of fertilizer transportation with PT. Petrokimia Gresik consisting of 3 routes.

Initiatives in the field of Engineering and Facilities are as follows:

1. Controlling the ready-to-use fleet (SGO) for the ready-to-operate (SO) fleet through the selection of heavily damaged fleets that are no longer operational and are over 10 years of age so that the repair cost is reduced.
2. Digitization of maintenance in order to ensure periodic maintenance is carried out.
3. Uniform spare part prices.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

For the years ended
31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

38. KONDISI BISNIS PERUSAHAAN DAN
KEBERLANGSUNGAN USAHA
(lanjutan)

Inisiatif dalam bidang Teknik dan Fasilitas
sebagai berikut : (lanjutan)

4. Melakukan penjualan armada (usul afkir)
89 bus dan 249 bus yang dapat
memperingan Perusahaan dalam beban
maintenance dan sekaligus
mendatangkan pendapatan.
5. Mekanik terbang (*Flying Team*)
6. Inisiasi cuci bus otomatis.

Inisiatif bidang keuangan dengan melakukan
hal-hal sebagai berikut:

1. Memindahkan kelebihan *headcount* pada
cabang yang masih produktif.
2. Mengkaji beberapa opsi terkait
Perumahan Karyawan, Pengurangan
Headcount, Pemotongan Gaji.
3. Merestruktur model kekaryawanan
menjadi *Outsource* model dan atau
model kontrak *service*.

39. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

1. Tanah Sengketa di Pool Kemayoran
Pada tanggal 12 Januari 2022 kembali
dilakukan pertemuan dengan Jajaran
Direksi dari P2KK dan Dirut DAMRI,
bahwa sehubungan dengan potensial
aset yang saat ini ditempati oleh Damri
untuk menunjang transportasi
masyarakat, maka sedang diupayakan
penyelesaian permohonan HGB di atas
HPL P2KK yang mana tanah tersebut
merupakan milik Sekretariat Negara RI.

40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan dari halaman 1 sampai 165
merupakan tanggung jawab manajemen dan
telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan
pada tanggal 23 Maret 2022.

38. THE COMPANY'S BUSINESS
CONDITION AND GOING CONCERN
(continued)

*Initiatives in the field of Engineering and
Facilities are as follows: (continued)*

4. *Selling a fleet of 89 buses and 249
buses which can ease the Company's
maintenance cost and at the same time
bring in cash in.*
5. *Flying Mechanic (Flying Team)*
6. *Initiation of automatic bus wash.*

*Initiatives in the financial sector by doing
the following:*

1. *Transferring excess headcount to
branches that are still productive.*
2. *Reviewing options regarding Employee
Housing, Headcount Reduction, Pay
Deductions.*
3. *Restructuring the employee model into
an Outsourced model and/or service
contract model.*

39. Subsequent Events

1. *Disputed Land in Kemayoran Pool*
*On 12 January 2022, another meeting
was held with the Board of Directors
from P2KK and the President Director
of DAMRI, in relation to the potential
assets currently occupied by Damri to
support public transportation, efforts
are being made to complete the
application for HGB on HPL P2KK
whose land belongs to the Secretariat of
Republic of Indonesia.*

40. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY
AND APPROVAL OF FINANCIAL
STATEMENTS

*The preparation and fair presentation of the
financial statements on page 1 to 165 were
the responsibilities of management, which
were approved by the Directors and
authorized for issuance on 23 March 2022.*



Perum DAMRI Kantor Pusat

Jalan Matraman Raya No. 25, RT. 2/RW. 1
Palmeriam, Matraman, Kota Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13140
Tlp. (021) 1500 825
Email: humas@damri.co.id

   @damriindonesia

 damri.co.id

 DAMRI Indonesia